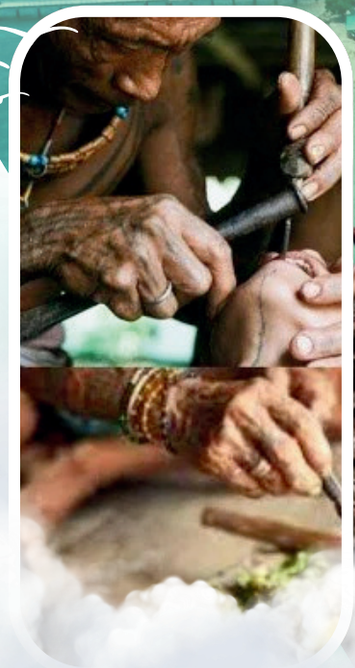
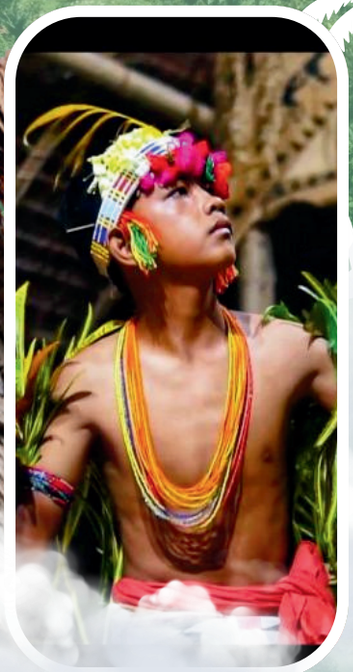
BAPPERIDA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa







(R K P D)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Kabupaten Kepulauan Mentawai

TAHUN 2027

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaga Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahun 2027.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 merupakan pedoman:

a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
b. penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS; dan
c. penyusunan Rencana APBD Tahun 2027.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2027 disusun dengan sistematika meliputi:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
    c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
    e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
    f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemeritahan Daerah; dan
    g. bab VII memuat penutup.
(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2027.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2027;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2027; dan
    c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2027.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027 setiap triwulan tahun berkenaan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2027; dan/atau
b. keadaaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 2027.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah ditetapkan.

(3) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. target sasaran pembangunan Daerah;
c. prioritas pembangunan Daerah;
d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
e. target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(4) Tatacara penyusunan perubahan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026 NOMOR.15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 14 TAHUN 2026
TANGGAL 7 JULI 2026
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar ix

BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang..... I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I.2
1.3 Hubungan Antar Dokumen I.4
1.4 Maksud dan Tujuan..... I.6
1.4.1 Maksud I.6
1.4.2 Tujuan I.6
1.5 Sistematika Penyusunan RKPD..... I.6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah II.1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis..... II.1
2.1.1.1 Aspek Geografis..... II.1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah..... II.6
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana II.25
2.1.1.4 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II.43
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.34
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.34
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial..... II.42
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... II.43
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II.44
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.45
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.66
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan..... II.83
2.1.3.4 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan II.89
2.1.3.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II.93
2.1.3.6 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II.94
2.1.3.7 Unsur Kewilayahan II.95
2.1.3.8 Urusan Pemerintahan Umum II.98
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II.99
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II.99
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II.108
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II.109

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II.110
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II.112
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II.256
2.3. 1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritasdan Sasaran Pembangunan Daerah II.256
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II.268
2.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) II.277
2.5 Isu Strategis Pembangunan Daerah II.283

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026 ..... III.1
3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional III.1
3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat III.2
3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah III.3
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026 ..... III.6
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.7
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah III.8
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah III.14
3.2.3 Kebijakan Pembiayaaan Daerah III.17

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV.1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027 ..... IV.1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 ..... IV.3
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027 ..... III.5
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027 ..... IV.8
4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027. ..... IV.8
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 ..... IV.30

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027 ..... IV.40
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V.1
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2027 ..... V.1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI.1

BAB VII PENUTUP VII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 ..... II.2
Tabel 2.2 Luas Wilayah, Jumlah kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa Tahun 2025 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat II.2
Tabel 2.3 Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 ..... II.3
Tabel 2.4 Luasan Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai II.4
Tabel 2.5 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat Tahun 2025..... II.5
Tabel 2.6 Perkembangan PDRB ADHB dan Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025 (juta rupiah)..... II.6
Tabel 2.7 Kontribusi Sektor Primer Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Sektor Primer Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025 (juta rupiah) II.7
Tabel 2.8 Kontribusi Sektor Pariwisata/Jasa Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Sektor Pariwisata/Jasa Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025 (juta rupiah)..... II.7
Tabel 2.9 Kontribusi Sektor Konstruksi Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Sektor Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025 (juta rupiah)..... II.8
Tabel 2.10 Kontribusi PMTB Kabupaten Kepulauan Mentawai PMTB PDRB Berdasarkan Pengeluaran Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025 (juta rupiah) II.8
Tabel 2.11 Hasil Perhitungan Location Quotient PDRB ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.11
Tabel 2.12 Klasifikasi Sektor Unggulan Menurut Tipologi Klassen II.13
Tabel 2.13 Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp.) Di Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025 ..... II.13
Tabel 2.14 Klasifikasi Sektor-Sektor Pembangunan Berdasarkan Tipologi Klassen Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.15
Tabel 2.15 Shift-Share PDRB ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 (Rp.Miliar) II.17
Tabel 2.16 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai II.25
Tabel 2.17 Tingkat Kerentanan Desa Terhadap Perubahan Iklim, 2024 ..... II.26
Tabel 2.18 Luas Bahaya dan Penduduk Terpapar Tsunami per Kecamatan, ... II.33
Tabel 2.19 Luas Risiko dan Penduduk Terpapar Gempa Bumi per Kecamatan II.35

Tabel 2.20 Luas Bahaya dan Penduduk Terpapar Banjir per Kecamatan II.36
Tabel 2.21 Luas Bahaya dan Penduduk Terpapar Tanah Longsor per Kecamatan II.37
Tabel 2.22 Rekapitulasi Kelas Risiko dan Potensi Kerugian Enam Jenis Bencana Lainnya II.39
Tabel 2.23 Sektor dan Fasilitas Publik Terdampak Berdasarkan Jenis Bencana II.41
Tabel 2.24 Sebaran Desa Pesisir Rawan Bencana Tsunami/Abrasi per Pulau dan Kecamatan II.41
Tabel 2.25 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 .....II.44
Tabel 2.26 Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (kWh/kapita) .II.44
Tabel 2.27 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (%).....II.46
Tabel 2.28 Kapasitas Air Baku (m3/detik) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025.....II.48
Tabel 2.29 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 II.50
Tabel 2.30 Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (%).....II.52
Tabel 2.31 Tutupan Lahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 .....II.53
Tabel 2.32 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (%) II.56
Tabel 2.33 Proporsi Timbunan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 – 2025 .II.58
Tabel 2.34 Perkembangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 .....II.60
Tabel 2.35 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Jenis Bencana II.63
Tabel 2.36 Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 .....II.65
Tabel 2.37 Keadaan Jumlah Penduduk, Rasio Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 .....II.66
Tabel 2.38 Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 .....II.66
Tabel 2.39 Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Makanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 .....II.69
Tabel 2.40 Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruiksi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 – 2025 .....II.70
Tabel 2.41 Perkembangan Indikator Tingkat Inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025.....II.77
Tabel 2.42 Perkembangan Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 .....II.82

Tabel 2.43 Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.86
Tabel 2.44 Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.87
Tabel 2.45 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.89
Tabel 2.46 Jumlah Layanan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.91
Tabel 2.47 Perkembangan Indeks Literasi Digital Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 .....II.96
Tabel 2.48 Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021- 2025.....II.96
Tabel 2.49 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah TinggiKabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 .....II.97
Tabel 2.50 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025.....II.98

Tabel 2.51 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.99
Tabel 2.52 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.100
Tabel 2.53 Perkembangan Warisan Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.101
Tabel 2.54 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025.....II.103
Tabel 2.55 Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.104
Tabel 2.56 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.105
Tabel 2.57 Perkembangan Indeks Pembangunan GenderKabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.105
Tabel 2.58 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.106
Tabel 2.59 Perkembangan Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.107
Tabel 2.60 Perkembangan Indikator Indeks Reformasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.108
Tabel 2.61 Perkembangan Nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.109
Tabel 2.62 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.109
Tabel 2.63 Perkembangan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK dan Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.110
Tabel 2.64 Perkembangan Persentase Penegakan Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.111

Tabel 2.65 Perkembangan MoU yang Tindak Lanjuti Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.113
Tabel 2.66 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 .. II.114
Tabel 2.67 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Urusan Kesehatan Kabuaten Kepulauan Mentawai, 2025 ..... II.118
Tabel 2.68 Perkembangan Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.120
Tabel 2.69 Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.124
Tabel 2.70 Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai,2021-2025 ..... II.125
Tabel 2.71 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.128
Tabel 2.72 Jumlah Layanan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.130
Tabel 2.73 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ..... II.130
Tabel 2.74 Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2025 ..... II.131
Tabel 2.75 Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2025 ..... II.131
Tabel 2.76 Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Bersih Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.132
Tabel 2.77 Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.132
Tabel 2.78 Keterkaitan Isu Infrastruktur PUPR dengan Risiko Bencana dan Prioritas 2027 ..... II.138
Tabel 2.79 Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.139
Tabel 2.80 Perkembangan Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.144
Tabel 2.81 Perkembangan Persentase Penegakan Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.145
Tabel 2.82 Perkembangan Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.146
Tabel 2.83 Operasional Pelayanan Dasar BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 ..... II.147
Tabel 2.84 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.149
Tabel 2.85 Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.150
Tabel 2.86 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.151
Tabel 2.87 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.152

Tabel 2.88 Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.153
Tabel 2.89 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.155
Tabel 2.90 Komponen Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Isu Prioritas II.156
Tabel 2.91 Proporsi Timbunan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 – 2025 ..... II.157
Tabel 2.92 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.159
Tabel 2.93 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021-2025 ..... II.160
Tabel 2.94 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 .. II. 160
Tabel 2.95 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.161
Tabel 2.96 Perkembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 ..... II.162
Tabel 2.97 Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.163
Tabel 2.98 Perkembangan Nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.163
Tabel 2.99 Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.164
Tabel 2.100 Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.166
Tabel 2.101 Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.167
Tabel 2.102 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.167
Tabel 2.103 Perkembangan Indikator Urusan Persandian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.168
Tabel 2.104 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.169
Tabel 2.105 Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.170
Tabel 2.106 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.171
Tabel 2.107 Produksi Perikanan Tangkap dan Budi Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.172
Tabel 2.108 Perkembangan Indikator Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.172
Tabel 2.109 Produksi Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.174
Tabel 2.110 Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.175

Tabel 2.111 Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.176
Tabel 2.112 Perkembangan Indikator Urusan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.177
Tabel 2.113 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.178
Tabel 2.114 Perkembangan Indikator Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.179
Tabel 2.115 Perkembangan Indikator Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.180
Tabel 2.116 Perkembangan Indikator Unsur Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.181
Tabel 2.117 Perkembangan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.182
Tabel 2.118 Perkembangan Indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.183
Tabel 2.119 Perkembangan IKM Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.184
Tabel 2.120 Perkembangan Indikator Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.186
Tabel 2.121 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga II.188
Tabel 2.122 Kunjungan Wisata Mancanegara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021-2025 ..... II.190
Tabel 2.123 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.192
Tabel 2.124 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.192
Tabel 2.125 Proporsi Rasio Kewirausahaan Enterprenuer Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.193
Tabel 2.126 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 – 2025 ..... II.194
Tabel 2.127 Perkembanagan Return of Asset (RoA) BUMD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.194
Tabel 2.128 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 - 2025 ..... II.195
Tabel 2.129 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.195
Tabel 2.130 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 – 2025..... II.197
Tabel 2.131 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan II.199
Tabel 2.132 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.203
Tabel 2.133 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (%) II.204
Tabel 2.134 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.205
Tabel 2.135 Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.206

Tabel 2.136 Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.207
Tabel 2.137 Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga / PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.208
Tabel 2.138 Perkembangan Nilai Transaksi Saham Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.209
Tabel 2.139 Perkembangan Nilai Total Kredit/ PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.210
Tabel 2.140 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.211
Tabel 2.141 Struktur Pengeluaran Perkapita Masyarakat II.212
Tabel 2.142 Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.215
Tabel 2.143 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.218
Tabel 2.144 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2025 ..... II.219
Tabel 2.145 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 .... II.326
Tabel 2.146 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025 ..... II.327
Tabel 2.147 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025 ..... II.328
Tabel 2.148 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025 ..... II.329
Tabel 2.149 Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025..... II.329
Tabel 2.150 Matriks Permasalahan Pembangunan Daerah Berdimensi Kebencanaan dan Kewilayahan Kepulauan II.332
Tabel 2.151 Realisasi Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 ..... II.333
Tabel 2.152 Rincian Jenis, Cakupan dan Kebutuhan Data SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2027 ..... II.335
Tabel 2.153 Realisasi Capaian SPM Bidang Bidang Sosial Tahun 2025 II.335
Tabel 3.1 Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2021-2025.....III.8
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024-2028 .....III.16
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024-2028 .....III.19
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024-2028 .....III.21
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Provinsi Sumatera Barat, 2025-2029 .....IV.3
Tabel 4.2 Proyeksi Indikator Makro Daerah Provinsi Sumatera Barat 2027 .....IV.5
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027.....IV.6
Tabel 4.4 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027.....IV.8
Tabel 4.5 Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2027 .....IV.8

Tabel 4.6 Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai 2027 .....IV.9
Tabel 4.7 Sasaran Pembangunan Nasional 1 .....IV.9
Tabel 4.8 Sasaran Pembangunan Nasional 2 .....IV.11
Tabel 4.9 Sasaran Pembangunan Nasional 3 .....IV.26
Tabel 4.10 Sasaran Pembangunan Nasional 4 .....IV.32
Tabel 4.11 Sasaran Pembangunan Nasional 5 .....IV.41
Tabel 4.12 Sasaran Pembangunan Nasional 6 .....IV.43
Tabel 4.13 Sasaran Pembangunan Nasional 7 .....IV.45
Tabel 4.14 Sasaran Pembangunan Nasional 8 .....IV.51
Tabel 4.15 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2027 .....IV.32
Tabel 4.16 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2026 .....IV.33
Tabel 4.17 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2026 .....IV.59
Tabel 4.18 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2027.....IV.61
Tabel 4.19 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2027 .....IV.63
Tabel 4.20 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas Tahun 2027 .....IV.64
Tabel 4.21 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM Tahun 2026 .....IV.66
Tabel 4.22 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif Tahun 2027 .....IV.67
Tabel 4.23 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Ekonomi Tahun 2027.....IV.69
Tabel 4.24 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Ekonomi Tahun 2027 .....IV.70
Tabel 4.25 Program Prioritas mendukung Prioritas Investasi dan Stabilisasi Ekonomi Tahun 2027 .....IV.71
Tabel 4.26 Program Prioritas mendukung Prioritas Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkelanjutan Tahun 2027 .....IV.72
Tabel 4.27 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2027 .....IV.74
Tabel 4.28 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2027 .....IV.75
Tabel 4.29 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pemerataan Jaringan Listrik Tahun 2027 .....IV.76
Tabel 4.30 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pemerataan Jaringan Listrik IV.76

Tabel 4.31 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Penyediaan Internet Tahun 2027 .....IV.77
Tabel 4.32 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Penyediaan Internet Tahun 2027.....IV.77
Tabel 4.33 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Air Bersih Tahun 2027.....IV.78
Tabel 4.34 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Air Bersih Tahun 2027.....IV.78
Tabel 4.35 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2027.....IV.80
Tabel 4.36 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2027.....IV.81
Tabel 4.37 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2027.....IV.82
Tabel 4.38 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2027.....IV.83
Tabel 4.39 Dukungan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional IV.85
Tabel 4.40 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi TAPD IV.262
Tabel 4.41 Kamus Usulan Aspirasi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 .....IV.446
Tabel 4.42 Usulan Musrenbang Tahun 2027 .....IV.468
Tabel 4.43 Daftar Nama Penerima, Alamat dan BesaranAlokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta Pemberi Hibah Kabupaten Kepulauan mentawai tahun anggaran 2027.....IV.524
Tabel 4.44 Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2027...IV.534
Tabel 4.45 Daftar Calon Penerima Bantuan Hibah Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2027 .....IV.535
Tabel 4.46 Sebaran Desa Prioritas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 .....IV.538
Tabel 4.47 Perkembangan Persentase Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kepulauan Mentwai, 2021-2025 .....IV.539
Tabel 4.48 Penyelarasan RKPD Tahun 2027 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 .....IV.541
Tabel 4.49 Keselarasan Sasaran Utama Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai IV.542
Tabel 4.50 Keselarasan Indikator Utama Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai IV.542
Tabel 4.51 Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama dalam RKPD IV.543
Tabel 4.52 Keselarasan Prioritas Pembangunan IV.543
Tabel 4.53 Dukungan Anggaran Terhadap Kegiatan Prioritas IV.544
Tabel 4.54 Dukungan Program daerah Terhadap Program strategis Nasional IV.546

Tabel 4.55 Dukungngan Pembiayaan non-APBD Program Unggulan Tahun 2027 .....IV.563
Tabel 5.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 .....V.4
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama VI.2
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah VI.5
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Kunci VI.8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I.5
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai II.1
Gambar 2.2 Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai II.4
Gambar 2.3 Peta Fungsi Kawasan Hutan II.6
Gambar 2.4 Perencanaan Kawasan Peternakan, Lapas Tipikor dan Sekolah Terintegrasi II.22
Gambar 2.5 Peta Sidik Kabupaten Kepulauan Mentawai II.25
Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana II.27
Gambar 2.7 Perkembangan Indikator Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024 ..... II.28
Gambar 2.8 Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai,2023 .... II.29
Gambar 2.9 Proses Terjadinya Gempa Bumi Tektonik II.29
Gambar 2.10 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.35
Gambar 2.11 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.38
Gambar 2.12 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.39
Gambar 2.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.40
Gambar 2.14 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.41
Gambar 2.15 ICOR Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2025..... II.42
Gambar 2.16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.43
Gambar 2.17 Rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.45
Gambar 2.18 Harapan Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.46
Gambar 2.19 Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.47
Gambar 2.20 Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.48
Gambar 2.21 Perkembangan Usia Harapan Hidup (tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.49
Gambar 2.22 Perkembangan Angka Kesakitan/morbilitas (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.50
Gambar 2.23 Cakupan Jaminan Kesehatan (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.52
Gambar 2.24 Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.62
Gambar 2.25 Jalur pelayaran Padang -Kep Mentawai II.76
Gambar 2.26 Layanan Perpustakaan untuk Masyarakat dan Anak Sekolah..... II.83

Gambar 2.27 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.92
Gambar 2.28 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.99
Gambar 2.29 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.100
Gambar 2.30 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.101
Gambar 2.31 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.102
Gambar 2.32 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... II.102
Gambar 2.33 Perkembangan NTP Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025 ..... II.103
Gambar 2.34 Pengeluaran Konsumsi RT Perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 ..... II.105
Gambar 2.35 Angka Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... II.111
Gambar 4.1 Dukungan terhadap Tema Pembangunan IV.2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta menargetkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dapat mencapai target 5,3 persen diperkirakan tetap tumbuh stabil, tidak melonjak tinggi, tapi juga tidak melemah di tengah gejolak yang terjadi baik dalam negeri maupun luar negeri. Dibandingkan ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, sedikit mengalami kenaikan sekalipun tidak begitu signifikan. Ini menunjukkan resiliensi perekonomian Indonesia sudah sangat baik. Faktor Pendorong pertumbuhan adalah konsumsi domestik, investasi dan hilirisasi serta stabilitas fiskal dan moneter yang proaktif dan dukungan APBN yang optimal dalam melindungi masyarakat dan menjaga daya beli. Investasi dan konsumsi kelas menengah juga menjadi pendorong utama. Pemerintah juga berupaya membuka pasar ekspor baru, mendorong hilirisasi industri, dan transformasi digital.

Tema RKP 2027 ini mencerminkan prioritas strategis pemerintah untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang, khususnya dalam kerangka RPJMN Tahun 2025-2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Kedaulatan pangan mengandung arti untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi seluruh rakyat Indonesia secara mandiri. Kedaulatan Energi bertujuan untuk menjamin akses energi yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ekonomi yang produktif fokus pada peningkatan nilai tambah ekonomi, daya saing, dan inovasi. Ekonomi yang inklusif memiliki tujuan yaitu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memberdayakan kelompok rentan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Tantangan pertumbuhan perekonomian masih diperhadapkan pada perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik dan perdagangan pelemahan ekonomi yang diakibatkan perang di Timur Tengah, yang masih berlanjut, dampak konsumsi rumah tangga yang masih melambat.

Peluang perekonomian secara nyata tampak pada ekonomi digital dan teknologi dimana E-commerce, fintech, dan AI terus berkembang, demikian juga dengan UMKM makin go digital serta layanan berbasis aplikasi masih punya ruang besar.

Penguatan stabilitas makro ekonomi terus dilakukan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif dan inklusif. Stabilitas ekonomi Nasional yang kuat memberikan dampak dan diharapkan dapat dirasakan secara signifikan hingga ke daerah. Stabilitas ekonomi yang kuat tidak hanya berarti angka pertumbuhan PDB yang baik, tetapi juga terjaganya daya beli masyarakat, terkendalinya inflasi, serta iklim investasi yang kondusif. Dampak yang sangat dirasakan oleh UMKM dan pelaku usaha di daerah adalah stabilitas harga dalam memberikan kepastian dalam perencanaan biaya produksi dan harga jual, sehingga mengurangi risiko kerugian, dan mendorong investasi lokal. Begitu juga, belanja daerah dirancang untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, dengan fokus

pada belanja produktif, program prioritas dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 disusun dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi dan Industri". Ini merupakan turunan langsung dari prioritas yang digariskan dalam RPJMN 2025-2029, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai 6,63%. target pertumbuhan ini menjadi landasan bagi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2027 yang juga menjadi bagian dari penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.

RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran setiap tahun dari RPJMD. Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana amanat dari Permendagri 86 Tahun 2017. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD ini berpedoman pada Permendagri terkait pedoman penyusunan RKPD Tahun 2027, RKP Tahun 2027, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RKPD ini sangat penting, mengingat:

1. merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029 pada tahun ketiga (2027).
2. menjadi dasar peletakan fondasi pembangunan periode pertama menuju visi pembangunan jangka panjang daerah menuju Mentawai Emas 2045.
3. menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. mewujudkan keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra OPD Tahun 2025-2029.
5. mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 dan RKP Tahun 2027.
6. menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027.

Sebagai sebuah sistem perencanaan yang selaras dan berkelanjutan, Penguatan Sumber Daya Ekonomi untuk Peningkatan Produktivitas menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2027 sebagai upaya meningkatkan produktivitas masyarakat berbasis sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah pada setiap komoditas yang dikembangkan sehingga pada setiap usaha ekonomi yang sedang dan terus diupayakan menuju transformasi ekonomi daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2027 mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2027, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

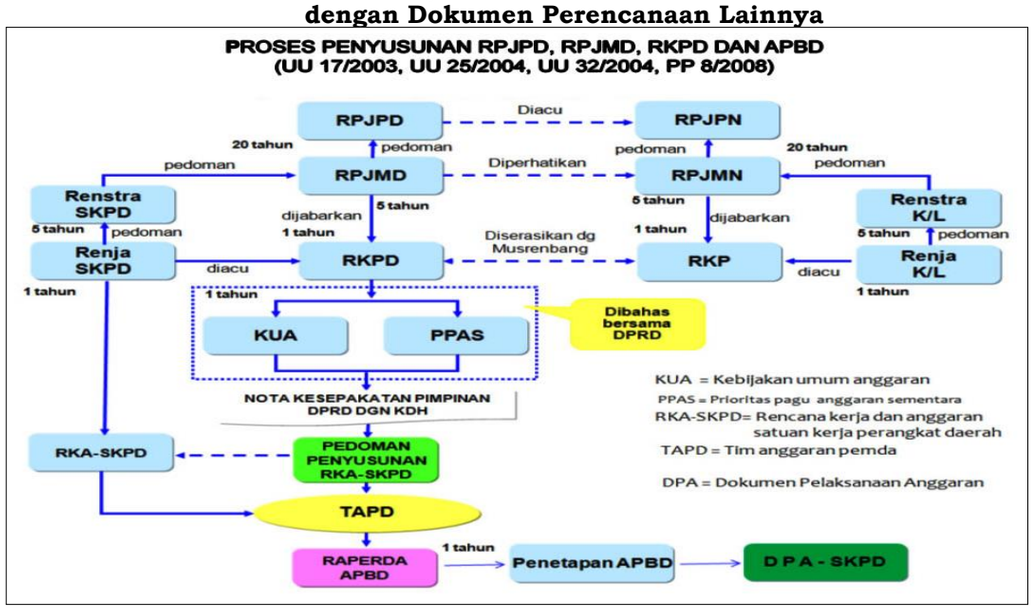
Penyusunan RKPD Tahun 2027 merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Hubungan antara RKPD Tahun 2027 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran tahun ketiga RPJMD Tahun 2025-2029. RKPD menjadi operasionalisasi dari rencana jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD. Program dan kegiatan dalam RKPD harus mengacu pada prioritas dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. RPJMD menjadi acuan penyusunan RKPD, maka penyusunan RKPD harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD. RKPD juga harus selaras dengan kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hubungan RPJMD dan RKPD menciptakan sinergi dan kesinambungan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. RPJMD memberikan arah jangka menengah, sementara RKPD menjabarkan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut dalam jangka pendek.
2. RKPD Tahun 2027 memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. RKPD Tahun 2027

memperhatikan dan menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

3. RKPD Tahun 2027 memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 sebagai satu kesatuan dalam memberikan kontribusi pembangunan untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027. Keselarasan program prioritas dan target pembangunan makro disusun sebagai bagian target imperatif untuk memastikan kesamaan langkah dan tujuan pencapaian visi misi dan target pembangunan untuk tahun 2027.
4. RKPD Tahun 2027 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.
5. RKPD Tahun 2027 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027. Dengan berpedoman pada RKPD, Renja memastikan bahwa program, kegiatan, sasaran, dan prioritas yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah selaras dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
6. RKPD Tahun 2027 pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RKPD Tahun 2027 dimaksudkan agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 antara lain:

1. Terwujudnya penjabaran tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan jangka panjang (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yang secara operasional akan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah.
3. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.
4. Menjadi acuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2027.
5. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2027.

1.5. **Sistematika Penyusunan RKPD**

RKPD Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan;
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD;

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
terdiri atas Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Permasalahan Pembangunan Daerah. Kondisi Umum Kondisi Daerah menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun lalu yang mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPD. Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
terdiri atas Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam

dokumen RPJMD provinsi yang secara nyata memiliki keterkaitan dan pengaruh pada kondisi ekonomi daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran strategi yang disusun untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja sebagai evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021-2025, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
berisi Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun perencanaan.

BAB VII Penutup;
berisi penegasan bahwa RKPD adalah pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2027.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

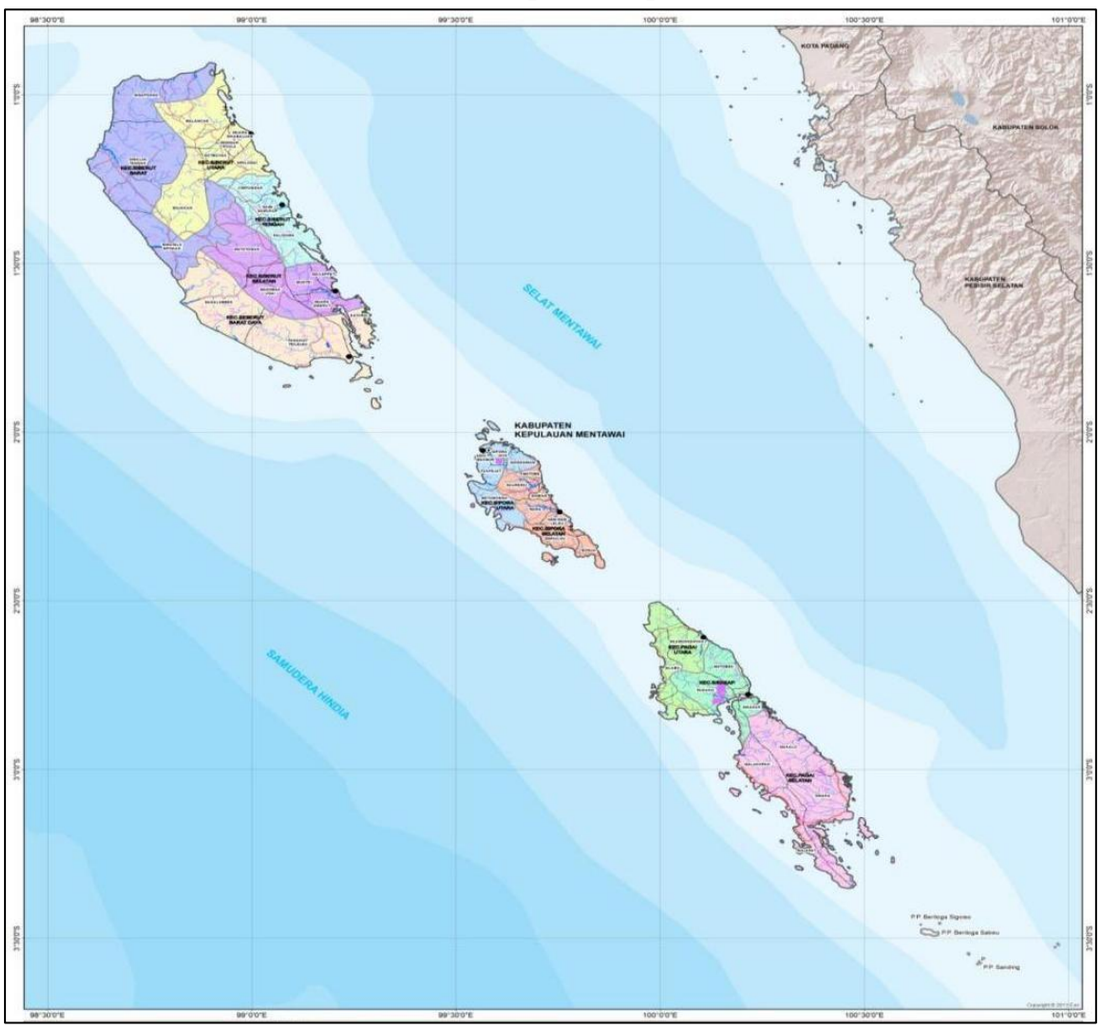
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia yang wilayahnya disebelah Barat Sumatera dan terpisah oleh laut dari daratan Pulau Sumatera. Ibukotanya terletak di Tua Pejat dengan jumlah penduduk (2025) sebesar 99.810 jiwa. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 yang terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan 358 dusun. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki luas wilayah sekitar 5.983,22 km^2 dan panjang garis pantai 1.402,66 km, sebagaimana Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04 /10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 4 (empat) pulau besar antara lain Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan serta terdiri atas 103 pulau kecil lainnya.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber **:** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai

Berdasarkan luas wilayah setiap kecamatan, Kecamatan Siberut Barat menjadi kecamatan terluas yaitu 1.163,64 km^2 atau sebesar 19,29 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai dan Kecamatan Siberut Barat Daya dengan luas wilayah terbesar kedua yaitu 1.013,83 km^2 atau sebesar 16,80 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sipora Utara yaitu dengan luas 272,40 km^2 atau sebesar 4,51 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai dan Kecamatan Sikakap dengan luas wilayah terkecil kedua yaitu seluas 312,60 km^2 atau sebesar 5,18 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak pada posisi 0^{0}55'00"–3^{0}21'00" Lintang Selatan dan 98^{0}35'00"-100^{0}32'00" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara geografis berbatasan dengan:

- sebelah Utara adalah Selat Siberut.
- sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai.
- sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Adapun keadaan geografis dan administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap kecamatannya disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km^2)	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pagai Selatan	Bulasat	851,28	2^{0}49'04"-3^{0}21'00"	100^{0}07'01"-100^{0}32'00"
2	Sikakap	Taikako	312,60	2^{0}37'12"-3^{0}55'04"	100^{0}00'00"-100^{0}16'12"
3	Pagai Utara	Saumanganya	371,25	2^{0}30'00"-2^{0}51'36"	99^{0}57'00"-100^{0}09'36"
4	Sipora Selatan	Sioban	348,33	2^{0}06'00"-2^{0}24'36"	99^{0}36'00"-99^{0}52'12"
5	Sipora Utara	Sido Makmur	272,40	1^{0}57'00"-2^{0}18'00"	98^{0}30'00"-99^{0}42'00"
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	328,00	1^{0}19'48"-1^{0}42'00"	98^{0}48'00"-99^{0}18'00"
7	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	1.013,83	1^{0}27'36"-1^{0}57'00"	98^{0}45'00"-99^{0}19'48"
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	589,75	1^{0}15'00"-1^{0}33'00"	98^{0}54'00"-99^{0}12'00"
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	782,68	0^{0}54'00"-1^{0}27'00"	98^{0}40'48"-99^{0}06'00"
10	Siberut Barat	Simalegi	1.163,64	0^{0}55'00"-1^{0}34'12"	98^{0}35'00"-98^{0}59'24"

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026

Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan terbesar kedua yaitu sekitar 14,20% dari total wilayah Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas 6,045,65 ribu km^2 atau sekitar 14,35%. Seluruh wilayah administrasi pemerintahan terkecil di Sumatera Barat disebut nagari kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki wilayah administrasi terendah berupa desa.

Tabel 2.2
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa
Tahun 2025 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas Wlayah (km^2)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
1.	Kab. Kep. Mentawai	5.983,22	10	-	-	43
2.	Kab. Pesisir Selatan	6.045,676	15	-	182	-
3.	Kab. Solok	3.590,404	14	-	74	-
4.	Kab. Sijunjung	3.150,580	8	-	61	1
5.	Kab. Tanah Datar	1.377,186	14	-	75	-
6.	Kab. Padang Pariaman	1.341,879	17	-	103	-
7.	Kab. Agam	2.226,270	16	-	92	-

No	Kabupaten/Kota	Luas Wlayah (km^2)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
8.	Kab. Lima Puluh Kota	3.273,405	13	-	79	-
9.	Kab. Pasaman	3.902,444	12	-	62	-
10.	Kab. Solok Selatan	3.282,144	7	-	39	-
11.	Kab. Dharmasraya	2.920,925	11	-	52	-
12.	Kab. Pasaman Barat	3.851,883	11	-	90	-
13.	Kota Padang	694,315	11	104	-	-
14.	Kota Solok	58,720	2	13	-	-
15.	Kota Sawahlunto	231,945	4	10	-	27
16.	Kota Padang Panjang	23,560	2	16	-	-
17.	Kota Bukittinggi	24,173	3	24	-	-
18.	Kota Payakumbuh	74,552	5	47	-	-
19.	Kota Pariaman	64,626	4	16	-	55
	Jumlah	42.107,674	179	230	909	126

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Jumlah dusun terbanyak terdapat pada Kecamatan Pagai Selatan dengan jumlah 52 dusun lalu diikuti Kecamatan Sipora Selatan dengan jumlah 48 dusun sedangkan untuk Kecamatan Siberut Utara menjadi kecamatan dengan jumlah paling sedikit yaitu dengan jumlah 26 dusun. Wilayah kecamatan dengan jumlah pulau terbanyak berada pada Kecamatan Pagai Selatan dengan jumlah 34 pulau dan Kecamatan Siberut Barat Daya sebanyak 22 pulau, secara keseluruhan Kepulauan Mentawai memiliki 103 pulau.

Tabel 2.3
Jumlah Desa dan Dusun
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah Pulau	Daerah (desa) Pesisir/ Tepi Laut
1	Pagai Selatan	Bulasat	4	52	34	4
2	Sikakap	Taikako	3	44	9	3
3	Pagai Utara	Saumanganya	3	30	9	3
4	Sipora Selatan	Sioban	7	48	3	6
5	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29	15	3
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	36	1	2
7	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	3	31	22	3
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	33	5	3
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	6	26	4	3
10	Siberut Barat	Simalegi	3	29	1	3
Jumlah			43	358	103	33

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaian besar wilayah desanya merupakan daerah pesisir pantai yaitu sebanyak 33 desa atau sebesar 76,75 persen. Kecamatan Sipora Selatan menjadi kecamatan dengan desa diwilayah pesisir terbanyak yaitu dengan jumlah 6 desa dan Kecamatan Pagai Selatan dengan 4 desa di wilayah pesisir.

Luasan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dibagi kedalam 5 kawasan penggunaan lahan, antara lain hutan lindung, kawasan suaka dan pelestarian alam, hutan produksi tetap, hutan produksi dapat dikonversi dan areal penggunaan lainnya.

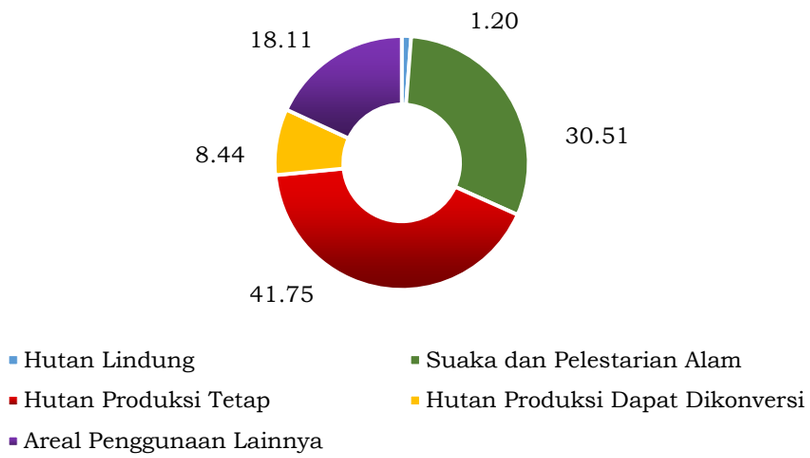
Tabel 2.4
Luasan Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Uraian	Hutan Lindung	Suaka dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Areal Penggunaan Lainnya	Total
Penggunaan Lahan (ha)	7.221,22	183.703,83	251.305,64	50.807,03	108.097,28	601.135

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Luasan penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi oleh kawasan hutan dengan persentase sekitar 82,02 persen dan areal penggunaan lainnya sekitar 18,11 persen. Untuk luasan hutan produksi tetap menjadi kawasan hutan dengan persentase sebesar 41,81 persen atau seluas 251.305,64 ha dan kawasan suaka dan pelestarian alam sebesar 30,56 persen atau seluas 183.703,83 ha, kawasan hutan lindung sebesar 7.221,22 ha atau sekitar 1,20 persen dari luas wilayah. Untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 50.807,03 ha atau sekitar 8,45 persen dari total luas wilayah dan memiliki potensi yang besar untuk dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. Areal penggunaan lainnya sebagai areal penopang kehidupan masyarakat sebesar 108.097,28 ha atau sekitar 17,98 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai.

Gambar 2.2
Persentase Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026

Peruntukan dan Penggunaan kawasan hutan oleh pihak swasta maupun pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain KSA/KPA yang ditunjuk seluas ± 183.397 Ha termasuk Kawasan Taman Nasional Siberut (TNS) di Pulau Siberut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor K.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 147.213 Ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 9.906 Ha di Provinsi Sumatera Barat, Hutan Produksi (HP) yang ada di Pulau Siberut dikelola dalam bentuk IUPHHK-HA oleh PT. Salaki Summa Sejahtera seluas ± 48.420 Ha sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 794/ MENLHK/ SEKJEN/ HPL.0/9/2021 tanggal 17 September 2021, persetujuan Usaha Pemanfaatan Hutan atas Areal Hutan Produksi Periode 2024-2033 kepada PT. Minas Pagai Lumber melalui surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7989/MenLHK-PHL/ PUPH/ HPL.1/ 8/ 2023 seluas 78.000 Ha.

Akan tetapi pada tanggal 20 Januari 2026, pemerintah pusat mengumumkan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH0 terhadap beberapa perusahaan di Kepulauan Mentawai yaitu PT Minas Pagai Lumber (MPL), PT Biomass Andalan Energi (BAE), PT Salaki Summa Sejahtera (SSS), dengan alasan kerusakan lingkungan, risiko bencana dan dugaan pelanggaran hukum.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 11577 Tahun 2025 tentang Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota dan Fungsi Hutan di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

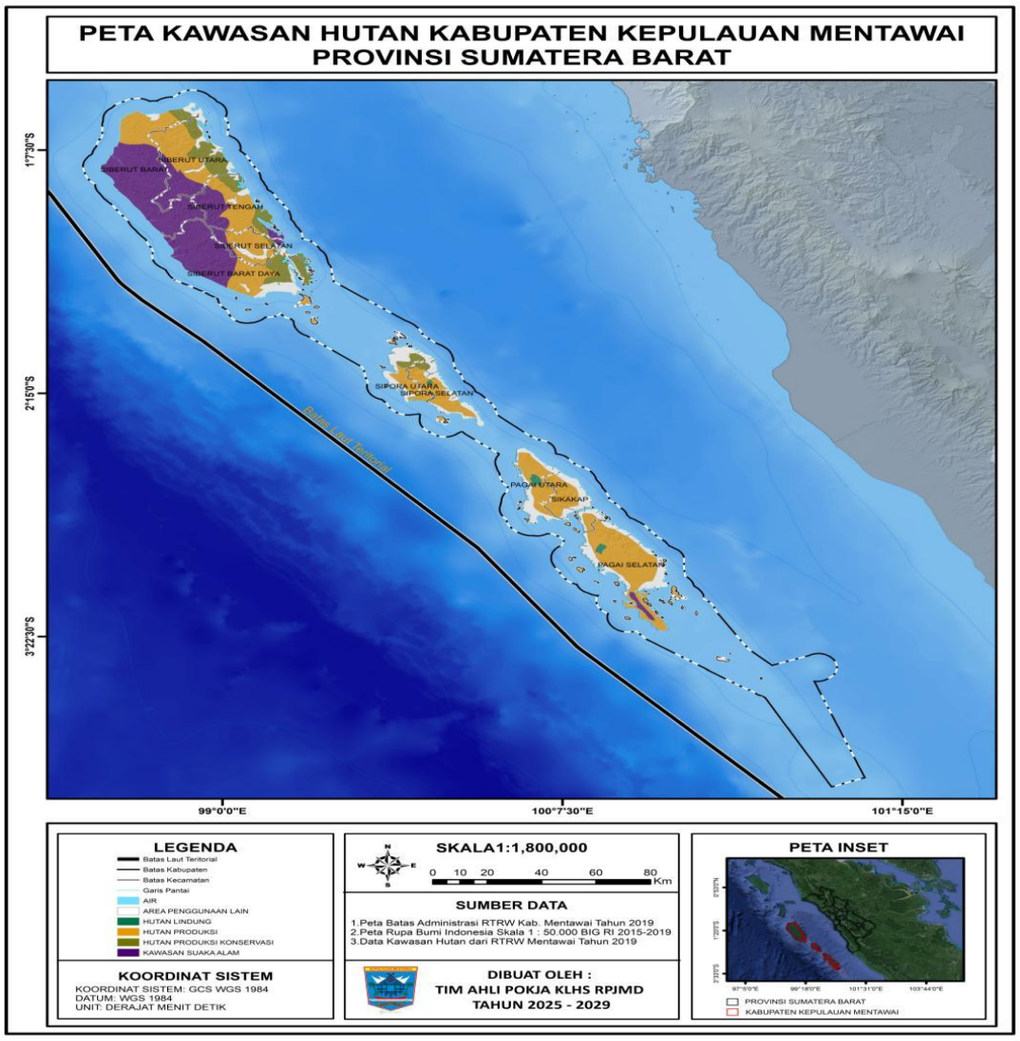
Tabel 2.5
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Hutan Lindung (Ha)	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Tetap (Ha)	Hutan Produksi yang dapat konversi (Ha)	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
1.	Kab. Kep. Mentawai	7.221,22	183.703,83	-	251.305,64	50.807,03	493.033,72
2.	Kab. Pesisir Selatan	22.538,34	280.242,25	45.438,12	3.991,60	31.269,35	383.479,66
3.	Kab. Solok	145.976,38	47.148,56	11.707,94	4.873,11	8.970,61	218.676,60
4.	Kab. Sijunjung	75.538,26	42.803,37	28.337,27	21.788,77	4.502,04	172.969,71
5.	Kab. Tanah Datar	20.089,02	20.165,69	-	7.276,60	28,01	47.559,32
6.	Kab. Padang Pariaman	13.097,96	14.810,82	-	-	-	27.908,78
7.	Kab. Agam	19.179,12	29.100,25	7.278,46	1.689,80	7.990,79	65.238,42
8.	Kab. Lima Puluh Kota	116.215,60	20.140,96	20413,32	3.899,12	11.213,39	171.882,39
9.	Kab. Pasaman	194.899,72	31.887,72	29.252,93	-	4.734,76	260.775,13
10.	Kab. Solok Selatan	54.933,25	65.935,76	52.798,63	13.134,47	13.033,56	199.835,67
11.	Kab. Dharmasraya	10.647,51	3.725,31	28.230,54	24.05`,34	15.956,10	82.610,80
12.	Kab. Pasaman Barat	75.765,83	1.251,91	4.822,57	17.599,10	4.959,72	104.359,31
13.	Kota Padang	12.575,49	25225,01	245,33	-	-	38.045,83
14.	Kota Solok	298,96	883,06	-	-	-	1.182,02
15.	Kota Sawahlunto	207,09	–	30,61	4.215,66	4.215,66	8.256,65
16.	Kota Padang Panjang	569,99	3,93	-	-	-	573,92
17.	Kota Bukittinggi	–		-	-	-	-
18.	Kota Payakumbuh	231,74		-	-	-	231,74
19.	Kota Pariaman	-	–	-	-	-	-
	Jumlah	769.985,48	796.292,18	228.555,72	353.373,02	157.681,02	2.313.777,32

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Luasan kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 491.992,17 ha atau sebesar 21,59% dari total kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Luasan kawasan ini menjadikan Kawasan hutan Kepulauan Mentawai menjadi kawasan hutan terbesar di Provinsi Sumatera Barat, tentunya ini akan memberikan kontribusi pada menjaga dan meningkatkan fungsi ekologis seperti pengurangan gas karbon, penghasil oksigen, pengaturan siklus air dan beberapa fungsi sosial ekonomi lainnya.

Gambar 2.3
Peta Fungsi Kawasan Hutan



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kehidupan masyarakat di Kepulauan Mentawai bertopang pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan dengan kontribusi PDRB sekitar 48,04 persen (BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025). Hal ini menunjukkan begitu besarnya peran sektor primer dalam keberlangsungan hidup masyarakat di Kepulauan Mentawai serta menjadi bagian penyumbang atau berkontribusi pada total produksi barang dan jasa secara agregat di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.6
Perkembangan PDRB ADHB dan Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025 (juta rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	2021		2022		2023		2024		2025	
		PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)
1	Kab. Kep. Mentawai	4.843,91	1,91	5.445,70	1,91	5.915,00	1,89	6.245,80	1,88	6.590,78	1,97
2	Kab. Pesisir Selatan	14.926,57	5,89	16.606,49	5,83	18.025,68	5,77	19.182,15	5,77	20.357,36	6,09
3	Kab. Solok	14.178,06	5,59	15.781,14	5,54	17.316,41	5,54	18.391,99	5,54	19.412,79	5,81
4	Kab. Sijunjung	9.567,67	3,77	10.668,55	3,74	11.676,77	3,74	12.488,94	3,76	13.536,75	4,05
5	Kab. Tanah datar	13.590,94	5,36	15.059,26	5,28	16.459,56	5,27	17.496,03	5,27	18.472,04	5,53
6	Kab. Padang Pariaman	18.455,09	7,28	22.193,35	7,78	25.070,85	8,03	26.808,95	8,07	27.793,21	8,31

No	Kabupaten/ Kota	2021		2022		2023		2024		2025	
		PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)	PDRB ADHB	(%)
7	Kab. Agam	21.440,41	8,45	23.924,34	8,39	26.162,66	8,38	27.975,68	8,42	29.599,64	8,85
8	Kab. Lima Puluh Kota	16.182,39	6,38	17.900,61	6,28	19.604,20	6,28	20.850,62	6,28	22.486,38	6,73
9	Kab. Pasaman	9.432,45	3,72	10.390,58	3,64	11.360,36	3,64	12.165,24	3,66	12.909,78	3,86
10	Kab. Solok Selatan	5.777,98	2,28	6.430,74	2,26	7.044,41	2,26	7.587,87	2,28	8.157,2	2,44
11	Kab. Dharmasraya	10.757,47	4,24	12.233,47	4,29	13.345,77	4,27	14.327,63	4,31	15.399,82	4,61
12	Kab. Pasaman Barat	15.933,88	6,28	17.875,83	6,27	19.544,80	6,26	21.115,66	6,36	23.014,44	6,88
13	Kota Padang	65.178,86	25,70	72.978,95	25,60	79.704,67	25,52	84.182,56	25,34	88.987,41	26,62
14	Kota Solok	4.251,89	1,68	4.793,15	1,68	5.262,10	1,68	5.561,16	1,67	5.879,31	1,76
15	Kota Sawahlunto	3.851,69	1,52	4.389,76	1,54	4.825,30	1,54	5.058,00	1,52	5.441,23	1,63
16	Kota Padang Panjang	3.651,12	1,44	4.086,55	1,43	4.474,08	1,43	4.756,96	1,43	5.067,66	1,52
17	Kota Bukittinggi	9.026,56	3,56	10.194,02	3,58	11.131,58	3,56	11.747,42	3,54	12.420,04	3,72
18	Kota Payakumbuh	7.302,51	2,88	8.250,30	2,89	8.982,35	2,88	9.421,00	2,84	9.812,97	2,94
19	Kota Pariaman	5.258,66	2,07	5.881,85	2,06	6.435,12	2,06	6.801,89	2,05	7.284,82	2,18
Provinsi Sumatera Barat		253.608,12		285.084,63		312.341,67		332.165,55		352.623,63	

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

Tabel 2.6 menunjukkan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku dalam kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 1,88-1,92 persen. Kontribusi ini dapat dikategorikan masih relatif sedikit jika dibandingkan kontribusi kabupaten/kota lainnya telah di atas 5 persen dan bahkan Kota Padang dengan kontribusi terbesar yaitu 25,84 persen di tahun 2024. Rendahnya capaian ini tentunya di samping kapasitas ruang/kawasan untuk dikelola yang relatif sedikit (APL sekitar 108.840,62 ha) di sisi lain jumlah penduduk yang relatif masih sedikit dan struktur ekonomi masyarakat Mentawai masih bertumpu pada sektor primer yang belum memberikan dampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara signifikan.

Tabel 2.7
Kontribusi Sektor Primer Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terhadap PDRB Sektor Primer Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025 (juta rupiah)

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Kep. Mentawai	2.447,03	2.702,45	2.963,60	3.101,43	3.272,80
Provinsi Sumatera Barat	51.958,40	72.191,47	78.556,02	84.067,88	91.192,94
Persentase (%)	4,71	3,74	3,77	3,69	3,59

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tabel 2.7 menunjukkan kontribusi sektor primer (pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) belum memberikan kontribusi signifikan pada total PDRB sektor primer di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2025 yaitu hanya sebesar 4,71-3,59 persen atau dengan rata-rata kontribusi sebesar 3,90 persen. Hal ini menunjukkan belum optimalnya produktivitas komoditi sektor primer di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.8
Kontribusi Sektor Pariwisata/Jasa Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terhadap PDRB Sektor Pariwisata/Jasa
Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025 (juta rupiah)

Transportasi, Pergudangan, Akomodasi dan Makan Minum	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Kep. Mentawai	401,31	469,81	467,99	501,63	523,98
Provinsi Sumatera Barat	23.632,26	34.923,07	39.637,83	41.578,23	42.416,17

Persentase (%)	1,70	1,35	1,18	1,21	1,24

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Sebagai salah satu tujuan destinasi pariwisata khususnya wisata bahari seperti selancar (*surfing*), *snorkling* dan wisata pantai, kontribusi sektor pariwisata yang dilihat dari aktivitas Transportasi, Pergudangan, Akomodasi dan Makan Minum juga belum memberikan kontribusi pada sektor yang sama di Provinsi Sumatera Barat. Tabel 2.8 menunjukkan kontribusi sektor pariwisata/jasa di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat kecil yaitu pada kisaran 1,70-1,24 persen atau dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,33 persen dari total PDRB sektor pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan pengembangan sektor jasa belum optimal dalam menarik kunjungan wisatawan khususnya wisatawan nusantara yang meningkatkan *occupancy* dan lama tinggal (*length of stay*) di Kepulauan Mentawai selain *branding* yang tetap dipromosikan juga hal yang perlu diperhatikan adalah *hospitality* dan pengembangan destinasi melalui 6 A komponen pengembangan pariwisata yang terdiri dari *attraction, amenities, accessibility, accommodation, activity,* dan *ancillary*.

Tabel 2.9
Kontribusi Sektor Konstruksi Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terhadap PDRB Sektor Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025 (juta rupiah)

Konstruksi	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Kep. Mentawai	661,81	764,04	837,87	879,81	892,39
Provinsi Sumatera Barat	25775,65	28702,17	31758,36	33562,98	33340,48
Persentase (%)	2,57	2,66	2,64	2,62	2,68

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Kontribusi sektor konstruksi Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB sektor konstruksi di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum menunjukkan pengaruh yang signifikan yaitu pada kisaran 2,57-2,68 persen atau dengan rata-rata sebesar 2,63 persen. Hal ini menunjukkan belum masifnya pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan aktivitas investasi yang ada di Kepulauan Mentawai belum menunjukkan kontribusi yang besar dalam akumulasi investasi secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas investasi ini di kategorikan sebagai komponen pembentukan modal tetap bruto dalam PDRB berdasarkan pengeluaran. Berdasarkan Tabel 2.10 menunjukkan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PMTB Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 5 tahun masih sangat kecil yaitu pada angka 0,00192 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa akumulasi aset tetap di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bentuk investasi modal tidak mengalami peningkatan yang berarti atau tidak begitu berkembang secara *time series* jika dibandingkan dengan akumulasi Pembentukan Modal Tetap Bruto di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.10
Kontribusi PMTB Kabupaten Kepulauan Mentawai
PMTB PDRB Berdasarkan Pengeluaran
Provinsi Sumatera Barat, 2021-2025 (juta rupiah)

Pembentukan Modal Tetap Bruto	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Kep. Mentawai	1462,99	1601,98	1797,22	1864,79	1947,08
Provinsi Sumatera Barat	76101,28	83802,01	92519,70	97829,60	100403,51

Persentase (%)	1,92	1,91	1,94	1,91	1,94

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, identifikasi sektor unggulan menjadi hal yang sangat penting. Sektor unggulan merupakan sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di suatu daerah dibandingkan dengan wilayah lain. Keunggulan ini ditunjukkan oleh tingginya kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat produktivitas, serta potensi pengembangan yang dimilikinya. Penetapan sektor unggulan menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena dapat menjadi prioritas dalam alokasi sumber daya, pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, serta promosi investasi. Dengan mengenali sektor-sektor yang memiliki kinerja dan potensi terbaik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang efektif dan berbasis potensi lokal.

Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ) PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021–2025, dapat disusun narasi analisis yang mendukung arah kebijakan dalam menyusun dokumen RKPD tahun berikutnya sebagai berikut:

Secara umum, struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai masih didominasi oleh sektor-sektor primer dan sektor jasa pemerintahan. Hal ini terlihat dari nilai LQ > 1 yang secara konsisten ditunjukkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan nilai LQ berkisar antara 2,17–2,21. Kondisi ini menegaskan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis utama yang memiliki keunggulan komparatif serta berperan sebagai penggerak ekonomi daerah. Selain itu, sektor Konstruksi juga menunjukkan nilai LQ > 1 (1,46–1,54), yang mengindikasikan adanya aktivitas pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan dalam mendukung konektivitas dan pelayanan dasar di wilayah Kepulauan Mentawai.

Sektor basis lainnya adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dengan nilai LQ berkisar sekitar 1,20–1,24. Hal ini mencerminkan masih besarnya peran belanja pemerintah dalam mendorong perekonomian daerah, yang sekaligus menunjukkan ketergantungan terhadap sektor publik.

Sementara itu, sebagian besar sektor lainnya memiliki nilai LQ < 1, yang berarti masih tergolong sebagai sektor non-basis. Sektor-sektor seperti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate dan Jasa Perusahaan menunjukkan nilai LQ mendekati 1, namun belum mampu menjadi sektor unggulan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut guna memperkuat struktur ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong hilirisasi, peningkatan nilai tambah, serta penguatan sektor pariwisata.

Adapun sektor-sektor dengan nilai LQ sangat rendah, seperti Jasa Keuangan dan Asuransi, Informasi dan Komunikasi, serta Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, menunjukkan masih terbatasnya kapasitas dan kontribusi sektor-sektor tersebut dalam perekonomian daerah. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan transformasi ekonomi ke arah yang lebih modern dan inklusif.

Dalam mendukung RKPD Tahun 2027, hasil analisis ini mengarah pada beberapa implikasi kebijakan. Pertama, penguatan sektor basis, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan, perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas, hilirisasi, serta penguatan akses pasar. Kedua, sektor konstruksi perlu diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata antar wilayah. Ketiga, pengembangan sektor

non-basis potensial seperti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate dan Jasa Perusahaan harus didorong melalui peningkatan investasi, pengembangan SDM, serta penyediaan infrastruktur pendukung.

Dengan demikian, strategi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu diarahkan pada transformasi ekonomi yang bertahap, dari ketergantungan pada sektor primer menuju penguatan sektor sekunder dan tersier, tanpa mengabaikan keunggulan lokal yang telah dimiliki. Hal ini penting untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, tangguh, dan berdaya saing.

Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan adalah analisis *Location Quotient* (LQ). Melalui pendekatan ini, dapat diketahui sektor-sektor ekonomi yang memiliki konsentrasi lebih tinggi dibandingkan wilayah acuan (misalnya provinsi atau nasional), sehingga berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan memiliki kemampuan untuk mendorong ekspor antarwilayah. Dengan demikian, analisis terhadap sektor unggulan tidak hanya membantu dalam memahami struktur ekonomi suatu daerah, tetapi juga menjadi dasar dalam menetapkan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran, berorientasi pada potensi lokal, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. *Location Quotient* (LQ), yaitu alat analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar keunggulan atau konsentrasi suatu sektor ekonomi di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah acuan (biasanya provinsi atau nasional). Pendekatan LQ pada penelitian dihitung dengan rumus :

$$LQ = \frac{Y_{ij}/Y_j}{Y_i/Y}$$

Keterangan:
Yij : PDRB sektor i di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Yj : PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai
Yi : PDRB sektor i di Sumatera Barat
Y : PDRB Sumatera Barat

Berdasarkan rumus, ada dua kemungkinan nilai LQ yang dapat diperoleh, yaitu:

a. Jika nilai LQ ≥ 1, mempunyai arti bahwa peranan sektor i di Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih besar dibandingkan dengan peranan sektor i di Provinsi Sumatera Barat. Sektor ini disebut sektor unggul atau basis.
b. Jika nilai LQ < 1, mempunyai arti bahwa sektor i di Kabupaten Kepulauan Mentawai peranannya lebih kecil dibandingkan dengan sektor i di Provinsi Sumatera Barat. Sektor ini disebut sektor non unggul atau non basis.

Berdasarkan perhitungan koefisien LQ masing-masing sektor pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, terdapat 3 sektor yang terkategori sektor basis dan 14 sektor yang terkategori non basis. 3 sektor ini terkategori sektor basis sebab sektor ini mempunyai nilai rata-rata LQ dari tahun 2021-2025 lebih besar dari 1, artinya sektor-sektor tersebut mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sektor-sektor tersebut adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2) Konstruksi, serta 3) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Disamping itu terlihat bahwa nilai LQ sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,21 yang lebih besar dari 1 menunjukkan sektor yang dominan dalam menunjang perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat terkonsentrasi pada beberapa sektor tertentu, terutama sektor primer seperti pertanian.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menempati posisi dominan dengan nilai LQ sebesar 2,21 pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi yang kuat. Kontribusi sektor ini terhadap total PDRB Kabupaten jauh lebih besar dibandingkan kontribusinya di tingkat provinsi. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor primer, yang lazim dijumpai di daerah kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang besar namun minim aktivitas industri hilir.

Selain sektor pertanian, sektor Konstruksi juga menunjukkan karakteristik sebagai sektor basis dengan nilai LQ sebesar 1,54 pada tahun 2025. Ini dapat mengindikasikan adanya aktivitas pembangunan infrastruktur yang cukup aktif selama periode 2021–2025. Besarnya kontribusi sektor konstruksi juga dapat mencerminkan proyek-proyek pembangunan yang sedang digencarkan oleh pemerintah daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, jalan, atau sarana transportasi yang penting bagi wilayah kepulauan. Sektor ketiga yang masuk kategori basis adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan LQ sebesar 1,23. Hal ini lazim terjadi di daerah-daerah tertinggal atau 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), di mana sektor pemerintahan menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah masih menjadi salah satu pendorong utama kegiatan ekonomi lokal, sedangkan ada 14 sektor non basis yang mempunyai nilai rata-rata LQ dari tahun 2021-2025 lebih kecil dari 1. Sektor-sektor ini disebut sektor non basis sebab sektor ini mempunyai nilai rata-rata LQ dari tahun 2021-2025 lebih kecil dari 1. Dengan makna bahwa sektor-sektor tersebut mempunyai kontribusi yang lebih kecil perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sektor-sektor tersebut adalah 1) Pertambangan dan Penggalian, 2) Industri Pengolahan, 3) Pengadaan Listrik dan Gas, 4) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 6) Transportasi dan Pergudangan, 7) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 8) Informasi dan Komunikasi, 9) Jasa Keuangan dan Asuransi, 10) Real Estate, 11) Jasa Perusahaan, 12) Jasa Pendidikan, 13) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta 14) Jasa lainnya.

Tabel 2.11
Hasil Perhitungan *Location Quotient* PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021–2025

No.	Sektor	Tahun 2021 LQ	Tahun 2022 LQ	Tahun 2023 LQ	Tahun 2024 LQ	Tahun 2025 LQ	Rata-rata LQ	Ket.
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,17	2,16	2,21	2,23	2,21	10,97	Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,40	0,41	0,41	0,41	0,42	2,06	Basis
C	Industri Pengolahan	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	1,61	Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,25	0,26	0,26	0,26	0,27	1,29	Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	0,22	Non Basis
F	Konstruksi Transportasi dan Pergudangan	1,46	1,51	1,52	1,51	1,54	7,55	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,85	0,85	0,85	0,86	0,87	4,28	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,64	0,69	0,62	0,63	0,65	3,23	Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,68	0,65	0,67	0,68	0,68	3,36	Basis

No.	Sektor	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Rata-rata LQ	Ket.
		2021	2022	2023	2024	2025		
		LQ	LQ	LQ	LQ	LQ		
J	Informasi dan Komunikasi	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,81	Non Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,20	Non Basis
L	Real Estate	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	2,40	Basis
M, N	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,54	Non Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,24	1,23	1,23	1,20	1,23	6,12	Basis
P	Jasa Pendidikan	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	1,40	Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	2,24	Basis
R,S	Jasa Lainnya	0,48	0,47	0,48	0,49	0,49	2,41	Basis
	Produk Domestik Regional Bruto					-	-	
						10,24	10,24	

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Tipologi Klassen merupakan suatu metode untuk menentukan *output* sektor tertentu yang dihasilkan suatu daerah berdasarkan pertumbuhan dan kontribusi *output* sektor tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan dan kontribusi *output* rata-rata suatu wilayah. Tipologi Klassen mengklasifikasikan sektor berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kontribusi terhadap nilai rata-rata output pada suatu daerah. Kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Sektor yang berada pada kuadran I (sektor maju) disebut sektor unggulan. Pendekatan Tipologi Klassen dihitung berdasarkan pertumbuhan (Si) dan kontribusi (Ski) masing-masing sektor pembentuk PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut lapangan usaha Analisis Klassen adalah alat analisis ekonomi regional yang dipakai untuk memetakan posisi suatu daerah dibanding daerah lain yang lebih luas, analisis ini membagi sektor atau wilayah berdasarkan 4 kuadran berdasarkan 2 indikator yaitu

1. Indikator Utama

   Laju Pertumbuhan seberapa cepat sektor/ daerah tumbuh dibanding rata-rata acuan, Kontribusi/ pangsa seberapa besar peran sektor/ daerah disbanding total acuan

2. Kuadran Klassen
   1. Kuadran I yaitu Daerah Maju dan Tumbuh Cepat dengan ciri (Pertumbuhan> Wilayah Acuan + Kontribusi/share $\geq$ Wilayah Acuan), artinya Sektor/ daerah sudah mapan dan masih berkembang pesat, jadi primadona bagi daerah
   2. Kuadran II : Daerah Maju tapi Tertekan dengan ciri (Pertumbuhan < Wilayah Acuan + Kontribusi/ Share $\geq$ Wilayah Acuan), artinya sudah besar kontribusinya, tapi mulai melambat. Perlu direvitalisasi biar tidak stagnan sektor pertumbuhan ekonomi suatu daerah
   3. Kuadran III : daerah Berkembang Cepat/ Potensial dengan ciri : (Pertumbuhan > Wilayah Acuan + Kontribusi/ Share < Wilayah acuan), artinya masih kecil perannya, tapi tumbuh kencang, sektor/ daerah yang potensial untuk di dorong
   4. Kuadran IV : Daerah Relatif Tertinggal dengan ciri : Pertumbuhan < Wilayah Acuan + Kontribusi/ Share < Wilayah Acuan), artinya Kontribusinya kecil dan tumbuhnya juga lambat, daerah ini butuh perhatian khusus

Tabel 2.12
Klasifikasi Sektor Unggulan Menurut Tipologi Klassen

Kuadran I	Kuadran II
Sektor Maju (*Developed Sector*) si > s dan ski > sk	Sektor Berkembang (*Stagnant Sector*) si < s dan ski > sk
Kuadran III	**Kuadran IV**
Sektor Potensial (*Depeloping Sector*) si > s dan ski < sk	Sektor Tertinggal (*Under developed Sector*) si < s dan ski< sk

Sjafrizal (2018)

Keterangan :
si : pertumbuhan sektor i dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai
s : rata-rata pertumbuhan seluruh sektor dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai
Ski : kontribusi sektor i terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai
sk : rata-rata kontribusi seluruh sektor terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tabel 2.13
Produk Domestik Bruto/ Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Rp.)
Di Provinsi Sumbar Tahun 2021-2025

No.	Sektor	Rata-Rata Mentawai Kepulauan Mentawai Yij/Yj	Rata-Rata Sumbar Sumatera Barat Yi/Y	Rata-rata LQ
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,39	1,09	1097
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.08	0,19	2,06
3.	Industri Pengolahan	0,15	0,46	1,61
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,00	1,29
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,22
6.	Kontsruksi Transportasi dan Pergudangan	0,69	0,46	7,55
7.	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,71	0,84	4,28
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,34	0,52	3,23
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,04	0,06	3,36
10.	Informasi dan Komunikasi	0,07	0,44	0,81
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,01	0,15	0,20
12.	Real Estate	0,05	0,10	2,40
13.	Jasa Perusahaan	0,00	0,02	0,54
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,34	0,28	6,12
15.	Jasa Pendidikan	0,06	0,21	1,40
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,04	0,08	2,24

No.	Sektor	Rata-Rata Mentawai	Rata-Rata Sumbar	Rata-rata
		Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	LQ
		Yij/Yj	Yi/Y	
17.	Jasa Lainnya	0,06	0,09	2,41
	PDRB	1,00	1,83	-
				10,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ) tahun 2021–2025 pada tabel 2.13 diatas prinsip dasarnya adalah:

LQ > 1 → sektor basis (unggulan, memiliki kelebihan dan berpotensi ekspor keluar daerah)

LQ < 1 → sektor non-basis (hanya melayani kebutuhan lokal)

1. Sektor Basis (LQ > 1)

Dari tabel, sektor yang konsisten memiliki nilai LQ di atas 1 adalah:

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Sektor A), nilai LQ berada di kisaran ±2,1 2,2 setiap tahun.

Sektor ini merupakan unggulan utama Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kontribusinya jauh lebih besar dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Barat

Menjadi penggerak ekonomi daerah dan berpotensi "mengekspor" hasil ke luar wilayah, layak menjadi prioritas pembangunan (misalnya penguatan perikanan, perkebunan, dan hasil hutan)

2. Sektor Non-Basis (LQ < 1)

Sebagian besar sektor lainnya memiliki LQ < 1,

contohnya: Pertambangan dan Penggalian

Sektor-sektor turunan lainnya (industri, jasa, dll – jika mengikuti struktur umum PDRB)

Peran sektor ini di Mentawai lebih kecil dibandingkan rata-rata provinsi, kegiatannya masih berorientasi memenuhi kebutuhan local, belum menjadi keunggulan kompetitif daerah, masih perlu pengembangan dan investasi jika ingin ditingkatkan

3. Kesimpulan Utama

Struktur ekonomi Mentawai sangat bergantung pada sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan, terjadi ketimpangan struktur ekonomi, karena hanya sedikit sektor yang menjadi basis, strategi pembangunan yang bisa diambil:

a. Memperkuat sektor basis (hilirisasi hasil pertanian/perikanan)
b. Mengembangkan sektor non-basis agar lebih kompetitif (diversifikasi ekonomi)

Analisis Sektor Basis dan Non-Basis Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021–2025

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2021–2025, dapat diidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang tergolong sebagai sektor basis dan non-basis.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan secara konsisten memiliki nilai LQ lebih besar dari 1 (LQ > 1) dengan kisaran nilai di atas 2 setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Tingginya nilai LQ mencerminkan bahwa kontribusi sektor ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif lebih besar dibandingkan kontribusinya pada tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, sektor ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan

internal daerah, tetapi juga berpotensi untuk melayani permintaan dari luar wilayah (ekspor antar daerah).

Di sisi lain, sebagian besar sektor ekonomi lainnya menunjukkan nilai LQ kurang dari 1 (LQ < 1), sehingga dikategorikan sebagai sektor non-basis. Kondisi ini mencerminkan bahwa peran sektor-sektor tersebut dalam perekonomian daerah masih relatif terbatas dan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan domestik. Rendahnya nilai LQ juga menunjukkan bahwa tingkat spesialisasi sektor-sektor tersebut di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Secara umum, struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode analisis masih didominasi oleh sektor primer, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap satu sektor basis ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih belum terdiversifikasi secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah ke depan perlu difokuskan pada penguatan sektor basis melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, serta pengembangan hilirisasi komoditas unggulan. Selain itu, diperlukan upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor non-basis agar lebih kompetitif, melalui peningkatan investasi, penguatan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, diharapkan tercipta struktur ekonomi yang lebih seimbang, tangguh, dan berkelanjutan.

Tabel 2.14
Klasifikasi Sektor-Sektor Pembangunan Berdasarkan Tipologi Klassen
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Pertumbuhan / Kontribusi	Pertumbuhan di atas Rata – Rata (si > s)	Pertumbuhan di Bawah Rata – Rata (si < s)
Kontribusi di Atas Rata – Rata (ski > k)	SEKTOR MAJU	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Konstruksi Transportasi dan Pergudangan 4. Transportasi dan Pergudangan 5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib SEKTOR BERKEMBANG
Kontribusi di Bawah Rata – Rata (ski < k)	1. Industri Pengolahan 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Informasi dan Komunikasi 4. Jasa Keuangan dan Asuransi 5. Real Estate 6. Jasa Perusahaan 7. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8. Jasa lainnya SEKTOR POTENSIAL	1. Pertambangan dan Penggalian 2. Pengadaan Listrik dan Gas 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4. Jasa Pendidikan SEKTOR TERTINGGAL

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (Data Diolah)

Terdapat 8 sektor yang berada pada Kuadran III atau sektor yang terkategori Potensial. Sektor-sektor ini disebut potensial sebab sektor-sektor

ini pertumbuhan di atas rata-rata namun kontribusinya di bawah rata-rata. Sektor-sektor tersebut adalah 1) Industri Pengolahan, 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 3) Informasi dan Komunikasi, 4) Jasa Keuangan dan Asuransi, 5) Real Estate, 6) Jasa Perusahaan, 7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan 8) Jasa lainnya. Kemudian, terdapat 4 sektor yang berada pada Kuadran IV atau sektor yang terkategori Tertinggal. Sektor ini terkategori tertinggal karena sektor ini mempunyai pertumbuhan dan kategori di bawah rata-rata. Sektor-sektor tersebut adalah 1) Pertambangan dan Penggalian, 2) Pengadaan Listrik dan Gas, 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan 4) Jasa Pendidikan.

Analisis *Shift-Share* merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengukur perubahan (*shift*) dan kontribusi (*share*) sektor atau sub sektor terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pendekatan ini menyoroti tiga komponen utama yang memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi daerah:

1. *National Share* (*Regional Share*): Menggambarkan pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional atau luar daerah terhadap sektor-sektor di suatu wilayah.
2. *Proportionality Shift*: Menunjukkan sejauh mana sektor di daerah memiliki kesamaan pola pertumbuhan dengan sektor yang sama di tingkat nasional. Sektor yang tumbuh lebih cepat secara nasional cenderung menjadi sektor unggulan.
3. *Differential Shift* (*Competitiveness Effect*): Menggambarkan keunggulan kompetitif atau kekhasan lokal, seperti ketersediaan lahan subur, potensi sumber daya alam, atau kualitas sumber daya manusia, yang membuat suatu sektor tumbuh lebih cepat dibandingkan secara nasional.

Metode *Shift-Share* di dasarkan pada Teori Basis Ekspor (*Export-Based Model*) dan Teori Ekonomi Basis (*Economic-Based Model*), yang menekankan pentingnya potensi ekonomi spesifik daerah sebagai penggerak utama pembangunan wilayah. Berbeda dengan model pertumbuhan ekonomi seperti Model Solow, yang lebih fokus pada faktor-faktor makro seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi, model *Shift-Share* lebih kontekstual dan aplikatif untuk pembangunan daerah karena mempertimbangkan keunggulan lokal secara langsung. Teknik ini sangat bermanfaat untuk:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik dari pengaruh nasional maupun kekuatan internal daerah;
2. Menentukan sektor dan sub sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif dan daya saing tinggi;
3. Menyusun kebijakan pembangunan ekonomi sektoral dan menentukan arah prioritas pembangunan berbasis potensi unggulan daerah.

Dengan demikian, *Shift-Share analysis* menjadi alat strategis dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis potensi, terutama untuk menggali sektor-sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

Shift-Share dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\Delta e_i = e_{i,t} - e_{i,t-1} = NS_i + PS_i + DS_i$$

Dimana :
Δe_i = Perubahan Nilai Tambah Sektor i
NS_i = National (Regional) Share
PS_i = Proportional Shift
DS_i= Differential Shift

Tabel 2.15
***Shift-Share* PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha**
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020–2024 (Rp.Miliar)

No	Lapangan Usaha	*NSi*	*PSi*	*DSi*	Δe_i
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	252,19	-84,35	44,00	211,84
B	Pertambangan dan Penggalian	8,26	-4,08	3,82	8,00
C	Industri Pengolahan	15,38	-5,28	2,91	13,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	-0,01	0,04	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	-0,00	-0,00	0,02
F	Konstruksi	69,66	-6,83	24,80	87,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	71,66	16,78	4,34	92,78
H	Transportasi dan Pergudangan	39,17	7,45	-37,38	9,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,37	4,03	0,74	8,14
J	Informasi dan Komunikasi	6,88	4,50	0,22	11,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,61	0,20	-0,05	0,76
L	Real Estat	5,04	1,21	-0,43	5,82
M, N	Jasa Perusahaan	0,25	0,05	-0,02	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	36,64	-9,90	-0,60	26,15
P	Jasa Pendidikan	6,16	-1,79	0,42	4,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,63	1,58	0,65	5,86
R,S, T, U	Jasa lainnya	4,03	4,82	1,04	9,89
	Rata-Rata	58,12	-3,98	0,96	55,11

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Dari hasil perhitungan *Shift-Share* pada Tabel 2.15, dapat diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai dari tahun 2020-2024 didukung oleh 2 unsur yaitu :

1. Peran daerah luar (NSi), sebesar Rp.58,12 Miliar
2. Potensi khusus daerah (DSi), sebesar Rp.0,960 Miliar

sebab nilai kedua komponen ini positif.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak didukung oleh Potensi sektoral (PSi) sebab bernilai negatif = -Rp.3,98 Miliar. Dalam teori ekonomi modal dapat direpresentasikan dari investasi. Investasi merupakan mesin bagi percepatan pembangunan suatu daerah. Investasi dapat menyerap lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan dan seterusnya. Investasi yang berkualitas akan dapat meningkatkan kualitas pembangunan itu sendiri. Investasi berkualitas dapat dilihat dari seberapa besar efisiensi investasi tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa yang mampu diproduksi.

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 601.135 ha terdiri atas kawasan hutan lindung seluas 492.294,38 ha sekitar 81,90 persen dari luas wilayah, sedangkan 108.840,62 ha atau sekitar 18,10 persen adalah kawasan Area Penggunaan Lain (APL), memiliki potensi pengembangan wilayah Kepulauan Mentawai yang dapat dikembangkan melalui pengembangan kawasan budi daya yang telah ditetapkan antara lain.

1) Kawasan peruntukan hutan produksi.

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi tetap yang merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan

cara tebang pilih maupun cara tebang habis. Kawasan ini terdapat di seluruh kecamatan, dengan luasan 251.305,64 hektar. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang dapat dicadangkan atau diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan diluar sektor kehutanan seperti perkebunan, pertanian, permukiman, industri. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Siberut Barat, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Selatan dengan luasan kurang lebih 54.807,03 hektar.

2) Kawasan peruntukan pertanian.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi sawah dan komoditas tanaman pangan lainnya dengan total luas adalah 24.934,03 ha. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan komoditi sayuran dan buah-buahan dengan total luas adalah 3.740,17 ha. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas lahan adalah 90.818 ha dengan komoditas perkebunan skala kecil atau perkebunan rakyat khas Mentawai yaitu coklat, karet, cengkeh, pala, kelapa, nilam, manau. Kawasan perkebunan rakyat tidak merusak alam dan lingkungan sekitar hutan. Kawasan peruntukan peternakan terdapat di seluruh wilayah daerah dengan memanfaatkan areal pertanian dan perkebunan.

3) Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap di seluruh perairan wilayah daerah dengan pusat perikanan tangkap di Kecamatan Siberut Utara, Tuapejat, Pagai Utara dan Sikakap. Kawasan peruntukan budi daya perikanan terdiri dari budi daya perikanan laut meliputi: Muara Sigep, Malancan, Sirilogui, Saibi Samukop, Saliguma, Malilimok, Katurei (Pulau Siberut), Teraet, Teluk Beriulou, Teluk Pukarajat, Tuapejat (Pulau Sipora), Sikakap dan Betumonga (Pulau Pagai Utara), Pulau Tanopo, Makalo dan Sinaka (Pulau Pagai Selatan). budi daya perikanan darat meliputi: Bosua, Saureinu, Nemnemleleu, (Sipora Selatan), Malancan, Sirilogui, Bojakan, Sotboyak, Muara Sikabaluan, Monganpoula (Siberut Utara), Muara Siberut, Salappak, Maileppet, Muntei, Madobag, Matotonan (Siberut Selatan), Saibi Samukop, Cimpungan (Siberut Tengah), Saumanganya, Betumonga, Silabu (Pagai Utara), Matobe, Taikako (Sikakap), Desa Malakopa dan Desa Bulasat (Pagai Selatan). Kawasan Minapolitan adalah Sikakap dan Muara Siberut (Siberut Selatan). Kawasan pengolahan hasil perikanan memiliki prasarana pendukung, meliputi bagian wilayah Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara dan bagian wilayah Muara Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Muara Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara, Sikakap. Prasarana pendukung kawasan pengolahan hasil perikanan terdiri atas rencana pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Tuapejat dan Sikakap, rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut dan Muara Sikabaluan, dan rencana pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Sikakap.

4) Kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri rumah tangga yang dapat dikembangkan di setiap kecamatan dengan memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

5) Kawasan peruntukkan pertambangan.

Kawasan peruntukkan pertambangan diperuntukkan untuk wilayah pertambangan terdapat di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang memiliki potensi bahan tambang jenis bebatuan (galian C).

6) Kawasan peruntukan pariwisata.

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah terdapat di Pulau Siberut yang meliputi kawasan Madobag dan Matotonan (Siberut Selatan), Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sagulubbek (Siberut Barat Daya), benteng peninggalan Jepang di Sioban (Sipora Selatan). Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat dipulau Siberut yang meliputi kawasan Sigapokna, Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sibudda Oinan (Siberut Tengah), Matotonan dan Madobag (Siberut Selatan), Katurei dan Sagulubbek (Siberut Barat Daya). Kawasan peruntukan pariwisata bahari terdapat di Silabu (Pagai Utara), Sikakap, Malakopa dan Sinakak (Pagai Selatan), Katiet, Bosua, Gobi dan Pulau Siruamata (Sipora Selatan), Mapaddegat, Teluk Pukarajat, Taraet dan Matuptuman (Sipora Utara), Teluk Katurei dan Taileleu (Siberut Barat Daya), Saibi Samukop dan Saliguma (Siberut Tengah), Sirilogui (Siberut Utara), dan Pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan peruntukan ekonomi khusus pariwisata terdapat di Mapaddegat seluas 300 ha, Katiet, Gobi dan Bosua 100 ha, Teluk Katurei 300 ha, Taraet 50 ha, Matutuman Buggei Siata 50 ha. Kawasan peruntukan konservasi budaya terdapat di Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan dan Sakudei Kecamatan Siberut Barat Daya, Simatalu Kecamatan Siberut Barat.

7) Kawasan peruntukan permukiman.

Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan yaitu Muara Siberut (PKW), Tuapejat (PKL), Sikakap (PKLp), Muara Sikabaluan, Saibi Samukop, Pasakiat Taileleu, Saumanganyak, Bulasat, Sido Makmur dan Sioban. Kawasan peruntukan perdesaan yaitu pusat lingkungan pemukiman di setiap dusun diluar kawasan perkotaan dan kawasan hunian tetap (huntap) korban tsunami.

8) Kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, seperti kawasan bandara, kawasan militer AD, AL, kepolisian dan satuan keamanan dan pertahanan lainnya.

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dikelompokkan berdasarkan potensi komoditas/ sumber daya alam dan karakteristik wilayahnya. Beberapa Kawasan pengembangan wilayah, antara lain:

1. Kawasan pertanian, perkebunan/ mandiri pangan

Masyarakat Mentawai dengan mayoritas sumber ekonominya berasal dari sektor primer yaitu pertanian dan perkebunan memiliki berbagai komoditas unggulan sebagai sumber mata pencarian utama antara lain pisang, keladi, sagu, cengkeh, pala, kelapa. Komoditas unggulan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan sangat potensial dilakukan dalam memberikan nilai tambah di setiap produk komoditas unggulan sektor pertanian/ perkebunan. kawasan pengembangan pertanian tanaman pisang pada Desa Monganpoula, Desa

Bulasat, Pengembangan Sagu di Desa Muntei, Desa Madobag. Kawasan pengembangan holtikultura pada Desa Goisoionan, Desa Bukit Pamewa, Desa Sikakap, Desa Matobe. Kawasan pertanian sawah pada Desa Saureinu, Desa Nemnemleleu, Desa Matobe, Desa Saumanganya, Desa Sotboyak. Pembangunan ekonomi pedesaan dengan konsep agribisnis juga dapat dikembangkan dalam pembangunan desa seperti pada kawasan perkebunan cengkeh di Desa Sirilogui, kawasan perkebunan kelapa di Taraet Desa Betumonga dan Desa Sagulubbeg.



Melalui pengembangan pertanian berbasis kawasan tentunya akan memberikan kemudahan dalam hal integrasi dalam hal keterkaitan *input* dan *output* (*backward dan forward linkage*), efektivitas dan efisiensi skala ekonomi tentunya dalam jengka Panjang akan memberi dampak pada pengembangan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta membentuk kemandirian desa dan masyarakat.

2. Kawasan perikanan/kelautan.

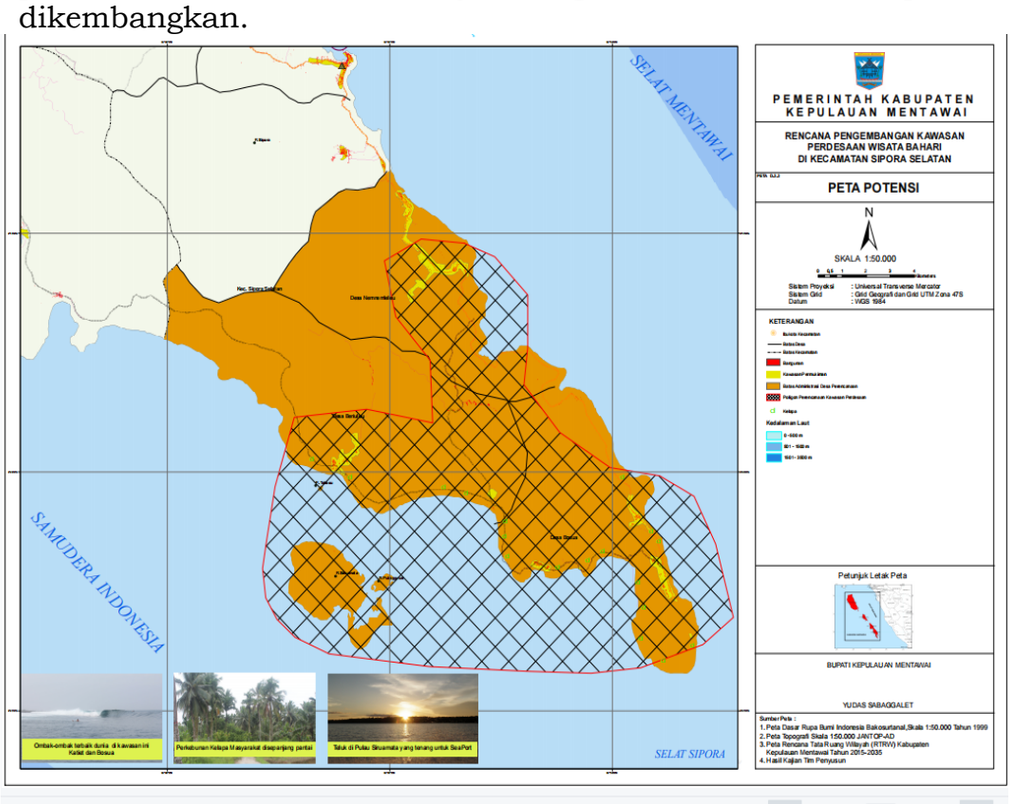
Pembangunan sektor perikanan, kelautan diharapkan dapat dipercepat dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh. Kemudahan atau peluang yang biasanya ada perlu dikembangkan di daerah-daerah pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra-sentra produksi, yang didukung sarana prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan dan sumber daya manusia yang memadai.

Pengembangan kawasan budi daya perikanan laut sangat potensial dikembangkan di kawasan perikanan di Desa Sikakap, Desa Sinaka, Desa Matobe, Desa Sikabaluan, Desa Tuapejat, Desa Muara Siberut. Selain itu juga dengan pembandan kawasan budi daya kepiting bakau, lobster dan udang di kawasan Desa Katurei, Desa Sikakap, Desa Pasakiat Taileleu. Produksi ikan yang melimpah juga potensial untuk pengembangan industri pengolahan ikan asin, ikan asap dan pengalengan ikan di kawasan Desa Sikabaluan Dusun Bose, Desa Sigapokna. Begitu juga dengan potensi pengembangan kawasan budi daya perikanan darat sangat memungkinkan dikembangan pada kawasan di Desa Saureinu, Desa Sido Makmur, Desa Sikakap.




3. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai daerah kepulauan tentunya panorama alam dan lautnya sangat memukau dan potensial untuk dikembangkan.



Sektor pariwisata menjadi unggulan antara lain wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Wisata bahari yang menjadi sangat potensial dikembangkan di Kepulauan Mentawai hampir pada seluruh kawasan pesisir, Namun beberapa lokasi yang menjadi prioritas pengembangan seperti Desa Bosua pada kawasan Katiet, Desa Nemnemleleu, Desa Beriulou.

Arah pengembangan produk dan pariwisata bahari selain *surfing*, *snorkling, diving* juga dikembangkan wisata ekowisata, budaya, kano dan pengembangan kuliner serta akomodasi yang ramah lingkungan, memadai dengan kualitas standar internasional.

Arah pengembangan produk dan pariwisata bahari selain *surfing, snorkling, diving* juga dikembangkan wisata ekowisata, budaya, kano dan pengembangan kuliner serta akomodasi yang ramah lingkungan, memadai dengan kualitas standar internasional.

Zona Wilayah	Aktivitas Pariwisata Bahari
Desa Katurei	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *diving*, *surfing* dan *snorkling* - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Taileleu	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *diving*, *surfing* dan *snorkling* - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Bosua/ Katiet	- Surfing - Diving, snorkling - Sewa peralatan dan perlengkapan *diving*, *surfing* dan *snorkling*
Desa Simalegi	- Surfing - Sewa peralatan surfing
Desa Makalo	- Pemandangan Teluk Makalo - Wisata Fishing Makalo

Wisata Alam dan Wisata Budaya menjadi bagian yang saling melengkapi yang ada di Kepulauan Mentawai. Potensi pengembangannya ada dibeberapa titik di wilayah Pulau Siberut seperti di Desa Matotonan, Desa Madobag, Desa Muntei, dimana kelestarian alam dan budaya masyarakat yang masih terjaga dan tetap eksis hingga saat ini.

Zona Wilayah	Aktivitas pariwisata
Desa Matotonan	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur *tracking* ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *camping*; - Pendidikan dan keterampilan membuat tato dan turuk Mentawai
Desa Madobag	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur *tracking* ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *camping*; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.
Desa Muntei	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur *tracking* ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *camping*; - Pendidikan dan keterampilan membuat tato dan turuk Mentawai.
Desa Maileppet	- Pemandangan alam/bahari - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan *camping*; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.

Berdasarkan peruntukan wilayah dan potensi komoditas/ sumber daya alam serta karakteristik wilayah, rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dikembangkan melalui :

1. Pusat Pertumbuhan Baru *New Growth Center (NGC).*

New Growth Center of Mentawai (NGC) merupakan konsep baru yang akan dilaksanakan untuk masa depan kehidupan sosial ekonomi Mentawai sebagai pusat pelayanan yang akan tumbuh berkembang dari hulu ke hilir yang berkonsekuensi lahirnya investasi dan penciptaan lapangan kerja berdasarkan potensi wilayah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. New Growth Center of Mentawai (NGC) yang akan dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain:

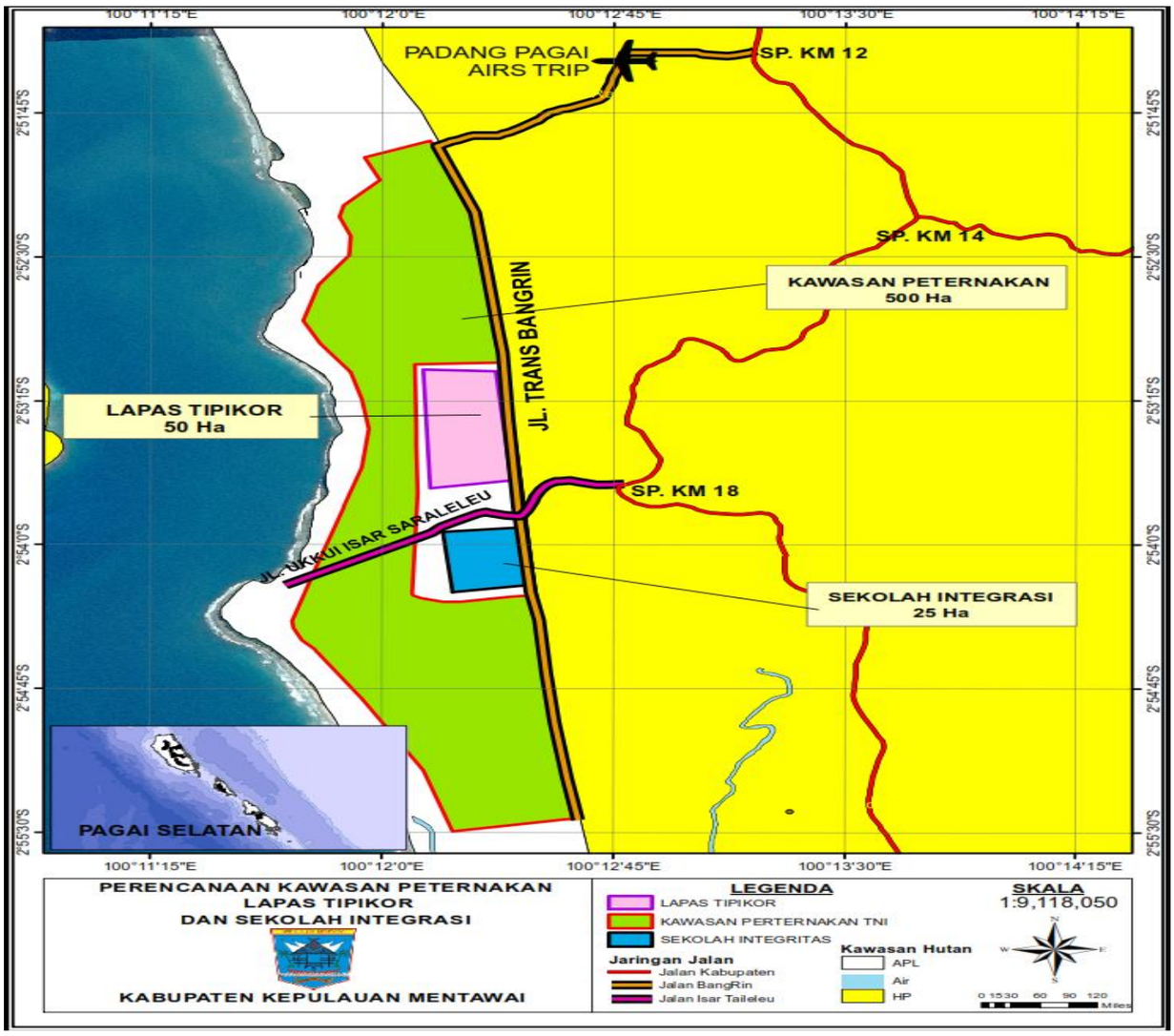
a. NGC 1 Pelayanan publik

Pengembangan kawasan lapas koruptor dan narkoba (luas lahan 50 Ha, target 1000 orang narapidana dan 5000 orang rehabilitasi pecandu narkoba) di Beleraksok.

b. NGC 2 Pelayanan Sosial

Pembangunan Sekolah Terintegrasi di Beleraksok.

Gambar 2.4
Perencanaan Kawasan Peternakan Lapas Tipikor dan Sekolah Terintegrasi



c. NGC 3 Kawasan Ekonomi

a. Pusat pertanian kelapa dan pengolahan (pembibitan dan penanaman di Sikakap Pagai Utara dan Pagai Selatan, Sigapokna, Pasakiat Taileleu, Sagulubbeg, Taraet, Pukarayat, Betumonga, Tuapejat.
b. Pusat pengembangan pisang dan pengolahan (pembibitan dan penanaman) di Bulasat.
c. Pusat pengembangan sapi dan domba rakyat Beleraksok Pagai Selatan.
d. Pusat pengembangan ikan kerapu, lobster, rumput laut, kepiting bakau dan ikan tuna, pabrik pengalengan ikan Sikakap.
e. Pusat pengembangan wisata bahari (surfing dunia) Katiet, Silabu.
f. Pusat pengembangan wisata budaya dan alam Siberut Selatan (Muntei, Madobag, Matotonan)
g. Pusat pengembangan galangan kapal Malancan
h. Pusat Pengembangan Kawasan Sagu dan Pengolahan di Muntei, Madobag, Subelen.

i. Pusat Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan di Bose Desa Muara Sikabaluan, Saliguma, Maileppet, Muara Siberut, Katurei, Tuapejat, Matobe Sipora Selatan, Pasapuat Desa Saumanganya, Sikakap, Taikako, Makalo, Aban Baga Desa Sinaka.

2. Pengembangan Ekonomi Pulau Siberut Berbasis Kawasan Hutan

a. Hasil Hutan Bukan Kayu
   Fokus pada komoditas bernnilai tanpa menebang hutan, contohnya Madu Hutan, Rotan, Getah Damar, Sagu Hutan.
b. Agroforestry
   Model kebun campuran yang meniru hutan alami, contohnya Sagu + pisang + keladi + tanaman obat, kakao dibawah naungan pohon.
c. Ekowisata Hutan Dan Budaya
   Tracking hutan Siberut, wisata budaya Uma Mentawai, Observasi satwa endemik.
d. Jasa Lingkungan (Karbon Ekonomi)
   Pemanfaatan hutan sebagai penyerap karbon, contohnya karbon kredit.
e. Perikanan Sungai Dan Hutan
   Budidaya ikan air tawar alami, sistem kolam berbasis hutan.

3. Kawasan Hilirisasi Sektor Unggulan

a. Kawasan Sentra Produksi Pisang Hilirisasi Industri Pengolahan Tepung Pisang di Muara Sikabaluan, Monganpoula, Sirilanggai (Kec. Siberut Utara), Desa Bulasat (Kec, Pagai Selatan).
b. Kawasan Sentra Produksi Kelapa Hilirisasi Industri Terpadu Pengolahan Kelapa di Polaga (Logpon) Sikakap, Pagai Selatan Sepanjang Pantai Timur Pulau Pagai Selatan (4.300 Ha).
c. Kawasan Sentra Produksi Cengkeh Hilirisasi Bibit Perkebunan (Cengkeh Organik) di Pasakiat Taileleu, Tuapejat.

4. Kawasan Pusat Pertumbuhan antar Pulau

a. Kawasan Sentra Produksi Pisang Hilirisasi Industri Pengolahan Tepung Pisang di Muara Sikabaluan (Kec. Siberut Utara) dan Desa Malakopa (Kec, Pagai Selatan), KM 37.
b. Kawasan Sentra Produksi Kelapa Hilirisasi Industri Terpadu Pengolahan Kelapa di Polaga (Logpon) Sikakap, Pagai Selatan Sepanjang Pantai Timur Pulau Pagai Selatan (4.300 Ha).
c. Kawasan Pusat Administatif Tuapejat
d. Kawasan Destinasi Pariwisata Ibukota Surfing Dunia BOKASA
e. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Siberut.

5. Peningkatan Konektivitas dan Logistik Konektivitas arus barang dan orang

a. Akses transportasi laut antar pulau menghubungkan 3 pulau Mentawai (Sikakap - Pasapuat – Sao – Tuapejat – Mabukkuk - Muara Siberut - Muara Sikabaluan).
b. Akses transportasi laut Mentawai-Padang (Padang-Sikakap, Padang-Polaga (industry kelapa), Padang-Tuapejat, Padang-Muara Siberut, Padang-Sikabaluan).
c. Akses transportasi laut Mentawai-Bengkulu, Mentawai-Nias

6. 10 Cikal Bakal Kota

a. Mentawai Boulevard, Tuapejat-Mapadegat-Berkat.
b. BOKASA, Bosua-Katiet-Sao (Destinasi Wisata Surfing Dunia).
c. Mentawai Bay, KEK Pariwisata Taileleu-Peipei.
d. Berkat Waterfront City (Dusun Berkat Desa Sikakap).

e. Kawasan Toleransi Beragama Pulau Pagai.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Jumlah 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana terhadap bahaya tsunami. Dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak paling besar.

Tabel 2.16 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang Ekstrem dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir, bencana gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan tingkat bahaya sedang terhadap bencana kekeringan. Indeks bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.16
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

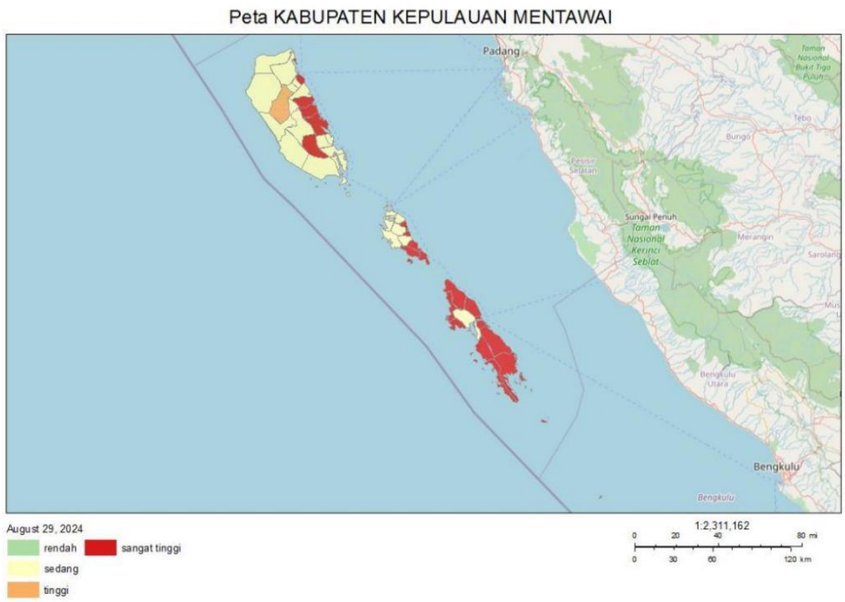
No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi
2	Gempa Bumi	Tinggi
3	Tsunami	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Sedang
5	Tanah Longsor	Tinggi
6	Banjir	Tinggi
7	Kekeringan	Sedang
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

Sumber: Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2025

Merujuk kepada Sistem Informasi Data dan Indeks Kerentanan (SIDIK) Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukan bawah Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap tingkat kerentanan berkategori sedang. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang memengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya adaptasi.

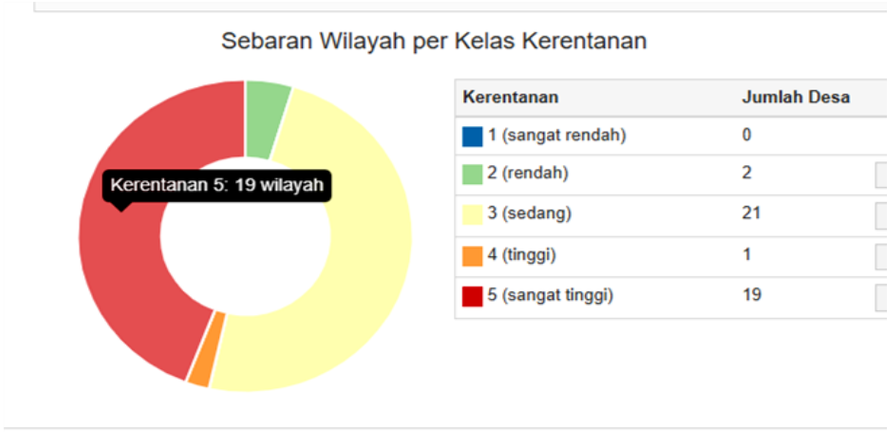
Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Kondisi kerentanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 2.5
Peta Sidik Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber : Sidik KLHK, 2024

Adapun sebaran per kelas kerentanan disajikan pada chart berikut:



Berdasarkan gambar, terdapat 19 desa yang memiliki kerentanan sangat tinggi terhadap perubahan iklim, 1 desa kategori tinggi dan 21 desa kategori sedang serta 2 desa kategori rendah. Agar desa ini keluar dari kategori rentan maka indikator tersebut dapat intervensi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut disajikan daftar desa dengan tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim.

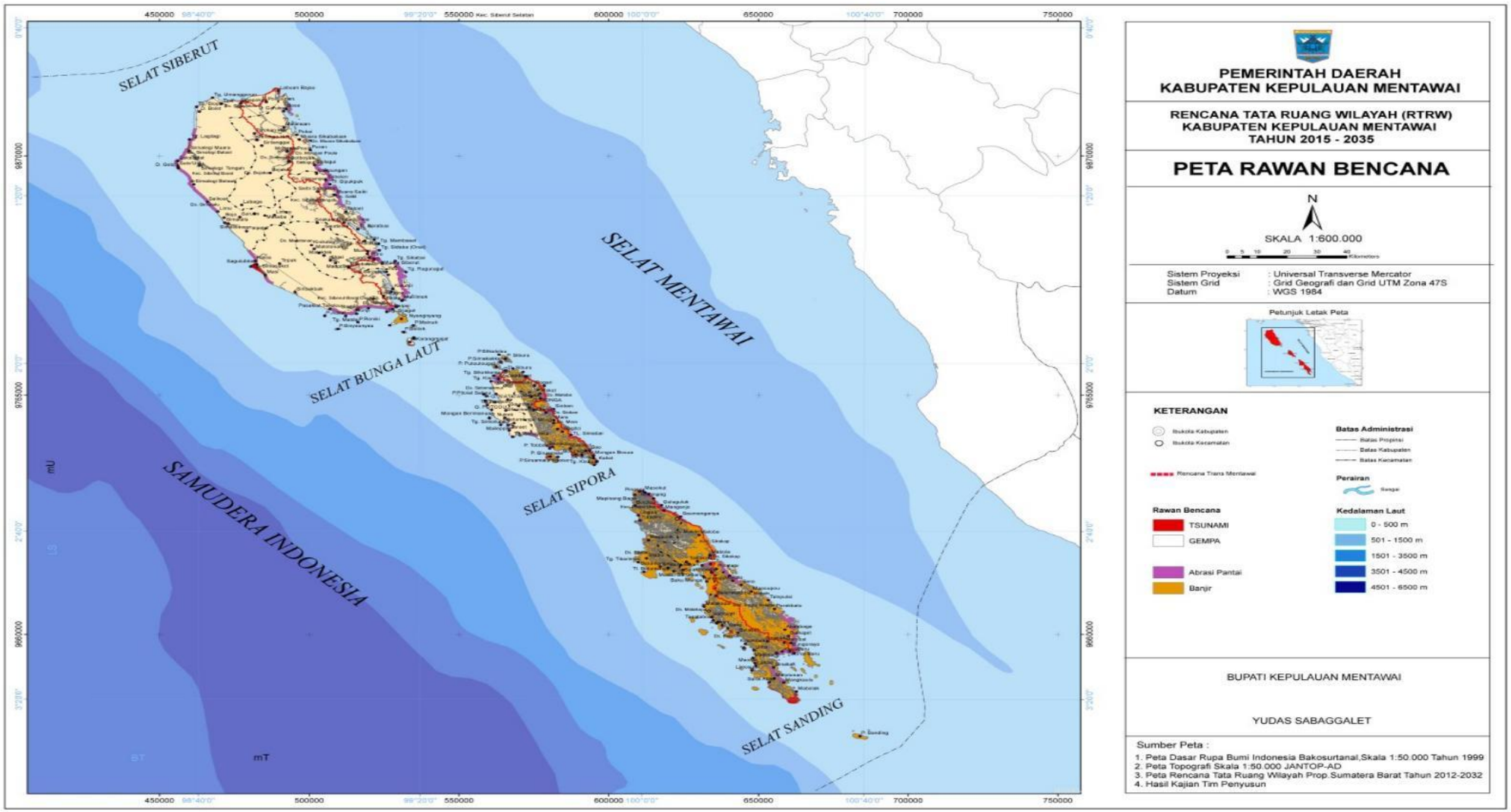
Tabel 2.17
Tingkat Kerentanan Desa Terhadap Perubahan Iklim, 2024

No.	Kecamatan	Desa	Indeks Kapasitas Adaptif	Indeks Keterpaparan dan Sensivitas	Tingkat Kerentanan
1	PAGAI SELATAN	BULASAT	0.25472	0.678	5
2	PAGAI SELATAN	SINAKA	0.27385	0.5924	5
3	PAGAI SELATAN	MAKALO	0.22351	0.5423	5
4	PAGAI SELATAN	MALAKOPA	0.38991	0.8095	5
5	SIKAKAP	TAIKAKO	0.3572	0.5903	3
6	SIKAKAP	SIKAKAP	0.37473	0.6379	5

No.	Kecamatan	Desa	Indeks Kapasitas Adaptif	Indeks Keterpaparan dan Sensivitas	Tingkat Kerentanan
7	SIKAKAP	MATOBE	0.37626	0.6308	5
8	PAGAI UTARA	SAUMANGANYA	0.32312	0.7528	5
9	PAGAI UTARA	SILABU	0.33681	0.6261	5
10	PAGAI UTARA	BETUMONGA	0.3125	0.6938	5
11	SIPORA SELATAN	BOSUA	0.23255	0.5339	5
12	SIPORA SELATAN	NEMNEMLELEU	0.29037	0.5826	5
13	SIPORA SELATAN	BERIULOU	0.27194	0.5279	5
14	SIPORA SELATAN	MARA	0.34448	0.4594	3
15	SIPORA SELATAN	SIOBAN	0.36329	0.6684	5
16	SIPORA SELATAN	SAUREINU	0.35092	0.5348	3
17	SIPORA SELATAN	MATOBE	0.31895	0.6119	5
18	SIPORA UTARA	BETUMONGA	0.42048	0.6594	3
19	SIPORA UTARA	GOISOOINAN	0.452	0.5064	3
20	SIPORA UTARA	BUKIT PAMEWA	0.58744	0.6822	2
21	SIPORA UTARA	SIPORA JAYA	0.49971	0.4522	3
22	SIPORA UTARA	SIDO MAKMUR	0.5954	0.6547	2
23	SIPORA UTARA	TUAPEJAT	0.49815	0.4112	3
24	SIBERUT SELATAN	MADOBAG	0.29472	0.5988	5
25	SIBERUT SELATAN	MUARA SIBERUT	0.40092	0.6467	3
26	SIBERUT SELATAN	MAILEPPET	0.55085	0.6327	3
27	SIBERUT SELATAN	MUNTEI	0.46316	0.5081	3
28	SIBERUT SELATAN	MATOTONAN	0.35085	0.4328	3
29	SEBERUT BARAT DAYA	PASAKIAT TEILELEU	0.44493	0.4116	3
30	SEBERUT BARAT DAYA	KATUREI	0.41428	0.4899	3
31	SEBERUT BARAT DAYA	SAGULUBBEG	0.43912	0.5513	3
32	SIBERUT TENGAH	SALIGUMA	0.25713	0.5598	5
33	SIBERUT TENGAH	SAIBI SAMUKOP	0.29675	0.6439	5
34	SIBERUT TENGAH	CIMPUNGAN	0.20406	0.6146	5
35	SIBERUT UTARA	SIRILOGUI	0.34429	0.4569	3
36	SIBERUT UTARA	MUARA SIKABALUAN	0.35557	0.6084	5
37	SIBERUT UTARA	MONGAN POULA	0.31383	0.5174	3
38	SIBERUT UTARA	SOTBOYAK	0.48841	0.4772	3
39	SIBERUT UTARA	BOJAKAN	0.29865	0.4404	4
40	SIBERUT UTARA	MALANCAN	0.38069	0.4876	3
41	SIBERUT BARAT	SIMATALU	0.37616	0.4354	3
42	SIBERUT BARAT	SIMALEGI	0.41517	0.6579	3
43	SIBERUT BARAT	SIGAPOKNA	0.41587	0.6094	3

Sumber : Sidik KLHK, 2024

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana

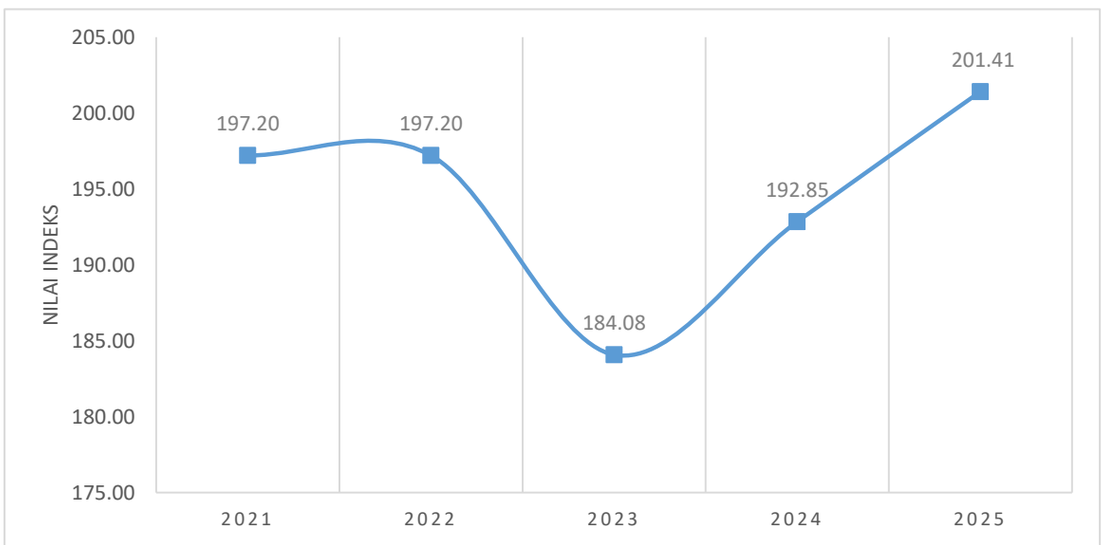


Sebagai daerah dengan potensi bencana yang besar, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berupaya melakukan usaha-usaha mitigasi bencana untuk mengurangi dampak negatif dari setiap bencana yang terjadi. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu informasi/kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasional penanggulangan bencana.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu dari 18 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan tsunami (Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral). Tumbukan antara dua lempeng besar yakni Lempeng Samudera Hindia-Australia dengan Lempeng Benua Asia menyebabkan terbentuknya patahan sepanjang 1.650 km di pantai barat Sumatera, yang disebut dengan Mentawai Fold Zone. Tumbukan yang terjadi dapat menimbulkan gempa yang berpotensi terjadinya tsunami. Kawasan rawan tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir Kepulauan Mentawai beserta pulau- pulau kecil lainnya, yang dapat dikelompokan menjadi tiga kategori zona kerawanan yaitu:

a. Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.
b. Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 – 15 m dpl, dengan kemiringanlereng cukup terjal.
c. Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 — 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.

Gambar 2.7
Perkembangan Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber: IRBI BNPB

Sumber : IRBI BNPB

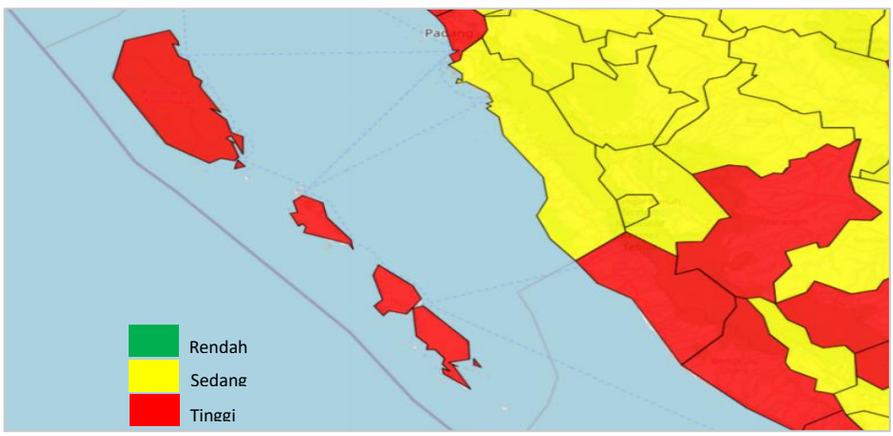
Perkembangan indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2021-2025 menunjukkan tren yang relatif stagnan pada tiga tahun pertama, yaitu tetap berada pada angka 197,20 dari tahun 2021 hingga 2022. Perbaikan signifikan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan penurunan indeks menjadi 184,08, sebelum kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 192,85 dan tahun 2025 menjadi 201,41, yang merupakan nilai tertinggi sepanjang periode pengamatan. berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh skor 201,41, menempatkannya dalam kategori risiko

tinggi di peringkat ke-18 secara nasional dan peringkat ke-5 di Sumatera Barat.

Peningkatan nilai IRBI pada tahun 2024-2025 perlu menjadi perhatian serius, karena semakin tinggi nilai indeks risiko bencana menunjukkan semakin besarnya tingkat ancaman, keterpaparan penduduk dan aset, serta kebutuhan penguatan kapasitas penanggulangan bencana daerah. Penurunan angka pada tahun 2023 sebelumnya menjadi indikasi adanya upaya dan kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi bencana melalui penguatan kapasitas, kepedulian, dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana, namun tren tersebut belum berlanjut secara konsisten pada dua tahun berikutnya.

Oleh karena itu, penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana menjadi prioritas utama dalam pembangunan Tahun 2027, melalui pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB) secara berkala, perluasan cakupan sistem peringatan dini (Early Warning System), penguatan jalur dan rambu evakuasi tsunami, peningkatan jumlah Desa Tangguh Bencana, serta penerapan prinsip pembangunan tangguh bencana (disaster resilient development) pada seluruh infrastruktur strategis daerah.

Gambar 2.8
Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023



Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Indonesia (KRBI) BNPB, ancaman utama yang dihadapi adalah gempa bumi dan tsunami akibat letaknya pada zona subduksi pertemuan Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia (Sunda Megathrust) yang membentuk Segmen Mentawai memiliki garis pantai sepanjang 1.402,68 km, terdiri atas gugusan pulau-pulau yang tersebar, serta memiliki luas wilayah sekitar 6.033,76 km². Secara administratif Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan 341 dusun, sehingga sebagian besar pusat permukiman dan aktivitas masyarakat berada di kawasan pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, abrasi pantai, gelombang pasang, serta kebakaran hutan dan lahan pada beberapa lokasi.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh nilai 192,85 dengan kategori risiko tinggi, menempati peringkat ke-18 nasional dan peringkat ke-5 di Provinsi Sumatera Barat. Hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2030 juga menegaskan bahwa daerah ini memiliki 10 jenis potensi

bahaya, dengan tingkat risiko tinggi pada *bencana gempa bumi*, *tsunami*, dan *likuifaksi*, *risiko sedang pada banjir*, *cuaca ekstrem*, *kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan, dan risiko rendah pada tanah longsor dan epidemi/ wabah penyakit.* Penentuan tingkat risiko tersebut dilakukan melalui analisis tiga komponen utama, yaitu tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Tingginya indeks risiko tersebut merupakan akumulasi dari besarnya ancaman, tingginya tingkat keterpaparan penduduk dan aset, serta kapasitas penanggulangan bencana yang masih perlu terus ditingkatkan.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana BNPB, seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat ancaman gempa bumi, sedangkan kawasan pesisir di Kecamatan Siberut Selatan, Siberut Barat Daya, Siberut Utara, Siberut Barat, Siberut Tengah, Sipora Utara, Sipora Selatan, Pagai Utara, dan Pagai Selatan berada pada zona rawan tsunami dengan tingkat risiko yang bervariasi. Desa-desa yang berada di sepanjang garis pantai merupakan wilayah dengan tingkat keterpaparan paling tinggi karena menjadi lokasi permukiman penduduk, pusat pemerintahan, kawasan ekonomi, pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, telekomunikasi, serta infrastruktur transportasi yang berpotensi terdampak apabila terjadi gempa bumi besar yang diikuti tsunami.

Selain penduduk, aset daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi meliputi kantor pemerintahan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, pelabuhan, bandar udara, jaringan jalan, jembatan, instalasi air bersih, jaringan listrik, serta pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang sebagian besar berada di kawasan pesisir. Kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang berbentuk kepulauan juga menyebabkan akses evakuasi dan distribusi logistik pascabencana menjadi lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengembangkan sistem mitigasi melalui penyusunan jalur evakuasi tsunami, pemasangan rambu evakuasi, penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) pada kawasan rawan, penguatan sistem peringatan dini (Early Warning System), penyelenggaraan simulasi kebencanaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan cakupan jalur evakuasi yang memenuhi standar, pembangunan shelter vertikal pada kawasan dengan keterbatasan lokasi evakuasi alami, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung evakuasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027. Setiap pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pelayanan publik, kawasan permukiman, pusat pertumbuhan ekonomi, maupun pengembangan kawasan strategis diarahkan mengacu pada Kajian Risiko Bencana dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pembangunan tidak meningkatkan tingkat kerentanan terhadap bencana. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana juga dilakukan melalui penerapan pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana (disaster resilient infrastructure), perlindungan kawasan lindung pesisir dan hutan, peningkatan kualitas data spasial kebencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan berketahanan terhadap bencana.

Sejalan dengan hal tersebut, pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 melalui penguatan regulasi dan kelembagaan penanggulangan bencana, integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, penguatan sistem kesiapsiagaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana. Upaya tersebut dilaksanakan sesuai tujuh strategi utama penanggulangan bencana yang meliputi penguatan regulasi, perencanaan terpadu, penelitian dan pendidikan, peningkatan kapasitas masyarakat, pengurangan risiko bencana, peningkatan efektivitas penanganan darurat, dan optimalisasi pemulihan pascabencana.

Pengurangan risiko bencana menjadi salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana, perlindungan kawasan lindung pesisir, serta pembatasan pembangunan permukiman baru pada zona dengan tingkat risiko tinggi.

Pengembangan kawasan pesisir dan pariwisata diarahkan menerapkan prinsip build back better dan disaster resilient development**,** yaitu melalui penyediaan jalur evakuasi, ruang evakuasi vertikal, sistem peringatan dini, infrastruktur tahan gempa, serta penyediaan ruang terbuka sebagai kawasan evakuasi. Pengembangan kawasan permukiman diprioritaskan pada lokasi yang aman berdasarkan peta risiko bencana dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, sistem penyediaan air minum, sanitasi, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas pelayanan publik diarahkan memenuhi standar ketahanan terhadap bencana serta menjamin keberlanjutan pelayanan dasar pada saat terjadi keadaan darurat. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik, tetapi juga memperkuat resiliensi Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap ancaman bencana di masa mendatang.

Upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah menjadi hal penting dilakukan terutama dalam pengarusutamaan kebencanaan untuk setiap sektor pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir risiko dan memitigasi dampak bencana bagian penting dalam tahapan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana

Daerah Rawan Tsunami

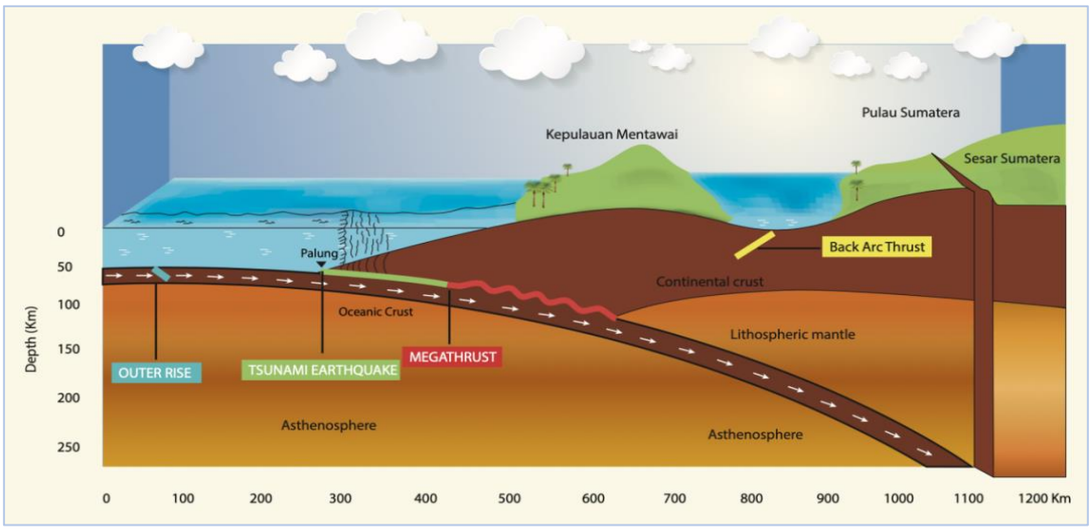
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu dari 18 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan tsunami (Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral). Tumbukan antara dua lempeng besar yakni Lempeng Samudera Hindia-Australia dengan Lempeng Benua Asia menyebabkan terbentuknya patahan sepanjang 1.650 km di pantai barat Sumatera, yang disebut dengan Mentawai Fold Zone. Tumbukan yang terjadi dapat menimbulkan gempa yang berpotensi terjadinya tsunami. Kawasan rawan tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir Kepulauan Mentawai beserta pulau- pulau kecil lainnya, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori zona kerawanan yaitu:

a. Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang

pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.

b. Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 – 15 m dpl, dengan kemiringanlereng cukup terjal.
c. Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 — 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.

Gambar 2.9
Proses Terjadinya Gempa Bumi Tektonik



Salah satu bencana yang mengancam kehidupan masyarakat Mentawai adalah gempa bumi Zona Megathrust Mentawai-Siberut yang menjadi salah satu zona tumbukan lempeng yang terletak di sepanjang batas barat Pulau Sumatera, tepatnya barat Kepulauan Mentawai dengan kedalaman dangkal. Zona Megathrust Mentawai-Siberut ini merupakan hasil dari aktivitas subduksi atau pergerakan Lempeng Indo-Australia ke arah utara dan menyusup di bawah Lempeng Eurasia.

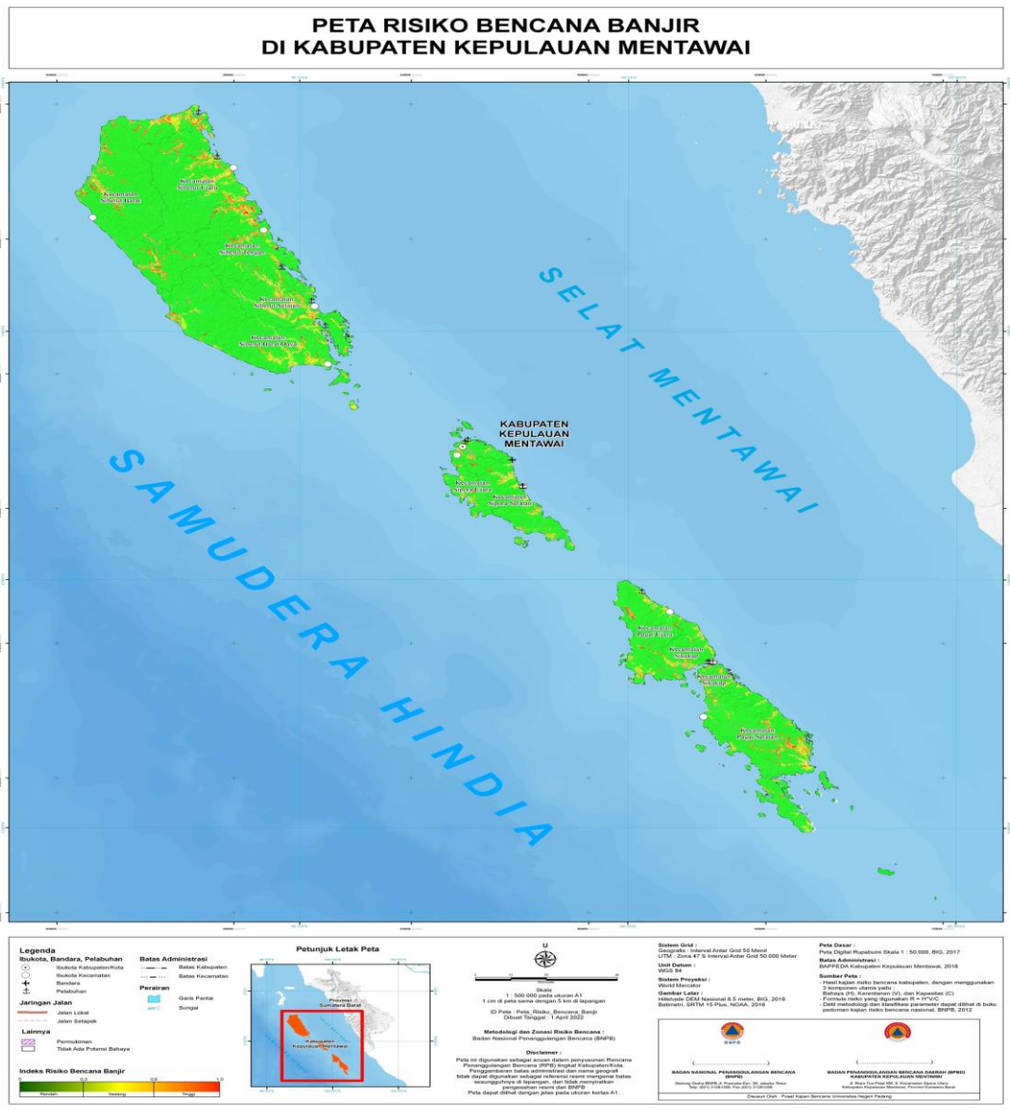
Tabel 2.18
Luas Bahaya dan Penduduk Terpapar Tsunami per Kecamatan

No	Kecamatan	Bahaya Tinggi (Ha)	Total Luas (Ha)	Terpapar Kelas Tinggi (Jiwa)	Kelas Risiko
1	Pagai Selatan	21.397	30.269	4.313	Tinggi
2	Pagai Utara	13.107	18.780	4.767	Tinggi
3	Siberut Barat	15.156	23.552	5.059	Tinggi
4	Siberut Barat Daya	22.998	31.097	4.878	Tinggi
5	Siberut Selatan	4.462	7.173	5.642	Tinggi
6	Siberut Tengah	10.723	15.035	5.048	Tinggi
7	Siberut Utara	9.528	15.786	4.831	Tinggi
8	Sikakap	8.629	12.628	7.461	Tinggi

No	Kecamatan	Bahaya Tinggi (Ha)	Total Luas (Ha)	Terpapar Kelas Tinggi (Jiwa)	Kelas Risiko
9	Sipora Selatan	12.701	17.383	7.498	Tinggi
10	Sipora Utara	11.118	14.602	7.636	Tinggi
	Kab. Kep. Mentawai	**129.819**	**186.305**	**57.133**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai berbasis InaRISK, diolah 2025.

Gambar 2.10
Peta Risiko Bencana Tsunami



Gempa Bumi

Seluruh 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada kelas risiko tinggi terhadap ancaman gempa bumi, dengan total luasan risiko tinggi mencapai 574.063 Ha dari total 603.376 Ha wilayah kabupaten (95,1%). Potensi penduduk terpapar gempa bumi tercatat sebesar 88.389 jiwa, termasuk di dalamnya 268 jiwa penduduk difabel, 5.234 jiwa penduduk miskin dan 8.114 jiwa kelompok umur rentan. Estimasi total potensi kerugian akibat

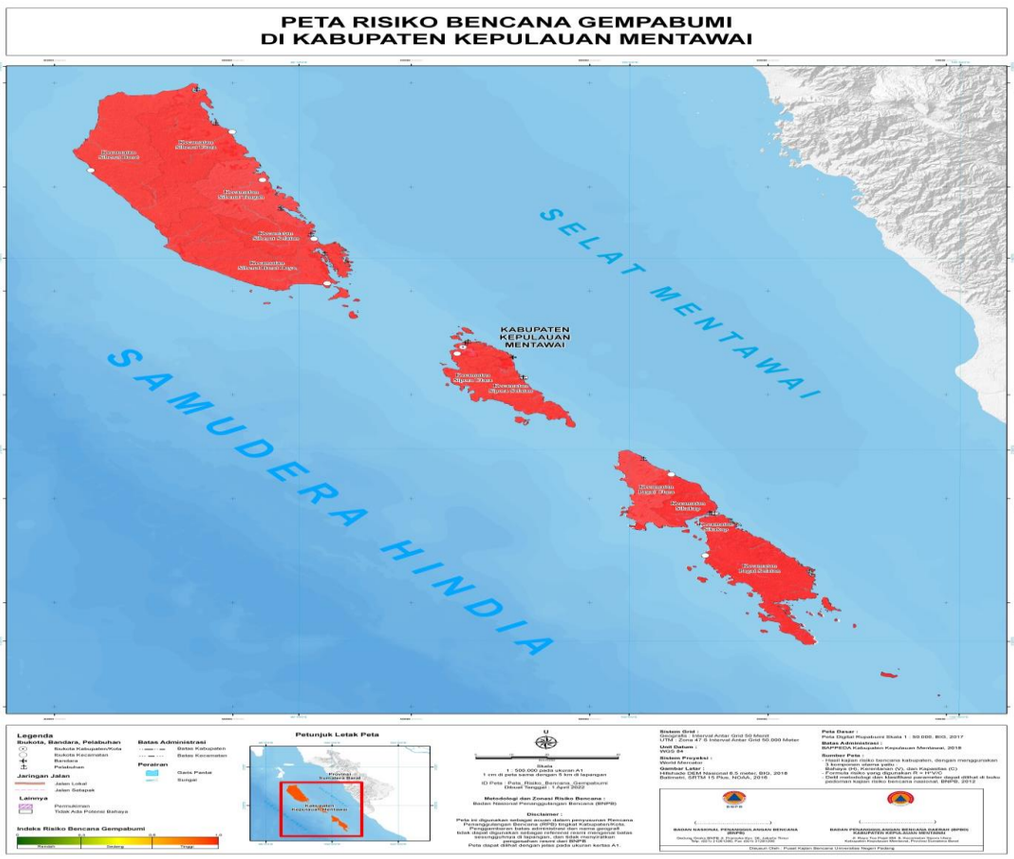
gempa bumi mencapai Rp4,05 triliun, terdiri atas kerugian fisik sebesar Rp2,59 triliun dan kerugian ekonomi sebesar Rp1,45 triliun.

Tabel 2.19
Luas Risiko dan Penduduk Terpapar Gempa Bumi per Kecamatan

No	Kecamatan	Risiko Tinggi (Ha)	Total Luas (Ha)	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelas Risiko
1	Pagai Selatan	80.044	85.128	9.385	Tinggi
2	Pagai Utara	33.971	37.125	6.086	Tinggi
3	Siberut Barat	114.883	116.364	7.875	Tinggi
4	Siberut Barat Daya	94.500	101.383	7.126	Tinggi
5	Siberut Selatan	32.075	32.800	10.039	Tinggi
6	Siberut Tengah	56.610	58.975	7.160	Tinggi
7	Siberut Utara	74.281	78.268	8.351	Tinggi
8	Sikakap	29.420	31.260	10.236	Tinggi
9	Sipora Selatan	31.865	34.833	10.039	Tinggi
10	Sipora Utara	26.414	27.240	12.228	Tinggi
	Kab. Kep. Mentawai	**574.063**	**603.376**	**88.389**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai berbasis InaRISK, diolah 2025.

Gambar 2.11
Peta Multi-Bahaya Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai / InaRISK BNPB, 2025.

Banjir

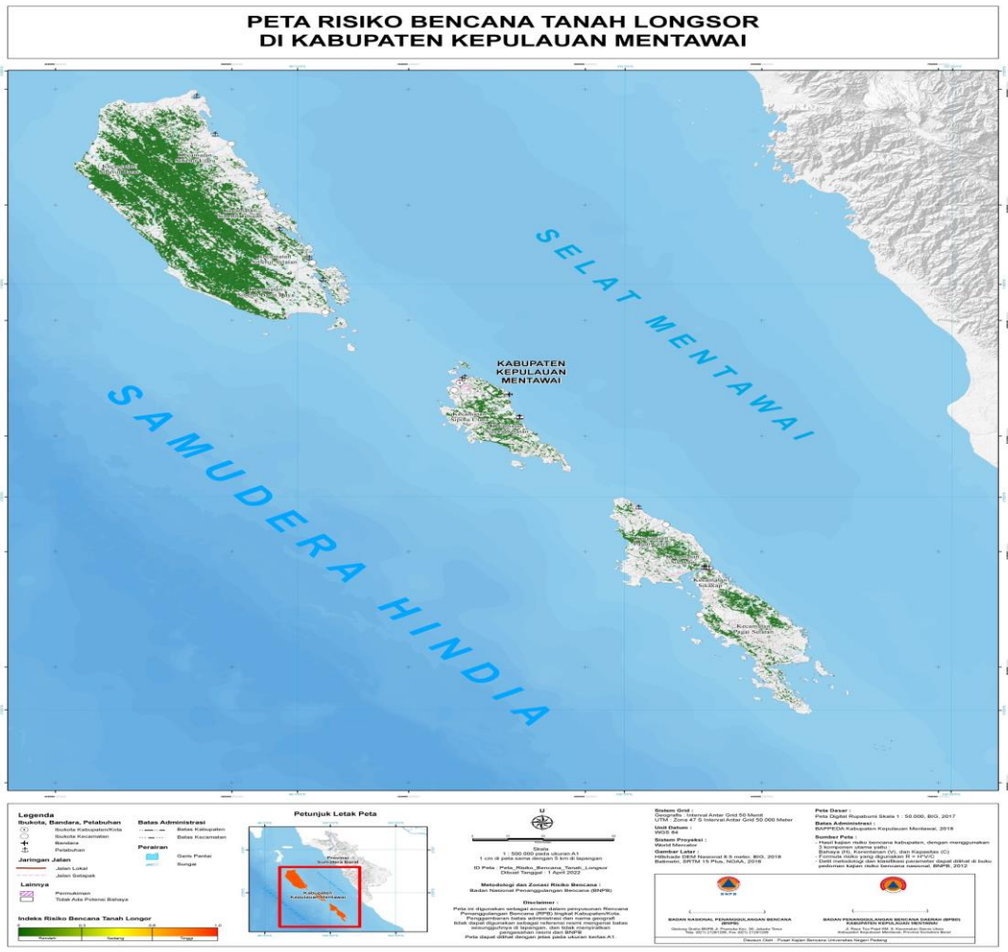
Ancaman banjir tersebar pada seluruh kecamatan dengan total luas bahaya kelas tinggi mencapai 34.945 Ha dari total 69.727 Ha. Potensi penduduk terpapar banjir tercatat sebesar 87.623 jiwa, termasuk 1.188 jiwa penduduk difabel, 5.253 jiwa penduduk miskin dan 8.144 jiwa kelompok umur rentan. Total potensi kerugian banjir diperkirakan Rp529,3 miliar, terdiri atas kerugian fisik Rp227,7 miliar dan kerugian ekonomi Rp171,7 miliar, dengan Kecamatan Siberut Barat Daya sebagai wilayah dengan kerugian tertinggi (Rp115,67 miliar).

Tabel 2.20
Luas Bahaya dan Penduduk Terpapar Banjir per Kecamatan

No	Kecamatan	Bahaya Tinggi (Ha)	Total Luas (Ha)	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelas Risiko
1	Pagai Selatan	4.594	9.133	9.374	Tinggi
2	Pagai Utara	2.184	3.806	6.031	Sedang
3	Siberut Barat	5.109	12.007	7.803	Sedang
4	Siberut Barat Daya	5.247	10.653	7.058	Sedang
5	Siberut Selatan	3.162	6.094	8.533	Sedang
6	Siberut Tengah	4.250	7.896	6.089	Sedang
7	Siberut Utara	4.436	9.448	7.336	Sedang
8	Sikakap	2.332	4.043	9.219	Sedang
9	Sipora Selatan	2.237	4.404	9.811	Sedang
10	Sipora Utara	1.394	2.243	11.967	Sedang
	Kab. Kep. Mentawai	**34.945**	**69.727**	**87.623**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai berbasis InaRISK, diolah 2025.

Gambar 2.12
Peta Risiko Bencana Banjir



Tanah Longsor

Kelas risiko tanah longsor pada level kabupaten tergolong rendah, namun tetap perlu diwaspadai pada kecamatan berbukit seperti Siberut Barat dan Siberut Utara yang memiliki luas bahaya kelas tinggi terbesar (masing-masing 4.018 Ha dan 2.486 Ha). Potensi penduduk terpapar longsor tercatat 14.148 jiwa. Total potensi kerugian longsor diperkirakan Rp50,1 miliar (kerugian fisik Rp31,9 miliar dan kerugian ekonomi Rp18,2 miliar), dengan Kecamatan Siberut Barat sebagai wilayah kerugian dan kerusakan lingkungan tertinggi (Rp13,95 miliar dan 835,2 Ha).

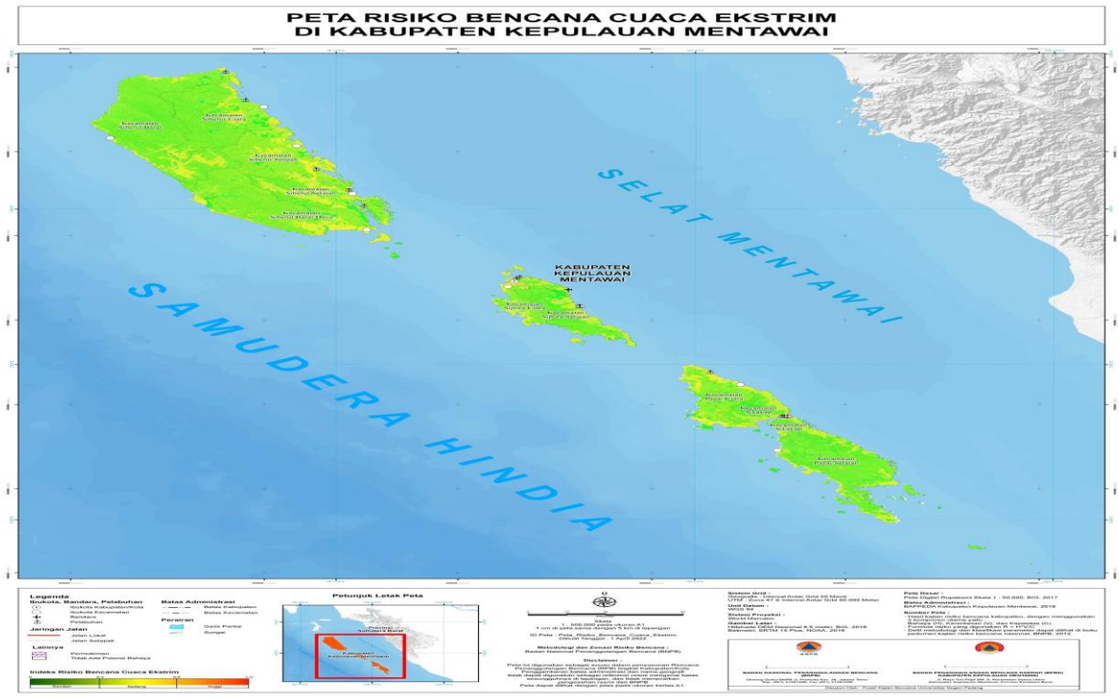
Tabel 2.21
Luas Bahaya dan Penduduk Terpapar Tanah Longsor per Kecamatan

No	Kecamatan	Bahaya Tinggi (Ha)	Total Luas (Ha)	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelas Risiko
1	Pagai Selatan	592	15.405	777	Rendah
2	Pagai Utara	314	8.199	473	Rendah
3	Siberut Barat	4.018	62.740	1.735	Sedang
4	Siberut Barat Daya	3.889	48.056	1.339	Sedang
5	Siberut Selatan	1.011	14.319	1.619	Rendah
6	Siberut Tengah	368	26.010	1.198	Rendah
7	Siberut Utara	2.486	39.416	1.990	Sedang
8	Sikakap	152	7.016	2.538	Rendah

No	Kecamatan	Bahaya Tinggi (Ha)	Total Luas (Ha)	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelas Risiko
9	Sipora Selatan	158	12.083	1.913	Rendah
10	Sipora Utara	50	4.696	708	Rendah
	Kab. Kep. Mentawai	**13.038**	**237.940**	**14.148**	**Rendah**

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai berbasis InaRISK, diolah 2025.

Gambar 2.13
Peta Risiko Bencana Tanah Longsor



Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai / InaRISK BNPB, 2025.

Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Epidemi/Wabah Penyakit, dan Likuifaksi

Selain empat ancaman utama di atas, Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menghadapi enam jenis ancaman lain yang disajikan secara konsolidasi pada level kabupaten sebagai berikut. Cuaca ekstrim tergolong kelas risiko tinggi dengan estimasi total kerugian terbesar di antara seluruh jenis bencana, yaitu Rp5,19 triliun (kerugian fisik Rp1,45 triliun beserta komponen kerugian ekonomi lain), mengingat frekuensi kejadian angin kencang dan hujan lebat yang tinggi di wilayah kepulauan. Gelombang ekstrim berkelas risiko tinggi dengan potensi kerugian Rp192,11 miliar dan potensi kerusakan lingkungan pesisir 398,7 Ha, tertinggi di Kecamatan Pagai Selatan. Kekeringan tergolong kelas sedang dengan estimasi potensi kerugian ekonomi Rp890,84 miliar. Kebakaran hutan dan lahan berkelas sedang dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai Rp1,70 triliun serta potensi kerusakan lingkungan 594,98 Ha. Epidemi dan wabah penyakit tergolong kelas risiko rendah dengan potensi penduduk terpapar 7.034 jiwa terkonsentrasi di Kecamatan Siberut Utara dan Pagai Selatan. Likuifaksi (pencairan tanah akibat guncangan gempa pada tanah jenuh air) berkelas risiko tinggi dengan estimasi kerugian Rp1,05 triliun.

Tabel 2.22
Rekapitulasi Kelas Risiko dan Potensi Kerugian Enam Jenis Bencana Lainnya

No	Jenis Bencana	Total Luas Bahaya (Ha)	Kelas Risiko	Potensi Kerugian
1	Cuaca Ekstrim	890.837,1 (sedang)	Tinggi	Rp5,19 triliun
2	Gelombang Ekstrim	23.346	Tinggi	Rp192,11 miliar
3	Kekeringan	890.837,1	Sedang	Rp890,84 miliar
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	596.094,2	Sedang	Rp1,70 triliun
5	Epidemi/Wabah Penyakit	6.072	Rendah	7.034 jiwa terpapar
6	Likuifaksi	-	Tinggi	Rp1,05 triliun

Sumber: Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai berbasis InaRISK, diolah 2025.

Ancaman Bencana Hidrometeorologi

Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Mentawai bervariasi antara dataran, sungai dan berbukit-bukit, dengan rata-rata ketinggian daerah seluruh ibukota kecamatan 2 meter dari permukaan laut (dpl) yang dialiri sistem sungai kompleks, memiliki tingkat kerentanan inheren yang tinggi terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Pada akhir tahun 2025, dengan kondisi curah hujan yang ekstrem sebagai dampak dari pergerakan angin Monsun Asia, BMKG wilayah Sumatera Barat menetapkan sejumlah wilayah sebagai area dengan risiko tinggi, yaitu Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Limapuluh Kota. Tepatnya 27 November 2025 di Kabupaten Kepulauan Mentawai diberlakukan masa tanggap darurat sebagai upaya mitigasi dampak banjir yang sedang dan telah terjadi di berbagai wilayah di Kepulauan Mentawai. Mengingat luasnya sebaran dampak, tingginya kerugian yang diderita, serta ancaman yang berkelanjutan terhadap keselamatan dan penghidupan publik, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan segera mengambil tindakan strategis. Sebagai landasan hukum untuk mobilisasi sumber daya dan upaya penanganan yang komprehensif, Bupati Kabupaten Mentawai secara resmi menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Hidrometerologi Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Nomor 360-386-2025 tanggal 27 November 2025.

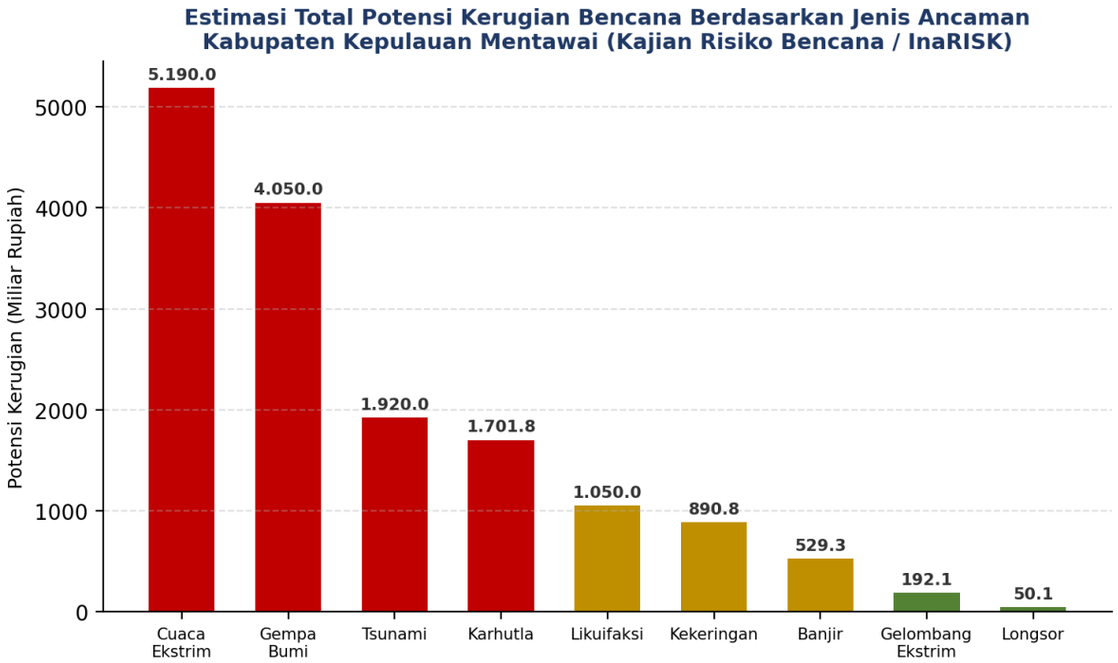
Bencana banjir bandang dan longsor telah menimbulkan dampak multisektoral yang signifikan. Hasil asesmen awal menunjukkan kerugian besar mencakup: Kerusakan infrastruktur publik, terputusnya konektivitas pada ruas jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang vital bagi pergerakan logistik dan aktivitas pertanian, kerusakan fasilitas dasar, gangguan parah pada fasilitas pelayanan publik (sekolah dan sarana kesehatan) serta jaringan utilitas dasar (listrik dan air bersih), kerugian permukiman dan ekonomi, kerusakan berat pada rumah tinggal masyarakat, serta terganggunya secara total aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk lahan pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Rekapitulasi dan Perbandingan Potensi Kerugian Bencana

Untuk memberikan gambaran perbandingan skala risiko antar jenis bencana, berikut disajikan grafik potensi kerugian dan grafik penduduk terpapar untuk jenis bencana dengan dampak terbesar di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Grafik ini menegaskan bahwa cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, serta tsunami merupakan empat ancaman dengan potensi kerugian ekonomi tertinggi, sehingga menjadi prioritas utama

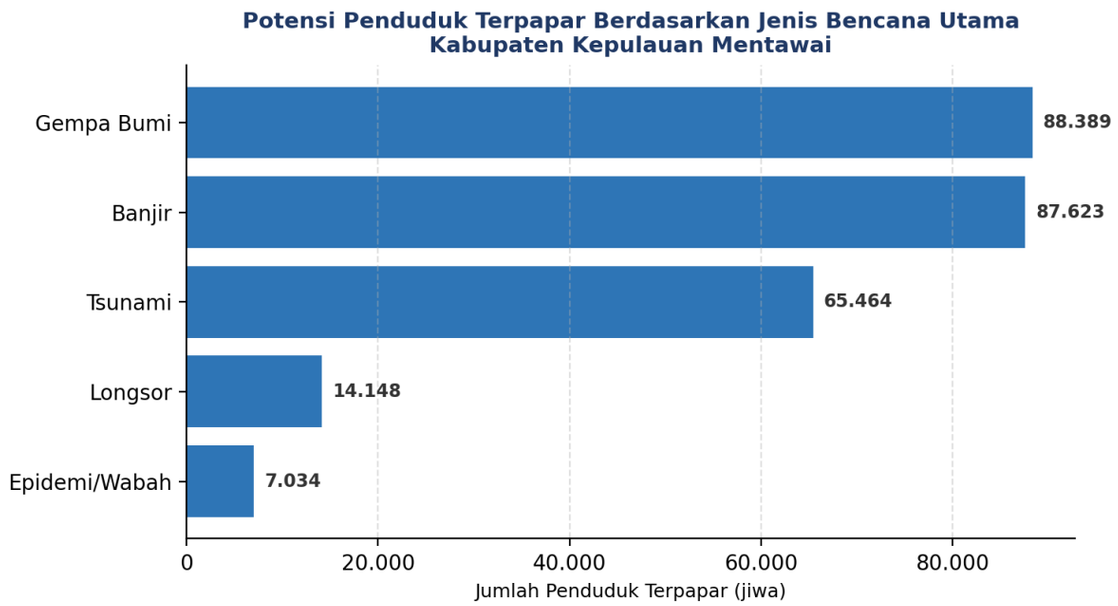
mitigasi dan alokasi sumber daya penanggulangan bencana pada RKPD Tahun 2027.

Gambar 2.14
Estimasi Total Potensi Kerugian Bencana Berdasarkan Jenis Ancaman



Sumber: Diolah dari Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025.

Gambar 2.15
Potensi Penduduk Terpapar Berdasarkan Jenis Bencana Utama



Sumber: Diolah dari Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025.

Analisis kebencanaan sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya diintegrasikan dengan RTRW, pengembangan kawasan pesisir, permukiman, pariwisata dan infrastruktur dasar, agar pembangunan tahun 2027 secara konsisten memperkuat resiliensi daerah kepulauan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada sub bab urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Lingkungan Hidup.

Fasilitas Publik Terdampak

Dampak bencana terhadap fasilitas publik dan infrastruktur dasar di Kabupaten Kepulauan Mentawai bervariasi menurut jenis ancaman. Fasilitas

permukiman, jalan, jembatan, pelabuhan/dermaga, bandara, fasilitas sosial (RSUD, Puskesmas, rumah ibadah, sekolah, panti), fasilitas ekonomi serta jaringan air minum dan sanitasi merupakan sektor-sektor yang secara konsisten berpotensi terdampak pada seluruh jenis bencana. Rekapitulasi dampak per sektor terhadap masing-masing jenis bencana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Sektor dan Fasilitas Publik Terdampak Berdasarkan Jenis Bencana

No	Sektor	Gempa Bumi	Longsor	Badai/Kebakaran	Banjir
1	Perumahan	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
2	Jalan	Runtuh, putus, bergeser	Putus, tertimbun, patah	-	Terputus, terbawa arus, rusak
3	Jembatan	Rusak	Tertimbun	Rusak struktur	Rusak
4	Sungai	-	Tertutup material, abrasi	-	Abrasi badan sungai
5	Air Minum dan Sanitasi	Peralatan rusak, pipa terputus	Pipa terputus	Merusak peralatan/pipa	Merusak mutu air dan sarana
6	Pelabuhan/Dermaga	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
7	Bandara	Rusak	Rusak	Rusak	Rusak
8	Sosial (RSUD, Puskesmas, Rumah Ibadah, Sekolah, Panti)	Runtuh, rusak	Rusak ruangan	Menghanguskan sarana	Merendam sarana
9	Ekonomi	Runtuh, rusak	Rusak	Menghanguskan sarana	Merendam sarana
10	Lintas Sektor	Runtuh, rusak	Rusak	Menghanguskan sarana	Merendam sarana

Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kajian Risiko Bencana, 2025.

Data dampak sektoral tersebut menegaskan keterkaitan langsung antara kondisi infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih dan sanitasi) dengan tingkat resiliensi masyarakat terhadap bencana, sehingga penguatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi prasyarat penting bagi pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jalur Evakuasi, Shelter dan Kesiapsiagaan Masyarakat

Dari 43 desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebanyak 33 desa pesisir pantai ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana dengan konsentrasi penduduk paling terancam pada zona merah kerawanan tinggi tsunami dan abrasi pantai. Sebaran desa pesisir tersebut meliputi 17 desa di Pulau Siberut, 9 desa di Pulau Sipora, dan 10 desa di gugusan Pulau Pagai dan Sikakap, sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Sebaran Desa Pesisir Rawan Bencana Tsunami/Abrasi per Pulau dan Kecamatan

No	Pulau	Kecamatan	Jumlah Desa Pesisir	Contoh Desa
1	Siberut	Siberut Barat, Siberut Barat Daya, Siberut Tengah, Siberut Utara, Siberut Selatan	17 desa	Simalegi, Sigapokna, Simatalu, Muara Sikabaluan, Malancan, Muara Siberut

No	Pulau	Kecamatan	Jumlah Desa Pesisir	Contoh Desa
2	Sipora	Sipora Utara, Sipora Selatan	9 desa	Tuapejat (ibu kota kabupaten), Goisooinan, Sioban, Bosua, Beriulou
3	Pagai & Sikakap	Sikakap, Pagai Utara, Pagai Selatan	10 desa	Sikakap, Saumanganya, Silabu, Bulasat, Sinaka, Malakopa

Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Data Kawasan Rawan Bencana, 2025.

Pola mitigasi tsunami di Kepulauan Mentawai difokuskan pada evakuasi alami mandiri menuju perbukitan di belakang desa, bukan mengandalkan gedung shelter vertikal buatan berskala besar, mengingat kondisi topografi kepulauan yang dikelilingi perbukitan tinggi di bagian pedalaman pulau. Pada kawasan pusat pemerintahan (Kecamatan Sipora Utara dan Sipora Selatan), BPBD telah menetapkan 2 Tempat Evakuasi Akhir (TEA) utama berbasis ketinggian, yaitu TEA Gereja IFGF (ketinggian 61 mdpl, kapasitas 1.500 jiwa) dan TEA Gereja GKPM Maniri Piniel (ketinggian 56 mdpl, kapasitas 1.500 jiwa), dengan jarak tempuh terjauh sekitar 1,9 km atau sekitar 25 menit berjalan kaki. Untuk wilayah dengan golden time yang sangat singkat, disediakan pula pos pemeriksaan (checkpoint) darurat dengan waktu tempuh kurang dari 5 menit di sekitar area PDAM dan Tower.

Di Pulau Siberut yang berhadapan langsung dengan zona megathrust utama, jalur evakuasi diarahkan mengikuti jalan poros utama menjauhi bibir pantai menuju kawasan perbukitan pedalaman, dilengkapi rambu evakuasi berwarna hijau di sepanjang jalan utama permukiman. Sementara itu, pasca kejadian tsunami tahun 2010, sebagian besar permukiman yang hancur di Pulau Pagai (seperti di Tumarei, Desa Silabu dan beberapa dusun di Pagai Selatan) telah direlokasi secara permanen ke kawasan hunian tetap (Huntap) di atas perbukitan, dilengkapi lumbung sosial logistik makanan dan tenda darurat pada titik-titik tinggi evakuasi.

Prinsip kesiapsiagaan mandiri masyarakat Mentawai ditekankan melalui rumus “Gempa Kuat/Lama = Evakuasi Sekarang”, yaitu berjalan cepat atau berlari menuju perbukitan (minimal ketinggian 20-30 meter dari permukaan laut) tanpa menunggu sirine peringatan dini, apabila guncangan gempa dirasakan lebih dari 20 detik. Prinsip ini didukung oleh tiga bentuk kegiatan kesiapsiagaan yang dilaksanakan BPBD secara terpadu, yaitu:

- Sosialisasi (transfer pengetahuan): edukasi kebencanaan berbasis komunitas dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) bagi guru dan siswa.
- Komunikasi (penyebaran informasi dan peringatan): pemasangan rambu evakuasi, aktivasi kearifan lokal (kentongan, lonceng gereja), pembentukan jaringan radio komunitas (HT) antar instansi, serta penyebaran media visual berbahasa daerah.
- Simulasi (latihan fisik dan kesiapsiagaan): gladi lapang evakuasi mandiri, simulasi penyelamatan kelompok rentan (lansia, ibu hamil, anak-anak, penyandang disabilitas), dan gladi posko (table top exercise).

Renstra BPBD Tahun 2025-2029 yang diturunkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Tahun 2027 mengedepankan pembangunan jalur evakuasi dan pembangunan gedung pemerintahan berbasis mitigasi risiko, guna menjawab kebutuhan resiliensi Mentawai secara berkelanjutan pada sektor infrastruktur. Strategi ini mencakup empat pilar utama, yaitu mitigasi struktural (pembangunan infrastruktur tahan bencana dan penataan ruang berbasis risiko), mitigasi non-struktural (pemetaan kawasan rawan bencana, edukasi, regulasi dan simulasi), kesiapsiagaan dan peringatan dini (sistem peringatan

dini, rute evakuasi, kesiapan medis), serta konservasi lingkungan (reforestasi dan pengelolaan sampah).











2.1.1.4 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi satu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

berkelanjutan. Gambar menunjukkan perkembangan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 mengalami tren peningkatan, yaitu dari 46,67 tahun 2020 mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 37,67 namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 52,48 pada tahun 2022 meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 50,91, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 53,86 dan secara akumulatif pencapaian Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih pada kategori rentan.

Tabel 2.25
Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Ketahanan Pangan	37,67	52,48	50,91	53,86	52,42

Sumber : Badan Pangan Nasional

Peningkatan ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi kerawanan pangan yang akan terjadi di Kepulauan Mentawai khususnya saat terjadi bencana atau cuaca buruk karena pangan di Kepulauan Mentawai masih didominasi dari pasokan pangan dari luar Mentawai.

2. Konsumsi Listrik Per Kapita

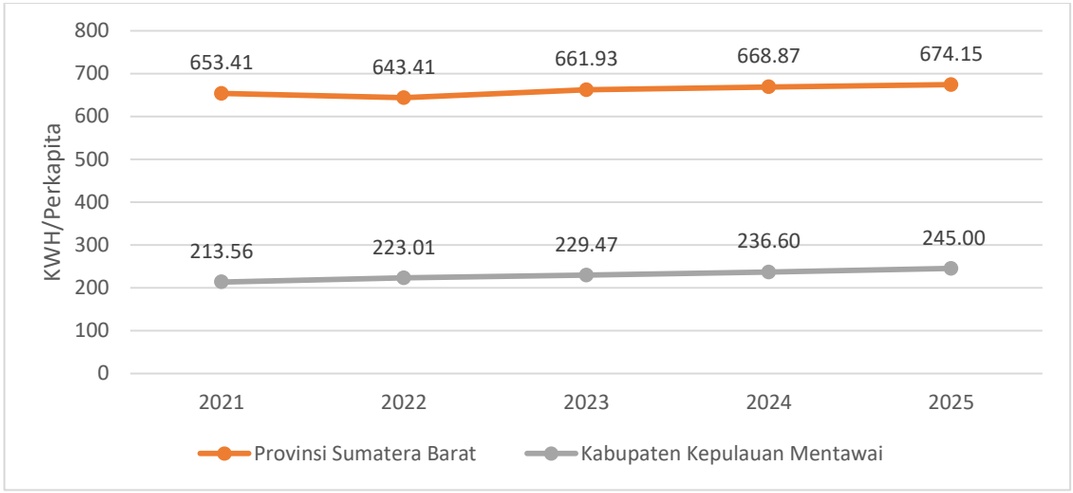
Ketersediaan dan pemanfaatan listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang seharusnya tersedia secara merata bagi masyarakat. Konsumsi listrik per kapita menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena semakin tinggi pemakaian listrik suatu keluarga atau wilayah maka akan berbanding lurus dengan tingkat produktivitas dan kesejahteraannya. Secara agregat, perkembangan konsumsi listrik per kapita masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yaitu dari 213,56 kWh/kapita pada tahun 2021 meningkat menjadi 223,01 kWh/kapita pada tahun 2022, 229,47 kWh/kapita pada tahun 2023, 236,60 kWh/kapita pada tahun 2024, hingga mencapai 245,00 kWh/kapita pada tahun 2025.

Tabel 2.26
Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (kWh/kapita)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Provinsi Sumatera Barat	653,41	643,41	661,93	668,87	674,15
Kab. Kepulauan Mentawai	213,56	223,01	229,47	236,60	245,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat dan BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (diolah)

Gambar 2.16
Perkembangan Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat dan BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (diolah)

Meskipun menunjukkan tren peningkatan yang stabil, capaian konsumsi listrik per kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai masih jauh berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat sepanjang periode 2021-2025. Pada tahun 2021, rata-rata konsumsi listrik Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 653,41 kWh/kapita, sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 213,56 kWh/kapita, atau kurang dari sepertiga capaian provinsi. Kesenjangan ini masih berlanjut hingga tahun 2025, di mana rata-rata konsumsi listrik Provinsi Sumatera Barat mencapai 674,15 kWh/kapita, sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai baru mencapai 245,00 kWh/kapita.

Rendahnya capaian konsumsi rata-rata listrik di Kepulauan Mentawai menjadi indikasi bahwa akses dan ketersediaan listrik di wilayah ini masih terbatas. Pembangkit listrik PLN beserta jaringannya masih terfokus pada wilayah desa di pusat kecamatan, sementara desa-desa yang tersebar pada pulau-pulau kecil dan kawasan pedalaman belum sepenuhnya terjangkau jaringan distribusi listrik. Selain itu, sektor ekonomi khususnya industri pengolahan masyarakat belum berkembang secara signifikan sehingga konsumsi listrik untuk kegiatan produktif belum terserap secara maksimal.

Untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, arah kebijakan pembangunan Tahun 2027 diarahkan pada perluasan jaringan distribusi listrik PLN ke desa-desa terpencil, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal untuk kawasan yang belum terjangkau jaringan interkoneksi, penguatan Alat Penerangan Jalan (APJ) di pusat-pusat permukiman dan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, serta mendorong tumbuhnya sektor usaha produktif berbasis listrik seperti pengolahan hasil perikanan dan pertanian. Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2027 juga fokus pada pengembangan Energi baru terbarukan yang bersumber dari gelombang laut dan biomassa.

3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, atau *Prevalenceof Undernourishment* (PoU), adalah proporsi penduduk yang asupan energinya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum demi hidup sehat dan aktif. PoU dihitung dengan membandingkan asupan energi rata-rata per orang dengan standar kebutuhan energi minimum yang diperlukan untuk aktivitas fisik dan metabolisme dasar. *PoU* merupakan indikator penting untuk menilai kondisi gizi dan ketahanan pangan suatu populasi. Ketidakcukupan konsumsi

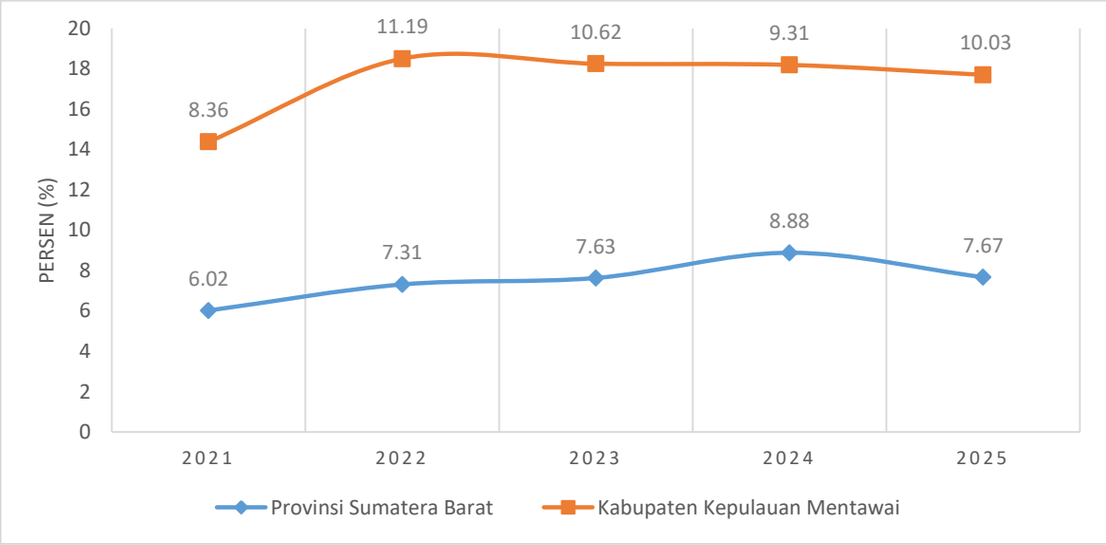
pangan memiliki dampak yang serius terutama kaitannya dengan kasus *stunting, wasting,* dan *underweight* pada anak (Roser dan Ritchie, 2019). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) menjadi indikator yang dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat Nasional dan sub-nasional. Secara umum, terdapat 5 (lima) klasifikasi status *PoU* yaitu sangat rendah (2,5%), rendah (2,5%-4%), sedang (5%-19%), tinggi (20%-34%) dan sangat tinggi (>35%).

Tabel 2.27
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (%)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Provinsi Sumatera Barat	6,02	7,31	7,63	8,88	7,67
Kab. Kepulauan Mentawai	8,36	11,19	10,62	9,31	10,03

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar 2.17
Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan ketidakcukupan konsumsi pangan masyarakat Kepulauan Mentawai selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tiga tahun pertama, angka PoU mengalami peningkatan dari 8,36 persen pada tahun 2021 menjadi 11,19 persen pada tahun 2022, sebelum kemudian menurun menjadi 10,62 persen pada tahun 2023 dan 9,31 persen pada tahun 2024. Namun, capaian tahun 2025 kembali meningkat menjadi 10,03 persen, mengindikasikan bahwa perbaikan ketahanan pangan daerah belum berlangsung secara konsisten dan masih rentan terhadap gejolak harga pangan maupun keterbatasan produksi pangan lokal.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi sepanjang periode 2021-2025, meskipun pada tahun 2024 selisihnya relatif menyempit menjadi hanya 0,43

poin (9,31% berbanding 8,88%). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 1 dari 10 penduduk Kepulauan Mentawai yang mengonsumsi makanan dengan asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Kondisi kepulauan yang menyebabkan keterbatasan distribusi pangan antar pulau, ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, serta terbatasnya diversifikasi pangan lokal menjadi faktor utama yang memengaruhi capaian PoU di Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan Tahun 2027 diarahkan pada penguatan produksi pangan lokal melalui optimalisasi lahan pekarangan dan kelompok tani, penganekaragaman komoditas pangan lokal, penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan antar pulau, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pangan bergizi melalui program intervensi gizi terintegrasi.

4. Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Indikator Kapasitas Air Baku merupakan ukuran yang menggambarkan kemampuan sistem penyediaan sumber daya air dalam menyediakan debit air baku yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan air minum, pelayanan dasar masyarakat, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Kapasitas air baku diukur dalam satuan meter kubik per detik (m^3/detik) yang menunjukkan jumlah debit air yang tersedia dan dapat dimanfaatkan melalui prasarana pengambilan, penyimpanan, maupun distribusi air.

Ketersediaan air baku merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan daerah karena menjadi dasar penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), peningkatan kualitas pelayanan dasar, pengembangan kawasan permukiman, pelayanan fasilitas umum, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penyediaan air baku yang memadai juga berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan risiko penyakit akibat keterbatasan air bersih, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tujuan 6, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi tantangan dalam penyediaan air baku akibat karakteristik wilayah kepulauan, sebaran permukiman yang berjauhan, kondisi topografi, keterbatasan infrastruktur sumber daya air, serta tingginya ketergantungan terhadap sumber air permukaan dan mata air alami yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan musim. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas air baku diarahkan melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air, perlindungan kawasan resapan air, konservasi daerah tangkapan air, pembangunan embung dan intake, optimalisasi pemanfaatan sumber air permukaan maupun air tanah yang memenuhi standar, serta penguatan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.

Target Kapasitas Air Baku Tahun 2027 sebesar 0,014 m^3/detik mencerminkan kemampuan daerah dalam meningkatkan penyediaan debit air baku secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, kondisi sumber daya air, serta kemampuan pendanaan pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan pelayanan air

minum, meningkatkan keandalan sistem penyediaan air bersih, mengurangi kerentanan terhadap krisis air pada musim kemarau, serta mendukung pengembangan kawasan permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Keberhasilan pencapaian indikator ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber-sumber air melalui upaya konservasi lingkungan, perlindungan daerah tangkapan air, dan pemanfaatan sumber daya air secara efisien. Dengan demikian, penyediaan air baku yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperkuat ketahanan air daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

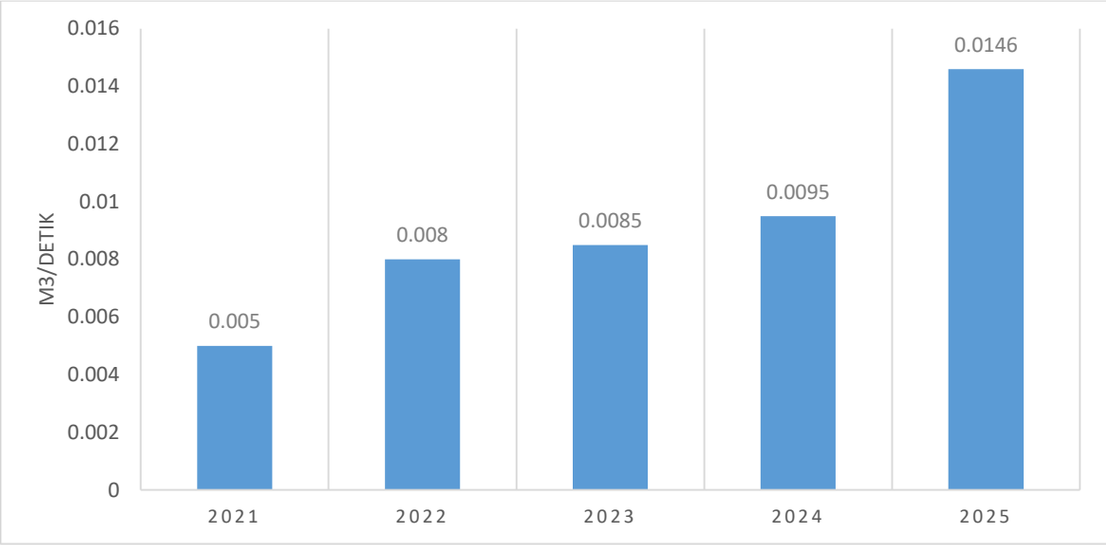
Pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan pemerintah daerah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi rumah tangga dan irigasi pertanian. Penambahan volume air yang dapat ditampung akan memberi pengaruh terhadap luasan areal irigasi yang dialiri serta kapasitas air yang dapat disalurkan kepada masyarakat melalui PDAM maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelola air baku. Kapasitas air baku di Kepulauan Mentawai masih tergolong sangat rendah akibat sejumlah faktor, antara lain kekeringan musiman, penebangan hutan pada daerah tangkapan air, sedimentasi, serta masih terbatasnya infrastruktur penyaluran dan distribusi air baku.

Tabel 2.28
Kapasitas Air Baku (m3/detik)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,005	0,008	0,0085	0,0095	0,0146

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kepulauan Mentawai

Gambar 2.18
Perkembangan Kapasitas Air Baku Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kapasitas air baku di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2021-2023 relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu bergerak pada kisaran 0,005 hingga 0,0085 m3/detik. Peningkatan mulai terlihat pada tahun 2024 dengan capaian 0,0095 m3/detik, sebelum kemudian melonjak pada tahun 2025 menjadi 0,0146 m3/detik seiring dengan penyelesaian sejumlah infrastruktur penampung dan intake air baku baru yang dibangun pemerintah daerah bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Lonjakan kapasitas air baku pada tahun 2025 menjadi capaian penting yang perlu terus dijaga keberlanjutannya, mengingat kebutuhan air baku akan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan perluasan kawasan permukiman baru. Tanpa dukungan infrastruktur penampungan dan distribusi yang memadai, peningkatan kapasitas ini berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terutama pada kawasan permukiman yang tersebar di pulau-pulau kecil.

Arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada pemeliharaan dan optimalisasi infrastruktur air baku yang telah dibangun, perlindungan daerah tangkapan air (catchment area) dari alih fungsi lahan dan deforestasi, pembangunan infrastruktur penampungan air baku baru pada kecamatan yang masih memiliki kapasitas rendah, serta peningkatan kapasitas jaringan distribusi air baku menuju instalasi pengolahan air agar peningkatan kapasitas dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan cakupan pelayanan air minum masyarakat.

5. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan merupakan ukuran yang menggambarkan persentase rumah tangga di kawasan perkotaan yang memperoleh pelayanan air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Air siap minum perpipaan merupakan air yang telah melalui proses pengolahan sehingga memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat digunakan secara langsung maupun dengan pengolahan sederhana sesuai standar yang ditetapkan.

Peningkatan akses terhadap air siap minum perpipaan merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan layanan air minum perpipaan yang andal berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, penurunan risiko penyakit yang ditularkan melalui air (water borne diseases), peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta mendukung produktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Indikator ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tujuan 6, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua.

Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan layanan air minum perpipaan, antara lain kondisi geografis berupa wilayah kepulauan, sebaran permukiman yang berjauhan, keterbatasan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), keterbatasan infrastruktur jaringan distribusi, serta tingginya biaya pembangunan dan operasional

pelayanan air minum. Oleh karena itu, peningkatan akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan diarahkan melalui pembangunan dan pengembangan SPAM, peningkatan kapasitas produksi air minum, perluasan jaringan perpipaan ke kawasan permukiman, rehabilitasi jaringan distribusi yang telah ada, pengurangan tingkat kehilangan air (non-revenue water), serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Target Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2027 sebesar 11,00 persen merupakan target yang disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi eksisting pelayanan air minum, kapasitas infrastruktur, kemampuan pendanaan daerah, serta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Peningkatan akses ini diharapkan mampu memperluas cakupan pelayanan air minum yang aman, meningkatkan keandalan pelayanan kepada masyarakat perkotaan, mengurangi ketergantungan terhadap sumber air yang belum terjamin kualitasnya, serta memperkuat ketahanan air di kawasan perkotaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Keberhasilan pencapaian indikator ini memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah desa/kelurahan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sarana dan prasarana air minum. Selain itu, upaya konservasi sumber daya air, perlindungan daerah tangkapan air, efisiensi pemanfaatan air, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan air secara bijaksana menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan air siap minum perpipaan yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

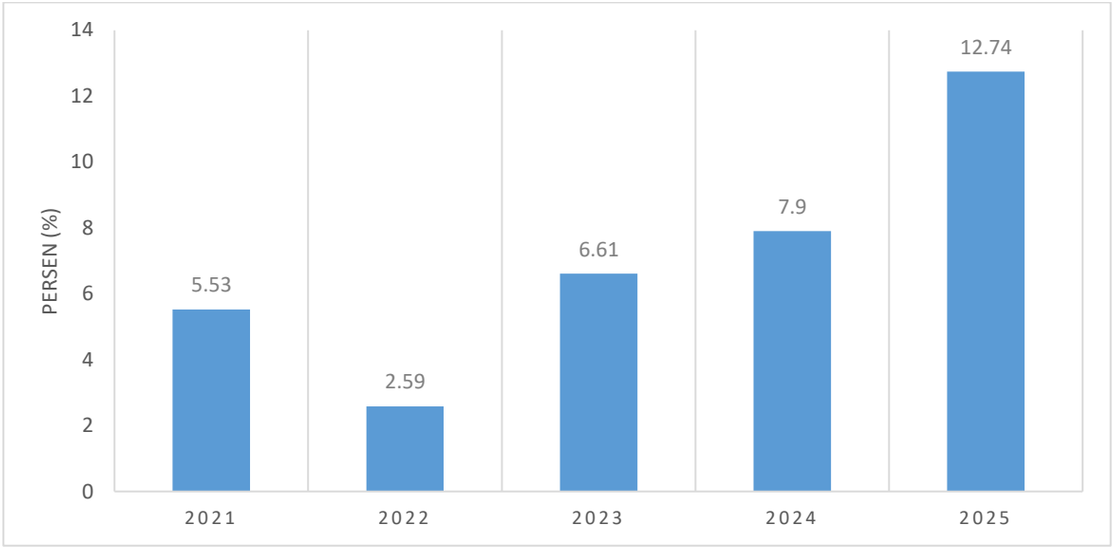
Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan merujuk pada persentase rumah tangga di kawasan perkotaan yang telah terhubung ke sistem perpipaan yang menyediakan air minum aman dan siap dikonsumsi langsung. Indikator ini penting untuk menilai ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat perkotaan. Ketersediaan air siap minum perpipaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada ketersediaan air bersih yang layak di pusat ibu kota kabupaten di Tua Pejat, yang menjadi potret utama ketersediaan layanan dasar air bersih perkotaan bagi masyarakat.

Tabel 2.29
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Akses RT Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	5,53	2,59	6,61	7,90	12,74

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar 2.19
Perkembangan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kepulauan Mentawai menunjukkan tren fluktuatif namun secara keseluruhan meningkat signifikan pada akhir periode. Pada tahun 2021 capaian tercatat sebesar 5,53 persen, kemudian mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2022 menjadi hanya 2,59 persen. Perbaikan mulai terlihat pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian masing-masing 6,61 persen dan 7,90 persen, hingga meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 12,74 persen, atau lebih dari dua kali lipat capaian tahun 2021.

Peningkatan signifikan pada tahun 2025 mengindikasikan mulai membaiknya kualitas dan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan di Tua Pejat sebagai pusat ibu kota kabupaten. Namun demikian, capaian sebesar 12,74 persen pada tahun 2025 masih menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga perkotaan belum terlayani air siap minum melalui sistem perpipaan yang aman dan berkelanjutan, sehingga sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sumber air non-perpipaan.

Peningkatan akses air minum melalui perpipaan tidak hanya berdampak positif pada derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Mentawai. Arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan SPAM perkotaan Tua Pejat, peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air (IPA), perluasan sambungan rumah tangga baru, serta peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan penyedia air minum agar pelayanan air siap minum perpipaan dapat menjangkau seluruh kawasan perkotaan secara bertahap.

6. Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak

Akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak menggambarkan proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang terlindungi dari kontaminasi, baik melalui perpipaan, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, maupun penampungan air hujan yang memenuhi standar. Secara agregat, capaian rumah tangga pengguna air bersih

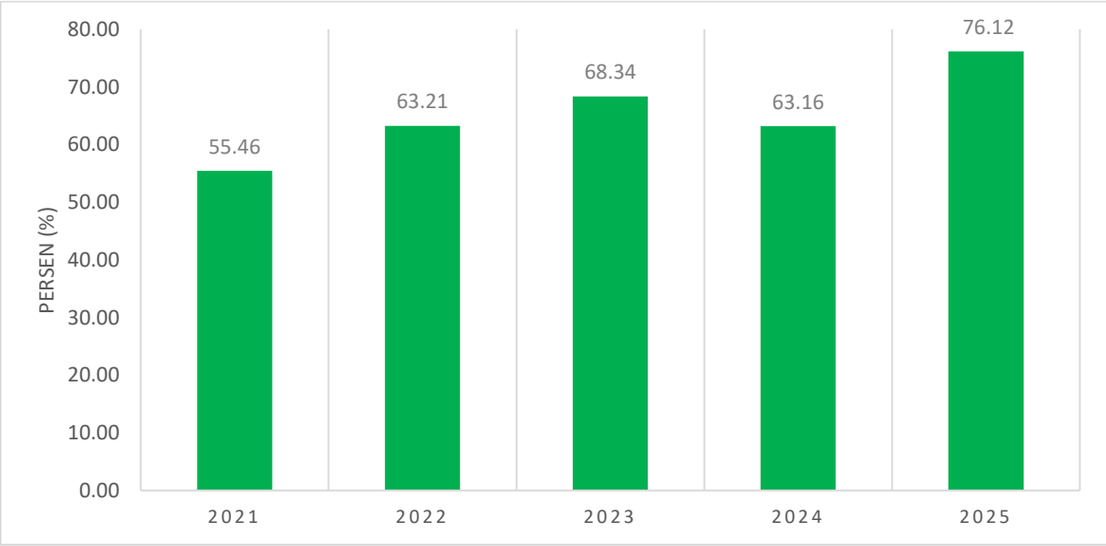
di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 masih sekitar 63,16 persen, dengan estimasi sekitar 8.421 rumah tangga yang belum terlayani air minum layak. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kebutuhan air bersih akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.

Tabel 2.30
Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (%)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak	55,46	63,21	68,34	63,16	76,12

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar 2.20
Perkembangan Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak, 2021-2025



Indikator akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menunjukkan perbaikan dengan tren peningkatan yang cukup baik. Capaian meningkat dari 55,46 persen pada tahun 2021 menjadi 63,21 persen pada tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 68,34 persen pada tahun 2023. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 63,16 persen, capaian kembali melonjak signifikan pada tahun 2025 menjadi 76,12 persen, capaian tertinggi sepanjang periode 2021-2025.

Penurunan capaian pada tahun 2024 perlu menjadi catatan penting dalam evaluasi pembangunan, mengingat hal tersebut dapat mengindikasikan adanya gangguan pada sebagian sistem penyediaan air minum eksisting, baik akibat kerusakan infrastruktur, penurunan kualitas sumber air baku, maupun keterbatasan pemeliharaan jaringan. Namun demikian, pemulihan signifikan pada tahun 2025 menunjukkan keberhasilan langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk pengembangan SPAM di sejumlah kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 10 kecamatan dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan air bersih layak bagi seluruh masyarakat. Arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada perluasan cakupan SPAM perdesaan dan perkotaan, peningkatan

kualitas pengelolaan kelembagaan air minum, penguatan pemeliharaan infrastruktur SPAM eksisting, serta percepatan penyelesaian target akses air minum layak dan aman sesuai amanat RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup yang Berkualiats

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai semaksimal mungkin tetap dijaga dan dipastikan berada pada kondisi awal/lestari. Luas kawasan yang mayoritas berupa kawasan hutan dengan persentase mencapai 82 persen dari total wilayah menjadi indikator bahwa Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestasi yang dapat berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Dua indikator utama yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup daerah adalah indeks tutupan lahan dan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak.

1. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan (ITL) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas suatu lahan berdasarkan jenis dan luas tutupan lahan serta kondisi ekosistemnya. Indeks ini membantu pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan, dengan memberikan gambaran mengenai kondisi tutupan lahan termasuk hutan, vegetasi non-hutan, dan lahan terbuka. Berdasarkan data tutupan lahan tahun 2025, kondisi indeks tutupan lahan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat berada pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai 84,10 dan persentase tutupan lahan sebesar 75,26 persen, sedangkan indeks tutupan hutan terendah berada di Kota Bukittinggi dengan nilai 22,38. Sebagai perbandingan, indeks tutupan hutan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 63,16 dengan persentase tutupan hutan 44,32 persen.

Tabel 2.31
Tutupan Lahan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

NO	TUTUPAN LAHAN		KECAMATAN (Ha)				
	Nama Tutupan Lahan	Kode Tutupan Lahan	Sipora Utara	Sipora Selatan	Pagai Utara	Sikakap	Pagai Selatan
1	2	3	2025	2025	2025	2025	2025
PRIMER							
1	Hutan Lahan Kering Primer	2001					
2	Hutan Mangrove Primer	2004	1.069,91	489,14	231,58	831,12	3.099,24
SEKUNDER							
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	2002	13.724,58	24.273,35	27.862,40	17.267,04	57.297,38
4	Hutan Mangrove Sekunder	20041	97,60			125,07	471,18
NON HUTAN							
5	Hutan Rawa Sekunder	20051	284,50	51,78			3.477,92
6	Pertanian Lahan Kering	20091	5.820,29	6.229,82	2.975,90	560,79	5.901,93
7	Pertanian Lahan	20092	2.148,54	2.409,27	5.160,48	8.062,86	6.053,37

NO	TUTUPAN LAHAN		KECAMATAN (Ha)				
	Nama Tutupan Lahan	Kode Tutupan Lahan	Sipora Utara	Sipora Selatan	Pagai Utara	Sikakap	Pagai Selatan
1	2	3	2025	2025	2025	2025	2025
	Kering Campur						
8	Perkebunan	2010				22,53	
9	Semak Belukar	2007	429,94	2.185,96	1.252,57	658,86	3.695,43
10	Semak Belukar Rawa	20071	36,33	545,36	848,66	475,38	1.599,66
11	Sawah	20093	21,81	176,70	241,75	427,69	399,58
12	Lahan Terbuka	2014	148,05	15,43	507,75	110,93	185,52
13	Tubuh Air	5001	87,31	257,94	238,98	162,29	233,05
14	Rawa	50011	9,92	1,90		37,16	
15	Pemukiman	2012	563,69	400,61	239,49	492,65	450,67
16	Bandara / Pelabuhan	20121	34,72	16,83			
	JUMLAH TOTAL	**213.190,14**	**24.477,19**	**37.054,09**	**39.559,56**	**29.234,37**	**82.864,93**

Sumber: DIKPLH Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diringkas)

Komposisi kawasan hutan di Kepulauan Mentawai yang mencapai 82 persen dari total wilayah menjadi faktor pendukung utama masih tingginya indeks tutupan lahan di kabupaten ini, sehingga vegetasi dan ekosistem di dalamnya masih dapat terjaga dan terpelihara dengan baik dibandingkan wilayah lain di Provinsi Sumatera Barat. Dominasi hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove pada kawasan pesisir turut berperan penting sebagai penyangga ekosistem sekaligus mitigasi alami terhadap abrasi pantai dan gelombang ekstrem.

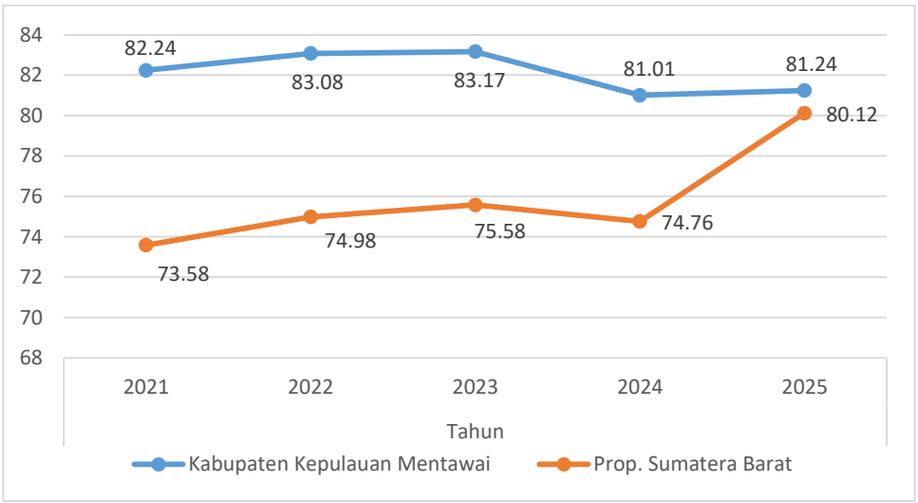
Meskipun capaian indeks tutupan lahan tergolong tinggi, tekanan terhadap kawasan hutan berpotensi meningkat seiring pertumbuhan kebutuhan lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, dan pengembangan kawasan ekonomi baru, termasuk kawasan New Growth Center (NGC) Mentawai. Oleh karena itu, arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada penguatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan, perlindungan kawasan hutan mangrove sebagai kawasan lindung pesisir, pengembangan skema insentif karbon (carbon credit) melalui mekanisme IDXCarbon/Verra VCS, serta pemantauan tutupan lahan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan daya dukung lingkungan Kepulauan Mentawai.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas

Kualitas lingkungan hidup dalam keadaan baik dapat dilihat dari kondisi lingkungan yang memungkinkan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya secara optimal. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk kualitas udara, air, tanah, dan interaksi sosial-ekonomi serta budaya dalam suatu wilayah. Dalam kurun 5 tahun terakhir indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai perkembangannya pada predikat baik. Begitu juga respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 82,24 pada tahun 2021

meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 83,08 dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi sebesar 83,17.Pada tahun 2024 IKLH di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan menjadi sebesar 81,01, namun pada tahun 2025 capaian IKLH Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan menjadi sebesar 81,24

Gambar 2.21
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Propinsi Sumatera Barat, 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

IKLH Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan yaitu dari 73,58 pada tahun 2021 menjadi 74,98 pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 75,58 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 74,46 meskipun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan, pada tahun 2025 IKLH prop. Sumatera Barat meningkat kembali menjadi 80,12. Aktivitas sosial ekonomi tentu sangat memengaruhi kualitas lingkungan di setiap daerah, terutama dengan pembangunan dan investasi fisik yang membutuhkan penanganan kawasan/lahan.

3. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak/Aman

Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar keamanan kesehatan dan lingkungan. Sanitasi aman tidak hanya ditandai dengan kepemilikan jamban yang layak, tetapi juga mencakup sistem pengelolaan air limbah domestik yang mampu mencegah kontak manusia dengan limbah, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir yang memenuhi standar kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Peningkatan akses sanitasi aman menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan prevalensi penyakit berbasis lingkungan, pencegahan stunting, peningkatan kualitas permukiman, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Indikator ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tujuan 6, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua.

Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan layanan sanitasi aman, di antaranya karakteristik wilayah kepulauan yang tersebar, keterbatasan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta rendahnya akses masyarakat terhadap sistem sanitasi yang memenuhi standar. Oleh karena itu, peningkatan cakupan sanitasi aman dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana sanitasi, peningkatan akses layanan pengelolaan lumpur tinja, penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Target Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2027 sebesar 5,11 persen merupakan tahapan awal dalam meningkatkan kualitas layanan sanitasi secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah dan kesiapan infrastruktur. Pencapaian target tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan akses sanitasi aman pada tahun-tahun berikutnya, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Keberhasilan pencapaian indikator ini memerlukan sinergi lintas perangkat daerah, pemerintah nagari/desa, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sarana sanitasi yang telah dibangun. Selain itu, penguatan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta pemanfaatan sarana sanitasi yang memenuhi standar menjadi faktor penting dalam mewujudkan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

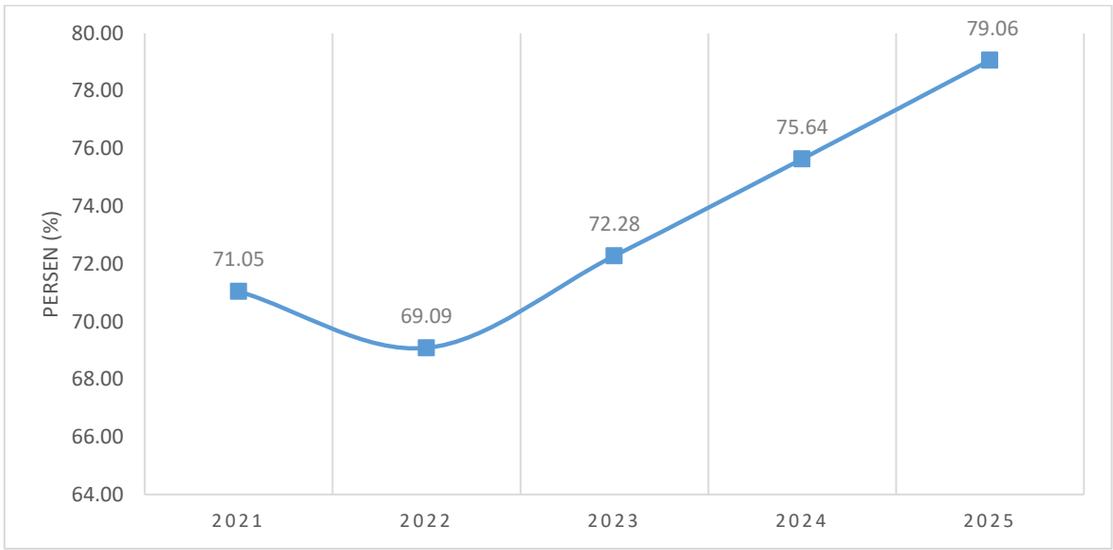
Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, seperti kloset dengan leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja yang menggunakan tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang digunakan oleh rumah tangga sendiri maupun bersama rumah tangga tertentu, menjadi fasilitas yang harus dimiliki setiap rumah tangga. Pentingnya ketersediaan sanitasi layak dikarenakan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mencegah penyebaran penyakit akibat sanitasi buruk, mencegah pencemaran lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.32
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (%)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	71,05	69,09	72,28	75,64	79,06

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar 2.22
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan capaian rumah tangga dengan sanitasi layak di Kepulauan Mentawai selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik meskipun sempat berfluktuasi pada tahun-tahun awal. Pada tahun 2021 capaian tercatat sebesar 71,05 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 69,09 persen. Sejak tahun 2023, capaian kembali meningkat secara konsisten menjadi 72,28 persen, dilanjutkan 75,64 persen pada tahun 2024, dan mencapai 79,06 persen pada tahun 2025, capaian tertinggi sepanjang periode pengamatan.

Tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2023 menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat secara mandiri dalam menyediakan dan mengelola sanitasi layak skala rumah tangga semakin membaik, didukung pula oleh program-program pembangunan sanitasi yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui skema PPSP/SSK (Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman/Strategi Sanitasi Kabupaten). Meski demikian, capaian 79,06 persen pada tahun 2025 berarti masih terdapat sekitar seperlima rumah tangga di Kepulauan Mentawai yang belum memiliki akses sanitasi layak.

Perlu ditegaskan bahwa capaian sanitasi layak berbeda dengan capaian sanitasi aman, di mana sanitasi aman mencakup pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh mulai dari penampungan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada percepatan pembangunan sarana sanitasi rumah tangga bagi keluarga yang belum memiliki jamban sehat, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal, serta edukasi perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat.

4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Layanan pengumpulan sampah adalah proses pemindahan limbah padat dari tempat penggunaannya ke tempat pembuangan atau pengolahan. Sampah dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian diangkut ke tempat

penampungan sementara (TPS), pengolahan sampah antara (SPA atau ITF), atau langsung ke tempat pemrosesan akhir (TPST).
Untuk penanganan dan pengelolaan sampah juga capaian setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan cakupan layanan persampahan dan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan.Namun, intervensi dalam pengelolaan sampah masih sebatas pada kawasan ibukota kabupaten (Kecamatan Sipora Utara/Tuapejat dan sekitarnya) menjadi indikasi masih rendahnya persentase penanganan sampah atau pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.33
Proporsi Timbunan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 – 2025

Keterangan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Timbulan Sampah Terolah	13,72	13,38	15,06	13,05	6,94

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan

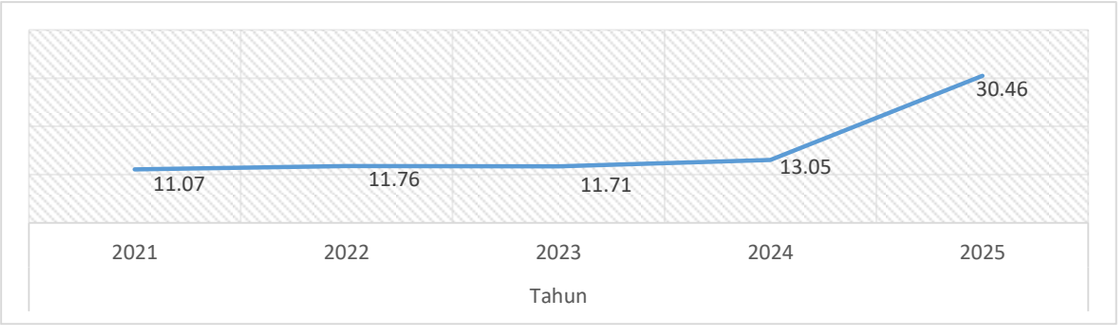
Perkembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2021-2025 menunjukkan hasil yang masih rendah, artinya intervensi sampah masih pada pengangkutan sampah secara utuh dengan pengolahan yang relatif masih sedikit atau bersifat swadaya dari rumah tangga/masyarakat/atau pihak terkait.Pemerintah Daerah belum melakukan pengelolaan Timbunan sampah ataupun mendaur ulang sampah dikarenakan belum adanya TPA/TPST. Meskipun demikian, tetap dilakukan edukasi dan penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya seperti mengurangi pencemaran lingkungan, Melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk proporsi Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah masih dalam kategori sangat rendah yaitu pada tahun 2021 sebesar 13,72 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 13,38 persen, pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 1,68 poin menjadi sebesar 15,06 persen. Pada tahun 2024 proporsi Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan menjadi sebesar 13,05 persen dan mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi sebesar 6,94 persen.

5. Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengolahan Sampah

Layanan Penuh Pengumpulan Sampah merupakan sistem layanan yang menyediakan pengumpulan sampah secara teratur dari rumah tangga, dengan opsi pengolahan lebih lanjut seperti daur ulang atau pengomposan. Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tampak pada Gambar 2.13 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 11,07 persen lalu kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 11,76 persen, namun pada tahun 2023 sedikit penurunan menjadi sebesar 11,71 persen dan pada tahun 2024 peningkatan menjadi sebesar 13,05 persen. Pada Tahun 2025 mengalami peningkatan kembali menjadi 30,46 Pencapaian ini tergolong masih rendah melalui intervensi pemerintah, tentu ini menjadi problem dalam menyediakan layanan pengumpulan sampah di Kabupaten Kepulauan

Mentawai yang dikarenakan belum tersedianya infrastruktur persampahan dan model pengelolaan persampahan yang komprehensif di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dampak yang terjadi dari rendahnya pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain banyak sampah, terutama plastik, berakhir di laut dan pantai, menyebabkan pencemaran yang berdampak pada biota kehidupan laut.

Gambar 2.23
Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengolahan Sampah (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 -2025



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Ini merusak ekosistem pesisir dan mengancam kelangsungan hidup spesies laut di Kepulauan Mentawai. Pembuangan sampah secara sembarangan, terutama sampah organik dan berbahaya, dapat mencemari tanah dan sumber air, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat setempat. Pemandangan sampah yang menumpuk di tempat-tempat wisata dapat merusak citra Kepulauan Mentawai sebagai destinasi wisata alam yang bersih dan asri, yang pada akhirnya bisa mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang bagi penyakit, seperti diare, demam berdarah, dan infeksi kulit. Pembakaran sampah terbuka yang sering dilakukan juga dapat menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagikesehatan. Lingkungan yang tercemar oleh sampah dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat lokal, ekosistem laut didalamnya dan dampak pada estetika lingkungan, kebersihan, dan kenyamanan.

2.1.1.5 Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Indonesia (KRBI) BNPB, ancaman utama yang dihadapi adalah gempa bumi dan tsunami akibat letaknya pada zona subduksi pertemuan Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia (Sunda Megathrust) yang membentuk Segmen Mentawai. Kabupaten ini memiliki garis pantai sepanjang 1.402,68 km, terdiri atas gugusan pulau-pulau yang tersebar, serta memiliki luas wilayah sekitar 6.033,76 km^2. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa, dan 341 dusun, sehingga sebagian besar pusat permukiman dan aktivitas masyarakat berada di kawasan pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, abrasi pantai, gelombang pasang, serta kebakaran hutan dan lahan pada beberapa lokasi.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh nilai 192,85 dengan kategori

risiko tinggi, menempati peringkat ke-18 nasional dan peringkat ke-3 di Provinsi Sumatera Barat. Hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2030 juga menegaskan bahwa daerah ini memiliki 10 jenis potensi bahaya, dengan tingkat risiko tinggi pada bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi; risiko sedang pada banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan; dan risiko rendah pada tanah longsor dan epidemi/wabah penyakit. Penentuan tingkat risiko tersebut dilakukan melalui analisis tiga komponen utama, yaitu tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana BNPB, seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat ancaman gempa bumi, sedangkan kawasan pesisir di Kecamatan Siberut Selatan, Siberut Barat Daya, Siberut Utara, Siberut Barat, Siberut Tengah, Sipora Utara, Sipora Selatan, Pagai Utara, dan Pagai Selatan berada pada zona rawan tsunami dengan tingkat risiko yang bervariasi. Desa-desa yang berada di sepanjang garis pantai merupakan wilayah dengan tingkat keterpaparan paling tinggi karena menjadi lokasi permukiman penduduk, pusat pemerintahan, kawasan ekonomi, pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, telekomunikasi, serta infrastruktur transportasi yang berpotensi terdampak apabila terjadi gempa bumi besar yang diikuti tsunami.

1. Indeks Risiko Bencana

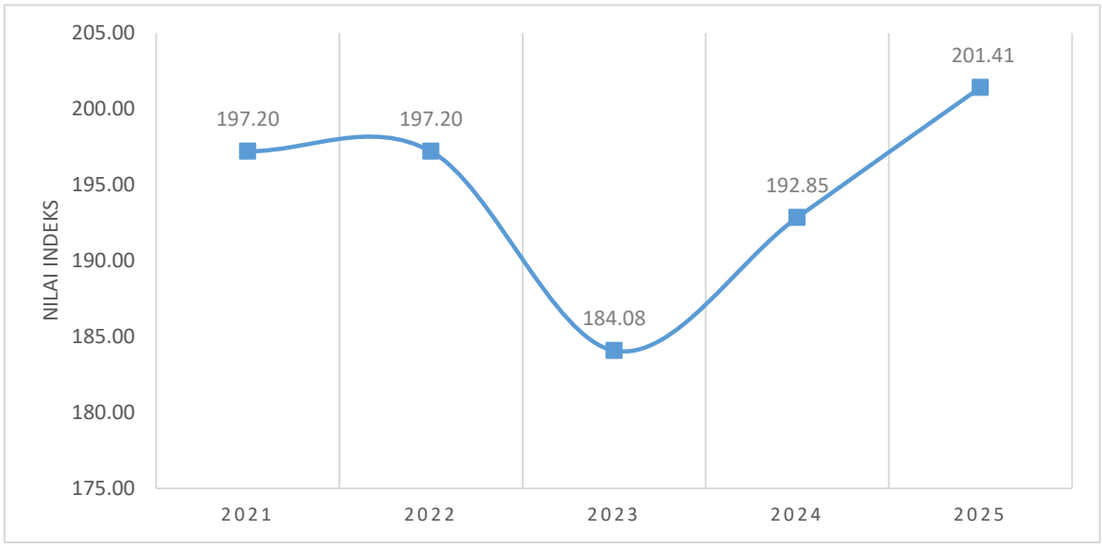
Sebagai daerah dengan potensi bencana yang besar, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus melakukan upaya mitigasi bencana untuk mengurangi dampak negatif dari setiap bencana yang terjadi. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari pemahaman risiko bencana yang diperoleh melalui informasi/kajian risiko bencana, yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik, dan operasional penanggulangan bencana. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu dari 18 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan tsunami, akibat tumbukan antara Lempeng Samudera Hindia-Australia dengan Lempeng Benua Asia yang membentuk patahan sepanjang 1.650 km di pantai barat Sumatera, yang disebut Mentawai Fold Zone.

Tabel 2.34
Perkembangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Risiko Bencana Indonesia	197,20	197,20	184,08	192,85	201,41

Sumber: IRBI BNPB

Gambar 2.24
Perkembangan Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



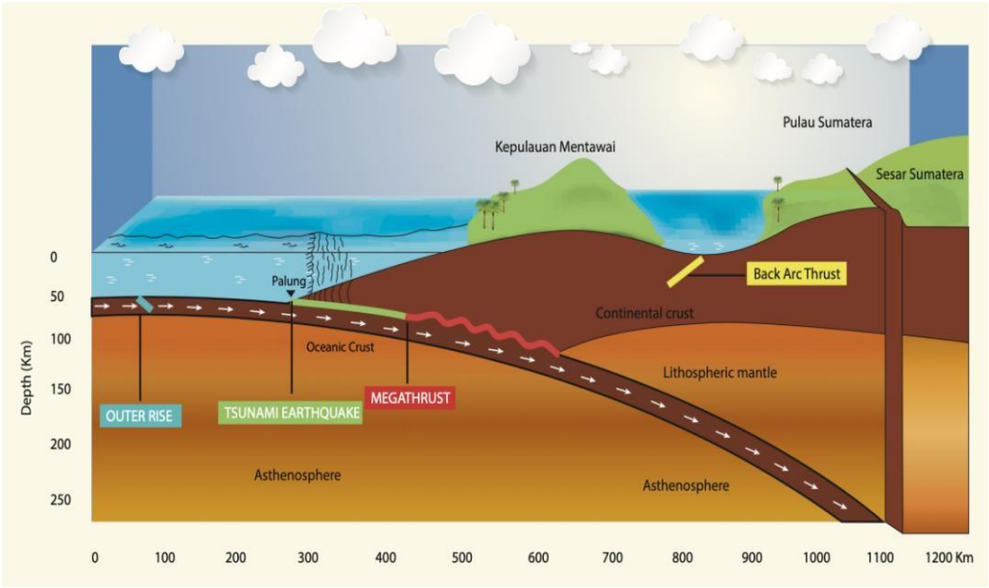
Sumber: IRBI BNPB

Perkembangan indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2021-2025 menunjukkan tren yang relatif stagnan pada tiga tahun pertama, yaitu tetap berada pada angka 197,20 dari tahun 2021 hingga 2022. Perbaikan signifikan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan penurunan indeks menjadi 184,08, sebelum kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 192,85 dan tahun 2025 menjadi 201,41, yang merupakan nilai tertinggi sepanjang periode pengamatan.

Peningkatan nilai IRBI pada tahun 2024-2025 perlu menjadi perhatian serius, karena semakin tinggi nilai indeks risiko bencana menunjukkan semakin besarnya tingkat ancaman, keterpaparan penduduk dan aset, serta kebutuhan penguatan kapasitas penanggulangan bencana daerah. Penurunan angka pada tahun 2023 sebelumnya menjadi indikasi adanya upaya dan kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi bencana melalui penguatan kapasitas, kepedulian, dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana, namun tren tersebut belum berlanjut secara konsisten pada dua tahun berikutnya.

Oleh karena itu, penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana menjadi prioritas utama dalam pembangunan Tahun 2027, melalui pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB) secara berkala, perluasan cakupan sistem peringatan dini (Early Warning System), penguatan jalur dan rambu evakuasi tsunami, peningkatan jumlah Desa Tangguh Bencana, serta penerapan prinsip pembangunan tangguh bencana (disaster resilient development) pada seluruh infrastruktur strategis daerah.

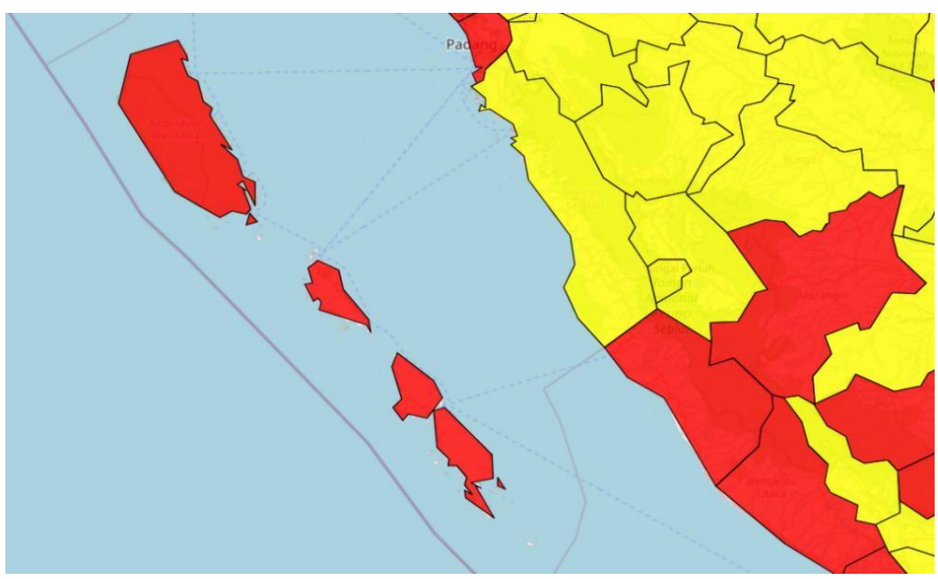
Gambar 2.25
Proses Terjadinya Gempa Bumi Tektonik



Salah satu bencana yang mengancam kehidupan masyarakat Mentawai adalah gempa bumi zona Megathrust Mentawai-Siberut, yang merupakan salah satu zona tumbukan lempeng terletak di sepanjang batas barat Pulau Sumatera, tepatnya di barat Kepulauan Mentawai, dengan kedalaman dangkal. Zona Megathrust Mentawai-Siberut ini merupakan hasil dari aktivitas subduksi atau pergerakan Lempeng Indo-Australia ke arah utara yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana daerah menjadi hal penting dilakukan, terutama dalam pengarusutamaan kebencanaan pada setiap sektor pembangunan.

Penguatan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir risiko dan memitigasi dampak bencana merupakan bagian penting dari tahapan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana. Pemahaman terhadap mekanisme terjadinya gempa bumi tektonik akibat pelepasan energi pada zona subduksi menjadi dasar penting bagi penyusunan sistem peringatan dini serta perencanaan jalur evakuasi yang tepat sasaran bagi masyarakat di kawasan pesisir.

Gambar 2.26
Peta Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025



Peta risiko bencana menggambarkan sebaran tingkat kerawanan gempa bumi dan tsunami pada seluruh gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan kawasan pesisir yang menghadap langsung ke Samudera Hindia menunjukkan tingkat kerawanan tertinggi. Peta ini menjadi acuan penting dalam perencanaan tata ruang, penentuan lokasi kawasan permukiman baru, serta penyusunan jalur dan titik evakuasi yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Indeks Ketahanan Daerah

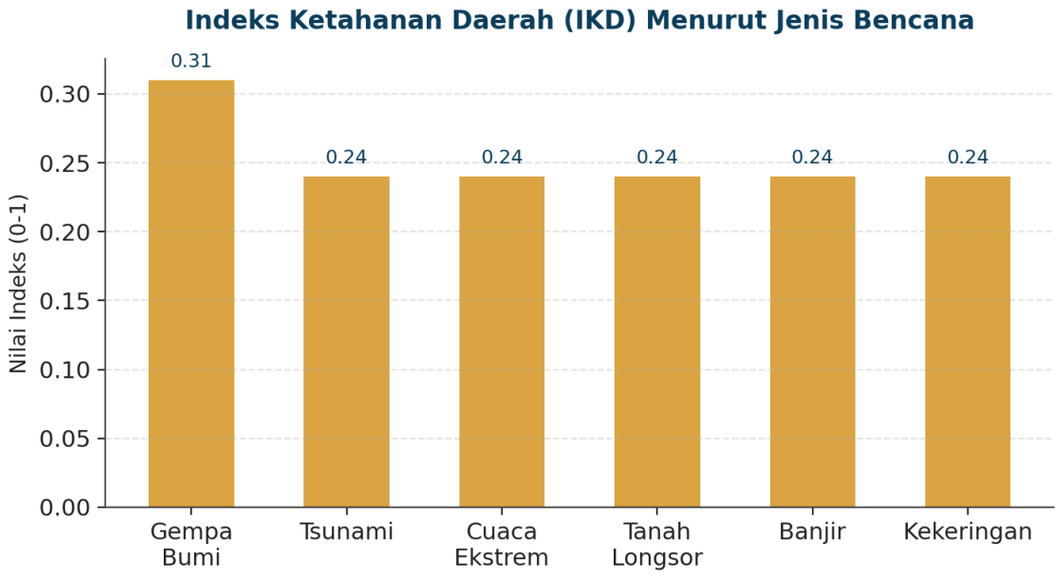
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi dan mengatasi dampak bencana. Indeks ini mengukur berbagai faktor yang memengaruhi kerentanan dan kapasitas suatu daerah dalam merespons bencana, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indeks dan tingkat ketahanan daerah dinilai menggunakan indikator HFA (Hyogo Framework for Actions) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012, yang terdiri atas 5 fokus prioritas dan dibagi dalam 22 indikator pencapaian. Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0-1, dengan pembagian kelas: indeks ≤ 0,4 adalah rendah, 0,4-0,8 adalah sedang, dan 0,8-1 adalah tinggi.

Tabel 2.35
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Jenis Bencana

No	Jenis Bencana	IKD	Keterangan
1	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	-	Rendah
2	Gempa Bumi	0,31	Rendah
3	Tsunami	0,24	Rendah
4	Cuaca Ekstrem	0,24	Rendah
5	Tanah Longsor	0,24	Rendah
6	Banjir	0,24	Rendah
7	Kekeringan	0,24	Rendah
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	Rendah

Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2025

Gambar 2.27
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Jenis Bencana



Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2025

Indeks ketahanan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk seluruh jenis bencana berada pada rentang 0,24 hingga 0,31, atau seluruhnya berada pada kategori rendah. Nilai tertinggi terdapat pada jenis bencana gempa bumi dengan indeks 0,31, sementara jenis bencana tsunami, cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir, dan kekeringan seluruhnya berada pada angka yang sama yaitu 0,24. Sementara itu, untuk jenis bencana gelombang ekstrem dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan, data indeks ketahanan belum tersedia.

Rendahnya indeks ketahanan daerah pada seluruh jenis bencana berarti bahwa tingkat ketahanan masyarakat Kepulauan Mentawai dalam menghadapi bencana yang akan datang masih berada pada kondisi belum sepenuhnya menyadari bahaya dan dampak bencana yang ditimbulkan. Kondisi ini konsisten dengan tingginya nilai IRBI yang telah diuraikan sebelumnya, dan menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat masih menjadi kebutuhan mendesak dalam lima prioritas kerangka Hyogo, khususnya pada aspek pengurangan faktor risiko dasar dan penguatan kesiapsiagaan bencana.

Sejalan dengan itu, arah kebijakan pembangunan Tahun 2027 juga diarahkan pada upaya mitigasi pasca bencana melalui edukasi dan advokasi kebencanaan bagi masyarakat, mulai dari tatanan kebijakan perencanaan pembangunan, penguatan sistem peringatan kebencanaan, penyediaan alat peraga dan jalur evakuasi, pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat, hingga penyiapan sumber daya manusia dan kelembagaan penanggulangan bencana yang memadai.

2.1.1.7 Aspek Demografi

Demografi dapat diartikan sebagai dinamika kependudukan manusia. Menurut Philip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan (1959) berpendapat bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut. Secara lebih rinci, demografi meliputi:

1. Ukuran penduduk: Jumlah total penduduk dalam suatu wilayah tertentu.

2. Struktur penduduk: Komposisi penduduk berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan agama.
3. Distribusi penduduk: Penyebaran penduduk di suatu wilayah geografis, termasuk kepadatan penduduk dan pola urbanisasi.
4. Perubahan penduduk: Bagaimana jumlah dan struktur penduduk berubah seiring waktu akibat faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi.

Secara umum keadaan kependudukan di Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara teori (BPS), penduduk diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Hubungan antara penduduk dan pembangunan adalah hubungan yang dinamis dan kompleks. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan faktor-faktor kependudukan dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk. Pembangunan yang berhasil dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesetaraan. Integrasi perencanaan dengan kependudukan menjadi hal penting bagi daerah dalam mengarahkan esensi pembangunan daerah, bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan.

Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 berjumlah 99.810 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat pada Kecamatan Sipora Utara yaitu dengan kepadatan penduduk sebesar 50,93 orang/km^2 dan tingkat *kepadatan penduduk* yang jarang penduduknya terdapat pada Kecamatan Siberut Barat yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 7,33 orang/km^2.

Tabel 2.36
Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

No	Kecamatan	Luas Daerah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (orang/km^2)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Pagai Selatan	851,28	10.736	12,61	2,19
2	Sikakap	312,60	11.318	36,21	2,21
3	Pagai Utara	371,25	6.675	17,98	1,48
4	Sipora Selatan	348,33	10.932	31,38	1,36
5	Sipora Utara	272,40	14.441	53,01	3,23
6	Siberut Selatan	328,00	11.317	34,5	2,25
7	Siberut Barat Daya	1.013,83	8.266	8,15	3,61
8	Siberut Tengah	589,75	8.048	13,65	1,95
9	Siberut Utara	782,68	9.440	12,06	2,03
10	Siberut Barat	1.163,64	8.637	7,42	1,83
2025		5.983,22	99.810	16,54	2.25
2024		5.983,22	97.837	16,21	1,53
2023		5.983,22	95.068	15,29	1,56
2022		6.011,35	89.401	14,82	1,15
2021		6.011,35	88.389	19,96	0,84

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026

Laju pertumbuhan penduduk di Kepulauan Mentawai tahun 2025 sebesar 2,25 persen, artinya ada penambahan 2,25 orang penduduk dari 100

orang penduduk yang ada dan secara keseluruhan ada penambahan penduduk sebesar 2,25 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.37
Keadaan Jumlah Penduduk, Rasio Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pagai Selatan	5.611	5.125	10.736	109,48
2	Sikakap	5.864	5.454	11.318	107,52
3	Pagai Utara	3.514	3.161	6.675	111,17
4	Sipora Selatan	5.651	5.281	10.932	107,01
5	Sipora Utara	7.423	7.018	14.441	105,77
6	Siberut Selatan	5.856	5.461	11.317	107,23
7	Siberut Barat Daya	4.328	3.938	8.266	109,90
8	Siberut Tengah	4.187	3.861	8.048	108,44
9	Siberut Utara	4.914	4.526	9.440	108,57
10	Siberut Barat	4.513	4.124	8.637	108,43
	TOTAL	51.861	47.949	99.810	108,16

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan jenis kelamin seperti pada Tabel 2.19 yang dikelompokkan berdasarkan rasio jenis kelamin menunjukkan rasio sebesar 108,16 artinya jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Rasio jenis kelamin juga dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan, artinya dalam 100 orang perempuan terdapat sebanyak 108 orang laki-laki.

Tabel 2.38
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
0 - 4	3.482	3.097	6.579
5 - 9	4.749	4.462	9.211
10 - 14	4.965	4.478	9.443
15 - 19	5.475	5.143	10.618
20 - 24	4.769	4.515	9.284
25 - 29	4.539	4.184	8.723
30 - 34	3.844	3.502	7.346
35 - 39	3.871	3.598	7.469
40 - 44	3.685	3.208	6.893
45 - 49	3.249	2.918	6.167
50 - 54	2.646	2.415	5.061
55 - 59	2.250	2.010	4.260
60 - 64	1.550	1.503	3.053
65 - 69	1.294	1.316	2.610
70 - 74	678	678	1.356
75+	815	922	1.737
Total	51.861	47.949	99.810

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026

Pengelolaan tren perkembangan penduduk yang baik dapat membantu dalam memanfaatkan potensi bonus demografi dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Bonus demografi memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan suatu daerah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diindikasikan ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi serta kualitas hidupnya yang layak.

Pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh positif tidak serta merta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi merata dan setidaknya menjadi t*rickle-down effect* yang diharapkan menetes ke bawah membantu ekonomi masyarakat dengan tetap membutuhkan intervensi pemerintah daerah sebagai katalisator pembangunan sehingga masyarakat benar-benar merasakan arti pembangunan.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

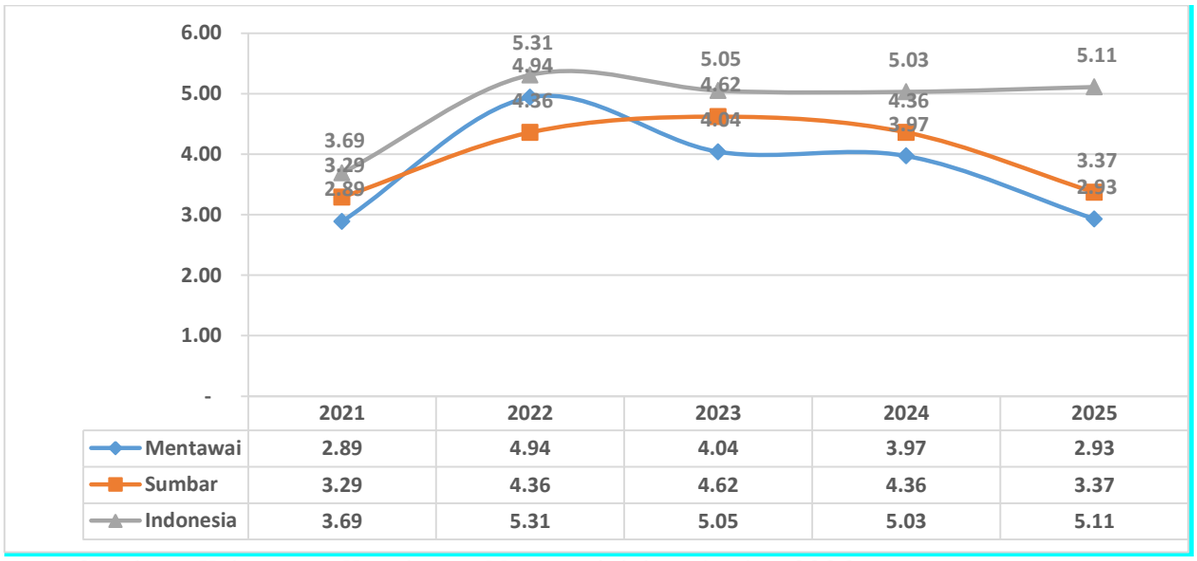
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan ekonomi suatu daerah, semakin membaiknya distribusi ekonomi/ pendapatan masyarakat dan meningkatnya daya beli masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi juga sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah yang dilihat dari berbagai waktu tertentu.

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2021-2025 menunjukkan tren kenaikan, terkhususnya setelah pasca kejadian COVID-19 yang melanda pada tahun 2021. Kenaikan dalam sisi permintaan domestik dengan terbukanya aktivitas sosial ekonomi masyarakat turut menyumbang kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dari -2,89 persen pada tahun 2021 meningkat menjadi 4,94persen pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan kenaikan secara regional untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu dari 3,29 persen tahun 2021 meningkat menjadi 4,36 persen pada tahun 2022 dan secara nasional dari 3,69 persen tahun 2020 meningkat menjadi 5,31 persen pada tahun 2021.

Gambar 2.28
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Mentawai	2.89	4.94	4.04	3.97	2.93
Sumbar	3.29	4.36	4.62	4.36	3.37
Indonesia	3.69	5.31	5.05	5.03	5.11

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2026

Kenaikan produksi barang dan jasa pasca COVID-19 secara masif mempengaruhi positif pada sosial ekonomi masyarakat di Kepulauan Mentawai, ini dapat terlihat pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Mentawai mencapai 4,04 persen dan menjadi pertumbuhan cenderung menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2021-2025). Namun di tahun 2024 dan 2025 mengalami *decline* yaitu menjadi 3,97 persen (2024) dan 2,93 persen (2025) khususnya untuk sektor akomodasi/makan minuman, pertanian kehutanan dan perikanan sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2024 dan penurunan pada sektor Pertambahan dan Penggalian, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Transportasi dan Pergudangan, akomodasi/makan minuman, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib pada tahun 2025.

2. Tingkat Kemiskinan Daerah dan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (Word Bank, 1990). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi kemiskinan, tetapi kemiskinan juga dapat menghambat pembangunan ekonomi. Kemiskinan menciptakan kesenjangan, mengurangi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan dapat menghambat investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur yang penting untuk pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi perlu adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Kemiskinan dihitung berdasarakan pendekatan *basic need aproach*. Penghitungan dilakukan oleh Badan Psat Statistik (BPS). BPS menetapkan

angka garis kemiskinan yang kemudian menjadi acuan (dasar) dalam menentukan jumlah penduduk miskin, indek kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

Ada dua faktor yang mempengaruhi angka garis kemiskinan, yakni harga kebutuhan pokok makanan dan non-makanan. Fluktuasi harga kebutuhan pokok makanan berkontribusi sebesar 60-70%, sebesar 30-35%nya ditentukan oleh harga beras. Semakin tinggi harga makanan maka akan semakin tinggi GK. Faktor non-makanan mempengaruhi garis kemiskinan hanya sekitar 30-40 % saja, tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Jadi kenaikan harga elektronik, sepeda motor, mobil, dan sejenisnya tidak terlalu berpengaruh pada perubahan angka garis kemiskinan. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, rata-rata harga kebutuhan pokok makanan mengalami peningkatan. Harga kebutuhan pokok makanan yang dimaksud adalah: beras, bawang merah, bawang putih bonggol, cabai merah keriting, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu. Tabel berikut memperlihatkan tren perkembangan harga yang dimaksud.

Tabel 2.39
Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Makanan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

NO	Komuditi	Harga Rata-Rata/Tahun (Rp)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Beras Premium	15.933	16.124	18.058	18.758	18.042
2	Beras Medium	13.922	13.958	15.067	17.516	16.053
3	Bawang Merah	32.385	40.125	35.133	42.000	44.321
4	Bawang Putih Bonggol	32.388	33.686	38.971	42.581	42.149
5	Cabai Merah Keriting	42.323	58.832	49.717	50.645	60.593
6	Daging Sapi Murni	130.698	149.810	156.175	160.000	155.029
7	Daging Ayam Ras	34.112	37.766	38.783	43.006	43.993
8	Telur Ayam Ras	23.818	25.761	29.683	33.776	31.630
9	Gula Pasir Lokal	14.839	15.123	15.775	18.000	189.059
10	Minyak Goreng Curah	16.103	17.171	16.233	16.000	16.730
11	Tepung Terigu	11.440	12.440	13.658	14.000	13.382

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Beras sebagai faktor terbesar dalam menentukan garis kemiskinan terus saja naik dari tahun ke tahun. Tapi perlu juga diingat bahwa beras bukan satu-satunya makanan pokok di Mentawai. Sebagian dari masyarakat Mentawai mengkonsumsi Sagu dan keladi sebagai kebutuhan pokok, khususnya masyarakat pulau Siberut.

Dari segi non makanan bisa dilihat dari Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) realatif berfluktuasi. Namun tetap cendrung memperlihatkan trend peningkatan. Tabel berikut menggambarkan peningkatan harga konstruksi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.40
Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruiksi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 – 2025

No	Tahun	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
1	2021	124,97
2	2022	129,04
3	2023	121,25
4	2024	118,65
5	2025	117,65

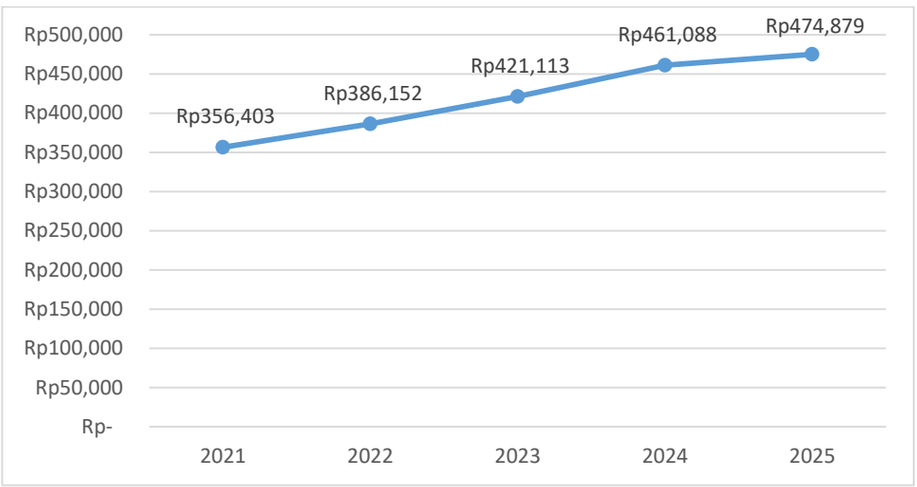
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka Tahun 2026

Gambaran singkat dari perkembangan harga tersebut merupakan alasan logis dari meningkatnya garis kemiskinan. Diketahui bahwa dalam waktu 5 tahun terakhir angka garis kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai terus saja meningkat. Tahun 2016 Garis Kemiskinan Mentawai adalah Rp. 263.793, dan kemudian di tahun 2025 tembus di angka Rp. 474.879. Artinya masyarakat yang jumlah pengeluarannya dibawah Rp. 474.879/kapita/bulan dikategorikan sebagai masyarakat miskin.

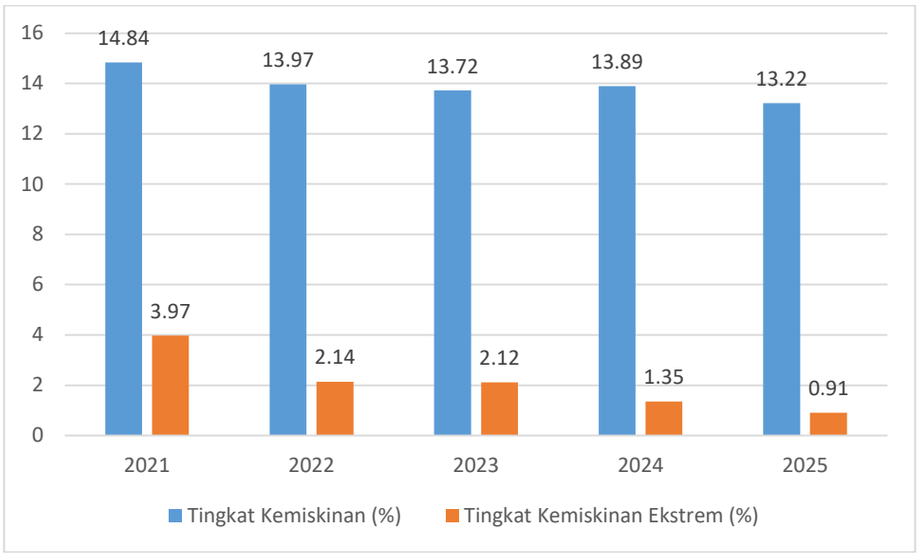
Angka garis kemiskinan bisa saja berubah mengikuti atau menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok (makanan dan non makanan). Fluktuasi harga kebutuhan pokok identik dengan inflasi. Menjaga untuk tidak terjadinya peningkatan inflasi sama dengan menjaga untuk tidak naiknya angka garis kemiskinan.

Dengan begitu, peningkatan angka garis kemiskinan bisa diartikan sebagai kegagalan pemerintah dalam menjaga inflasi. Pemerintah masih belum cermat dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah harus lebih cermat untuk menjaga agar tidak terjadinya kenaikan inflasi.

Gambar 2.29
Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Gambar 2.30
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : BPS, 2026 (diolah)

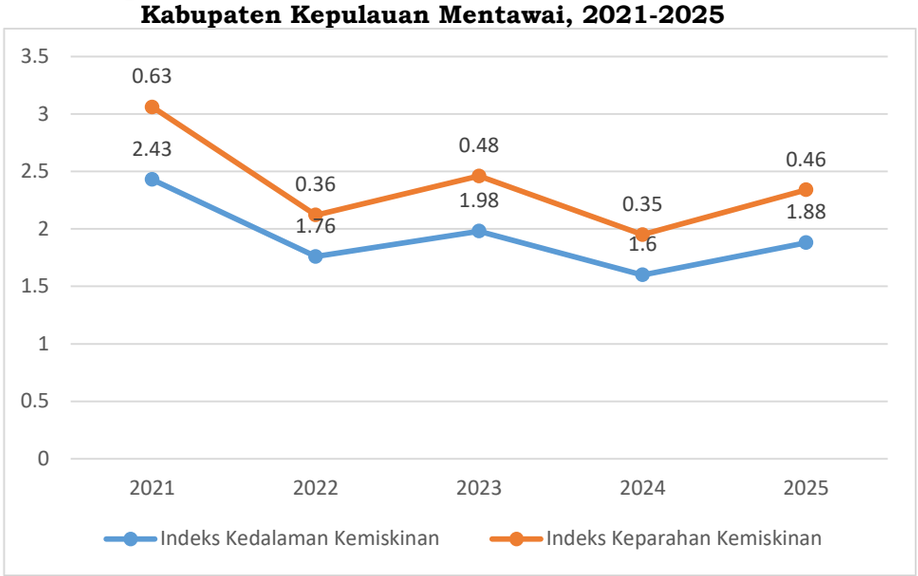
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan pola penurunan. Namun sangat lambat dan belum terlalu signifikan. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,84, tahun berikutnya turun dan di tahun 2024 sedikit mengalami kenaikan. Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 13,22 persen. Hal yang mendasar menjadi indikasi belum signifikannya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah terkait perbaikan dan pemutakhiran data kemiskinan (updating) baik exclusion error dan inclusion error data dan belum terintegrasinya program penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Disisi lain, target kemiskinan harus segera diatasi adalah penuntasan/pengentasan masyarakat miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah tingkat kemiskinan ekstrem yang dihitung dari penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dengan pola yang relatif sama dengan penurunan tingkat kemiskinan. Berbagai upaya dilakukan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan pencapaian target SDG's yaitu tanpa kemiskinan antara lain integrasi program, pemutakhiran pensasaran data kemiskinan daerah (P3KE) dan kolaborasi pemangku kepentingan dan dunia usaha.

Pada perspektif dan asumsi umum bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berkorelasi positif, artinya peningkatan jumlah pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan suatu daerah dan sebaliknya. Hal ini senada dengan Todaro (2003), pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam memengaruhi pada tingkat kemiskinan. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan pendapatan berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pada akhirnya akan mengalami kemiskinan, dengan demikian jumlah pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. Hal ini sedikit berbeda dengan kondisi faktual (paradoks) di Kabupaten Kepulauan Mentawai di mana tingkat pengangguran yang rendah yaitu 1,53 persen tahun 2025 (terendah di Provinsi Sumatera Barat) namun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu 13,22 persen tahun 2025 (tertinggi di Provinsi Sumatera Barat). Fenomena ini

tentunya perlu kajian mendalam untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan asumsi. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat khususnya yang bekerja di sektor primer menjadi fokus dan lokus pembangunan sehingga apa yang dikerjakan (yang bekerja) bisa memberikan efek dan dampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melihat jarak antara kemampuan pengeluaran masyarakat miskin dengan kemiskinan maka digunakan indeks kedalaman kemiskinan. Semakin jauh antara keduanya maka semakin dalam indeks kemiskinan. Indkes keparahan kemiskinan adalah perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar diantara masyarakat miskin itu sendiri. Semakin tinggi kesenjangan antar masyarakat miskin maka semakin parah kemiskinan tersebut.

Gambar 2.31
Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : BPS, 2026

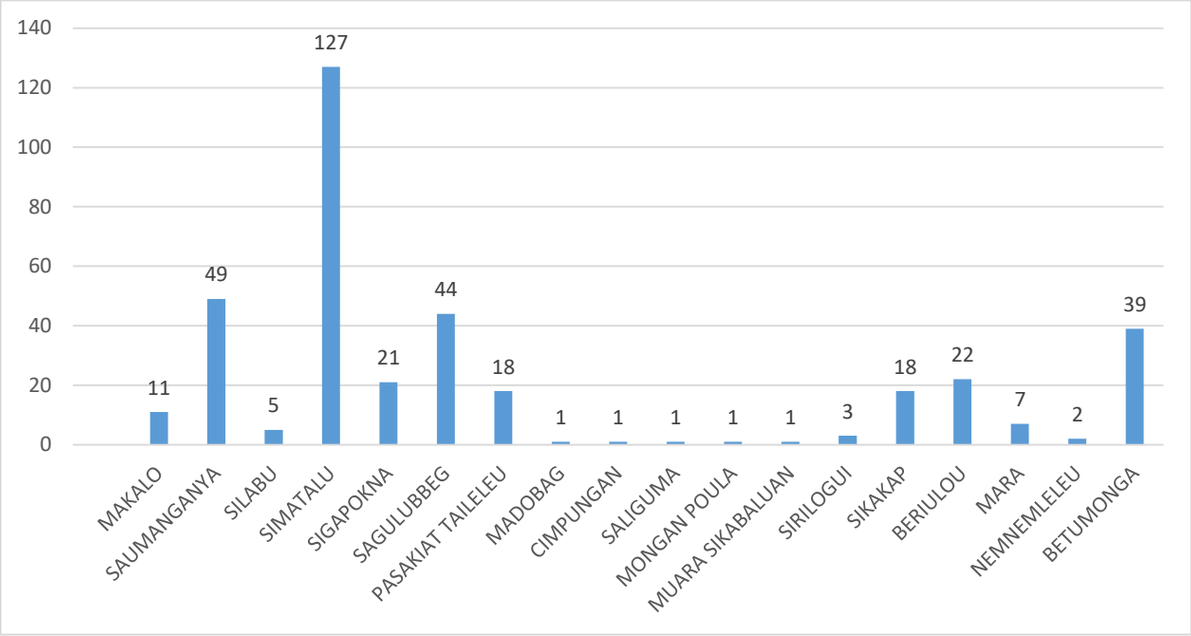
Semakin tinggi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan maka akan semakin sulit penanggulangannya. Artinya indeks kedalaman dan keparahan ini menjadi salah satu indikator tingkat kesulitan dalam penanggulangannya.

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 43 desa. Masing-masing desa memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, kondisi kemiskinan dimasing-masing desa relatif berbeda. Begitu juga dengan pilihan intervensi kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan juga akan berbeda.

Kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Mentawai, meski tinggi namun cendrung memperlihatkan trend penurunan. Pada tahun 2024, Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan, dan Anak melakukan verifikasi data penduduk miskin ekstrem. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa sebanyak 371 keluarga (2.128 jiwa) di Kabupaten Kepulauan Mentawai berada dalam kondisi miskin ekstrem.

Hasil verifikasi tersebut telah ditetapkan melalui SK Bupati Kepulauan Mentawai dengan nomor 100.3.3.2-387 Tahun 2024. Jumlah keluarga miskin ekstrem paling banyak dari hasil verifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati tersebut berada di Desa Simatalu. Tabel berikut memperlihatkan sebaran penduduk miskin ekstrem tahun 2024.

Gambar 2.32
Sebaran Keluarga Miskin Ekstrem
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024



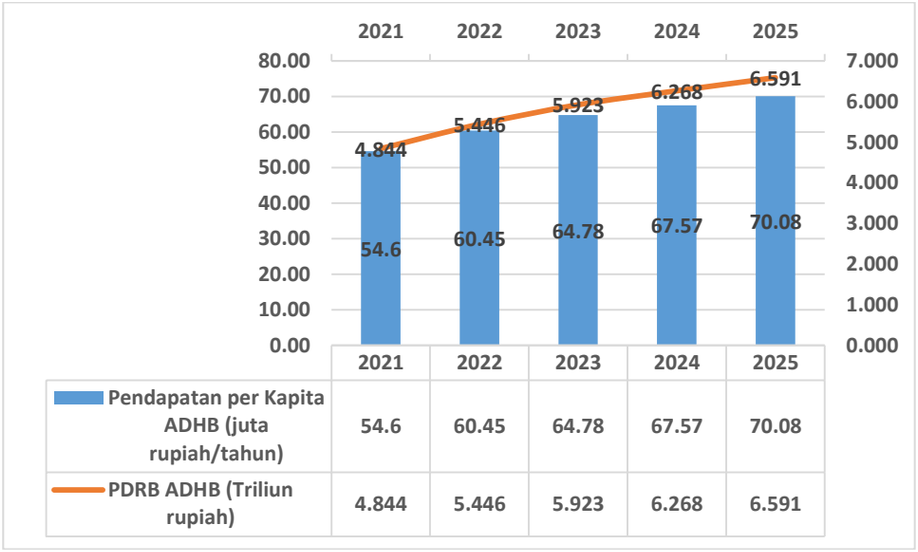
Sumber: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai

Simatalu, Saumanganya, Sagulubbeg, Betumonga, dan Beriulou merupakan desa-desa yang berada di kawasan peisisir. Desa-desa tersebut adalah desa-desa yang kondisi geografisnya relatif sulit untuk diakses.
Berdasarkan DTSEN, jumlah masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada pada desil 1 adalah sebanyak 4.753 keluarga (19.131 jiwa). Sebanyak 1.728 jiwa diantaranya adalah penduduk lansia. Dan sebanyak 34 keluarga adalah keluarga disabilitas.

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah atau wilayah. Indikator ini mengacu pada rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu dalam suatu populasi dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan tingkat kemakmuran antara daerah atau wilayah yang satu dengan yang lainnya. Selain sebagai data pencapaian pembangunan daerah, pendapatan per kapita juga dapat menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat.

Gambar 2.33
Perkembangan Pendapatan Per Kapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan per Kapita ADHB (juta rupiah/tahun)	54.6	60.45	64.78	67.57	70.08
PDRB ADHB (Triliun rupiah)	4.844	5.446	5.923	6.268	6.591

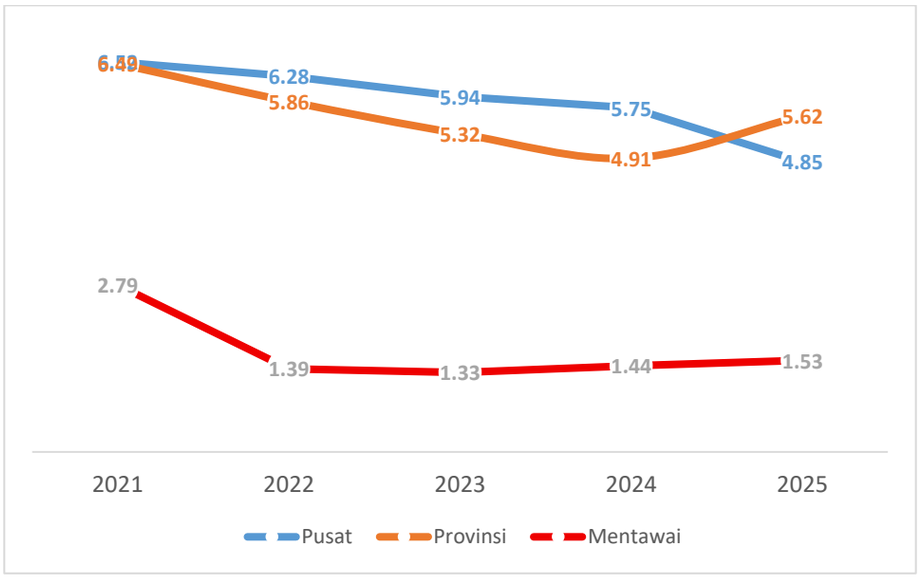
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2026

Perkembangan pendapatan per kapita di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2021-2025). Hal ini seiiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya sebagaimana tampak pada Gambar 2.14. Pada tahun 2021 pendapatan per kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.54,6 juta/kapita meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp.70,08juta/kapita. Begitu juga dengan PDRB Atas Harga Berlaku mengalami peningkatan yaitu dari Rp.4,844 triliun pada tahun 2021 meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2025 menjadi Rp.6,591 triliun. Peningkatan pendapatan per kapita dan PDRB ini menunjukkan terjadinya penambahan jumlah produksi barang dan jasa seiring dengan telah membaiknya aktivitas sosial ekonomi budaya masyarakat dengan pertumbuhan yang positif.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang menunjukkan persentase orang yang mencari kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menghambat pembangunan karena mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Contoh pengangguran terbuka antara lain lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi yang mencari pekerjaan di kota, tetapi tidak dapat tertampung, seseorang sarjana dengan kualifikasi tertentu yang menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.13 menunjukkan tren penurunan dengan persentasi angka yang sangat kecil, yaitu TPT pada tahun 2021 sebesar 2,79 persen dan mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 1,39 persen. Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengalami penurunan di 1,33 persen dan di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,44 persen. Pada tahun 2025 sebesar 1,53 persen

Gambar 2.34
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2026

Angka ini menginterpretasikan bahwa sangat rendahnya jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini disebabkan salah satunya adalah struktur perekonomian masyarakat Mentawai yang bertumpu pada sektor primer sehingga masyarakat akumulatif dinyatakan bekerja dalam durasi waktu tertentu atau tidak dalam kondisi menganggur mencari pekerjaan. Pencapaian TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan yang terendah di Provinsi Sumatera Barat begitu juga jika dibandingkan dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional. Namun hal ini tidak sejalan dengan tingginya angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai di tingkat Provinsi Sumatera Barat yang mencapai kurang lebih 14 persen. seperti tampak pada Gambar 2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan penurunan dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2021-2025. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Mentawai paling kecil dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Barat dan Nasional.

4. Rasio Gini

Indeks Gini, juga dikenal sebagai Rasio Gini atau Koefisien Gini, adalah alat untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di suatu wilayah.

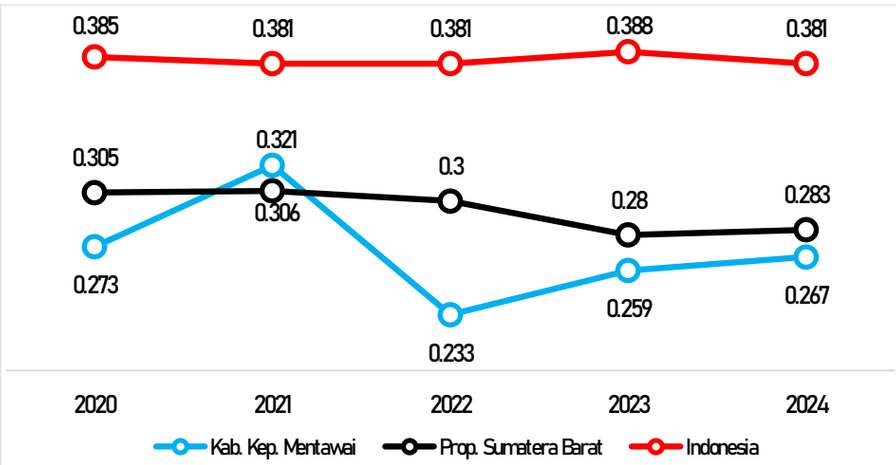
Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, penting dalam pembangunan karena menunjukkan seberapa merata pendapatan di suatu wilayah atau daerah, dan ketimpangan yang tinggi dapat menghambat kemajuan pembangunan. Pembangunan yang merata dan inklusif membutuhkan pemerataan pendapatan, di mana Indeks Gini yang rendah dapat membantu mewujudkannya, Pemerataan pendapatan dapat mendorong peningkatan produktivitas karena semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Jika nilai rasio gini bernilai 0 maka dikatakan pemerataan pendapatan sempurna, namun jika rasio gini bernilai 1 maka dikatakan ketimpangan pendapatan sempurna.

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Ketimpangan Rendah
0,4 - 0,5	Ketimpangan Sedang
> 0,5	Ketimpangan Tinggi

Perkembangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dilihat dari indikator Indeks Gini dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan relatif masih terjaga di bawah 0,4 yaitu dengan kategori ketimpangan rendah. Secara numerik, nilai Indeks Gini di Kepulauan Mentawai mengalami penurunan yaitu dari 0,273 pada tahun 2020 menjadi 0,267 pada tahun 2024.

Ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif merata (bahkan di bawah 0,3) dan tidak ada masyarakat yang dominan dalam menguasai sumber daya/pendapatan.

Gambar 2.35
Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Demikian halnya juga tren penurunan Indeks Gini juga dialami oleh Provinsi Sumatra Barat yaitu dari 0,305 pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga tahun 2024 nilai Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat menjadi 0,283. Namun dala skala Nasional, upaya penurunan Indeks Gini masai relatif stagnan pada kisaran 0,38 tentu upaya pemerataan pendapatan terus dilakukan agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

5. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Ini berarti bahwa dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan sebelumnya. Inflasi bukan hanya kenaikan harga beberapa barang, tetapi kenaikan harga secara umum yang mempengaruhi berbagai sektor. Kenaikan harga ini terjadi dalam jangka waktu yang berkelanjutan, bukan hanya sesaat. Tingginya tingkat inflasi akan menurunkan daya beli. Karena harga barang naik, nilai uang menjadi berkurang, sehingga daya beli masyarakat juga menurun.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Tingkat Inflasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Inflasi	1,3	7,15	3,8	3,5	3,8

Sumber : BPS (diolah)

Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, seiring dengan perubahan kondisi ekonomi global, nasional, serta karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan distribusi barang.

Pada tahun 2021, tingkat inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sangat rendah, yakni sebesar 1,3 persen. Angka ini mencerminkan kondisi permintaan masyarakat yang masih tertekan akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan tekanan inflasi dari sisi permintaan (demand-pull) relatif minimal. Di sisi lain, kebijakan pembatasan mobilitas turut menekan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, sehingga kenaikan harga barang dan jasa cenderung terkendali. Inflasi 1,3 persen pada tahun ini bahkan berada di bawah sasaran inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah, mengindikasikan perlunya stimulus untuk menggerakkan kembali roda perekonomian daerah.

Namun demikian, Tahun 2022 menjadi titik inflasi tertinggi dalam rentang lima tahun terakhir, dengan tingkat inflasi yang melonjak tajam menjadi 7,15 persen. Lonjakan ini sejalan dengan tren inflasi nasional dan global yang dipicu oleh beberapa faktor utama, antara lain: (1) terjadinya gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga energi dan pangan dunia; (2) pemulihan ekonomi pascapandemi yang mendorong lonjakan permintaan secara bersamaan (pent-up demand); serta (3) kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di dalam negeri pada pertengahan tahun 2022. Bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat bergantung pada pasokan barang melalui jalur laut, kenaikan biaya transportasi dan energi secara langsung memperparah tekanan inflasi di tingkat konsumen. Kelompok bahan makanan, makanan jadi, serta transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar pada periode ini.

Memasuki tahun 2023, tekanan inflasi mulai mereda secara signifikan. Tingkat inflasi turun ke angka 3,8 persen, mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang diterapkan, baik oleh Bank Indonesia melalui kebijakan moneter, maupun oleh pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Normalisasi harga komoditas global, membaiknya pasokan bahan pangan, serta meredanya tekanan dari sisi biaya energi turut berkontribusi pada penurunan inflasi. Meskipun demikian, angka 3,8 persen masih berada di batas atas sasaran inflasi nasional, yang mengindikasikan bahwa tekanan harga di daerah kepulauan belum sepenuhnya mereda, terutama akibat tingginya biaya distribusi antar pulau.

Pada tahun 2024, inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali menunjukkan penurunan moderat menjadi 3,5 persen. Tren penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian inflasi terus membuahkan hasil. Kondisi pasokan yang lebih terjaga, stabilitas harga pangan strategis, serta dukungan intervensi pasar melalui operasi pasar dan distribusi pangan bersubsidi menjadi faktor penjaga stabilitas harga. Angka inflasi 3,5 persen sudah masuk dalam rentang sasaran inflasi yang ditetapkan secara nasional, menandakan kondisi makroekonomi daerah yang semakin kondusif. Namun demikian, tantangan struktural berupa keterbatasan infrastruktur transportasi

antarpulau dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah tetap menjadi faktor risiko yang perlu diwaspadai.

Pada tahun 2025, tingkat inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebesar 3,8 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan moderat ini perlu dicermati, mengingat berbagai potensi risiko yang dapat mendorong tekanan harga, antara lain volatilitas harga pangan akibat perubahan iklim, potensi gangguan jalur distribusi di daerah kepulauan, serta dampak kebijakan harga energi. Meskipun angka ini masih terkendali, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan peran TPID dalam memantau dan menstabilkan harga, memperkuat cadangan pangan daerah, serta mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah untuk menekan biaya distribusi.

Secara keseluruhan, inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai pasca lonjakan tahun 2022 cenderung stabil pada kisaran 3,5–3,8 persen, yang menunjukkan keberhasilan pengendalian inflasi daerah. Meski demikian, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta kerentanan terhadap gangguan cuaca masih menjadi faktor utama yang perlu diantisipasi ke depan.

Rekomendasi kebijakan diarahkan pada:

1. Penguatan konektivitas dan sistem logistik antar pulau
2. Pengembangan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor daerah
3. Optimalisasi peran TPID dalam stabilisasi harga
4. Digitalisasi informasi harga dan distribusi barang

Dengan langkah tersebut, diharapkan stabilitas inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terus terjaga guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

Konsep efisiensi investasi dikenal dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR mengukur besarnya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan 1 unit *output*. ICOR yang rendah menunjukkan bahwa investasi menghasilkan peningkatan *output* yang relatif besar, yang berarti investasi tersebut efisien. Sebaliknya, ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa banyak investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan peningkatan *output* yang relatif kecil, yang mengindikasikan efisiensi investasi yang rendah. Efisiensi ini sangat penting bagi pembuat kebijakan dan investor, karena menunjukkan apakah tambahan investasi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

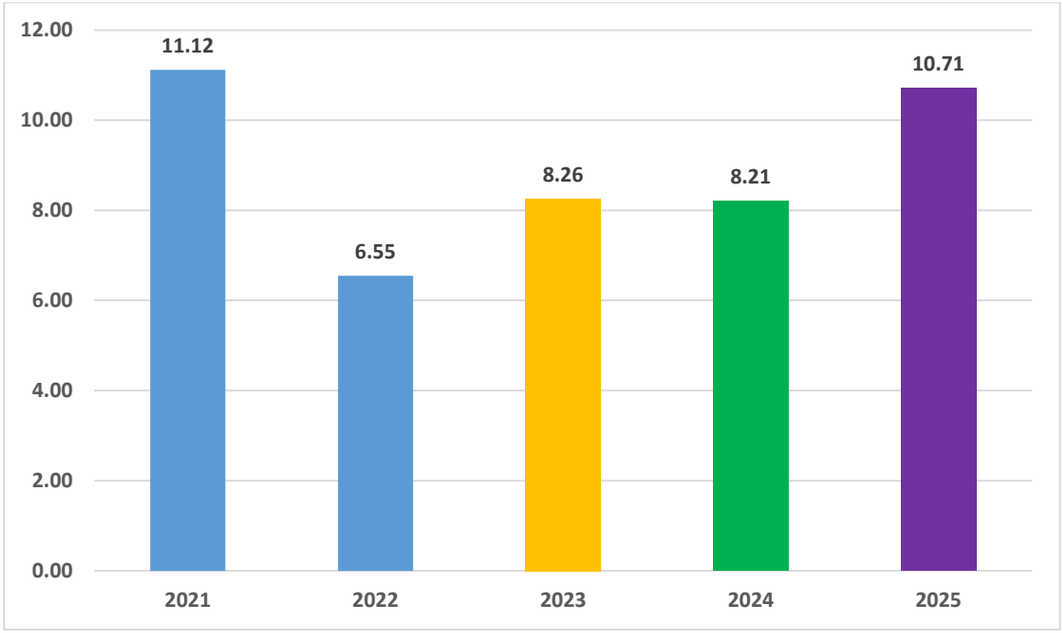
Pemerintah dapat menggunakan ICOR untuk merancang kebijakan investasi. Jika ICOR suatu negara tinggi, ini bisa menunjukkan bahwa ekonomi memerlukan reformasi atau peningkatan efisiensi untuk membuat investasi lebih produktif. Hal ini bisa mendorong kebijakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pendidikan tenaga kerja, atau mengurangi hambatan birokrasi yang menghalangi produktivitas investasi. Sebaliknya, ICOR yang rendah dapat menunjukkan bahwa investasi baru dapat menghasilkan hasil yang lebih besar, sehingga mendorong peningkatan investasi lebih lanjut.

Dalam kinerja permodalan atau investasi Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan peningkatan angka ICOR dari tahun 2022 sampai 2025. Pada tahun 2022, ICOR Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 6,55 artinya dibutuhkan investasi sebesar 6,55 miliar rupiah untuk menghasilkan tambahan 1 miliar rupiah *output*. ICOR Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2025 ICOR Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 10,71. Artinya dibutuhkan investasi yang lebih besar dari tahun 2025 untuk menghasilkan tambahan 1

miliar rupiah *output*. Peningkatan nilai ICOR ini mengindikasikan bahwa efisiensi investasi dalam mendorong pertumbuhan *output* mengalami penurunan.

Artinya, untuk menghasilkan tambahan *output* sebesar 1 miliar rupiah pada tahun 2025, dibutuhkan investasi yang lebih besar dibandingkan tahun 2022. Fenomena ini mencerminkan bahwa efektivitas pemanfaatan investasi di daerah masih perlu ditingkatkan.

Gambar 2.36
ICOR Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 – 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta dapat mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan di daerah, dan distribusi pendapatan yang timpang. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*), tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan (Esmara, Meier dalam Kuncoro, 2010). Untuk menyempurnakan tujuan pembangunan tersebut, munculah konsep pembangunan manusia. Menurut UNDP (1990) mengenai pembangunan manusia ialah suatu proses memperluas pilihan-pilihan penduduk *(a process enlarging people's choices*). Ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu panjang umur dan sehat (*longevity*), berpendidikan/ berpengetahuan (*knowledge*), dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak (*living standard*).

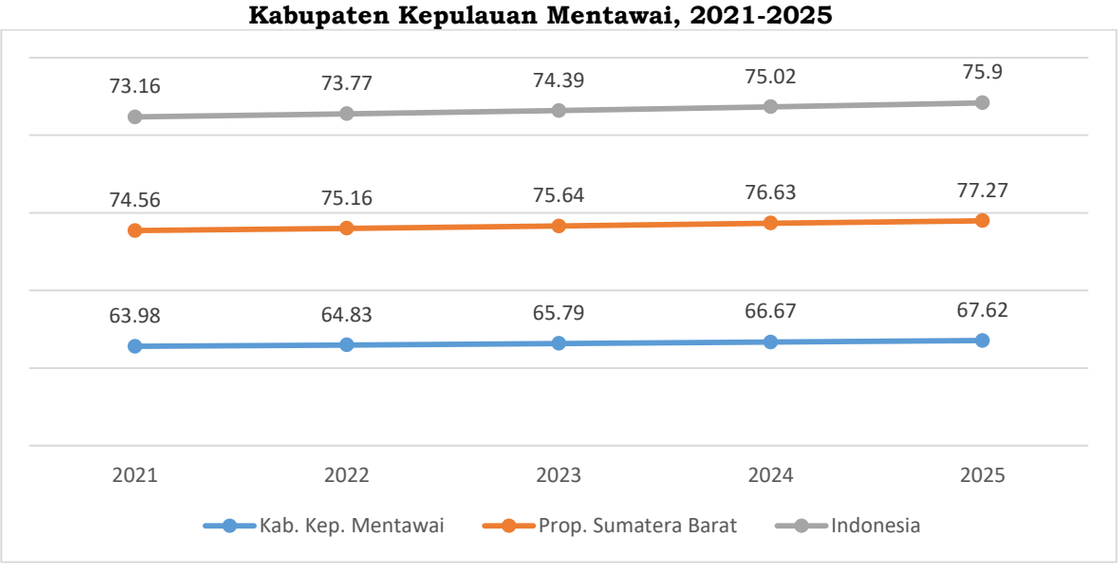
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Komponen penyusunan IPM adalah:

- Umur harapan hidup saat lahir mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat.
- Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan.
- Pengeluaran per kapita mewakili dimensi standar hidup layak.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Gambar 2.16 menunjukkan IPM Kabupaten Kepulauan

Mentawai tahun 2021 sebesar 63,98 mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebesar 64,83 dan di tahun 2025 menjadi sebesar 67,62.

Gambar 2.37
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Tren peningkatan ini cukup signifikan jika dilihat dari tahun 2021-2022 dengan kenaikan 0,85 poin sedangkan tahun 2022-2023 kenaikan 0,96 poin dan tahun 2023-2024 dengan kenaikan 0,88 poin tahun 2024-2025 dengan kenaikan sebesar 0,95 poin. Peningkatan ini menjadi hal yang baik dalam upaya menghadirkan kesejahteraan yang sebenarnya kepada masyarakat.

2. Kesehatan Untuk Semua

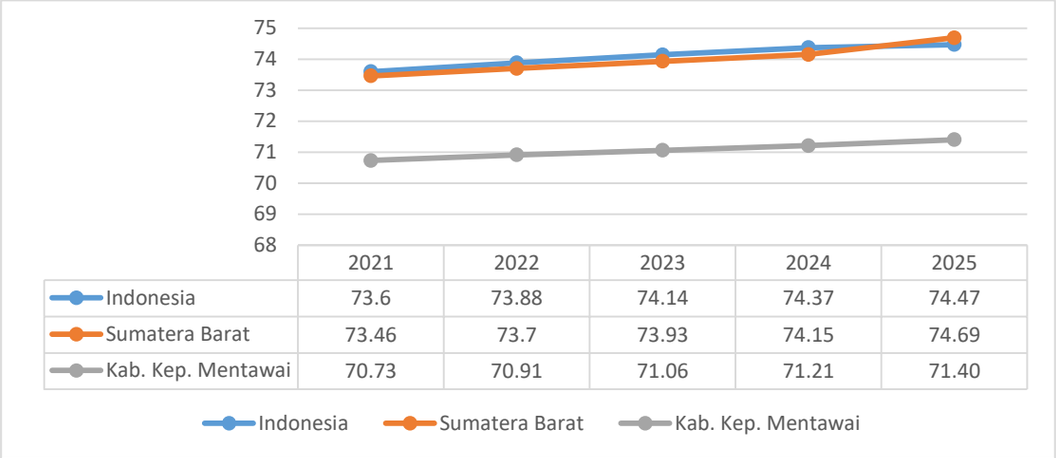
Kesehatan adalah suatu hal yang tidak tergantikan karena merupakan fondasi utama dari kualitas hidup dan produktivitas. Tanpa kesehatan yang baik, individu tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan sosial ekonomi. Kesehatan yang buruk dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan dan potensi penuh mereka, serta meningkatkan beban ekonomi baik pada individu maupun masyarakat melalui biaya perawatan medis yang tinggi sehingga kehilangan produktivitas. Disisi lain, kesehatan juga berpengaruh langsung pada kesejahteraan mental dan emosional, sehingga menjaga kesehatan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan bahagia. Dalam konteks yang lebih luas, masyarakat yang sehat merupakan dasar bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan tahun yang dapat dijalani seseorang sejak lahir, dan merupakan indikator penting untuk menilai kualitas hidup dan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. UHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keadaan lingkungan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah, dan perekonomian masyarakat.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan, menunjukkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, dan merupakan komponen penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan UHH mencerminkan kemajuan dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Gambar 2.38
Perkembangan Usia Harapan Hidup (tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Indonesia	73.6	73.88	74.14	74.37	74.47
Sumatera Barat	73.46	73.7	73.93	74.15	74.69
Kab. Kep. Mentawai	70.73	70.91	71.06	71.21	71.40

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan pencapaian ini terlihat pada tahun 2021 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 70,73 tahun meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2025 menjadi sebesar 71,40 tahun. Jika dibandingkan capaian UHH Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sumatera Barat dan secara Nasional, tentunya capaian UHH Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian UHH Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, seperti pada Gambar 2.21 menunjukkan pada tahun 2021 UHH Provinsi Sumatera Barat mencapai 73,5 tahun dan UHH Nasional sebesar 73,6 tahun, setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga tahun 2024 UHH Provinsi Sumatera Barat sebesar 74,69 tahun dan UHH Nasional sebesar 74,47 tahun. Upaya peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) sangat erat kaitannya angka kematian anak lahir, gizi yang cukup bagi ibu hamil dan bayi lahir, nutrisi dan gizi bagi anak, pola hidup sehat dan produktivitas, mutu layanan kesehatan, kualitas lingkungan, kualitas hidup bagi lanjut usia. *Analisis Perkembangan Usia Harapan Hidup (2021-2025)* Secara umum, data menunjukkan tren positif dan progresif di ketiga wilayah tersebut. Peningkatan UHH merupakan indikator keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan, perbaikan gizi, serta akses terhadap sanitasi dan layanan medis yang lebih baik. Dalam kurun waktu 5 tahun, Indonesia berhasil meningkatkan harapan hidup masyarakatnya sebesar 0,87 tahun. Hal ini mencerminkan keberhasilan program kesehatan nasional dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular di tingkat makro.

Provinsi Sumatera Barat menunjukkan akselerasi yang menarik, pada tahun 2025, UHH Sumatera Barat (74,69) berhasil melampaui rata-rata nasional (74,47). Ini menandakan bahwa intervensi kebijakan kesehatan di tingkat provinsi sangat efektif, bahkan mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan rata-rata nasional.

Kabupaten Kepulauan Mentawai meskipun masih berada di bawah angka nasional dan provinsi, Mentawai menunjukkan pertumbuhan yang stabil tren meningkat dari 70,73 (2021) menjadi 71,4 (2025). Namun, tren yang terus naik menunjukkan bahwa program afirmasi untuk wilayah tertinggal mulai membuahkan hasil. Fokus Mentawai: Meskipun terus meningkat, Kepulauan Mentawai memerlukan perhatian khusus untuk memperkecil ketimpangan dengan wilayah lain di Sumatera Barat agar standar kualitas hidup di kepulauan setara dengan wilayah daratan. Peningkatan UHH ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan lansia, karena penduduk yang

hidup lebih lama akan membutuhkan fasilitas kesehatan kronis yang lebih memadai di masa depan.

b. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat komplikasi yang terkait dengan kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan. AKI biasanya dinyatakan dalam angka per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu disebabkan oleh komplikasi yang berkaitan langsung dengan kehamilan, persalinan, atau nifas, seperti perdarahan, infeksi, preeklamsia, dan eklamsia. Beberapa faktor dapat memengaruhi AKI, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, status gizi ibu, pengetahuan tentang perawatan kehamilan, dan dukungan keluarga.

Tabel 2.42
Perkembangan Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Kematian Ibu 9Per 100.000 Kelahiran Hidup)	207	191	304	277	200

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Kepulauan Mentawai

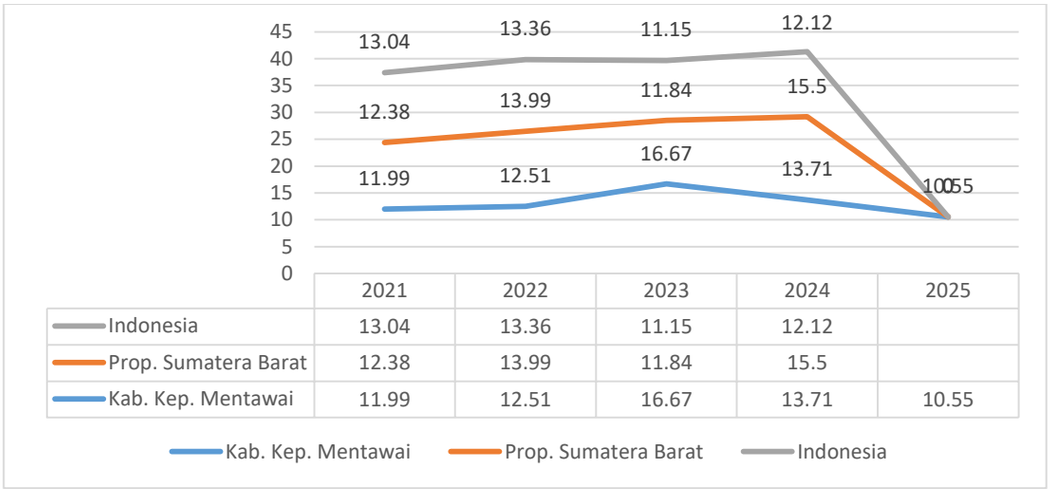
Perkembangan nilai Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai AKI yang masih relatif tinggi. Pada tahun 2020 nilai AKI sebesar 356 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebanyak 207 kematian ibu melahirkan dan pada tahun 2022 dengan 191 kasus kematian ibu melahirkan. Namun pada tahun 2023 angka AKI kembali meningkat menjadi 304 kasus kematian ibu melahirkan dan menurun di tahun 2024 menjadi sebanyak 277 kasus kematian ibu melahirkan dan ditahun 2025 angka AKI kembali menurun menjadi 200 kasus kematian ibu melahirkan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya peran kesehatan dalam mengedukasi dan mendampingi ibu hamil mulai dari pra kehamilan, selama kehamilan dan persalinan. Langkah mencegah kematian ibu hamil yang dapatdilakukan antara lain rentang usia hamil, kehamilan ideal pada usia 20-35 tahun, kontrol kehamilan, periksa kehamilan minimal setiap 3 bulan sekali atau lebih, libatkan keluarga, dampingi istri bersalin di pelayanan kesehatan, tunda usia perkawinan dini.

c. Angka Kesakitan/Morbiditas

Angka kesakitan atau morbiditas adalah indikator yang menunjukkan seberapa sering gangguan kesehatan terjadi dalam suatu populasi, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan merupakan indikator penting untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan seberapa banyak orang dalam suatu populasi yang menderita suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi angka kesakitan, semakin buruk derajat kesehatan penduduk. Pentingnya angka kesakitan (morbiditas) ini dihitung untuk:

a) Penilaian Program Kesehatan: Angka kesakitan membantu dalam mengevaluasi efektivitas program kesehatan dan intervensi yang bertujuan untuk mengurangi penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
b) Perencanaan Kesehatan: Data morbiditas digunakan untuk perencanaan program kesehatan yang lebih baik, seperti alokasi sumber daya dan pengembangan layanan kesehatan.
c) Pemantauan Kesehatan: Angka kesakitan membantu memantau tren penyakit dan masalah kesehatan dalam suatu populasi, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan dan intervensi yang tepat waktu.

Gambar 2.39
Perkembangan Angka Kesakitan/Morbiditas (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



	2021	2022	2023	2024	2025
Indonesia	13.04	13.36	11.15	12.12	
Prop. Sumatera Barat	12.38	13.99	11.84	15.5	
Kab. Kep. Mentawai	11.99	12.51	16.67	13.71	10.55

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Angka kesakitan (morbiditas) secara *time series* 2021-2025 di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan penurunan. Pada tahun 2021 angka kesakitan di Kepulauan Mentawai sebesar 11,99 persen, artinya dari 100 orang penduduk terdapat 16-17 orang yang mengalami keluhan kesehatan. Angka ini turun di tahun 2021 menjadi 11,99 persen dan tahun 2022 sebesar 12,51 persen. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan 4,16 poin menjadi 16,67 persen dan kembali turun di tahun 2025 menjadi 13,71 persen. Hal yang sama, angka kesakitan (morbiditas) di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional juga mengalami penurunan yaitu dari 14,39 persen pada tahun 2020 (Provinsi Sumatera Barat) dan 14,64 persen secara Nasional mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 12,38 persen untuk Provinsi Sumatera Barat dan sebesar 13,04 persen untuk Nasional. Namun, untuk 2024, angka morbiditas di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan yaitu menjadi 15,5 persen sedangkan untuk skala Nasional angka kesakitan (morbiditas) mengalami penurunan yaitu menjadi 12,12 persen

Angka kesakitan menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Berbeda dengan Usia Harapan Hidup, dalam variabel ini angka yang lebih rendah menunjukkan capaian yang lebih baik. Dimulai dari 13,04% pada 2021, sempat naik ke 13,36% (2022), lalu turun signifikan ke 11,15% (2023), sebelum kembali naik tipis ke 12,12% pada 2024. Sumatera Barat menunjukkan tren yang lebih volatil dibandingkan angka nasional.

Kabupaten Kepulauan Mentawai sempat mengalami lonjakan tinggi pada tahun 2023 di angka 16,67%, namun berhasil melakukan penurunan drastis secara berturut-turut hingga mencapai 10,55% pada 2025.

Analisis: Capaian tahun 2025 (10,55%) adalah angka terendah dalam seluruh tabel data ini. Penurunan dari 16,67% ke 10,55% dalam dua tahun

merupakan indikasi keberhasilan intervensi kesehatan di tingkat lokal, seperti perbaikan layanan kesehatan dasar di puskesmas atau peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan.

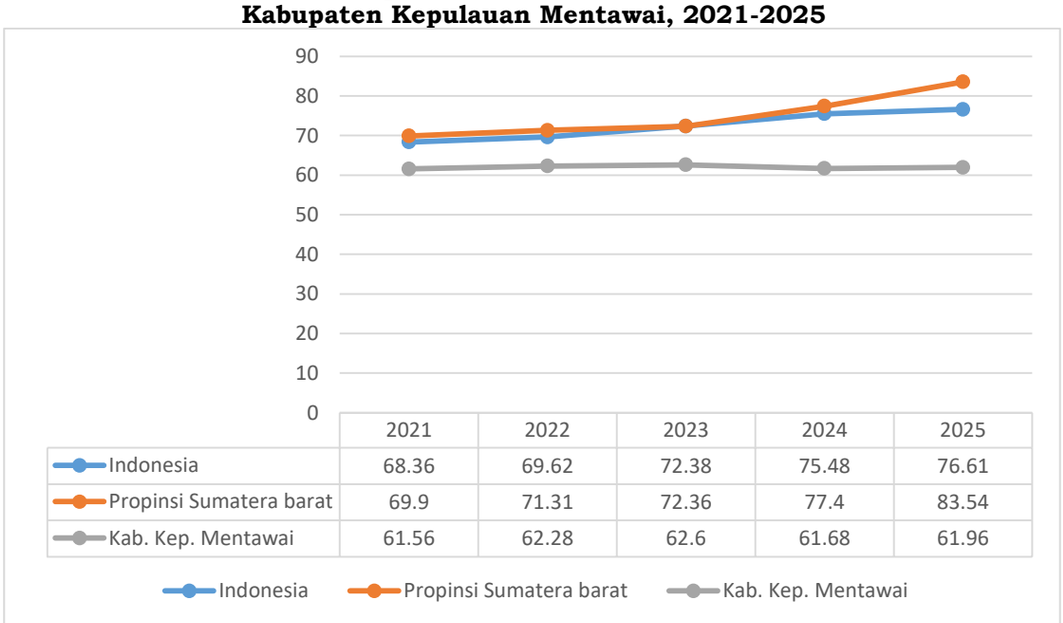
d. Cakupan Jaminan Kesehatan

Cakupan jaminan kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diimplementasikan oleh BPJS Kesehatan, merupakan komponen penting dalam pembangunan, karena memastikan akses layanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat, mendukung peningkatan kualitas hidup dan produktivitas, serta mengurangi beban ekonomi akibat penyakit. Cakupan jaminan kesehatan yang dihitung dalam layanan jaminan kesehatan berupa JKN, asuransi swasta, perusahaan/kantor. Pentingnya Jaminan Kesehatan dalam Pembangunan antara lain:

a) Peningkatan Kualitas Hidup: Jaminan kesehatan yang memadai memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan, mencegah penyakit, dan mendapatkan pengobatan yang tepat, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas.
b) Peningkatan Produktivitas: Dengan jaminan kesehatan, masyarakat tidak perlu khawatir akan biaya pengobatan yang mahal, sehingga dapat fokus pada pekerjaan dan kegiatan produktif lainnya.
c) Pencegahan Kemiskinan: Jaminan kesehatan dapat membantu mencegah orang jatuh ke dalam kemiskinan akibat biaya pengobatan yang mahal, karena beban finansial akibat penyakit akan berkurang.
d) Pembangunan Sumber Daya Manusia: Kesehatan yang baik merupakan modal penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, karena masyarakat yang sehat dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan.

Cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menjadi perhatian dan hal yang mendasar khususnya bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penanganan *stunting* dan program pembangunan lainnya. Gambar 2.23 menunjukkan cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum menyentuh angka 70 persen. Artinya masih terdapat 30 persen masyarakat Mentawai tidak memiliki jaminan kesehatan untuk layanan kesehatannya.

Gambar 2.40
Cakupan Jaminan Kesehatan (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Indonesia	68.36	69.62	72.38	75.48	76.61
Propinsi Sumatera barat	69.9	71.31	72.36	77.4	83.54
Kab. Kep. Mentawai	61.56	62.28	62.6	61.68	61.96

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021-2025

Secara nasional, cakupan Jaminan Kesehatan menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari 68,36% pada tahun 2021 menjadi 76,61% pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperluas kepesertaan JKN melalui berbagai program seperti PBI (Penerima Bantuan Iuran), integrasi data sosial, serta peningkatan akses layanan kesehatan.

Di tingkat Provinsi Sumatera Barat, capaian cakupan JKN juga mengalami peningkatan yang lebih progresif dibanding nasional, dari 69,90% pada tahun 2021 menjadi 83,54% pada tahun 2025. Lonjakan signifikan terutama terjadi pada periode 2024–2025, yang mengindikasikan adanya akselerasi kebijakan daerah, seperti optimalisasi Universal Health Coverage (UHC) dan dukungan APBD untuk pembiayaan peserta.

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan kondisi yang relatif stagnan dan fluktuatif. Cakupan JKN pada tahun 2021 sebesar 61,56% meningkat sedikit pada 2022 (62,28%), namun sempat menurun pada 2023 menjadi 60,60%. Pada periode berikutnya terjadi peningkatan terbatas hingga mencapai 61,96% pada tahun 2025. Dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi, posisi Mentawai masih tertinggal cukup signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya beberapa tantangan utama di Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain: Keterbatasan akses geografis wilayah kepulauan yang menyulitkan pendaftaran dan pemutakhiran data peserta.

Kapasitas fiskal daerah yang terbatas untuk mendukung pembiayaan peserta JKN. Validitas data kependudukan dan kemiskinan yang belum optimal. Tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan tren cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif stagnan, tentu perlu keberpihakan dan kerja keras pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat memiliki jaminan kesehatan baik secara mandiri, melalui pemerintah (Jamkesda/BPJS) dan dibiayai perusahaan/kantor.

Negara menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam rangka menjamin hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, Pemerintah Indonesia meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2011. Penyelenggaraan JKN diatur melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saat ini, pemerintah berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang menjamin setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil, menyeluruh, dan bermutu tanpa hambatan finansial.

e. Prevalensi *stunting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya. Dampak dari *stunting* adalah dalam jangka pendek: hambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, peningkatan risiko infeksi, dan gangguan metabolisme. Jangka panjang: Kesulitan belajar, gangguan kesehatan kronis (diabetes, penyakit jantung), dan penurunan produktivitas di masa depan.

Stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-2, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi

pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Pencegahan dan penanganan *stunting* menjadi prioritas penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan karena *stunting* menurunkan produktivitas dan pendapatan, tidak memiliki potensi untuk menjadi kurang cerdas dan memiliki kemampuan yang terbatas di masa depan.

Tabel 2.43
Perkembangan Prevalensi Stunting
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Prevalensi *stunting* (%)	27,3	32	33,7	26,2	26,3

Sumber : SSGI, 2021-2025

Capaian angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara tren selama lima tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan yaitu dari 27,3 persen di tahun 2021 menjadi 32,0 persen pada tahun 2022, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 33,7 persen, pada tahun 2024 menjadi 26,2, dan pada tahun 2025 prevalensi stunting 26,3, hal ini menjadi peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat begitu juga pemenuhan asupan gizi kepada pasangan atau ibu hamil/ 1.000 hari pertama kehidupan ketika sudah diketahui ada janin, begitu juga dengan pemantauan gizi ibu hamil yang senantiasa dilakukan melalui pelayanan kesehatan. Begitu juga perbaikan sarana dan prasarana lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan berupa pembangunan toilet RT, pengelolaan limbah, drainase dan berbagai intervensi yang terpadu. Akselerasi penanganan *stunting* telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gerakan Mentawai Anti *stunting* dan Gizi Buruk Peduli Anak (Masgibur Dua) dengan sasaran intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. *stunting* adalah masalah serius yang berdampak luas pada pembangunan. Penanganan *stunting* membutuhkan upaya yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pihak. Dengan penanganan yang tepat, *stunting* dapat dicegah dan diatasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Intervensi dilakukan melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) bersama BKKBN yang difokuskan pada pendampingan keluarga berisiko, pemenuhan gizi, serta intervensi spesifik bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Upaya pencegahan diperbuat melalui Aksi Bergizi di satuan pendidikan melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, yang menitikberatkan pada peningkatan literasi gizi, pencegahan anemia melalui konsumsi tablet tambah darah, serta pembiasaan perilaku hidup sehat pada remaja.

Kolaborasi tersebut diharapkan mewujudkan penanganan stunting yang komprehensip, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia serta percepatan pecapaian target penurunan stunting di daerah.

Tabel 2.44
Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Indikator Kesehatan	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Harapan Hidup (tahun)	64,73	64,93	65,1	71,21	72,26
Prevalensi Stunting	27,3	32	33,7	26,2	Belum release
Angka Kematian Bayi (kematian/1.000 kelahiran hidup)	23	20,4	18	28.4	22
Angka Kematian Balita (1.000 balita)	3,2	13,8	12	32.5	24
Angka Kematian Ibu (kematian/100.000 kelahiran hidup)	207	191	304	277.2	137
Cakupan Desa UCI (%)	59,52	51,2	35,87	30,3	53,6
Kunjungan ibu hamil)%)	53,1	75,71	81,4	82,1	1750
Rasio Daya Tampung RS Rujukan (TT/100.000 penduduk)	71	71	85	86	51
Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	66,50	70,18	76,42	42,04	32,12
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin (%)	55,14	75,71	81,4	55,31	42,9
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	59,07	60,00	68,26	58,51	67,45
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	58,01	49,13	56,28	69,13	74,8
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	17,74	21,43	24,05	85,43	86,82
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	32,71	54,60	56,24	62,60	80,18
Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	84,61	75,20	78,31	91,00	98,57
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	48,83	35,44	47,82	57,00	83,55
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	10,88	67,25	70,05	22,00	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	38,91	90,15	92,46	27,00	100
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan standar pelayanan TBC sesuai standar (%)	18,52	60,74	65,62	85,00	59,00
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	0,00	0,00	0	59,00	67,68
Angka kesakitan Malaria	0,5	1,31	1,43	1,08	0
Angka kesembuhan TB	85	85	90	88,5	15

sumber: data (diolah)

Pembangunan bidang kesehatan selama periode Tahun 2021-2025 menunjukkan capaian yang cukup baragam, dengan beberapa indikator mengalami peningkatan signifikan, namun sebagian lainnya masih menunjukkan fluktuasi bahkan penuunan kinerja yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan Tahun 2027. Pada Tabel 2.25 menunjukkan beberapa capaian indikator kesehatan daerah selama 5 tahun terakhir. Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukan tren peningkatan yang cukup signifikan, dari 64,73 tahun pada Tahun 2021 menjadi 72,26 tahun pada Tahun 2025.

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, perbaikan status gizi, serta pengendalian penyakit. prevalensi *stunting* mengalami peningkatan pada periode awal, dari 27,3% pada Tahun 2021 menjadi 33,7% pada Tahun 2023. Namun demikian, pada Tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 26,2% yang menunjukan mulai efektifnya intervensi percepatan penurunan stuntung. Data Tahun 2025 belum dirilis, sehingga evaluasi lanjutan masih diperlukan untuk memastikan keberlanjutan tren penurunan tersebut.

Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan tren menurun dari 23 per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2021 menjadi 18 pada Tahun 2023, namin kembali meningkat pada Tahun 2024 menjadi 28.4 dan menurun kembali pada Tahun 2025 menjadi 22. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas pelayanan kesehatan bayi masih perlu diperkuat.

Angka Kematian Balita mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dari 3,2 pada tahun 2021 meningkat menjadi 13,8 pada Tahun 2022, kemudian relatif menurun pada Tahun 2023, namun kembali meningkat signifikan pada Tahun 2024 menjadi 32,2 dan menurun pada Tahun 2025 menjadi 24. Hal ini mengindikasikan masih adanya permasalahan dalam pelayanan kesehatan balita dan faktor risiko lingkungan.

Angka Kematian Ibu (AKI) juga menunjukkan pola fluktuatif dengan peningkatan signifikan pada Tahun 2023 sebesar 304 kematian per 100.000 kelahiran hidup, kemudian menurun secara signifikan pada Tahun 2025 menjadi 137. Penurunan ini menunjukan adanya perbaikandalam sitem pelayanan kesehatan ibi, meskipun masih memerlukan penguatan berkelanjutan.

Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) mengalami penurunan dari 59,52% pada Tahun 2021 menjadi 30,3% pada Tahun 2024, namun kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 53,6%. Hal ini menujukkan adanya gangguan dalam pelaksanaan program immunisasi yang perlu segera ditangani melalui penguatan sistem pelayanan.

Kunjungan ibu hamil menunjukan tren peningkatan dari 53,1% pada Tahun 2021 menjadi 82,1% pada Tahun 2024 namun data Tahun 2025 tercatat sebesar 1750 yang mengindikasikan adanya ketidaksesuian satuan atau pencatatn, sehingga perlu dilakukan validasi data.

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meningkat hingga Tahun 2023 (76,42%), namun mengalami penurunan signifikan pada Tahun 2024 menjadi 42,04% dan kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 32,12% Hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas atau akses layanan kesehatan ibu.

Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan juga menunjukkan pola serupa, dengan peningkatan hingga Tahun 2023 (81,4%), namun menurun pada Tahun 2024 menjadi 55,31% dan kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 42,9%.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir relatif stabil dengan tren meningkat pada Tahun 2025 sebesar 67,45%, sementara cakupan pelayanan kesehatan balita meningkat secara bertahap hingga mencapai 74,8% pada Tahun 2025.

Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar mengalami peningkatan signifikan dari 17,74% pada Tahun 2021 menjadi 86,825 pada Tahun 2025, yang menunjukkan keberhasilan intervensi pelayanan kesehatan berbasis sekolah.

Cakupan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59 Tahun) meningkat secara signifikan dari 32,71% pada Tahun 2021 menjadi 80,18% pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini penyakit.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut (≥60 tahun) juga menunjukan peningkatan yang konsisten, dari 84,61% pada Tahun 2021 menjadi 98,57% pada Tahun 2025, yang mencerminkan optimalisasi pelayanan kesehatan lansia.

Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi menunjukkan peningkatan dari 48,83% pada Tahun 2021 menjadi 83,55% pada Tahun 2025. Demikian pula pelayanan bagi penderita diabetes mellitus meningkat signifikan hingga mencapai 100% pada Tahun 2025, meskipun sebelumnya mengalami fluktuasi.

Pelayanan terhadap Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) berat juga menunjukkan peningkatan hingga mencapai 100% pada Tahun 2025, meskipun sempat mengalami penurunan pada Tahun 2024.

Cakupan pelayanan TBC meningkat hingga Tahun 2024 (85%), namunmenurun pada Tahun 2025 menjadi 59%. Lebih lanjut, angka kesembuhan TBC mengalami penurunan dratis dari 88,5% pada Tahun 2024 menjadi hanya 15% pada Tahun 2025, yang menjadi perhatian serius dalam upaya pengendalian penyakit menular.

Deteksi dini HIV menunjukkan peningkatan dari 0% pada periode 2021-2023 menjadi67,68% pada Tahun 2025, yang mencerminkan peningkatan upaya skrining dan kesadaran masyarakat.

Angka kesakitan malaria menunjukan tren menurun hingga mencapai 0 pada Tahun 2025, yang mengindikasikan keberhasilan dalam pengendalian penyakit malaria.

Rasio daya tampung rumah sakit rujukan meningkat dari 71 tempat tidur per 100.000 penduduk pada Tahun 2021 menjadi 86 pada Tahun 2024, namun menurun signifikan pada Tahun 2025 menjadi 51. Hal ini menunjukan adanya keterbatasan kapasitas layanan kesehatan rujukan yang perlu segera diatasi.

Jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi masih terbatas, yaitu hanya 1 RSUD selama periode 2021-2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas fasililitas kesehatan rujukan.

Pembangunan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki atau yang tersedia pada daerah tersebut. Tentunya tenaga kesehatan yang tersedia sudah seharusnya memiliki standar keahlian dimasing-masing disiplin ilmunya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga kesehatan melalui beberapa saluran, antara lain penerimaan CPNS, tenaga medis kontrak, tenaga penyuluh, kemitraan dengan perdesaan/dusun, tenaga kesehatan PTT dan melalui saluran lainnya.

Tabel 2.45
Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Tenaga Kesehatan	2021	2022	2023	2024	2025
Dokter	38	43	42	50	34
Perawat	137	353	346	367	267
Bidan	79	263	265	260	232

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026

Ketersedian tenaga kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Tenaga kesehatan yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, sangat menentukan keberhasilan pencapaian indikator pembangunan kesehatan, terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Ketersedian tenaga kesehatan selama periode Tahun 2021-2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Jumlah tenaga dokter mengalami peningkatan hingga Tahun 2024, namun menurun signifikan pada Tahun 2025. Kondisi serupa juga terjadi pada tenaga perawat dan bidan, yang mengalami peningkatan pada periode awal, namun menurun pada Tahun 2025.

Penurunan jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokte dan bidan, berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan rujukan. Selaian itu, tantangan dalam distribusi tenaga kesehatan antar wilayah dan fisilitasi pelayanan juga menjadi faktor yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Jumlah tenaga dokter pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 38 orang dan meningkat menjadi 43 orang pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 42 orang, sebelum kembali meningkat pada Tahun 2024 menjadi 50 orang. Namun demikian, pada Tahun 2025 jumlah tenaga dokter mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 34 orang. Penurunan ini menjadi perhatian penting mengingat tenaga dokter memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan. Keterbatasan tenaga dokter berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan medis, khususnya dalam penanganan kasus yang membutuhkan kompetensi klinis lebih lanjut.

Jumlah tenaga perawat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 137 orang pada Tahun 2021 menjadi 353 orang pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 jumlah tenaga perawat relatif stabil sebanyak 346 orang, kemudian meningkat kembali pada Tahun 2024 menjadi 367 orang. Namun, pada Tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 267 orang. Meskipun secara keseluruhan jumlah tenaga perawat masih lebih tinggi dibandingkan kondisi awal pada Tahun 2021, penurunan pada Tahun 2025 mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan tenaga, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor mutasi, pensiun, atau keterbatasan pengadaan tenaga baru. Mengingat perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling banyak berinteraksi langsung dengan pasien, kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kesehatan.

Jumlah tenaga bidan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 79 orang pada Tahun 2021 menjadi 263 orang pada Tahun 2022, dan relatif stabil pada Tahun 2023 dengan jumlah 265 orang. Selanjutnya, jumlah tenaga bidan mengalami penurunan secara bertahap pada Tahun 2024 menjadi 260 orang dan kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 232 orang. Penurunan jumlah tenaga bidan ini memiliki implikasi langsung terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, mengingat bidan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kehamilan, persalinan, dan nifas, khususnya di tingkat pelayanan dasar.

Secara umum, perkembangan jumlah tenaga kesehatan selama periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan, namun pada Tahun 2025 seluruh jenis tenaga kesehatan utama mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, baik dari aspek perencanaan kebutuhan, distribusi, maupun retensi tenaga kesehatan.

Fluktuasi jumlah tenaga kesehatan tersebut berpotensi mempengaruhi capaian indikator pembangunan kesehatan, terutama pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, cakupan pelayanan kesehatan dasar, serta kualitas layanan rujukan. Penurunan jumlah tenaga dokter dan bidan, khususnya, dapat berdampak pada peningkatan risiko terhadap pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

Selain itu, ketersediaan tenaga kesehatan juga perlu dilihat dari aspek pemerataan distribusi antar wilayah dan fasilitas pelayanan kesehatan. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dapat menyebabkan belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas.

Dengan demikian, dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan pada RKPD Tahun 2027, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam penguatan sumber daya manusia kesehatan, antara lain melalui perencanaan kebutuhan tenaga berbasis beban kerja, peningkatan rekrutmen tenaga kesehatan, pemerataan distribusi tenaga, serta penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan. Selain itu, diperlukan pula kebijakan yang mendukung retensi tenaga kesehatan agar tetap dapat bertugas secara optimal di daerah.

Kondisi pembangunan kesehatan menunjukkan adanya kemajuan yang cukup baik pada beberapa indikator, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis melalui perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, guna mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan pada RKPD Tahun 2027.

Pembangunan kesehatan adalah bentuk pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat. Tentunya akses terhadap layanan kesehatan harus menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana kesehatan untuk mempermudah dalam mengatasi permasalahan kesehatannya. Penyediaan sarana kesehatan sebagai sarana bagi masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan permasalahan kesehatan baik itu preventif, kuratif dan promotif kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 2.46
Jumlah Layanan Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Sarana Layanan Kesehatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	RSUD/RS Pratama	1	2	2	1	2
2	Puskesmas	15	15	15	15	15
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	27	39	40	39	41
4	Poskesdes	128	90	90	96	86
5	Posyandu	279	289	289	285	272
6	Polindes	33	90	90	38	40

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026

Ketersediaan layanan kesehatan berupa sarana dan prasarana kesehatan adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses layanan kesehatan. Pusat layanan kesehatan masyarakat harus menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat tidak bersusah payah pergi ke daerah lain untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 2.27 menunjukkan perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2021-2025 mengalami perkembangan dalam hal jumlah sarana, terutama di daerah terpencil yaitu di dusun-dusun. Tentunya tidak sekedar penyediaan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat, yang lebih esensial lagi adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan promosi pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.

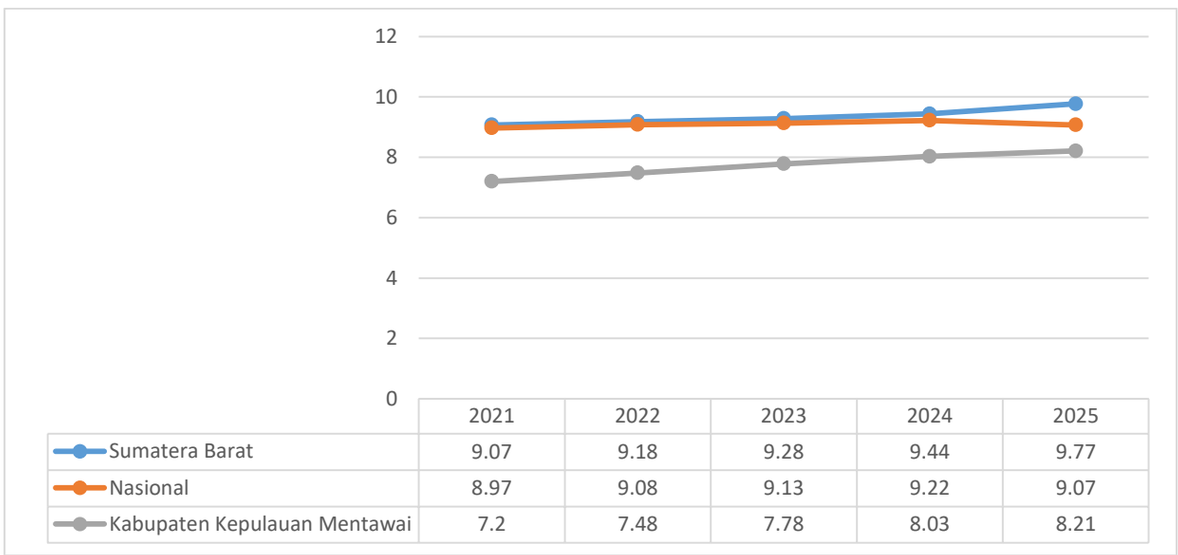
3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencerdaskan hingga mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pembangunan berkelanjutan yang memungkinkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Pendidikan akan membantu mengembangkan kapital manusia, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang meningkatkan produktivitas, peran besar pendidikan juga dapat memutus mata rantai kemiskinan. Tujuan pendidikan itu dapat mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan *(Tan Malaka)*. Pendidikan yang merata adalah fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan, memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada masyarakat.

a. Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh penduduk untuk menempuh pendidikan formal. RLS digunakan untuk melihat kualitas pendidikan dan penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas, RLS tidak termasuk tahun yang diulang dan RLS dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan, kualitas pendidikan, perencanaan kebijakan, dan evaluasi program pendidikan.

Gambar 2.41
Rata Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Sumatera Barat	9.07	9.18	9.28	9.44	9.77
Nasional	8.97	9.08	9.13	9.22	9.07
Kabupaten Kepulauan Mentawai	7.2	7.48	7.78	8.03	8.21

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

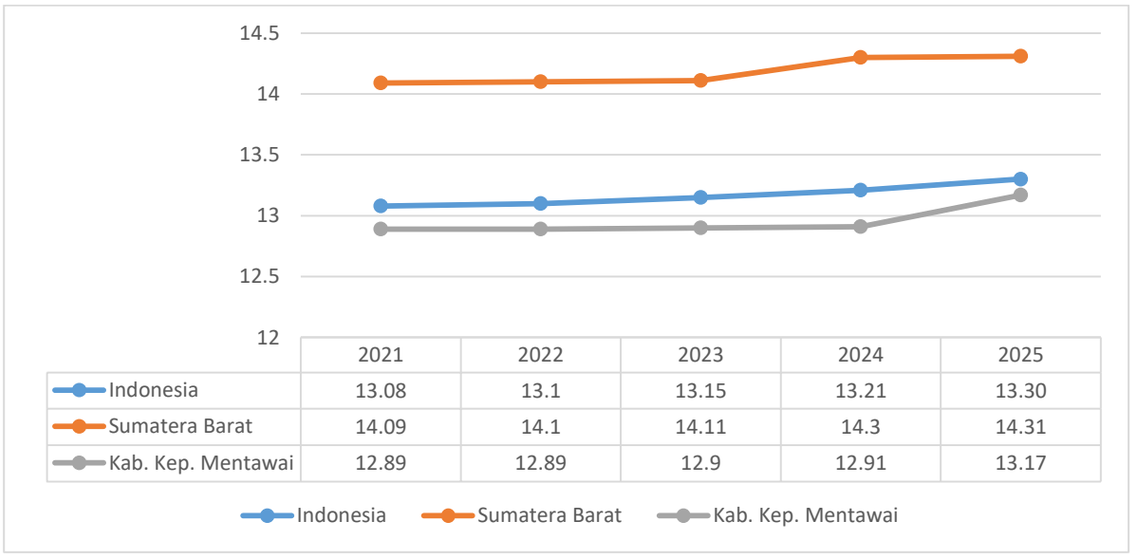
Sekolah (RLS) tingkat Provinsi Sumatera Barat dan secara Nasional. Tren perkembangan rata lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan hasil yang positif, dapat dilihat dalam Gambar 2.17 bahwa pada tahun 2022 RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 7,2 tahun dan meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 7,48 tahun begitu juga selanjutnya hingga tahun 2025 RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 8,21 tahun. Peningkatan RLS ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan pencapaian RLS di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yaitu dengan *slope* (kemiringan) yang lebih besar (0,244) dari RLS Provinsi Sumatera Barat (0,111) dan Nasional (0,08). Pencapaian ini tentunya sebagai respons positif terhadap program pemerintah daerah yang memberikan beasiswa perguruan tinggi, penyediaan sarana dan sarana pendidikan, serta memperluas keikursertaan

program kesetaraan bagi masyarakat. Namun pencapaian RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai masih jauh berada dibawah capaian Rata Lama Sekolah (RLS) tingkat Provinsi Sumatera Barat dan secara Nasional.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya masa sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang, dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. HLS merupakan indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan, karena mencerminkan peluang anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih lama dan berkualitas. Beberapa faktor yang memengaruhi nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah kualitas pendidikan, akses terhadap pendidikan, kebijakan pemerintah terkait pendidikan, kondisi ekonomi dan sosial.

Gambar 2.42
Harapan Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Indonesia	13.08	13.1	13.15	13.21	13.30
Sumatera Barat	14.09	14.1	14.11	14.3	14.31
Kab. Kep. Mentawai	12.89	12.89	12.9	12.91	13.17

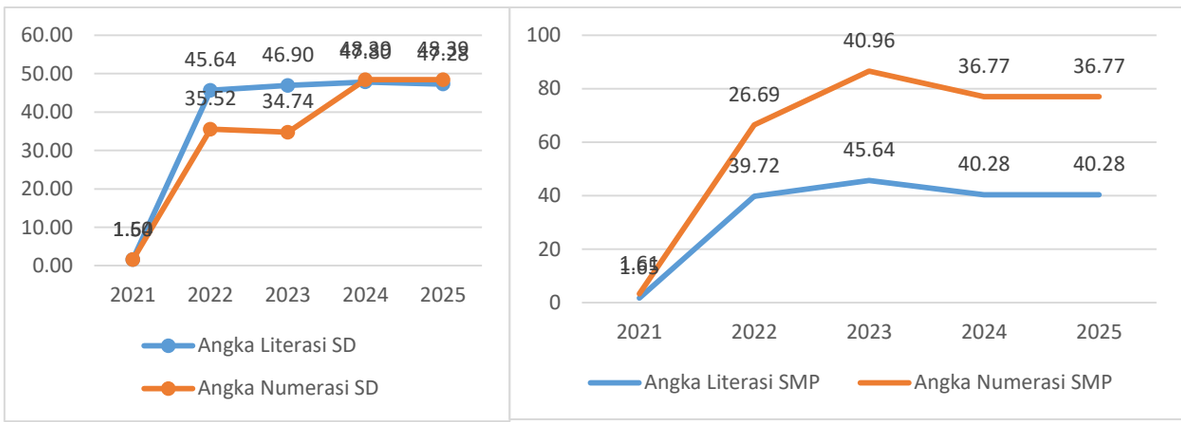
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Perkembangan capaian Harapan lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 12,89 tahun pada tahun 2021 meningkat hingga tahun 2024 HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 12,91 tahun. Namun peningkatan nilai HLS ini tidak signifikan yaitu peningkatan hanya 0,09 poin selama 5 tahun terakhir. Pencapaian HLS yang belum signifikan mengalami peningkatan tentu menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali program sektor pendidikan terutama terhadap akses dan mutu layanan pendidikan sehingga ekspektasi (harapan) masyarakat untuk mengenyam pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin bertambah/meningkat. Capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian HLS Provinsi Sumatera Barat dan secara nasional. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.18 menujukkan pada tahun 2020 HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 12,82 tahun sedangkan HLS Provinsi Sumatera Barat sebesar 14,02 tahun dan HLS Nasional sebesar 13,08 tahun hingga tahun 2025 posisi HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai (13,17 tahun) masih dibawah capaian HLS Provinsi Sumatera Barat (14,31 tahun) dan HLS Nasional 13,30 tahun).

c. Literasi dan Numerasi Pendidikan

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi dan numerasi yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, literasi dan numerasi adalah dua keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang, terutama anak-anak di usia sekolah.

Gambar 2.43
Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber: Rapor Pendidikan Kab. Kepulauan Mentawai

Gambar 2.19 menunjukkan bahwa perkembangan capaian angka literasi baik jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami tren peningkatan. Untuk jenjang pendidikan SD, angka literasi meningkat dari 1,60 pada tahun 2021 menjadi 47,28 pada tahun 2024. Begitu juga dengan angka literasi pada jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan dari 1,65 pada tahun 2021 meningkat menjadi 40,28 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbaikan yang signifikan atas kemampuan literasi peserta didik jenjang pendidikan SD dan SMP sehingga mampu lebih memaknai suatu narasi atau teks yang dibaca/tertulis.

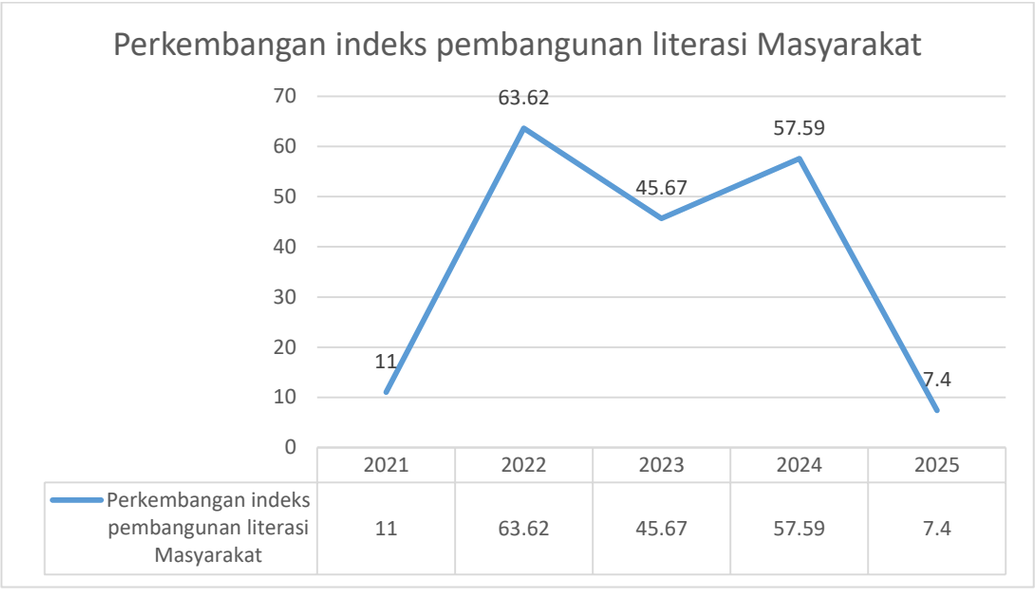
Perkembangan angka numerasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP juga menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya kurun waktu 2021-2025. Pada jenjang pendidikan SD, angka numerasi mengalami peningkatan dari 1,54 pada tahun 2021 menjadi 48,39 pada tahun 2025. begitu juga pada jenjang pendidikan SMP, angka numerasi mengalami peningkatan dari 1,61 pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 36,77 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan terhadap kemampuan numerasi peserta didik baik pada jenjang pendidikan SD maupun SMP sehingga lebih mampu memaknai dan memahami bilangan atau angka yang disajikan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

d. Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan peningkatan sebagaimana Gambar 2.20 Pada tahun 2021 nilai IPLM sebesar 11 dan mengalami peningkatan di

tahun 2022 menjadi 63,62 namun sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 45,67. Penurunan nilai IPLM di tahun 2023 terletak pada komponen ketercukupan koleksi perpustakaan dari 2,3757 poin menjadi 0,1773 poin dan komponen perpustakaan yang dibina seusai SNP dari 1,0738 poin menjadi 0,3045 poin.

Gambar 2.44
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Perkembangan indeks pembangunan literasi Masyarakat	11	63.62	45.67	57.59	7.4

Sumber: Perpustakaan Nasional RI

Pada tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga nilai IPLM Kab. Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 57,59. Peningkatan ini terdapat di beberapa unsur salah satunya adalah peningkatan skor pada unsur perpustakaan yang dibina sesuai SNP menglami peningkatan dari 0,3045 poin menjadi 0,8436 poin. Upaya peningkatan literasi masyarakat terus dilakukan selain mengupayakan adanya gedung perpustakaan daerah dan pembinaan perpustakaan di tingkat desa juga melakukan upaya peningkatan layanan dan akses baca masyarakat.

e. Indeks Literasi Digital

Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang bisa diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Segmentasi dalam melihat perkembangan literasi digital adalah masyarakat, pemerintah dan dunia pendidikan. Pembangunan literasi digital mencakup pada 4 aspek antara lain:
a. Digital *skill*, memahami perangkat keras dan lunak serta sistem operasi digital.
b. Digital *culture*, membangun wawasan kebangsaan dan budaya di ruang digital.
c. Digital *ethics*, menyesuaikan diri berpikir rasional dan beretiket.
d. Digital *safety*, meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data diri.
Perkembangan literasi digital di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik (skala 1-5). Hal ini terlihat dari perkembangan indeks literasi digital yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 indeks literasi digital di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 3,46

dan mengalami peningkatan pencapaian di tahun 2022 menjadi sebesar 3,54. Pada tahun 2023 capaian ILD mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,65 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 3,78.

Tabel 2.47
Perkembangan Indeks Literasi Digital
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Literasi Digital	3,46	3,54	3,65	3,78	Belum Rilis

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kepulauan Mentawai

f. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tingginya proporsi
penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Pentingnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi terletak pada kontribusinya terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan di daerah. Pendidikan tinggi menghasilkan tenaga kerja terampil dan
berpengetahuan luas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing bangsa di berbagai sektor.

Tabel 2.48
Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	8,53	8,54	8,6	9,25	10,18

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026

Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2021 proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi sebesar 8,53 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebesar 8,54 persen. Pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,6 persen dan tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,25 persen, hingga pada tahun 2025 proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 10,18 persen.

g. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan

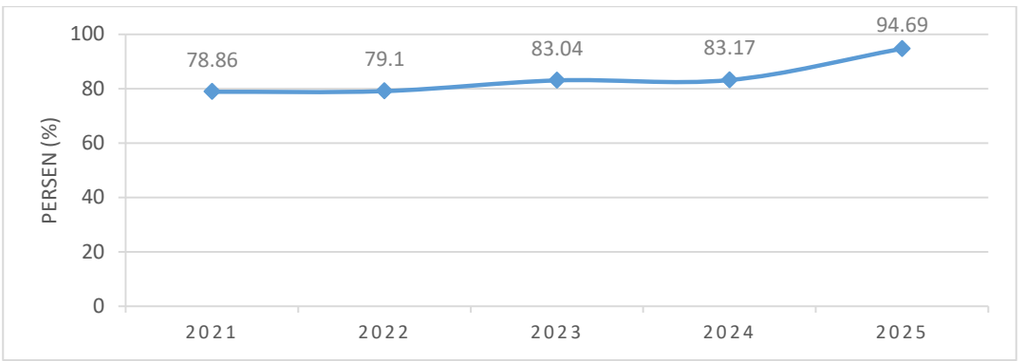
lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

Tabel. 2.49
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	78,86	79,10	83,04	83,17	94,69

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2021-2025

Gambar 2.45
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022-2026

Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021-2025 menunjukkan tren kenaikan. Hal ini menunjukkan peningkatan kualifikasi pendidikan masyarakat berbanding lurus dengan tenaga kerja yang terserap pada keahlian menengah tinggi. Pada tahun 2021 persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi sebesar 78,86 persen. Pada tahun 2022 persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 79,10 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi sebesar 83,04 persen dan pada tahun 2024 persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi sebesar 83,17 persen. Puncaknya pada tahun 2025 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 94,69 persen.

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik. Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Perlindungan sosial, baik melalui skema bantuan sosial maupun skema jaminan sosial adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menangani risiko dan

tantangan sepanjang hayat (siklus hidup) dari guncangan dan kerentanan sosial yang dihadapi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

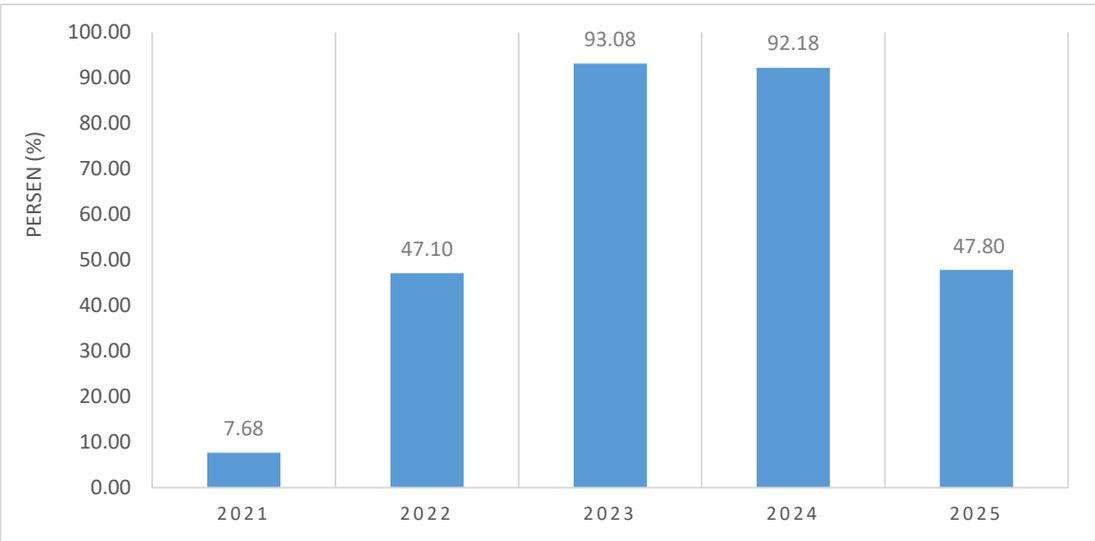
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja rentan dan miskin, meliputi risiko kecelakaan kerja dan kematian. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKT) sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan karena memberikan perlindungan dasar bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan adanya jaminan sosial, pekerja merasa lebih aman dan terjamin sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja mereka.

Tabel 2.50
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (%)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	7,68	47,10	93,08	92,18	47,80

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Gambar 2.46
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan pada tiga tahun pertama, yaitu dari 7,68 persen pada tahun 2021 meningkat tajam menjadi 47,10 persen pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya sebesar 93,08 persen pada tahun 2023. Capaian tersebut relatif bertahan pada tahun 2024 dengan angka 92,18 persen, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2025 menjadi 47,80 persen, hampir separuh dari capaian dua tahun sebelumnya.

Penurunan signifikan pada tahun 2025 perlu ditelusuri lebih lanjut, baik disebabkan oleh perubahan basis data kepesertaan, berakhirnya program subsidi iuran tertentu, maupun penurunan jumlah pekerja aktif yang terdaftar. Hal ini menjadi bentuk wujud komitmen pemerintah daerah dalam melindungi seluruh pekerja rentan terhadap risiko kecelakaan dan kematian

dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya, dengan total sasaran sekitar 55.000 pekerja, terutama pekerja sektor informal seperti nelayan, petani, ojek, pekerja sawah, dan kuli yang kondisi kerjanya jauh dari standar dan memiliki risiko tinggi serta berpenghasilan minim.

Mengingat fluktuasi capaian yang tinggi, arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada penguatan basis data kepesertaan pekerja rentan secara berkelanjutan, perluasan cakupan subsidi iuran bagi pekerja informal berpenghasilan rendah, sosialisasi manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada kelompok nelayan, petani, dan pekerja informal lainnya, serta sinergi lintas perangkat daerah dalam pendataan dan pendaftaran peserta baru guna menjaga keberlanjutan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

2. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal

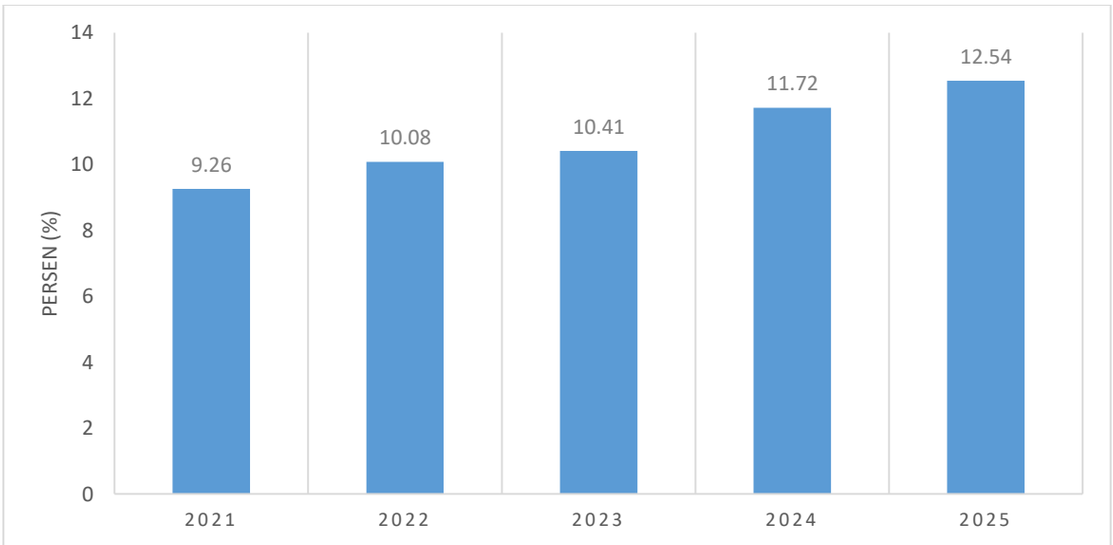
Pemerintah memberikan jaminan persentase bagi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, sementara BUMN dan BUMD diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 2 persen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang jaminan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Undang-undang ini menjamin akses setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Tabel 2.51
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	9,26	10,08	10,41	11,72	12,54

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.47
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Perkembangan penyandang disabilitas bekerja di sektor formal kurun waktu di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan, yaitu pada tahun 2021 sebesar 9,26, kemudian tahun 2022

meningkat menjadi sebesar 10,08 persen, pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 10,41 persen dan pada tahun 2024 persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 11,72 persen. Puncaknya pada tahun 2025 meningkat penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 12,54 persen.

Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan kesehatan berperan krusial dalam pembangunan karena meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan akses merata terhadap layanan kesehatan. Jaminan kesehatan membantu mengurangi ketimpangan dalam akses layanan kesehatan, sehingga memastikan bahwa semua orang, terlepas dari status sosial-ekonominya, dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas.

Tabel.2.52
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	98.56	98.99	99.56	99.11	47,8

Sumber: BPJS Kabupaten Kepulauan Mentawai

Jaminan kesehatan juga memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dari risiko biaya pengobatan yang tinggi, sehingga mencegah kemiskinan akibat penyakit sehingga masyarakat dapat fokus pada pendidikan dan pengembangan diri, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Cakupan kepesertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mencapai angka 90 persen sejak tahun 2021. Pentingnya jaminan kesehatan ini khususnya masyarakat miskin agar tidak lagi menambah beban hidup untuk pengeluaran terhadap layanan kesehatan sehingga tidak ragu lagi dalam memanfaatkan layanankesehatan yang ada. Selain dari memastikan semua masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan yang paling utama adalah ketersediaan akses sarana kesehatan, tenaga medis, alat kesehatan dan obat-obatan sehingga layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan masyarakat dapat dinikmati dan dirasakan masyarakat.

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Peran agama sebagai landasan moral dan spritual, etika, adab dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah untuk memperkuat karakter dan memperteguhjati diri masyarakat Mentawai. Agama dan budaya memiliki peran krusial dalam pembangunan, sebagai landasan moral dan spiritual, sumber inspirasi, dan perekat sosial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga keharmonisan masyarakat. Agama dan budaya saling memengaruhi dan menguatkan di mana agama memberikan nilai-nilai dan norma, sedangkan budaya memberikan bentuk-bentuk ekspresi dan adaptasi terhadap ajaran agama. Keduanya memberikan wawasan

dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan, dengan agama menekankan nilai ketaatan kepada Tuhan dan budaya menekankan nilai dan simbol untuk kehidupan yang dinamis. Pada tingkatan yang lebih lanjut (*advance*) budaya dan agama dapat menjadi daya tarik pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaanmelalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional yang sudah masuk kedalam agenda pariwisata Nasional dalam Pesona Indonesia. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tercermin dari seberapa banyak objek pemajuan kebudayaan yang dapat diakui, legalisasi dan dilestarikan. Perkembangan objek kebudayaan yang telah ditetapkan kurun waktu 2014-2024 telah mencapai 12 warisan budaya.

Tabel.2.53
Perkembangan Warisan Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Perkembangan Warisan Budaya yang Dilestarikan	100	60	66.67	75.00	88,23

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain warisan budaya yang ditetapkan adalah Tato (2014), Sikerei (2019), Uma (2020), Kirekat dan Pasikut Abag (2022), Tahun 2023 antara lain Mone, Pangurei, Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot. Tabel. 2,37 menunjukkan warisan budaya yang dilestarikan pada tahun 2021 sebesar 100 persen, seperti warisan budaya Tato yang ditetapkan pada tahun 2014 pada perkembangannya tetap dilestarikan dengan berbagai sarana kebudayaan yang digelar/laksanakan. Tahun 2019 objek kebudayaan yang ditetapkan yaitu Sikerei dan keberadaan/pemberdayaan Sikerei masih ada hingga saat ini. Tahun 2020 ditetapkan Uma sebagai warisan budaya, hingga saat ini Uma masih ada dan difasilitasi sebagai fasilitas wisata untuk Desa Wisata Muntei dan kawasan wisata lain dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Tahun 2022 ditetapkan Kirekat dan Pasikut Abag sebagai warisan budaya, namun warisan budaya ini tidak begitu berkembang dan belum ada upaya pengembangannya baik secara kelompok wisata lokal maupun pemerintah. Tahun 2023 ada 7 warisan budaya yang ditetapkan, antara lain Mone, Pangurei, Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot. Untuk warisan budaya yang berkembang adalah Sikerei, Uma, Mone, Pangurei, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa, Panunggru dan Pasipiat Sot.

Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dinyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran dalam upaya pengakuan hak masyarakat

adat di Mentawai menyangkut perlindungan masyarakat secara adat dan akses mobilitas masyarakat termasuk infrastruktur. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan UMA Sebagai Satu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan lebih teknis diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019. Masyarakat hukum adat merupakan entitas pembangunan yang perlu diintervensi untuk membangkitkan sosial ekonominya. Pengakuan hak wilayah adat oleh pemerintah melalui Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejak tahun 2019 yaitu Uma Goisooinan seluas 971 ha, Uma Rokot seluas 114 ha, Uma Usut Ngaik seluas 83 ha dan Uma Saureinu seluas 5.739 ha. Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) ini masih belum diiringi dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat adat untuk dapat mengelola segala sumber daya yang ada.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat keharmonisan hubungan antarumat beragama melalui aspek toleransi, kesetaraan, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode 2025–2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2025, Indeks KUB tercatat sebesar 70,87, kemudian meningkat menjadi 71,00 pada tahun 2026 atau naik sebesar 0,13 poin.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah bersama instansi vertikal, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama telah memberikan hasil yang positif. Meskipun peningkatannya relatif terbatas, capaian ini mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang tetap kondusif serta terpeliharanya sikap saling menghormati, toleransi, dan kerja sama antarumat beragama dalam mendukung stabilitas daerah.

Ke depan, peningkatan Indeks KUB masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian melalui penguatan program pembinaan kerukunan umat beragama, pengarusutamaan moderasi beragama, peningkatan peran FKUB, serta penguatan dialog dan kolaborasi lintas agama. Selain itu, pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, serta generasi muda dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan perlu terus didorong agar tercipta kehidupan yang semakin harmonis dan inklusif.

Dengan terjaganya kerukunan umat beragama, diharapkan stabilitas sosial di Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin kuat sehingga mampu mendukung terciptanya iklim pembangunan yang aman, damai, dan kondusif. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana direncanakan dalam RKPD Tahun 2027.

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat menjadi pembentuk karakter sosial dan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Pembangunan yang inklusif dan tidak diskriminasi

menjadi syarat perlu untuk menggerakkan seluruh sendi pembangunan sehingga berjalan menuju tujuan dan cita-cita bersama. Keluarga yang berkualitas adalah fondasi masyarakat yang kuat, di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi setiap individu dalam keluarga. Keluarga yang berkualitas berperan dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupunakhlak. Kesetaraan gender berarti semua orang, laki-laki dan perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Ini mencakup kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, politik, dan pengambilan keputusan di dalam keluarga dan masyarakat. Membangun kesetaraan gender berarti menumbuhkan kesadaran tentang peran gender, menghapus diskriminasi, dan memastikan partisipasi yang setara dari semua gender. Kesetaraan gender yang telah diimplementasikan dalam pembangunan akan meningkatkan peran semua pihak (laki-laki dan perempuan) meningkatkan komitmen, kontribusi dan produktivitas dalam pembangunan. Masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang menghargai keberagaman dan memastikan semua orang, termasuk kelompok yang rentan, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan terlibat dalam pembangunan. Masyarakat inklusif ditandai dengantoleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Implementasi masyarakat yang inklusif dapat dicapai melalui pendidikan tentang keberagaman, kampanye anti-diskriminasi, dan kebijakan yang mendukung inklusi.

1. Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga yang berkualitas dapat dilihat dari indikator pembangunan keluarga. Indikator indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang dikeluarkan oleh BKKBN. Ini merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70, baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Pada tahun 2021, nilai Indeks Pembangunan keluarga (iBangga) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada angka 53,18 atau dengan predikat cukup baik (berkembang). Sedangkan pada tahun 2022, nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada angka 51,5 atau dengan predikat cukup baik (berkembang), Tahun 2023 nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada angka 51,50 atau dengan predikat cukup baik (berkembang).

Tabel. 2.54
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	53,18	51,5	51,50	55,6	67,62

Sumber: BKKBN

Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang positif. Untuk tahun 2021 capaian Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 53,18,. Tahun 2022 capaian Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 51,5 mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar 51,50. di tahun 2024

Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 55,6. Tahun 2025 Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 67,62.

2. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indikator yang mengukur pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. IPKA ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. IPKA bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) melalui penguatan Sistem
Perlindungan Anak (SPA) yang responsif terhadap keragaman anak dan karakteristik anak. Dengan adanya IPA, diharapkan upaya perlindungan anak dapat terus ditingkatkan dan dioptimalkan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan terlindungi.

Tabel. 2.55
Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Perlindungan Khusus Anak	51,23	51,4	56,09	66,15	Belum Rilis

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menjadi wujud perbaikan tata kelola dan intervensi program untuk melindungi dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Nilai IPKA pada tahun 2021 sebesar 51,23 mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi sebesar 51,4 dan pada tahun 2023 nilai IPKA di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan menjadi sebesar 56,09 lalu pada tahun 2024 nilai Indeks Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan menjadi sebesar 66,15, Tahun 2025 Indeks Perlindungan Khusus Anak belum rilis.

3. Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender merujuk pada ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh ketimpangangender meliputi ketimpangan dalam akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan formal. Ketimpangan dalam kesempatan kerja, upah, dan partisipasi perempuan dan lakilaki di pasar tenaga kerja. Ketimpangan dalam akses perempuan dan
laki-laki terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit, dan perawatan medis. Ketimpangan dalam partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan politik dan kepemimpinan. Ini mencakup perwakilan perempuan dalam parlemen, pemerintahan, danlembaga-lembaga publik.Pembangunan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Ketimpangan Gender sebagai kondisi semakin baiknya kesetaraan yang ada khususnya di Kabupaten KepulauanMentawai. Rentang nilai Indeks Ketimpangan Gender adalah 0-1, artinya semakin kecil nilai IKG maka semakin baiknya kesetaraan gender di daerah tersebut. Gambar 2.56 menunjukkan perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 yang masih tinggi yaitu lebih dari angka 0,8.

Tabel. 2.56
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.851	0.85	0.851	0.849	0,841

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Hal ini dapat dilihat capaian IKG pada tahun 2021 menjadi 0,851, lalu pada tahun 2022 juga mengalami penurunan menjadi sehingga nilai IKG menjadi sebesar 0,85. Pada tahun 2023 nilai IKG di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,851 dan pada tahun 2024 nilai IKG Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 0,849. dan pada tahun 2025 nilai IKG Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 0,841 Penurunan nilai indeks ketimpangan gender ini mengindikasikan semakin berkurangnya ketimpangan gender dalam pembangunan di Kepulauan Mentawai.

4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah atau negara, berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG bertujuan untuk mengukur seberapa baik pembangunan suatu wilayah atau negara telah memperhitungkanmasalah kesetaraan gender.

Tabel.2.57
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Gender	89,81	89,91	89,57	90,13	Belum Rilis

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pembangunan gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, untuk tahun 2021 capaian IPG sebesar 89,81 persen, mengalami peningkatan di tahun 2022 yaitu sebesar 89,91. Pada tahun 2023 nilai capaian IPG mengalami penurunan dengan capaian sebesar 89,57 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian IPG di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 90,13 persen. Pembangunan gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 belum rilis. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti bahwa perbedaan pencapaian dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil.

5. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Dalam proses pembangunan, pemuda memegang perananan penting sebagai tulang punggung dan penentu masa depan bangsa. Sejarah juga mencatat bahwa pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam

mengantarkan kemerdekaan bangsa. Di era modern seperti sekarang ini, pemuda diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan, agen pembangunan, dan agen pembaharuan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP mengukur berbagai aspek pembangunan pemuda, termasuk pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi, dan kesetaraan gender, yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa domain. IPP berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda, serta merefleksikan capaian upaya pembangunan pemuda. Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda yang disusun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga
belum mencakup hingga kabupaten/kota sehingga capaian indikator kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada perkembangan jumlah organisasi yang masih bertahan. Pemuda yang diasosiasikan dengan paham idealisme yang dapat melihat setiap perkembangan dan isu daerah secara jernih tentunya akan mampu memberikan pemikiran dan dukungan yang Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG)menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti bahwa perbedaan utuh tanpa ada unsur kepentingan. Peran pemuda dalam pembangunan juga sudah dimulai dari sisi perencanaan pembangunan daerah, memberikan kontribusi dan terlibat aktif dalam sosial ekonomi masyarakat, dan menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan pembangunan memberikan saran masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa dilakukan dalam upaya pelestarian tata cara/ norma kehidupan bermasyarakat. Meningkatkan kepedulian dan minat masyarakat menjadi hal penting dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya pada masyarakat terutama kaum muda agar nilai tersebut berkelanjutan dan lestari kegenerasi berikutnya.

Tabel 2.58
Perkembangan Seni dan Budaya
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	0	0	2	1	1
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	4	2	10
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	13	13

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Melalui berbagai even/ festival dilakukan juga berbagai pembangunan sarana, pelestarian objek, dan warisan budaya diharapkan mampu memajukan kebudayaan daerah sehingga menjadi lestari dan dikenal dengan baik. Di tahun 2027 arah kebijakan RKPD terkait dengan pariwisata, seni dan budaya

adalah “One village One Event” (satu desa satu even) yang maksudnya adalah mendorong setiap desa menyelenggarakan minimal satu even atau kegiatan unggulan secara rutin setiap tahun untuk mengembangkan potensi desa. Adapun potensi desa itu seperti budaya, kuliner, kerajinan, tradisi, dan alam. Sehingga akan menjadi daya tarik wisata nusantara maupun mancanegara.

Tabel 2.59
Perkembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah organisasi pemuda	12	10	14	14	14
2	Jumlah organisasi olahraga	15	12	16	16	32
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	8	10	8	8	8
4	Jumlah kegiatan olahraga	0	5	12	10	10
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	20	20	24	24	24
6	Lapangan olahraga	145	150	150	150	150

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan keolahragaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat identik dengan kehidupan bermasyarakat Mentawai, hal ini dapat terlihat dari aktivitas sehari-hari khususnya pada sore hari selalu ada kegiatan olah raga yang dilakukan masyarakat, seperti bola voli, sepak takraw, bola kaki, bulu tangkis. Namun di beberapa tempat sarana keolahragaan dimasing-masing desa berada dalam kondisi tidak terawat dan tidak difungsikan. Pentingnya olahraga dalam pembangunan karena olahraga berperan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan prestasi dan citra suatu daerah/negara

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan pelayanan yang secara umum dibutuhkan dan menjadi prasyarat kehidupan masyarakat yang bermartabat dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga atas suatu barang jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Pelayanan umum ini pada dasarnya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adatif

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang adaptif menekankan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan pro aktivitas dalam menghadapi perubahan, baik di tingkat global, nasional, regional maupun tingkat daerah. Manfaat tata kelola yang adaptif adalah:

a) Efisiensi: Mengurangi pemborosan sumber daya dengan menyesuaikan regulasi dan tata kelola dengan kebutuhan yang sebenarnya.
b) Efektivitas: Meningkatkan pencapaian tujuan dengan memastikan regulasi dan tata kelola tetap relevan dan efektif.
c) Resiliensi: Meningkatkan kemampuan organisasi dan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan perubahan.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan integritas adalah salah satu hal yang sangat penting. Hal ini mengingat bahwa karakter integritas sangat bertentangan dengan karakter korupsi. Karakter dan budaya integritas secara langsung bertentangan dengan korupsi. Pengembangan karakter dan budaya integritas mengandung keniscayaan logis menangkal korupsi.

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melihat sejauh mana upaya reformasi hukum telah berjalan dan memberikan rekomendasi perbaikan. IRH bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan reformasi hukum, mengidentifikasi permasalahan, serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas reformasi hukum.

Penilaian IRH didasarkan pada empat variabel utama, yaitu koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk harmonisasi regulasi, reregulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Permenkum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil penilaian IRH akan memberikan gambaran mengenai capaian reformasi hukum pada masing-masing instansi dan akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan apresiasi atau penghargaan.

Perkembangan Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan perkembangan yang positif dan meningkat. Pada tahun 2021 Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 58,63 dengan kategori CC, lalu meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 58,95 lalu nilai ini turun pada tahun 2023 menjadi 57,43 persen. Pada tahun 2024 meningkat cukup signifikan dengan nilai 98,04 (AA). Peningkatan ini didorong oleh komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola dan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahapan penyusunannya. Untuk Tahun 2025 Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Kepulauan Mentawai turun dari tahun 2024 menjadi 97,06 namun masih dalam predikat (AA).

Tabel 2.60
Perkembangan Indikator Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Hukum	58,63	58,95	57,43	98,04	97,06
Predikat	CC	CC	CC	AA	AA

Sumber : Kemenkumham RI

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e- government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik secara terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya.

Tabel 2.61
Perkembangan Nilai SPBE
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	1,23	1,53	2,46	Belum Rilis

Sumber : Kementerian PAN-RB RI

Begitu juga peran SPBE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat untukberpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan kritik melalui platform online yang disediakan oleh pemerintah. SPBE juga dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang lebih personal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan pelaksanaan e-goverment di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikategorikan belum mengalami perkembangan yang signifikan, jika dilihat dari indeks SPBE bahwa pada tahun 2021 untuk SPBE di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada nilai oleh Kementerian PANRB dan sedangkan tahun 2023 nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,53 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dari tahun 2022 di mana nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,23. Namun, pada tahun 2024 nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat menjadi 2,46 namun masih pada kategori rendah. Untuk Tahun 2025 nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai belum Rilis.

Merujuk pada Lampiran I Perpres RPJMN 2025–2029 dan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/66/PD.02/2025 terkait penerapan kebijakan pemerintah digital sebagai penguatan kebijakan SPBE di mana penerapan Indeks Pemerintahan Digital dengan indikator baru akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Upaya transformasi digital menjadi landasan dan fondasi utama dalam menggerakkan digitalisasi pada setiap sendi kehidupan masyarakat terutama dalam pengelolaan pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien.

3. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik merujuk pada segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan publik mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara pelayanan publik harus memastikan efisiensi, efektivitas, kecepatan, kualitas, dan kepuasan masyarakat.

Tabel 2.62
Perkembangan Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pelayanan Publik	2,86	3,46	2,3	3,27	Belum Rilis

Sumber : Nilai RB (Kemenpan-RB)

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berjalan dan dirasakan oleh masyarakat baik pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kependudukan. Pengukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dinilai dalam kurun

waktu 5 tahun terakhir oleh Kemenpan RB. Pada tahun 2021 nilai Indeks Pelayanan Publik di Kepulauan Mentawai sebesar 2,86 meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 3,46 lalu turun di tahun 2023 menjadi 2,3 dan di tahun 2024 nilai Indeks Pelayanan Publik di Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 3,27. Tahun 2025 nilai Indeks Pelayanan Publik di Kepulauan Mentawai Belum Rilis. Nilai ini menunjukkan komitmen dan upaya kuat pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, inovatif dan akuntabel.

4. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, Indeks Persepsi Anti Korupsi

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel tanpa adanya unsur KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) masih menjadi tugas dan perhatian setiap elemen penyelenggara pemerintahan. Begitu juga di Kabupaten Kepulauan Mentawai, prinsip ini menjadi garda terdepan dalam memastikan good governance dan clean governance berjalan baik dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, sistem pengadaan barang dan jasa, manajemen sumber daya manusia dan pada segala aspek birokrasi.

Tabel 2.63
Perkembangan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK
dan Indeks Persepsi Anti Korupsi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	71,74	67,25	68,18	67,77	Belum Rilis
Indeks Persepsi Anti Korupsi	83,99	82,79	82,95	83,02	Belum Rilis

Sumber: Nilai Reformasi Birokrasi (diolah)

Tabel 2.27 menunjukkan indikator penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN yang relatif belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dilihat dari indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan nilai survei Penilaian Integritas (SPI) di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada angka 71,74 dan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu dengan nilai 67,25 dan sedikit mengalami peningkatan di tahun 2023 yaitu dengan nilai 68,18, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 67,77. Untuk penilaian indeks persepsi anti korupsi skor yang menggambarkan persepsi atau anggapan masyarakat terhadap tingkat korupsi di suatu daerah dengan skor sebesar 83,99 di tahun 2021, meskipun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 82,79 dan kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024 yaitu menjadi sebesar 82,95 dan 83,02. Untuk Tahun 2025 indeks persepsi anti korupsi belum rilis. Peningkatan Indeks Persepsi Anti Korupsi ini mengindikasikan adanya harapan masyarakat terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi hal dasar yang harus dilakukan sehingga masyarakat patuh dan taat hukum. Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil baik isu internal maupun eksternal serta mampu mencegah berbagai ancaman yang akan datang. Penyelenggaraan demokrasi dan menjamin hak-hak warga negara.

1. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan perda (Peraturan Daerah) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah ditegakkan atau dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaran perda yang ditindak dengan total pelanggaran perda yang terjadi. Pelaksanaan penegakan Perda yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.

Tabel 2.64
Perkembangan Persentase Penegakan Perda
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Penegakan Perda	92	94	95	98	Belum rilis

Sumber: Satpol PP Damkar Kab. Kepulauan Mentawai (diolah)

Perkembangan penegakan perda di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan perkembangan yang sangat baik, dalam artian setiap permasalahan pelanggaran perda yang ditemukan selalu dilakukan upaya penertiban atau tindakan, baik melalui persuasif, mediasi dan penegakan atau penertiban langsung. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 92 persen. Pada tahun 2022 penegakan perda terus dilakukan sehingga persentase penegakan perda mengalami kenaikan menjadi 94 persen, lalu pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 95 persen dan pada tahun 2024 persentase penegakan perda di Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat menjadi 98 persen.dan pad tahun 2025 persentase penegakan perda di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum dirilis

2. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan Aksi HAM sebagai wujud komitmen terhadap penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Penilaian dilaksanakan berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui pelaksanaan aksi-aksi prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil Penilaian Capaian Aksi HAM Daerah Periode Pelaporan B12 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 93. Nilai tersebut merupakan hasil penilaian terhadap lima aksi prioritas, yaitu pemberian bantuan usaha dan pengembangan kemitraan bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (100), penyediaan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (88), penyediaan layanan kesehatan jiwa sesuai Standar Pelayanan Minimal (100), implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas (95), serta pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (80).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Aksi HAM di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berjalan dengan baik sesuai indikator penilaian nasional. Namun demikian, pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya diukur dari capaian indikator, tetapi juga dari kualitas dan pemerataan

akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Karakteristik wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah kepulauan masih memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Pada sektor pendidikan, masih terdapat kendala akses layanan di beberapa wilayah terpencil serta faktor sosial ekonomi yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan anak. Pada sektor kesehatan, tantangan masih dihadapkan pada pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, dan peningkatan mutu pelayanan. Selain itu, upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan masyarakat hukum adat masih memerlukan penguatan melalui penyediaan layanan publik yang lebih inklusif, aksesibel, dan berkeadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, capaian pelaksanaan Aksi HAM telah mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam memenuhi indikator penilaian nasional. Namun demikian, peningkatan kualitas pemenuhan hak asasi manusia masih perlu terus dilakukan melalui pemerataan akses terhadap pelayanan dasar dan penguatan layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, sehingga implementasi Aksi HAM tidak hanya tercermin dari capaian indikator, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya merupakan indikator yang mengukur persepsi masyarakat terhadap kondisi keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Indikator ini menggambarkan tingkat rasa aman masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari di lingkungan sekitar, yang mencerminkan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kondusivitas wilayah.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, data indikator ini untuk periode tahun 2021–2026 belum tersedia karena pengukuran belum pernah dilaksanakan pada tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengukuran indikator direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2027 sesuai dengan metodologi dan mekanisme pengumpulan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Hasil pengukuran tersebut akan menjadi data dasar (baseline) untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan target kinerja, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada periode perencanaan selanjutnya.

4. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas penyelenggaraan demokrasi, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, penghormatan terhadap hak-hak warga negara, serta efektivitas kelembagaan demokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027, data Indeks Demokrasi Indonesia untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai belum dapat disajikan karena pengukuran indikator pada tingkat kabupaten belum pernah dilaksanakan. Berdasarkan kesepakatan dan rencana pelaksanaan pengukuran, penilaian Indeks Demokrasi Indonesia akan mulai

dilaksanakan pada tahun 2027 sesuai dengan metodologi dan mekanisme yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Hasil pengukuran tersebut akan menjadi data dasar (baseline) untuk menggambarkan kondisi demokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan target kinerja, pemantauan, dan evaluasi pembangunan demokrasi pada periode perencanaan selanjutnya.

Ketersediaan data Indeks Demokrasi Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan demokrasi di daerah, sehingga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan demokrasi, perlindungan hak-hak sipil dan politik, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan merujuk pada kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional melalui diplomasi yang kuat dan pertahanan yang efektif, serta kemampuan untuk menanggulangi ancaman terhadap kawasan. Dalam kerangka pemerintah daerah, ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor, inovasi serta dukungan kebijakan yang relevan. Penyelenggaraan pemerintah membutuhkan dukungan lintas sektor baik antar pemerintah, swasta dan masyarakat.

1. Persentase MoU yang ditindaklanjuti

Kerja sama antar lembaga dan pemerintah daerah lainnya sangat penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta menghadapi tantangan global dan permasalahan sosial ekonomi di masyarakat. Pemerintah daerah dengan keterbatasan sumber daya yang ada memerlukan ruang untuk berkolaborasi dalam menguraikan permasalahan pembangunan daerah sehingga ditemukan beberapa pilihan alternatif pemecahan masalah, salah satunya adalah melalui kerja sama dengan lembaga, badan ataupun dengan pemerintah daerah lainnya.

Tabel 2.65
Perkembangan MoU yang Ditindaklanjuti
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2022		2023		2024	
	MoU	PKS	MoU	PKS	MoU	PKS
Jumlah Dokumen	12	10	6	5	11	10
Persentase	83,34		83,34		90,9	

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Mentawai, 2022-2025 (diolah)

Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman memang perlu ditindaklanjuti dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih mengikat dan terperinci sehingga keputusan akan mempengaruhi kedua belah pihak.
Perkembangan MoU yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 2022-2024 menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Pada tahun 2022 dari 12 MoU yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 10

PKS. Begitu juga dengan MoU yang dilakukan di tahun 2023 sebanyak 6 MoU ditindaklanjuti dengan PKS sebanyak 5 PKS dan pada tahun 2024 dengan MoU sebanyak 11 MoU ditindaklanjuti dengan PKS sebanyak 10 PKS.

2. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan

Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan menunjukkan kondisi dinamis yang melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat Mentawai untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar demi kelangsungan hidup dan perkembangan bangsa dan negara. Ini mencakup upaya menjaga keamanan wilayah, menjaga stabilitas sosial, dan memastikan kedaulatan negara. Sebagai daerah terluar Indonesia, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi besar terhadap ancaman dan gangguan baik dari sisi militer seperti potensi serangan dari negara lain (kawasan Samudera Hindia), pengungsi dari negara lain (Sri Lanka) dan dari negara berkonflik, kelompok separatis/teroris dan gangguan non militer seperti Bencana alam (tsunami, gempa bumi), *illegal logging*, *illegal fishing*, kejahatan transnasional, serta konflik sosial.Sebagai urusan pemerintahan absolut oleh pemerintah pusat, memperkuat kekuatan militer, kepolisian dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah, TNI, Polri (Forkopimda) dan seluruh elemen masyarakat menjadi hal terpenting dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat di Kepulauan Mentawai.

D. Capaian Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisa kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; (6) sosial.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencerdaskan hingga mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pembangunan berkelanjutan yang memungkinkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Pendidikan akan membantu mengembangkan kapital manusia, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang meningkatkan produktivitas, peran besar pendidikan juga dapat memutus mata rantai kemiskinan. Tujuan pendidikan itu dapat mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan *(Tan Malaka)*. Pendidikan yang merata adalah fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan, memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada masyarakat.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 yang berhubungan dengan urusan dengan pendidikan sebagai berikut :

Tabel. 2.66
Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Urusan Pendidikan
Kabuaten Kepulauan Mentawai, 2025

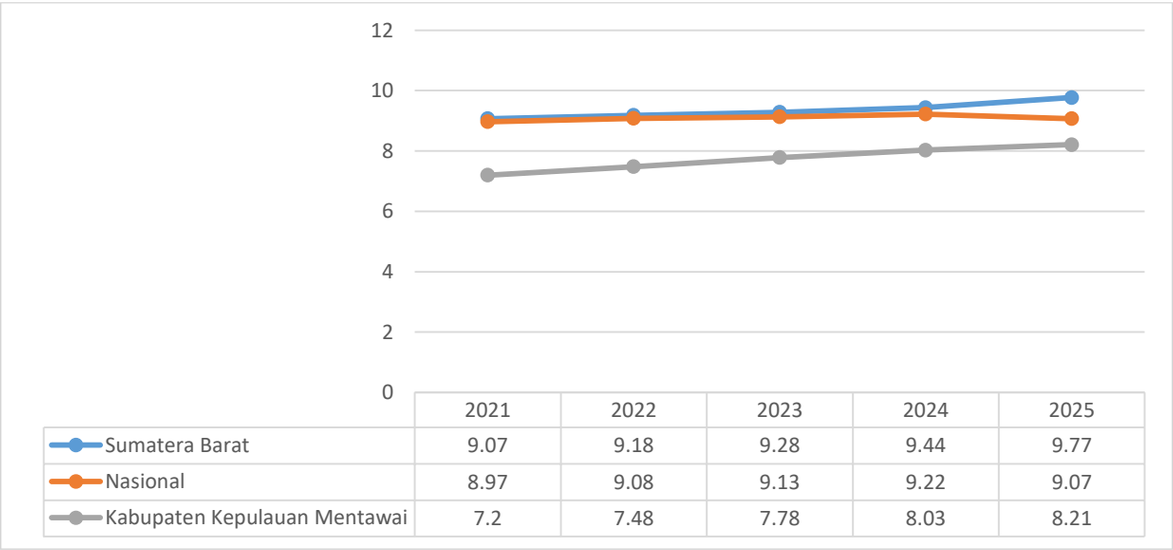
INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN)	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,8	67,62
Rata Lama sekolah	Tahun	8,09	8,21

INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN)	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	13,17
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas berkualifikasi tinggi	Persen	5	10,18
Indeks Perkembangan Anak Usia Dini	Indeks	84,4	0
Literasi Membaca	Angka	45,00	40,28
Numerasi	Angka	12,00	36,77

2. Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh penduduk untuk menempuh pendidikan formal. RLS digunakan untuk melihat kualitas pendidikan dan penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas, RLS tidak termasuk tahun yang diulang dan RLS dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan, kualitas pendidikan, perencanaan kebijakan, dan evaluasi program pendidikan.

Rata Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Sumatera Barat	9.07	9.18	9.28	9.44	9.77
Nasional	8.97	9.08	9.13	9.22	9.07
Kabupaten Kepulauan Mentawai	7.2	7.48	7.78	8.03	8.21

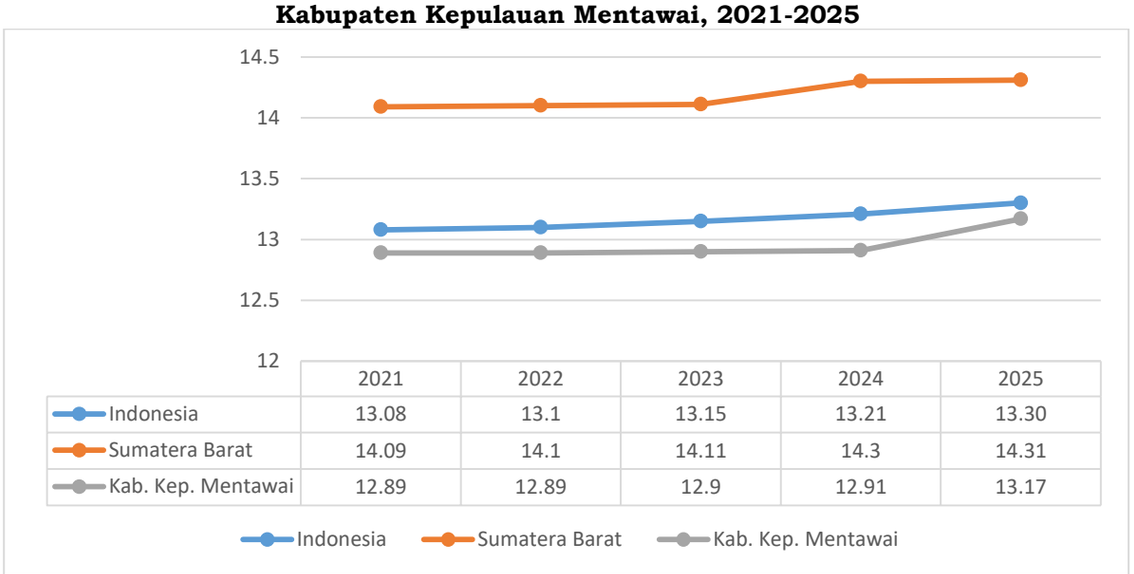
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Sekolah (RLS) tingkat Provinsi Sumatera Barat dan secara Nasional. Tren perkembangan rata lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan hasil yang positif, dapat dilihat dalam Gambar 2.17 bahwa pada tahun 2022 RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 7,2 tahun dan meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 7,48 tahun begitu juga selanjutnya hingga tahun 2025 RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 8,21 tahun. Peningkatan RLS ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan pencapaian RLS di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yaitu dengan *slope* (kemiringan) yang lebih besar (0,244) dari RLS Provinsi Sumatera Barat (0,111) dan Nasional (0,08). Pencapaian ini tentunya sebagai respons positif terhadap program pemerintah daerah yang memberikan beasiswa perguruan tinggi, penyediaan sarana dan sarana pendidikan, serta memperluas keikursertaan program kesetaraan bagi masyarakat. Namun pencapaian RLS Kabupaten Kepulauan Mentawai masih jauh berada dibawah capaian Rata Lama Sekolah (RLS) tingkat Provinsi Sumatera Barat dan secara Nasional.

3. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya masa sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang, dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. HLS merupakan indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan, karena mencerminkan peluang anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih lama dan berkualitas. Beberapa faktor yang memengaruhi nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah kualitas pendidikan, akses terhadap pendidikan, kebijakan pemerintah t
terkait pendidikan, kondisi ekonomi dan sosial.

Harapan Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Indonesia	13.08	13.1	13.15	13.21	13.30
Sumatera Barat	14.09	14.1	14.11	14.3	14.31
Kab. Kep. Mentawai	12.89	12.89	12.9	12.91	13.17

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

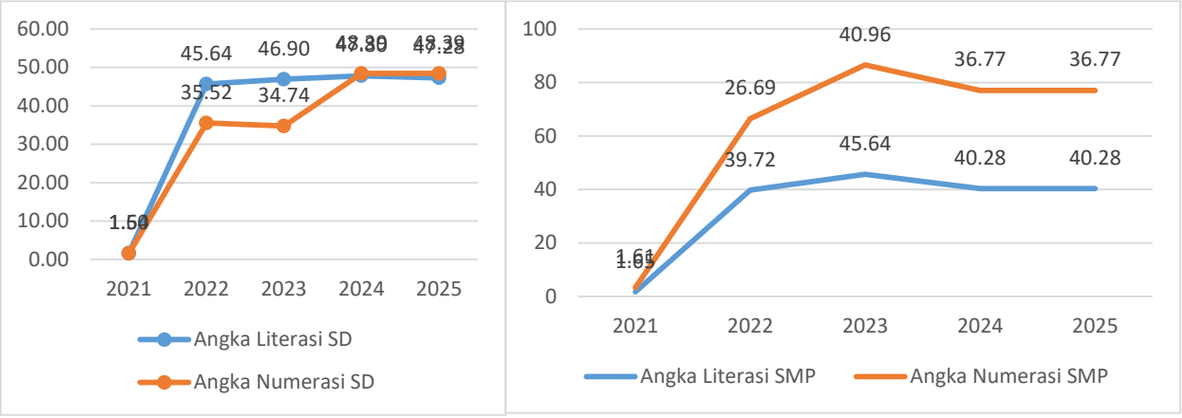
Perkembangan capaian Harapan lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 12,89 tahun pada tahun 2021 meningkat hingga tahun 2024 HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 12,91 tahun. Namun peningkatan nilai HLS ini tidak signifikan yaitu peningkatan hanya 0,09 poin selama 5 tahun terakhir. Pencapaian HLS yang belum signifikan mengalami peningkatan tentu menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali program sektor pendidikan terutama terhadap akses dan mutu layanan pendidikan sehingga ekspektasi (harapan) masyarakat untuk mengenyam pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin bertambah/meningkat. Capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian HLS Provinsi Sumatera Barat dan secara nasional. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.18 menujukkan pada tahun 2020 HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 12,82 tahun sedangkan HLS Provinsi Sumatera Barat sebesar 14,02 tahun dan HLS Nasional sebesar 13,08 tahun hingga tahun 2025 posisi HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai (13,17 tahun) masih dibawah capaian HLS Provinsi Sumatera Barat (14,31 tahun) dan HLS Nasional 13,30 tahun).

3. Literasi dan Numerasi Pendidikan

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi dan numerasi

yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, literasi dan numerasi adalah dua keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang, terutama anak-anak di usia sekolah.

Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber: Rapor Pendidikan Kab. Kepulauan Mentawai

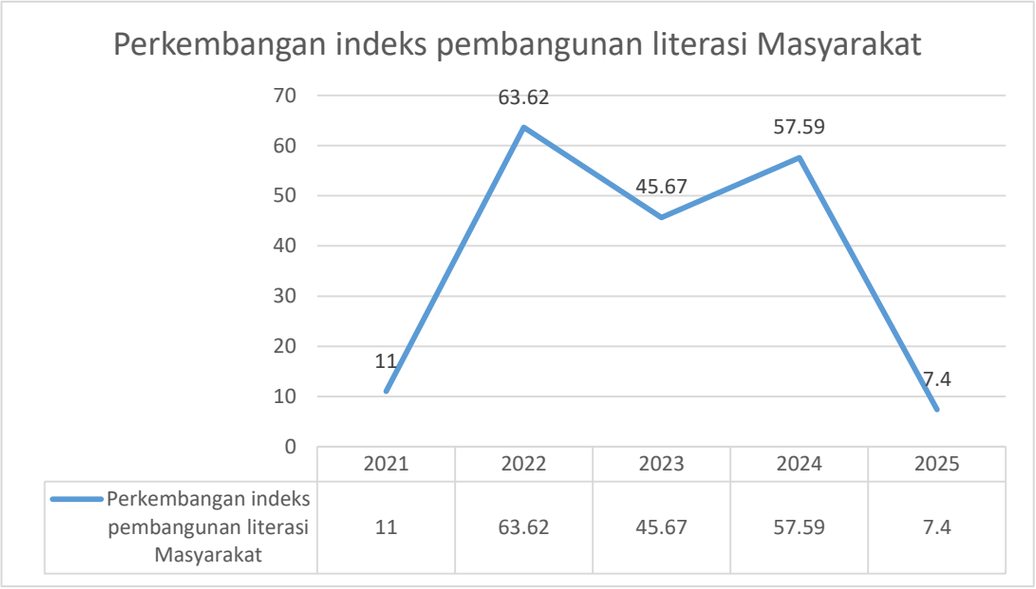
Gambar 2.40 menunjukkan bahwa perkembangan capaian angka literasi baik jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami tren peningkatan. Untuk jenjang pendidikan SD, angka literasi meningkat dari 1,60 pada tahun 2021 menjadi 47,28 pada tahun 2024. Begitu juga dengan angka literasi pada jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan dari 1,65 pada tahun 2021 meningkat menjadi 40,28 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbaikan yang signifikan atas kemampuan literasi peserta didik jenjang pendidikan SD dan SMP sehingga mampu lebih memaknai suatu narasi atau teks yang dibaca/tertulis.

Perkembangan angka numerasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP juga menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya kurun waktu 2021-2025. Pada jenjang pendidikan SD, angka numerasi mengalami peningkatan dari 1,54 pada tahun 2021 menjadi 48,39 pada tahun 2025. begitu juga pada jenjang pendidikan SMP, angka numerasi mengalami peningkatan dari 1,61 pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 36,77 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan terhadap kemampuan numerasi peserta didik baik pada jenjang pendidikan SD maupun SMP sehingga lebih mampu memaknai dan memahami bilangan atau angka yang disajikan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

4. Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan peningkatan sebagaimana Gambar 2.20 Pada tahun 2021 nilai IPLM sebesar 11 dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 63,62 namun sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 45,67. Penurunan nilai IPLM di tahun 2023 terletak pada komponen ketercukupan koleksi perpustakaan dari 2,3757 poin menjadi 0,1773 poin dan komponen perpustakaan yang dibina seusai SNP dari 1,0738 poin menjadi 0,3045 poin.

Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber: Perpustakaan Nasional RI

Pada tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga nilai IPLM Kab. Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 57,59. Peningkatan ini terdapat di beberapa unsur salah satunya adalah peningkatan skor pada unsur perpustakaan yang dibina sesuai SNP menglami peningkatan dari 0,3045 poin menjadi 0,8436 poin. Upaya peningkatan literasi masyarakat terus dilakukan selain mengupayakan adanya gedung perpustakaan daerah dan pembinaan perpustakaan di tingkat desa juga melakukan upaya peningkatan layanan dan akses baca masyarakat.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kesehatan adalah suatu hal yang tidak tergantikan karena merupakan fondasi utama dari kualitas hidup dan produktivitas. Tanpa kesehatan yang baik, individu tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan sosial ekonomi. Kesehatan yang buruk dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan dan potensi penuh mereka, serta meningkatkan beban ekonomi baik pada individu maupun masyarakat melalui biaya perawatan medis yang tinggi sehingga kehilangan produktivitas. Disisi lain, kesehatan juga berpengaruh langsung pada kesejahteraan mental dan emosional, sehingga menjaga kesehatan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan bahagia. Dalam konteks yang lebih luas, masyarakat yang sehat merupakan dasar bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.67
Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Urusan Kesehatan
Kabuaten Kepulauan Mentawai, 2025

INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN)	Satuan	TARGET CAPAIAN TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,33	71,4
Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	208	200
Prevalensi Stunting	Persen	31,9	26,3
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus	Persen	56	38

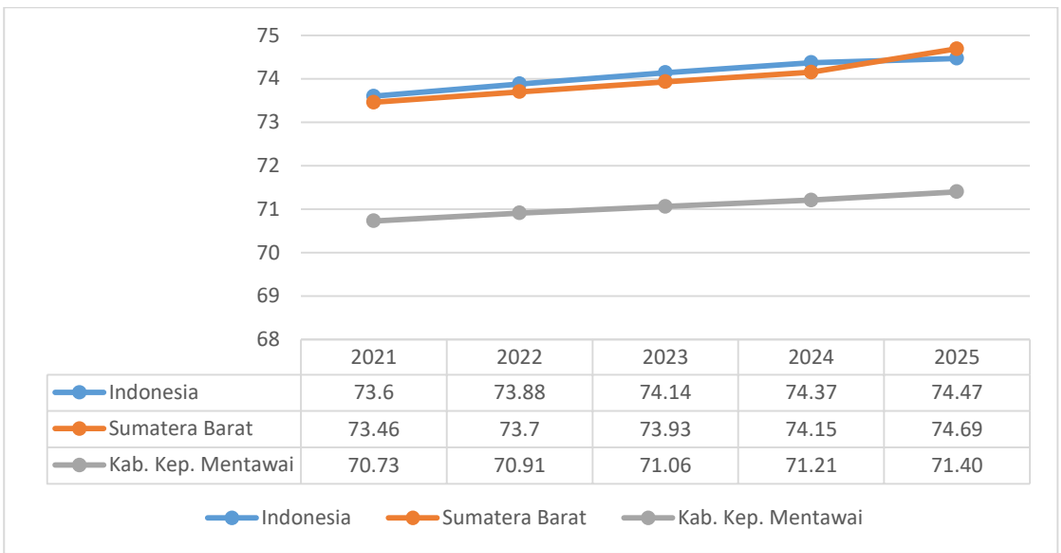
INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN)	Satuan	TARGET CAPAIAN TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
Tuberkulosis (*treatment coverage*)			
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	Persen	84	74,00

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan tahun yang dapat dijalani seseorang sejak lahir, dan merupakan indikator penting untuk menilai kualitas hidup dan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. UHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keadaan lingkungan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah, dan perekonomian masyarakat.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan, menunjukkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, dan merupakan komponen penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan UHH mencerminkan kemajuan dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Perkembangan Usia Harapan Hidup (tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Indonesia	73.6	73.88	74.14	74.37	74.47
Sumatera Barat	73.46	73.7	73.93	74.15	74.69
Kab. Kep. Mentawai	70.73	70.91	71.06	71.21	71.40

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan pencapaian ini terlihat pada tahun 2021 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 70,73 tahun meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2025 menjadi sebesar 71,40 tahun. Jika dibandingkan capaian UHH Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sumatera Barat dan secara Nasional, tentunya capaian UHH Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian UHH Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, seperti pada Gambar 2.21 menunjukkan pada tahun 2021 UHH Provinsi Sumatera Barat mencapai 73,5 tahun dan UHH Nasional sebesar 73,6 tahun, setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga tahun 2024 UHH Provinsi Sumatera Barat sebesar 74,69 tahun dan UHH Nasional sebesar 74,47 tahun. Upaya peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) sangat erat kaitannya

angka kematian anak lahir, gizi yang cukup bagi ibu hamil dan bayi lahir, nutrisi dan gizi bagi anak, pola hidup sehat dan produktivitas, mutu layanan kesehatan, kualitas lingkungan, kualitas hidup bagi lanjut usia. *Analisis Perkembangan Usia Harapan Hidup (2021-2025)* Secara umum, data menunjukkan tren positif dan progresif di ketiga wilayah tersebut. Peningkatan UHH merupakan indikator keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan, perbaikan gizi, serta akses terhadap sanitasi dan layanan medis yang lebih baik. Dalam kurun waktu 5 tahun, Indonesia berhasil meningkatkan harapan hidup masyarakatnya sebesar 0,87 tahun. Hal ini mencerminkan keberhasilan program kesehatan nasional dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular di tingkat makro.

Provinsi Sumatera Barat menunjukkan akselerasi yang menarik, pada tahun 2025, UHH Sumatera Barat (74,69) berhasil melampaui rata-rata nasional (74,47). Ini menandakan bahwa intervensi kebijakan kesehatan di tingkat provinsi sangat efektif, bahkan mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan rata-rata nasional.

Kabupaten Kepulauan Mentawai meskipun masih berada di bawah angka nasional dan provinsi, Mentawai menunjukkan pertumbuhan yang stabil tren meningkat dari 70,73 (2021) menjadi 71,4 (2025). Namun, tren yang terus naik menunjukkan bahwa program afirmasi untuk wilayah tertinggal mulai membuahkan hasil. Fokus Mentawai: Meskipun terus meningkat, Kepulauan Mentawai memerlukan perhatian khusus untuk memperkecil ketimpangan dengan wilayah lain di Sumatera Barat agar standar kualitas hidup di kepulauan setara dengan wilayah daratan. Peningkatan UHH ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan lansia, karena penduduk yang hidup lebih lama akan membutuhkan fasilitas kesehatan kronis yang lebih memadai di masa depan.

2. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat komplikasi yang terkait dengan kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan. AKI biasanya dinyatakan dalam angka per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu disebabkan oleh komplikasi yang berkaitan langsung dengan kehamilan, persalinan, atau nifas, seperti perdarahan, infeksi, preeklamsia, dan eklamsia. Beberapa faktor dapat memengaruhi AKI, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, status gizi ibu, pengetahuan tentang perawatan kehamilan, dan dukungan keluarga.

Tabel 2.68
Perkembangan Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Kematian Ibu 9Per 100.000 Kelahiran Hidup)	207	191	304	277	200

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Kepulauan Mentawai

Perkembangan nilai Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024 belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai AKI yang masih relatif tinggi. Pada tahun 2020 nilai AKI sebesar 356 kematian per 100.000

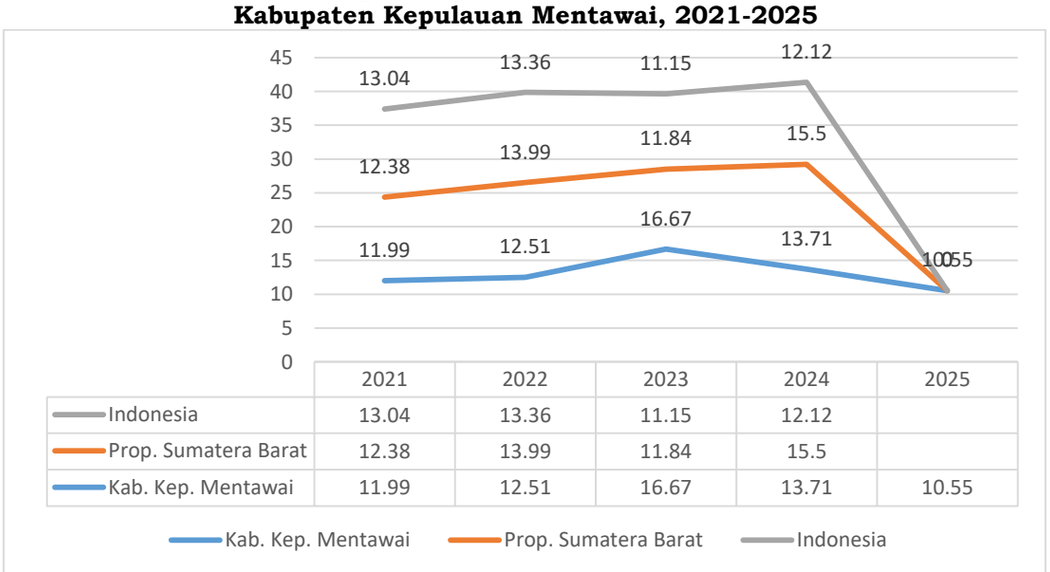
kelahiran hidup, dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebanyak 207 kematian ibu melahirkan dan pada tahun 2022 dengan 191 kasus kematian ibu melahirkan. Namun pada tahun 2023 angka AKI kembali meningkat menjadi 304 kasus kematian ibu melahirkan dan menurun di tahun 2024 menjadi sebanyak 277 kasus kematian ibu melahirkan dan ditahun 2025 angka AKI kembali menurun menjadi 200 kasus kematian ibu melahirkan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya peran kesehatan dalam mengedukasi dan mendampingi ibu hamil mulai dari pra kehamilan, selama kehamilan dan persalinan. Langkah mencegah kematian ibu hamil yang dapatdilakukan antara lain rentang usia hamil, kehamilan ideal pada usia 20-35 tahun, kontrol kehamilan, periksa kehamilan minimal setiap 3 bulan sekali atau lebih, libatkan keluarga, dampingi istri bersalin di pelayanan kesehatan, tunda usia perkawinan dini.

3. Angka Kesakitan/Morbiditas

Angka kesakitan atau morbiditas adalah indikator yang menunjukkan seberapa sering gangguan kesehatan terjadi dalam suatu populasi, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan merupakan indikator penting untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan seberapa banyak orang dalam suatu populasi yang menderita suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi angka kesakitan, semakin buruk derajat kesehatan penduduk. Pentingnya angka kesakitan (morbiditas) ini dihitung untuk:

d) Penilaian Program Kesehatan: Angka kesakitan membantu dalam mengevaluasi efektivitas program kesehatan dan intervensi yang bertujuan untuk mengurangi penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
e) Perencanaan Kesehatan: Data morbiditas digunakan untuk perencanaan program kesehatan yang lebih baik, seperti alokasi sumber daya dan pengembangan layanan kesehatan.
f) Pemantauan Kesehatan: Angka kesakitan membantu memantau tren penyakit dan masalah kesehatan dalam suatu populasi, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan dan intervensi yang tepat waktu.

Perkembangan Angka Kesakitan/Morbiditas (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Indonesia	13.04	13.36	11.15	12.12	
Prop. Sumatera Barat	12.38	13.99	11.84	15.5	
Kab. Kep. Mentawai	11.99	12.51	16.67	13.71	10.55

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Angka kesakitan (morbiditas) secara *time series* 2021-2025 di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan penurunan. Pada tahun 2021 angka kesakitan di Kepulauan Mentawai sebesar 11,99 persen, artinya dari 100 orang penduduk terdapat 16-17 orang yang mengalami keluhan kesehatan. Angka ini turun di tahun 2021 menjadi 11,99 persen dan tahun 2022 sebesar 12,51

persen. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan 4,16 poin menjadi 16,67 persen dan kembali turun di tahun 2025 menjadi 13,71 persen. Hal yang sama, angka kesakitan (morbiditas) di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional juga mengalami penurunan yaitu dari 14,39 persen pada tahun 2020 (Provinsi Sumatera Barat) dan 14,64 persen secara Nasional mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 12,38 persen untuk Provinsi Sumatera Barat dan sebesar 13,04 persen untuk Nasional. Namun, untuk 2024, angka morbiditas di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan yaitu menjadi 15,5 persen sedangkan untuk skala Nasional angka kesakitan (morbiditas) mengalami penurunan yaitu menjadi 12,12 persen

Angka kesakitan menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Berbeda dengan Usia Harapan Hidup, dalam variabel ini angka yang lebih rendah menunjukkan capaian yang lebih baik. Dimulai dari 13,04% pada 2021, sempat naik ke 13,36% (2022), lalu turun signifikan ke 11,15% (2023), sebelum kembali naik tipis ke 12,12% pada 2024. Sumatera Barat menunjukkan tren yang lebih volatil dibandingkan angka nasional.

Kabupaten Kepulauan Mentawai sempat mengalami lonjakan tinggi pada tahun 2023 di angka 16,67%, namun berhasil melakukan penurunan drastis secara berturut-turut hingga mencapai 10,55% pada 2025.

Analisis: Capaian tahun 2025 (10,55%) adalah angka terendah dalam seluruh tabel data ini. Penurunan dari 16,67% ke 10,55% dalam dua tahun merupakan indikasi keberhasilan intervensi kesehatan di tingkat lokal, seperti perbaikan layanan kesehatan dasar di puskesmas atau peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan.

4. Cakupan Jaminan Kesehatan

Cakupan jaminan kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diimplementasikan oleh BPJS Kesehatan, merupakan komponen penting dalam pembangunan, karena memastikan akses layanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat, mendukung peningkatan kualitas hidup dan produktivitas, serta mengurangi beban ekonomi akibat penyakit. Cakupan jaminan kesehatan yang dihitung dalam layanan jaminan kesehatan berupa JKN, asuransi swasta, perusahaan/kantor. Pentingnya Jaminan Kesehatan dalam Pembangunan antara lain:

e) Peningkatan Kualitas Hidup: Jaminan kesehatan yang memadai memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan, mencegah penyakit, dan mendapatkan pengobatan yang tepat, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas.
f) Peningkatan Produktivitas: Dengan jaminan kesehatan, masyarakat tidak perlu khawatir akan biaya pengobatan yang mahal, sehingga dapat fokus pada pekerjaan dan kegiatan produktif lainnya.
g) Pencegahan Kemiskinan: Jaminan kesehatan dapat membantu mencegah orang jatuh ke dalam kemiskinan akibat biaya pengobatan yang mahal, karena beban finansial akibat penyakit akan berkurang.
h) Pembangunan Sumber Daya Manusia: Kesehatan yang baik merupakan modal penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, karena masyarakat yang sehat dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan.

Cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menjadi perhatian dan hal yang mendasar khususnya bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penanganan *stunting* dan program pembangunan lainnya. Gambar 2.23 menunjukkan cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum menyentuh angka 70 persen. Artinya masih terdapat 30 persen

masyarakat Mentawai tidak memiliki jaminan kesehatan untuk layanan kesehatannya.

Cakupan Jaminan Kesehatan (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Indonesia	68.36	69.62	72.38	75.48	76.61
Propinsi Sumatera barat	69.9	71.31	72.36	77.4	83.54
Kab. Kep. Mentawai	61.56	62.28	62.6	61.68	61.96

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021-2025

Secara nasional, cakupan Jaminan Kesehatan menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari 68,36% pada tahun 2021 menjadi 76,61% pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperluas kepesertaan JKN melalui berbagai program seperti PBI (Penerima Bantuan Iuran), integrasi data sosial, serta peningkatan akses layanan kesehatan.

Di tingkat Provinsi Sumatera Barat, capaian cakupan JKN juga mengalami peningkatan yang lebih progresif dibanding nasional, dari 69,90% pada tahun 2021 menjadi 83,54% pada tahun 2025. Lonjakan signifikan terutama terjadi pada periode 2024–2025, yang mengindikasikan adanya akselerasi kebijakan daerah, seperti optimalisasi Universal Health Coverage (UHC) dan dukungan APBD untuk pembiayaan peserta.

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan kondisi yang relatif stagnan dan fluktuatif. Cakupan JKN pada tahun 2021 sebesar 61,56% meningkat sedikit pada 2022 (62,28%), namun sempat menurun pada 2023 menjadi 60,60%. Pada periode berikutnya terjadi peningkatan terbatas hingga mencapai 61,96% pada tahun 2025. Dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi, posisi Mentawai masih tertinggal cukup signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya beberapa tantangan utama di Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain: Keterbatasan akses geografis wilayah kepulauan yang menyulitkan pendaftaran dan pemutakhiran data peserta.

Kapasitas fiskal daerah yang terbatas untuk mendukung pembiayaan peserta JKN. Validitas data kependudukan dan kemiskinan yang belum optimal. Tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan tren cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif stagnan, tentu perlu keberpihakan dan kerja keras pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat memiliki jaminan kesehatan baik secara mandiri, melalui pemerintah (Jamkesda/BPJS) dan dibiayai perusahaan/kantor.

Negara menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam rangka menjamin hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, Pemerintah Indonesia

meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2011. Penyelenggaraan JKN diatur melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saat ini, pemerintah berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang menjamin setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil, menyeluruh, dan bermutu tanpa hambatan finansial.

5. Prevalensi *stunting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya. Dampak dari *stunting* adalah dalam jangka pendek: hambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, peningkatan risiko infeksi, dan gangguan metabolisme. Jangka panjang: Kesulitan belajar, gangguan kesehatan kronis (diabetes, penyakit jantung), dan penurunan produktivitas di masa depan.

Stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-2, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Pencegahan dan penanganan *stunting* menjadi prioritas penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan karena *stunting* menurunkan produktivitas dan pendapatan, tidak memiliki potensi untuk menjadi kurang cerdas dan memiliki kemampuan yang terbatas di masa depan.

Tabel 2.69
Perkembangan Prevalensi Stunting
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Prevalensi *stunting* (%)	27,3	32	33,7	26,2	26,3

Sumber : SSGI, 2021-2025

Capaian angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara tren selama lima tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan yaitu dari 27,3 persen di tahun 2021 menjadi 32,0 persen pada tahun 2022, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 33,7 persen, pada tahun 2024 menjadi 26,2, dan pada tahun 2025 prevalensi stunting 26,3 persen, hal ini menjadi peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat begitu juga pemenuhan asupan gizi kepada pasangan atau ibu hamil/ 1.000 hari pertama kehidupan ketika sudah diketahui ada janin, begitu juga dengan pemantauan gizi ibu hamil yang senantiasa dilakukan melalui pelayanan kesehatan. Begitu juga perbaikan sarana dan prasarana lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan berupa pembangunan toilet RT, pengelolaan limbah, drainase dan berbagai intervensi yang terpadu. Akselerasi penanganan *stunting* telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gerakan Mentawai Anti *stunting* dan Gizi Buruk Peduli Anak (Masgibur Dua) dengan sasaran intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. *stunting* adalah masalah serius yang berdampak luas pada pembangunan. Penanganan *stunting* membutuhkan upaya yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pihak. Dengan penanganan yang tepat, *stunting* dapat dicegah dan diatasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Intervensi dilakukan melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) bersama BKKBN yang difokuskan pada pendampingan keluarga berisiko, pemenuhan gizi, serta intervensi spesifik bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Upaya pencegahan diperbuat melalui Aksi Bergizi di satuan pendidikan melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, yang menitikberatkan pada peningkatan literasi gizi, pencegahan anemia melalui konsumsi tablet tambah darah, serta pembiasaan perilaku hidup sehat pada remaja.

Kolaborasi tersebut diharapkan mewujudkan penanganan stunting yang komprehensip, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia serta percepatan pecapaian target penurunan stunting di daerah.

Tabel 2.70
Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Indikator Kesehatan	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Harapan Hidup (tahun)	64,73	64,93	65,1	71,21	72,26
Prevalensi Stunting	27,3	32	33,7	26,2	Belum release
Angka Kematian Bayi (kematian/1.000 kelahiran hidup)	23	20,4	18	28.4	22
Angka Kematian Balita (1.000 balita)	3,2	13,8	12	32.5	24
Angka Kematian Ibu (kematian/100.000 kelahiran hidup)	207	191	304	277.2	137
Cakupan Desa UCI (%)	59,52	51,2	35,87	30,3	53,6
Kunjungan ibu hamil)%)	53,1	75,71	81,4	82,1	1750
Rasio Daya Tampung RS Rujukan (TT/100.000 penduduk)	71	71	85	86	51
Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	66,50	70,18	76,42	42,04	32,12
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin (%)	55,14	75,71	81,4	55,31	42,9
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	59,07	60,00	68,26	58,51	67,45
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	58,01	49,13	56,28	69,13	74,8
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	17,74	21,43	24,05	85,43	86,82
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	32,71	54,60	56,24	62,60	80,18
Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	84,61	75,20	78,31	91,00	98,57
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	48,83	35,44	47,82	57,00	83,55
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	10,88	67,25	70,05	22,00	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	38,91	90,15	92,46	27,00	100
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan standar pelayanan TBC sesuai standar (%)	18,52	60,74	65,62	85,00	59,00

Indikator Kesehatan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	0,00	0,00	0	59,00	67,68
Angka kesakitan Malaria	0,5	1,31	1,43	1,08	0
Angka kesembuhan TB	85	85	90	88,5	15

sumber: data (diolah)

Pembangunan bidang kesehatan selama periode Tahun 2021-2025 menunjukkan capaian yang cukup baragam, dengan beberapa indikator mengalami peningkatan signifikan, namun sebagian lainnya masih menunjukkan fluktuasi bahkan penuunan kinerja yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan Tahun 2027. Pada Tabel 2.25 menunjukkan beberapa capaian indikator kesehatan daerah selama 5 tahun terakhir. Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukan tren peningkatan yang cukup signifikan, dari 64,73 tahun pada Tahun 2021 menjadi 72,26 tahun pada Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, perbaikan status gizi, serta pengendalian penyakit. prevalensi *stunting* mengalami peningkatan pada periode awal, dari 27,3% pada Tahun 2021 menjadi 33,7% pada Tahun 2023. Namun demikian, pada Tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 26,2% yang menunjukan mulai efektifnya intervensi percepatan penurunan stuntung. Data Tahun 2025 belum dirilis, sehingga evaluasi lanjutan masih diperlukan untuk memastikan keberlanjutan tren penurunan tersebut.

Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan tren menurun dari 23 per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2021 menjadi 18 pada Tahun 2023, namin kembali meningkat pada Tahun 2024 menjadi 28.4 dan menurun kembali pada Tahun 2025 menjadi 22. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas pelayanan kesehatan bayi masih perlu diperkuat.

Angka Kematian Balita mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dari 3,2 pada tahun 2021 meningkat menjadi 13,8 pada Tahun 2022, kemudian relatif menurun pada Tahun 2023, namun kembali meningkat signifikan pada Tahun 2024 menjadi 32,2 dan menurun pada Tahun 2025 menjadi 24. Hal ini mengindikasikan masih adanya permasalahan dalam pelayanan kesehatan balita dan faktor risiko lingkungan.

Angka Kematian Ibu (AKI) juga menunjukkan pola fluktuatif dengan peningkatan signifikan pada Tahun 2023 sebesar 304 kematian per 100.000 kelahiran hidup, kemudian menurun secara signifikan pada Tahun 2025 menjadi 137. Penurunan ini menunjukan adanya perbaikandalam sitem pelayanan kesehatan ibi, meskipun masih memerlukan penguatan berkelanjutan.

Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) mengalami penurunan dari 59,52% pada Tahun 2021 menjadi 30,3% pada Tahun 2024, namun kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 53,6%. Hal ini menujukkan adanya gangguan dalam pelaksanaan program immunisasi yang perlu segera ditangani melalui penguatan sistem pelayanan.

Kunjungan ibu hamil menunjukan tren peningkatan dari 53,1% pada Tahun 2021 menjadi 82,1% pada Tahun 2024 namun data Tahun 2025 tercatat sebesar 1750 yang mengindikasikan adanya ketidaksesuian satuan atau pencatatn, sehingga perlu dilakukan validasi data.

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meningkat hingga Tahun 2023 (76,42%), namun mengalami penurunan signifikan pada Tahun 2024 menjadi 42,04% dan kembali

menurun pada Tahun 2025 menjadi 32,12% Hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas atau akses layanan kesehatan ibu.

Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan juga menunjukkan pola serupa, dengan peningkatan hingga Tahun 2023 (81,4%), namun menurun pada Tahun 2024 menjadi 55,31% dan kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 42,9%.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir relatif stabil dengan tren meningkat pada Tahun 2025 sebesar 67,45%, sementara cakupan pelayanan kesehatan balita meningkat secara bertahap hingga mencapai 74,8% pada Tahun 2025.

Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar mengalami peningkatan signifikan dari 17,74% pada Tahun 2021 menjadi 86,825 pada Tahun 2025, yang menunjukkan keberhasilan intervensi pelayanan kesehatan berbasis sekolah.

Cakupan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59 Tahun) meningkat secara signifikan dari 32,71% pada Tahun 2021 menjadi 80,18% pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini penyakit.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut (≥60 tahun) juga menunjukan peningkatan yang konsisten, dari 84,61% pada Tahun 2021 menjadi 98,57% pada Tahun 2025, yang mencerminkan optimalisasi pelayanan kesehatan lansia.

Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi menunjukkan peningkatan dari 48,83% pada Tahun 2021 menjadi 83,55% pada Tahun 2025. Demikian pula pelayanan bagi penderita diabetes mellitus meningkat signifikan hingga mencapai 100% pada Tahun 2025, meskipun sebelumnya mengalami fluktuasi.

Pelayanan terhadap Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) berat juga menunjukkan peningkatan hingga mencapai 100% pada Tahun 2025, meskipun sempat mengalami penurunan pada Tahun 2024.

Cakupan pelayanan TBC meningkat hingga Tahun 2024 (85%), namunmenurun pada Tahun 2025 menjadi 59%. Lebih lanjut, angka kesembuhan TBC mengalami penurunan dratis dari 88,5% pada Tahun 2024 menjadi hanya 15% pada Tahun 2025, yang menjadi perhatian serius dalam upaya pengendalian penyakit menular.

Deteksi dini HIV menunjukkan peningkatan dari 0% pada periode 2021-2023 menjadi67,68% pada Tahun 2025, yang mencerminkan peningkatan upaya skrining dan kesadaran masyarakat.

Angka kesakitan malaria menunjukan tren menurun hingga mencapai 0 pada Tahun 2025, yang mengindikasikan keberhasilan dalam pengendalian penyakit malaria.

Rasio daya tampung rumah sakit rujukan meningkat dari 71 tempat tidur per 100.000 penduduk pada Tahun 2021 menjadi 86 pada Tahun 2024, namun menurun signifikan pada Tahun 2025 menjadi 51. Hal ini menunjukan adanya keterbatasan kapasitas layanan kesehatan rujukan yang perlu segera diatasi.

Jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi masih terbatas, yaitu hanya 1 RSUD selama periode 2021-2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas fasililitas kesehatan rujukan.

Pembangunan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki atau yang tersedia pada daerah tersebut. Tentunya tenaga kesehatan yang tersedia sudah seharusnya memiliki standar keahlian dimasing-masing disiplin ilmunya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga kesehatan melalui beberapa saluran, antara lain penerimaan CPNS, tenaga medis kontrak, tenaga penyuluh, kemitraan dengan perdesaan/dusun, tenaga kesehatan PTT dan melalui saluran lainnya.

Tabel 2.71
Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Tenaga Kesehatan	2021	2022	2023	2024	2025
Dokter	38	43	42	50	34
Perawat	137	353	346	367	267
Bidan	79	263	265	260	232

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026

Ketersedian tenaga kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Tenaga kesehatan yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, sangat menentukan keberhasilan pencapaian indikator pembangunan kesehatan, terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Ketersedian tenaga kesehatan selama periode Tahun 2021-2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Jumlah tenaga dokter mengalami peningkatan hingga Tahun 2024, namun menurun signifikan pada Tahun 2025. Kondisi serupa juga terjadi pada tenaga perawat dan bidan, yang mengalami peningkatan pada periode awal, namun menurun pada Tahun 2025.

Penurunan jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokte dan bidan, berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan rujukan. Selaian itu, tantangan dalam distribusi tenaga kesehatan antar wilayah dan fisilitasi pelayanan juga menjadi faktor yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Jumlah tenaga dokter pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 38 orang dan meningkat menjadi 43 orang pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 42 orang, sebelum kembali meningkat pada Tahun 2024 menjadi 50 orang. Namun demikian, pada Tahun 2025 jumlah tenaga dokter mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 34 orang. Penurunan ini menjadi perhatian penting mengingat tenaga dokter memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan. Keterbatasan tenaga dokter berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan medis, khususnya dalam penanganan kasus yang membutuhkan kompetensi klinis lebih lanjut.

Jumlah tenaga perawat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 137 orang pada Tahun 2021 menjadi 353 orang pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 jumlah tenaga perawat relatif stabil sebanyak 346 orang, kemudian meningkat kembali pada Tahun 2024 menjadi 367 orang. Namun, pada Tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 267 orang. Meskipun secara keseluruhan jumlah tenaga perawat masih lebih tinggi dibandingkan kondisi awal pada Tahun 2021, penurunan pada Tahun 2025 mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan tenaga, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor mutasi, pensiun, atau keterbatasan pengadaan tenaga baru. Mengingat perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling banyak berinteraksi langsung dengan pasien, kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kesehatan.

Jumlah tenaga bidan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 79 orang pada Tahun 2021 menjadi 263 orang pada Tahun 2022, dan relatif stabil pada Tahun 2023 dengan jumlah 265 orang. Selanjutnya, jumlah tenaga

bidan mengalami penurunan secara bertahap pada Tahun 2024 menjadi 260 orang dan kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 232 orang. Penurunan jumlah tenaga bidan ini memiliki implikasi langsung terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, mengingat bidan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kehamilan, persalinan, dan nifas, khususnya di tingkat pelayanan dasar.

Secara umum, perkembangan jumlah tenaga kesehatan selama periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan, namun pada Tahun 2025 seluruh jenis tenaga kesehatan utama mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, baik dari aspek perencanaan kebutuhan, distribusi, maupun retensi tenaga kesehatan.

Fluktuasi jumlah tenaga kesehatan tersebut berpotensi mempengaruhi capaian indikator pembangunan kesehatan, terutama pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, cakupan pelayanan kesehatan dasar, serta kualitas layanan rujukan. Penurunan jumlah tenaga dokter dan bidan, khususnya, dapat berdampak pada peningkatan risiko terhadap pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

Selain itu, ketersediaan tenaga kesehatan juga perlu dilihat dari aspek pemerataan distribusi antar wilayah dan fasilitas pelayanan kesehatan. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dapat menyebabkan belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas.

Dengan demikian, dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan pada RKPD Tahun 2027, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam penguatan sumber daya manusia kesehatan, antara lain melalui perencanaan kebutuhan tenaga berbasis beban kerja, peningkatan rekrutmen tenaga kesehatan, pemerataan distribusi tenaga, serta penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan. Selain itu, diperlukan pula kebijakan yang mendukung retensi tenaga kesehatan agar tetap dapat bertugas secara optimal di daerah.

Kondisi pembangunan kesehatan menunjukkan adanya kemajuan yang cukup baik pada beberapa indikator, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis melalui perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, guna mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan pada RKPD Tahun 2027.

Pembangunan kesehatan adalah bentuk pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat. Tentunya akses terhadap layanan kesehatan harus menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana kesehatan untuk mempermudah dalam mengatasi permasalahan kesehatannya. Penyediaan sarana kesehatan sebagai sarana bagi masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan permasalahan kesehatan baik itu preventif, kuratif dan promotif kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 2.72
Jumlah Layanan Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Sarana Layanan Kesehatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	RSUD/RS Pratama	1	2	2	1	2
2	Puskesmas	15	15	15	15	15

No	Sarana Layanan Kesehatan	2021	2022	2023	2024	2025
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	27	39	40	39	41
4	Poskesdes	128	90	90	96	86
5	Posyandu	279	289	289	285	272
6	Polindes	33	90	90	38	40

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026

Ketersediaan layanan kesehatan berupa sarana dan prasarana kesehatan adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses layanan kesehatan. Pusat layanan kesehatan masyarakat harus menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat tidak bersusah payah pergi ke daerah lain untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 2.27 menunjukkan perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2021-2025 mengalami perkembangan dalam hal jumlah sarana, terutama di daerah terpencil yaitu di dusun-dusun. Tentunya tidak sekedar penyediaan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat, yang lebih esensial lagi adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan promosi pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.73
Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabuaten Kepulauan Mentawai, 2025

INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN)	Satuan	TARGET CAPAIAN TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	52,62	0
Kapasitas Air Baku	m3/ detik	0,01	0,0146
Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan	Persen	8	12,74
RT dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	75,82	79,06
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	3,16	79,06
Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	16,79	6,94
Indeks tutupan lahan	Indeks	95,91	213.190,14
Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	37,99	30,46

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat dalam memperlancarkan aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas serta daya saing. Pembangunan jalan menjadi hal utama dan pertama yang harus disediakan pemerintah. Ketersediaan jalan menjadi pra syarat awal dalam pembangunan yang berkelanjutan. Jalan memegang peranan penting dalam kegiatan transportasi dan mobilitas penduduk. Sebagai

penopang sistem sosial dan ekonomi masyarakat, jalan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan sektor lain, terutama dalam peningkatan sektor ekonomi riil masyarakat. Tabel 2.27 menunjukkan panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kondisi baik menunjukkan tren naik. Panjang jalan hingga tahun 2025 dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 226,55 km dari total panjang jalan yang ada 1.103 km atau 20,54 persen di mana berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2-161 tahun 2025 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Kepulauan Mentawai bahwa total panjang ruas jalan kabupaten 1.103,989 KM menurun jika di bandingkan panjang jalan pada tahun 2024 dengan total panjang ruas jalan kabupaten 1.130,2 KM, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak ringan tahun 2025 sekitar 6,46 km atau 0,58 persen dari total panjang jalan dan panjang jalan dalam kondisi rusak berat sekitar 870,98 km atau sekitar 78,89 persen. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, mengingat peran strategis pembangunan jalan dalam memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.74
Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2025

Tahun	Kondisi Jalan (km)				Panjang Jalan (km)
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2020	53,89	293,54	388,93	393,82	1.130,2
2021	88,52	60,54	210,18	770,94	1.130,2
2022	111,92	41,54	35,71	941,01	1.130,2
2023	45,50	33,80	79,50	971,40	1.130,2
2024	142,81	35,32	33,40	918,67	1.130,2
2025	163,19	63,36	6,46	870,98	1.103,989

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan jalan trans Mentawai yang telah dilaksanakan untuk mendukung kawasan strategis daerah hingga tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2025, panjang jalan yang telah dibangun adalah sepanjang 481,48 km dengan rincian struktur beton sepanjang 117,69 km, dengan perkerasan sepanjang 117,69 km, dengan pembukaan/ tanah sepanjang 9,84 km.

Tabel 2.75
Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2025

Rencana Jalan TRANS MENTAWAI (393,87 km)	Beton (km)	Perkerasan (km)	Pembukaan/ Tanah (km)	Belum Terbuka (km)
Trans Sipora (77,67 km)	77,67	77,67	-	-
Trans Pagai Utara (63 km)	12,74	12,74	36,46	
Trans Pagai Selatan (66 km)	4,95	4,95	51,66	8.84
Trans Siberut (187,2 km)	22,32	22.32	157,98	1,00
Total	117,69	117,69	246,10	9,84

Sumber : Dinas PUPR Kab.Kepulauan Mentawai

Secara total, panjang trans Mentawai yang belum terbangun/ belum terbuka adalah sepanjang 9,84 km. ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan pembukaan jalan trans Mentawai agar wilayah mulai dari ujung utara hingga selatan Pulau Siberut sudah terhubung, begitu juga di 3 pulau lainnya.

Tabel 2.30 menunjukkan perkembangan rumah tangga dengan akses air minum layak, selama kurun waktu 2021-2025 tren pencapaiannya meningkat, yaitu pada tahun 2021 persentase RT dengan akses air bersih layak sebesar 55,46 persen dan capaiannya setiap tahun meningkat hingga pada tahun 2025 capaiannya menjadi sebesar 67,42 persen

Tabel 2.76
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Bersih Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

TAHUN	PERSENTASE (%)
2021	55,46
2022	63,21
2023	68,34
2024	63,16
2025	67,42

Sumber : Dinas PUPR Kab.Kepulauan Mentawai

Angka ini tentunya sangat kecil jika dilihat kebutuhan masyarakat akan layanan dasar air bersih dan juga bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harusnya sudah ada dan dinikmati oleh masyarakat. Capaian ini tentunya menjadi perhatian pemerintah karena intervensi capaiannya dapat didorong dari investasi atau pengelolaan secara mandiri baik berupa perumda atau BLUD untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
Perkembangan capaian rumah tangga dengan sanitasi layak di Kepulauan Mentawai Tahun 2021-2025 menunjukkan peningkatan pencapaian. Tabel 2.31 menunjukkan pada tahun 2021 rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 71,05 persen meningkat pada tahun 2025 menjadi 69,63 persen. Capaian ini tentunya didorong oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat secara mandiri untuk menyediakan dan mengelola sanitasi layak skala rumah tangga.

Tabel 2.77
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

TAHUN	PERSENTASE (%)
2021	71,05
2022	60,09
2023	72,28
2024	69,3
2025	69,63

Sumber : Dinas PUPR Kab.Kepulauan Mentawai

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan, baik dari aspek konektivitas wilayah, pelayanan infrastruktur dasar, maupun penataan ruang yang adaptif terhadap karakteristik daerah kepulauan dan risiko bencana. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa kemantapan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Dokumen RPJMD juga mengidentifikasi bahwa kemantapan jalan, konektivitas transportasi darat, laut dan udara, ketersediaan air bersih yang memadai, listrik yang stabil

serta akses internet masih menjadi tantangan pembangunan lima tahun ke depan.

Meskipun kondisi jalan kabupaten mengalami peningkatan setiap tahun, tingkat kemantapan jalan masih belum sepenuhnya mampu mendukung mobilitas masyarakat pada seluruh wilayah kepulauan. Sebaran penduduk yang tersebar pada empat pulau utama dan lebih dari seratus pulau kecil menyebabkan pembangunan jaringan jalan membutuhkan biaya yang relatif tinggi dengan tingkat kesulitan konstruksi yang lebih besar dibandingkan daerah daratan. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat ruas jalan yang belum mantap, terutama pada kawasan pedalaman, kawasan produksi pertanian dan perkebunan, kawasan wisata, serta wilayah yang menjadi jalur penghubung antar pusat pelayanan.

Pengembangan Jalan Trans Mentawai tetap menjadi prioritas pembangunan infrastruktur wilayah karena berfungsi sebagai tulang punggung konektivitas Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Prioritas pembangunan diarahkan pada penyelesaian ruas-ruas strategis yang menghubungkan pusat pemerintahan, pelabuhan, bandar udara, kawasan permukiman, kawasan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, sentra pariwisata, serta kawasan rawan bencana sebagai jalur evakuasi. Peningkatan kualitas jalan tersebut diharapkan mampu mempercepat distribusi barang dan jasa, memperluas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, menurunkan biaya transportasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Berdasarkan karakteristik wilayah kepulauan, analisis kesenjangan pelayanan infrastruktur jalan menunjukkan bahwa setiap kecamatan memiliki kebutuhan yang berbeda. Kecamatan di Pulau Siberut masih membutuhkan peningkatan konektivitas menuju kawasan produksi dan pusat pelayanan, sementara kecamatan di Pulau Sipora dan Kepulauan Pagai memerlukan peningkatan kualitas jalan menuju kawasan wisata, pelabuhan, bandara, serta pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan jalan tidak hanya berorientasi pada peningkatan panjang jalan mantap, tetapi juga pada peningkatan aksesibilitas antarwilayah, keterhubungan antar moda transportasi darat dan laut, serta pemerataan pelayanan infrastruktur dasar.

Pada sektor air minum, pelayanan air bersih masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber air baku, kondisi topografi, penyebaran permukiman yang berjauhan, serta terbatasnya sistem penyediaan air minum (SPAM) yang mampu melayani seluruh masyarakat. Sebagian masyarakat masih memanfaatkan sumber air permukaan, mata air maupun penampungan air hujan sehingga kualitas, kontinuitas dan kuantitas pelayanan air bersih belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan. Oleh karena itu, pengembangan sektor air minum perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber air baku, pembangunan dan rehabilitasi SPAM, perluasan jaringan distribusi perpipaan, perlindungan kawasan resapan air, serta peningkatan investasi infrastruktur air minum untuk mendukung target peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum layak dan aman.

Analisis pelayanan air minum juga perlu menggambarkan kesenjangan antar kecamatan, meliputi kapasitas sumber air baku yang tersedia, kapasitas produksi instalasi pengolahan air, cakupan pelayanan perpipaan, jumlah masyarakat yang belum terlayani, serta kebutuhan pengembangan jaringan pelayanan pada kawasan permukiman baru, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendekatan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas investasi infrastruktur air minum secara bertahap sesuai kemampuan pendanaan daerah.

Pada sektor sanitasi, pelayanan perlu dibedakan secara jelas antara akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman. Sanitasi layak menggambarkan rumah tangga yang telah memiliki fasilitas sanitasi sesuai standar, sedangkan sanitasi aman mencakup pengelolaan air limbah domestik secara aman mulai dari penampungan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan akhir. Saat ini masih terdapat keterbatasan sistem pengelolaan air limbah domestik, sehingga sebagian besar rumah tangga masih menggunakan sistem setempat dengan tingkat pengelolaan lumpur tinja yang belum optimal. Oleh sebab itu, pembangunan sanitasi diarahkan pada peningkatan akses sanitasi aman, pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola, serta perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

Permasalahan drainase perkotaan juga masih menjadi perhatian, terutama pada kawasan permukiman padat, pusat pemerintahan, kawasan perdagangan, dan wilayah pesisir yang sering mengalami genangan akibat tingginya curah hujan, sedimentasi saluran, serta keterbatasan kapasitas drainase eksisting. Penanganan drainase dilakukan secara terpadu melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan drainase lingkungan, normalisasi saluran, pengendalian limpasan permukaan, serta integrasi dengan pengelolaan kawasan permukiman dan konservasi daerah tangkapan air.

Dalam aspek penataan ruang, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki karakteristik wilayah yang berada pada kawasan rawan gempa bumi, tsunami, abrasi pantai, banjir dan longsor sehingga pemanfaatan ruang harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana. Pengendalian pemanfaatan ruang diarahkan agar pembangunan permukiman, fasilitas umum, infrastruktur strategis, kawasan ekonomi maupun kawasan pariwisata berada pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta tingkat kerawanan bencana. Penataan ruang juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kawasan lindung, kawasan konservasi, daerah resapan air, sempadan sungai dan sempadan pantai agar tetap mampu menjalankan fungsi ekologisnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, arah pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kemantapan Jalan Trans Mentawai dan ruas jalan strategis kabupaten, peningkatan konektivitas kawasan produksi dan destinasi pariwisata, peningkatan kapasitas sumber air baku dan pelayanan air minum, peningkatan akses sanitasi layak dan sanitasi aman, penguatan sistem drainase perkotaan, serta pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana. Pendekatan pembangunan tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah kepulauan, meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana sesuai arah pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029.

Sebagai daerah kepulauan yang terdiri atas empat pulau utama, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan serta 103 pulau kecil, pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menunjukkan kesenjangan antarwilayah. Karakteristik geografis yang dipisahkan oleh laut, kondisi topografi yang didominasi perbukitan dan kawasan hutan, serta tingginya ancaman bencana gempa bumi dan tsunami menyebabkan pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang tinggi dan dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena itu, analisis kesenjangan pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan

berdasarkan kondisi masing-masing pulau dan kecamatan untuk menentukan prioritas pembangunan tahun 2027.

Analisis Gap Infrastruktur Jalan dan Konektivitas Wilayah

Pelayanan jaringan jalan kabupaten masih belum merata antar kecamatan. Kawasan Pulau Sipora memiliki tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik dibandingkan Pulau Siberut maupun Kepulauan Pagai karena merupakan pusat pemerintahan kabupaten. Sebaliknya, sebagian ruas jalan pada Pulau Siberut dan Kepulauan Pagai masih membutuhkan peningkatan kualitas jalan, pembangunan jembatan, serta peningkatan konektivitas menuju kawasan produksi dan pusat pelayanan dasar.

Kesenjangan pelayanan jalan berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

Wilayah/Pulau	Kondisi Eksisting	Gap Pelayanan	Prioritas Tahun 2027
Pulau Siberut	Masih terdapat ruas jalan dengan kondisi belum mantap, keterhubungan antar kecamatan belum optimal	Akses menuju kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pelabuhan dan pusat pelayanan masih terbatas	Peningkatan ruas Jalan Trans Mentawai, pembangunan jembatan, peningkatan jalan menuju sentra produksi dan jalur evakuasi bencana
Pulau Sipora	Kondisi jalan relatif lebih baik namun beberapa ruas lingkungan dan kawasan wisata masih memerlukan peningkatan	Belum seluruh kawasan wisata, permukiman dan pusat pelayanan terhubung dengan jalan mantap	Peningkatan jalan menuju kawasan wisata, pelabuhan, bandara Rokot dan pusat pemerintahan
Pulau Pagai Utara	Sebagian ruas masih berupa jalan agregat dan memerlukan peningkatan struktur	Konektivitas antar desa dan akses menuju pelabuhan masih terbatas	Peningkatan ruas strategis menuju kawasan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelabuhan
Pulau Pagai Selatan	Masih terdapat keterbatasan akses menuju desa terpencil	Distribusi logistik dan pelayanan publik belum optimal	Peningkatan jalan kabupaten dan jalan penghubung menuju kawasan produksi dan jalur evakuasi tsunami

Prioritas pembangunan jalan diarahkan pada ruas-ruas yang mendukung:

a. konektivitas Jalan Trans Mentawai;
b. akses menuju pelabuhan, bandar udara dan pusat pemerintahan;

c. akses menuju kawasan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata;
d. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. jalur evakuasi bencana gempa bumi dan tsunami; serta
f. pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Analisis Gap Pelayanan Air Minum

Pelayanan air minum masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber air baku dan sistem penyediaan air minum (SPAM), terutama pada kawasan permukiman terpencar dan pulau-pulau kecil. Sebagian masyarakat masih bergantung pada mata air, sungai, sumur gali maupun penampungan air hujan sehingga kontinuitas pelayanan belum sepenuhnya terjamin.

Analisis kesenjangan pelayanan air minum meliputi:

Aspek	Kondisi Eksisting	Gap Pelayanan	Arah Kebijakan
Kapasitas sumber air baku	Masih terbatas pada beberapa kecamatan	Belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk dan pengembangan kawasan	Pengembangan sumber air baku dan perlindungan daerah tangkapan air
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Belum menjangkau seluruh desa	Masih terdapat desa yang belum memperoleh pelayanan perpipaan	Pengembangan SPAM perkotaan dan SPAM perdesaan
Cakupan pelayanan	Belum merata antar kecamatan	Masih terdapat rumah tangga yang menggunakan sumber air tidak terlindungi	Perluasan jaringan distribusi dan sambungan rumah
Kebutuhan investasi	Masih tinggi	Memerlukan pembangunan IPA, reservoir, jaringan transmisi dan distribusi	Pendanaan APBD, APBN, DAK, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha

Pembangunan sektor air minum diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber air baku, pembangunan instalasi pengolahan air, perluasan jaringan perpipaan, peningkatan kualitas pelayanan SPAM, serta pengembangan sistem air minum yang mampu menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan.

Analisis Gap Pelayanan Sanitasi

Pelayanan sanitasi perlu dibedakan antara sanitasi layak dan sanitasi aman.

Sanitasi layak menunjukkan rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap jamban sesuai standar, sedangkan sanitasi aman mencakup pengelolaan air limbah domestik secara aman mulai dari penampungan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan akhir.

Kondisi eksisting menunjukkan bahwa akses sanitasi layak terus meningkat, namun akses sanitasi aman masih relatif rendah karena sebagian besar rumah tangga masih menggunakan sistem setempat (on-site) dengan pengelolaan lumpur tinja yang belum optimal.

Analisis gap sanitasi meliputi:

Aspek	Kondisi Eksisting	Gap Pelayanan	Prioritas
Sanitasi layak	Terus meningkat	Masih terdapat rumah tangga belum memiliki jamban sehat	Pembangunan sarana sanitasi rumah tangga
Sanitasi aman	Masih terbatas	Belum tersedia sistem pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh	Pengembangan SPALD, IPLT dan layanan penyedotan lumpur tinja
Pengelolaan air limbah domestik	Didominasi sistem individual	Pengolahan lumpur tinja belum terkelola secara berkala	Penguatan kelembagaan dan pelayanan air limbah domestik

Analisis Gap Drainase

Pada beberapa kawasan perkotaan seperti Tua Pejat, Sikakap, Sioban, Muara Siberut dan pusat-pusat permukiman lainnya masih terjadi genangan pada musim hujan akibat kapasitas drainase yang belum memadai, sedimentasi saluran serta belum terintegrasinya sistem drainase dengan pengendalian limpasan permukaan.

Prioritas pembangunan diarahkan pada:

- rehabilitasi jaringan drainase;
- normalisasi saluran;
- pembangunan drainase kawasan permukiman;
- pengendalian banjir lokal dan genangan; serta
- peningkatan operasi dan pemeliharaan jaringan drainase.

Analisis Gap Penataan Ruang

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menghadapi tantangan berupa tingginya risiko gempa bumi, tsunami, abrasi pantai, banjir dan longsor. Oleh karena itu diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih konsisten terhadap RTRW serta integrasi dengan kajian risiko bencana.

Kesenjangan utama meliputi:

- masih terdapat pembangunan pada kawasan rawan bencana yang memerlukan pengendalian lebih ketat;

- belum optimalnya pemanfaatan ruang untuk kawasan ekonomi dan pariwisata yang memperhatikan daya dukung lingkungan;
- perlunya sinkronisasi RTRW dengan rencana sektoral dan dokumen mitigasi bencana.

Arah kebijakan penataan ruang tahun 2027 difokuskan pada penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan lindung, penyediaan ruang terbuka hijau, penataan kawasan pesisir, pengembangan kawasan strategis ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung jalur evakuasi dan kawasan aman bencana.

Secara keseluruhan, prioritas pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2027 diarahkan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan antar pulau melalui peningkatan kemantapan Jalan Trans Mentawai, penguatan konektivitas pusat pelayanan dan kawasan produksi, peningkatan kapasitas sumber air baku dan pelayanan air minum, peningkatan akses sanitasi layak dan sanitasi aman beserta pengelolaan air limbah domestik, pembangunan sistem drainase perkotaan, serta penguatan penataan ruang berbasis mitigasi bencana sehingga mampu mendukung pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan dasar dan ketahanan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta RPJMD arah peningkatan infrastruktur dasar, telah memuat perkembangan kondisi jalan, Jalan Trans Mentawai, rumah tangga berakses air bersih layak dan sanitasi layak. Namun demikian, analisis urusan PUPR perlu memperlihatkan keterkaitan antar-isu utama secara lebih eksplisit, yaitu rendahnya kemantapan jalan, keterbatasan konektivitas antarpulau dan antarkawasan, keterbatasan air bersih dan sanitasi layak, drainase, sumber air baku, serta kebutuhan penataan ruang berbasis mitigasi bencana.

RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai menegaskan bahwa kemantapan jalan, konektivitas darat-laut-udara, ketersediaan air bersih yang memadai dan pasokan listrik yang stabil menjadi tantangan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Sebagaimana diuraikan pada sub bab kebencanaan, dampak bencana terhadap jalan (runtuh, putus, bergeser, amblas, abrasi), jembatan (rusak, tertimbun), serta jaringan air minum dan sanitasi (pipa terputus, mutu air menurun) menegaskan bahwa penguatan infrastruktur dasar merupakan prasyarat sekaligus komponen mitigasi struktural terhadap risiko bencana.

Tabel 2.78
Keterkaitan Isu Infrastruktur PUPR dengan Risiko Bencana dan Prioritas 2027

No	Isu Infrastruktur PUPR	Keterkaitan dengan Risiko Bencana	Arah Kebijakan 2027
1	Kemantapan jalan dan Jalan Trans Mentawai	Jalan menjadi jalur evakuasi utama menuju perbukitan pada 33 desa pesisir rawan tsunami	Peningkatan struktur jalan tahan bencana dan revitalisasi jalur evakuasi
2	Konektivitas antarpulau (dermaga, pelabuhan, bandara)	Pelabuhan/dermaga dan bandara berpotensi rusak pada seluruh jenis bencana	Penguatan infrastruktur transportasi laut-udara berbasis mitigasi risiko

No	Isu Infrastruktur PUPR	Keterkaitan dengan Risiko Bencana	Arah Kebijakan 2027
3	Air bersih dan sumber air baku	Jaringan pipanisasi terputus akibat gempa, longsor dan cuaca ekstrim	Pembangunan/perbaikan SPAM dan sumber air baku tahan bencana
4	Sanitasi layak dan drainase	Banjir dan cuaca ekstrim merusak mutu air serta sarana sanitasi	Pengembangan masterplan drainase terintegrasi kesiapsiagaan iklim
5	Penataan ruang (RTRW)	Kawasan permukiman pesisir berada pada zona merah risiko tinggi	Integrasi RTRW dengan peta risiko bencana dan zona resiliensi

Sumber: RPJMD dan Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029, diolah.

Dengan demikian, prioritas pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2027 diarahkan tidak semata pada aspek konektivitas dan pelayanan dasar, tetapi juga secara eksplisit memperkuat mitigasi struktural kebencanaan, sejalan dengan Renstra BPBD 2025-2029 yang mendorong pembangunan jalur evakuasi, shelter, serta gedung pemerintahan berbasis mitigasi risiko.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu pemerintah daerah juga harus menjamin bahwa rumah yang ditempati masyarakat sudah sesuai dengan struktur geografis di Kepulauan Mentawai dikarenakan bahwa Kepulauan Mentawai adalah daerah rawan gempa. Sebuah rumah harus memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah yang terdiri dari ruang tidur atau ruang serba guna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

Perkembangan rasio rumah layak huni di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2021-2025 mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 rasio rumah layak huni telah mencapai 38,02 persen dan tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi sekitar 43,82 persen dengan jumlah rumah tidak layak huni sekitar sebesar 6.673 unit. Begitu juga dengan cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana meningkat dari 8 persen di tahun 2021 menjadi 24 persen pada tahun 2025. Untuk persentase fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 1,73 persen pada tahun 2021 menjadi 38 persen tahun 2025.

Tabel 2.79
Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

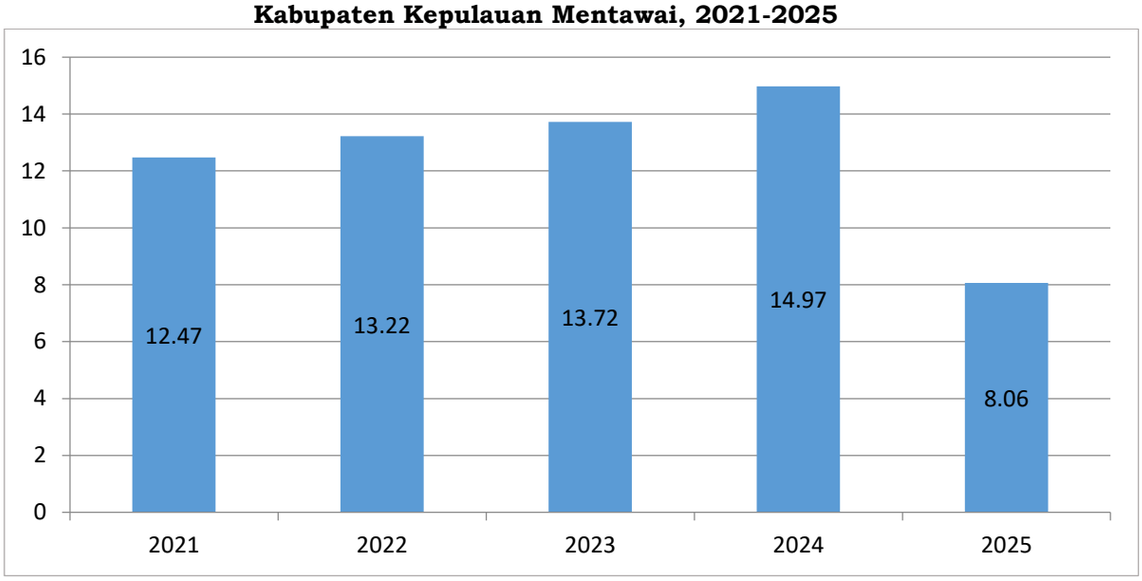
No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio rumah layak huni (%)	38,02	43,05	41,46	43,24	43,82
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	8	10	12,2	23	24

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah/ kota (%)	1,73	1,85	2,12	38	38
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	5	5,3	5,5	6	3,23
5	Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6.500	5.840	5.787	5.303	6.673
6	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1 kawasan	1 kawasan	2 kawasan	0	0

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Begitu juga dengan jumlah rumah tidak layak huni yang selalu diintervensi melalui program pemerintah daerah yaitu melalui perbaikan dan pembangunan rumah layak huni baik itu yang menjadi relokasi kawasan bencana atau potensi bencana juga sebagai program pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, yaitu dari 6500 unit RTLH pada tahun 2021 (belum terdata 100% jumlah RTLH di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai) berkurang sampai pada tahun 2024. Pada tahun 2025 menjadi 6.673 unit setelah dilakukan pendataan ulang rumah tidak layak huni di seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2026. Berikut ini bentuk penyajian dalam pencapaian penanganan kawasan kumuh kurun waktu dari dari tahun 2021 – 2025 :

Gambar 2.48
Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

Perkembangan luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif. Luas penanganan kawasan kumuh ditangani melalui penanganan 7 indikator utama antara lain (aspek kondisi bangunan gedung, aspek kondisi jalan lingkungan, aspek kondisi penyediaan air minum, aspek kondisi drainase lingkungan, aspek kondisi pengelolaan air limbah, aspek

londisi pengelolaan persampahan, dan aspek kondisi proteksi kebakaran. Setelah dilakukan pendataan tingkat kekumuhan ulang data yang di dapat berubah seiring dengan penanganan yang sudah dilakukan dari pemerintah daerah yang menyebabkan data luas penanganan yang meningkat dan dapat sewaktu-waktu menurun. Program berkelanjutan belum bisa menangani secara tuntas. Pada tahun 2021, luas penanganan mencapai 12,47 hektare. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 13,22 hektare, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 13,72 hektare. Peningkatan berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian tertinggi sebesar 14,96 hektare, yang mencerminkan adanya upaya intensif dalam penanganan kawasan kumuh.

Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan, dengan luas kawasan yang ditangani hanya sebesar 8,05 hektare. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya perubahan prioritas program, keterbatasan anggaran, atau berkurangnya luasan kawasan kumuh yang perlu ditangani. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami peningkatan konsisten hingga 2024, capaian pada 2025 menunjukkan perlunya evaluasi terhadap keberlanjutan dan efektivitas program penanganan kawasan kumuh agar target penanganan, seperti 10 hektare, dapat tetap tercapai secara optimal.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan. Tugas ini secara sinergis dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk menciptakan wilayah yang tertib, aman, dan siaga bencana.

Dan untuk Urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana merupakan bagian dari pelayanan dasar yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana melalui upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga masyarakat, maupun masyarakat secara langsung.

urusan penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Mengingat Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada kawasan dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kebencanaan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh nilai 196,67 dengan kategori risiko tinggi, yang menunjukkan bahwa ancaman bencana, tingkat keterpaparan penduduk, serta kerentanan wilayah masih memerlukan penguatan kapasitas secara berkelanjutan.

Pelayanan dasar pada sub urusan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui tiga layanan utama, yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan informasi rawan bencana dilakukan melalui penyusunan dan pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB), pemetaan kawasan rawan bencana berbasis InaRISK, penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat, pemasangan rambu dan papan informasi evakuasi, serta sosialisasi mitigasi bencana pada

kawasan yang berpotensi terdampak gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana lainnya.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan geologis yang cukup kompleks serta rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Wilayah ini berada pada zona subduksi aktif di sepanjang pantai barat Sumatera yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dan tsunami. Selain itu, kondisi geografis berupa wilayah kepulauan, curah hujan yang tinggi, serta topografi yang berbukit juga menyebabkan daerah ini berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang, dan cuaca ekstrem.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Upaya tersebut meliputi penyusunan dokumen kajian risiko bencana, peningkatan sistem peringatan dini, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Pada aspek pelayanan informasi kebencanaan, pemerintah daerah melalui BPBD telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai potensi dan risiko bencana kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ancaman bencana serta mendorong terbentuknya budaya sadar bencana. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media, baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, kegiatan simulasi kebencanaan, maupun melalui media komunikasi lainnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana melalui pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana, pelatihan relawan kebencanaan, serta peningkatan kapasitas aparat desa dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Upaya ini sangat penting mengingat kondisi geografis wilayah Mentawai yang terdiri dari pulau-pulau dengan akses transportasi yang terbatas sehingga peran masyarakat lokal dalam penanganan awal bencana menjadi sangat krusial.

Pada tahap tanggap darurat, BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berupaya meningkatkan kemampuan respon cepat terhadap kejadian bencana melalui penguatan sistem komando penanganan darurat, penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, organisasi kemanusiaan, serta relawan kebencanaan. Hal ini bertujuan agar proses penyelamatan dan evakuasi korban bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, jangkauan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat menunjukkan peningkatan, terutama dalam hal penyampaian informasi rawan bencana, kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Peningkatan ini menunjukkan semakin meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko bencana.

Namun demikian, dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan, keterbatasan jumlah personel dan relawan terlatih, serta kondisi geografis wilayah yang tersebar di beberapa pulau sehingga mempengaruhi kecepatan mobilisasi sumber daya pada saat terjadi bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kontinjensi, pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana,

pendidikan dan simulasi evakuasi secara berkala, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, relawan, dunia usaha, dan masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Upaya tersebut didukung dengan pengembangan sistem peringatan dini (Early Warning System), penyediaan data dan informasi kebencanaan secara terpadu, serta peningkatan kesiapan logistik dan peralatan kebencanaan.

Sampai dengan Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan berbagai upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana, penyelenggaraan simulasi kebencanaan, pembentukan Desa Tangguh Bencana, penyediaan peralatan penanggulangan bencana, serta penguatan koordinasi penanganan darurat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan jumlah personel BPBD dan relawan yang tersertifikasi, belum meratanya cakupan sistem peringatan dini pada kawasan rawan tsunami, terbatasnya jumlah Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA), belum optimalnya jalur dan rambu evakuasi, keterbatasan gudang logistik dan peralatan kebencanaan, serta kondisi geografis kepulauan yang menyebabkan waktu tanggap darurat dan distribusi bantuan menjadi lebih kompleks.

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengenai penguatan resiliensi bencana, pembangunan Tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD, memperkuat sistem pelayanan dasar kebencanaan, memperluas cakupan sistem peringatan dini, meningkatkan jumlah dan kualitas jalur evakuasi serta shelter evakuasi tsunami, memperkuat ketersediaan logistik dan peralatan kebencanaan, meningkatkan jumlah Desa Tangguh Bencana, serta memperluas pelatihan dan simulasi kebencanaan bagi masyarakat. Selain itu, seluruh pembangunan infrastruktur strategis diarahkan mengacu pada Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan prinsip pembangunan yang tangguh terhadap bencana (disaster resilient development), sehingga mampu meningkatkan ketahanan daerah sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan dasar pada saat terjadi bencana.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kebencanaan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga akan memperkuat pengukuran kinerja melalui indikator operasional, antara lain jumlah penduduk di kawasan rawan yang menerima layanan informasi kebencanaan, jumlah desa yang melaksanakan simulasi dan memiliki rencana evakuasi, jumlah relawan dan personel yang telah dilatih, jumlah Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang tersedia, panjang jalur evakuasi yang memenuhi standar, jumlah rambu evakuasi dan sistem peringatan dini yang berfungsi, ketersediaan logistik kebencanaan, serta waktu respons penanganan darurat. Indikator-indikator tersebut menjadi dasar evaluasi peningkatan kualitas pelayanan dasar dan penguatan resiliensi Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap ancaman bencana.

Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, pemerintah daerah perlu terus memperkuat upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui penguatan kelembagaan BPBD, peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan, pengembangan sistem informasi dan peringatan dini bencana, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian diharapkan tingkat risiko

bencana dapat ditekan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat semakin meningkat

Beberapa indikator terkait kebencanaan yang menjadi bagian dari urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dirangkum dalam Tabel 2.33.

Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman di Kepulauan Mentawai dengan tingkat kesulitan geografis mampu diselesaikan dengan capaian pada tahun 2025 sebesar 100 persen. Namun pada cakupan layanan bencana kebakaran telah pada angka 98 persen di tahun 2025.

Tabel 2.80
Perkembangan Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	85	88	90	92	100
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (persen)	35	38	60	80	98
Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	30	25	25	20	20
Persentase Penegakan PERDA (persen)	70	65	65	70	75
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.536	3.217	4.428	9.217	12.653
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.536	3.217	4.428	9.217	520
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	856	592	672	516	2.373
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Khusus Perkembangan Indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada aspek perlindungan masyarakat terhadap bencana, indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 jumlah penerima layanan sebanyak 2.536 orang, meningkat menjadi 3.217 orang pada tahun 2022 dan 4.428 orang pada tahun 2023. Peningkatan yang sangat besar terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah penerima layanan mencapai 9.217 orang dan kembali meningkat menjadi 12.653 orang pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan semakin luasnya jangkauan sosialisasi dan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.

Untuk *respon time* kejadian kebakaran sudah semakin membaik yaitu 20 menit di tahun 2025. Untuk penegakan perda senantiasa dilakukan dengan mengutamakan sosialisasi dan ajakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan tindakan-tindakan yang mengarah pada preventif dalam upaya menjaga kondusifitas dan kenyamanan masyarakat, seperti pada penertiban lapak atau kios pedagang yang tidak pada peruntukannya telah dilakukan tindakan penertiban langsung. Begitu juga dengan personel penegakan peraturan daerah yang masih sangat terbatas yaitu dengan PPNS sebanyak 2

orang, sehingga untuk capaian penegakan perda pada tahun 2025 hanya mencapai 75 persen.

Indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana menunjukkan pola yang sama pada periode 2021–2024 dengan jumlah penerima layanan meningkat dari 2.536 orang pada tahun 2021 menjadi 9.217 orang pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 jumlah penerima layanan tercatat sebesar 520 orang, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan metode pencatatan, fokus kegiatan, atau penyesuaian program kegiatan pada tahun tersebut.

Selanjutnya, indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana menunjukkan dinamika selama periode pengamatan. Pada tahun 2021 jumlah penerima layanan tercatat sebanyak 856 orang, kemudian menurun menjadi 592 orang pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 672 orang, namun kembali menurun menjadi 516 orang pada tahun 2024. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan dengan jumlah penerima layanan mencapai 2.373 orang, yang menunjukkan adanya peningkatan kejadian bencana yang memerlukan penanganan evakuasi atau peningkatan kapasitas layanan penyelamatan.

Adapun indikator persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara konsisten menunjukkan capaian maksimal yaitu 100 persen selama periode 2021–2025. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kejadian kebakaran yang terjadi dapat ditangani melalui layanan penyelamatan dan evakuasi secara optimal oleh petugas.

Untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah menjadi hal penting dilakukan terutama dalam pengarusutamaan kebencanaan untuk setiap sektor pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir risiko dan memitigasi dampak bencana bagian penting dalam tahapan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana.

Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan perda (Peraturan Daerah) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah ditegakkan atau dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaran perda yang ditindak dengan total pelanggaran perda yang terjadi. Pelaksanaan penegakan Perda yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.

Tabel 2.81
Perkembangan Persentase Penegakan Perda
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Penegakan Perda	92	94	95	98	75

Sumber: Satpol PP Damkar Kab. Kepulauan Mentawai (diolah)

Perkembangan penegakan perda di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan perkembangan yang sangat baik, dalam artian setiap permasalahan pelanggaran perda yang ditemukan selalu dilakukan upaya penertiban atau tindakan, baik melalui persuasif, mediasi dan penegakan atau penertiban langsung. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 92 persen. Pada tahun 2022 penegakan perda terus dilakukan sehingga persentase penegakan perda mengalami kenaikan menjadi 94 persen, lalu pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 95 persen dan pada tahun 2024

persentase penegakan perda di Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat menjadi 98 persen, tahun 2025 persentase penegakan perda di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum rilis.

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)

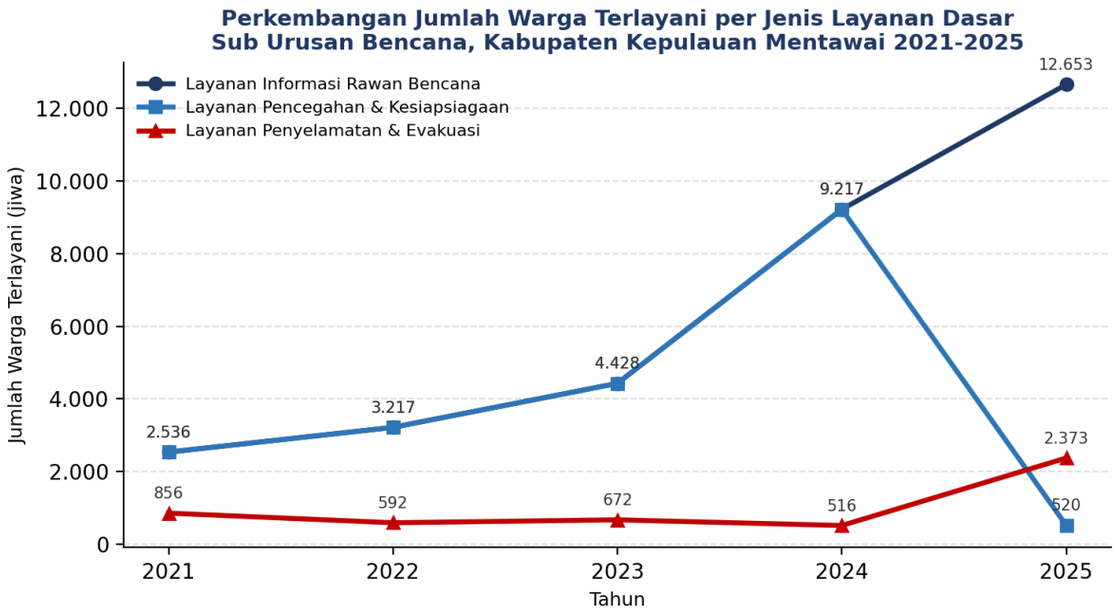
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah memuat perkembangan indikator umum ketenteraman dan ketertiban, namun sub urusan penanggulangan bencana masih perlu diperkuat dengan data operasional layanan dasar secara series lima tahun, terutama pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dengan IRBI tahun 2025 sebesar 201,41 berkategori risiko tinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai membutuhkan penguatan kapasitas BPBD, masyarakat, relawan, sistem peringatan dini, shelter, jalur evakuasi dan logistik secara lebih terukur.

Tabel 2.82
Perkembangan Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)	85	88	90	92	93
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	35	38	60	80	82
3	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	30	25	25	20	18
4	Persentase penegakan PERDA (%)	70	65	65	70	72
5	Jumlah warga memperoleh layanan informasi rawan bencana (jiwa)	2.536	3.217	4.428	9.217	12.653
6	Jumlah warga memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan (jiwa)	2.536	3.217	4.428	9.217	520
7	Jumlah warga memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (jiwa)	856	592	672	516	2.373

Sumber: BPBD dan Satpol PP Kabupaten Kepulauan Mentawai, diolah 2025.

Gambar 2.49
Tren Jumlah Warga Terlayani Sub Urusan Bencana Tahun 2021-2025



Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pada layanan informasi rawan bencana, dari 2.536 jiwa pada tahun 2021 menjadi 12.653 jiwa pada tahun 2025 (naik hampir lima kali lipat), sejalan dengan penguatan program sosialisasi dan Kajian Risiko Bencana berbasis InaRISK. Sebaliknya, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025 menjadi hanya 520 jiwa, setelah sebelumnya turut meningkat sejalan dengan layanan informasi. Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berfluktuasi mengikuti intensitas kejadian bencana pada tahun berjalan, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2025 menjadi 2.373 jiwa.

Data Operasional Pelayanan BPBD

Untuk menjawab kebutuhan penguatan data operasional sebagaimana dicatat dalam telaah RKPD, berikut disajikan rekapitulasi operasional pelayanan dasar BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 yang memuat jenis layanan, populasi sasaran, desa/kawasan rawan, sarana prasarana kebencanaan, jalur evakuasi/shelter, sistem peringatan dini, logistik, relawan dan kendala pelayanan.

Tabel 2.83
Operasional Pelayanan Dasar BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

No	Uraian	Data/Kondisi
1	Jumlah penduduk sasaran layanan (populasi kawasan rawan bencana)	55.378 jiwa
2	Desa/kawasan rawan bencana (pesisir)	33 dari 43 desa (76,7%)
3	Warga terlayani informasi rawan bencana (2025)	12.653 jiwa (22,85% dari sasaran)
4	Warga terlayani pencegahan dan	520 jiwa (0,94% dari sasaran)

No	Uraian	Data/Kondisi
	kesiapsiagaan (2025)	
5	Warga terlayani penyelamatan dan evakuasi (2025)	2.373 jiwa (100% dari sasaran kejadian)
6	Kejadian bencana tertangani (2025)	Gempa bumi, tsunami, banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim
7	Tempat Evakuasi Akhir (TEA) utama	2 titik di Sipora Utara (Gereja IFGF 61 mdpl; Gereja GKPM Maniri Piniel 56 mdpl), kapasitas 1.500 jiwa/titik
8	Pos checkpoint jalur evakuasi cepat (<5 menit)	Area PDAM dan Tower, Dusun Tuapejat, Kampung, dan Jati
9	Jalur evakuasi darurat	Jalan poros utama menjauhi pesisir menuju perbukitan (Siberut, Pagai, Sipora)
10	Hunian tetap (Huntap) relokasi pasca-tsunami 2010	Tumarei, Desa Silabu, dan beberapa dusun Pagai Selatan
11	Sistem peringatan dini	Kombinasi EWS BMKG/InaRISK, radio HT antar-instansi, kentongan/lonceng gereja
12	Rambu evakuasi	Rambu arah hijau di jalur utama permukiman pesisir
13	Logistik kedaruratan	Lumbung sosial pangan dan tenda darurat di titik tinggi evakuasi (Kemensos)
14	Relawan dan kelembagaan	Destana (Desa Tangguh Bencana), SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana)
15	Kendala utama pelayanan	Keterbatasan sarpras kantor, SDM, anggaran, dan sinergi implementasi SPM

Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025 (diolah).

Analisis operasional tersebut diperlukan agar capaian SPM dan target pengurangan risiko bencana tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menunjukkan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat kepulauan, khususnya pada 33 desa pesisir dengan kerawanan tinggi terhadap tsunami dan abrasi pantai.

Analisis Fluktuasi Data dan Kendala Pelayanan

Fluktuasi jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana setiap tahun terjadi karena beberapa faktor, yaitu: (1) target wilayah berbasis risiko yang berubah setiap tahun mengikuti daerah dengan risiko tertinggi pada periode tersebut; (2) keterbatasan sumber daya berupa anggaran, personel dan alat yang membatasi jangkauan sosialisasi; (3) perubahan indikator dan kebijakan pemerintah daerah; serta (4) variasi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan mitigasi.

Sementara itu, fluktuasi jumlah warga yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi bencana dipengaruhi oleh ketidakpastian intensitas dan jenis bencana alam (geologi maupun hidrometeorologi) yang

tidak dapat diprediksi, tingkat kerentanan wilayah akibat aktivitas pembangunan pada kawasan rawan bencana, efektivitas mitigasi dan edukasi masyarakat, serta kecepatan dan kapasitas respons tim SAR (BPBD dan Pemadam Kebakaran).

Kendala utama yang dihadapi dalam pemenuhan tiga jenis layanan dasar sub urusan bencana adalah sebagai berikut:

- Pelayanan informasi rawan bencana: kurangnya pemahaman mitigasi masyarakat serta ketidaktahuan titik rawan yang menyebabkan potensi kepanikan saat kejadian bencana.
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan: terbatasnya jangkauan sosialisasi, kendala anggaran dan SDM, serta ketidakpastian infrastruktur komunikasi darurat pada kawasan kepulauan.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi: keterlambatan respons akibat rusaknya infrastruktur, terbatasnya personel dan sarana prasarana, serta terputusnya jalur komunikasi pasca-bencana.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pelaksanaan Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib sosial, selama periode waktu 2021-2025, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.34 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan pada sarana sosial yang direhabilitasi serta indikator lain.

Tabel 2.84
Perkembangan Indikator Sosial
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
PPKS yang memperoleh bantuan (persen)	100	100	100	100	100
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial (persen)	100	100	100	100	100
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penanganan PPKS (persen)	100	100	100	100	100
Jumlah PPKS	24.636	24.797	25.241	24.562	28.824
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah sangat baik, dalam artian setiap kejadian dan kebutuhan PPKS selalu difasilitasi dan dibantu. Untuk jumlah PPKS dalam kurun waktu tahun 2021-2025 memperlihatkan tren peningkatan. Pada tahun tahun 2021 sebanyak 24.636 orang dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2025 menjadi sebanyak 28.824 orang.

Untuk capaian cakupan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti serta cakupan korban bencana alam dan sosial yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah .tanggap darurat bencana daerah kota telah mencapai 100 persen, artinya untuk setiap kasus yang ada telah ditangani/difasilitasi oleh dinas terkait.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumber daya manusia menjadi penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat pengangguran terbuka terendah di Provinsi Sumatera Barat. Indikator tenaga kerja lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.35 dibawah ini.

Tabel 2.85
Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	81,65	78,25	80,07	83,47	82,33
Jumlah pengangguran Terbuka (orang)	1.485	716	711	818	877
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	10	20	25	18,2	10
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	35,4	38	41,2	43	20
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	83,6	85	88	90	10,49
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	0	0	1	1	1

Sumber : BPS Kepulauan Mentawai dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir relatif konstan pada kisaran 1-2 persen. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,39 persen mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar 1,33 persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga TPT Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 1,44 persen atau bertambah 107 pengangguran dengan total jumlah pengangguran sebanyak 818 orang. Tingkat partisipasi angkatan sebagai bentuk gambaran ketersediaan angkatan kerja pada kelompok penduduk usia kerja yang produktif menunjukkan perkembangan yang membaik pada tahun 2022 yaitu sebesar 78,25 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 83,47 persen dan pada tahun 2025 sebesar 82,33 persen. Untuk jumlah pengangguran di Kabupaten kepulauan Mentawai tahun 2023 sebanyak 711 orang berkurang jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada tahun 2022 yaitu sebanyak 716 orang. Namun, mengalami peningkatan jumlah pengangguran di tahun 2024, sehingga jumlah pengangguran sebanyak 818 orang. Dan di tahun 2025 tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,53 persen

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi angkatan kerja perempuan kurun waktu 5 tahun tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yaitu dari 42,4 persen tahun 2020 menjadi 80 persen di tahun 2024. Hal ini dapat menggambarkan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah cukup memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Pembangunan gender di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, untuk tahun 2020 capaian IPG sebesar 89,59 persen dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2024 menjadi 90,13 persen. Untuk pencapaian kabupaten layak anak di Kepulauan Mentawai masih pada predikat pratama dan perlu peningkatan, hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk membangun komitmen dan mengintegrasikan program pembangunan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kepulauan Mentawai.

Dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, setiap kasus yang ada selalu ditangani dengan baik, koordinasi dengan Forkopimda dan muspika di kecamatan sangat baik begitu juga dengan peranan pokja P2TP2A sebagai perpanjangan tangan dan mitra pemerintah daerah melalui unit UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang telah terbentuk sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak sangat baik serta dalam upaya pencegahan dan penanganan kejadian tanggap dan melibatkan berbagai pihak.

Tabel 2.86
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase pemenuhan hak anak (persen)	100	100	100	100	100
Pencanangan kecamatan layak Anak (kec)	4 kec	4 kec	3 Kec	4 kec	5 Kec
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait (persen)	100	100	100	100	100
Persentase Kepala Keluarga perempuan yang sejahtera (persen)	9	7	7,4	8,2	NA
Indeks Pembangunan Gender	89,81	89,91	89,57	90,13	89.95
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (persen)	100	100	100	100	100
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	52	50	53,95	57,20	53.39
Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	42,93	42,17	72,50	80,0	80.01
Persentase PNS perempuan dibanding total PNS (persen)	51,25	52,37	53,95	52,87	53.33
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,11	0,12	0,13	0,14	0.2
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pada urusan wajib pangan berbagai indikator yang terlihat pada Tabel 2.34 mengambarkan perkembangan yang cukup baik dan mengalami peningkatan pencapaian dalam kurun waktu 2021-2025, begitu juga dengan pengawasan dan pembinaan pangan. Perkembangan capaian ketahanan pangan secara nasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah yang dilihat dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Indikator Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2021 nilai indeks berada pada angka 37,67, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 52,48. Pada tahun 2023 nilai indeks sedikit mengalami penurunan menjadi 50,91, namun kembali meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai angka 52 dan tetap berada pada nilai yang sama pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi ketahanan pangan mengalami perbaikan dibandingkan tahun awal pengukuran.

Masih rendahnya pencapaian indeks ketahanan pangan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam kaitan ketersediaan pangan utama sebagai konsumsi pangan lokal yang tersedia, nilai yang dicapai pada tahun 2021 dan 2022 berada pada angka 68. Selanjutnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 70 dan tetap berada pada angka yang sama pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 54,92. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, pada tahun 2025 ketersediaan pangan utama mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.87
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan pangan utama	68	68	70	70	54,92
lndeks Ketahanan Pangan	37,67	52,48	50,91	52	52
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	52,07	52,07	65,27	65,27	63
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	82	84	85	85	54,92

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Penurunan ketersedian pangan utama di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor bencana banjir dan kondisi cuaca yang tidak mendukung. Intensitas curah hujan yang tinggi dan berlangsung dalam periode yang cukup panjang pada tahun 2025 telah menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah wilayah sentra produksi pangan, yang terjadi pada 10 juni 2025 di Kecamatan Sipora Utara khususnya Desa Tuapejat, Sidomakmur,Goisooinan, Bukit Pamewa dan Kecamatan Sipora Selatan di Desa Saurenu, Matobe, Bosua dan Beireulou. Pada akhir Tahun 2025 banjir di tiga Kecamatan di Siberut Utara, Kecamatan Selatan dan Siberut Barat Daya. Dampak dari kejadian tersebut antara lain terendamnya lahan pertanian dan terganggunya aktivitas tanam dan panen masyarakat. Cuaca tidak mendukung yang menyebabkan pergeseran musim tanam, tingginya kelembapan udara, serta berkurangnya intensitas sinar matahari turut mempengaruhi produktivitas tanama pangan. Kondisi ini menyebabkan

pertumbuhan tanaman tidak optimal, meningkatnya serangan hama dan penyakit, serta menurunya hasil produksi secara keseluruhan.

Pada wilayah kabupaten kepulauan mentawai keterbatasan akses distribusi serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah semakin memperparah kondisi ketersediaan pangan ketika terjadi gangguan cuaca ekstrem. Distribusi pangan menjadi terhambat akibat gelombang tinggi dan cuaca buruk, sehingga pasokan tidak terpenuhi secara tepat waktu. Dengan demikian, kombinasi antara bencana banjir, perubahan pola cuaca, serta keterbatasan sistem distribusi menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan ketersediaan pangan pada tahun 2025. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan infrastruktur, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta penguatan sistem logistik pangan di wilayah kepulauan

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Legalisasi aset berupa tanah sangat penting bagi pemerintah khususnya masyarakat dalam menopang tumbuh kembangnya sosial ekonomi masyarakat. Sengketa pertanahan/ lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai selalu menjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Tanah hak ulayat (adat) dan sengketa tanah masyarakat menjadi persoalan khususnya menyangkut hak masyarakat miskin selalu dimediasi baik melalui pemerintahan desa, di kecamatan dan bahan tingkat kabupaten melalui koordinasi pemangku kepentingan agar hak-hak kepemilikan pertanahan masyarakat terjamin.

Tabel 2.88
Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Penanganan sengketa tanah yang dilakukan secara mediasi (persen)	100	100	100	100	100
Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	11,4	20,42	22,05	36,55	39,26
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	38	40	62,36	0	0
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0	0	0	0
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	1.200 ha	800 ha	800 ha	0	0
Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	0	0	0	0
Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	0	0	0

Evaluasi terhadap perkembangan indikator urusan pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2021–2025 menunjukkan bahwa kinerja pembangunan bidang pertanahan masih menghadapi sejumlah tantangan, meskipun terdapat beberapa capaian yang cukup baik.

Pada aspek penanganan sengketa tanah, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat optimal, dengan tingkat penyelesaian melalui mediasi yang konsisten mencapai 100 persen setiap tahun. Kondisi ini mencerminkan efektivitas upaya penyelesaian konflik pertanahan secara non-litigasi serta menunjukkan adanya kapasitas kelembagaan yang cukup baik dalam menjaga

stabilitas dan kepastian hukum di masyarakat. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dengan tetap memperkuat kualitas mediasi serta memastikan keberlanjutan penyelesaian sengketa yang berkeadilan.

Di sisi lain, persentase luas lahan bersertifikat menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2021–2025, dari 11,4 persen pada tahun 2021 menjadi 39,26 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya percepatan dalam pelaksanaan sertifikasi tanah, yang berkontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum atas kepemilikan lahan. Namun demikian, cakupan tersebut masih relatif rendah, sehingga pada tahun 2027 diperlukan upaya yang lebih intensif dan terintegrasi untuk memperluas legalisasi aset tanah masyarakat.

Indikator kesesuaian pemanfaatan tanah terhadap izin lokasi menunjukkan peningkatan hingga tahun 2023, namun mengalami penurunan signifikan menjadi 0 persen pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini mengindikasikan adanya potensi stagnasi dalam penerbitan izin lokasi, rendahnya aktivitas pemanfaatan lahan, atau belum optimalnya sistem pelaporan dan pengendalian. Oleh karena itu, pada RKPD Tahun 2027 perlu diarahkan pada penguatan pengawasan pemanfaatan ruang dan peningkatan sinkronisasi antara perizinan dan implementasi di lapangan.

Selanjutnya, indikator penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang tetap berada pada angka 0 persen sepanjang periode evaluasi menunjukkan bahwa penyediaan lahan untuk infrastruktur publik belum menjadi prioritas atau belum terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam RKPD Tahun 2027, mengingat ketersediaan lahan merupakan prasyarat utama dalam percepatan pembangunan fasilitas umum dan pelayanan dasar.

Ketersediaan lahan untuk penanaman modal juga menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 0 hektare pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini berpotensi menghambat peningkatan investasi daerah. Oleh karena itu, pada perencanaan tahun 2027 diperlukan langkah strategis untuk mengidentifikasi dan menyiapkan kembali lahan yang potensial dan sesuai dengan rencana tata ruang guna mendukung iklim investasi yang kondusif.

Selain itu, belum tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) serta tanah untuk masyarakat selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa program redistribusi tanah dan penyediaan akses lahan bagi masyarakat belum berjalan optimal. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya upaya pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Dalam RKPD Tahun 2027, perlu didorong kebijakan yang mendukung pelaksanaan reforma agraria secara lebih konkret dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan urusan pertanahan pada RKPD Tahun 2027 perlu difokuskan pada peningkatan legalisasi aset tanah, optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, penyediaan lahan untuk kepentingan umum dan investasi, serta penguatan program redistribusi tanah bagi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk persentase luas lahan yang telah memiliki sertifikat di Kepulauan Mentawai pada tahun 2025 baru mencapai 39,26 persen atau seluas 42.730,827412 Ha.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Perkembangan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama tahun 2021-2025 ditunjukkan pada Tabel 2.78 kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Mentawai semaksimal mungkin tetap dijaga dan dipastikan tetap pada kondisi awal/lestari. Luas kawasan yang mayoritas adalah kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestisasi yang akan

berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan/kawasan. Dalam kurun 5 tahun terakhir indeks kualitas lingkungan hidup perkembangannya mengalami perbaikan dari tahun 2021 dengan predikat baik meningkat hingga pada tahun 2025 pada predikat baik.

Begitu juga respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik.

Tabel 2.89
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Penetapan hak MHA	4	17	17	0	0
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota (persen)	7,38	14,35	26,47	13,05	6,94
Penanganan kasus lingkungan hidup (%)	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,24	83,08	83,17	80,01	81,24
Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota (%)	50	53,4	33,33	77,77	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman , Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Untuk penanganan dan pengelolaan sampah juga capaian setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan cakupan layanan persampahan dan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Namun, intervensi dalam pengelolaan sampah masih sebatas pada kawasan ibukota kabupaten (Kecamatan Sipora Utara/Tuapejat dan sekitarnya) menjadi indikasi masih rendahnya persentase penanganan sampah atau pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 13.05 persen pada tahun 2024 dan Mengalami penurunan sebesar 6,94 persen pada tahun 2025.

Urusan Lingkungan Hidup serta RPJMD strategi ekosistem berkualitas dan resiliensi bencana telah memuat perkembangan indikator lingkungan hidup secara umum, namun perlu memperdalam isu khas Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah kepulauan, pesisir dan pulau kecil. RPJMD menekankan pentingnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan kawasan hutan, pengelolaan sampah, Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan sanitasi berbasis lingkungan, perlindungan kawasan pesisir, serta pembangunan yang ramah lingkungan.

Ancaman degradasi pesisir, alih fungsi lahan, penebangan mangrove, pengambilan pasir/karang, dan kerusakan ekosistem pesisir merupakan tekanan utama lingkungan hidup di Kepulauan Mentawai. Sebagaimana diuraikan pada sub bab kebencanaan, kerusakan lingkungan akibat bencana tercatat cukup luas, antara lain 14.463,2 Ha akibat tsunami, 398,7 Ha akibat gelombang ekstrim, dan 594.098 Ha (kelas rendah-sedang) akibat kebakaran

hutan dan lahan, yang keseluruhannya berdampak langsung pada ekosistem pesisir dan pulau kecil.

Tabel 2.90
Komponen Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Isu Prioritas

No	Komponen/Isu	Uraian Kondisi dan Kebutuhan Analisis 2027
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Kualitas air permukaan dan air baku dipengaruhi sedimentasi dan pencemaran pasca-bencana hidrometeorologi
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Relatif baik namun berpotensi menurun akibat kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Ancaman alih fungsi lahan dan penebangan mangrove pada kawasan pesisir 33 desa rawan bencana
4	Persampahan (timbulan dan layanan)	Kebutuhan TPST/TPS3R untuk mengurangi pencemaran pesisir dan mendukung pariwisata berkelanjutan
5	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perlu penambahan RTH terintegrasi mitigasi bencana pada kawasan permukiman pesisir
6	Perlindungan mangrove dan pesisir	Rehabilitasi ekosistem mangrove sebagai green infrastructure peredam abrasi dan gelombang ekstrim
7	Pengendalian pencemaran	Pengawasan pengambilan pasir/karang dan pencemaran akibat aktivitas ekonomi pesisir

Sumber: RPJMD Bab III dan Renstra BPBD 2025-2029, diolah.

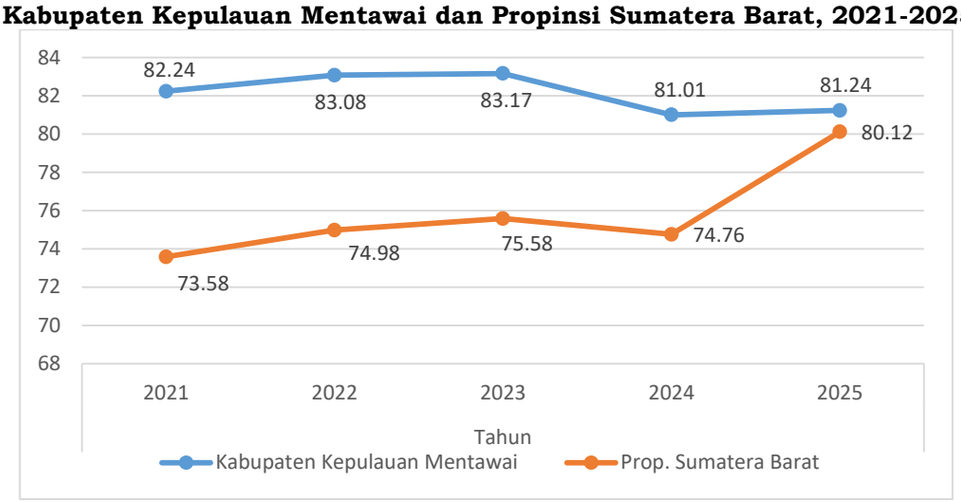
Pengelolaan lingkungan hidup tahun 2027 perlu dikaitkan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan, perlindungan kawasan pulau kecil, pembangunan rendah karbon, dan mitigasi bencana berbasis ekosistem (eco-based disaster risk reduction), termasuk pengintegrasian konsep green infrastructure dan nature-based solution ke dalam dokumen perencanaan, pembangunan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil, sebagaimana diarahkan dalam Renstra BPBD 2025-2029.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup dalam keadaan baik dapat dilihat dari kondisi lingkungan yang memungkinkan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya secara optimal. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk kualitas udara, air, tanah, dan interaksi sosial-ekonomi serta budaya dalam suatu wilayah. Dalam kurun 5 tahun terakhir indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai perkembangannya pada predikat baik. Begitu juga respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 82,24 pada tahun 2021 meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 83,08 dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi sebesar 83,17.Pada tahun 2024 IKLH di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan menjadi sebesar 81,01, namun

pada tahun 2025 capaian IKLH Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan menjadi sebesar 81,24.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Propinsi Sumatera Barat, 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

IKLH Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan yaitu dari 73,58 pada tahun 2021 menjadi 74,98 pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 75,58 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 74,46 meskipun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan, pada tahun 2025 IKLH prop. Sumatera Barat meningkat kembali menjadi 80,12. Aktivitas sosial ekonomi tentu sangat memengaruhi kualitas lingkungan di setiap daerah, terutama dengan pembangunan dan investasi fisik yang membutuhkan penanganan kawasan/lahan.

2. Proporsi Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Layanan pengumpulan sampah adalah proses pemindahan limbah padat dari tempat penggunaannya ke tempat pembuangan atau pengolahan. Sampah dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian diangkut ke tempat penampungan sementara (TPS), pengolahan sampah antara (SPA atau ITF), atau langsung ke tempat pemrosesan akhir (TPST).

Untuk penanganan dan pengelolaan sampah juga capaian setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan cakupan layanan persampahan dan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan.Namun, intervensi dalam pengelolaan sampah masih sebatas pada kawasan ibukota kabupaten (Kecamatan Sipora Utara/Tuapejat dan sekitarnya) menjadi indikasi masih rendahnya persentase penanganan sampah atau pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel. 2.91
Proporsi Timbunan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 – 2025

Keterangan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Timbunan Sampah Terolah	13,72	13,38	15,06	13,05	6,94

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan

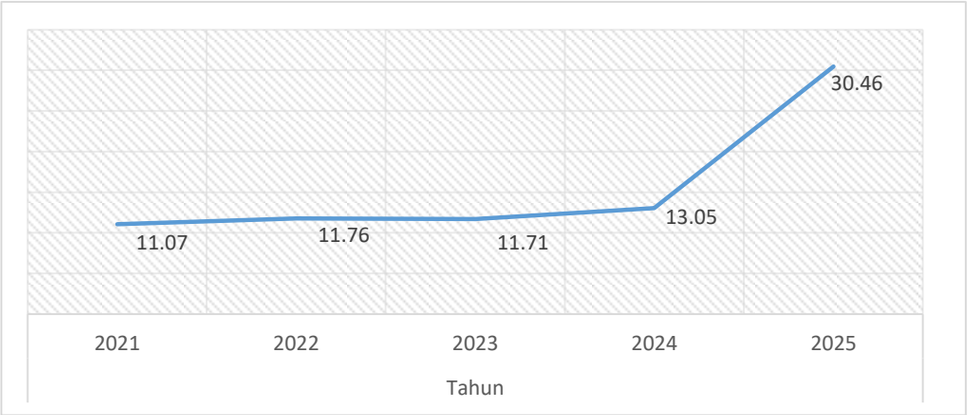
Perkembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2021-2025 menunjukkan hasil yang masih rendah, artinya

intervensi sampah masih pada pengangkutan sampah secara utuh dengan pengolahan yang relatif masih sedikit atau bersifat swadaya dari rumah tangga/masyarakat/atau pihak terkait.Pemerintah Daerah belum melakukan pengelolaan Timbunan sampah ataupun mendaur ulang sampah dikarenakan belum adanya TPA/TPST. Meskipun demikian, tetap dilakukan edukasi dan penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya seperti mengurangi pencemaran lingkungan, Melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk proporsi Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah masih dalam kategori sangat rendah yaitu pada tahun 2021 sebesar 13,72 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 13,38 persen, pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 1,68 poin menjadi sebesar 15,06 persen. Pada tahun 2024 proporsi Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan menjadi sebesar 13,05 persen dan mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi sebesar 6,94 persen.

3. Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengolahan Sampah

Layanan Penuh Pengumpulan Sampah merupakan sistem layanan yang menyediakan pengumpulan sampah secara teratur dari rumah tangga, dengan opsi pengolahan lebih lanjut seperti daur ulang atau pengomposan. Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tampak pada Gambar 2.13 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 11,07 persen lalu kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 11,76 persen, namun pada tahun 2023 sedikit penurunan menjadi sebesar 11,71 persen dan pada tahun 2024 peningkatan menjadi sebesar 13,05 persen. Pada Tahun 2025 mengalami peningkatan kembali menjadi 30,46 Pencapaian ini tergolong masih rendah melalui intervensi pemerintah, tentu ini menjadi problem dalam menyediakan layanan pengumpulan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dikarenakan belum tersedianya infrastruktur persampahan dan model pengelolaan persampahan yang komprehensif di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dampak yang terjadi dari rendahnya pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain banyak sampah, terutama plastik, berakhir di laut dan pantai, menyebabkan pencemaran yang berdampak pada biota kehidupan laut.

Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengolahan Sampah (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 -2025



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan

Ini merusak ekosistem pesisir dan mengancam kelangsungan hidup spesies laut di Kepulauan Mentawai. Pembuangan sampah secara sembarangan, terutama sampah organik dan berbahaya, dapat mencemari tanah dan sumber air, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat setempat. Pemandangan sampah yang menumpuk di tempat-tempat wisata dapat merusak citra Kepulauan Mentawai sebagai destinasi wisata alam yang bersih dan asri, yang pada akhirnya bisa mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang bagi penyakit, seperti diare, demam berdarah, dan infeksi kulit. Pembakaran sampah terbuka yang sering dilakukan juga dapat menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagikesehatan. Lingkungan yang tercemar oleh sampah dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat lokal, ekosistem laut didalamnya dan dampak pada estetika lingkungan, kebersihan, dan kenyamanan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data yang terlihat pada Tabel 2.40 menunjukkan berbagai indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2021-2025.

Tabel 2.92
Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (persen)	64,90	67,77	73,55	73,28	96,82
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	64,25	66,28	68,44	49,31	50,17
Persentase kepemilikan akte kelahiran (persen)	77,34	77,24	79,03	91,22	91,73
Persentase pasangan berakte nikah (persen)	49,79	42,08	44,15	62,63	64,51
Rasio kepemilikan KK	89,82	85,18	86,08	99,03	98,81
Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	49,79	42,08	55,56	46,15	64,28

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian indikator perkembangan kemajuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pada tabel 2.40 menunjukkan perkembangan yang baik. Dari sisi rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2025 telah mencapai 96,82 persen. Begitu juga dengan kepemilikan akte kelahiran telah mencapai 91,73 persen. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2025 telah mencapai 98,81 persen dan pasangan/keluarga yang telah memiliki akte nikah pada tahun 2025 telah mencapai 64,51 persen. Capaian ini tentu belum maksimal sehubungan dengan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat yang sangat membutuhkan kepemilikan KTP sebagai syarat menerima layanan pemerintah (sosial dan ekonomi) khususnya masyarakat miskin.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikatakan bahwa belum mengalami kemajuan yang cukup berarti hal ini

terlihat dari indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seperti terlihat dari Tabel 2.41 perkembangan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021-2025 dari sisi kinerja pembangunan masyarakat dan desa, indikator utama yang dapat dijadikan patokan pembangunannya adalah Indeks Desa Membangun (IDM), di mana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perbaikan capaian. Pada tahun 2021-2025 tidak ada lagi status desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan predikat desa sangat tertinggal.

Tabel 2.93
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021-2025

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	559	559	486	486	559
Jumlah LPM	43	43	43	43	43
PKK aktif	43	43	43	43	43
Posyandu aktif	180	283	286	286	279
IDM (Desa Mandiri)	3	3	3	3	3
IDM (Desa Maju)	5	9	10	10	9
IDM (Desa Berkembang)	22	20	22	24	22
IDM (Desa Tertinggal)	13	11	8	6	10
Persentase pengentasan desa tertinggal	27,78	15,38	27,27	25	-50
Persentase peningkatan status desa mandiri	50	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P2KB

Indeks Desa Membangun (IDM) diukur dengan menggunakan tiga indikator utama, yakni : ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan lingkungan. Perkembangan desa dari tahun 2021 - 2025 di Mentawai relatif mengalami peningkatan kearah yang lebih baik. Jumlah desa mandiri dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Namun memang sedikit disayangkan karena adanya peningkatan jumlah desa tertinggal pada tahun 2025, dari 6 desa tahun 2021 menjadi 9 desa di tahun 2025. Kemudian penurunan 1 desa maju dan 2 desa mandiri.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami peningkatan walau tidak signifikan, seperti terlihat dari Tabel 2.42. Untuk jumlah rata-rata anak per keluarga relatif stabil untuk setiap tahunnya hingga tahun 2025 rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 1,27 orang.

Tabel 2.94
Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	4	4	3	3	1,27
Rasio akseptor KB	58	62	67	43,14	51,55
Cakupan peserta KB aktif (persen)	58,40	58,44	58,63	58,46	51,99

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
TFR (Angka Kelahiran Total)	2,20	2,35	2,43	2,68	2,55
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/ mCPR)	21,27	24,15	24,56	51,6	58,6
Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	0,65	1,12	7,7	12,95	17,5

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P2 KB

Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Kepulauan Mentawai realtif stabil dalam periode 2021 – 2024. Namun pada tahun 2025 mengalami penurunan. Tahun 2021 capaiannya sebesar 58,40 persen dan pada tahun 2025 capaiannya turun menjadi sebesar 58,46 persen. Rasio akseptor keluarga KB cakupannya mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2021 dengan rasio sebesar 58,40 turun pada tahun 2025 dengan rasio akseptor KB menjadi 51,55. Untuk angka kelahiran total mengalami peningkatan dari 2,20 persen tahun 2021 meningkat pada tahun 2025 menjadi 2,55 persen.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang vital dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bercirikan kepulauan. Konektivitas antar pulau di Kepulauan Mentawai dan sebagai penghubung Kepulauan Mentawai dan Padang atau daerah lain di luar Mentawai urusan perhubungan mengambil bagian penting dalam menunjang dan memperlancar arus barang dan arus orang yang pergi dan menuju Kepulauan Mentawai.

Perkembangan capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat dari cakupan layanan transportasi yang melayani seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2021 cakupan layanan transportasi sebesar 83 persen dan capaian ini meningkat di tahun 2025 menjadi 85 persen.

Tabel 2.95
Perkembangan Indikator Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan layanan transportasi (persen)	83	85	88	83	85
Persentase armada angkutan laik jalan/ layar (persen)	80	80	82	85	82
Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (orang)	145.206	168.742	182.346	224.049	253.291
Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (ton)	52.669	65.163	75.003	118.329,88	50.988,41
Rasio konektivitas Kota	52,19	52,64	53,04	54,68	11,63
V/C Ratio di jalan Kota	0,18	0,18	0,18	0,2	0,20

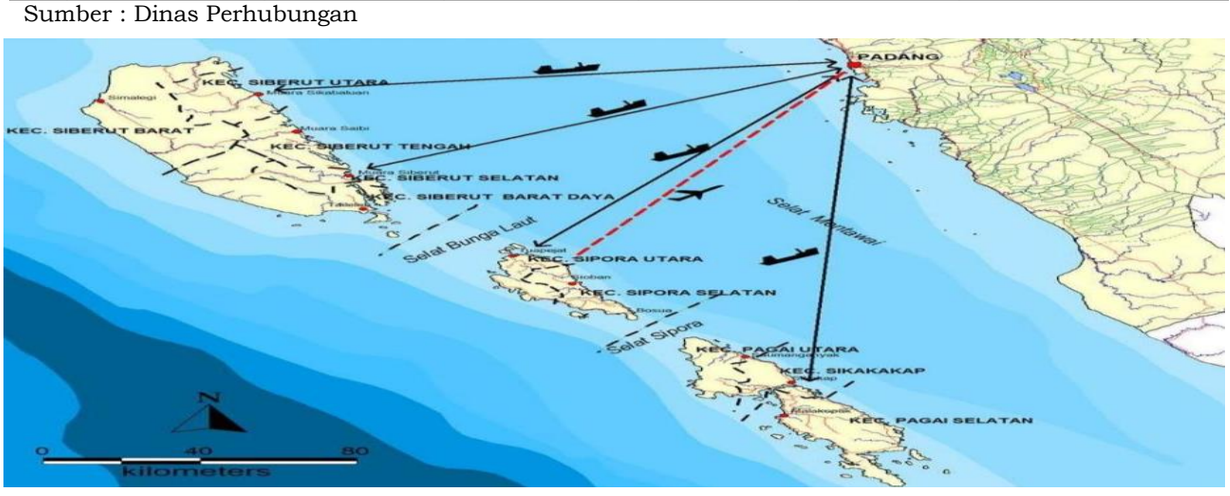
Sumber : Dinas Perhubungan

Begitu juga dengan kondisi sarana dan prasarana perhubungan terutama pelabuhan laut sebanyak 7 buah dan pelabuhan penyeberangan sebanyak 3 buah dengan kondisi baik dan masih beroperasi hingga sekarang. Sebagai bagian dari sistem konektivitas daerah, selain ketersediaan jalan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah rencana pembangunan pelabuhan menjadi kebutuhan untuk menjawab konektivitas total antar wilayah/antar pulau dan konektivitas regional antar kabupaten dan Provinsi. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional bahwa rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut/penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 9 pelabuhan yaitu di Pulau Siberut antara lain Pelabuhan Sikabaluan, Subelen, Mabukkuk, Sirilogui. Pulau Sipora antara lain Pelabuhan Simaoumbuk, Sao, Sagitsi Pulau Pagai Utara Selatan antara lain Pelabuhan Polaga, Sinaka.

Tabel 2.96
Perkembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025

No	Nama Pelabuhan	Kepemilikan Aset	Pengelola	Status	Kondisi	Ket
1	Pelabuhan Muara Siberut	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
2	Pelabuhan Sikakap	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
3	Pelabuhan Siuban	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
4	Pelabuhan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
5	Pelabuhan Pasapuat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
6	Pelabuhan Sikabaluan	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
7	Pelabuhan Labuhan Bajau	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
8	Pelabuhan Penyeberangan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan
9	Pelabuhan Penyeberangan Siberut	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan
10	Pelabuhan Penyeberangan Sikakap	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan

Sumber : Dinas Perhubungan



10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah didukung oleh sistem teknologi informasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai website untuk publikasi dan komunikasi proses dan hasil-hasil pembangunan. Perkembangan sistem komunikasi dan informasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel 2.45 berikut :

Tabel 2.97
Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan Layanan Telekomunikasi	84,5	85	86	88	88
Nilai SPBE	0	1,23	1,53	2,46	2.60
OPD yang terhubung oleh akses internet yang disediakan Diskominfo (persen)	63,8	69,4	69,4	75	80
Layanan publik yang dilayani secara Online (persen)	5	5,2	5,2	10	54.55
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	70	70	70	72	69.71

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mendukung pengelolaan website telah menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (*Access Service to Internet*). Perkembangan pelaksanaan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai perlahan sudah mengalami perkembangan yang signifikan, dilihat dari indeks SPBE bahwa pada tahun 2025 untuk SPBE di Kepulauan Mentawai sebesar 2,60 dibanding Tahun 2024 sebesar 2,46 sudah mengalami perkembangan yang lebih meningkat. Infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akses data dan komunikasi yang masih terbatas.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e- government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik secara terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya.

Tabel 2.98
Perkembangan Nilai SPBE
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	1,23	1,53	2,46	Belum Rilis

Sumber : Kementerian PAN-RB RI

Begitu juga peran SPBE dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat untukberpartisipasi aktif dalam

proses pengambilan keputusan pemerintah. Masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan kritik melalui platform online yang disediakan oleh pemerintah. SPBE juga dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang lebih personal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan pelaksanaan e-goverment di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikategorikan belum mengalami perkembangan yang signifikan, jika dilihat dari indeks SPBE bahwa pada tahun 2021 untuk SPBE di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada nilai oleh Kementerian PANRB dan sedangkan tahun 2023 nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,53 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dari tahun 2022 di mana nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,23. Namun, pada tahun 2024 nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat menjadi 2,46 namun masih pada kategori rendah. Untuk Tahun 2025 nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai belum Rilis.

Merujuk pada Lampiran I Perpres RPJMN 2025–2029 dan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/66/PD.02/2025 terkait penerapan kebijakan pemerintah digital sebagai penguatan kebijakan SPBE di mana penerapan Indeks Pemerintahan Digital dengan indikator baru akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Upaya transformasi digital menjadi landasan dan fondasi utama dalam menggerakkan digitalisasi pada setiap sendi kehidupan masyarakat terutama dalam pengelolaan pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Perkembangan indikator urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk persentase koperasi aktif secara tren dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 20 persen tahun 2021 menjadi 65 persen tahun 2025, indikator pelayanan koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah, seperti terlihat pada Tabel 2.40. Untuk jumlah usaha mikro dan kecil juga mengalami tren peningkatan jumlah usaha. Tabel 2.43 menunjukkan untuk usaha mikro sebanyak 2.508 usaha pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2025 menjadi sebanyak 3.586 usaha. Dalam upaya menciptakan wirausaha baru (enterprenuer), program ke depan yang disusun adalah pelatihan/ peningkatan kapasitas keterampilan keahlian agar memiliki skill untuk dapat terjun ke dunia usaha, begitu juga dengan membangun relasi melalui perjanjian kerja sama dengan dunia usaha (MoU) sehingga di hulunya pembangunan sumber daya tenaga kerja yang terampil (skill) didukung dengan di hilirnya adalah terserapnya tenaga kerja sebagai modal awal untuk menjadi wirausaha baru.

Tabel 2.99
Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase koperasi aktif	20	20	89	89	65
2	Jumlah BPR/BPRS	3	3	2	2	2
3	Usaha Mikro	2.508	3.180	3.180	3.441	3,586
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (persen)	3,50	3,50	3,80	3,50	4,30
5	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha (persen)	6,00	7,00	7,50	8,21	8,57

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Terkait Persentase Koperasi Aktif Tahun 2025 menurun menjadi 65 dibandingkan Tahun 2023 dan Tahun 2024 sama-sama berjumlah 89 ini

dikarenakan sebanyak 24 Persen yang ada dari Jumlah Koperasi yang aktif setelah dilakukan evaluasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 tahun berturut-turut, sehingga sudah melanggar aturan dalam menjalani perkoperasian.

Merupakan program prioritas pemerintah untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa lewat koperasi. Diluncurkan Presiden Prabowo Subianto dan dikoordinasikan Kementerian Koperasi dan Kementerian Bidang Pangan. Dasar Hukum pembentukan Koperasi Merah Putih :

Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2025

Target dan Timeline Koperasi Merah Putih yaitu target pemerintah terbentuk koperasi sebanyak 70.000 – 80.000 di seluruh Indonesia, yang pembentukannya ditargetkan selesai tanggal 30 Juni 2025 dan sudah terdaftar badan hukumnya, peluncuran serentak di tanggal 12 Juli 2025 bertepatan *Hari Koperasi Nasional* dan mulai beroperasi di tanggal 28 Oktober 2025 yang lalu.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025

Mengatur soal pendanaan dan pengawasan Koperasi Merah Putih

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Koperasi UKM :

- PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi.

Arahan Presiden dan Siaran Pers Kemenko (sambutan Presiden di IEO 2026, 13 Februari 2026 Menegaskan Koperasi Merah Putih sebagai instumen strategis perkuat rantai pasok nasional)

Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk atau dikembangkan diseluruh desa/ kelurahan di Indonesia sebagai instrument strategis memperkuat rantai pasok, daya saing ekonomi lokal, dan efesiensi ekonomi nasional.

Tujuan Utama didirikan Koperasi Merah Putih yaitu :

a. Ketahanan pangan nasional (jadi penampung dan pengelola hasil penen warga);
b. Pengentasan kemiskinan (bisa menciptakan lapangan kerja dan usaha bersama):
c. Sinergi pusat dengan daerah (untuk membangun ekonomi kerakyatan menuju Indonesia emas 2045).

Jenis usaha Koperasi Merah Putih yaitu gerai sembako, gudang dan cold storage, simpan pinjam, apotek dan klinik desa, logistik desa, took saprotan dan sebagainya yang bisa menjadi pendapatan bagi desa.

Koperasi Merah Putih ini bukan sekedar program, tapi gerakan nasional supaya desa mandiri secara ekonomi. Pemerintah manargetkan sebanyak 84.276 desa/kelurahan di seluruh Indonesia punya koperasinya sendiri.

Koperasi Desa Merah Putih di Kepulauan Mentawai dari 43 desa yang ada baru 1 desa yang sudah memenuhi syarat sah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yaitu desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara, dan 42 desa yang lainnya masih dalam proses pemenuhan kelengkapan persyaratan sah yang ditentukan oleh Kementerian Koperasi melalui Aplikasi SIMKOPDES Mobile yang diverifikasi oleh Dinas Koperasi Provinsi sampai Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Tabel 2.100
Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi Proyek Investasi (PMDN & PMA)	16	44	154	540	155
Realisasi Investasi PMDN (juta Rp)	6.892,80	29.375,30	1.667,70	7.910,1	34.660
Realisasi Investasi PMA (000 US$)	1.158	114,50	4.297	5.373,63	123,415

Sumber: Dinas PMPTSP

Perkembangan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan yaitu dari Rp.6.892.080.000 tahun 2021 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2025 dengan realisasi PMDN sebesar Rp34.660.000.000. Realisasi investasi PMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 realisasi investasi PMA sebesar 1.158 US$ dan relatif meningkat setiap tahunnya, hingga tahun 2025 realisasi PMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 123.415 US$.

Angka ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi investasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan sumber daya alam yang melimpah dan proses perijinan yang sangat mudah dan cepat. Untuk realisasi proyek baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 16 proyek, pada tahun 2022 sebesar 44 proyek dan pada tahun 2023 sebesar 154 proyek dan pada tahun 2024 sebanyak 540 proyek. Dan di tahun 2025 sebanyak 155 proyek.

Penanaman modal di suatu daerah akan semakin subur tentunya tak lepas dari beberapa faktor :

1. Infrastruktur yang perlu diperkuat seperti : Jalan dan transportasi, pelabuhan dan bandara, listrik dan air, internet dan jaringan telekomunikasi.
2. Kemudahan perizinan. Proses perizinan yang cepat, transparan dan tidak berbelit sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor
3. Kepastian Hukum dan Regulasi. Investor membutuhkan aturan yang jelas dan stabil seperti : kepastian hak tanah, regulasi usaha yang konsisten, dan perlindungan terhadap investasi

Promosi dan Branding Daerah. Potensi daerah harus dipromosikan secara aktif di forum-forum investasi, dan pameran bisnis, sekaligus kerjasama dengan investor domestik dan luar negeri.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian indikator urusan kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada perkembangan jumlah organisasi yang masih bertahan. Pemuda yang diasosiasikan dengan paham idealisme yang dapat melihat setiap perkembangan dan isu daerah secara jernih tentunya akan mampu memberikan pemikiran dan dukungan yang utuh tanpa ada unsur kepentingan. Untuk urusan wajib kepemudaan dan olahraga dari data pada Tabel 2.48, secara umum dapat memberikan gambaran bahwa indikator menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dan terus meningkat selama periode 2021-2025.

Tabel 2.101
Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah organisasi pemuda	10	10	14	14	14
Jumlah organisasi olahraga	12	12	16	16	32
Jumlah kegiatan kepemudaan	10	10	8	8	8
Jumlah kegiatan olahraga	5	5	12	10	10
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	20	20	24	24	24
Lapangan olahraga	150	150	150	150	150
Pertumbuhan wirausaha (enterprenuer)	1,183	1,183	0.93	0,93	0,93
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	15	15	15,3	15,3	15,3
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	28	28	30	32,5	32,5

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.48 menunjukkan perkembangan jumlah organisasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan dari sisi kuantitas. Pada tahun 2021 jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 10 organisasi dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2025 jumlah organisasi kepemudaan meningkat menjadi sebanyak 14 organisasi. Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan memberikan sinyal dan manfaat di suatu daerah yakni :

1. Meningkatnya partisipasi pemuda
2. Pengembangan kepemimpinan dan keterampilan
3. Mendorong inovasi dan kreativitas
4. Memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial
5. Mendukung pembang.unan daerah
6. Menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan

Begitu juga dilihat dari kapasitas ekonomi kepemudaan yang dilihat dari pertumbuhan wirausaha mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2021 pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,183 persen dan mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi sebesar 0,93 persen.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan wajib statistik berkenaan dengan penyediaan data yang diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan, melihat perkembangan pembangunan dan dihilirnya sebagai bahan evaluasi untuk memberikan sebuah informasi analisis pembangunan. Penyelenggaraan urusan statistik menjadi bagian penting dalam penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perkembangan kinerja urusan statistik erat kaitannya dengan ketersediaan data dan informasi yang digunakan oleh setiap pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah melalui perangkat daerah.

Tabel 2.102
Perkembangan Indikator Statistik
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Buku ”Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	1	1	1	1

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Dalam Angka”					
2	Buku ”PDRB kabupaten”	2	2	2	2	2
3	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah (persen)	75	76,2	78,15	79,17	79.30
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	61,11	69,44	71,4	72,2	72,10
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	50,56	58,33	60,5	72,2	76,2

Sumber : BPS dan Bappeda

Selama periode 2021-2025 secara rutin telah diterbitkan buku Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai dan berbagai dokumen atau buku statistik dasar lainnya yang secara resmi dirilis melalui Badan Pusat Statistik (BPS) seperti dilihatkan pada Tabel 2.49 Data statistik ini baik statistik dasar maupun statistik sektoral yang berasal dari perangkat daerah tentunya menjadi pedoman dalam merumuskan dan menganalisis sebuah perkembangan indikator pembangunan daerah. Penyusunan buku Kepulauan Mentawai Dalam Angka (KKMDA) selalu diterbitkan setiap tahunnya oleh BPS Kepulauan Mentawai, begitu juga dengan dokumen lainnya seperti dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan pengeluaran dan lapangan usaha. Untuk data statistik sektoral yang dihasilkan oleh instansi atau perangkat daerah dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan khususnya dalam merumuskan indikator kinerja pemerintah daerah sehingga nantinya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan penerapan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan. Integrasi sistem informasi pemerintahan masih parsial sehingga perlu dilakukan kesepahaman sistem yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan keamanan dan perlindungan data yang terjamin. Seluruh sistem informasi pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, layanan publik harus memenuhi kaidah-kaidah tingkat keamanan dengan menyelenggarakan keamanan persandian sehingga risiko kerusakan sistem, data hilang, *hack* dapat dicegah dan ditangkal.

Urusan persandian yang telah dikukuhkan ke dalam susunan struktur organisasi perangkat daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika belum memadai untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengamanan informasi pemerintah daerah, terutama dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang secara keahlian (sertifikasi) belum ada, sehingga data terkait tingkat keamanan informasi pemerintah belum tersedia atau belum dapat dihitung/diukur.

Tabel 2.103
Perkembangan Indikator Urusan Persandian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional yang sudah masuk kedalam agenda pariwisata nasional dalam Pesona Indonesia. Selain itu dalam kebijakannya, telah disusun pokok-pokok pikiran kebudayaan pada tahun 2020 serta telah disertifikasi 4 tenaga tim ahli cagar budaya (TACB) untuk memfasilitasi dalam penilaian warisan budaya benda yang ada di Kepulauan Mentawai. Pembangunan kebudayaan yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dengan melihat dari perkembangan periode waktu 2021-2025, penyelenggaraan festival seni dan budaya, benda situs budaya yang dilestarikan (perkembangan indikator kebudayaan) di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat seperti terlihat pada Tabel 2.103

Tabel 2.104
Perkembangan Indikator Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	0	1	3	1	1
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	3	2	10
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	13	13

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan objek kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah ditetapkan sampai dengan saat ini telah mencapai 13 warisan budaya. Penetapan ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain warisan budaya yang ditetapkan adalah Tato (2014), Sikerei (2019), Uma (2020), Kirekat dan Pasikut Abag (2022), Tahun 2023 antara lain Mone, Pangurei, Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot, Kabid (2024).

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.

Kinerja urusan wajib perpustakaan selama periode 2021-2025 diperlihatkan pada Tabel 2.52 Perkembangan indikator jumlah pengunjung memberi bukti bahwa minat masyarakat untuk memanfaatkan pustaka daerah semakin membaik terutama dalam meningkatkan minat literasi dan numerasi masyarakat. Jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya rata-rata mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 jumlah pengunjung perpustakaan itu sebanyak 9.842 pengunjung. Tahun 2025 meningkat menjadi 15.659 pengunjung.

Tabel 2.105
Perkembangan Indikator Perpustakaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah perpustakaan	82	92	95	98	128
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	9.842	12.445	13.400	14.998	15.659
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	21.044	32.733	20.317	21.511	23.000
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11	63,62	45,67	57,59	11,57
5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (persen)	15	43,87	60,80	68,18	63,37

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2025 dengan nilai indeks 11,57 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 11. Untuk tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2025 sebesar 63,57 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan nilai sebesar 60,80.

Upaya untuk meningkatkan literasi dan minat baca di Kepulauan Mentawai seperti perlombaan menulis, bercerita, pidato, cerdas cermat antar jenjang sekolah begitu juga dilakukan program pustaka keliling untuk mempermudah jangkauan anak-anak sekolah/ peserta didik dan juga masyarakat akan layanan perpustakaan seperti buku, buletin dan bahan pustaka lainnya.

Gambar 2.50
Layanan Perpustakaan untuk Masyarakat dan Anak Sekolah



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja urusan wajib kearsipan dapat diukur dari pembinaan tata kelola arsip secara baku, persentase kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan dan indikator lainnya, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.53. Perkembangan pembangunan kearsipan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikatakan belum berkembang secara signifikan. Selain dari masih terbatasnya tenaga atau SDM kearsipan yang secara fungsional mengelola dan menata arsip juga masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menata arsip yang baik dan benar. Sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan dan layanan arsip setiap perangkat daerah dan pemerintah daerah tentunya urusan kearsipan sudah mulai menjadi bagian penting yang harus diintervensi sehingga pengelolaan kearsipan daerah semakin lebih baik.

Tabel 2.106
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	5,5	5,56	3,5	3,93	4
2	Persentase Kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan	1,5	1,17	1,2	1,3	1,5
3	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	25	33	35	39,3	74,23
4	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	5	6,5	7	4	4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Selain urusan wajib, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain meliputi beberapa bidang, yaitu (1) Kelautan dan Perikanan (2) Pariwisata (3) Pertanian (4) Energi dan Sumber Daya Mineral (6) Perdagangan. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah kepulauan yang ditutupi oleh sepanjang garis pantai 1.402,66 km tentunya Kabupaten Kepulauan Mentawai dianugerahi kekayaan laut yang luar biasa. Pengembangan produksi perikanan tangkap memiliki prospek yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan potensi kelautan sebesar 1.229.950 ton ikan, namun yang dikelola sebesar 11.869 ton atau sekitar 0,96 persen. Potensi ini memberikan gambaran nyata terhadap harapan bagi nelayan untuk meningkatkan ekonomi mulai dari peningkatan kapasitas nelayan, sarana dan prasarana, budi daya perikanan, pengolahan bahkan pada pemasaran produk perikanan.

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap sebanyak 8.694,5 ton dan mengalami peningkatan setiap tahun hingga pada tahun 2025 produksi perikanan tangkap sebesar 12.294 ton.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya mengalami tren peningkatan produksi dari tahun ke tahun. Sebaliknya, pada produksi olahan ikan terjadi fluktuasi yang ditandai dengan peningkatan hingga tahun 2023, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pada sektor pengolahan hasil perikanan agar nilai tambah dari produk perikanan dapat terus meningkat.

Tabel 2.107
Produksi Perikanan Tangkap dan Budi Daya
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Jumlah Produksi	2021	2022	2023	2024	2025
1	Perikanan Tangkap (ton)	8.694,5	10.354	10.800	11.869	12.294
2	Perikanan budi daya (ton)	308,14	320,6	328,65	331,1	314,71
3	Produksi Olahan Ikan (kg)	73.070	81.070	99.730	77.860	69,08

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jika dilihat dikonversikan ke dalam penghasilan para nelayan maka penghasilan yang didapatkan masing-masing nelayan adalah Rp. 51.707.604,-/tahun atau sekitar Rp.4,3 juta/bulan. Untuk perikanan budi daya khususnya budidaya wilayah pesisir/ terumbu karang dengan luasan lebih dari 17.636,72 ha. Potensi budi daya kawasan pesisir terumbu karang seperti kerapu, lobster dan kepiting bakau sangat menjanjikan dengan pasar kebutuhan domestik dan juga pasar nasional dan luar negeri dengan produksi rata-rata pertahun sebesar 58 ton.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat potensial untuk mengembangkan sektor jasa melalui pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai *core sector* dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa lainnya bahkan sektor pertanian dan industri. Pengembangan sektor ini juga sangat potensial untuk membangun ekonomi kreatif baik itu bagi ekonomi mikro juga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal. Kabupaten Kepulauan Mentawai dikenal akan potensi pariwisatanya, kabupaten ini memiliki pelbagai kawasan objek wisata yang sudah dikenal hingga penjuru dunia. Perkembangan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trennya menunjukkan perkembangan yang positif kecuali pada tahun 2021 yang mengalami kontraksi dikarenakan oleh dampak pandemi COVID-19 yang tentunya membatasi aktivitas masyarakat dan juga larangan untuk melakukan even atau kegiatan yang memicu berkumpulnya masyarakat/orang. Banyaknya jenis objek wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dalam Tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.108
Perkembangan Indikator Pariwisata
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara (orang)	3.807	9.318	9.815	8.488	10.177
Jumlah Kunjungan Wisata Domestik (orang)	31.144	32.979	54.588	98.433	55.840
Lama Kunjungan (Lama tinggal)	±5 hari	±5 hari	±5 hari	±3 hari	14± hari
Penerimaan Retribusi Daerah	4 M	6 M	7,5 M	9,91 M	14.382 M
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	10	11	11,5	12,3	10,52
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	6,70	5,89	65,52	80,32	59,63

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat hunian akomodasi	82,43	85,86	86,02	86,54	37,94
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,81	0,84	0,87	0,89	1
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,2	6,04	15,69	17,17	19,81

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 3.807 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 31.144 orang dan meningkat hingga tahun 2024 sebesar 98.433 orang sedangkan wisatawan mancanegara sebanyak 8.488 orang. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan kunjungan wisatawan domestik sebanyak 55.840 orang tetapi kunjungan wisatawan mancanegara naik menjadi 10.177 orang. Penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata memang belum maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata sebesar 15,69 persen setiap tahunnya (kondisi normal), tentu strategi pengembangan pariwisata dan program pemasaran yang tepat menjadi hal penting harus diperhatikan dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Besar harapannya melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengatur besaran tarif retribusi olahraga rekreasi (*surfing*) tentunya memberikan dampak pada peningkatan kualitas sarana dan fasilitas kepariwisataan dan tentunya menambah alokasi Pendapatan Asli Daerah. Rencana aksi pengembangan daerah desa wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet adalah rencana daerah dalam pengembangan desa wisata untuk periode lima tahun. Penetapan kawasan desa wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet dapat ditentukan atau dikelompokkan berdasarkan jenis potensi pariwisata yang dimiliki. Pengembangan kawasan desa wisata bukan hanya dengan menetapkan lokasi atau daerah mana saja yang menjadi kawasan strategis, namun perlu juga memperhatikan tema pengembangan, ketersediaan dana, perancangan lokasi pengkajian kelayakan dan peluang kerja sama antar pihak. Orientasi pembangunan tahun 2027 khususnya di sektor kepariwisataan, Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengembangkan konsep “one village one event”. Dimana daerah-daerah yang memiliki potensi keunggulan akan didorong untuk membuat even atau kegiatan yang menjadi ciri khas masing-masing desa.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Hasil pertanian dan perkebunan menjadi andalan dalam perekonomian masyarakat di Kepulauan Mentawai. Dari data BPS didapatkan bahwa dalam 5 tahun terakhir persentase kontribusi sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah lebih dari 48 persen. Begitu juga isu strategis dalam pengembangan sektor pertanian yang tidak sekadar menjual *raw material* tapi harus mampu memberikan nilai tambah terhadap komoditas pertanian, sehingga mampu menyejahterakan para petani. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan lokal (ketahanan pangan), alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman/perkantoran dan alih fungsi lahan untuk komoditas pertanian lainnya (tidak konsisten) menjadi isu penting dalam memengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Tabel 2.56 menunjukkan perkembangan produksi tanaman pertanian, perkebunan dan perkembangan ternak yang dibudidayakan oleh masyarakat. Untuk perkembangan produksi tanaman pertanian/ perkebunan yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti

pisang, kelapa, sagu cenderung mengalami penurunan produksi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.109
Produksi Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Jumlah Produksi	2021	2022	2023	2024	2025
1	Keladi (kwintal)	13.260	8.550	7.830	8.496	873,18
2	Ubi Kayu (kwintal)	1.150	3.750	1.844	2.261	1.000
3	Ubi Jalar (kwintal)	2.630	2.910	2.646	2.569	2.000
4	Pisang (kwintal)	139.873	40.652	42.620	39.934	140,4
5	Padi (ton)	940,98	1.387	1.833	1.675	1.087,25
6	Durian (kwintal)	117.211	50.085	22.869	12.068	12.000
7	Kelapa (ton)	14.053	16.100	11.228	7.831	8.670,95
8	Cengkeh (ton)	143,65	91,15	146,92	211,44	0
9	Cocoa (ton)	131,24	83,53	36,32	30,43	19,73
10	Sagu (ton)	624,31	692,56	665,57	652,53	613,01
11	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	2,47	2,5	2,5	2,5	2,7
12	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	85	85	85	90	90
13	Babi (ekor) --- produksi	42.510	44.081	44.991	46.353	3.645
14	Babi (kg) --- pemotongan	391.560	536.322	543.212	415.474	5.068
15	Ayam Pedaging (kg) --- pemotongan	82.440	84.101	26.884	59.031	25.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pada tahun 2021 produksi komoditi pisang sebesar 139.873 kwintal dan mengalami penurunan hingga tahun 2025 produksi komoditi pisang sebesar 140,4 kwintal, komoditi kelapa pada tahun 2021 sebanyak 14.053 ton mengalami penurunan produksi hingga menjadi 8.670,95 ton pada tahun 2025. Begitu juga dengan komoditi sagu juga mengalami fluktuasi produksi yaitu pada tahun 2021 produksinya 624,31 ton produksinya hingga tahun 2025 produksi komoditinya menjadi 613,01 ton. Beberapa hal yang menjadi indikasi penurunan komoditas unggulan daerah ini antara lain pembudidayaan yang belum dilakukan, peremajaan dan alih fungsi lahan menjadi areal perumahan atau pertanian komoditas lainnya.

Produksi komoditas perkebunan cengkeh pada tahun 2025 di Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebesar nol (0). Kondisi ini bukan disebabkan oleh penurunan kinerja sektor pertanian, melainkan karena siklus produksi tanaman cengkeh yang bersifat musiman dan belum memasuki periode panen pada tahun berjalan. Tanaman cengkeh umumnya memiliki pola panen

tahunan hingga dua tahunan, yang sangat dipengaruhi oleh faktor umur tanaman, curah hujan, serta kondisi iklim setempat.

Selain itu, sebagian besar tanaman cengkeh di wilayah ini berada pada fase vegetatif dan pembungaan, sehingga belum menghasilkan buah yang siap dipanen. Dengan demikian, tidak adanya produksi pada tahun 2025 merupakan kondisi yang wajar dalam siklus budidaya cengkeh. Pemerintah daerah tetap mendorong upaya pemeliharaan tanaman dan perbaikan tata kelola kebun guna memastikan peningkatan produksi pada periode panen berikutnya.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 rata-rata 14,05 persen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan mulai di tahun 2021-2025. Capaian ini tergolong sangat kecil, dikarenakan belum maksimalnya pengembangan sektor perdagangan terutama pusat-pusat perdagangan seperti pasar yang berkembang. Di sisi lain sektor perdagangan yang didorong yang tumbuh dari tumbuh kembangnya usaha perdagangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dalam legalisasi sektor usaha perdagangan.

Tabel 2.110
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,72	13,43	13,72	13,96	14,05
2	Jumlah Koperasi	83	85	89	89	135
3	Jumlah Perdagangan (Pasar, Toko, Swalayan)	880	343	1.412	1.444	1,482
4	Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan	6	6	6	10	12
5	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	1,07	1,60	1,80	1,77	1, 89
6	Persentase kinerja realisasi pupuk	0,42	0,35	0,4	0,6	0,7
7	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0,4	0,2	0,2	0,4	0,5

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama 5 tahun terakhir masih sangat konstan diangka 2-2,5 persen terhadap PDRB belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Kondisi ini memang sangat berbanding terbalik pada kontribusi sektor *raw material*/primer dengan kontribusi dengan rata-rata 48 persen setiap

tahunnya, yang seharusnya sudah mulai reformasi struktur ekonomi ke arah sektor industri/ pengolahan

Tabel 2.111
Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2,57	2,48	2,45	2,48	2,45
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	1,25	0,031	1	3	3
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	0,8	1	1	1
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0,02	0,04	0,06	0.06
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0,6825	0,2	0,4	0,3
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan kawasan pedesaan terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, daerah strategis cepat tumbuh, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir. Perkembangan transmigrasi di Kepulauan Mentawai telah menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini dapat dilihat perkembangan satuan permukiman transmigrasi yang telah menyatu menjadi bagian pemerintahan desa seperti pada Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) 1 termasuk desa Desa Sipora Jaya, Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) 2 termasuk pada Desa Sidomakmur dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) 3 termasuk pada Desa Bukit Pamewa.

Tabel 2.112
Perkembangan Indikator Urusan Transmigrasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) yang difasilitasi pembangunannya.	3	3	3	3	3
Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) yang difasilitasi pembinaan.	3	3	3	3	3

2.1.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Penunjang Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner dan implementatif. Kurun waktu hingga tahun 2025, perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin baik. Hal ini terlihat dari pencapaian beberapa penghargaan yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak tahun 2018, antara lain:

1. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2018.
2. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2019.
3. Perencanaan Terbaik III se-Sumatera Barat Tahun 2019.
4. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2020.
5. Perencanaan Terbaik Harapan III se-Sumatera Barat Tahun 2020.
6. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2021.
7. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2022.
8. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2023.
9. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2024
10. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2025
11. Perencanaan Terbaik Harapan III se-Sumatera Barat Tahun 2021.

Capaian kinerja Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan telah berjalan cukup baik dan konsisten. Hal ini terlihat dari Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memperoleh predikat B secara berkelanjutan sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025. Konsistensi tersebut mencerminkan bahwa penerapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara cukup efektif. Selain itu, capaian di bidang perencanaan pembangunan juga ditunjukkan melalui penghargaan Perencanaan Terbaik III se-Sumatera Barat pada Tahun 2019 serta Perencanaan Terbaik Harapan III pada Tahun 2020 dan 2021, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap kualitas dokumen dan proses perencanaan pembangunan daerah. Meskipun

demikian, capaian predikat SAKIP yang masih berada pada level B menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kualitas tata kelola kinerja, terutama dalam memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Begitu juga dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024, dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomot 4 Tahun 2025, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya telah disusun dan batas waktu penetapannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Unsur Penunjang Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Capaian target indikator kinerja penunjang pada urusan keuangan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. APBD merupakan instrumen fiskal di daerah yang digunakan dalam membiayai membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pencapaian kinerja penyelenggaraan keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah pada pencapaian tertinggi yaitu dengan opini keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperoleh pertama kali sejak kabupaten berdiri yaitu tahun 2019. Namun, pancapaian ini mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 untuk pengelolaan keuangan tahun 2021 dengan opini keuangan dengan predikat WDP dan pada tahun 2022-2024 opini pengelolaan keuangan daerah Kembali mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tabel 2.113
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Opini Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	Belum Keluar
2	Realisasi PAD (persen)	69,78	112,89	83,26	83,37	Masih disusun/dihitung terkait unaudited nya

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Pada tahun 2025, capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah belum dapat dianalisis secara menyeluruh karena beberapa indikator utama masih dalam proses penyelesaian. Opini atas laporan keuangan daerah masih menunggu hasil pemeriksaan sehingga belum dapat dipastikan apakah pemerintah daerah mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana yang telah dicapai secara konsisten sejak tahun 2022 hingga 2024. Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga

masih dalam tahap penyusunan berdasarkan data unaudited sehingga tingkat pencapaiannya terhadap target belum dapat diketahui secara pasti. Kondisi ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 masih bersifat sementara dan akan lebih jelas setelah proses audit serta finalisasi laporan keuangan daerah selesai dilakukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa menargetkan maksimal dalam pencapaian kinerja opini keuangan terhadap hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan setiap tahunnya dengan opini wajar tanpa pengecualian.

d. Unsur Penunjang Kepegawaian

Suksesnya pencapaian kinerja pembangunan daerah sangat tergantung dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Perhatian pada unsur kepegawaian menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan, juga sebagaimana amanat Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, seluruh Pemerintah Daerah diamanahkan untuk menerapkan Sistem Merit dilingkungannya. Penerapan sistem merit sebagai salah satu strategi dalam manajemen SDM ASN tentunya bukanlah hal yang mudah. Pada perjalanannya, banyak tantangan dan inkonsistensi yang ditemui dalam pelaksanaan sistem ini. Tantangan dan inkonsistensi datang tidak hanya dari dalam ekosistem birokrasi semata, namun juga dari ekosistem di luar birokrasi yang secara tidak langsung memengaruhi.

Sejak tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mulai penerapan dan penilaian Sistem Merit dengan indikator Nilai Penerapan Sistem Merit. Penilaian tersebut didasarkan pada aspek antara lain Perencanaan Kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan Karier, Promosi dan Rotasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan Serta Sistem Informasi. Penerapan Sistem Merit akan diukur dengan Penilaian Sistem Merit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya menjadi indikator dalam urusan penunjang kepegawaian menggantikan indikator Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70 persen.

Tabel 2.114
Perkembangan Indikator Kepegawaian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sistem Merit	-	85	129	176	176

Sumber: BKPSDM Kab.Kepulauan Mentawai (Diolah)

Pada tahun 2024 sistem merit di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 176 mengalami kenaikan perolehan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan nilai sistem merit di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 129 (skala 0-400) dan di tahun 2022 dengan nilai sistem merit di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 85. Pelaksanaan sistem merit 2025 masih difokuskan pada persiapan penerapan manajemen talenta, namun nilai indeks sistem merit yang ada masih sama dengan tahun 2024 karena belum diperoleh penilaian atas indeks sistem merit tahun 2025.

e. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan juga dalam jabatan struktural dan fungsional yang

diselenggarakan dalam upaya menyesuaikan kapasitas sumber daya dengan jabatan yang diemban sehingga mempercepat tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari perkembangan indikator persentase penempatan (jabatan) yang diduduki berdasarkan kompetensi sudah mencapai 100 persen tahun 2025 yang mencerminkan pencapaian target daerah dalam menempatkan pegawai sesuai kapasitas dan keahlian masing-masing, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kinerja aparatur.

Tabel 2.115
Perkembangan Indikator Kepegawaian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase penempatan yang diduduki berdasarkan kompetensi	70	72	73	75	100
Persentase peningkatan kinerja ASN	90	100	100	100	N.A

Sumber: BKPSDM Kab.Kepulauan Mentawai

Begitu juga dengan upaya peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui berbagai pendidikan dan pelatihan telah mencapai 100 persen sampai dengan tahun 2024 dari seluruh ASN khususnya PNS yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk capaian peningkatan kinerja Aparatus Sipil Negara (ASN) Tahun 2025 belum diketahui datanya.

f. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Dalam proses penyusunan perencanaan terutama dalam perumusan strategi/ kebijakan dengan penarikan kesimpulan secara ilmiah yang dijadikan pedoman dan dasar/rujukan pengambilan kebijakan urusan penelitian dan pengembangan merupakan urusan penunjang yang sangat vital. Hasil penelitian dan pengembangan yang sudah dilaksanakan belum optimal sedangkan itu digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan dalam penetapan suatu kebijakan. Di bidang kelitbangan kondisi saat ini belum ada SDM (peneliti) yang kompeten menjadi satu kendala dalam pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan.

Perkembangan inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih fluktuatif. Inovasi yang diartikan sebagai pembaharuan tata kelola dan pelayanan publiK dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Gambar 2.51
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai, 2025

Perkembangan capaian inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diukur dalam indeks inovasi daerah setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pengukuran IGA (Innovation Government Award) mengalami pencapaian yang fluktuatif, lalu pada tahun 2021 dengan metode perhitungan baru masuk pada kategori inovatif dengan nilai 32,53. Pencapaian dengan predikat inovatif ini dapat dipertahankan pada tahun 2022 dengan nilai 40,19. Namun pada tahun 2023 turun menjadi kabupaten kurang inovatif dengan nilai 18,31 kemudian pada tahun 2024 kembali meraih kabupaten dengan kategori inovatif dengan nilai 37,04, dan untuk kondisi terakhir tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Mentawai meraih kategori kabupaten inovatif dengan nilai 47,21.

Penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam perspektif kematangan dan kedalaman penerapan inovasi masih belum maksimal. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti jangkauan yang sangat luas, rentang kendali yang terbatas, biaya operasional dan komitmen yang masih rendah. Beberapa hal tersebut menjadi penghambat dalam inisiasi dan penerapan inovasi pada setiap perangkat daerah. komitmen, dukungan dan pembaharuan pola pikir setiap ASN menjadi syarat yang perlu dalam menerapkan inovasi dipemerintah daerah sehingga bisa mendorong percepatan pencapaian tugas dan fungsi di masing-masing perangkat daerah.

2.1.3.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kedudukan inspektorat daerah adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Tabel 2.116
Perkembangan Indikator Unsur Pengawasan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase tindak lanjut temuan	86,25	76,80	86,20	71,63	88
2	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	97,58	100	100	100	88
3	Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
4	Survei Penilaian (SPI)	71,74	67,25	68,18	67,77	Belum Rilis
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	83,99	82,79	82,95	83,02	Belum Rilis

Sumber: Inspektorat

Perkembangan indikator pengawasan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan. Penguatan unsur

pengawasan tidak dapat hanya berada pada unsur pengawasan atau berdasarkan temuan-temuan pemeriksaaan, yang lebih penting adalah penguatan tata kelola, tertib adminstrasi dan penguatan sumber daya manusia sehingga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan tertib dan taat azas. Untuk persentasi tindak lanjut temuan mengalami penurunan yaitu dari 97,58 persen pada tahun 2021 turun pada tahun 2025 menjadi sebesar 88 persen. Untuk OPD yang menerapkan SPIP telah mencapai 100 persen pada tahun 2025.

2.1.3.6 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai instansi yang memiliki tugas untuk melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah memiliki beberapa indikator pencapaian kinerja sebagai bentuk ukuran keberhasilan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Pencapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Daerah tidak terlepas dari peran dan kontribusi masing-masing Bagian, para Asisten dan Staf Ahli dan pejabat fungsional yang ada

Tabel 2.117
Perkembangan Indikator Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai IKM > 60%	80	83	80,59	81,16	79,29
Nilai EKPPD	2,7	2,8	3,4	3,4	Masih Proses
Penyusunan APBD tepat waktu	30 November	30 November	30 November	30 November	30 November
Persentase MoU yang ditindaklanjuti	30	40	50	80	50
Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik > 80 persen	83	84	85	88	95,73
Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100	100	100	100	100
Indeks Reformasi Hukum	58,63	58,95	57,43	98,04	
Predikat	CC	CC	CC	AA	

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan tren positif. Nilai IKM konsisten berada di atas 60 persen dengan sedikit fluktuasi, sementara Nilai EKPPD meningkat dari 2,7 pada 2021 menjadi 3,4 pada 2023–2024 yang mencerminkan perbaikan tata kelola pemerintahan. Penyusunan APBD setiap tahun juga terlaksana tepat waktu (30 November). Persentase MoU yang

ditindaklanjuti sempat meningkat hingga 80 persen pada 2024 namun menurun menjadi 50 persen pada 2025 sehingga perlu penguatan tindak lanjut kerja sama. Di sisi lain, kinerja OPD dalam realisasi keuangan dan fisik terus meningkat hingga 95,73 persen pada 2025, serta kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan perangkat daerah konsisten mencapai 100 persen.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi *budgeting*. Dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi Anggota DPRD maka ukuran 183 able 183 ati kinerja yang digunakan adalah kepuasan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD serta masyarakat yang mengunjungi DPRD.

Tabel 2.118
Perkembangan Indikator Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan oleh DPRD	5	16	16	16	7
Persentase Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan sesuai SOP	90	100	100	100	100
Jumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai dengan SOP	14	12	12	16	14
Jumlah produk 183 able yang difasilitasi Sekretariat DPRD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang dibahas dan didukung oleh DPRD	8	12	12	16	6
Persentase kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD	95	100	100	100	100

Pelaksanaan tugas 183 able 183 ative DPRD secara prinsip adalah memfasilitasi penyelenggaraan agenda setiap pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, juga menjaga keselarasan agenda dan komunikasi antara pemerintah daerah (eksekutif) dan 183 able 183 ative. Secara umum, pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD pada tahun 2025 telah mencapai kinerja optimal dengan capaian 100 persen. Ke depan, kualitas pelayanan diharapkan dapat terus ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara lebih efektif.

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Unsur kewilayahan kecamatan secara umum terdiri dari pimpinan dan struktur organisasi di bawahnya, di mana kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Camat sebagai perpanjangan tangan kepala daerah untuk membawahi wilayah kecamatan. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan pada

10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan variasi capaian kinerja pelayanan.

Tabel 2.119
Perkembangan IKM Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	KECAMATAN SIBERUT UTARA	61,67	68,40	77,78	81,06	81,06
	Predikat	D	C	B	B	B
2	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	67,59	72,57	80,94	85,98	85,98
	Predikat	C	C	B	A	A
3	KECAMATAN SIBERUT BARAT	90,55	90,63	71,30	87,50	87,50
	Predikat	A	A	C	A	A
4	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	56,39	59,26	85,90	78,59	78,59
	Predikat	D	C	A	B	B
5	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	77,12	76,70	77,78	79,37	79,37
	Predikat	B	B	B	B	B
6	KECAMATAN SIPORA UTARA	85,88	82,48	83,33	73,72	73,72
	Predikat	A	B	A	C	C
7	KECAMATAN SIPORA SELATAN	77,52	75,00	82,94	76,19	76,19
	Predikat	B	C	B	C	C
8	KECAMATAN PAGAI UTARA	77,78	72,53	68,75	77,58	77,58
	Predikat	B	C	C	B	B
9	KECAMATAN SIKAKAP	89,81	92,97	71,11	79,08	79,08
	Predikat	A	A	C	B	B
10	KECAMATAN PAGAI SELATAN	63,49	75,00	71,03	80,77	80,77
	Predikat	D	C	C	B	B

Sumber: Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai

Setiap kecamatan memiliki kekuatan dan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pelayanan publik. Responden memberikan penilaian terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan administrasi terpadu di setiap kantor kecamatan terdiri atas kriteria antara lain kesesuaian persyaratan, kemudahan prosedur, kecepatan waktu, kompetensi petugas serta kualitas sarana dan prasarana, kewajaran biaya/tarif, kesesuaian produk, kesopanan dan keramahan petugas serta penanganan dan pengaduan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Siberut Utara kurun waktu 2021-2025 menunjukkan peningkatan pencapaian meskipun terjadi anomali atau penurunan di tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 nilai IKM di Kecamatan Siberut Utara sebesar 77,20 dengan predikat B, capaian ini turun di tahun 2021 dengan nilai 61, 67 (predikat D) dan tahun 2022

mengalami kenaikan menjadi 68,40 (predikat C), kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024 dengan nilai 77,78 (predikat B) dan 81,06 (predikat B).

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Siberut Tengah kurun waktu 2020-2024 menunjukkan peningkatan pencapaian, yaitu pada tahun 2020 nilai IKM di Kecamatan Siberut Tengah sebesar 76,55 (predikat C) mengalami penurunan pencapaian di tahun 2021 menjadi sebesar 67,59 dengan predikat C. Pada tahun 2022 nilai IKM Kecamatan Siberut Tengah mengalami kenaikan menjadi sebesar 72,57 dengan predikat C hingga tahun 2024 nilai IKM di Kecamatan Siberut Tengah sebesar 85,98 dengan predikat A.

Perkembangan nilai IKM di Kecamatan Siberut Barat dapat dikategorikan dengan pencapaian yang baik, yaitu pada tahun 2020 nilai IKM Kecamatan Siberut Barat sebesar 75,12 atau dengan predikat C. Pada tahun 2021 nilai IKM meningkat signifikan menjado sebesar 90,55 atau dengan predikat A dan kembali meningkat di tahun 2022 dengan nilai IKM sebesar 90,63 (predikat A) hingga tahun 2024 nilai IKM di Kecamatan Siberut Barat sebesar 87,50 dengan predikat A.

Nilai IKM di Kecamatan Siberut Barat Daya cukup mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 76,61 atau dengan predikat B namun pada tahun 2021 capaiannya turun menjadi 56,39 atau dengan predikat D. Pada tahun 2022 capaian IKM mengalami kenaikan menjadi sebesar 59,26 dengan predikat C dan di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 85,90 (predikat A) hingga tahun 2024 nilai IKM di Kecamatan Siberut Barat Daya sebesar 78,59 atau dengan predikat B.

Untuk pencapaian IKM di Kecamatan Siberut Selatan relatif stabil yaitu pada predikat B. Pada tahun 2020, nilai IKM di Kecamatan Siberut Selatan sebesar 76,93 lalu pada tahun 2021 dengan nilai IKM sebesar 77,12 dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 76.7 kemudian di tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 77,78 dan di tahun 2024 nilai IKM di Kecamatan Siberut Selatan sebesar 79,37.

Pencapaian IKM Kecamatan Sipora Utara pada tahun 2020 sebesar 84,51 atau dengan predikat A dan mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan nilai 85,88 (predikat A) dan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 82,48 dengan predikat B hingga pada tahun 2024 nilai IKM di Kecamatan Sipora Utara relatif mengalami penurunan menjadi sebesar 73,72 dengan predikat C.

Perkembangan nilai IKM di Kecamatan Sipora Selatan kurun waktu 2020-2024 relatif stabil, yaitu pada tahun 2020 dengan nilai IKM sebesar 69,16 atau dengan predikat C, mengalami kenaikan di tahun 2021 dengan nilai sebesar 77,52 atau dengan predikat B dan sedikit turun di tahun 2022 menjadi sebesar 75,00. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 82,94 dengan predikat B dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 76,19 atau dengan predikat C.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan publik di Kecamatan Pagai Utara dari nilai IKM menunjukkan perkembangan yang baik yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 77,92 (predikat B), tahun 2021 dengan nilai IKM sebesar 77,78 (predikat B). Pada tahun 2022 dan 2023 nilai IKM di Kecamatan Pagai Utara turun menjadi sebesar 72,53 atau dengan predikat C dan 68,75 (predikat C) dan di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 77,58 atau dengan predikat B.

Perkembangan nilai IKM di Kecamatan Sikakap kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan yang sangat baik, yaitu pada tahun 2020 dengan nilai IKM sebesar 75,76 (predikat C) mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 89,81 (predikat A). Pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan dengan nilai IKM sebesar 92,97 (predikat A), pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 71,11 atau dengan predikat C namun di tahun

2024 kembali nilai IKM si Kecamatan Sikakap mengalami kenaikan menjadi sebesar 79,08 atau dengan predikat B.

Perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik di Kecamatan Pagai Selatan dengan pencapaian cukup baik, dengan relatif adanya penurunan pencapaian di tahun 2021-2023. Pada tahun 2020 nilai IKM di Kecamatan Pagai Selatan sebesar 78,86 dengan predikat B dan di tahun 2021 mengalami penurunan 63,49 (predikat D) namun mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi sebesar 75,00 atau dengan predikat C dan pencapaian IKM turun di tahun 2023 menjadi sebesar 71,03 dan di tahun 2024 mengalami kenaikan sehingga nilai IKM di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 80,77 atau dengan predikat B.

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja pelaksanaan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana terlihat pada 186able berikut.

Tabel 2.120
Perkembangan Indikator Unsur Pemerintahan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Kriminalitas	5,76	5,36	5,58	2,15	3,21

Sumber Data : Badan Kesbangpol

Angka kriminalitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kejadian tindak kriminal dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat serta efektivitas upaya pencegahan dan penegakan hukum di daerah.

Perkembangan angka kriminalitas selama Tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2021, angka kriminalitas tercatat sebesar 5,76, kemudian menurun menjadi 5,36 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan menjadi 5,58. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 2,15, yang merupakan capaian terbaik selama periode tersebut. Namun demikian, pada tahun 2025 angka kriminalitas kembali meningkat menjadi 3,21.

Penurunan tajam pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk melalui penguatan pengawasan, partisipasi masyarakat, serta sinergi antar aparat penegak hukum. Sementara itu, kenaikan pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa upaya pengendalian kriminalitas masih perlu diperkuat agar tren penurunan dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi, kondisi angka kriminalitas daerah masih menunjukkan kecenderungan yang membaik dibandingkan tahun awal periode. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga secara proporsional tingkat kriminalitas relatif dapat dikendalikan.

Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh dalam melakukan pencegahan konflik adalah sebagai berikut :

a. Adanya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat

karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah- tengah masyarakat.

b. Meningkatnya intensitas pertemuan dengan jajaran Forkopimda dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi dalam penyelesaian masalah.
c. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik social

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek Daya saing daerah mengacu pada faktor-faktor yang menentukan seberapa mampu suatu daerah untuk bersaing secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dibandingkan dengan daerah lain. Beberapa komponen utama yang biasanya menjadi bagian dari aspek daya saing daerah antara lain :

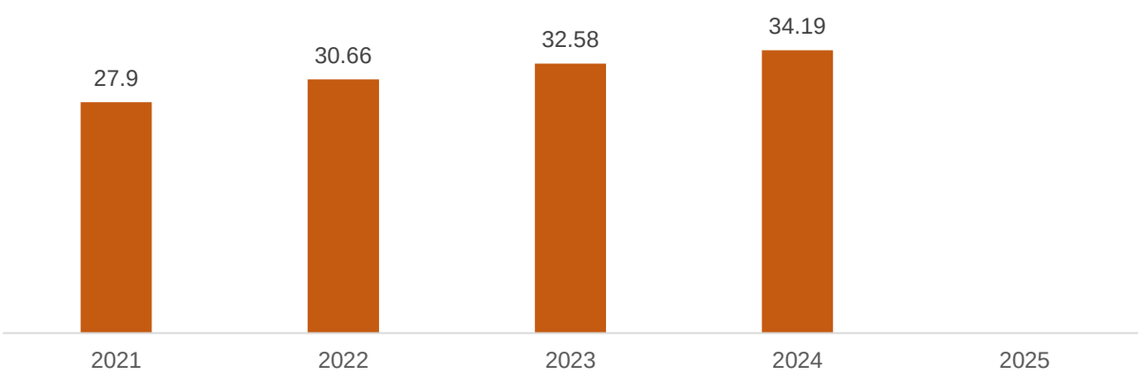
1. Ekonomi dan Infrastruktur yakni kekuatan ekonomi lokal (PDRB, pertumbuhan ekonomi), ketersediaan infrastruktur, transportasi, energi dan teknologi.
2. Sumber Daya Manusia yakni tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk serta kesehatan dan produktivitas tenaga kerja
3. Kebijakan dan Regulasi yakni kemudahan berusaha dan kepastian hukum sekaligus transparansi dan efisiensi birokrasi.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kemampuan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari kondisi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di daerah tersebut. Begitu halnya dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut capaian pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita :

Gambar 2.52
Pengeluaran Konsumsi RT Perkapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025



Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren peningkatancapaian. Pada tahun 2021 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mencapai 27,9 dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 30,66. Berikutnya pada tahun 2023 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mengalami kenaikan menjadi sebesar 32,28. Kemudian capaian di tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 34,19 dan di tahun 2025 capaiannya belum rilis.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran. Indikator ini mencerminkan tingkat daya beli masyarakat sekaligus menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi daerah, khususnya di wilayah dengan struktur ekonomi yang masih didominasi konsumsi domestik seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.121
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Tahun	PKRT (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Tahunan
2021	1.565,14	-
2022	1.631,70	+4,25%
2023	1.690,72	+3,62%
2024	1.753,62	+3,72%
2025	1.769,95	+0,93%

Secara kumulatif, terjadi peningkatan sebesar 13,08% dari tahun 2021 ke 2025, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 3,13%.
Analisis Tren Konsumsi Rumah Tangga

1. Fase Pemulihan Pasca-Pandemi (2021-2022)
Peningkatan signifikan sebesar 4,25% pada 2022 mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat setelah masa pandemi. Hal ini sejalan dengan:
- Peningkatan mobilitas masyarakat antar-pulau
- Pemulihan sektor pariwisata, khususnya wisata selancar yang menjadi andalan Mentawai
- Stabilisasi harga komoditas pokok

2. Konsolidasi Pertumbuhan (2023-2024)
Pertumbuhan yang stabil di kisaran 3,6-3,7% menunjukkan:
- Daya beli masyarakat yang terjaga meski menghadapi tekanan inflasi
- Peran sektor pertanian dan perikanan dalam menopang pendapatan rumah tangga
- Peningkatan akses terhadap barang dan jasa seiring perbaikan infrastruktur transportasi

3. Perlambatan Pertumbuhan (2025)
Angka pertumbuhan 0,93% pada 2025 mengindikasikan:
- Potensi jenuh konsumsi pada level pendapatan saat ini
- Dampak keterbatasan akses pasar dan distribusi barang ke wilayah kepulauan
- Perlunya diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga

Secara struktural, konsumsi masyarakat Mentawai masih didominasi oleh pengeluaran untuk kebutuhan makanan, meskipun proporsi pengeluaran non-makanan seperti transportasi, pendidikan, dan komunikasi terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran pola konsumsi yang secara bertahap mencerminkan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Namun demikian, karakteristik wilayah kepulauan yang dimiliki Mentawai turut memengaruhi besaran konsumsi per kapita. Tingginya biaya

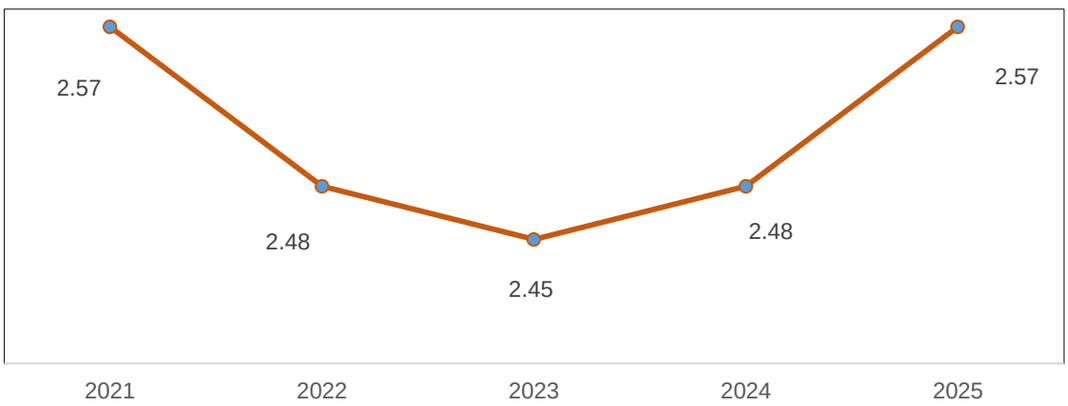
distribusi barang, keterbatasan aksesibilitas antar wilayah, serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menyebabkan harga barang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan. Kondisi ini berkontribusi terhadap besarnya nilai konsumsi, meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan riil.

C. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Gambar 2.53
Rasio PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : BPS Mentawai

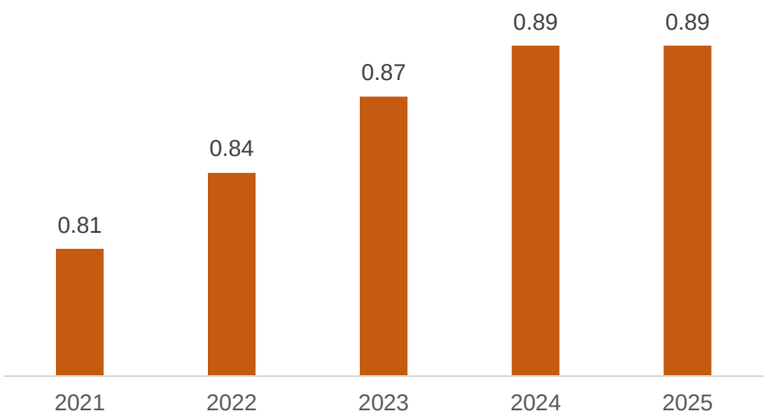
Gambar 2.28 menunjukkan perkembangan rasio Industri Pengolahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021-2025 yang menunjukkan tren peningkatan meskipun tidak signifikan. Kondisi ini memang sangat berbanding terbalik pada kontribusi sektor raw material/primer dengan kontribusi dengan rata-rata 48 persen setiap tahunnya, yang seharusnya sudah mulai reformasi struktural ekonomi ke arah sektor industri/ pengolahan.

Tahun 2021 rasio PDRB Industri pengolahan terhadap total PDRB sebesar 2,57 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 2,48 persen. Pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 2,45, selanjutnya tahun 2024 naik menjadi 2,48 persen dan pada tahun 2025 naik kembali menjadi, 2,57 persen. Hilirisasi sektor primer yang belum menggeliat dan adanya pilot project yang menjadi success story bagi masyarakat atau kelompok sehingga industri pengolahan khususnya pada komoditas unggulan daerah belum berkembang. Juga masih sedikitnya produk sektor primer yang dapat diproduksi dalam jumlah besar untuk menjadi bahan baku utuk hilirisasi, megakibatkan sektor hilirisasi tidak berkembang dan stagnan.

2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sebagai daerah tujuan wisata khususnya wisata bahari sangat potensial untuk mengembangkan sektor jasa melalui pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai core sektor dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan multiplier effect terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa lainnya bahkan sektor pertanian dan industri.

Gambar 2.54
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : BPS Mentawai (diolah)

Perkembangan rasio PDRB Akomodasi makan dan Minum di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2021 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,81 persen mengalami peningkatan hingga tahun 2022 dengan kontribusi sektor ini sebesar 0,84 persen dan meningkat lagi pada tahun 2023 dengan rasio sebesar 0,87 persen, dan tahun 2024 menjadi 0,89 dan hingga tahun 2025 rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum masih tetap sebesar 0,89 persen. Angka ini relatif masih sangat kecil jika dijadikan Kepulauan Mentawai sebagai kawasan destinasi pariwisata unggulan dan sektor jasa menjadi core sector pengembangan wilayah dan ekonomi masyarakat. Pengembangan 6A pariwisata (attraction, amenities, accessibility, accommodation, activity, dan ancillary) tentunya menjadi skala prioritas menuju pariwisata Mentawai kelas dunia yang menjadi andalan ekonomi utama dengan hospitality yang prima tentunya.

3. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Perkembangan jumlah tamu wisatawan mancanegara di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trennya menunjukkan perkembangan yang positif Jumlah Wisatawan Mancanegara dihitung sebagai jumlah tamu wisatawan yang berasal dari mancanegara yang menginap di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan Tabel menunjukkan pada Tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 3.807 orang dan tahun 2022 sebanyak 9.318 orang, meningkat di tahun 2023 menjadi sebanyak 9.815 orang dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 8.488 orang dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sehingga jumlah tamu wisatawan mancanegara sebanyak 10.520 orang.

Tabel. 2.122
Kunjungan Wisata Mancanegara
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)
1	2021	3.807
2	2022	9.318
3	2023	9.815

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)
4	2024	8.488
5	2025	10.520
	Jumlah	41.948

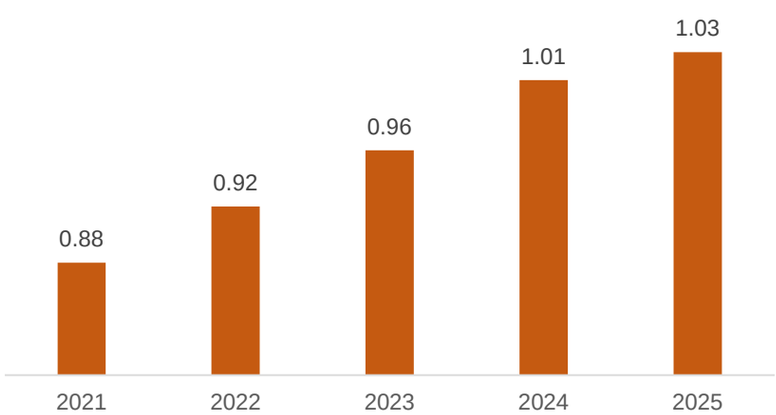
Sumber : Disparpora Kepulauan Mentawai

Berdasarkan tabel di atas terlihat trennya semakin meningkat atau dengan kata lain bahwa sektor pariwisata di Kepulauan Mentawai mengalami pertumbuhan yang positif dan konsisten sepanjang tahun 2021 hingga 2025. Secara keseluruhan, total kunjungan wisman yang tercatat selama empat tahun terakhir mencapai 41.948 orang. Pada tahun 2021 menjadi titik awal periode dengan jumlah kunjungan sebesar 3.807 orang. Di Tahun 2022 kunjungan wisata mancanegara mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 9.318 wisman. Di Tahun 2023 lonjakan kunjungan meningkat pada angka sebesar 9.815 wisman. Namun di tahun 2024 kunjungan menurun signifikan di angka 8.488. Dan di tahun 2025 kembali menunjukkan kenaikan yang positif hingga mencapai puncaknya dengan total kunjungan mencapai 10.520 orang. Namun demikian masih banyak kekurangan di berbagai sektor untuk menaikkan kunjungan lebih besar lagi seperti : aksesibilitas dan infrastruktur yang harus lebih ditingkatkan dan promosi dan informasi digital yang masih minim dibanding destinasi Indonesia lainnya.

4. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ide dan gagasan yang inovatif menjadi poin penting dalam membaca kebutuhan konsumen sebagai bentuk diversifikasi produk pariwisata yang dibutuhkan dan diinginkan para wisatawan dan konsumen lainnya. Pengembangan sektor ini juga sangat potensial untuk membangun ekonomi kreatif baik itu bagi ekonomi mikro juga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kearifan local.

Gambar 2.55
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Untuk rasio PDRB Ekonomi Kreatif yang dipilih sektor jasa lainnya menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 2021-2025 yaitu dari 0,83

persen di tahun 2020 meningkat menjadi ke 1,01 persen pada tahun 2024, kemudian meningkat kembali di tahun 2025 menjadi 1,03 persen. Dengan metode perhitungan PDRB menggunakan standar harga berlaku tahun 2010 perkembangan PDRB Ekonomi Kreatif menunjukkan pencapaian rasio yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini menjadi hal yang positif bagi keberlangsungan dan penguatan sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga dan melestarikan identitas budaya, memperkuat daya saing di pasar global, mendorong inovasi dan kreativitas.

5. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian

Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non Pertanian menunjukkan perbandingan jumlah unit Usaha Kecil dan Menengah non-pertanian terhadap total seluruh unit usaha. Secara umum, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian suatu daerah.

Tabel 2.123
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian	35,35	25,98	32,87	34,05	29,00

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022-2026 (diolah)

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan perkembangan yang positif 35,35 persen di tahun 2021 mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 25,98 persen dan mengalami peningkatan menjadi 32,87 persen di tahun 2023. Dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 34,05 persen. Di tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 29,00 persen hal ini disebabkan stabiitas ekonomi yang cenderung tidak stabil karena harga bahan baku dan energi mengalami kenaikan harga/tarif, untuk tambahan modal usaha mengalami kesulitan (akses pembiayaan sulit), bunga pinjaman/ perkreditan untuk modal usaha terlalu tingg, persaingan pasar dan digitalisasi yang sangat mempengaruhi kondisi pasar, daya beli yang rendah dan regulasi dan birokrasi yang tidak mendukung untuk mengurus perizinan/ izin usaha dan pajak yang rumit serta SDM yang masih rendah atau belum terampil dan produktivitas yang masih rendah.

6. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) menunjukkan peran dominan dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 2.124
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	64,68	51,28	53,28	63,70	53,00

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022-2026 (diolah)

Perkembangan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel..... yaitu pada tahun 2021 tumbuh sebesar 64,68 persen lalu mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 51,28 persen. Begitu juga di tahun 2023 di angka 53, 28 persen dan di tahun2024 sebesar 63,70 persen dan di tahun 2025 proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai terjadi penurunan menjadi 53 persen, hal ini disebabkan sulitnya pelaku usaha memperoleh modal atau kredit sehingga dengan keterbatasan akses pembiayaan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja yang SDM masih rendah, bahan baku yang tidak tersedia, permintaan pasar yang rendah, Perda yang tidak mendukung, teknologi yang belum memadai, infrastruktur yang tidak memadai serta kondisi ekonomi yang relatif tidak stabil.

7. Rasio Kewirausaahan (entrepreneur)

Rasio Kewirausahaan/*enterprenuer* di Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Tahun 2021 sampai tahun 2025 menunjukkan kecendrungan meningkat, meskipun laju pertumbuhannnya belum begitu signifikan.

Tabel 2.125
Proporsi Rasio Kewirausahaan Enterprenuer
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Proporsi Rasio Kewirausahaan Enterprenuer	0,58	1.18	0,93	1.11	1,99

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022-2026 (diolah)

Secara umum, perkembangan rasio kewirausahaan dari tahun 2021 masih relativ rendah di angka 0,58 persen sebagai dampak pemulihan COVID 19. Aktivitas usaha mikro dan kecil mulai kembali berjalan, namun pertumbuhan wirausaha masih terbatas. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan seiring membaiknya kondisi ekonomi daerah yaitu 1,18 persen. Dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Koperasi, dan pelaku usaha mulai mendorong lahirnya wirausaha baru. Pada Tahun 2023 Rasio kewirausahaan terjadi penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh semakin melemahnya modal usaha di masyarakat sehingga perkembangnya usaha mikro pada sektor perdagangan, perikanan, pertanian, serta industri rumah tangga yang menjadi sektor unggulan daerah mengalami penurunan.

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kewirausahaan sebesar 1, 11 persen. Pemerintah daerah menempatkan kewirausahaan sebagai salah satu indikator daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan Usaha MIkro (UMKM), Koperasi dan Ekonomi Kreatif. Pada Tahun 2025 rasio kewirausahaan mengalami peningkatan menjadi 1,99 persen, kenaikan ini terjadi karena adanya pertumbuhan sektor unggulan karena adanya peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Mentawai.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, rasio kewirausahaan Kabupaten Kepulauan Mentawai memperlihatkan tren positif. Walaupun tren kenaikan angkanya belum begitu signifikan dari tahun ke tahun, adanya peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha produktif, terutama pada Sektor usaha mikro, walaupun demikian, tantangan masih terdapat pada peningkaan kualitas usaha, akses permodalan, inovasi, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi agar jumlah wirausaha terus bertambah dan mampu meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

8. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB adalah ukuran yang menunjukan kontribusi ekonomi koperasi terhadap produk Do,estik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Rasio ini dihitung dengan membagi total volume usaha koperasi dengan PDRB daerah tersebut.

Tabel 2.126
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	0,13	0,12	0,11	0,11	0,19

Sumber : BPS Kepulauan Mentawai, 2022-2026 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.95 menunjukan perkembangan rasio volume koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang relatif masih sangat rendah yaitu sebesar 0,13 persen pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2022 yaitu dengan rasio 0,12 persen dan pada tahun 2023 dan 2024 rasio volume koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,11 persen dan pada tahun 2025 rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen, hal ini dipengaruhi oleh dukungan eksternal dan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, yang mana di Kepulauan Mentawai masih dominan pada usaha mikro dapat segera naik kelas ke usaha kecil. Begitu juga dengan koperasi yang sehat sebagai fondasi ekonomi masyarakat di Kepulauan Mentawai, hal ini termasuk pengembangan usaha koperasi (KDMP) di 43 Desa di Kepulauan Mentawai.

9. Return on Aset (ROA) BUMD

Return of Assets (ROA) menjadi sebuah toalak ukur akan untung yang bisa di dapat dari dalam sebuah bisnis. Di sisi lain, ROA juga menunjukkan tingkat efesiensi sebuah perusahaan untuk mengelola asetnya dalam proses bisnisnya.

Tabel 2.127
Perkembanagan Return of Asset (RoA) BUMD
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
RoA Perumda Kemakmuran Mentawai	%	-14,270	-20,849	-35,691	-48,57	-(1,284)

Sumber : laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (diolah)

Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai yang dibentuk tahun 2017 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 telah berjalan kurun waktu 6 tahun. Perkembangan aktivitas bisnis Perumda Kemakmuran Mentawai belum secara signifikan memberikan kontribusi kepada daerah khususnya kontribusi terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan nilai RoA yang telah dihitung didapat bahwa pada rentang waktu 2021-2023 nilai 14, 27 persen, tahun 2022 dengan RoA sebesar -20, 85 persen, tahun 2023 dengan nilai RoA sebesar -35,6 persen dan pada tahun 2024 nilai RoA Perumda Kemakmuran Mentawai dengan nilai -48,57 persen. Nilai ini menginterprestasikan bahwa Perumda Kemakmuran Mentawai belum mampu mengelola aset yang ada secara optimal untuk menghasilkan laba atau keuntungan, dan di tahun 2025 RoA BUMD mengalami penurunan yaitu -1,

284 persen sampai hal ini dikarenakan Perumda Kemakmuran Mentawai tidak ada perkembangan aktivitas bisnis.

10. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal merujuk pada persentase atau jumlah lapangan kerja yang tercipta di sektor formal dibandingkan dengan total lapangan kerja yang ada. Sektor formal biasanya ditandai dengan adanya perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum, kepastian gaji, dan perlindungan hukum bagi pekerja. Penciptaan lapangan kerja formal yang tinggi seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditunjukkan melalui sejauhmana angkatan kerja dapat bekerja menjadi buruh, karyawan atau pegawai dengan sistem kerja yang telah teratur dan terkelola dengan baik oleh dalam suatu badan atau perusahaan. Perkembangan proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan yaitu dari 19,41 persen di tahun 2021 dan meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 20,64 persen meskipun menurun di tahun 2023 menjadi 16,43 persen dan di tahun 2024 kembali meningkat menjadi sebesar 18,45. Dan di tahun 2025 naik signifikan menjadi 19,98 persen. Perkembangan proporsi ini menunjukkan meningkatnya kuantitas dan kualitas angkatan kerja sehingga dapat masuk dalam lingkup tenaga kerja pada sektor formal.

Tabel 2.128
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 - 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja formal (%)	19,41	20,64	16,43	18,45	19,98

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

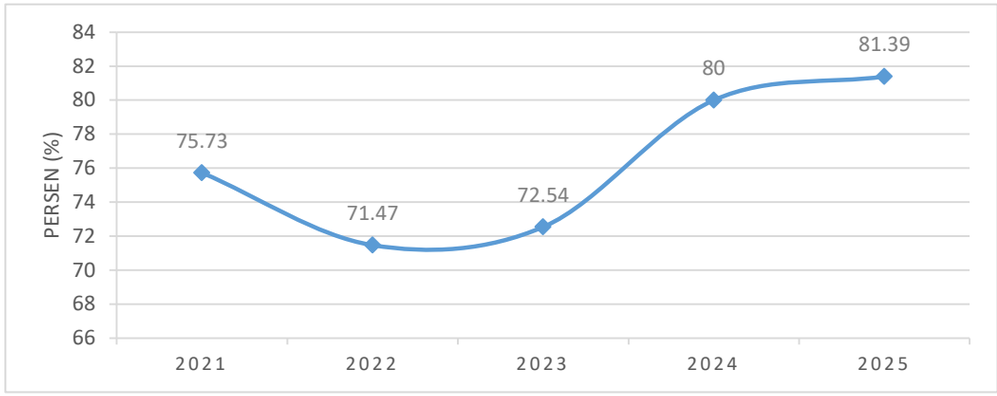
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase perempuan yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan di pasar kerja dari total perempuan yang masuk dalam kategori angkatan kerja. Indikator ini penting untuk menggambarkan peran perempuan dalam struktur ketenagakerjaan daerah, sekaligus mencerminkan tingkat kesetaraan gender dalam akses terhadap kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi produktif di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.129
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	75,73	71,47	72,54	80,00	81,39

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

Gambar 2.56
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, 2021-2025



Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum mengalami peningkatan selama periode 2021-2025, meskipun sempat menurun pada dua tahun awal. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 75,73 persen, kemudian menurun menjadi 71,47 persen pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 72,54 persen pada tahun 2023. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024 menjadi 80,00 persen, dan berlanjut hingga mencapai 81,39 persen pada tahun 2025, capaian tertinggi sepanjang periode pengamatan.

Peran perempuan menjadi sangat vital dalam konstruksi tenaga kerja di Mentawai, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan skala kecil, dan usaha rumah tangga. Peningkatan konsisten TPAK Perempuan sejak tahun 2023 menunjukkan semakin terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan di berbagai sektor ekonomi daerah, sekaligus mencerminkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilaksanakan pemerintah daerah bersama mitra pembangunan.

Untuk mempertahankan tren positif ini, arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada penguatan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan, perluasan akses permodalan usaha mikro bagi kelompok perempuan, penyediaan fasilitas pendukung yang ramah bagi pekerja perempuan seperti akses transportasi dan layanan pengasuhan anak, serta penguatan data ketenagakerjaan berbasis gender untuk perencanaan pembangunan yang lebih responsif.

12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk angkatan kerja (bekerja atau mencari kerja) terhadap total penduduk usia kerja, yang menunjukkan seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas peluang lapangan pekerjaan dan meningkatkan pasokan tenaga kerja.

menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kepulauan Mentawai ralatif meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir meskipun pada tahun 2022 ada penurunan. Pada tahun 2021 TPAK Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 82,57 persen mengalami peningkatan di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 78,25 , pada tahun 2023

mengalami peningkatan menjadi sebesar 80,07 persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga TPAK Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 83,47 persen dan tahun 2025 meningkat kembali menjadi 81,39 Persen.

Tabel 2.130
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat partisipasi angkatan kerja	82,57	78,25	80,07	83,47	

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

13. Indeks Inovasi Daerah

Dalam proses penyusunan perencanaan terutama dalam perumusan strategi/ kebijakan dengan penarikan kesimpulan secara ilmiah yang dijadikan pedoman dan dasar/rujukan pengambilan kebijakan urusan penelitian dan pengembangan merupakan urusan penunjang yang sangat vital. Hasil penelitian dan pengembangan yang sudah dilaksanakan belum optimal sedangkan itu digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan dalam penetapan suatu kebijakan. Di bidang kelitbangan kondisi saat ini belum ada SDM (peneliti) yang kompeten menjadi satu kendala dalam pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan.

Perkembangan inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih fluktuatif. Inovasi yang diartikan sebagai pembaharuan tata kelola dan pelayanan publiK dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai, 2025

Perkembangan capaian inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diukur dalam indeks inovasi daerah setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pengukuran IGA (Innovation Government Award) mengalami pencapaian yang fluktuatif, lalu pada tahun 2021 dengan metode perhitungan baru masuk pada kategori inovatif dengan nilai 32,53. Pencapaian dengan predikat inovatif ini dapat dipertahankan pada tahun 2022 dengan nilai 40,19. Namun pada tahun 2023 turun menjadi kabupaten kurang inovatif dengan nilai 18,31 kemudian pada tahun 2024 kembali meraih kabupaten dengan kategori inovatif dengan nilai 37,04, dan untuk kondisi terakhir tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Mentawai meraih kategori kabupaten inovatif dengan nilai 47,21.

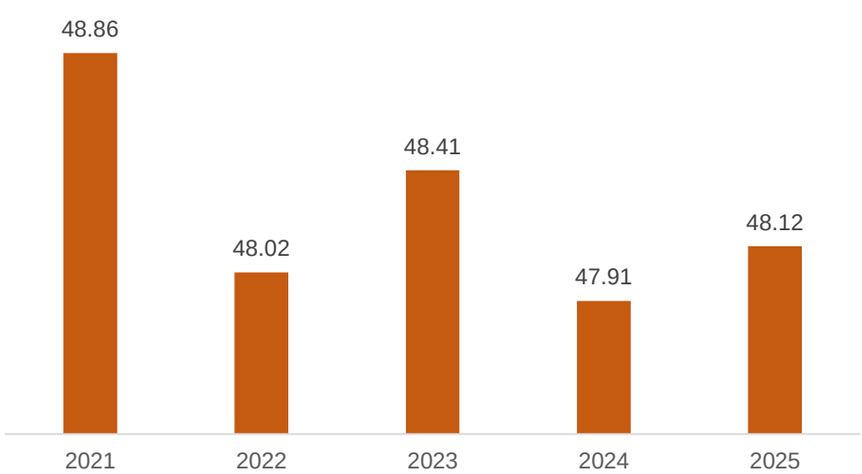
Penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam perspektif kematangan dan kedalaman penerapan inovasi masih belum maksimal. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti jangkauan yang sangat luas, rentang kendali yang terbatas, biaya operasional dan komitmen yang masih rendah. Beberapa hal tersebut menjadi penghambat dalam inisiasi dan penerapan inovasi pada setiap perangkat daerah. komitmen, dukungan dan pembaharuan pola pikir setiap ASN menjadi syarat yang perlu dalam menerapkan inovasi dipemerintah daerah sehingga bisa mendorong percepatan pencapaian tugas dan fungsi di masing-masing perangkat daerah.

D. Penerapan Ekonomi Hijau

1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (sangat penting dalam pembangunan, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, menjadi sumber mata pencaharian, dan mendukung ketahanan pangan. Sektor PKP merupakan salah satu sektor ekonomi primer di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, selain itu sektor ini juga sebagai penyedia pangan dan bahan baku komoditas yang diekspor/kirim ke luar Mentawai. Sektor PKP menjadi sumber bahan pangan dan mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Mentawai. Sebagai sumber utama pangan dan mata pencarian masyarakat Mentawai, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi core sektor yang secara nyata di Kepulauan Mentawai. Ini dapat dilihat dari rasio PDRB sektor ini dengan angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 48,86 persen di tahun 2021 dan pada tahun 2025 pada kisaran 48,12 persen. Struktur ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam juga menjadi bagian dari budaya Mentawai tentang keterpaduan kearifan lokal dengan pemenuhan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari sehingga menjaga kelestarian alam adalah bagian dari menjaga kehidupan masyarakat Mentawai. Tingginya rasio dan share PDRB pada sektor ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat Mentawai menggantungkan kehidupannya pada sektor ini sehingga agar senantiasa dapat berkelanjutan maka harus dijaga dan dirawat dan dilestarikan. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada nilai >80 atau dengan predikat Baik

Gambar 2.57
Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Pencapaian ini tentunya tetap dijaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutannya agar dapat dikelola dengan bijak sehingga ekonomi masyarakat tumbuh dan sumber daya alam dapat terjaga.

2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Indonesia menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja yang besar namun didominasi oleh tenaga kerja usia lanjut dan tingkat pendidikan yang lebih rendah serta perkembangan pertumbuhan tenaga kerja yang bervariasi antar sub sektornya

Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat dihitung dengan membagi total output dengan total input. Produktivitas kerja adalah kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai harapan dalam waktu yang tepat. Sebagai daerah dengan tingkat kontribusi sektor primer yang tinggi (48%) maka diperlukan produktivitas tenaga kerja yang tinggi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi produktivitas tenaga kerja, di antaranya seperti sikap kerja, tingkat ketrampilan, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi, manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja dan kewiraswastaan

Tabel 2.131
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Tenaga Produktifitas Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan	152,66	160,62	199,10	197,43	200,58

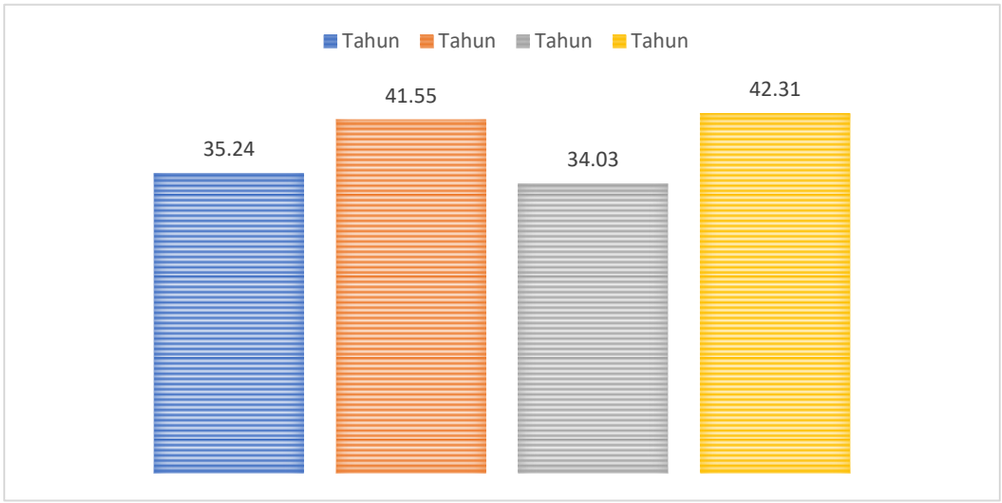
Sumber : BPS (diolah)

E. Transformasi Digital

1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Transformasi Digital diperlukan sebagai akseleratorpembangunan ekonomi masyarakat dan penguat fondasi perekonomian untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Setidaknya, ada 3 (tiga) outcome yang diharapkan, yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas, penciptaan inovasi, dan inklusivitas. Indikator ini melihat gambaran secara utuh pemberdayaan digital masyarakat dalam suatu daerah yaitu Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Indikator ini disusun berdasarkan 3 aspek utama yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan.

Gambar 2.58
Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022 - 2025



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI

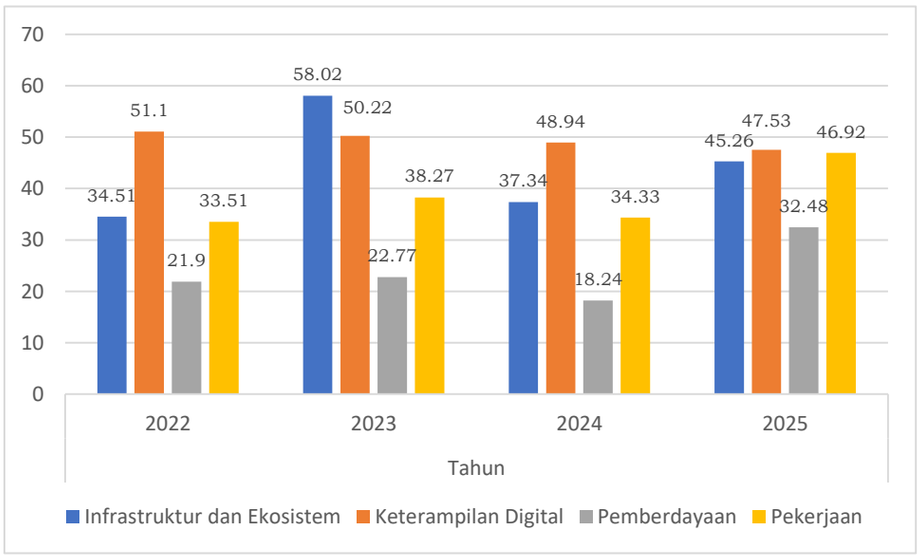
Perkembangan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode 2022–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum mengarah pada peningkatan kapasitas digital masyarakat. Pada tahun 2022, IMDI Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebesar 35,24, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 41,55. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 34,03, sebelum akhirnya kembali meningkat tajam pada tahun 2025 mencapai angka tertinggi selama empat tahun terakhir, yaitu 42,31.

Fluktuasi capaian IMDI tersebut tidak terlepas dari karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai wilayah kepulauan dengan tingkat aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur telekomunikasi yang masih terbatas, khususnya pada wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Penurunan indeks pada tahun 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan akses digital, kualitas infrastruktur jaringan, maupun tingkat literasi dan kecakapan digital masyarakat yang belum merata di seluruh kecamatan.

Peningkatan signifikan yang terjadi pada tahun 2025 mencerminkan hasil dari berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong percepatan transformasi digital, antara lain melalui perluasan jaringan telekomunikasi, penguatan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di wilayah blank spot, peningkatan layanan pemerintahan berbasis elektronik (e-government), serta program literasi dan pemberdayaan masyarakat digital di tingkat desa dan kecamatan.

Ke depan, capaian IMDI ini menjadi salah satu indikator strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah pada bidang komunikasi dan informatika, khususnya dalam mewujudkan masyarakat Kepulauan Mentawai yang inklusif secara digital, mendukung transformasi layanan publik, serta memperkuat daya saing daerah di era digitalisasi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks ini melalui perencanaan yang berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor, serta sinergi dengan pemerintah pusat dan penyedia layanan telekomunikasi guna memastikan pemerataan akses dan pemanfaatan teknologi digital bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 2.59
Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022 - 2025



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI

Capaian Pilar-Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Capaian masing-masing pilar selama periode 2022–2025 menunjukkan dinamika yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan berikut.

1. Infrastruktur dan Ekosistem

Pilar Infrastruktur dan Ekosistem menunjukkan capaian yang paling fluktuatif dibandingkan pilar lainnya. Pada tahun 2022, nilai pilar ini tercatat sebesar 34,51, kemudian melonjak signifikan pada tahun 2023 menjadi 58,02, sebelum akhirnya turun tajam pada tahun 2024 menjadi 37,34. Pada tahun 2025, pilar ini kembali membaik menjadi 45,26. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digital di Kepulauan Mentawai masih sangat dipengaruhi oleh faktor geografis kepulauan, keterbatasan jaringan listrik, serta tantangan pemerataan sinyal dan akses internet di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar.

2. Keterampilan Digital

Berbeda dengan pilar infrastruktur, pilar Keterampilan Digital justru menunjukkan tren penurunan yang konsisten, yaitu dari 51,10 pada tahun 2022 menjadi 50,22 (2023), 48,94 (2024), hingga 47,53 pada tahun 2025. Meskipun nilai pada pilar ini relatif lebih tinggi dibandingkan pilar lainnya, tren penurunan yang terus berlanjut menjadi perhatian serius, mengingat keterampilan digital masyarakat merupakan fondasi penting dalam pemanfaatan teknologi secara produktif. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan program literasi dan pelatihan digital yang lebih masif dan berkelanjutan, khususnya bagi generasi muda dan pelaku usaha lokal.

3. Pemberdayaan

Pilar Pemberdayaan menunjukkan capaian terendah di antara seluruh pilar IMDI, dengan nilai yang juga berfluktuasi: 21,90 (2022), 22,77 (2023), sempat turun menjadi 18,24 (2024), namun kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 32,48 pada tahun 2025. Peningkatan pada tahun 2025

mencerminkan mulai berkembangnya pemanfaatan platform digital dalam mendukung partisipasi masyarakat, layanan publik berbasis digital, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui teknologi. Meski demikian, capaian pilar ini masih menjadi yang paling rendah sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah.

4. Pekerjaan

Pilar Pekerjaan menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup positif dan progresif, yaitu dari 33,51 (2022), naik menjadi 38,27 (2023), sedikit menurun pada 2024 menjadi 34,33, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 46,92 — capaian tertinggi selama empat tahun terakhir. Tren ini menunjukkan mulai terbukanya peluang kerja berbasis digital di Kepulauan Mentawai, seiring dengan berkembangnya sektor UMKM digital, pariwisata berbasis teknologi, serta pemanfaatan platform daring dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian keempat pilar IMDI Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa pilar Pemberdayaan menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian khusus, sementara pilar Keterampilan Digital yang semula menjadi kekuatan justru menunjukkan tren penurunan yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, pilar Infrastruktur dan Ekosistem serta Pekerjaan menunjukkan potensi perbaikan yang cukup baik pada tahun 2025, meskipun infrastruktur masih rentan terhadap fluktuasi akibat kendala geografis wilayah kepulauan.

F. Transformasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok.

Stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menunjukkan kondisi pasar yang sehat dan terkendali, serta kemampuan pemerintah daerah dan produsen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara memadai dan stabil. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok mengukur sejauh mana harga-harga barang esensial (seperti pangan, sandang, dan papan) tetap konsisten atau relatif tidak mengalami perubahan drastis dalam periode waktu tertentu, menandakan inflasi yang terkendali dan daya beli masyarakat yang terjaga. Ketersediaan barang kebutuhan pokok mengukur sejauh mana barang-barang esensial tersedia di pasar dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat, mengindikasikan kelancaran pasokan dan tidak adanya kelangkaan yang dapat menyebabkan lonjakan harga. Persentase Stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan kebutuhan pokok di Kepulauan Mentawai berada pada angka 6 persen untuk komoditas beras, gula pasir, minyak, cabai, telur, tepung terigu, bawang merah, daging ayam, daging sapi. Perkembangan ketersediaan barang bahan makanan pokok di Kepulauan Mentawai sangat dipengaruhi akan pasokan perdagangan dari luar Kepulauan Mentawai. Hal ini menyebabkan sangat rentannya terjadi kelangkaan jika hal-hal di luar asumsi umum seperti badai dan terputusnya moda pelayaran laut menuju Mentawai. Namun berbagai antisipasi selalu dilakukan untuk meminimalisir potensi kelangkaan yang akan terjadi.

2. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun, yang mencakup bangunan, mesin, peralatan, dan infrastruktur, dan merupakan indikator penting untuk mengukur investasi fisik di suatu wilayah/daerah. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berperan krusial dalam pembangunan karena merupakan indikator investasi yang menggerakkan

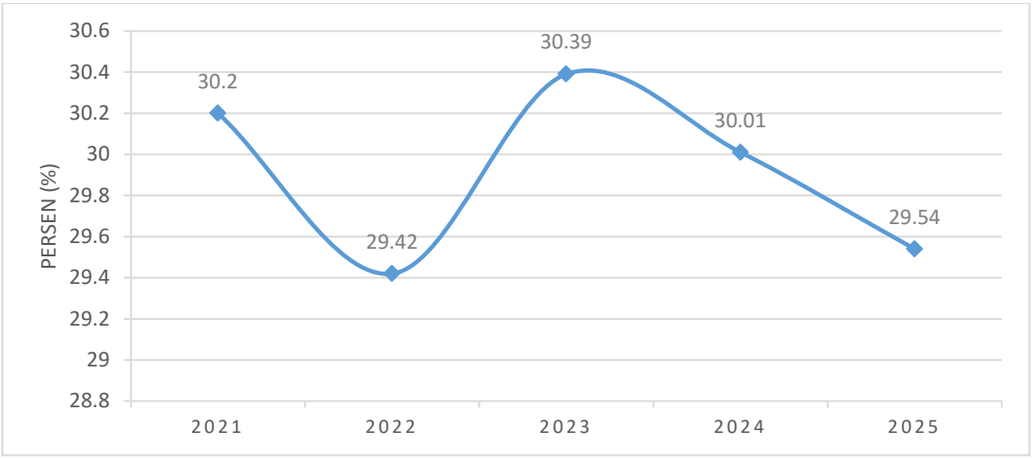
perekonomian, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.132
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	30,2	29,42	30,39	30,01	29,54

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026 (diolah)

Gambar 2.60
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026 (diolah)

Perkembangan Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif fluktuatif dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2021 kontribusi PMTB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 30,2 persen, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 29,42 persen, namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan kontribusi PMTB sebesar 30,39 persen lalu kembali mengalami penurunan menjadi 30,01 persen tahun 2024 dan pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan menjadi 29,54 persen.

Kemudahan investasi terus didorong dan peningkatan infrastruktur dasar dan layanan publik terus disediakan untuk menstimulus investasi dan modal yang datang ke Kepulauan Mentawai sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan wilayah.

3. Ekspor Barang dan Jasa

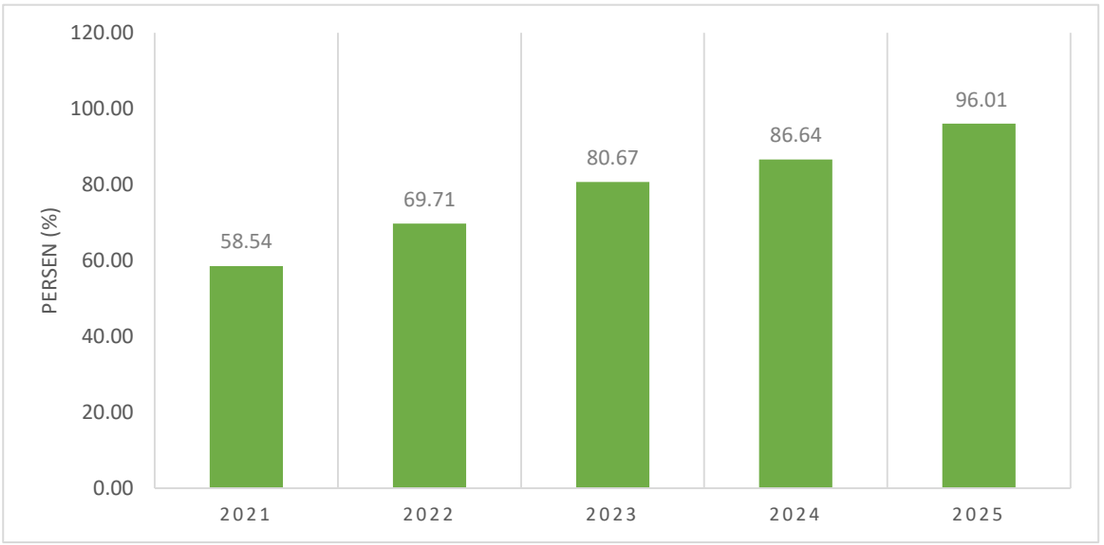
Komponen ekspor pada PDRB berdasarkan pengeluaran menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik kabupaten lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 2.133
Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 (%)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	58,54	69,71	80,67	86,64	96,01

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (diolah)

Gambar 2.61
Perkembangan Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB, 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (diolah)

Perkembangan kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang sangat konsisten. Pada tahun 2021 kontribusi ekspor tercatat sebesar 58,54 persen, kemudian meningkat menjadi 69,71 persen pada tahun 2022, 80,67 persen pada tahun 2023, 86,64 persen pada tahun 2024, hingga mencapai 96,01 persen pada tahun 2025, hampir mendekati seluruh kegiatan produksi daerah berorientasi keluar wilayah.

Peningkatan yang konsisten sepanjang lima tahun ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin terhubung dengan pasar di luar daerah. Namun, peningkatan ekspor barang dan jasa perlu didorong lebih lanjut pada hilirisasi produk, karena barang dan jasa yang diekspor masih didominasi komoditas sektor primer bahan mentah (raw material) yang belum memiliki nilai tambah signifikan bagi masyarakat lokal.

Transformasi ekonomi dari sektor primer menuju industri pengolahan atau jasa menjadi daya ungkit utama untuk mengakselerasi peningkatan perekonomian di Kepulauan Mentawai ke depan. Arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian skala kecil-menengah, penguatan rantai pasok dan logistik antar pulau, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk ekspor, serta pengembangan kawasan ekonomi baru melalui kerangka New Growth Center (NGC) Mentawai.

G. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

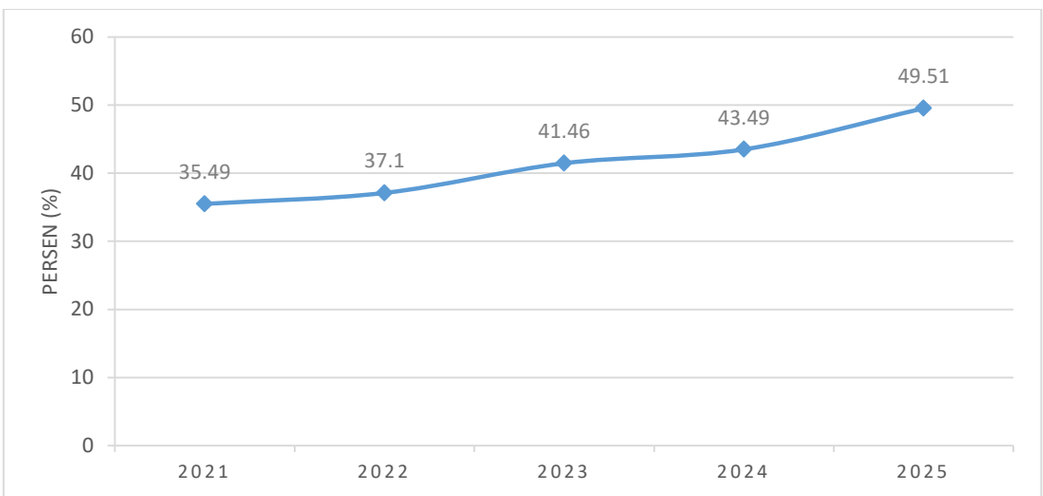
Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu pemerintah daerah juga harus menjamin bahwa rumah yang ditempati masyarakat sudah sesuai dengan struktur geografis diKepulauan Mentawai dikarenakan bahwa Kepulauan Mentawai adalah daerah rawan gempa. Sebuah rumah harus memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah yang terdiri dari ruang tidur atau ruang serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi. Secara umum, Proporsi Rumah Tangga yang memiliki hunian layak di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih rendah, namun capaiannya menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 persentase RT yang memiliki akses hunian layak sebesar 35,49 persen mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebesar 37,1 persen. Begitu juga tahun 2023 menjadi sebesar 41,46 persen, dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 43,49 persen, dan pada tahun 2025 mengalami meningkatan yaitu persen

Tabel 2.134
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	35,49	37,1	41,46	43,49	49.51

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2026

Gambar 2.62
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022-2026

2. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Pengukuran kemajuan dan kemandirian Desa selama ini salah satunya dilakukan melalui

Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman), Indeks Ketahanan Ekonomi (Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah), Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan (Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana).

Tabel 2.135
Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
IDM (Desa Mandiri)	3	3	3	3	3
IDM (Desa Maju)	5	9	10	10	9
IDM (Desa Berkembang)	22	20	22	24	22
IDM (Desa Tertinggal)	13	11	8	6	10
JUMLAH DESA	43	43	43	43	43

Sumber : Indeks Desa Membangun, 2025

Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana Tabel 2.50 menunjukkan bahwa tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kabupaten Mentawai sejak tahun 2018 dan telah terdapat 3 desa mandiri dengan 9 desa maju dan desa tertinggal sebanyak 10 desa pada tahun 2025.

H. Stabilitas Ekonomi Makro

7. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

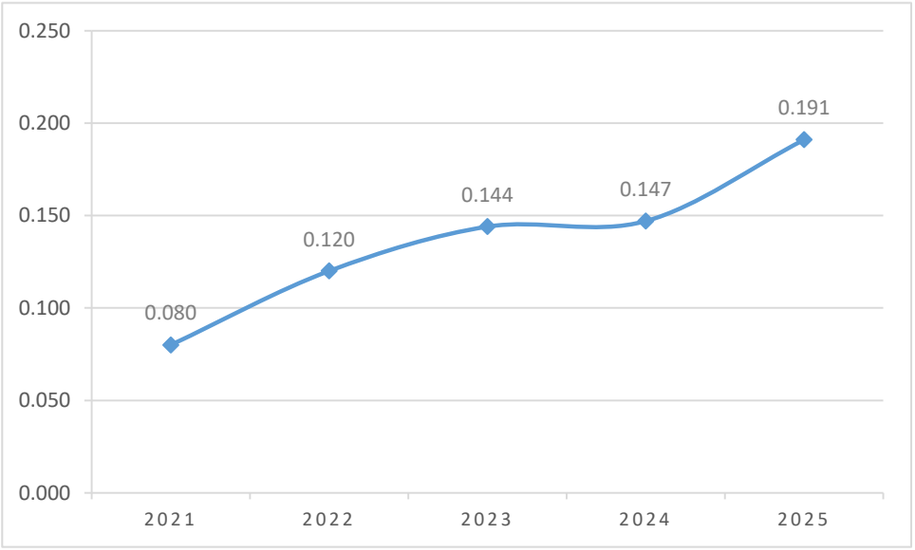
Pajak daerah yang dilihat sebagai salah satu instrumen sumber pendanaan pembangunan terus diupayakan memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan di daerah. Penguatan sistem pelaporan dan peningkatan potensi wajib pajak menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Hal ini menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi. Melalui pemberian kewenangan pengelolaan sumber daya pembiayaan daerah oleh pemerintah sehingga memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kontribusi sektor pajak dalam pembangunan menjadi indikator yang dapat dilihat sejauh mana memberikan kontribusi bagi pembangunan khususnya di daerah. Tabel 2.117 kontribusi pajak terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan walaupun dari sisi nilai masih relatif kecil.

Tabel 2.136
Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0,080	0,120	0,144	0,147	0,191

Sumber : LRA LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025, (diolah)

Gambar 2.63
Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, 2021-2025



Sumber: LRA LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai (diolah)

Kontribusi pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2021-2025, yaitu dari 0,080 persen pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,120 persen pada tahun 2022, 0,144 persen pada tahun 2023, 0,147 persen pada tahun 2024, hingga mencapai 0,191 persen pada tahun 2025, capaian tertinggi sepanjang periode pengamatan.

Meskipun tren peningkatan cukup baik, nilai kontribusi pajak daerah terhadap PDRB yang masih di bawah satu persen ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah dari sumber pajak masih relatif kecil dan belum mampu menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang nilainya senantiasa meningkat setiap tahun. Kondisi ini wajar mengingat basis ekonomi Kepulauan Mentawai yang masih didominasi sektor primer dengan tingkat formalitas usaha yang relatif rendah.

Restrukturisasi dan optimalisasi pajak daerah menjadi sangat penting agar pemerintah daerah dapat lebih mandiri secara fiskal sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada perluasan basis dan objek pajak daerah, digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak, intensifikasi penagihan piutang pajak, serta penguatan pengawasan dan pembinaan wajib pajak, khususnya pada sektor pariwisata dan usaha jasa yang terus berkembang.

2. Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB (%)

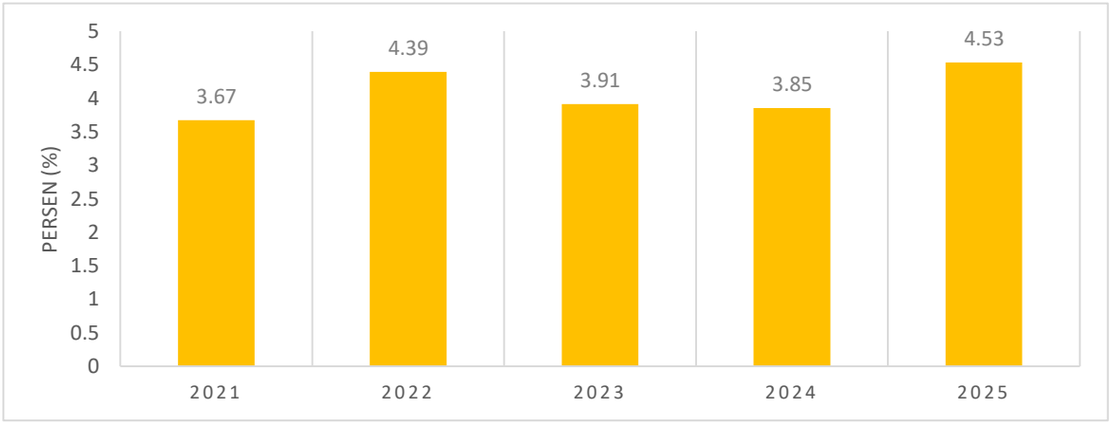
Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang dihimpun oleh bank melalui berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki. Indikator total dana pihak ketiga terhadap PDRB mencerminkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus menggambarkan kapasitas penghimpunan dana untuk pembiayaan kegiatan ekonomi di daerah.

Tabel 2.137
Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga / PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Total DPK/PDRB (%)	3,67	4,39	3,91	3,85	4,53

Sumber: OJK Provinsi Sumatera Barat

Gambar 2.64
Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB, 2021-2025



Sumber: OJK Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan dana pihak ketiga yang dapat dihimpun melalui badan usaha, khususnya bank, dalam bentuk giro, simpanan berjangka, dan tabungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif stabil pada kisaran 3,67 hingga 4,53 persen dari PDRB sepanjang periode 2021-2025. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,67 persen, meningkat menjadi 4,39 persen pada tahun 2022, sedikit menurun menjadi 3,91 persen pada tahun 2023 dan 3,85 persen pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 4,53 persen pada tahun 2025, capaian tertinggi sepanjang periode pengamatan.

Secara nominal, total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun meningkat dari Rp178,15 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp298,56 miliar pada tahun 2025, menunjukkan semakin membaiknya kepercayaan dan partisipasi masyarakat Kepulauan Mentawai dalam menyimpan dana di lembaga keuangan formal. Peningkatan ini turut mencerminkan perluasan akses layanan perbankan serta membaiknya kondisi ekonomi rumah tangga di daerah kepulauan.

Arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, perluasan jangkauan layanan perbankan dan lembaga keuangan non-bank ke kecamatan yang belum terlayani optimal, serta sinergi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar peningkatan dana pihak ketiga dapat berkorelasi dengan peningkatan penyaluran kredit produktif bagi UMKM lokal.

3. Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)

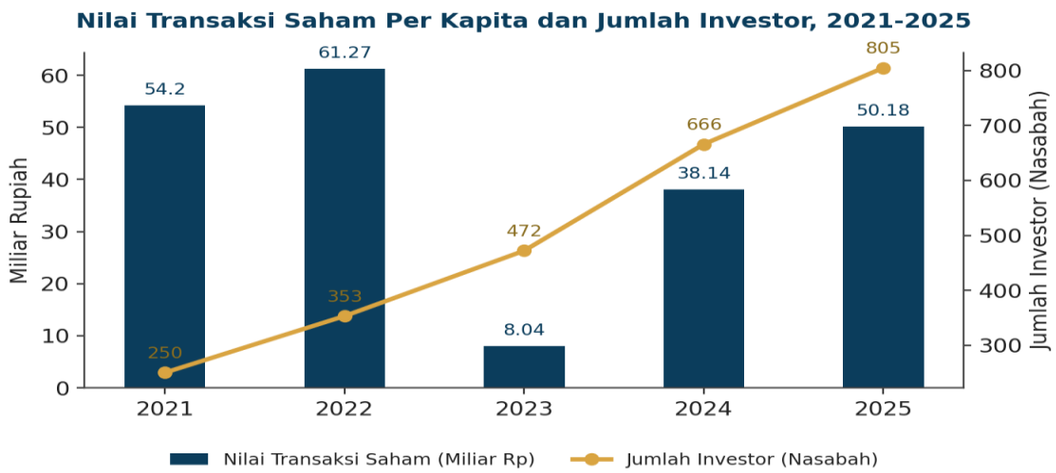
Nilai transaksi saham per kapita bukanlah istilah yang umum digunakan dalam konteks ekonomi atau pasar modal. Nilai Transaksi Saham adalah jumlah perdagangan dari seluruh saham yang tercatat di bursa. Untuk mengukur *size* dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan memengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan.

Tabel 2.138
Perkembangan Nilai Transaksi Saham Per Kapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Transaksi Saham Per Kapita	Miliar Rupiah	54,2	61,27	8,04	38,14	50,18
Jumlah Investor	Nasabah	250	353	472	666	805

Sumber: OJK Provinsi Sumatera Barat

Gambar 2.65
Perkembangan Nilai Transaksi Saham Per Kapita dan Jumlah Investor, 2021-2025



Sumber: OJK Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan nilai transaksi saham di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021 nilai transaksi tercatat sebesar 54,2 miliar rupiah, meningkat menjadi 61,27 miliar rupiah pada tahun 2022, sebelum mengalami penurunan tajam pada tahun 2023 menjadi hanya 8,04 miliar rupiah. Nilai transaksi kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 38,14 miliar rupiah dan berlanjut menjadi 50,18 miliar rupiah pada tahun 2025, mendekati capaian pada tahun 2021.

Berbeda dengan pola fluktuatif pada nilai transaksi, jumlah investor atau nasabah pasar modal justru menunjukkan tren peningkatan yang sangat konsisten sepanjang periode pengamatan, yaitu dari 250 nasabah pada tahun 2021 terus bertambah menjadi 353 nasabah pada tahun 2022, 472 nasabah pada tahun 2023, 666 nasabah pada tahun 2024, hingga mencapai 805 nasabah pada tahun 2025. Pertumbuhan jumlah investor yang konsisten ini

menunjukkan semakin meningkatnya minat dan literasi masyarakat Kepulauan Mentawai terhadap instrumen investasi pasar modal, meskipun nilai transaksi per kapita yang dihasilkan belum sepenuhnya stabil.

Arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada penguatan edukasi dan literasi pasar modal bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha, perluasan kemitraan dengan galeri investasi dan lembaga sekuritas, serta pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan aktivitas pasar modal daerah sebagai salah satu indikator kesehatan sektor keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. Total Kredit terhadap PDRB

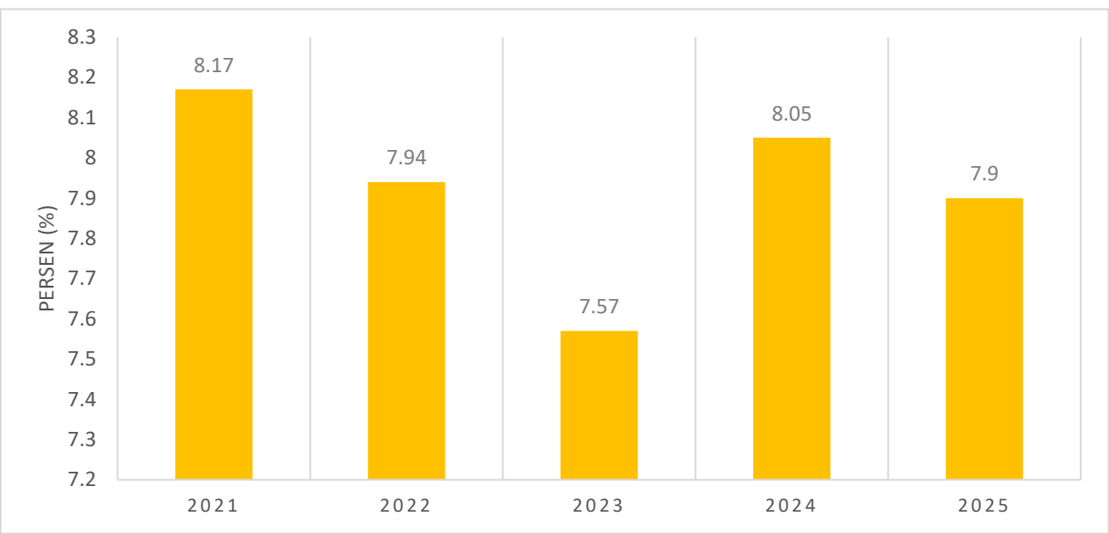
Pemberian dana kredit sebagai bagian dari inklusi keuangan memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi UMKM dan kelompok rentan, dengan memberikan akses pembiayaan dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Perbankan dalam penyaluran kredit memiliki peran yang penting dalam pembiayaan perekonomian nasional dan daerah sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha–usaha yang baru. Kredit dapat memberikan banyak manfaat bagi perekonomian dan masyarakat, di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan rasa aman untuk menyimpan uang.

Tabel 2.139
Perkembangan Nilai Total Kredit/ PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Total Kredit/PDRB (%)	Juta Rupiah	395.823/ 4.843.910	432.525/5 .445.7000	447.852/ 5.915.000	502.872/ 6.245.800	520.671/ 6.590.780
Persentase (%)		8,17	7,94	7,57	8,05	7,90

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka (diolah)

Gambar 2.65
Perkembangan Total Kredit terhadap PDRB, 2021-2025



Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka (diolah)

Total kredit yang disalurkan oleh badan usaha/bank terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif stabil pada kisaran 7,57 hingga 8,17 persen sepanjang periode 2021-2025. Pada tahun 2021 rasio tercatat sebesar 8,17 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 7,94 persen pada tahun 2022 dan 7,57 persen pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 8,05 persen pada tahun 2024 dan sedikit menurun menjadi 7,90 persen pada tahun 2025.

Secara nominal, total kredit yang disalurkan meningkat dari Rp395,82 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp520,67 miliar pada tahun 2025, menunjukkan bahwa meskipun rasio terhadap PDRB relatif stabil, nilai absolut penyaluran kredit terus tumbuh seiring pertumbuhan ekonomi daerah. Kredit membantu UMKM dan kelompok rentan mendapatkan modal kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, sekaligus menjadi indikasi menggeliatnya aktivitas ekonomi masyarakat Kepulauan Mentawai.

Edukasi literasi keuangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi perpaduan penting agar perputaran keuangan yang disalurkan pihak ketiga (bank dan lembaga keuangan) dapat berjalan lancar dan sehat, serta tidak menimbulkan persoalan kredit macet atau gagal bayar. Arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada perluasan akses kredit produktif bagi UMKM dan sektor perikanan-pertanian, penguatan pendampingan usaha, serta sinergi dengan program jaminan kredit daerah untuk menekan risiko kredit bermasalah.

5. Rasio PDRB Sektro Jasa Keuangan (%)

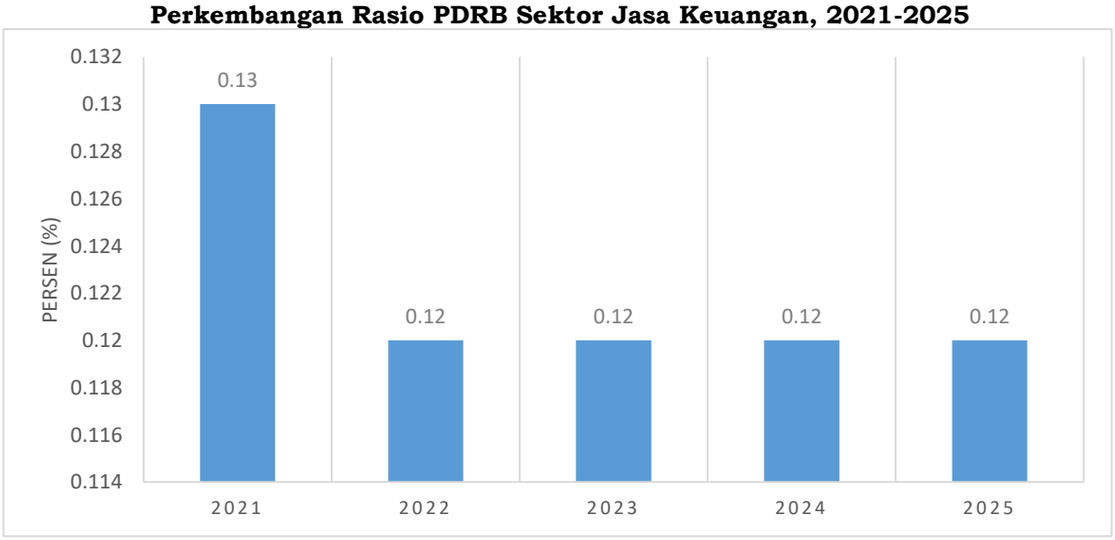
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan menunjukkan peran dan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap total perekonomian suatu wilayah, yang diukur berdasarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut dibandingkan dengan total PDRB wilayah. Sektor jasa keuangan meliputi aktivitas perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.140
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12

Sumber : BPS (diolah)

Gambar 2.67
Perkembangan Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan, 2021-2025



Sumber: BPS (diolah)

Rasio sektor jasa keuangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, mencakup bank, lembaga non-bank, dan lembaga keuangan lainnya/asuransi, menunjukkan capaian yang relatif stabil sepanjang periode 2021-2025. Pada tahun 2021 kontribusi sektor jasa keuangan tercatat sebesar 0,13 persen, kemudian relatif stabil pada angka 0,12 persen sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, tanpa mengalami peningkatan yang signifikan.

Stabilnya kontribusi sektor jasa keuangan pada kisaran 0,12 persen menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kepulauan Mentawai masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, sementara sektor jasa keuangan formal masih memiliki peran yang relatif terbatas dalam perekonomian daerah. Kondisi ini sejalan dengan masih rendahnya rasio dana pihak ketiga dan kredit terhadap PDRB sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan ke depan, arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada perluasan jaringan kantor layanan keuangan formal ke kecamatan yang belum terjangkau, pengembangan layanan keuangan digital (digital banking) untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil, serta penguatan sinergi antara sektor jasa keuangan dengan sektor riil unggulan daerah seperti perikanan, pariwisata, dan perkebunan.

6.Persentase Rumah Tangga Non Pangan

Persentase rumah tangga berdasarkan komposisi pengeluaran merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar proporsi pengeluaran non pangan, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep Hukum Engel, yang menyatakan bahwa ketika pendapatan meningkat, persentase pengeluaran untuk pangan akan menurun, sementara pengeluaran untuk kebutuhan non pangan cenderung meningkat.

Tabel 2.141
Struktur Pengeluaran Perkapita Masyarakat

Kategori	Persentase	Nilai (Rupiah/kapita/bulan)
Makanan	59,35%	712.164
Non-Makanan	40,65%	487.694

Pada tahun 2025, struktur pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai mengalami pergeseran pola konsumsi ke arah non pangan. Berdasarkan estimasi berbasis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), persentase rumah tangga dengan dominasi pengeluaran non pangan diperkirakan berada pada kisaran 40,65 persen. Angka ini mencerminkan bahwa sekitar dua perlima rumah tangga di wilayah ini telah memasuki fase konsumsi yang lebih beragam, tidak lagi sepenuhnya terfokus pada kebutuhan dasar pangan.

Meskipun demikian, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih didominasi oleh pengeluaran pangan, dengan proporsi mencapai sekitar 59,35 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum masih berada pada kategori berkembang. Tingginya porsi pengeluaran untuk pangan mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan rumah tangga masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makanan dan minuman.

Jika dibandingkan dengan daerah yang lebih maju, persentase rumah tangga dengan pengeluaran non pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih relatif lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendapatan masyarakat yang masih terbatas, struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor primer seperti pertanian dan perikanan, serta keterbatasan akses terhadap barang dan jasa non pangan. Selain itu, kondisi geografis kepulauan juga berpengaruh terhadap distribusi barang dan harga, yang pada akhirnya memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Namun demikian, terdapat kecenderungan peningkatan persentase rumah tangga non pangan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam kondisi ekonomi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan perumahan. Perubahan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum.

Dengan demikian, meskipun sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar, perkembangan persentase pengeluaran non pangan yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, diversifikasi ekonomi, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan non dasar guna mempercepat transformasi struktur konsumsi rumah tangga ke arah yang lebih sejahtera.

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seiring dengan tuntutan pengelolaan pemerintahan yang baik/*good governance,* maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan terhadap delapan area tersebut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Perwujudan birokrasi kelas dunia menjadi faktor determinan yang perlu bersama-sama kita akselerasi implementasinya, sehingga memastikan adanya perubahan *mindset* dan *cultural set* ASN sebagai komponen utama mesin birokrasi. Pembangunan sumber daya manusia ASN Unggul, yang antara lain dicirikan dengan SDM yang memiliki jiwa pekerja keras, bekerja *smart*, dinamis, adaptif dan agile serta terampil menguasai IT, memiliki kapabilitas dan integritas serta komitmen kerja yang tinggi. Penataan kelembagaan diperlukan adanya transformasi kelembagaan melalui penyederhanaan birokrasi, melalui pengintegrasian kelembagaan dan organisasi yang memiliki kemiripan tugas pokok dan fungsi, agar dapat "*berlari kencang*" dalam menjawab tantangan perubahan yang sedemikian cepat, guna meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan.

Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi keharusan dan syarat perlu untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif dan tepercaya. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan akan meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,

mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, memastikan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan inovasi, mencegah dan memberantas korupsi.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Salah satu capaian yang dapat dijadikan ukuran dalam daya saing daerah adalah ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung kegiatan sektor rill masyarakat. Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya.

a. Aksesibilitas

Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

a) Sarana jalan yang tersedia dalam kondisi baik sepanjang 163,19 km atau sekitar 14,78 persen dari total jalan yang tersedia, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 870,98 km atau sekitar 78,89 persen dari total panjang jalan tersedia.
b) Bandar Udara Mentawai yang memiliki landasan pacu 1.500 m melayani penerbangan domestik Padang-Rokot (Tuapejat) dengan waktu tempuh sekitar 40-45 menit. Pelayanan penerbangan Padang-Tuapejat telah memiliki rute penerbangan tetap (2 kali seminggu) dengan kapasitas pesawat 15 s/d 20 orang.
c) Pelabuhan Laut sebanyak 5 buah, yaitu Pelabuhan Tuapejat, Pelabuhan Sioban, Pelabuhan Sikakap, Pelabuhan Sikabaluan, Pelabuhan Maileppet.

Jumlah Penumpang naik-Turun di Pelabuhan tercatat pada tahun 2025 turun 122.849 orang naik 115.379 orang total jumlah 238.228 orang. Sedangkan jumlah Bongkar-Muat barang di Pelabuhan pada tahun 2025 Bongkar 32.920,70 ton Muat 13.067 ton dengan total jumlah 45987,70 ton.

Untuk pelayaran Padang-Mentawai dapat dilalui oleh kelima pelabuhan tersebut dengan rute sudah terjadwal. Kapal yang tersedia sebanyak 2 buah (KMP Gambolo, KMP Ambu-Ambu) dan 2 unit Mentawai Fast juga melayani pelayaran rute Padang-Mentawai. Pelayaran antar pulau dalam wilayah Kepulauan Mentawai tersedia kapal penyeberangan antar pulau antara lain KM Nade, KM Bakkat Benuang dengan rute sudah terjadwal.

b. Air Bersih

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih secara agregat hingga tahun 2025 mencapai 67,42 persen. Hal ini menjadi perhatian serius karena kebutuhan akan air bersih akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengembangkan SPAM untuk kawasan di 10 kecamatan dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

c. Listrik dan Komunikasi

Rasio elektrifikasi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 masih rendah sekitar 80,94% persen. Kendala utama adalah infrastruktur jalan yang masih sangat terbatas dan juga kemampuan ekonomi masyarakat calon pelanggan yang tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik. Jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebanyak 27.151 pelanggan. Untuk 4 wilayah antara lain Tuapejat, Sioban, Sikakap, Muara Siberut, Sikabaluan telah beroperasi PLN selama 24 jam, sedangkan di daerah

lain masih sekitar 10-12 jam/hari. Pengembangan sektor energi terutama energi baru dan terbarukan kedepan menjadi alternatif pilihan dalam rangka pembangunan energi yang berkelanjutan terutama dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23% hingga tahun 2025.

Layanan surat menyurat juga sudah tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain di Sikakap, Sioban, Tuapejat, Muara Siberut, Sikabaluan. Begitu juga untuk akses telekomunikasi sudah dapat melayani konsumen di 10 kecamatan.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk pelbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan pelbagai jenis kejahatan lainnya.

Tabel 2.142
Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

No	Jenis Kriminal	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kasus Narkoba	4	5	6	0	12
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	0	0	0	1	0
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	14	18	15	4	6
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	8	6	8	5	6
5.	Jumlah kasus Pencurian	20	13	17	9	7
6.	Jumlah kasus Penipuan	5	6	5	2	1
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	51	48	51	21	32
9.	Jumlah Penduduk	88.389	89.401	91.427	97.837	99.810
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	5,76	5,36	5,58	2,15	3,21

Sumber Data : Badan Kesbangpol

Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung stabilitas pembangunan daerah. Perkembangan kriminalitas di daerah selama Tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif baik dari sisi jumlah kasus maupun jenis tindak pidana.

Jumlah tindak kriminal pada tahun 2021 tercatat sebanyak 51 kasus, menurun menjadi 48 kasus pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 51 kasus pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 21 kasus, namun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 32 kasus. Penurunan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pengendalian keamanan, sedangkan kenaikan pada tahun 2025 menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan secara berkelanjutan.

Berdasarkan jenisnya, tindak kejahatan pencurian merupakan kasus yang paling dominan meskipun menunjukkan tren penurunan dari 20 kasus pada tahun 2021 menjadi 7 kasus pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem keamanan lingkungan dan partisipasi masyarakat.

Kasus kejahatan seksual mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 18 kasus, menurun pada tahun 2024 menjadi 4 kasus, dan meningkat kembali menjadi 6 kasus pada tahun 2025. Kondisi ini

menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

Kasus penganiayaan relatif stabil dengan kecenderungan menurun, sedangkan kasus penipuan mengalami penurunan signifikan dari 5 kasus pada tahun 2021 menjadi 1 kasus pada tahun 2025. Di sisi lain, kasus narkoba menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 4 kasus pada tahun 2021 menjadi 12 kasus pada tahun 2025, yang menjadi perhatian serius dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari 88.389 jiwa pada tahun 2021 menjadi 99.810 jiwa pada tahun 2025, angka kriminalitas (jumlah tindak kriminal per jumlah penduduk) menunjukkan tren menurun dari 5,76 pada tahun 2021 menjadi 3,21 pada tahun 2025, dengan capaian terendah pada tahun 2024 sebesar 2,15. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif tingkat kriminalitas masih dapat dikendalikan.

b. Layanan Perizinan

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian pelbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diorganisir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan aspirasi dan pengaduan atas pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyediakan beberapa saluran pengaduan yang dapat digunakan dalam menyampaikan keluhan atau aduan terhadap pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Berikut adalah saluran yang disediakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara elektronik :

1. Website : https://dpmptsp.mentawaikab.go.id
2. Fecebook : Dpmptsp Mentawai
3. Instagram : @dpmptspmtw
4. Twitter : @dpmptspMentawai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, semua pengurusan perizinan berusaha wajib melalui Online Single Submission (OSS). Pengurusan Perizinan melalui Sistem OSS dibagi berdasarkan resiko usaha, dimana resiko ini dinilai berdasarkan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

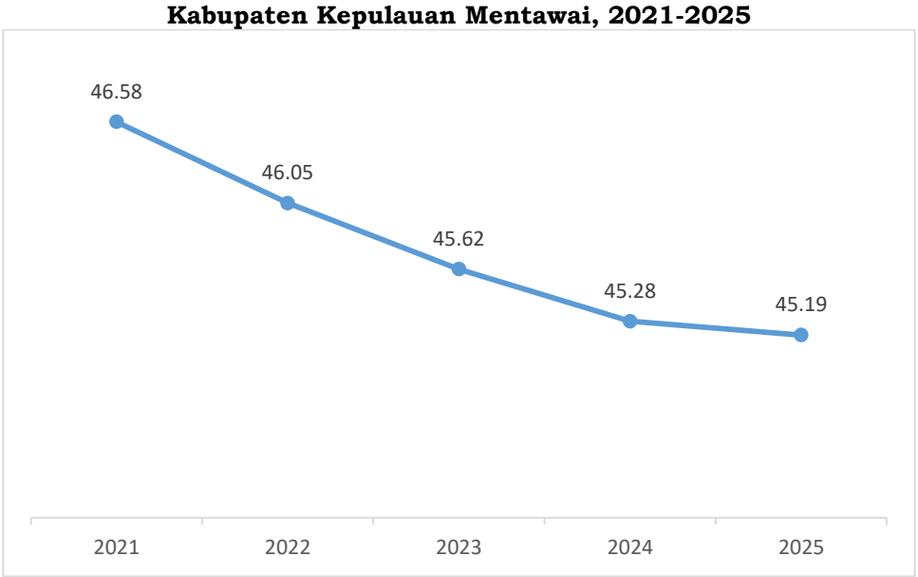
Daya saing sumber daya manusia (SDM) sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan karena SDM yang kompeten dan berkualitas menjadi fondasi utama untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. SDM yang kompeten memiliki kemampuan untuk bekerja lebih efisien dan menghasilkan *output* yang lebih berkualitas, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor. SDM yang kompeten berperan penting dalam mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

1. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun), yang mengindikasikan beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk produktif. Angka ketergantungan yang kecil (di bawah 50%) mengindikasikan terciptanya bonus demografi dalam suatu daerah. Angka beban ketergantungan (ABK) merupakan indikator adanya momentum bonus demografi (Parwodiwiyonom & Witono, 2022).

Angka beban ketergantungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren penurunan dari 46,58 persen pada tahun 2021 menjadi 45,19 persen pada tahun 2025, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban penduduk nonproduktif (anak-anak dan lansia) yang semakin menurun. publik. Kabupaten Kepulauan Mentawai masih memiliki peluang untuk memanfaatkan bonus demografi yang ada dengan memperkuat sektor tenaga kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendorong inovasi ekonomi, sehingga beban ketergantungan ini dapat dikelola dengan lebih efektif.

Angka Ketergantungan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2025 (diolah)

Berdasarkan data Tahun 2021–2025, komposisi penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa:
Persentase penduduk usia muda (0–14 tahun) relatif stabil, yaitu sebesar 26,31% pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 26,23% pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 26,99% pada tahun 2025. Persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) mengalami peningkatan dari 64,36% pada tahun 2021 menjadi 67,87% pada tahun 2024 dan 68,68% pada tahun 2025. Persentase penduduk usia lanjut (65+ tahun) menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap (tercermin dari peningkatan rasio dan struktur umur).

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang berada dalam fase potensi bonus demografi, dimana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok usia non-produktif.

Sementara itu, rasio ketergantungan menunjukkan tren menurun dari 46,58 pada tahun 2021 menjadi 45,19 pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia non-produktif semakin ringan.
Di Indonesia, puncak bonus demografi diprediksi akan terjadi pada 2030 mendatang. Oleh karena itu, suatu daerah berupaya untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusianya dengan harapan akan dapat mencetak calon calon pemimpin di masa depan supaya nantinya bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

2. *Kualitas Tenaga Kerja*

Kualitas kerja yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3. Tabel 2.72 menunjukkan adanya peningkatan rasio lulusan sarjana pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2.143
Jumlah Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas berijazah S1/S2/S3	5.494	5.590	5.753	6.693	6.597
Jumlah penduduk 15 tahun keatas	64 370	65.431	66.936	72.391	74,577
Persentase penduduk 15 tahun keatas berijazah S1/S2/S3 (1/2)	8,53	8,54	8,6	9,25	8,85

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai (diolah)

Persentase penduduk 15 tahun ke atas dengan kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S3 tahun 2021 sebesar 8,53 persen, mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebesar 8,54 persen. Begitu juga pada tahun 2022 persentase penduduk 15 tahun keatas berijazah S1/S2/S3 sebesar 8,54 persen dan pada tahun 2024 sebesar persentase penduduk 15 tahun keatas berijazah S1/S2/S3 mencapai 9,25 persen atau sekitar 6.693 jiwa. Ini menjadi modal pembangunan dalam ketersediaan sumber daya manusia untuk menjadi motor penggerak pembangunan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan, pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah dapat tercapai. Evaluasi pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan melalui pencapaian indikator kinerja RKPD yang sesuai/selaras dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

Tabel 2.144
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH TAHUN 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**																	
1	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**																	
	1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16495 orang	1.388.626.814.045	3299	277.725.362.809	1800	191.944.432.448	1800	174.550.155.126	100,00	90,94	5099	452.275.517.935	30,91	32,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 bulan	360.000.000	24	107.928.855	12	63.000.000	12	56.275.000	100,00	89,33	36	164.203.855	75,00	45,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	280 laporan	3.600.000.000	68	1.109.924.000	24	288.000.000	24	273.600.000	100,00	95,00	92	1.383.524.000	32,86	38,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**																	
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**																	
	1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	8 unit	12.000.000.000	5	5.494.788.400	1	1.437.205.050	1	1.436.205.050	100,00	99,93	6	6.930.993.450	75,00	57,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun pada sekolah dasar	20 sekolah	6.000.000.000	24	1.879.226.000	2	738.325.600	2	737.844.600	100,00	99,93	26	2.617.070.600	130,00	43,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	12 ruang	5.300.000.000	5	1.504.241.000	2	838.937.600	2	838.506.400	100,00	99,95	7	2.342.747.400	58,33	44,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	42 unit	16.000.000.000	19	5.183.874.200	8	2.908.236.800	8	2.817.028.840	100,00	96,86	27	8.000.903.040	64,29	50,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	20 unit	14.000.000.000	15	5.379.443.600	2	1.655.196.600	2	1.647.180.000	100,00	99,52	17	7.026.623.600	85,00	50,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15 paket	2.300.000.000	13	1.282.198.150	9	2.104.098.300	9	2.083.211.900	100,00	99,01	22	3.365.410.050	146,67	146,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Siswa	842.672.400			150	842.672.400	150	648.915.705	100,00	77,01	150	648.915.705	100,00	77,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Sekolah Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Sekolah Sekolah Dasar	880 guru	8.499.798.400	514	10.613.329.795	220	2.124.949.600	220	1.927.816.778	100,00	90,72	734	12.541.146.573	83,41	147,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Sekolah Dasar	Jumlah yang mengikuti pengembangan karir	800 orang	3.000.000.000	400	1.958.757.908	150	1.015.602.680	150	758.620.650	100,00	74,70	550	2.717.378.558	68,75	90,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	544 Sekolah	1.200.000.000	268	447.325.500	136	115.833.000	136	106.708.365	100,00	92,12	404	554.033.865	74,26	46,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	544 Sekolah	800.000.000	268	218.347.900	136	261.835.800	136	255.782.376	100,00	97,69	404	474.130.276	74,26	59,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136 Tenaga	188.906.400			136	188.906.400	136	172.590.900	100,00	91,36	136	172.590.900	100,00	91,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	221.255.400			1	221.255.400	1	175.277.195	100,00	79,22	1	175.277.195	100,00	79,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	147.009.000			1	147.009.000	1	20.333.200	100,00	13,83	1	20.333.200	100,00	13,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	257.385.400			1	257.385.400	1	162.144.000	100,00	63,00	1	162.144.000	100,00	63,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi Sekolah untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi Sekolah untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	47.614.000			1	47.614.000	1	45.494.000	100,00	95,55	1	45.494.000	100,00	95,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 ruang	15.000.000.000	13	10.275.792.132	4	2.857.205.400	4	2.852.187.965	100,00	99,82	17	13.127.980.097	113,33	87,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	56000 Siswa	1.200.000.000	26000	358.798.900	14000	102.191.600	14000	94.154.600	100,00	92,14	40000	452.953.500	71,43	37,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	42 ruang	18.000.000.000	26	8.412.371.700	11	4.294.882.833	11	4.250.247.615	100,00	98,96	37	12.662.619.315	88,10	70,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	45316 Siswa	62.391.504.000	26000	28.403.653.822	11329	15.597.876.000	11329	15.481.094.371	100,00	99,25	37329	43.884.748.193	82,37	70,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	600 paket	6.000.000.000	225	1.167.807.100	2	1.210.058.800	2	400.020.400	100,00	33,06	227	1.567.827.500	37,83	26,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**																	
	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 sekolah	3.730.796.000			4	3.730.796.000	4	3.523.865.985	100,00	94,45	4	3.523.865.985	133,33	94,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.08	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	2 Asrama	1.074.030.000			2	1.074.030.000	2	334.750.907	100,00	31,17	2	334.750.907	100,00	31,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 unit	9.300.000.000	5	3.227.319.926	5	784.800.100	5	744.934.517	100,00	94,92	10	3.972.254.443	111,11	42,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 ruang	5.000.000.000	5	3.335.205.233	4	4.443.572.830	4	3.010.815.152	100,00	67,76	9	6.346.020.385	112,50	126,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	9 paket	800.000.000	2	258.869.580	2	1.121.441.000	2	1.113.366.685	100,00	99,28	4	1.372.236.265	44,44	171,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6000 Siswa	30.657.500.000	12000	16.267.278.245	5114	7.664.375.000	5114	7.643.699.456	100,00	99,73	17114	23.910.977.701	285,23	77,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Siswa	142.969.400			100	142.969.400	100	122.329.400	100,00	85,56	100	122.329.400	100,00	85,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Sekolah Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Sekolah Sekolah Menengah Pertama	480 orang	9.000.000.000	292	6.146.188.300	120	741.800.000	120	684.550.000	100,00	92,28	412	6.830.738.300	85,83	75,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 orang	1.200.000.000	200	662.177.873	250	672.757.000	250	651.617.603	100,00	96,86	450	1.313.795.476	112,50	109,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan pengelolaan Dapodik dan Aneka Tunjangan	140 Sekolah	900.000.000	68	340.431.913	35	128.556.470	35	113.864.929	100,00	88,57	103	454.296.842	73,57	50,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34 sekolah	200.000.000	34	43.486.100	34	88.620.000	34	51.958.500	100,00	58,63	68	95.444.600	200,00	47,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	35 Peserta	404.203.000			35	404.203.000	35	344.468.606	100,00	85,22	35	344.468.606	100,00	85,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	102 Dokumen	500.000.000	34	140.434.400	12	301.406.600	12	263.021.500	100,00	87,26	46	403.455.900	45,10	80,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2.359.680.900			3	2.359.680.900	3	2.012.720.501	100,00	85,30	3	2.012.720.501	150,00	85,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Dididik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	140 Siswa	300.000.000	6000	150.625.946	35	144.879.800	35	96.211.085	100,00	66,41	6035	246.837.031	4310,71	82,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 paket	800.000.000	1	157.418.550	1	2.445.739.025	1	2.366.465.474	100,00	96,76	2	2.523.884.024	40,00	315,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**																	
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	9 unit	1.600.000.000	6	1.707.545.306	2	553.561.825	2	534.617.800	100,00	96,58	8	2.242.163.106	88,89	140,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	400 orang	450.000.000	200	343.143.400	30	202.963.100	30	199.558.000	100,00	98,32	230	542.701.400	57,50	120,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450 orang	800.000.000	250	375.233.700	100	625.113.200	100	324.526.784	100,00	51,91	350	699.760.484	77,78	87,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Sekolah	500.000.000	100	252.440.500	116	113.951.000	116	104.392.600	100,00	91,61	216	356.833.100	108,00	71,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	360 Sekolah	5.000.000.000	180	2.123.079.000	107	2.182.622.600	107	1.858.087.734	100,00	85,13	287	3.981.166.734	79,72	79,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	80 Dokumen	400.000.000	20	98.467.700	12	55.792.100	12	55.758.100	100,00	99,94	32	154.225.800	40,00	38,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Siswa	78.562.900			300	78.562.900	300	76.562.900	100,00	97,45	300	76.562.900	100,00	97,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**																	
	1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Sekolah Nonformal/Kesetaraan	220 orang	450.000.000	55	130.925.406	1	4.988.000	1	4.988.000	100,00	100,00	56	135.913.406	25,45	30,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	220 orang	200.000.000	110	295.204.500	50	73.696.700	50	72.862.005	100,00	98,87	160	368.066.505	72,73	184,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44 Sekolah	400.000.000	11	101.603.000	13	71.979.800	13	69.761.400	100,00	96,92	24	171.364.400	54,55	42,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	44 Sekolah	6.000.000.000	23	2.178.500.800	13	1.641.684.560	13	1.483.567.000	100,00	90,37	36	3.662.067.800	81,82	61,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	13.040.000			12	13.040.000	12	12.990.000	100,00	99,62	12	12.990.000	100,00	99,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**																	
	1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**																	
	1.01.03.2.02.06	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	2 Dokumen	326.454.800	1	235.198.200	1	91.256.600	1	77.292.200	100,00	84,70	2	312.490.400	100,00	95,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																	
4	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Belanja Transfer DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																	
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah		20 Dok	185.999.200	5	46.499.800	5	46.499.800	5	44.826.000	100,00	96,40	10	91.325.800	30,00	49,10	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1.900 Orang	180.521.555.400	1780	169.120.194.006	591	77.100.577.422	591	67.952.261.856	100,00	88,13	2371	237.072.455.862	4271,00	131,33	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya administrasi keuangan	2.586 Orang	24.469.061.000	1750	16.496.105.000	862	24.450.250	862	24.450.000	100,00	100,00	2612	16.520.555.000	5198,00	67,52	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	1.02.01.2.06.02	Penyediaan jasa layanan umum Kantor	Tersedianya layanan umum Perkantoran	150 Jenis	148.947.936	75	74.473.950	50	3.197.900.000	50	2.978.494.000	100,00	93,14	125	3.052.967.950	275,00	2049,69	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	153 jenis	223.778.400	50	95.503.070	43	28.425.400	43	28.168.800	100,00	99,10	93	123.671.870	246,00	55,27	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telekomunikasi berupa internet, informasi, sumberdaya air dan listrik	9 rekening	679.400.000	5	91.800.000	36	64.000.000	33	59.492.833	91,67	92,96	38	151.292.833	47,00	22,27	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terbayarnya Pajak kendaraan	144 unit	345.120.000	53	127.023.333	30	60.002.000	30	57.763.640	100,00	96,27	83	184.786.973	227,00	53,54	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Operasional atau Lapangan																	
5	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**																	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**																	
	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibangun	26 unit	2.500.000.000	22	2.014.092.000	24	2.014.092.000	24	1.624.921.370	100,00	80,68	46	3.639.013.370	72,00	145,56	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang direhabilitasi	30 Unit	4.500.000.000	15	150.000.000	5	2.824.062.146	5	2.336.854.989	100,00	82,75	20	2.486.854.989	50,00	55,26	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.12	Pengembangan rumah sakit	Jumlah Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan yang diadakan	1 unit	2.300.000.000	1	2.128.390.250	1	884.172.639	1	842.639.439	100,00	95,30	2	2.971.029.689	3,00	129,18	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan penunjang yang tersedia	20 Buah	1.100.000.000	17	7.213.561.620	2	285.113.400	2	267.162.200	100,00	93,70	19	7.480.723.820	39,00	680,07	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.16.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah jenis obat, vaksin ,bahan habis pakai yang tersedia	322 jenis	8.800.000.000	223	3.341.689.190	18	3.490.607.000	18	3.467.788.156	100,00	99,35	241	6.809.477.346	563,00	77,38	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	JenisBahan Habis Pakai yang tersedia	20 unit	6.918.644.220	18	6.818.644.220	15	488.121.900	15	447.283.585	100,00	91,63	33	7.265.927.805	53,00	105,02	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13000 orang	314.998.000	9500	274.038.462	2600	363.902.900	2565	342.076.000	98,65	94,00	12065	616.114.462	#####	195,59	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	13000 orang	1.590.235.000	9500	1.480.135.000	65	355.454.000	45	214.644.240	69,23	60,39	9545	1.694.779.240	#####	106,57	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	13000 orang	274.963.000	9500	264.963.000	2364	216.731.800	2000	203.079.918	84,60	93,70	11500	468.042.918	#####	170,22	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	13000 orang	249.999.925	9500	239.999.925	35	421.632.228	35	421.547.301	100,00	99,98	9535	661.547.226	#####	264,62	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	25 orang	250.000.000	10	100.000.000	5	17.360.800	5	17.200.800	100,00	99,08	15	117.200.800	40,00	46,88	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif mendpat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	75 orang	249.999.975	60	199.999.980	15	22.308.000	11	18.969.000	73,33	85,03	71	218.968.980	146,00	87,59	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang dengan lanjut usia mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	95 orang	95.000.000	80	80.000.000	5	204.486.000	5	194.316.487	100,00	95,03	85	274.316.487	180,00	288,75	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang dengan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	105 orang	121.153.830	95	109.615.370	65	27.220.000	65	26.303.000	100,00	96,63	160	135.918.370	265,00	112,19	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang dengan Diabetes mellitus medapat pelayanan Kesehatan sesuai standar	95 orang	120.000.000	60	60.000.000	50	21.894.800	50	21.200.800	100,00	96,83	110	81.200.800	205,00	67,67	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	20 orang	100.000.000	18	90.000.000	10	12.962.400	10	12.244.400	100,00	94,46	28	102.244.400	48,00	102,24	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	60 orang	300.000.000	40	200.000.000	30	34.292.200	30	31.384.029	100,00	91,52	70	231.384.029	130,00	77,13	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayana	25 orang	175.000.000	18	126.000.000	10	35.556.000	10	26.055.600	100,00	73,28	28	152.055.600	53,00	86,89	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Risiko Terinfeksi HIV	Kesehahtan sesuai standar																
	1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen yang tersedia	50 orang	161.220.000	30	161.220.000	25	175.205.400	25	169.372.318	100,00	96,67	55	330.592.318	105,00	205,06	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan sesuai standar	10 orang	250.000.000	5	100.000.000	15	431.420.700	15	429.152.944	100,00	99,47	20	529.152.944	30,00	211,66	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	2 Dokumen	100.000.000	2	100.000.000	1	32.164.400	1	32.164.400	100,00	100,00	3	132.164.400	5,00	132,16	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen yang tersedia	290 orang	700.000.000	200	633.402.500	9	457.350.000	9	424.457.635	100,00	92,81	209	1.057.860.135	499,00	151,12	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen yang tersedia	3500 Dokumen	134.520.172.500	105	3.690.701.200	100	6.119.856.800	60	5.337.895.887	60,00	87,22	165	9.028.597.087	3665,00	6,71	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen yang tersedia	20 Dokumen	1.906.212.433	15	1.506.212.433	12	424.758.250	10	356.621.300	83,33	83,96	25	1.862.833.733	45,00	97,72	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen yang tersedia	150 Dokumen	1.891.621.622	40	655.845.000	37	445.170.000	34	413.789.200	91,89	92,95	74	1.069.634.200	224,00	56,55	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.35	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah dokumen yang tersedia	2 Dokumen	29.561.800			5	29.561.800	4	25.987.600	80,00	87,91	4	25.987.600	6,00	87,91	Dinas Kesehatan	
6	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**																	
	1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																	
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersedia	140 Dokumen	140.000.000	132	132.030.000	75	610.929.000	70	580.956.125	93,33	95,09	202	712.986.125	342,00	509,28	Dinas Kesehatan	
7	**1.02.04.**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**																	
	1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**																	
	1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen yang tersedia	6 Dokumen	116.666.667	5	50.060.000	3	63.790.000	2	46.259.590	66,67	72,52	7	96.319.590	13,00	82,56	Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**																	
	1.02.04.2.03.01	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	Jumlah dokumen yang tersedia	60 Dokumen	120.000.000	46	97.744.900	25	113.092.000	25	108.709.890	100,00	96,13	71	206.454.790	131,00	172,05	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Industri Rumah Tangga																	
	1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**																	
	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah dokumen yang tersedia	10 Dokumen	151.060.000			10	151.060.000	10	141.681.250	100,00	93,79	10	141.681.250	20,00	93,79	Dinas Kesehatan	
8	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**																	
	1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																	
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen yang tersedia	75 Dokumen	250.000.000	56	189.605.000	15	154.403.800	15	153.145.800	100,00	99,19	71	342.750.800	146,00	137,10	Dinas Kesehatan	
9	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**																	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Mapaddegat	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	2.133.828.250			12	2.133.828.250	12	2.053.527.924	100,00	96,24	12	2.053.527.924	24,00	96,24	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sioban	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	1.602.477.000			12	1.602.477.000	12	1.588.398.914	100,00	99,12	12	1.588.398.914	24,00	99,12	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Bosua	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	966.011.174			12	966.011.174	11	713.857.228	93,33	73,90	11	713.857.228	23,20	73,90	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Ma Siberut	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	1.704.274.166			12	1.704.274.166	12	1.417.310.601	100,00	83,16	12	1.417.310.601	24,00	83,16	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Peipei	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	1.494.428.400			12	1.494.428.400	11	1.280.129.705	91,67	85,66	11	1.280.129.705	23,00	85,66	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Saibi	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	1.368.346.054			12	1.368.346.054	12	1.088.690.719	100,00	79,56	12	1.088.690.719	24,00	79,56	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Ma Sikabaluan	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	1.574.190.369			12	1.574.190.369	12	1.504.018.670	100,00	95,54	12	1.504.018.670	24,00	95,54	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Betaet	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	1.017.347.020			12	1.017.347.020	11	941.808.252	91,67	92,57	11	941.808.252	23,00	92,57	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Malakopa	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	1.328.480.270			12	1.328.480.270	12	1.299.976.105	100,00	97,85	12	1.299.976.105	24,00	97,85	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Bulasat	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	943.541.620			12	943.541.620	12	887.611.929	100,00	94,07	12	887.611.929	24,00	94,07	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sarereiket	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	790.135.352			12	790.135.352	12	738.951.809	100,00	93,52	12	738.951.809	24,00	93,52	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Simatalu	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	921.968.000			12	921.968.000	12	880.967.010	100,00	95,55	12	880.967.010	24,00	95,55	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sigapokna	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	1.231.230.650			12	1.231.230.650	12	1.083.514.459	100,00	88,00	12	1.083.514.459	24,00	88,00	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sikakap	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	1.874.743.997			12	1.874.743.997	12	1.807.526.997	100,00	96,41	12	1.807.526.997	24,00	96,41	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas Saumanganya	Jumlah dokumen yang tersedia	12 Dokumen	1.279.497.479			12	1.279.497.479	12	1.213.621.575	100,00	94,85	12	1.213.621.575	24,00	94,85	Dinas Kesehatan	
10	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	24 Jenis	90.208.000	12	55.762.500	6	25.817.087	6	25.802.000	100,00	99,94	18	81.564.500	75,00	90,42	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	80 Jenis	425.721.600	35	106.428.500	17	67.769.440	17	67.075.080	100,00	98,98	52	173.503.580	65,00	40,76	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedianya Bahan da Perlengkapan Kebersihan Kantor	136 Jenis	649.472.000	56	316.551.053	21	100.441.600	21	99.683.550	100,00	99,25	77	416.234.603	56,62	64,09	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	120 Jenis	180.000.000	60	89.999.400	25	25.685.600	25	25.684.800	100,00	100,00	85	115.684.200	70,83	64,27	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10 org/pkt	6.800.000	2	2.720.000	1	1.360.000	1	1.360.000	100,00	100,00	3	4.080.000	30,00	60,00	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedianya Tabung Gas	240 tabung	72.000.000	120	35.910.000	60	18.000.000	60	17.960.000	100,00	99,78	180	53.870.000	75,00	74,82	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedianya benda pos (matrai)	800 buah	8.000.000	400	4.000.000	320	3.200.000	320	3.200.000	100,00	100,00	720	7.200.000	90,00	90,00	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	1800 bungkus	84.600.000			540	21.600.000	60	6.198.000	11,11	28,69	60	6.198.000	3,33	7,33	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	128 Kali	497.088.000	54	246.850.129	24	52.398.000	24	52.384.100	100,00	99,97	78	299.234.229	60,94	60,20	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya rekening listrik dan air	12 Rekening	1.986.000.000	6	870.418.233	3	485.920.000	3	481.363.688	100,00	99,06	9	1.351.781.921	75,00	68,07	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Gaji pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452 Orang	12.624.346.080	226	6.043.927.614	113	2.252.830.000	113	2.177.746.027	100,00	96,67	339	8.221.673.641	75,00	65,13	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40 Unit	600.000.000	20	299.678.437	10	150.000.000	10	149.752.870	100,00	99,84	30	449.431.307	75,00	74,91	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedianya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60000 Liter	720.000.000	24109	306.072.000	10882	147.470.000	10882	132.163.750	100,00	89,62	34991	438.235.750	58,32	60,87	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
11	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**																	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**																	
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Vaksin dan BMHP	20 paket	6.574.658.616			12	2.558.252.009	12	2.557.751.754	100,00	99,98	12	2.557.751.754	60,00	38,90	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedianya Belanja Natura dan Pakan-Natura	232 Jenis	538.424.000			1	134.025.000	1	133.980.640	100,00	99,97	1	133.980.640	0,43	24,88	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedianya Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	120 Jenis	565.100.000			1	131.422.438	1	131.326.124	100,00	99,93	1	131.326.124	0,83	23,24	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Belanja Sewa Kendaraan	5 kali	150.000.000			1	30.000.000	1	30.000.000	100,00	100,00	1	30.000.000	20,00	20,00	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Belanja honorarium barang dan jasa	5 Keg	5.440.000			5	5.440.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terkalibrasinya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4 paket	480.000.000	2	236.647.000	1	120.000.000	1	119.380.489	100,00	99,48	3	356.027.489	75,00	74,17	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4 paket	560.000.000	2	269.990.850	1	140.000.000	1	137.232.630	100,00	98,02	3	407.223.480	75,00	72,72	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (ME)	2 paket	200.000.000	0	0	1	220.840.000	1	220.825.009	100,00	99,99	1	220.825.009	50,00	110,41	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (Genset)	2 unit	80.000.000	0	0	1	80.000.026	1	79.772.370	100,00	99,72	1	79.772.370	50,00	99,72	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (IPAL)	2 unit	100.000.000	0	0	1	50.000.000	1	49.977.750	100,00	99,96	1	49.977.750	50,00	49,98	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (WTP)	2 unit	150.000.000	0	0	1	150.000.000	1	149.334.238	100,00	99,56	1	149.334.238	50,00	99,56	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 org / pkt	3.400.000	1		1	3.400.000	1	3.400.000	100,00	100,00	2	3.400.000	200,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (Mesin Oksigen Central)	2 unit	400.000.000	0	0	1	180.279.000	1	180.257.895	100,00	99,99	1	180.257.895	50,00	45,06	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																	
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedinya Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	4 paket	100.000.000	2	50.000.000	1	25.000.000	0	0	0,00	0,00	2	50.000.000	50,00	50,00	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedianya Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	16 paket	288.000.000	3	42.000.000	3	78.000.000	3	78.000.000	100,00	100,00	6	120.000.000	37,50	41,67	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedianya Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	16 paket	1.380.000.000	1	306.000.000	1	306.240.000	1	306.138.000	100,00	99,97	2	612.138.000	12,50	44,36	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedianya Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	104 kali	769.213.736	0	0	1	24.000.000	1	22.500.000	100,00	93,75	1	22.500.000	0,96	2,93	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedianya Operasional Rumah Sakit	180 kali	989.481.284	30	284.952.473	80	307.936.000	80	307.921.099	100,00	100,00	110	592.873.572	61,11	59,92	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (AC)	100 unit	61.000.000	0	0	50	30.500.000	50	30.450.000	100,00	99,84	50	30.450.000	50,00	49,92	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	40 unit	29.200.000	0	0	20	32.850.000	20	30.100.500	100,00	91,63	20	30.100.500	50,00	103,08	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedinya Instalasi Gas Oksigen Ruangan	1 paket	200.000.000	0	0	1	200.000.000	1	199.356.000	100,00	99,68	1	199.356.000	100,00	99,68	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Belanja jasa Tenaga kesehatan	4 orang	360.144.000	4	0	4	360.144.000	4	360.144.000	100,00	100,00	8	360.144.000	200,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 orrg / pkt	6.440.000	0	0	2	6.440.000	1	1.513.000	50,00	23,49	1	1.513.000	100,00	23,49	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	1 paket	19.200.000	0	0	1	19.200.000	1	17.900.000	100,00	93,23	1	17.900.000	100,00	93,23	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Belanja Modal Alat Kantor Lainya	1 unit	9.929.100	1	0	1	9.929.100	1	9.929.100	100,00	100,00	2	9.929.100	200,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Belanja Modal Alat Studio	1 unit	5.000.000	1	0	1	5.000.000	1	4.000.000	100,00	80,00	2	4.000.000	200,00	80,00	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (belanja pemeliharaan gedung tempat kerja-bangunan) gedung -instalasi	1 unit	642.820.000	1	0	1	642.820.000	1	642.418.978	100,00	99,94	2	642.418.978	200,00	99,94	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
			Tersedianya Belanja Laboratorium	1 paket	145.588.000	0	0	1	63.134.000	1	60.550.500	100,00	95,91	1	60.550.500	100,00	41,59	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
12	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**																	
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**																	
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	436 orang	10.938.100.000	0	0	218	5.704.506.000	218	5.593.916.000	100,00	98,06	218	5.593.916.000	50,00	51,14	Rumah Sakit Umum Daerah KKM	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN**																	
13	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**																
	1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi keuangan perangkat daerah**																
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang	33.700.000.000	72	10.728.664.220	72	6.452.598.998	72	5.897.440.461	100,00	91,40	144	16.626.104.681	50,00	49,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya operasional penunjang kegiatan**																
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lap	511.800.000	12	173.543.466	12	91.680.000	12	91.472.000	100,00	99,77	24	265.015.466	66,67	51,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Lap	80.000.000		38.806.000	12	540.000.000	6	390.610.000	50,00	72,34	6	429.416.000	200,00	536,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
14	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Pengelolaan Sumber Air Baku**																
	1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Layanan Irigasi**																
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	8 km	2.800.000.000	4	6.157.288.219	4	392.734.300	1	392.734.300	27,78	100,00	5	6.550.022.519	57,50	233,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
15	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR**	**Persentase Rumah Tinggal Beakses Air Minum**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		MINUM																	
	1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Air Bersih Bagi Masyarakat**																
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	40 Unit	6.400.000.000	30	6.194.313.276	10	2.741.991.095	5	2.253.766.081	50,00	82,19	35	8.448.079.357	87,50	132,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2456 SR	11.751.743.661	450	8.346.380.761	183	3.405.362.900	100	2.745.334.810	54,64	80,62	550	11.091.715.571	22,39	94,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
16	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Rumah Tangga ramah lingkungan**																
	1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Sistim dan Pengelolaan Persampahan**																
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	5 dok	2.320.500.000	1	1.078.853.760	4	350.655.700	4	225.611.681	100,00	64,34	5	1.304.465.441	100,00	56,21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
17	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga Bersanitasi**																
	1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya MCK Individual bagi Masyarakat**																
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	12 RT	6.061.235.385	50	6.061.235.385	50	357.606.245	50	347.734.996	100,00	97,24	100	6.408.970.381	833,33	105,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
19	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Berkurangnya Titik genangan Air**																
	1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlindunginya lingkungan dari genangan air**																
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	914 M	1.670.500.000	800	1.288.332.900	4	228.123.000	4	212.292.600	100,00	93,06	804	1.500.625.500	87,96	89,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
20	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Lingkungan yang tertata**																
	1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Tesedianya Bangunan Gedung Daerah siap Pakai**																
	1.03.09.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	10.131.338.686	1	7.697.771.850	4	1.336.156.177	1	1.336.156.177	25,00	100,00	2	9.033.928.027	200,00	89,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kabupaten/Kota																	
	1.03.09.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	10 Dokumen	2.320.500.000	2	120.302.450	4	205.634.400	1	97.898.100	25,00	47,61	3	218.200.550	30,00	9,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
21	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan Mantap**																
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan penyelengaraan jalan Kabupaten**																
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	24 Dok	4.341.000.000	1	7.254.167.524	3	1.435.640.969	1	2.072.518.061	33,33	144,36	2	9.326.685.585	8,33	214,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	12 KM	25.641.525.000	7	47.426.608.053	7	17.893.061.728	3	12.274.876.479	43,73	68,60	10	59.701.484.532	82,17	232,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	20 KM	161.368.850.208	1	110.647.422.227	2	3.154.329.000	1	2.092.994.082	50,00	66,35	2	112.740.416.309	11,70	69,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	27.829.574.010	50	8.384.839.824	50	2.144.997.435	25	1.892.097.821	50,00	88,21	75	10.276.937.645	750,00	36,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	17 Km	1.403.986.000	1	1.263.649.000	4	140.337.000	1	116.554.600	25,00	83,05	2	1.380.203.600	11,76	98,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	17 KM	19.231.143.750	4	3.712.621.575	4	3.105.955.859	4	2.977.892.130	100,00	95,88	8	6.690.513.705	47,06	34,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
22	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Ketaatan Terhadap RTRW**																
	1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RTRW dan/atau RRTR Kabupaten yang ditetapkan dan Disosialisasikan**																
	1.03.12.2.01.06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	450.000.000		0	1	280.574.586	1	280.574.586	100,00	100,00	1	280.574.586	20,00	62,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																	
23	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	56 Bulan	8.827.712.532	8	1.786.122.971	21	2.299.062.034	21	1.977.259.980	100,00	86,00	29	3.763.382.951	51,79	42,63	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium PNS	4 Tahun	11.722.101.697	1	28.750.000	12	28.200.000	12	28.080.000	100,00	99,57	13	56.830.000	325,00	0,48	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	92.000.000	1	19.999.500	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00	100,00	2	20.999.500	50,00	22,83	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	16 Jenis	137.384.000	5	42.319.700	2	880.000	2	880.000	100,00	100,00	7	43.199.700	43,75	31,44	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	236.863.000	3	102.946.000	2	1.391.500	1	580.000	50,00	41,68	4	103.526.000	33,33	43,71	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	137.115.600	4	33.114.900	2	1.398.000	2	1.398.000	100,00	100,00	6	34.512.900	37,50	25,17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	409.942.000	1	111.874.158	12	186.590.000	12	185.641.304	100,00	99,49	13	297.515.462	325,00	72,58	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.08	**Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah**																	
	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	376.000.000	3	77.610.305	12	89.400.000	12	83.986.790	100,00	93,94	15	161.597.095	125,00	42,98	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Prgawai Kontrak	44 Laporan	1.930.758.000	13	372.922.600	12	262.000.000	12	234.400.000	100,00	89,47	25	607.322.600	56,82	31,46	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	216.180.000	4	35.013.000	5	19.000.000	4	18.397.739	80,00	96,83	8	53.410.739	40,00	24,71	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	20 Unit	191.228.000	3	29.371.114	10	14.799.000	10	12.261.568	100,00	82,85	13	41.632.682	65,00	21,77	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	52 Unit	123.950.000	4	26.810.000	7	4.750.000	7	4.712.000	100,00	99,20	11	31.522.000	21,15	25,43	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	80.104.000	0	0	7	80.104.000	7	79.660.125	100,00	99,45	7	79.660.125	700,00	99,45	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
24	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata**																
	1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah dilokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4 Dokumen	353.299.600	2	72.477.100	6	61.040.800	6	51.995.180	100,00	85,18	8	124.472.280	200,00	35,23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**																
	1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1060 Orang	691.336.000	10	55.221.000	250	31.156.000	6	23.636.000	2,40	75,86	16	78.857.000	1,51	11,41	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.4.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Becana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**																
	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota tang Terehabilitasi	65 Unit Rumah	2.682.092.000	7	1.313.869.200	90	1.942.248.400	90	1.935.966.400	100,00	99,68	97	3.249.835.600	149,23	121,17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	259 Unit Rumah	15.539.584.000	41	3.646.963.614	35	1.866.624.400	3	1.865.568.200	8,57	99,94	44	5.512.531.814	16,99	35,47	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Menigkatnya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten**																
	1.4.2.2.2	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4 Dokumen	352.240.000	1	20.837.000	3	21.692.000	3	21.692.000	100,00	100,00	4	42.529.000	100,00	12,07	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
25	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**																	
	1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Tertata**																
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	257 Unit Rumah	8.890.852.000	110	2.148.653.802	140	3.371.669.600	140	3.235.626.300	100,00	95,97	250	5.384.280.102	97,28	60,56	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.03.03	Kerja sama Perbaikan rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	4 Dokumen	713.400.000	1	85.931.664	6	35.440.400	6	12.778.000	100,00	36,05	7	98.709.664	175,00	13,84	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifiksi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4 Dokumen	739.320.800	1	131.277.163	6	11.216.400	6	3.156.400	100,00	28,14	7	134.433.563	175,00	18,18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
26	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**																	
	1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Meningkatnya Permukiman yang Didukung oleh PSU																
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	57 Lokasi	14.409.902.300	7	1.296.117.013	12	2.006.381.528	12	2.006.381.528	100,00	100,00	19	3.302.498.541	33,33	22,92	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
27	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	60 Org	6.343.289.120	30	3.033.464.344	30	3.309.824.776	30	3.139.551.477	100,00	94,86	60	6.173.015.821	100,00	97,32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola keuangan	6 Org	214.680.000	3	111.480.000	3	103.200.000	3	103.200.000	100,00	100,00	6	214.680.000	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	2 Paket	27.320.000	1	18.000.000	1	9.320.000	1	9.315.500	100,00	99,95	2	27.315.500	100,00	99,98	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1.05.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya isi ulang gas	2 Paket	34.420.000	1	9.120.000	1	25.300.000	1	19.701.500	100,00	77,87	2	28.821.500	100,00	83,73	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	8 Paket	93.286.400	4	62.790.000	4	30.496.400	6	29.689.000	150,00	97,35	10	92.479.000	125,00	99,13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	4 Paket	25.999.800	2	17.999.800	2	8.000.000	2	8.000.000	100,00	100,00	4	25.999.800	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24 Laporan	109.643.800	12	79.311.800	12	30.332.000	11	29.689.000	91,67	97,88	23	109.000.800	95,83	99,41	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, air,penambahan daya listrik	4 Rekening	48.720.000	2	24.720.000	2	24.000.000	2	20.794.904	100,00	86,65	4	45.514.904	100,00	93,42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Tenaga Kontrak	24 Laporan	4.098.472.000	12	2.378.472.000	12	1.720.000.000	12	1.584.078.261	100,00	92,10	24	3.962.550.261	100,00	96,68	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	2 Unit	53.400.000	1	30.400.000	1	23.000.000	1	22.992.000	100,00	99,97	2	53.392.000	100,00	99,99	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional	14 Unit	197.280.000	7	148.970.000	7	48.310.000	7	48.283.729	100,00	99,95	14	197.253.729	100,00	99,99	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	30 Unit	17.260.000	15	9.990.000	15	7.270.000	15	7.270.000	100,00	100,00	30	17.260.000	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
28	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUN**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**																	
	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan tertib	4 kasus	1.383.529.800	3	1.133.774.800	1	249.755.000	1	249.655.000	100,00	99,96	4	1.383.429.800	100,00	99,99	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan tertib	3 Laporan	294.504.800	2	202.429.000	1	92.075.800	1	89.935.599	100,00	97,68	3	292.364.599	100,00	99,27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**																	
	1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Meningkatnya pengetahuan aparatur	6 orang	57.720.000	3	44.412.000	3	13.308.000	3	12.623.000	100,00	94,85	6	57.035.000	100,00	98,81	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
29	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**																	
	1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**																	
	1.05.04.2.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pemadaman kebakaran	520 orang	1.095.815.300	20	189.731.600	500	906.083.700	40	889.368.818	8,00	98,16	60	1.079.100.418	11,54	98,47	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																	
30	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	400 Org	11.753.259.243	753	4.509.395.799	280	2.624.750.475	231	2.337.259.000	82,50	89,05	984	6.846.654.799	246,00	58,25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	864 Org	180.000.000	72	106.290.000	18	16.650.000	18	16.650.000	100,00	100,00	90	122.940.000	10,42	68,30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	27.500.000	4	5.500.000	50	2.891.000	50	2.871.000	100,00	99,31	54	8.371.000	360,00	30,44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan	40 Jenis	296.014.600	10	113.711.125	50	19.211.350	50	18.743.200	100,00	97,56	60	132.454.325	150,00	44,75	Badan Penanggulangan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			kantor															Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	24 Jenis	75.875.000	9	24.992.050	50	9.623.600	50	9.528.400	100,00	99,01	59	34.520.450	245,83	45,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	48 Bulan	39.990.000	17	18.500.000	50	3.105.000	49	3.100.000	98,00	99,84	66	21.600.000	137,50	54,01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 Kali	764.592.000	32	300.309.220	5	15.582.000	5	15.472.252	100,00	99,30	37	315.781.472	52,86	41,30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Jenis	291.000.000	15	93.472.822	2	55.740.000	2	55.079.182	100,00	98,81	17	148.552.004	141,67	51,05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	500 Org	4.299.624.000	732	2.068.897.863	444	771.900.000	444	596.400.000	100,00	77,26	1176	2.665.297.863	235,20	61,99	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas jabatan	8 Unit	280.406.250	7	115.114.935	3	27.615.900	3	27.429.658	100,00	99,33	10	142.544.593	125,00	50,84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional	64 Unit	1.080.629.750	23	233.692.078	4	125.541.250	4	124.501.524	100,00	99,17	27	358.193.602	42,19	33,15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksnanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	124.626.848	22	29.686.375	3	12.230.000	3	12.073.800	100,00	98,72	25	41.760.175	100,00	33,51	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
31	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**																	
	1.05.0.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**																	
	1.05.03.2.01.04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Org yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka lepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	400 Org	625.785.050	180	154.827.100	2	215.829.700	2	163.944.470	100,00	75,96	182	318.771.570	45,50	50,94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.0.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**																	
	1.05.03.2.02.16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	350 Org	484.252.350	200	272.663.052	6	1.000.000.000	6	778.043.243	100,00	77,80	206	1.050.706.295	58,86	216,97	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.0.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terhadap Bencana**																	
	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	2000 Org	1.190.865.000	1500	390.570.620	6	256.889.550	6	224.060.240	100,00	87,22	1506	614.630.860	75,30	51,61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4000 Org	664.705.000	1850	187.509.950	6	614.685.750	6	582.911.245	100,00	94,83	1856	770.421.195	46,40	115,90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**																	
	1.05.03.2.04.10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Provinsinyang dilegalkan	4 Dok	150.000.000	2	35.807.770	2	7.640.000	2	7.574.400	100,00	99,14	4	43.382.170	100,00	28,92	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.04	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman. Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota**																	
	1.05.03.2.04.10	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulanagan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Lainnya	3 Kec	9.948.496.662	1	6.098.857.962	2	3.849.638.700	2	3.849.620.700	100,00	100,00	3	9.948.478.662	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																	
32	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**																
	1.06.01.2.01	**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkt daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**																
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dok	111.042.856			2	724.800	2	724.800	100,00	100,00	2	724.800	25,00	0,65	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.01.2.02	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar**																
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Org	12.849.600.000	62	5.977.973.098	29	3.334.918.376	29	3.090.416.569	100,00	92,67	91	9.068.389.667	313,79	70,57	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dok	110.400.000	2	100.500.000	1	22.200.000	1	22.200.000	100,00	100,00	3	122.700.000	300,00	111,14	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.01.2.06	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor**																
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	18.000.000	2	19.160.000	1	2.056.000	1	2.055.000	100,00	99,95	3	21.215.000	75,00	117,86	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	127.000.000	14	70.036.630	2	6.030.000	2	6.030.000	100,00	100,00	16	76.066.630	400,00	59,89	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	16 Paket	210.000.000	17	121.282.850	6	25.695.420	6	25.693.600	100,00	99,99	23	146.976.450	143,75	69,99	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan	8 Paket	55.000.000	4	16.032.300	2	1.423.210	2	1.108.200	100,00	77,87	6	17.140.500	75,00	31,16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.01.206.07	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasai SKPD	4 Lap	425.000.000	2	337.981.033	1	37.054.700	1	36.001.925	100,00	97,16	3	373.982.958	75,00	88,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		Perlindungan Anak	
	1.06.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase Jasa pelayanan umum kantor dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar**																
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Lap	200.000.000	2	99.616.478	1	58.400.000	1	52.612.409	100,00	90,09	3	152.228.887	75,00	76,11	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Lap	2.518.848.000	2	935.400.641	1	277.000.000	1	256.550.000	100,00	92,62	3	1.191.950.641	75,00	47,32	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase barang milik daerah layak pakai**																
	1.06.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	4 Unit	56.100.525	2	67.425.526	1	2.000.000	0	0	0,00	0,00	2	67.425.526	50,00	120,19	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	80 Unit	35.000.000	11	57.816.237	1	37.870.000	1	33.817.265	100,00	89,30	12	91.633.502	15,00	261,81	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	35.000.000	44	51.898.000	12	6.500.000	12	6.055.000	100,00	93,15	56	57.953.000	466,67	165,58	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	12 Unit	52.000.000	4	147.240.030	2	35.000.000	2	35.000.000	100,00	100,00	6	182.240.030	50,00	350,46	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
33	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase penurunan PMKS**																
	1.06.02.2.01	**Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)**	**Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan**																
	1.06.02.2.01.02	Fasilitasi PemberdayaanSosial KAT	Persentase masyarakat KAT yang mendapatkan Fasilitas	400 Keluarga	200.000.000	75	43.179.325	75	55.488.000	75	52.909.000	100,00	95,35	150	96.088.325	37,50	48,04	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.02.2.03	**Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**	**Persentase PSKS yang dilatih**																
	1.06.02.2.03.03	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten	128 Keluarga	80.000.000	0	83.398.104	40	124.000.000	40	89.536.200	100,00	72,21	40	172.934.304	31,25	216,17	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
34	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran**																
	1.06.04.2.01	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		gelandangan pengemis dan masyarakat	**mendapatkan bantuan**																
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten	40 Org	40.000.000	5	240.350.688	50	150.000.000	50	137.199.800	100,00	91,47	55	377.550.488	137,50	943,88	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Org	40.000.000	5	240.350.688	5	82.153.600	4	75.880.550	80,00	92,36	9	316.231.238	22,50	790,58	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kab/kota	890 Org	1.490.994.294	500	980.994.294	390	510.000.000	358	509.117.172	91,79	99,83	858	1.490.111.466	96,40	99,94	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
35	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial telah menerima jaminan social**																
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**Persentase data fakir miskin yang valid**																
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	85900 Keluarga	240.000.000	500	448.612.460	200	180.934.000	99	86.400.900	49,50	47,75	599	535.013.360	0,70	222,92	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
36	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran**																
	1.06.06.2.01	**perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota**	**Persentase korban bencana mendapatkan bantuan**																
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurart (Pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	400 Org	100.000.000	0	0	325	250.000.000	325	210.870.901	100,00	84,35	325	210.870.901	81,25	210,87	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.06.06.2.01.03	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kab/kota	125 orang	412.538.900	25	247.538.900	100	165.000.000	100	133.393.300	100,00	80,84	125	380.932.200	100,00	92,34	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
	2.07	**URUSAN PEMERITAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																	
37	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja**																
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan**																
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	48 orang	1.186.270.800	16	552.135.375	32	799.999.990	32	758.844.084	100,00	94,86	48	1.310.979.459	100,00	110,51	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan pelatihan kerja	2 Unit	1.000.000.000	0	0	1	500.000.000	0	46.560.000	0,00	9,31	0	46.560.000	0,00	4,66	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
38	**2.07.02**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja**																
	2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dlakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha**															
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Dokumen	509.000.000	10	48.557.600	12	25.304.300	12	16.112.200	100,00	63,67	22	64.669.800	550,00	12,71	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																	
39	**2..08.02**	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase OPD yang menggunakan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran**																
			Persentase peran serta perempuan dibidang politik, ekonomi, social, budaya																
	2.08.02.2.01	**Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota**	**Jumlah OPD yang Mengikuti pelembagaan PUG**																
	2.08.02.2.01.06	Advokasi kebijakan dan pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten	89 OPD	40.000.000	36	153.817.700	30	10.980.000	10	557.020	33,33	5,07	46	154.374.720	51,69	385,94	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.02.2.03	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota**	**Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan**																
	2.08.02.2.03.02	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	120 Org	60.000.000	220	1.022.138.940	30	299.999.000	30	269.585.802	100,00	89,86	250	1.291.724.742	208,33	2152,87	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
40	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**																
	2.08.03.2.02	**Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota**	**Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Layanan	80.000.000	9	109.299.000	2	37.167.100	2	36.819.450	100,00	99,06	11	146.118.450	275,00	182,65	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
41	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah Pencanangan Kecamatan Layak Anak**																
	2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota**	**Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHA**																
	2.08.06.2.01.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat AdvokasKebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Organisasi	400.000.000	6	225.742.750	3	170.000.000	3	165.558.600	100,00	97,39	9	391.301.350	128,57	97,83	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
42	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan**																
	2.08.07.2.01	**Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota**	**Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak**																
	2.08.07.2.01.04	Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan program/pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA	72 OPD	200.000.000	31	137.018.443	30	170.000.000	30	168.922.100	100,00	99,37	61	305.940.543	84,72	152,97	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.07.2.02	**Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi**																
	2.08.07.2.02.02	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	4 Layanan	80.000.000	32	544.449.233	7	86.220.051	7	86.094.220	100,00	99,85	39	630.543.453	975,00	788,18	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																	
43	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**																	
	2.09.03.2.02	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainya sesuai dengan Kebutuhan Daerah kabupaten/ Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan harga Pangan**																	
	2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis sumber daya lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber daya lokal	11 Kelompok	1.956.902.600	0	61.750.000	12	825.925.000	12	807.246.500	100,00	97,74	12	868.996.500	109,09	44,41	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	adanya Stok Pangan	50 ton	725.000.000	18	322.140.604	20	289.872.000	20	262.017.800	100,00	90,39	38	584.158.404	76,36	80,57	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
44	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**																
	2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Mengetahui Tingkat Pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah di tetapkan dengan	5 laporan	600.000.000	1	20.874.600	1	36.425.000	1	36.425.000	100,00	100,00	2	57.299.600	40,00	9,55	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**																
	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Meningkatnya kesejateraan ASN	324 Orang	31.907.775.755	151	13.853.290.803	72	7.627.453.237	72	7.041.674.548	100,00	92,32	223	20.894.965.351	68,83	65,49	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	227.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Meningkatnya kesejateraan ASN	12 orang	300.000.000	10	27.400.000	2	28.080.000	2	28.080.000	100,00	100,00	12	55.480.000	100,00	18,49	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**																
	2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	meningkatnya informasi/wawasan ASN	28 Dokumen	59.000.000	21	23.985.000	7	5.250.000	1	5.200.000	15,00	99,05	22	29.185.000	78,75	49,47	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi dan singronisasi program dan kegiatan antar kab./propinsi dan pemerintah pusat	248 laporan	800.000.000	60	245.170.218	12	32.930.000	12	32.930.000	100,00	100,00	72	278.100.218	29,03	34,76	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**																
	2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	lancarnya administrasi perkantoran	48 laporan	332.500.000	24	153.128.160	12	87.400.000	12	65.342.514	100,00	74,76	36	218.470.674	75,00	65,71	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																	
45	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**																	
	2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	104 Orang	11.425.862.026	52	4.412.959.669	20	2.527.855.232	20	2.299.965.824	100,00	90,98	72	6.712.925.493	69,23	58,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2 Dokumen	20.400.000	1	20.350.000	1	107.640.000	1	103.170.000	100,00	95,85	2	123.520.000	100,00	605,49	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
46	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**																	
	2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	28 Paket	47.360.000	13	20.542.937	6	5.357.000	6	5.357.000	100,00	100,00	19	25.899.937	67,86	54,69	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	188 Paket	664.000.000	94	355.440.144	47	35.839.900	47	35.453.500	100,00	98,92	141	390.893.644	75,00	58,87	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	392.000.000	100	211.301.977	50	39.030.000	50	38.727.100	100,00	99,22	150	250.029.077	75,00	63,78	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
47	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**																	
	2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	200.000.000	2	63.504.465	1	32.000.000	1	30.171.790	100,00	94,29	3	93.676.255	75,00	46,84	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44 Laporan	1.394.784.000	12	1.355.568.945	1	546.300.000	1	545.306.064	100,00	99,82	13	1.900.875.009	29,55	136,28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
48	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**																	
	2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	64 Unit	216.000.000	32	129.767.825	16	70.594.150	16	70.555.223	100,00	99,94	48	200.323.048	75,00	92,74	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara, Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	748.112.828	20	615.312.439	10	79.390.000	10	79.353.139	100,00	99,95	30	694.665.578	75,00	92,86	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
49	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**																	
	2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**																	
	2.11.03.2.01.06	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut yang di susun	2 Laporan	2.083.276.900			2	1.896.661.525	2	1.824.139.904	100,00	96,18	2	1.824.139.904	100,00	87,56	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
50	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**																	
	2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
	2.11.06.2.01.09	pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dan peraturan perundang undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	800.000.000	2	174.537.764	1	7.906.800	1	5.188.800	100,00	65,62	3	179.726.564	75,00	22,47	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
51	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**																	
	2.11.08.2.01	**penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota**																	
	2.11.08.2.01.02	pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli lingkungan hidup	4 Dokumen	574.349.876	4	318.108.932	1	500.000.000	1	434.494.423	100,00	86,90	5	752.603.355	125,00	131,04	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.08.2.01.05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/ Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok Masyarakat	jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komonitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait LLPH	25 lembaga	286.451.500			25	174.339.300	25	125.311.400	100,00	71,88	25	125.311.400	100,00	43,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
52	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**																	
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**																	
	2.11.11.2.01.07	penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/ SPA kabupaten/ kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemprosesan Akhir	32 unit	4.500.000.000	8	479.379.696	84	4.483.137.300	84	4.373.071.818	100,00	97,54	92	4.852.451.514	287,50	107,83	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.11.2.01.0012	penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	78.036 ton	1.000.000.000	34	126.486.250	9843	256.881.390	1368	256.006.718	13,90	99,66	1402	382.492.968	1,80	38,25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																	
53	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Pegawai Negeri	136 Orang	14.706.499.235	24	2.988.763.079	34	2.772.439.532	34	4.001.775.946	100,00	144,34	58	6.990.539.025	42,65	47,53	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan administrasi pelaksanan tugas ASN	terbayarnya honorarium PPK,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang	12 Dok	106.718.000	3	36.320.000	3	26.679.500	3	26.400.000	100,00	98,95	6	62.720.000	50,00	58,77	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.01.2.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	2.12.01.2.02.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya komponen listrik atau sarana penerangan	10 Paket	38.750.000	17	32.422.000	17	6.832.500	13	6.832.500	73,53	100,00	30	39.254.500	295,00	101,30	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	2.12.01.2.02.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	terlasaksananya atk dan makan minum pegawai, kebersihan	15 macam	350.000.000	4	126.830.600	4	112.012.053	4	111.268.979	100,00	99,34	8	238.099.579	53,33	68,03	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	2.12.01.2.02.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya cetak dan penggandaan	10 jenis	234.500.000	2	74.999.900	1	44.629.800	1	44.629.800	50,00	100,00	3	119.629.700	30,00	51,01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	2.12.01.2.02.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	45 jenis	9.600.000	2	14.400.000	2	7.600.000	1	7.200.000	25,00	94,74	3	21.600.000	6,67	225,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	2.12.01.2.02.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	terlaksananya rapat koordinasi antar skpd	60 kali	185.960.000	12	68.278.000	12	48.713.600	12	48.713.600	100,00	100,00	24	116.991.600	40,00	62,91	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	2.12.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening air dan listrik	10 jenis	117.600.000	2	70.000.000	2	78.000.000	1	73.928.181	50,00	94,78	3	143.928.181	30,00	122,39	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	terbayarnya gji pegawai kontrak	270 bulan	4.734.000.000	54	919.416.000	56	788.728.000	56	788.728.000	99,11	100,00	110	1.708.144.000	40,56	36,08	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	2.12.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	25 unit	224.500.000	1	58.987.500	1	31.830.000	1	29.300.129	100,00	92,05	2	88.287.629	8,00	39,33	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
54	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**																	
	2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**																	
	2.12.02.2.01.04	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	7 jenis	1.720.906.250	4	329.518.000	4	100.000.000	4	63.775.200	100,00	63,78	8	393.293.200	114,29	22,85	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
55	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**																	
	2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**																	
	2.12.03.2.01.02	bintek pencatatan sipil	meningkatnya masyarakat memiliki dok pencatatan sipil	300 jenis	2.500.000.000	5	170.436.000	4	765.011.800	3	544.304.305	75,00	71,15	8	714.740.305	2,67	28,59	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
57	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**																	
	2.12.05.2.01.02	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain		100 buku	100.000.000	100	24.475.900	50	5.994.000	9	860.000	18,00	14,35	109	25.335.900	109,00	25,34	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																	
58	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																	
	2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	122.486.000	1	43.353.080	1	8.650.000	1	8.235.000	100,00	95,20	2	51.588.080	66,67	42,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang Dibayarkan	48 Bulan	13.225.212.619	24	5.561.086.874	25	3.397.497.248	25	3.234.806.187	100,00	95,21	49	8.795.893.061	102,08	66,51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dok	187.440.000	24	48.600.000	14	22.200.000	14	22.200.000	100,00	100,00	38	70.800.000	79,17	37,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.01.2.06	**Administrasi umum Perangkat Daerah**																	
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	102.400.000	2	12.774.500	1	4.634.500	1	4.574.500	100,00	98,71	3	17.349.000	75,00	16,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Bulan	270.908.348	24	174.889.428	12	20.917.000	8	20.911.000	66,67	99,97	32	195.800.428	66,67	72,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Bulan	108.519.300	24	58.651.880	12	10.083.754	8	9.793.000	66,67	97,12	32	68.444.880	66,67	63,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.01.2.06.09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilakukan	48 Bulan	332.133.000	24	216.942.643	12	22.170.000	8	22.170.000	66,67	100,00	32	239.112.643	66,67	71,99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Bulan	182.600.000	24	55.889.553	12	33.000.000	9	26.074.482	75,00	79,01	33	81.964.035	68,75	44,89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Bulan	5.846.696.000	24	2.722.441.462	12	725.800.000	9	694.374.109	75,00	95,67	33	3.416.815.571	68,75	58,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	26.696.500			12	13.821.000	5	13.821.000	41,67	100,00	5	13.821.000	250,00	51,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Bulan	132.900.000	24	119.465.340	12	15.450.000	1	14.155.000	8,33	91,62	25	133.620.340	52,08	100,54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
59	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**																	
	2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**																	
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangannya	3 dok	347.119.000	23	47.374.157	5	50.772.600	5	43.224.600	100,00	85,13	28	90.598.757	933,33	26,10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.13.04.2.01.05	Pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	3 dok	240.608.000	3	45.425.200	3	20.326.000	3	19.530.600	100,00	96,09	6	64.955.800	200,00	27,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Hasil Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	3 dok	242.285.000	1	5.364.700	6	21.303.600	6	20.348.400	100,00	95,52	7	25.713.100	233,33	10,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa	27 kali	64.973.400	5	23.001.800	3	9.503.800	3	8.973.800	100,00	94,42	8	31.975.600	29,63	49,21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang Dilakukan	16 dok	219.996.000	6	188.231.140	1	4.021.000	1	1.915.000	100,00	47,62	7	190.146.140	43,75	86,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
60	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**																	
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Mayarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota**																	
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,nLPM dan Karang Taruna), Kembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Kembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yg dilakukan	9 kali	334.991.000	3	84.622.700	10	750.000.000	10	683.475.640	100,00	91,13	13	768.098.340	144,44	229,29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong	1 kali	150.000.000			1	150.000.000	1	143.703.500	100,00	95,80	1	143.703.500	100,00	95,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggara gerakan pemberdayaan masyarakat dan	Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang	32 kali	1.849.029.000	13	1.089.609.409	3	231.692.215	3	227.470.235	100,00	98,18	16	1.317.079.644	50,00	71,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		kesejahteraan keluarga	Dilakukan															Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																	
61	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**																	
	2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten**																	
	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	48 lap	174.100.000	15	27.942.000	10	54.600.000	3	24.600.000	30,00	45,05	18	52.542.000	37,50	30,18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	150 lap	361.000.000	38	47.354.133	38	42.000.000	5	39.763.471	13,16	94,67	43	87.117.604	28,67	24,13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
62	**2.14.02**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**																	
	2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearufan Budaya Lokal**																	
	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kabupaten	16 kali	590.998.000	8	134.334.000	5	82.916.000	2	49.418.000	40,00	59,60	10	183.752.000	62,50	31,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK/Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya sosialisasi program KKBPK melalui media cetak dan elektronik	20 Kali	509.999.800	6	216.601.807	2	30.534.600	2	23.033.600	100,00	75,43	8	239.635.407	40,00	46,99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK / Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya	Jumlah Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang Dilakukan	130 Kali	715.385.000	59	251.665.100	20	81.830.000	2	50.000.000	10,00	61,10	61	301.665.100	46,92	42,17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK/Bangga Kencana	Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang Dilakukan	48 Bulan	980.482.000	20	441.109.500	20	354.704.850	5	217.090.600	25,00	61,20	25	658.200.100	52,08	67,13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		Berencana	
	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Audit kasus stunting	8 Kali	613.579.900	4	196.304.100	2	59.999.600	1	46.719.000	50,00	77,87	5	243.023.100	62,50	39,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**																	
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	60 Kali	900.481.000	12	279.638.000	12	236.352.000	2	84.014.000	16,67	35,55	14	363.652.000	23,33	40,38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang Dilakukan	60 puskesmas	42.111.899	6	4.639.000	10	13.500.000	0	0	0,00	0,00	6	4.639.000	10,00	11,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB**																	
	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terlaksananya rapat penguatan kampung KB	4 kali	20.352.000	1	2.910.000	1	3.404.000	0	0	0,00	0,00	1	2.910.000	25,00	14,30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK/Bangga Kencana di kampung KB	Pembinaan POKJA dan POKTAN di Kampung KB	40 Kali	1.200.992.000	15	234.206.300	10	168.324.000	3	84.450.000	30,00	50,17	18	318.656.300	45,00	26,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.04.05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Tersedianya dapur sehat dalam penanganan kasus stunting	5 Unit	59.631.650			5	59.631.650	3	15.134.500	60,00	25,38	3	15.134.500	60,00	25,38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
63	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**																	
	2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**																	
	2.14.04.2.02.02	Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Terdistribusinya BKB Kit Stunting Sebagai Sarana Edukasi untuk Balita dan Orang Tua	120 Set	1.270.000.000	51	643.626.000	10	91.000.000	10	83.229.997	100,00	91,46	61	726.855.997	50,83	57,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**																	
	2.14.04.2.02.05	Pemantauan Data dan informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Calom Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Batita	Penginputan Data Pendampingan Catin, Bumil, Bufas, Balita di Aplikas ELSIMIL	156 TPK	469.000.000	42	120.600.000	50	156.000.000	40	135.000.000	80,00	86,54	82	255.600.000	52,56	54,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Calom Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Batita	Pendampingan Terhadap keluarga Beresiko Stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)	156 TPK	515.900.000	42	118.500.000	30	187.200.000	20	135.000.000	66,67	72,12	62	253.500.000	39,74	49,14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																	
64	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Presentase Peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah**																
	2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	835 Peg	994.450.000	668	795.560.000	57	198.890.000	57	198.400.000	100,00	99,75	725	993.960.000	86,83	99,95	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah barang yang disediakan**																
	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75 Jenis	194.725.000	60	155.780.000	15	38.945.000	15	38.945.000	100,00	100,00	75	194.725.000	100,00	100,00	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	150 Jenis	40.345.000	120	32.276.000	8	8.069.000	7	8.069.000	87,50	100,00	127	40.345.000	84,67	100,00	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	202 Jenis	86.274.500	193	172.396.400	35	112.439.200	35	112.439.200	100,00	100,00	228	284.835.600	112,87	330,15	Dinas Perhubungan	
			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	2831 Kotak	152.274.500	950	107.462.900	820	66.202.000	200	66.202.000	24,39	100,00	1150	173.664.900	40,62	114,05	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	35 jenis	390.549.000	32	312.439.200	8	78.109.800	8	78.109.800	100,00	100,00	40	390.549.000	114,29	100,00	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	21 Jenis	68.000.000	8	53.000.000	10	13.000.000	10	13.000.000	100,00	100,00	18	66.000.000	85,71	97,06	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah	109 Kali	1.440.216.000	39	917.390.000	27	138.717.440	26	138.717.440	96,30	100,00	65	1.056.107.440	59,63	73,33	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor**																
	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik	45 rek	1.592.615.200	19	763.333.200	12	247.360.700	12	247.360.700	100,00	100,00	31	1.010.693.900	68,89	63,46	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	15 Laporan	6.562.807.329	12	4.375.204.886	4	2.187.602.443	4	2.187.602.443	100,00	100,00	16	6.562.807.329	106,67	100,00	Dinas Perhubungan	
	2. 15.01.2.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Administrasi Umum**																
	2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	42 unit	702.254.772	42	702.254.772	21	351.127.386	21	351.127.386	100,00	100,00	63	1.053.382.158	150,00	150,00	Dinas Perhubungan	
65	**2.15.2**	**PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**																	
	2.15.2.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Analisa tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan**																
	2.15.3.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasional Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	71.779.935.700	24	57.423.948.560	13	14.355.987.140	13	14.355.987.140	100,00	100,00	37	71.779.935.700	123,33	100,00	Dinas Perhubungan	
	2.15.3.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Pelabuhan Yang Disusun**																
	2.15.3.2.07.02	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	6 unit	11.516.374.200	0	0	3	1.919.395.700	3	1.919.395.700	100,00	100,00	3	1.919.395.700	50,00	16,67	Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																	
66	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**																
	2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kesejahteraan ASN**																
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	76 Orang	9.753.291.228	39	4.042.339.601	19	2.438.322.807	19	2.160.527.308	100,00	88,61	58	6.202.866.909	76,32	63,60	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dok	144.000.000	2	48.180.000	1	22.200.000	1	22.200.000	100,00	100,00	3	70.380.000	75,00	48,88	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatanya Pelayanan Administrasi Perkantoran**																
	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	52.240.000	2	28.056.000	1	14.770.000	1	14.770.000	100,00	100,00	3	42.826.000	75,00	81,98	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yng diadakan	20 Paket	440.000.000	9	205.256.295	5	57.652.000	5	43.069.200	100,00	74,71	14	248.325.495	70,00	56,44	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	8 Paket	260.000.000	6	95.861.800	2	39.330.600	2	31.464.400	100,00	80,00	8	127.326.200	100,00	48,97	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Dok	60.000.000	3	9.400.000	1	9.990.000	1	800.000	100,00	8,01	4	10.200.000	100,00	17,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	605.594.000	65	302.679.658	25	92.842.099	25	92.842.099	100,00	100,00	90	395.521.757	90,00	65,31	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kelancaran Operasional Pelaksanaan Kegiatan OPD**																
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	12 unit	140.000.000	13	134.600.000	2	28.990.000	2	27.866.000	100,00	96,12	15	162.466.000	125,00	116,05	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**																
	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan liistrik	16 Laporan	384.000.000	6	204.859.800	4	189.400.000	4	156.495.602	100,00	82,63	10	361.355.402	62,50	94,10	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayan Umum kantor yang disediakan	4 Laporan	3.406.864.000	2	1.134.983.793	3	246.495.551	3	246.495.551	100,00	100,00	5	1.381.479.344	125,00	40,55	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangakat Daerah**																
	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	319.968.000	2	146.173.032	1	71.706.900	1	57.008.050	100,00	79,50	3	203.181.082	75,00	63,50	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	40 Unit	120.000.000	38	61.184.000	10	6.100.000	10	5.975.000	100,00	97,95	48	67.159.000	120,00	55,97	Dinas Komunikasi dan Informatika	
67	**2.16.02**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah																
	2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemrintah Daerah**																
	2.16.02.2.01.014	Relasi Media	Jumlah aktifitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut :1.terferifikasi dewan pers. 2. terdaftar dinas Kominfo. 3.aktif dalam kegiatan relasi media	16 media	162.627.204	1	0	4	433.250.000	4	433.250.000	100,00	100,00	5	433.250.000	31,25	266,41	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.09	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dok	241.089.100	1	86.909.231	1	36.576.898	1	36.576.898	100,00	100,00	2	123.486.129	50,00	51,22	Dinas Komunikasi dan Informatika	
68	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase OPD Yang Terhubung Dengan Layanan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo**																
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi																
	2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah**																
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah	124 Unit	12.199.018.176	57	5.556.197.700	31	2.708.799.960	31	2.660.730.360	100,00	98,23	88	8.216.928.060	70,97	67,36	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																	
69	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan ASN	23 Bulan	13.399.286.210	88	10.719.428.968	23	2.697.274.885	23	2.519.287.441	100,00	93,40	111	13.238.716.409	482,61	98,80	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	10 Dokumen	131.400.000	60	426.340.000	10	26.280.000	10	26.280.000	100,00	100,00	70	452.620.000	700,00	344,46	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya 'Bahan Logistik Kantor	6 Paket	500.000.000	120	400.000.000	6	32.764.200	6	32.708.934	100,00	99,83	126	432.708.934	2100,00	86,54	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan	13 Paket	480.000.000	45	384.000.000	13	14.848.000	13	14.419.000	100,00	97,11	58	398.419.000	446,15	83,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	12 Dokumen	80.000.000	16	64.000.000	12	2.800.000	12	2.800.000	100,00	100,00	28	66.800.000	233,33	83,50	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 laporan	600.000.000	56	480.000.000	14	44.999.600	14	44.789.191	100,00	99,53	70	524.789.191	500,00	87,46	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	2.17.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya 'Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	280.000.000	160	224.000.000	12	38.000.000	12	27.760.176	100,00	73,05	172	251.760.176	1433,33	89,91	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	2.17.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Non ASN	19 Orang/laporan	725.000.000	160	580.000.000	19	178.800.000	19	172.452.500	100,00	96,45	179	752.452.500	942,11	103,79	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	160.327.900	18	190.000.000	13	65.410.000	12	55.835.223	92,31	85,36	30	245.835.223	230,77	153,33	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
70	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**																	
	2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**																	
	2.17.08.2.01.02	Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi usaha mikro	50 unit usaha	3.582.001.900	60	3.582.001.900	46	2.828.037.400	40	2.251.926.037	86,96	79,63	100	5.833.927.937	200,00	162,87	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																	
71	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah**																
	2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kesejahteraan ASN**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 org	11.988.848.977	47	3.922.165.514	32	3.066.491.992	119	2.805.861.337	371,88	91,50	166	6.728.026.851	167,68	56,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 org	365.000.000	8	80.220.000	12	22.200.000	12	19.800.000	100,00	89,19	20	100.020.000	41,67	27,40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**																
	2.18.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	43.192.897	2	15.715.500	1	5.291.500	3	5.266.000	300,00	99,52	5	20.981.500	125,00	48,58	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	692.727.335	6	253.113.959	5	91.247.998	5	89.829.800	100,00	98,45	11	342.943.759	68,75	49,51	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 paket	80.000.000	30	33.802.600	2	12.099.480	2	12.099.200	100,00	100,00	32	45.901.800	200,00	57,38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.06.09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	845.000.000	66	283.771.706	15	49.942.000	15	49.658.320	100,00	99,43	81	333.430.026	50,63	39,46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**																
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Rekening	440.000.000	72	145.478.112	36	82.800.000	36	66.264.099	100,00	80,03	108	211.742.211	75,00	48,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	92 org	939.720.000	46	756.382.021	24	277.200.000	85	240.433.734	354,17	86,74	131	996.815.755	142,39	106,08	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD**																
	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	290.000.000	19	115.836.306	9	48.659.750	9	46.584.631	100,00	95,74	28	162.420.937	70,00	56,01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	114.000.000	37	30.980.000	29	16.080.000	29	15.810.000	100,00	98,32	66	46.790.000	66,00	41,04	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
72	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu**																
	2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota**	**Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**																
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	24 Kecamatan	492.907.700	5	117.564.900	2	24.070.000	2	23.895.900	100,00	99,28	7	141.460.800	29,17	28,70	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
73	**02.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi investasi**																
	2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal**																
	2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	413.752.000	29	137.464.400	9	28.770.000	9	28.464.000	100,00	98,94	38	165.928.400	63,33	40,10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																	
74	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	2.19.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**																	
	2.19.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	626.139.200	1	212.610.000	1	156.534.800	1	152.017.800	100,00	97,11	2	364.627.800	50,00	58,23	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
	2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Tahun	292.048.000	1	120.000.000	1	73.012.000	1	72.974.600	100,00	99,95	2	192.974.600	50,00	66,08	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	86.800.000	1	25.000.000	1	21.700.000	1	21.700.000	100,00	100,00	2	46.700.000	50,00	53,80	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
	2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningatnya koordinasi kepariwisataan dan olah raga	48 Laporan	475.504.000	12	115.000.000	12	118.876.000	12	118.705.304	100,00	99,86	24	233.705.304	50,00	49,15	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
	2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan**																
	2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Tahun	312.000.000	1	132.000.000	1	78.000.000	1	61.863.543	100,00	79,31	2	193.863.543	50,00	62,14	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
	2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya layanan operasional perkantoran**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya layanan operasional perkantoran	8 unit	295.848.000	2	41.790.000	2	73.962.000	2	73.952.000	100,00	99,99	4	115.742.000	50,00	39,12	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
75	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Terbentuknya Kapasitas SDM Pemuda dan Organisasi Kepemudaan**																
	2.19.02.2.01	**Peberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota**																	
	2.19.02.2.02.02	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Pemuda dan Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kab/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan penataan lapangan bola kaki muntei dan maileppet	8 Dokumen	1.714.282.000	2	289.580.000	2	428.570.500	2	426.461.000	100,00	99,51	4	716.041.000	50,00	41,77	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
76	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**																	
	2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																	
	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	866.647.800	2	523.483.100	2	216.661.950	2	216.404.950	100,00	99,88	4	739.888.050	50,00	85,37	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
	2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet**																
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet	8 Dokumen	257.027.200	2	672.326.400	2	64.256.800	2	62.881.000	100,00	97,86	4	735.207.400	50,00	286,04	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																	
77	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**																	
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**																	
	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	9 objek	2.000.000.000	6	629.512.967	3	323.649.000	3	266.728.400	100,00	82,41	9	896.241.367	100,00	44,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 objek	1.200.000.000	4	447.230.377	4	1.091.051.400	4	123.683.800	100,00	11,34	8	570.914.177	100,00	47,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
78	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**																	
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**																	
	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah pendidik dan pelatihan sumber daya manusia yang ditingkatkan	800 orang	900.000.000	245	594.547.159	40	554.228.800	40	494.803.131	100,00	89,28	285	1.089.350.290	35,63	121,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																	
79	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah**																
	2.23.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**																	
	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	95.000.000	3	39.686.260	3	15.253.400	3	12.082.100	100,00	79,21	6	51.768.360	50,00	54,49	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**																	
	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	84 Orang/bulan	10.818.893.795	21	2.054.712.055	21	2.214.022.419	21	2.011.130.439	100,00	90,84	42	4.065.842.494	50,00	37,58	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	150.000.000	1	21.980.000	1	22.200.000	1	22.200.000	100,00	100,00	2	44.180.000	50,00	29,45	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**																	
	2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	80 Paket	48.000.000	20	4.071.500	20	1.012.500	15	780.000	75,00	77,04	35	4.851.500	43,75	10,11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	203.340.503	3	51.599.900	3	32.885.000	3	25.568.000	100,00	77,75	6	77.167.900	50,00	37,95	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	52 Paket	68.000.000	13	13.214.800	13	11.248.568	13	7.068.000	100,00	62,83	26	20.282.800	50,00	29,83	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan	490.000.000	36	86.095.922	36	54.990.000	15	35.736.414	41,67	64,99	51	121.832.336	35,42	24,86	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	48.000.000	2	4.813.210	3	12.400.000	3	6.835.170	100,00	55,12	5	11.648.380	41,67	24,27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	1.142.189.374	11	375.196.159	12	240.300.000	12	224.607.292	100,00	93,47	23	599.803.451	47,92	52,51	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**																	
	2.23.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	200.000.000	10	33.832.333	13	28.880.000	10	12.796.250	76,92	44,31	20	46.628.583	38,46	23,31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	120 Unit	24.000.000	15	8.490.000	30	10.020.000	20	6.368.000	66,67	63,55	35	14.858.000	29,17	61,91	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
80	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**																	
	2.23.02.2.01	**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	2.23.02.2.02.04	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	60 Perpustakaan	50.215.400	0	33.544.400	15	16.671.000	13	13.815.000	86,67	82,87	13	47.359.400	21,67	94,31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.02.2.02.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Peprustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Orang	110.000.000	5	50.393.200	3	25.518.200	3	20.345.300	100,00	79,73	8	70.738.500	66,67	64,31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.02.2.02	**PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA**																	
	2.23.02.2.02.08	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Dawrah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Perpustakaan	4.490.997.455	1	2.384.858.510	1	4.197.991.200	1	3.059.513.888	100,00	72,88	2	5.444.372.398	50,00	121,23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	80 Lokus	150.000.000	25	155.393.887	20	76.380.200	19	74.740.870	95,00	97,85	44	230.134.757	55,00	153,42	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																	
81	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**																	
	2.24.02.2.01	**PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**		-															
	2.24.02.2..01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	48 Berkas	300.000.000	60	70.783.000	12	35.814.200	12	35.082.800	100,00	97,96	72	105.865.800	150,00	35,29	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																	
82	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**																
	3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																	
	3.25.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dokumen	33.626.400	4	16.813.200	4	16.813.200	4	16.800.000	100,00	99,92	8	33.613.200	66,67	99,96	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	3.25.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Bulan	3.639.387.578	28	6.229.721.267	14	3.731.103.411	14	3.484.480.551	100,00	93,39	42	9.714.201.818	100,00	266,92	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	100.000.000	13	26.157.500	7	4.180.000	7	4.165.000	100,00	99,64	20	30.322.500	66,67	30,32	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	140 Paket	355.000.000	66	143.366.000	34	25.974.700	34	25.833.600	100,00	99,46	100	169.199.600	71,43	47,66	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	165.000.000	10	49.571.500	5	12.574.800	5	11.959.200	100,00	95,10	15	61.530.700	100,00	37,29	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dok	135.000.000	4	40.000.000	2	25.000.000	2	22.600.000	100,00	90,40	6	62.600.000	75,00	46,37	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	635.000.000	80	233.825.721	40	42.926.000	40	42.921.581	100,00	99,99	120	276.747.302	75,00	43,58	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08.02	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	3.25.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1.750.000.000	4	590.908.591	2	330.500.000	2	284.440.453	100,00	86,06	6	875.349.044	100,00	50,02	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	36 Laporan	1.140.139.133	12	720.739.133	12	419.400.000	12	419.400.000	100,00	100,00	24	1.140.139.133	66,67	100,00	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	56.430.721	1	30.610.721	1	25.820.000	1	25.748.000	100,00	99,72	2	56.358.721	66,67	99,87	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 unit	750.000.000	15	158.276.462	2	34.357.600	2	34.085.000	100,00	99,21	17	192.361.462	30,36	25,65	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	29.463.000	1	29.463.000	1	24.800.000	1	24.798.000	100,00	99,99	2	54.261.000	100,00	184,17	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	215.000.000	6	42.628.000	3	13.890.000	2	7.370.000	66,67	53,06	8	49.998.000	66,67	23,25	Dinas Perikanan	
83	**3.25.03**	**PROGRAM PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Kecil**																
	3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**																	
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah prasarana nelayan yang diadakan	2950 Unit	27.000.000.000	1437	37.686.930.239	530	4.673.869.000	530	4.489.502.775	100,00	96,06	1967	42.176.433.014	66,68	156,21	Dinas Perikanan	
85	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi perikanan budidaya**																
	3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**																	
	3.25.04.2.02.01	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	28 Kelompok	1.460.000.000	0	0	2	59.247.750	2	59.167.750	100,00	99,86	2	59.167.750	7,14	4,05	Dinas Perikanan	
	3.25.04.2.04.02	Pemberian Pendampingan, Keudahama Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendididkan dan Pelatihan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22 Unit	4.800.000.000	0	0	1	62.070.000	1	62.070.000	100,00	100,00	1	62.070.000	4,55	1,29	Dinas Perikanan	
86	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**																
	3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Keciln**																	
	3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	60 Buku	45.191.300	40	39.939.700	1	5.251.600	1	5.220.000	100,00	99,40	41	45.159.700	68,33	99,93	Dinas Perikanan	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																	
87	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terbayarnya honoraium Aparatur PNS dan Non PNS**																
	3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, laporan keuangan, dan lakip yang terbuat	40 Dokumen	36.000.000	10	30.000.000	10	9.000.000	7	8.940.000	70,00	99,33	17	38.940.000	42,50	108,17	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
	3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164 Orang	15.464.224.032	41	3.668.265.391	41	3.866.056.008	41	3.581.813.038	100,00	92,65	82	7.250.078.429	50,00	46,88	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
	3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya operasional Perkantoran	4 Dokumen	2.058.320.000	1	1.150.800.000	1	514.580.000	1	502.843.043	100,00	97,72	2	1.653.643.043	50,00	80,34	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
88	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Meningkatnya Kunjungan Wisata**																
	3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**																	
	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	3.843.009.000	1	1.300.000.110	1	960.752.250	1	957.528.624	100,00	99,66	2	2.257.528.734	50,00	58,74	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
89	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**																	
	3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Terlaksananya Kapasitas SDM**																
	3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	100 Laporan	1.065.536.000	1	430.000.000	25	266.384.000	25	226.494.200	100,00	85,03	26	656.494.200	26,00	61,61	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
	3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**																	
	3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	140 Orang	1.082.348.000	35	191.791.300	35	270.587.000	35	266.724.900	100,00	98,57	70	458.516.200	50,00	42,36	Dinas Pariwisata dan Olahraga	
90	**3.27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																	
	3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai ASN	87 Orang	1.168.524.500	87	3.442.368.935	81	975.360.000	81	870.420.000	100,00	89,24	168	4.312.788.935	193,10	369,08	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	3.27.01.2.06.04	Penyediaaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatan Pelayanan Perkantoran	182 Jenis	275.933.000	49	155.980.200	22	21.452.200	22	21.452.200	100,00	100,00	71	177.432.400	39,01	64,30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	31 paket	99.000.000	4	22.782.100	3	2.900.000	3	2.900.000	100,00	100,00	7	25.682.100	22,58	25,94	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi Pemerintah Daerah**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemerintahan Daerah																	
	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terkelolanya aset kendaraan dinas operasional	60 unit	263.380.000	7	48.634.000	1	3.450.000	1	3.450.000	100,00	100,00	8	52.084.000	13,35	19,78	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
91	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**																	
	3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**																	
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	28 Kali	5.150.000.000	22	5.159.577.314	12	3.137.239.096	12	2.761.099.935	100,00	88,01	34	7.920.677.249	121,43	153,80	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**																	
	3.27.02.2.06.01	Pengadaan benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 Ekor	5.231.795.000	14	4.520.400.756	4382	2.713.202.400	4382	2.670.999.030	100,00	98,44	4396	7.191.399.786	4396,00	137,46	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
92	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**																	
	3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Tersalurkannya Bahan Pokok dan Bahan Pangan Lainnya**																
	3.27.03.2.02.03	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun	11 Unit	2.836.000.000	2	589.212.495	6	1.717.738.000	6	1.717.613.000	100,00	99,99	8	2.306.825.495	72,73	81,34	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	3.27.03.2.02.10	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang jalan usaha tani yang dibangun	11 Unit	2.836.000.000	2	589.212.495	1	357.549.800	1	356.087.800	100,00	99,59	3	945.300.295	27,27	33,33	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
93	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN**	**Meningkatnya Kesejahteraan Petani**																
	3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**																	
	3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelengaraan Sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten	meningkatnya kesejahteraan masyarakat	160 Orang	1.249.999.655	**0**	0	160	1.243.916.300	160	1.048.696.492	100,00	84,31	160	1.048.696.492	100,00	83,90	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	3.27.07.2.01.05	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	meningkatnya kesejahteraan masyarakat	34 Orang	171.756.200	0	0	34	171.756.200	34	144.097.000	100,00	83,90	34	144.097.000	100,00	83,90	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanain	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																	
94	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**																	
	3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**																	
	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terfasilitasinya Distribusi Perdagangan	3 unit	250.000.000	18	200.000.000	3	247.432.000	3	233.295.458	100,00	94,29	21	433.295.458	700,00	173,32	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		Perdagangan	
95	3.30.04	**PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**																	
	3.30.04.02	**Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**																	
	3.30.04.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	1 laporan	183.000.000	2	127.000.000	1	46.467.000	1	43.235.000	100,00	93,04	3	170.235.000	300,00	93,02	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																	
96	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	396 Orang	40.634.921.172	194	18.750.037.760	99	10.969.363.957	89	10.324.909.956	89,90	94,12	283	29.074.947.716	71,46	71,55	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	504.000.000	21	189.960.000	12	137.980.000	12	136.730.210	100,00	99,09	33	326.690.210	68,75	64,82	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	16 Paket	1.281.326.400	8	1.686.084.540	4	1.239.758.500	4	1.239.267.041	100,00	99,96	12	2.925.351.581	75,00	228,31	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	433.880.000	2	339.458.893	1	144.374.000	1	144.083.520	100,00	99,80	3	483.542.413	75,00	111,45	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	1.330.348.000	24	2.117.933.824	12	855.395.000	12	854.612.572	100,00	99,91	36	2.972.546.396	75,00	223,44	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	1.821.962.000	24	1.745.189.013	12	591.905.300	12	591.580.468	100,00	99,95	36	2.336.769.481	75,00	128,26	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																	
	4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	44 Unit	10.893.236.000	12	2.707.016.680	11	4.660.000	0	4.620.000	0,00	99,14	12	2.711.636.680	27,27	24,89	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit	1.674.024.000	24	1.628.222.789	12	1.369.136.000	10	1.366.441.283	83,33	99,80	34	2.994.664.072	70,83	178,89	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	1.993.800.000	21	838.922.703	12	543.970.000	11	520.140.101	91,67	95,62	32	1.359.062.804	66,67	68,16	Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	98 Laporan	5.099.877.912	48	8.291.829.664	24	1.609.440.000	20	1.564.900.000	83,33	97,23	68	9.856.729.664	69,39	193,27	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	1.558.457.515	15	1.019.084.406	8	393.617.491	8	392.678.173	100,00	99,76	23	1.411.762.579	71,88	90,59	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	24.772.600.000	49	11.559.244.051	25	4.308.616.191	24	4.304.818.322	96,00	99,91	73	15.864.062.373	73,00	64,04	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	7.842.240.000	3	2.486.576.017	4	2.041.522.000	4	2.040.275.957	100,00	99,94	7	4.526.851.974	43,75	57,72	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.056	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	16 Unit	719.920.000	8	895.960.969	4	215.450.000	4	214.559.650	100,00	99,59	12	1.110.520.619	75,00	154,26	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**																	
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	1.913.784.416	2	699.999.600	2	613.838.494	2	526.944.517	100,00	85,84	4	1.226.944.117	100,00	64,11	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang Disediakan	112 Paket	444.000.000	55	277.886.001	28	310.000.000	28	309.727.410	100,00	99,91	83	587.613.411	74,11	132,35	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	4 Orang	3.719.369.429	2	2.756.925.629	1	1.255.867.000	1	1.232.183.934	100,00	98,11	3	3.989.109.563	75,00	107,25	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan walkil Kepala Daerah	2 Orang	120.000.000			1	60.000.000	1	11.152.550	100,00	18,59	1	11.152.550	50,00	9,29	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**																	
	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	48 Paket	1.365.382.200	24	1.241.207.477	12	536.054.700	12	533.107.532	100,00	99,45	36	1.774.315.009	75,00	129,95	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Paket	474.426.400	0	0	1	474.426.400	1	474.289.300	100,00	99,97	1	474.289.300	100,00	99,97	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**																	
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	144 Dokument	1.013.729.000	62	381.871.982	36	163.290.400	16	75.644.332	44,44	46,33	78	457.516.314	54,17	45,13	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	524.449.000	2	197.143.730	1	68.424.600	1	37.705.073	100,00	55,10	3	234.848.803	75,00	44,78	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi	144 Dokument	701.583.480	55	225.256.771	36	73.647.800	17	34.190.500	47,22	46,42	72	259.447.271	50,00	36,98	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokument	258.034.730	4	77.895.959	3	29.540.860	2	18.490.002	66,67	62,59	6	96.385.961	50,00	37,35	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	507.232.000	2	187.103.651	1	98.305.280	1	77.094.471	100,00	78,42	3	264.198.122	75,00	52,09	Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**																	
	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	48 Laporan	682.687.000	23	756.601.995	12	201.660.000	11	201.496.188	91,67	99,92	34	958.098.183	70,83	140,34	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	48 Laporan	734.273.067	22	703.916.712	12	124.525.000	9	123.766.871	75,00	99,39	31	827.683.583	64,58	112,72	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	48 Laporan	718.010.400	24	634.599.786	12	106.757.900	10	106.600.957	83,33	99,85	34	741.200.743	70,83	103,23	Sekretariat Daerah	
97	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**																	
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**																	
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	16 Dokument	729.064.000	8	285.162.611	4	72.963.600	4	72.475.220	100,00	99,33	12	357.637.831	75,00	49,05	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	120 Kecamatan	477.663.600	56	611.407.881	1	71.098.000	1	69.529.241	100,00	97,79	57	680.937.122	47,50	142,56	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	16 Dokument	990.159.600	10	504.470.600	1	123.182.600	1	121.200.128	100,00	98,39	11	625.670.728	68,75	63,19	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**																	
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	5.993.481.600	17	8.663.219.294	2	2.997.385.800	2	2.964.527.991	100,00	98,90	19	11.627.747.285	237,50	194,01	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olah raga, Pariwisata, Pendididkan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan Trantibum Linmas	12 Dokumen	12.905.384.000	24	7.161.666.513	3	1.506.376.750	3	1.484.630.877	100,00	98,56	27	8.646.297.390	225,00	67,00	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**																	
	04.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	60 Dokumen	928.486.200	27	501.667.581	15	182.527.400	11	147.771.900	73,33	80,96	38	649.439.481	63,33	69,95	Sekretariat Daerah	
	04.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	2.579.492.000	8	820.916.316	5	661.994.000	5	620.774.567	100,00	93,77	13	1.441.690.883	65,00	55,89	Sekretariat Daerah	
	04.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	16 Dokumen	620.163.200	7	221.426.000	4	54.124.200	4	52.109.200	100,00	96,28	11	273.535.200	68,75	44,11	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**																	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	8.063.000.000	2	4.763.167.813	1	180.715.800	1	164.261.433	100,00	90,89	3	4.927.429.246	75,00	61,11	Sekretariat Daerah	
98	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**																	
	4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**																	
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dewan Pengawas Defenitif	12 Orang	215.241.704	5	513.463.458	2	632.640.100	1	518.256.064	50,00	81,92	6	1.031.719.522	50,00	479,33	Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	40 Dokument	250.500.000	9	154.934.650	8	46.516.800	5	45.591.100	62,50	98,01	14	200.525.750	35,00	80,05	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**																	
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokument	442.266.800	2	279.238.311	1	45.026.000	0	44.046.840	0,00	97,83	2	323.285.151	50,00	73,10	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	501.999.600	2	294.721.362	1	66.545.200	0	59.974.058	0,00	90,13	2	354.695.420	50,00	70,66	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	933.661.600	2	667.962.352	1	147.776.000	0	135.302.800	0,00	91,56	2	803.265.152	50,00	86,03	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**																	
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Barang dan Jasa	48 Dokumen	1.100.221.600	24	619.493.384	12	240.519.800	5	220.478.845	41,67	91,67	29	839.972.229	60,42	76,35	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil layanan Pengadaan Secara Elektronik	48 Dokumen	1.402.568.000	20	756.819.000	12	351.758.600	4	279.025.507	33,33	79,32	24	1.035.844.507	50,00	73,85	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	320 Orang	572.544.000	81	313.863.378	80	183.608.400	6	107.662.513	7,50	58,64	87	421.525.891	27,19	73,62	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**																	
	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan	4 Dokumen	556.218.000	1	162.920.831	1	32.273.000	0	29.279.030	0,00	90,72	1	192.199.861	25,00	34,55	Sekretariat Daerah	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**																	
99	**4.02.01**	**PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	4.02.01.2.02	**Administrasi Keauangan Perangkat Daerah**																	
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	5.944.584.933	1	3.096.868.815	33	3.556.950.628	33	3.335.444.815	100,00	93,77	34	6.432.313.630	103,03	108,20	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	329.360.000	1	169.090.000	1	152.280.000	1	152.200.000	100,00	99,95	2	321.290.000	200,00	97,55	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalsi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	66.647.000	1	41.580.500	1	19.580.000	1	18.858.000	100,00	96,31	2	60.438.500	25,00	90,68	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3 Paket	917.143.927	3	608.129.670	3	179.042.000	2	174.148.600	66,67	97,27	5	782.278.270	166,67	85,30	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	754.772.200	4	395.424.000	5	258.121.400	5	256.976.029	100,00	99,56	9	652.400.029	900,00	86,44	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	1 Paket	242.400.500	2	107.940.600	2	63.750.000	2	62.703.500	100,00	98,36	4	170.644.100	400,00	70,40	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	503.385.000	6	274.420.652	6	124.610.000	6	124.563.300	100,00	99,96	12	398.983.952	200,00	79,26	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemerintah Daerah																	
	4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mabel	3 Paket	62.610.000			2	165.780.000	2	164.855.590	100,00	99,44	2	164.855.590	66,67	263,31	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan	3 Rek	442.500.000	3	117.697.551	3	226.080.000	3	206.079.093	100,00	91,15	6	323.776.644	200,00	73,17	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Pegawai Kontrak	59 Orang	2.406.816.000	59	1.079.100.026	45	696.285.250	45	617.144.375	100,00	88,63	104	1.696.244.401	176,27	70,48	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	520.287.000	3	198.617.464	4	205.490.000	3	193.261.270	75,00	94,05	6	391.878.734	75,00	75,32	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22 Unit	196.685.000	15	63.736.519	16	45.820.000	12	30.709.500	75,00	67,02	27	94.446.019	122,73	48,02	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesinnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	45	51.150.000	35	45.340.900	45	41.450.000	43	40.475.556	95,56	97,65	78	85.816.456	173,33	167,77	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	557.400.000	1	148.258.620	1	248.245.000	1	210.456.921	100,00	84,78	2	358.715.541	200,00	64,36	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**																	
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	20 Orang	18.115.899.500	20	8.715.424.211	20	9.326.212.350	20	8.949.600.478	100,00	95,96	40	17.665.024.689	200,00	97,51	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15.02	Penyediaaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100 Stel	412.820.000	1	186.110.600	2	285.000.000	2	282.000.000	100,00	98,95	3	468.110.600	3,00	113,39	Sekretariat DPRD	
100	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**																	
	4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**																	
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	2.182.614.000	6	1.330.499.175	8	151.430.000	8	150.645.156	100,00	99,48	14	1.481.144.331	175,00	67,86	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang -undangan	Terlaksananya Penyelenggara Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	848.423.600	1	19.064.700	2	106.938.000	2	104.954.500	100,00	98,15	3	124.019.200	300,00	14,62	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**																	
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	36.437.400	1	16.553.600	1	12.975.000	1	12.456.000	100,00	96,00	2	29.009.600	200,00	79,61	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.02	PembahasanPerubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	48.275.400	1	15.542.800	1	13.140.000	1	12.630.000	100,00	96,12	2	28.172.800	200,00	58,36	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	1 Dokumen	538.222.800	1	175.421.300	1	198.422.800	1	191.725.361	100,00	96,62	2	367.146.661	200,00	68,21	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	545.058.600	1	242.776.433	1	199.207.800	1	193.038.685	100,00	96,90	2	435.815.118	200,00	79,96	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	1 Dokumen	553.954.600	1	388.658.000	1	188.125.000	1	187.579.400	100,00	99,71	2	576.237.400	200,00	104,02	Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**																	
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang pemerintah dan Hukum	4 Laporan	2.068.755.000	4	1.097.911.492	4	268.740.000	4	267.004.835	100,00	99,35	8	1.364.916.327	200,00	65,98	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	1.980.190.000	4	700.105.990	4	241.918.000	4	241.619.649	100,00	99,88	8	941.725.639	200,00	47,56	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	1.868.032.000	3	770.269.638	5	282.812.000	5	281.937.350	100,00	99,69	8	1.052.206.988	200,00	56,33	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	1.602.627.000	2	663.769.548	4	298.940.000	4	297.630.480	100,00	99,56	6	961.400.028	150,00	59,99	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	1.429.140.000	4	646.083.898	4	205.390.000	4	204.476.023	100,00	99,56	8	850.559.921	200,00	59,52	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**																	
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.754.283.000	4	1.084.717.515	5	1.566.066.000	5	1.566.065.451	100,00	100,00	9	2.650.782.966	150,00	70,61	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	4 Orang	500.000.000	4	225.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	100,00	100,00	8	525.000.000	200,00	105,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6 Dokumen	582.430.000	4	178.894.600	5	95.000.000	4	92.000.000	80,00	96,84	8	270.894.600	133,33	46,51	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05	**Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat**																	
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	6 Laporan	5.114.952.000	6	3.457.121.800	6	1.121.751.000	6	1.117.700.200	100,00	99,64	12	4.574.822.000	200,00	89,44	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	6.036.334.800	2	2.598.850.000	3	3.045.244.400	3	2.956.237.000	100,00	97,08	5	5.555.087.000	166,67	92,03	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**																	
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6 Dokumen	7.181.912.000	5	4.609.659.761	6	1.796.608.000	6	1.796.090.894	100,00	99,97	11	6.405.750.655	183,33	89,19	Sekretariat DPRD	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
	5.01	**PERENCANAAN**																	
10 1	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**																
	5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan**																
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	152 ASN	16.972.695.091	38	3.604.811.755	35	4.095.084.379	35	3.908.237.272	100,00	95,44	73	7.513.049.027	48,03	44,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.02.02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	372.864.000	1	126.940.000	1	22.200.000	1	22.200.000	100,00	100,00	2	149.140.000	50,00	40,00	Badan Perencanaan Pembangunan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		Daerah	
	5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi umum**																
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	113.713.782	12	24.999.000	1	60.999.800	1	60.999.000	100,00	100,00	13	85.998.000	27,08	75,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	949.609.861	3	118.471.100	3	85.415.550	3	85.403.107	100,00	99,99	6	203.874.207	50,00	21,47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.05	Penyedian Barang Cetak dan Penggandan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	1.113.753.000	6	55.242.000	6	8.012.800	6	8.012.600	100,00	100,00	12	63.254.600	50,00	5,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	4 Dokumen	139.980.000	1	12.150.000	1	600.000	1	600.000	100,00	100,00	2	12.750.000	50,00	9,11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan	1.000.000.000	36	145.162.779	36	228.803.000	36	227.828.424	100,00	99,57	72	372.991.203	50,00	37,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**																
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	1.807.205.400	36	319.403.669	36	298.510.000	36	287.271.091	100,00	96,23	72	606.674.760	50,00	33,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	2.027.467.260	12	335.537.549	12	155.700.000	12	155.240.000	100,00	99,70	24	490.777.549	50,00	24,21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah**																
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	217.243.180	2	42.260.100	2	30.000.000	2	29.998.866	100,00	100,00	4	72.258.966	50,00	33,26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Liter BBM yang di gunakan	10380 Liter	170.187.500	3595	58.242.158	4051	61.670.000	4051	59.508.507	100,00	96,50	7646	117.750.665	73,66	69,19		
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	260.000.000	15	46.147.482	11	60.709.650	11	60.672.779	100,00	99,94	26	106.820.261	65,00	41,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit	127.670.917	0	0	15	167.670.917	15	166.384.654	100,00	99,23	15	166.384.654	1500,00	130,32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
10 2	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**																
	5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Pesentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD**																
	5.0102.2.01.03	Pelasanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4 Berita Acara	600.000.000	1	42.808.900	1	40.752.600	1	40.682.900	100,00	99,83	2	83.491.800	50,00	13,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8 Berita Acara	1.544.000.000	2	424.786.275	2	224.404.800	2	224.387.800	100,00	99,99	4	649.174.075	50,00	42,04	Badan Perencanaan Pembangunan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		Daerah	
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	16 Dokumen	2.000.000.000	4	464.171.183	4	583.170.800	4	579.544.037	100,00	99,38	8	1.043.715.220	50,00	52,19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daearh BIdang Perencanaan Pembangunan Daerah**																	
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan	288 Orang	600.000.000	72	257.507.865	36	232.051.350	36	231.709.162	100,00	99,85	108	489.217.027	37,50	81,54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
103	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Program Prioritas OPD Dengan Program OPD Pendukung**																
	5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Dapat dijadikan sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan**																
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	600.000.000	1	52.510.193	1	12.131.000	1	12.131.000	100,00	100,00	2	64.641.193	50,00	10,77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	600.000.000	2	147.339.481	1	38.392.400	1	36.264.616	100,00	94,46	3	183.604.097	37,50	30,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah**																
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	600.000.000	1	89.757.029	1	28.970.000	1	28.466.425	100,00	98,26	2	118.223.454	50,00	19,70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	4 Laporan	600.000.000	1	79.611.400	1	53.180.400	1	33.144.000	100,00	62,32	2	112.755.400	50,00	18,79	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Inspratuktur dan Wilayahan**	**Menjadi Pedoman dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**																
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfratuktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	600.000.000	1	83.940.102	1	45.357.700	1	43.687.000	100,00	96,32	2	127.627.102	50,00	21,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	600.000.000	1	55.430.185	1	16.472.400	1	16.034.900	100,00	97,34	2	71.465.085	50,00	11,91	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.02	**KEUANGAN**																	
104	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**																	
	5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daearh**																	
	5.02.01.2.02.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Laporan	199.200.000	4	106.456.000	8	52.354.000	8	48.389.000	100,00	92,43	12	154.845.000	37,50	77,73	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	212 Orang	231.561.082.647	51	26.031.494.410	53	57.890.270.662	53	25.436.430.196	100,00	43,94	104	51.467.924.606	49,06	22,23	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	16 Dok	2.169.920.000	3	482.259.700	4	542.480.000	4	520.424.000	100,00	95,93	7	1.002.683.700	43,75	46,21	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**																	
	5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	16 Paket	691.660.000	1	158.221.103	4	172.915.000	4	76.298.000	100,00	44,12	5	234.519.103	31,25	33,91	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Paket	151.240.000	1	126.737.500	2	37.810.000	2	37.810.000	100,00	100,00	3	164.547.500	37,50	108,80	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	901.342.200	1	225.074.000	2	225.335.550	2	225.335.550	100,00	100,00	3	450.409.550	37,50	49,97	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	972.148.000	1	227.067.000	2	243.037.000	2	242.742.750	100,00	99,88	3	469.809.750	37,50	48,33	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Paket	263.772.000	1	99.900.000	2	65.943.000	2	63.943.000	100,00	96,97	3	163.843.000	37,50	62,12	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8 Paket	76.020.000	1	18.350.000	2	19.005.000	2	14.800.000	100,00	77,87	3	33.150.000	37,50	43,61	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	16 Laporan	2.060.000.000	1	545.882.342	4	515.000.000	4	508.543.166	100,00	98,75	5	1.054.425.508	31,25	51,19	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																	
	5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 Unit	1.362.500.000	1	822.721.700	2	340.625.000	2	340.625.000	100,00	100,00	3	1.163.346.700	37,50	85,38	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																	
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8 Laporan	3.127.632.000	2	751.473.494	2	781.908.000	2	765.430.989	100,00	97,89	4	1.516.904.483	50,00	48,50	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.672.000.000	2	606.299.984	2	418.000.000	2	393.831.000	100,00	94,22	4	1.000.130.984	50,00	59,82	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																	
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Unit	623.000.000	3	189.573.800	3	155.750.000	3	155.685.000	100,00	99,96	6	345.258.800	50,00	55,42	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	8 Unit	373.600.000	2	109.444.000	2	93.400.000	2	92.810.000	100,00	99,37	4	202.254.000	50,00	54,14	Badan Keuangan Daerah	
10 5	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentsae OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik**																
	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**																	
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	16 Dokumen	247.710.400	2	47.263.500	4	61.927.600	4	61.927.600	100,00	100,00	6	109.191.100	37,50	44,08	Badan Keuangan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.02.2.01.02	Koordnasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	16 Dokumen	235.530.400	2	49.967.500	4	58.882.600	4	57.574.800	100,00	97,78	6	107.542.300	37,50	45,66	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	16 Dokumen	2.697.352.000	2	823.149.551	4	674.338.000	4	648.261.208	100,00	96,13	6	1.471.410.759	37,50	54,55	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	16 Dokumen	2.760.660.000	2	817.678.917	4	690.165.000	4	670.399.552	100,00	97,14	6	1.488.078.469	37,50	53,90	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	16 Dokumen	224.480.000	2	52.687.800	4	56.120.000	4	40.890.000	100,00	72,86	6	93.577.800	37,50	41,69	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	288 Orang	185.313.600	72	478.950.830	72	46.328.400	72	44.058.400	100,00	95,10	144	523.009.230	50,00	282,23	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**																	
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlaah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	16 Dokumen	529.814.400	4	386.513.235	4	132.453.600	4	129.580.125	100,00	97,83	8	516.093.360	50,00	97,41	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas	12 Dokumen	133.400.000	3	131.834.697	3	33.350.000	3	33.150.000	100,00	99,40	6	164.984.697	50,00	123,68	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	89.729.600	3	86.740.400	3	22.432.400	3	22.075.000	100,00	98,41	6	108.815.400	50,00	121,27	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	48 Laporan	566.828.800	12	107.331.440	12	141.707.200	12	73.449.122	100,00	51,83	24	180.780.562	50,00	31,89	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2d dengan instansi terkait	36 Dokumen	271.328.000	9	184.071.100	9	67.832.000	9	62.669.117	100,00	92,39	18	246.740.217	50,00	90,94	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**																	
	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiba, ekuitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiba, ekuitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	16 Laporan	102.185.600	2	22.938.200	4	25.546.400	4	24.332.400	100,00	95,25	6	47.270.600	37,50	46,26	Badan Keuangan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	16 Laporan	258.202.400	2	71.196.700	4	64.550.600	4	47.723.400	100,00	73,93	6	118.920.100	37,50	46,06	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	8 Dokumen	175.505.600	2	48.810.400	2	43.876.400	2	43.767.800	100,00	99,75	4	92.578.200	50,00	52,75	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	8 Dokumen	62.729.600	1	9.677.200	2	15.682.400	2	14.888.800	100,00	94,94	3	24.566.000	37,50	39,16	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	72 Orang	274.099.200	72	11.636.500	72	68.524.800	72	41.801.800	100,00	61,00	144	53.438.300	200,00	19,50	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**																	
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	16 Laporan	6.600.000.000		1.025.861.621	4	1.650.000.000	4	1.632.262.002	100,00	98,92	4	2.658.123.623	25,00	40,27	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	16 Laporan	404.769.640.456		64.480.186.519	4	101.192.410.114	4	92.363.773.096	100,00	91,28	4	156.843.959.615	25,00	38,75	Badan Keuangan Daerah	
106	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik**																
	5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**																	
	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	16 Dokumen	162.307.200	4	47.295.300	4	40.576.800	4	37.121.920	100,00	91,49	8	84.417.220	50,00	52,01	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	144 Laporan	44.644.800	36	37.936.900	36	11.161.200	36	10.685.000	100,00	95,73	72	48.621.900	50,00	108,91	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 Laporan	2.032.658.600	10	146.274.075	10	508.164.650	10	286.260.000	100,00	56,33	20	432.534.075	50,00	21,28	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	120 Dokumen	361.740.800	30	88.402.200	30	90.435.200	30	18.855.200	100,00	20,85	60	107.257.400	50,00	29,65	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	211.272.800	2	101.835.200	2	52.818.200	2	28.618.200	100,00	54,18	4	130.453.400	50,00	61,75	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	8 Laporan	295.816.000	2	25.188.900	2	73.954.000	2	73.954.000	100,00	100,00	4	99.142.900	50,00	33,52	Badan Keuangan Daerah	
107	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap total pendapatan**																
	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**																	
	5.02.04.2.01.03	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	28.017.600	1	81.226.771	2	7.004.400	2	6.764.400	100,00	96,57	3	87.991.171	37,50	314,06	Badan Keuangan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	157.897.600	1	81.226.771	2	39.474.400	2	21.664.400	100,00	54,88	3	102.891.171	37,50	65,16	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengendalian pajak daerah	32 Unit	6.152.443.196	4	231.521.546	8	1.538.110.799	8	1.538.110.799	100,00	100,00	12	1.769.632.345	37,50	28,76	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	16 Objek Pajak	984.603.400	1	482.740.548	4	246.150.850	4	246.150.850	100,00	100,00	5	728.891.398	31,25	74,03	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.04.2.01.11	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16 Dokumen	158.439.200	1	54.056.496	4	39.609.800	4	37.319.800	100,00	94,22	5	91.376.296	31,25	57,67	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	16 Dokumen	155.185.600	1	54.056.496	4	38.796.400	4	26.346.400	100,00	67,91	5	80.402.896	31,25	51,81	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	16 Dokumen	204.249.200	1	154.083.410	4	51.062.300	4	44.311.800	100,00	86,78	5	198.395.210	31,25	97,13	Badan Keuangan Daerah	
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	16 Laporan	1.452.048.000	4	698.203.550	4	363.012.000	4	340.301.800	100,00	93,74	8	1.038.505.350	50,00	71,52	Badan Keuangan Daerah	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**																	
108	**5.03.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																	
	5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Lancarnya Kegiatan Perkantoran**																
	5.03.01.2.26.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Peningkatan Pelayaan dan Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	36 ASN	6.718.924.390	108	3.320.305.195	36	3.320.305.195	36	3.168.785.554	100,00	95,44	144	6.489.090.749	400,00	96,58	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06.01	Peneydiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor	Terwujudnya Ruang Kantor Yang Terang	66 Jenis	115.258.571	30	5.893.500	4	4.248.500	4	4.248.500	100,00	100,00	34	10.142.000	51,52	8,80	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum ASN	64 Jenis	971.521.636	46	50.081.300	4	48.436.300	4	46.794.340	100,00	96,61	50	96.875.640	78,13	5,21	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
			Tersedianya alat tulis kantor	110 Jenis		100	1.645.000							100		90,91			
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	66 Jenis	686.166.556	65	10.135.000	4	8.490.000	4	6.269.400	100,00	73,84	69	16.404.400	104,55	2,39	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pemahaman Apartur tentang peraturan perundang-undangan	62 Jenis	180.633.731	30	7.645.000	12	6.000.000	12	5.800.000	100,00	96,67	42	13.445.000	67,74	7,44	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Singkronisasi Informasi dan Pemahaman terhadap pelaksaan Kegiatan	114 Jenis	1.729.608.611	105	38.601.000	25	36.956.000	25	36.956.000	100,00	100,00	130	75.557.000	114,04	4,37	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																	
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Kegiatan Perkantoran	66 Rekening	1.569.508.477	36	104.641.000	12	102.996.000	12	63.370.083	100,00	61,53	48	168.011.083	72,73	10,70	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Kegiatan Kantor	5 Kegiatan	25.000.000	15	204.780.358	17	203.135.358	13	175.315.400	76,47	86,30	28	380.095.758	560,00	1520,38	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
	5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah**																	
	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	72 Unit	425.005.877	63	42.559.400	2	40.914.400	2	32.790.404	100,00	80,14	65	75.349.804	90,28	17,73	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
	5.03.01.2.09.09	Pemelihraan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangun Lainnya	Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	72 Unit	425.005.877	63	41.372.800	2	39.727.800	2	39.183.714	100,00	98,63	65	80.556.514	90,28	18,95	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
109	**5.03.02**	**Program Kepegawaian Daerah**																	
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**																	
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terpenuhinnya ASN sesuai dengan formasi jabatan dan analisis kebutuhan	600 PNS	1.800.000.000	510	198.679.515	5	74.451.400	5	72.073.564	100,00	96,81	515	270.753.079	85,83	15,04	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi pelaksaan Administrasi Pemberhentian	Dapat digunakan untuk pencairan taspen dan gaji pensiun	100 PNS	920.116.000	200	29.650.300	1	14.340.000	1	14.174.300	100,00	98,84	201	43.824.600	201,00	4,76	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaianan	Dapat digunakan untuk pencairan taspen dan gaji pensiun	100 PNS	920.116.000	200	29.650.300	1	11.052.600	1	9.734.000	100,00	88,07	201	39.384.300	201,00	4,28	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SDM	90 PNS	4.595.250.000	125	1.179.042.217	3	285.867.700	3	63.459.400	100,00	22,20	128	1.242.501.617	142,22	27,04	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan karir asn	300 PNS	654.098.000	600	63.985.700	2	16.641.200	2	16.276.600	100,00	97,81	602	80.262.300	200,67	12,27	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
	5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**																	
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan terpenuhinya persyaratan dalam penyesuian ijazah dan pindah golongan ruang ASN	30 PNS	769.331.200	55	769.331.200	10	539.787.400	10	430.736.069	100,00	79,80	65	1.200.067.269	216,67	155,99	Badan Kepegawaqian dan Pengembangan Sum,ber Daya Manusia	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																	
110	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**																
	5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangnan Bidang Sosial dan Kependudukan**																	
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4 Dokumen	1.120.000.000	1	271.968.170	1	510.244.200	1	504.089.680	100,00	98,79	2	776.057.850	50,00	69,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**																	
	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	981.783.000	1	351.153.884	1	471.148.500	1	471.128.363	100,00	100,00	2	822.282.247	100,00	83,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	475.683.400	0	0	1	475.072.400	1	462.129.100	100,00	97,28	1	462.129.100	100,00	97,15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	213.085.600	0	6.998.700	1	504.544.635	1	480.083.905	100,00	95,15	1	487.082.605	100,00	228,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**																	
111	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**																	
	6.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**																	
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	5.000.000.000	74	7.649.175.821	36	4.612.593.086	36	4.315.099.999	100,00	93,55	110	11.964.275.820	297,30	239,29	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Orang	500.000.000	36	139.577.000	12	95.340.000	12	95.340.000	100,00	100,00	48	234.917.000	192,00	46,98	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**																	
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	400.000.000	25	728.619.742	10	311.160.000	10	309.414.706	100,00	99,44	35	1.038.034.448	138,00	259,51	Inspektorat	
	6.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**																	
	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30 Paket	60.000.000	2		1	7.902.500	2	7.896.220	200,00	99,92	4	7.896.220	13,33	13,16	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	150.000.000	4	17.962.657	1	3.365.000	1	3.360.000	100,00	99,85	5	21.322.657	125,00	14,22	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	250.000.000	8	293.921.000	3	142.168.400	3	134.631.063	100,00	94,70	11	428.552.063	366,67	171,42	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	70.000.000	2	36.306.320	2	15.000.000	2	14.986.700	100,00	99,91	4	51.293.020	133,33	73,28	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	40.000.000	3	46.975.000	1	21.000.000	1	20.856.500	100,00	99,32	4	67.831.500	200,00	169,58	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	24	1.867.918.612	12	998.504.000	12	988.975.614	100,00	99,05	36	2.856.894.226	300,00	952,30	Inspektorat	
	6.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**																	
	6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	150.000.000	13	419.993.000	8	116.405.924	8	113.218.615	100,00	97,26	21	533.211.615	700,00	355,47	Inspektorat	
	6.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**																	
	6.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	180.000.000	72	163.570.966	36	84.650.000	36	75.747.725	100,00	89,48	108	239.318.691	900,00	132,95	Inspektorat	
	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	735.921.000	23	978.414.120	12	554.901.000	12	548.631.000	100,00	98,87	35	1.527.045.120	291,67	207,50	Inspektorat	
	6.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**																	
	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	200.000.000	2	91.339.296	1	16.990.400	1	16.914.996	100,00	99,56	3	108.254.292	20,00	54,13	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit	200.000.000	12	57.195.160	6	34.004.000	6	33.952.526	100,00	99,85	18	91.147.686	120,00	45,57	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	50.000.000	6	68.030.000	3	26.250.000	3	26.160.878	100,00	99,66	9	94.190.878	112,50	188,38	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	1	248.735.647	1	124.272.468	1	122.997.645	100,00	98,97	2	371.733.292	200,00	185,87	Inspektorat	
112	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PENGAWASAN																	
	6.01.02.2.01	**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL**																	
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24 Laporan	550.000.000	42	539.164.900	12	38.459.500	12	38.029.000	100,00	98,88	54	577.193.900	225,00	104,94	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24 Laporan	550.000.000	16	264.314.000	12	38.270.000	12	38.080.000	100,00	99,50	28	302.394.000	116,67	54,98	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	108 Laporan	550.000.000	216	761.766.499	108	183.505.000	108	182.801.000	100,00	99,62	324	944.567.499	300,00	171,74	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	200.000.000	74	67.126.600	37	22.959.000	37	22.773.000	100,00	99,19	111	89.899.600	300,00	44,95	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 Laporan	1.000.000.000	28	1.199.632.300	37	229.874.200	37	226.650.100	100,00	98,60	65	1.426.282.400	325,00	142,63	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.06	Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2 Kesepakatan	600.000.000	4	0	2	316.484.000	2	291.781.439	100,00	92,19	6	291.781.439	300,00	48,63	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut HASIL Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	450.000.000	4	354.866.700	4	129.590.842	4	122.671.794	100,00	94,66	8	477.538.494	400,00	106,12	Inspektorat	
	6.01.02.2.02	**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**																	
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	550.000.000	24	486.488.450	12	307.363.604	12	295.429.519	100,00	96,12	36	781.917.969	300,00	142,17	Inspektorat	
113		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**																	
	6.01.03.2.01	**PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN**																	
	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi	300.000.000	4	204.877.600	2	108.832.000	2	91.575.800	100,00	84,14	6	296.453.400	300,00	98,82	Inspektorat	
	6.01.03.2.02	**PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**																	
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	6 Perangkat Daerah	450.000.000	8	64.462.000	4	66.798.200	4	66.687.200	100,00	99,83	12	131.149.200	200,00	29,14	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26 Perangkat Daerah	250.000.000	20	111.281.800	10	29.700.000	10	29.519.000	100,00	99,39	30	140.800.800	115,38	56,32	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring danEvaluasi serta Verifikasi Pnecegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	450.000.000	8	130.679.890	5	218.213.004	5	193.204.500	100,00	88,54	13	323.884.390	260,00	71,97	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Darah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 Perangkat Daerah	250.000.000	4	139.346.672	2	32.834.400	2	32.128.100	100,00	97,85	6	171.474.772	120,00	68,59	Inspektorat	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01	**KECAMATAN SIPORA UTARA**																	
114	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Dokumen	162.395.100	0	0	12	47.843.000	12	47.693.000	100,00	99,69	12	47.693.000	25,00	29,37	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan**																
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Utara	64 Orang	6.400.962.285	0	0	16	1.594.769.348	15	1.484.886.748	93,75	93,11	15	1.484.886.748	23,44	23,20	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	353 dokumen	170.400.000	0	0	36	19.800.000	18	17.280.000	50,00	87,27	18	17.280.000	5,10	10,14	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Terlaksananya layanan administrasi umum**																
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	24 paket	15.250.000	0	0	8	7.875.000	8	7.875.000	100,00	100,00	8	7.875.000	33,33	51,64	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1 paket	5.050.000			2	5.050.000	2	5.050.000	100,00	100,00	2	5.050.000	200,00	100,00	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor,Jumlah makanan dan Minuman di Sediakan	1352 jenis	300.000.000		0	490	56.751.700	0	56.749.300	0,00	100,00	0	56.749.300	0,00	18,92	Kecamatan Sipora Utara	
			Jumlah ATK yang tersedia	100 Jenis	177.500.000	0	0	25	36.148.700	25	36.146.300	100,00	99,99	25	36.146.300	25,00	20,36	Kecamatan Sipora Utara	
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kantor yang Disediakan	1200 kotak	36.000.000	0	0	440	8.520.000	250	8.520.000	56,82	100,00	250	8.520.000	20,83	23,67	Kecamatan Sipora Utara	
			Jumlah perabot kantor yang tersedia	32 Jenis	16.000.000			20	5.735.000	20	5.735.000	100,00	100,00	20	5.735.000	62,50	35,84	Kecamatan Sipora Utara	
			Jumlah Natura dan Pakan Natura yang tersedia	20 Jenis	70.500.000	0	0	5	6.348.000	3	6.348.000	60,00	100,00	3	6.348.000	15,00	9,00	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	32 Jenis	34.842.800	0	0	5	15.245.000	5	15.225.000	100,00	99,87	5	15.225.000	15,63	43,70	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	244 laporan	303.425.000	0	0	50	44.970.000	26	44.190.000	52,00	98,27	26	44.190.000	10,66	14,56	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	16 Unit	185.000.000	0	0	17	17.900.000	17	17.900.000	100,00	100,00	17	17.900.000	106,25	9,68	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum**																
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	48 Laporan	156.000.000	0	0	12	29.600.000	12	22.870.946	100,00	77,27	12	22.870.946	25,00	14,66	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honororium yang Tersedia	48 laporan	1.586.086.400	0	0	12	213.600.000	12	207.440.000	100,00	97,12	12	207.440.000	25,00	13,08	Kecamatan Sipora Utara	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum**																
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	135.192.150	0	0	7	5.170.000	5	4.800.000	71,43	92,84	5	4.800.000	17,24	3,55	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Alat Transportasi yang dipelihara	4 unit	102.500.000			4	40.000.000	4	40.000.000	100,00	100,00	4	40.000.000	100,00	39,02	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	132.259.125	0	0	8	5.850.000	8	5.850.000	100,00	100,00	8	5.850.000	16,00	4,42	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	10 Unit	681.888.500	0	0	1	6.249.990	1	6.249.000	100,00	99,98	1	6.249.000	10,00	0,92	Kecamatan Sipora Utara	
115	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat**																
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan**																
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Nonperizinan yang diurus	414 dokumen	88.390.000	0	0	85	10.845.000	41	10.695.000	48,24	98,62	41	10.695.000	9,90	12,10	Kecamatan Sipora Utara	
116	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat**																
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**																
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	48 lembaga	106.089.725	0	0	1	15.016.000	1	15.016.000	100,00	100,00	1	15.016.000	2,08	14,15	Kecamatan Sipora Utara	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	48 laporan	162.395.100	0	0	12	10.942.800	12	10.942.800	100,00	100,00	12	10.942.800	25,00	6,74	Kecamatan Sipora Utara	
117	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**																
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan**																
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	110.000.000			6	30.735.000	6	30.735.000	100,00	100,00	6	30.735.000	25,00	27,94	Kecamatan Sipora Utara	
118	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**																
	7.01.06.2.01	**Pasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan**																
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	72 Dokumen	267.632.125	0	0	18	27.420.000	18	27.360.000	100,00	99,78	18	27.360.000	25,00	10,22	Kecamatan Sipora Utara	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01	**KECAMATAN SIPORA SELATAN**																	
119	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dok	39.840.000			1	25.500.000	1	25.500.000	100,00	100,00	1	25.500.000	8,33	64,01	Kecamatan Sipora Selatan	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan**																
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Selatan	23 Orang	1.944.803.671			25	2.253.346.269	25	2.108.464.620	100,00	93,57	25	2.108.464.620	108,70	108,42	Kecamatan Sipora Selatan	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	42 Orang	63.870.000			25	37.050.000	25	37.050.000	100,00	100,00	25	37.050.000	59,52	58,01	Kecamatan Sipora Selatan	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Terlaksananya layanan administrasi umum**																
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	4.995.000			4	5.001.500	4	5.001.500	100,00	100,00	4	5.001.500	80,00	100,13	Kecamatan Sipora Selatan	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	10.000.000			4	41.128.396	4	41.128.396	100,00	100,00	4	41.128.396	100,00	411,28	Kecamatan Sipora Selatan	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	63.214.600			4	47.494.000	4	47.494.000	100,00	100,00	4	47.494.000	133,33	75,13	Kecamatan Sipora Selatan	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	26 Kali	133.621.000			2	30.120.000	2	28.550.000	100,00	94,79	2	28.550.000	7,69	21,37	Kecamatan Sipora Selatan	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksannya pengadaan kendaraan Dinas**																
	7.1.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Unit Perumahan Dinas yang tersedia	4 Unit	27.500.000			1	27.500.000	1	25.500.000	100,00	92,73	1	25.500.000	25,00	92,73	Kecamatan Sipora Selatan	
	7.01.01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum**																
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayar	12 Bulan	20.000.000			4	24.000.000	4	24.000.000	100,00	100,00	4	24.000.000	33,33	120,00	Kecamatan Sipora Selatan	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	19 Orang	327.888.000			19	195.000.000	19	195.000.000	100,00	100,00	19	195.000.000	100,00	59,47	Kecamatan Sipora Selatan	
120	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat**																
	7.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**																	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	20.000.000			7	15.270.000	7	13.908.000	100,00	91,08	7	13.908.000	700,00	69,54	Kecamatan Sipora Selatan	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Laporan	28.156.000			7	14.640.000	7	14.640.000	100,00	100,00	7	14.640.000	700,00	52,00	Kecamatan Sipora Selatan	
121	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Dalam Forum Pembangunan**																
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**																
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Laporan	17.999.900			7	11.250.000	7	11.250.000	100,00	100,00	7	11.250.000	700,00	62,50	Kecamatan Sipora Selatan	
	7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Terwujudnya Pembinaan Penumbuhan Karakter Kesadaran dalam pengamalan Pancasila**																
	7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Pentingnya Penghayatan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek kehidupan Bermasyarakat,Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Berkarakter melalui Pengamalan Pancasila di Tingkat Kecamatan dan Desa terwujudnya Pembinaan Keluarga yang berkarakter melalui Pengamalan pancasila serta Undang-Undang dasar 1945	14 Laporan	19.990.000			7	32.860.000	7	20.288.000	100,00	61,74	7	20.288.000	50,00	101,49	Kecamatan Sipora Selatan	
122	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**																
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan**																
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terwujudnya Nilai-Nilai pancasila Persentase Konplik di Wilayah Kecamatan yang ditangani atau diselesaikan Jumlah Orang yang mengikuti dalam memperingati Hari Ulang tahun negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945	1 Kali	81.781.000			1	81.781.000	1	80.063.110	100,00	97,90	1	80.063.110	100,00	97,90	Kecamatan Sipora Selatan	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan masyarakat**																
	7.01.06.2.01	**Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa**																
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Dokumen Keuangan Desa	14 Laporan	73.725.200			7	13.250.000	7	13.250.000	100,00	100,00	7	13.250.000	50,00	17,97	Kecamatan Sipora Selatan	
	7.01	**KECAMATAN SIKAKAP**																	
123	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01	**PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Kepatuhan Penyusuinan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64 Laporan	290.000.000		0	16	10.730.000	16	8.480.000	100,00	79,03	16	8.480.000	100,00	79,03	Kecamatan Sikakap	
	7.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	104 Orang	11.366.707.040	0	0	25	2.489.807.370	25	2.321.034.917	100,00	93,22	25	2.321.034.917	100,00	93,22	Kecamatan Sikakap	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	717.845.410	0	0	12	117.690.000	12	117.598.000	100,00	99,92	12	117.598.000	100,00	99,92	Kecamatan Sikakap	
	7.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	38 Paket	36.737.060	0	0	3	3.660.000	3	3.607.500	100,00	98,57	3	3.607.500	100,00	98,57	Kecamatan Sikakap	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Junlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Peralatan	238.685.169	0		3	18.003.600	3	18.000.000	100,00	99,98	3	18.000.000	100,00	99,98	Kecamatan Sikakap	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	258 Paket	454.066.100	0	0	3	27.477.200	3	27.477.200	100,00	100,00	3	27.477.200	100,00	100,00	Kecamatan Sikakap	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	405.272.375	0	0	12	53.290.000	12	52.346.000	100,00	98,23	12	52.346.000	100,00	98,23	Kecamatan Sikakap	
	7.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan**																
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	140.289.300		0	12	12.600.000	12	10.968.000	100,00	87,05	12	10.968.000	100,00	87,05	Kecamatan Sikakap	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Junlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	677.687.700		0	6	115.800.000	6	115.800.000	100,00	100,00	6	115.800.000	100,00	100,00	Kecamatan Sikakap	
	7.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Terpeliharanya Baragn Milik Daerah**																
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	12.026.300		0	2	2.000.000	2	2.000.000	100,00	100,00	2	2.000.000	100,00	100,00	Kecamatan Sikakap	
124	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan**																
	7.01.02.2.04	**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**	**Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**																
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkian	48 Laporan	192.059.550		0	12	11.700.000	12	11.700.000	100,00	100,00	12	11.700.000	100,00	100,00	Kecamatan Sikakap	
125	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**																
	7.01.03.2.01	**KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawrah Perencanaan Pembanguan di Desa	12 Laporan	191.237.225	0		3	22.686.600	3	22.686.600	100,00	100,00	3	22.686.600	100,00	100,00	Kecamatan Sikakap	
126	**7.01.05**	**PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/ Diselesaikan**																
	7.01.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/ Diselesaikan**																
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	386.547.075	0	0	100	74.729.900	100	74.729.000	100,00	100,00	100	74.729.000	100,00	100,00	Kecamatan Sikakap	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	116.386.285	0	0	6	2.688.000	6	2.664.000	100,00	99,11	6	2.664.000	100,00	99,11	Kecamatan Sikakap	
127	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu**																
	7.01.06.2.01	**FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Desa yang Dibina**																
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuanga Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 Dokumen	218.768.557	0	0	9	24.270.000	9	24.270.000	100,00	100,00	9	24.270.000	100,00	100,00	Kecamatan Sikakap	
	7.01	**KECAMATAN SIBERUT UTARA**																	
128	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	24 Lap	255.080.000	12	87.703.500	6	18.400.000	5	18.400.000	83,33	100,00	17	106.103.500	70,83	41,60	Kecamatan Siberut Utara	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 org	8.226.124.740	50	4.094.988.325	25	2.357.807.779	25	2.166.446.817	100,00	91,88	75	6.261.435.142	75,00	76,12	Kecamatan Siberut Utara	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dok	912.650.000	24	362.862.100	12	101.400.000	12	101.180.000	100,00	99,78	36	464.042.100	75,00	50,85	Kecamatan Siberut Utara	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Terlaksananya layanan administrasi umum**																
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor yang tersedia	36 Jenis	11.412.500	18	4.485.000	9	2.412.500	9	2.412.500	100,00	100,00	27	6.897.500	75,00	60,44	Kecamatan Siberut Utara	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	133.727.100	6	103.475.400	3	31.868.500	3	31.868.500	100,00	100,00	9	135.343.900	75,00	101,21	Kecamatan Siberut Utara	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	10.920.000	4	4.877.900	2	2.082.400	2	1.974.000	100,00	94,79	6	6.851.900	75,00	62,75	Kecamatan Siberut Utara	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lap	512.630.000	2	237.252.900	1	63.000.000	1	62.670.000	100,00	99,48	3	299.922.900	75,00	58,51	Kecamatan Siberut Utara	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakann	48 Bln	60.000.000	24	24.000.000	12	15.600.000	12	15.370.000	100,00	98,53	36	39.370.000	75,00	65,62	Kecamatan Siberut Utara	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Lap	720.000.000	24	360.000.000	12	128.100.000	12	128.100.000	100,00	100,00	36	488.100.000	75,00	67,79	Kecamatan Siberut Utara	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	77.800.000	2	45.545.000	1	20.030.000	1	20.030.000	100,00	100,00	3	65.575.000	75,00	84,29	Kecamatan Siberut Utara	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	18.000.000	7	14.000.000	5	19.170.000	5	19.170.000	100,00	100,00	12	33.170.000	100,00	184,28	Kecamatan Siberut Utara	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	61.840.000	8	17.460.000	4	2.840.000	4	2.840.000	100,00	100,00	12	20.300.000	50,00	32,83	Kecamatan Siberut Utara	
129	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Utara**																
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Tersedianya Layanan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**																
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	24 Lap	207.635.900	12	171.840.900	1	14.455.000	1	14.355.000	100,00	99,31	13	186.195.900	54,17	89,67	Kecamatan Siberut Utara	
130	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Ketelibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**																
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Tersedianya Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 Lembaga	146.750.000	20	66.793.200	10	22.284.000	10	21.589.000	100,00	96,88	30	88.382.200	75,00	60,23	Kecamatan Siberut Utara	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48 Lap	268.521.800	24	61.380.000	12	9.730.000	12	9.295.000	100,00	95,53	36	70.675.000	75,00	26,32	Kecamatan Siberut Utara	
131	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan**																
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Tersedianya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**																
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI	400 org	213.324.184	200	200.044.000	100	17.702.500	100	17.702.500	100,00	100,00	300	217.746.500	75,00	102,07	Kecamatan Siberut Utara	
	7.01.05.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dok	152.115.000	2	57.235.000	1	13.508.000	1	13.508.000	100,00	100,00	3	70.743.000	75,00	46,51	Kecamatan Siberut Utara	
132	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu**																
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Tersedianya Layanan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**																
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dok	488.326.160	2	147.545.200	1	18.400.000	1	18.400.000	100,00	100,00	3	165.945.200	75,00	33,98	Kecamatan Siberut Utara	
	7.01	**KECAMATAN SIBERUT TENGAH**																	
133	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Dokumen	206.400.000	0	0	4	18.650.000	2	18.000.000	50,00	96,51	2	18.000.000	4,17	8,72	Kecamatan Siberut Tengah	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Siberut Tengah	576 Orang	5.947.968.712	0	0	36	1.366.155.336	36	1.180.158.691	100,00	86,39	36	1.180.158.691	6,25	19,84	Kecamatan Siberut Tengah	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	48 dokumen	450.720.000	0	0	12	116.148.000	12	111.167.700	100,00	95,71	12	111.167.700	25,00	24,66	Kecamatan Siberut Tengah	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	24 paket	10.916.000	0	0	6	4.715.000	6	4.715.000	100,00	100,00	6	4.715.000	25,00	43,19	Kecamatan Siberut Tengah	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor,Jumlah makanan dan Minuman di Sediakan	1286 jenis	126.340.000		0	84	45.480.000	84	42.538.000	100,00	93,53	84	42.538.000	6,53	33,67	Kecamatan Siberut Tengah	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12 Jenis	20.036.000	0	0	5	7.921.600	5	7.921.600	100,00	100,00	5	7.921.600	41,67	39,54	Kecamatan Siberut Tengah	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	48 laporan	316.000.000	0	0	8	44.175.000	8	44.175.000	100,00	100,00	8	44.175.000	16,67	13,98	Kecamatan Siberut Tengah	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum**																
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	48 Laporan	24.000.000	0	0	12	6.000.000	12	4.000.000	100,00	66,67	12	4.000.000	25,00	16,67	Kecamatan Siberut Tengah	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honororium yang Tersedia	720 laporan	1.020.000.000	0	0	156	141.700.000	142	135.400.000	91,03	95,55	142	135.400.000	19,72	13,27	Kecamatan Siberut Tengah	
	7.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah**																
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 Unit	32.000.000	0	0	3	5.170.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Tengah	
134	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Fasilitasi Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**																
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman e-KTP	600 Jiwa	204.000.000	0	0	200	11.250.000	185	11.250.000	92,50	100,00	185	11.250.000	30,83	5,51	Kecamatan Siberut Tengah	
135	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat**																
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**																
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	48 lembaga	80.000.000	0	0	2	20.750.000	2	11.033.000	100,00	53,17	2	11.033.000	4,17	13,79	Kecamatan Siberut Tengah	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	8 laporan	79.996.000	0	0	2	7.740.000	1	7.440.000	50,00	96,12	1	7.440.000	12,50	9,30	Kecamatan Siberut Tengah	
136	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**																
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan**																
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT-RI	400 0rang	380.000.000	0	0	100	76.628.000	100	76.628.000	100,00	100,00	100	76.628.000	25,00	20,17	Kecamatan Siberut Tengah	
137	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan**																
	7.01.06.2.01	**PASILITAS REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan**																
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	48 Dokumen	360.000.000	0	0	4	29.340.000	4	29.340.000	100,00	100,00	4	29.340.000	8,33	8,15	Kecamatan Siberut Tengah	
	7.01	**KECAMATAN SIBERUT SELATAN**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
138	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	92 Kali	320.770.500			4	27.000.000	4	26.955.000	100,00	99,83	4	26.955.000	4,35	8,40	Kecamatan Siberut Selatan	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Org	15.386.091.963			17	1.908.115.879	17	1.780.122.728	100,00	93,29	17	1.780.122.728	11,72	11,57	Kecamatan Siberut Selatan	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	188 Org	2.766.810.000			12	47.460.000	4	47.370.000	33,33	99,81	4	47.370.000	2,13	1,71	Kecamatan Siberut Selatan	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	106 Jenis	61.609.000			19	6.256.250	19	6.255.750	100,00	99,99	19	6.255.750	17,92	10,15	Kecamatan Siberut Selatan	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bnhan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan	80 Paket	464.919.940			17	57.470.000	16	57.470.000	94,12	100,00	16	57.470.000	20,00	12,36	Kecamatan Siberut Selatan	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	57 Jenis	47.912.000			8	5.550.000	7	5.550.000	87,50	100,00	7	5.550.000	12,28	11,58	Kecamatan Siberut Selatan	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	290 Kali	769.585.000			13	66.680.000	13	65.324.000	100,00	97,97	13	65.324.000	4,48	8,49	Kecamatan Siberut Selatan	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	24.280.000			1	6.500.000	1	6.500.000	100,00	100,00	1	6.500.000	25,00	26,77	Kecamatan Siberut Selatan	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum**																
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon dan listrik	93 Rekening	86.600.000			12	15.600.000	6	12.977.500	50,00	83,19	6	12.977.500	6,45	14,99	Kecamatan Siberut Selatan	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Org/bln	328.344.000			12	98.000.000	9	97.000.000	75,00	98,98	9	97.000.000	37,50	29,54	Kecamatan Siberut Selatan	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	273.660.000			2	64.300.000	2	63.900.000	100,00	99,38	2	63.900.000	4,00	23,35	Kecamatan Siberut Selatan	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	12.290.000			2	1.420.000	2	1.420.000	100,00	100,00	2	1.420.000	28,57	11,55	Kecamatan Siberut Selatan	
139	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**																
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat**																
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	1800 Orang	251.144.900			100	9.250.000	80	8.400.000	80,00	90,81	80	8.400.000	4,44	3,34	Kecamatan Siberut Selatan	
140	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**																
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah koordinasi pemberdayaan desa**																
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Kali	173.121.900			1	20.373.000	1	20.373.000	100,00	100,00	1	20.373.000	14,29	11,77	Kecamatan Siberut Selatan	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	7 Kali	215.082.750			1	9.940.000		0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Selatan	
141	**7.01.05**	**PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**																
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah**																
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	Meningkatnya pengetahuan kebinekaan	7 Kali	593.868.500			1	44.511.000	1	44.511.000	100,00	100,00	1	44.511.000	14,29	7,50	Kecamatan Siberut Selatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam	2 Dok	61.751.500			1	7.312.500	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Selatan	
142	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**																
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa**																
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	2 Dok	140.012.000			1	9.200.000	1	8.840.000	100,00	96,09	1	8.840.000	50,00	6,31	Kecamatan Siberut Selatan	
	7.01	**KECAMATAN SIBERUT BARAT**																	
143	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Evaluasi Kinerja OPD Kec Sib Barat**																
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Perangkat Daerah	48 Laporan	262.561.500	36	125.910.000	12	25.390.000	12	24.710.000	100,00	19,63	48	150.620.000	100,00	57,37	Kecamatan Siberut Barat	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	480 Orang	4.261.542.117	360	3.010.493.431	120	1.072.369.943	12	994.809.958	10,00	33,04	372	4.005.303.389	77,50	93,99	Kecamatan Siberut Barat	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	1.092.713.000	36	773.980.000	12	190.980.000	12	190.875.000	100,00	24,66	48	964.855.000	100,00	88,30	Kecamatan Siberut Barat	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik	48 Paket	22.022.000	36	14.610.000	12	4.490.000	11	4.473.000	91,67	30,62	47	19.083.000	97,92	86,65	Kecamatan Siberut Barat	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	48 Paket	164.710.200	36	110.804.000	12	32.134.600	12	32.051.600	100,00	28,93	48	142.855.600	100,00	86,73	Kecamatan Siberut Barat	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	48 Paket	8.048.220	36	5.786.810	12	1.353.400	12	1.353.400	100,00	23,39	48	7.140.210	100,00	88,72	Kecamatan Siberut Barat	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rakor	48 Laporan	455.885.000	36	313.590.000	12	49.100.000	12	72.325.000	100,00	23,06	48	385.915.000	100,00	84,65	Kecamatan Siberut Barat	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	120.000.000	36	72.000.000	12	24.000.000	12	25.437.000	100,00	35,33	48	97.437.000	100,00	81,20	Kecamatan Siberut Barat	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 Laporan	858.432.000	36	620.388.000	12	156.000.000	12	118.500.000	100,00	19,10	48	738.888.000	100,00	86,07	Kecamatan Siberut Barat	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik daerah**																
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	20 Unit	47.230.000	15	34.230.000	5	9.230.000	5	9.230.000	100,00	26,96	20	43.460.000	100,00	92,02	Kecamatan Siberut Barat	
144	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD Kecamatan Siberut Barat**																
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**																
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	48 Laporan	162.705.000	36	112.790.000	12	20.235.000	1	20.055.000	8,33	17,78	37	132.845.000	77,08	81,65	Kecamatan Siberut Barat	
145	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalamPembangunan Tingkat Kecamatan**																
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**																
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang	192 lembaga	119.737.000	144	59.737.000	48	20.215.000	1	20.215.000	2,08	100,00	145	79.952.000	75,52	66,77	Kecamatan Siberut Barat	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	8 Laporan	85.769.000	6	37.160.500	2	13.563.000	1	12.918.000	50,00	95,24	7	50.078.500	87,50	58,39	Kecamatan Siberut Barat	
146	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**																
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan UUD 1945 , Pelestariaan Bheneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestariaan Bheneka Tunggal Ika	400 Orang	214.590.000	300	154.590.000	100	40.100.000	1	28.650.000	1,00	71,45	301	183.240.000	75,25	85,39	Kecamatan Siberut Barat	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas forum pimpinan di Kecamatan	4 Dok	88.034.000	3	38.034.000	1	10.480.000	1	10.480.000	100,00	100,00	4	48.514.000	100,00	55,11	Kecamatan Siberut Barat	
147	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa Se-Kecamatan Siberut Barat Pada tepat waktu**																
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa se-kecamatan Siberut Barat**																
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan aset desa	120 Dok	285.955.500	90	169.759.000	30	26.220.000	30	25.710.000	100,00	98,05	120	195.469.000	100,00	68,36	Kecamatan Siberut Barat	
	7.01	**KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA**																	
148	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	24 Kali	296.170.500			4	11.556.000	3	11.505.000	75,00	99,56	3	11.505.000	12,50	3,88	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	144 Org	13.488.876.084			36	1.179.727.455	36	1.078.920.277	100,00	91,46	36	1.078.920.277	25,00	8,00	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	144 Org	2.728.150.000			12	116.457.000	12	114.057.700	100,00	97,94	12	114.057.700	8,33	4,18	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32 Jenis	55.352.750			15	3.200.000	15	3.200.000	100,00	100,00	15	3.200.000	46,88	5,78	Kecamatan Siberut Barat Daya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan	73 Paket	407.449.940			17	27.309.900	14	27.053.900	82,35	99,06	14	27.053.900	19,18	6,64	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	50 Jenis	42.362.000			8	2.304.800	8	2.208.540	100,00	95,82	8	2.208.540	16,00	5,21	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	80 Kali	723.555.000			12	53.593.000	3	51.666.200	25,00	96,40	3	51.666.200	3,75	7,14	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 Unit	23.872.700			18	18.360.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket Peralatan dan mesin Lainnya	4 Unit	29.660.000			4	29.660.000	0	29.660.000	0,00	100,00	0	29.660.000	0,00	100,00	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum**																
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon dan listrik	48 Rekening	77.600.000			12	15.600.000	12	12.000.000	100,00	76,92	12	12.000.000	25,00	15,46	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 Org/bln	162.000.000			14	148.800.000	14	148.800.000	100,00	100,00	14	148.800.000	100,00	91,85	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah**																
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	220.410.000			1	5.170.000	1	5.170.000	100,00	100,00	1	5.170.000	100,00	2,35	Kecamatan Siberut Barat Daya	
149	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**																
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat**																
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	100 Orang	241.894.900			2	3.530.000	2	3.530.000	100,00	100,00	2	3.530.000	2,00	1,46	Kecamatan Siberut Barat Daya	
150	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**																
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Pegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah koordinasi pemberdayaan desa**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kali	152.748.900			1	25.678.000	1	25.072.000	100,00	97,64	1	25.072.000	100,00	16,41	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Kali	205.142.750			1	8.692.000	1	5.806.000	100,00	66,80	1	5.806.000	100,00	2,83	Kecamatan Siberut Barat Daya	
151	**7.01.05**	**PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**																
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah**																
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	Meningkatnya pengetahuan kebinekaan	1 Kali	549.357.500			1	42.795.000	1	42.795.000	100,00	100,00	1	42.795.000	100,00	7,79	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forkopimcam	2 Dok	54.439.000			2	7.813.000	2	6.033.000	100,00	77,22	2	6.033.000	100,00	11,08	Kecamatan Siberut Barat Daya	
152	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat**																
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa**																
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa	3 Dok	130.812.000			3	27.749.000	3	25.585.000	100,00	92,20	3	25.585.000	100,00	19,56	Kecamatan Siberut Barat Daya	
	7.01	**KECAMATAN PAGAI UTARA**																	
153	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Pagai Utara Utara	70 Bulan	8.902.464.705			14	1.355.328.590	14	1.229.279.496	100,00	90,70	14	1.229.279.496	20,00	13,81	Kecamatan Pagai Utara	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	70 bulan	2.265.284.000			12	97.100.000	12	95.545.000	100,00	98,40	12	95.545.000	17,14	4,22	Kecamatan Pagai Utara	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Terlaksananya layanan administrasi umum**																
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Serta Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor	88 Jenis	349.548.550			22	53.133.600	22	53.133.600	100,00	100,00	22	53.133.600	25,00	15,20	Kecamatan Pagai Utara	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	30 Jenis	48.679.200			5	8.036.400	5	8.036.400	100,00	100,00	5	8.036.400	16,67	16,51	Kecamatan Pagai Utara	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	850 hari	363.660.000			12	56.950.000	12	56.648.500	100,00	99,47	12	56.648.500	1,41	15,58	Kecamatan Pagai Utara	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum**																
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	60 Bulan	360.000.000			12	15.600.000	12	12.000.000	100,00	76,92	12	12.000.000	20,00	3,33	Kecamatan Pagai Utara	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honororium yang Tersedia	6 Bulan	65.000.000			12	206.000.000	12	200.040.000	100,00	97,11	12	200.040.000	200,00	307,75	Kecamatan Pagai Utara	
154	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat**																
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**																
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	5 Kali	155.000.000			1	34.750.000	1	34.750.000	100,00	100,00	1	34.750.000	20,00	22,42	Kecamatan Pagai Utara	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	36 Desa	225.000.000			3	7.600.000	3	7.262.000	100,00	95,55	3	7.262.000	8,33	3,23	Kecamatan Pagai Utara	
155	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**																
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan**																
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	36 Desa	225.000.000			9	25.200.000	9	25.200.000	100,00	100,00	9	25.200.000	25,00	11,20	Kecamatan Pagai Utara	
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fungsi Kontrol dan fungsi Evaluasi serta Pelaporan dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	36 Desa	82.800.000			9	20.700.000	7	20.658.000	77,78	99,80	7	20.658.000	19,44	24,95	Kecamatan Pagai Utara	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01	**KECAMATAN PAGAI SELATAN**																	
156	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA**	**Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah**																
	7.01.01.2.01	**PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Kepatuhan Penyusuinan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64 Lap	290.000.000	0	60.795.000	48	53.450.000	48	52.670.000	100,00	98,54	48	113.465.000	100,00	98,54	Kecamatan Pagai Selatan	
	7.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	56 Orang	5.516.746.844	14	1.087.580.056	182	1.438.969.988	182	1.295.328.740	100,00	90,02	196	2.382.908.796	100,00	90,02	Kecamatan Pagai Selatan	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	1.150.000.000	12	169.524.700	50	92.732.600	50	92.531.000	100,00	99,78	62	262.055.700	100,00	99,78	Kecamatan Pagai Selatan	
	7.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur Perangkat Daerah**																
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.960.000	1	1.260.000	1	985.000	1	985.000	100,00	100,00	2	2.245.000	100,00	100,00	Kecamatan Pagai Selatan	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket	225.000.000	4	33.863.200	4	21.148.000	4	21.023.000	100,00	99,41	8	54.886.200	100,00	99,41	Kecamatan Pagai Selatan	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14.030.000	0	940.000	1	1.580.000	1	1.580.000	100,00	100,00	1	2.520.000	100,00	100,00	Kecamatan Pagai Selatan	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Orang	850.753.075	12	152.667.300	36	88.870.000	36	88.870.000	100,00	100,00	48	241.537.300	100,00	100,00	Kecamatan Pagai Selatan	
	7.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan**																
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	19.200.000	0	200.000	12	5.200.000	8	1.367.401	66,67	26,30	8	1.567.401	66,67	26,30	Kecamatan Pagai Selatan	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Junlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	42 Laporan	1.357.728.000	12	314.232.000	12	201.300.000	12	199.306.259	100,00	99,01	24	513.538.259	100,00	99,01	Kecamatan Pagai Selatan	
	7.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Terpeliharanya Baragn Milik Daerah**																
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	150.000.000	4	29.090.000	4	5.170.000	4	4.904.000	100,00	94,85	8	33.994.000	100,00	94,85	Kecamatan Pagai Selatan	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Peralatan	130.000.000	4	2.840.000	7	8.965.000	7	8.965.000	100,00	100,00	11	11.805.000	100,00	100,00	Kecamatan Pagai Selatan	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Gedung	150.080.000	0	0	1	5.007.799	1	4.927.000	100,00	98,39	1	4.927.000	100,00	98,39	Kecamatan Pagai Selatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi																
157	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan**																
	7.01.02.2.04	**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT**	**Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**																
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkian	48 Laporan	207.635.900	0	0	12	13.840.000	12	13.700.000	100,00	98,99	12	13.700.000	100,00	98,99	Kecamatan Pagai Selatan	
158	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**																
	7.01.03.2.01	**KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**																
	7.01.03.2.01.001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawrah Perencanaan Pembanguan di Desa	28 Lembaga	100.000.000	7	20.434.200	7	11.088.000	7	11.088.000	100,00	100,00	14	31.522.200	100,00	100,00	Kecamatan Pagai Selatan	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Permberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	315.271.800	4	34.847.700	4	1.140.000	0	0	0,00	0,00	4	34.847.700	0,00	0,00	Kecamatan Pagai Selatan	
159	7.01.05	**PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/ Diselesaikan**																
	7.01.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/ Diselesaikan**																
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	286.523.184	100	74.855.000	100	3.282.000	100	3.282.000	100,00	100,00	200	78.137.000	100,00	100,00	Kecamatan Pagai Selatan	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48 Dokumen	78.916.000	12	9.147.000	12	2.334.000	9	1.440.000	75,00	61,70	21	10.587.000	75,00	61,70	Kecamatan Pagai Selatan	
160	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu**																
	7.01.06.2.01	**FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Desa yang Dibina**																
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuanga Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48 Dokumen	498.326.164	12	73.377.200	16	50.375.000	16	50.329.000	100,00	99,91	28	123.706.200	100,00	99,91	Kecamatan Pagai Selatan	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																	
161	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																	
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	90 Rekening	12.677.960.662			12	1.077.820.471	12	925.062.003	100,00	85,83	12	925.062.003	13,33	7,30	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	60 Dokumen	1.010.320.000			12	54.000.000	2	10.300.000	16,67	19,07	2	10.300.000	3,33	1,02	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																	
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	85 Paket	51.999.800			8	3.725.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	25 Paket	330.000.000			5	51.553.720	0	12.001.000	0,00	23,28	0	12.001.000	0,00	3,64	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	41 Paket	145.000.000			3	10.035.200	0	800.000	0,00	7,97	0	800.000	0,00	0,55	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	599 Dokumen	86.440.000			8	4.305.000	0	1.200.000	0,00	27,87	0	1.200.000	0,00	1,39	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 Laporan	1.215.000.000			12	36.002.000	0	9.179.900	0,00	25,50	0	9.179.900	0,00	0,76	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.01.2.01	**Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																	
	8.01.01..2.01.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan mesin	16 Unit	365.000.000			8	102.594.920	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	96 Laporan	72.000.000			12	24.000.000	1	5.720.313	8,33	23,83	1	5.720.313	1,04	7,94	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dana transfer umum Dana Aokasi umum	36 Laporan	350.000.000			18	93.600.000	18	45.000.000	100,00	48,08	18	45.000.000	50,00	12,86	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																	
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya kendaraan dinas	3 Unit	100.000.000			2	17.650.000	1	8.400.000	50,00	47,59	1	8.400.000	33,33	8,40	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	27 Unit	60.000.000			12	10.230.000	6	6.570.000	50,00	64,22	6	6.570.000	22,22	10,95	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
162	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOOGI PANCASIA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**																	
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Peaksanaan Bidang ideoogiPancasia dan Karakter Kebangsaan**		210															
	8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Terlaksananya perekrutan Paskibra	210 Orang	3.500.000.000			54	1.435.491.513	54	376.179.019	100,00	26,21	54	376.179.019	25,71	10,75	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
163	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELAUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**																	
	8.01.03.2.01	**Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**																	
	8.01.03.2.01.02	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan	Terbayarnya Bantuan Partai politik	45 dokumen	2.940.000.000			9	630.045.000	8	633.363.542	88,89	100,53	8	633.363.542	17,78	21,54	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah																	
164	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**																	
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Peaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**																	
	8.01.04.2.01.05	Peaksanaan Monitoring Evauasi dan Peaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evauasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya pengawasan ormas	6 Laporan	650.000.000			1	79.725.800	1	46.115.200	100,00	57,84	1	46.115.200	16,67	7,09	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
165	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**																	
	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan Budaya**																	
	8.01.05.2.01.02	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Teraciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama	12 Dokumen	1.150.000.000			1	70.789.800	1	66.928.700	100,00	94,55	1	66.928.700	8,33	5,82	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.05.2.01.03	Peaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahan Ekonomi ,Sosi,Budaya dan Fasiitasi Pencegahan Penyaagunaan Narkotika,Fasiitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terawasinya aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	6 Orang	1.050.000.000			100	108.864.600	100	81.929.600	100,00	75,26	100	81.929.600	1666,67	7,80	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.05.2.01.04	Peaksanaan Koordinasi di bidang ketahan ekonomi,sosia budaya dan Fasiitasi pencegahan penyaahgunaan Narkotika,Fasiitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Terawasinya aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	6 Orang	1.050.000.000			20	84.135.000	20	68.966.591	100,00	81,97	20	68.966.591	333,33	6,57	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
166	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**																	
	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Peaksanaan Pemantapan Kewajiban Nasiona dan Penganan Konfik Sosia**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025-2029		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10		11=10/5x100		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terkendalinya cegah dini konflik di Masyarakat	21 0rang	950.000.000			20	104.126.800	20	78.924.924	100,00	75,80	20	78.924.924	95,24	8,31	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah koordinasi bidang kebijakan dini daerah	10 Orang	950.000.000			5	88.760.800	5	81.226.048	100,00	91,51	5	81.226.048	50,00	8,55	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terpantauanaya tenaga kerja asing	25 Laporan	1.000.000.000			1	43.125.747	1	43.125.747	100,00	100,00	1	43.125.747	4,00	4,31	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
	8.01.06.2.01.06	Peaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terpantauanaya tenaga kerja asing	30 Dokumen	1.200.000.000			1	301.287.200	1	126.878.766	100,00	42,11	1	126.878.766	3,33	10,57	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	
Jumlah								**86.905**	**864.488.582.427**	**74.224**	**760.448.291.394**	**85,41**	**87,97**						

Penyelenggaraan pemerintahan daerah kurun waktu tahun 2025 menunjukkan realisasi kinerja dengan kategori tinggi yaitu 85,41 persen pada realisasi kinerja dan 87,97 persen pada realisasi keuangan. Pencapaian ini didorong oleh ketercapaian keluaran/*output* pada masing-masing kegiatan/sub kegiatan baik fisik maupun non fisik yang diselenggarakan oleh setiap OPD sesuai dengan urusan pengampu. Begitu juga dengan realisasi di sisi anggaran. Meskipun demikian, beberapa program prioritas yang masih terdapat hambatan/ kendala seperti pada pelaksanaan rehabilitasi Pelabuhan Maileppet (DAK Fisik 2024) pada sisi darat yang tidak terealisasi 100 persen (putus kontrak), rehabilitasi pada RSUD Tuapejat (DAK Fisik 2024) putus kontrak, Pembangunan perpustakaan Daerah, di sisi lain optimalisasi serapan anggaran pada setiap perangkat daerah menjadi akumulasi pencapaian kinerja keuangan di tahun 2025.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah akan dirinci berdasarkan masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

a. Masih rendahnya kualitas pembangunan dan daya saing manusia

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kuantitas dan kualitas pendidikan masih sangat rendah	Akses layanan pendidikan yang terbatas	Letak geografis kepulauan dan jarak perkampungan (rumah) yang sangat jauh dengan fasilitas pendidikan
			Sarana dan prasarana yang belum memadai (kondisi fisik bangunan, mobiler yang beberapa satuan pendidikan belum tersedia, alat peraga pendidikan), MCK.
			Konektivitas ke layanan pendidikan yang tidak ada (harus melalui jalur laut)
			Asrama siswa tidak tersedia
			Pendidikan masih mahal buat masyarakat miskin (beli perlengkapan sekolah)
		Mutu pendidikan masih rendah	Tenaga pendidik yang terbatas, tidak tersebar merata (menumpuk di pusat kecamatan)
			Guru masih berkualifikasi dibawah S1
			Masih banyak guru yang belum memiliki sertifikat pendidik
			Tidak adanya insentif bagi tenaga pendidikan di daerah tidak diminati (terpencil).

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Sarana pendukung layanan pendidikan masih terbatas seperti internet, komputer, perlengkapan laboratorium,
2	Kuantitas dan kualitas kesehatan masih sangat rendah	Akses layanan kesehatan yang terbatas	Layanan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat khususnya di *remote* area dikarenakan konektivitas yang hanya dilalui jalur laut seperti pada Desa Sinaka dan Desa Sagulubbeg.
			Biaya pendukung kesehatan yang masih tinggi (jalur laut)
			Sarana dan prasarana kesehatan kondisi rusak berat.
			Masih rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat (masih berobat pada sikerei)
		Kualitas Kesehatan yang rendah	Masih kekurangan dokter umum dan dokter spesialis
			Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
			Tenaga kesehatan yang tidak tersebar merata
			Alat kesehatan yang terbatas, bahkan untuk layanan kesehatan di puskesmas pembantu tidak tersedia
			Masih rendahnya pola hidup bersih dan sehat masyarakat
3	Masih tingginya persentase masyarakat miskin	Program Perlindungan sosial yang terbatas dan tidak optimal	Belum maksimalnya jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin
			Belum adanya jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin (perlengkapan sekolah gratis, transportasi sekolah gratis, transportasi umum gratis), masih banyak masyarakat miskin belum mendapatkan jaminan kesehatan.
			Pendataan masyarakat miskin yang belum tuntas.
		Peningkatan kapasitas masyarakat miskin belum optimal	Pembelian bantuan yang tidak tepat sasaran
			Pendampingan yang tidak dilakukan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemberdayaan yang tidak berkelanjutan
			Pelatihan yang terbatas dan tidak kontiniu

b. Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Pendapatan dan produktivitas masyarakat	Masih tingginya ketergantungan pangan dari luar Mentawai	Masih bertumpu pada tanaman keras dan tua
			Rendahnya diversifikasi pangan
			Sumber daya ekonomi (modal) petani dan nelayan yang terbatas.
			Belum rendahnya perkembangan produktivitas pangan lokal
		Hasil produksi pertanian yang masih rendah	Minimnya pendampingan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
			Pengetahuan petani dan nelayan yang masih rendah
			Perlengkapan pertanian dan perikanan masih tradisional dan skala kecil
			Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna dalam proses pengolahan pertanian dan perkebunan.
		Keterhubungan dengan pasar yang belum ada	Hasil panen yang tidak bisa dijual sehingga hasil pertanian/perikanan terbuang
		Sarana dan Prasarana yang belum memadai	Jalan usaha tani yang belum tersedia
			Irigasi yang terbatas
			Alat pertanian yang belum ada
			Sarana pendukung pertanian berbiaya mahal
		Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat	Masyarakat masih terbiasa dengan tanaman keras seperi cengkih, kelapa, pala yang perawatannya minim.
			Sektor pertanian dan perkebunan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
			Mulai bergesernya pola mata pencarian masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			khususnya kaum milenial ke atas, tidak tertarik di sektor pertanian dan perikanan.
2	Belum adanya Investasi, sektor ekonomi dan Hilirisasi masih skala rumah tangga	Infrastruktur Investasi masih terbatas dan tidak memadai	Konektivitas daerah masih rendah baik darat, laut dan udara
			Proses perizinan masih cukup sulit
			Layanan dasar (air bersih, listrik) belum memadai
		Rantai pasok komoditas masih rendah	Produksi pertanian, perkebunan dan perikanan tidak stabil dan belum memenuhi skala ekonomi
			Moda transportasi untuk logistik masih terbatas dan terkendala
		Belum memenuhi kelayakan bisnis	Biaya produksi yang cukup besar
			Sebagian besar wilayah Kepulauan Mentawai adalah kawasan hutan (82 persen)
			Antusias masyarakat akan investasi masih rendah.
		Akses pasar yang belum ada	Komoditas pertanian hanya untuk kebutuhan lokal, ekspansi usaha belum ada
			Rendahnya informasi pasar komoditas oleh masyarakat
			Belum adanya *offtaker* yang dapat menampung hasil industri pengolahan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
			Belum adanya perlindungan usaha pertanian masyarakat.
3	Masih rendahnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Kemampuan dan keahlian masyarakat yang terbatas	Minimnya pelatihan *skill* kewiraswastaan bagi masyarakat
			Pelatihan yang dilakukan tidak berkelanjutan dan konsisten
			Belum terhubungnya konsep pelatihan dengan dunia usaha
		Akses finansial yang masih rendah	Masih rendahnya akses keuangan bagi masyarakat untuk berusaha
			Tingginya suku bunga yang diberikan dan pengurusan yang rumit

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja	Terbatasnya pelatihan keterampilan/*skill* bagi perempuan
			Edukasi pemberdayaan perempuan masih rendah dan tidak berkelanjutan
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia kerja/bisnis masih rendah	Pelatihan *e-commerce* masih terbatas
			Pemahaman dan pemanfaatan digitalisasi pemasaran masih rendah
		Akses pasar kerja masih rendah	Pelatihan yang dilakukan belum sesuai dengan pasar kerja yang tersedia
			Belum adanya kerja sama dengan dunia usaha
		Masih rendahnya partisipasi kaum disabilitas dalam dunia kerja	Pelatihan dan peningkatan keahlian belum menyasar kaum disabilitas
			Belum adanya regulasi penguatan kaum disabilitas
			Belum ada kuota bagi kaum disabilitas untuk mengakses dunia kerja

c. Masih rendahnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Konektivitas wilayah masih rendah	Infrastruktur yang tersedia belum merata dan belum memadai	Biaya kemahalan konstruksi yang tinggi di Kepulauan Mentawai
			Wilayah pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat yang terpencar dan saling berjauhan
			Material konstruksi yang didatangkan dari luar Mentawai
			Sebagian besar wilayah Kepulauan Mentawai kawasan hutan (82 persen)
			Pemeliharaan infrastruktur yang belum optimal
		Keterhubungan antar wilayah masih terbatas	Jalan yang sepenuhnya belum terhubung antar kecamatan
			Moda transportasi yang belum melayani seluruh wilayah (desa)
2	Masih rendahnya pemanfaatan air baku untuk	Infrastruktur air baku belum memadai	Tingginya biaya konstruksi air baku

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kehidupan produktif		
			Wilayah air baku berada pada kawasan
			Belum terintegrasinya pemanfaatan air baku dengan sektor lainnya (pertanian, perikanan, layanan dasar)
			Masih rendahnya kualitas air yang disalurkan kepada masyarakat

d. Masih rendahnya kawasan sebagai basis kemajuan wilayah yang didukung PSU berkualitas dan berwawasan lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Desa dengan kategori Desa Mandiri	Belum optimalnya pengentasan kawasan kumuh	Masyarakat mendiami kawasan kumuh sudah lama (beranak cucu)
			Adanya pembiaran penambahan rumah dikawasan kumuh
			Belum terdapat strategi teknis dan upaya relokasi atau penanganan kawasaan kumuh yang terintegrasi
			Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat
			Belum tersedianya permukiman baru
		Ketersediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan masih rendah	Masih rendahnya konsistensi penganggaran untuk PSU
			Masih rendahnya kuantitas dan kualitas PSU yang tersedia
			Integrasi layanan dasar (air bersih, sanitasi) di kawasan permukiman masih rendah
		Rendahnya pemberdayaan masyarakat khususnya kaum milenial (pemuda)	Masih terbatasnya ruang kreasi pemuda di setiap desa
			Masih rendahnya peran BUMDes dalam mengelola potensi desa
			Terbatasnya akses pelatihan kewiraswastaan bagi masyarakat khususnya para pemuda dan perempuan

e. Masih rendahnya harmonisasi kehidupan masyarakat berbasis sosial budaya dan lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya tatanan kehidupan sosial, budaya masyarakat	Rendahnya kesadaran pentingnya menjaga identitas dan nilai Budaya Mentawai	Rendahnya rasa kebanggaan beberapa orang/masyarakat menggunakan bahasa dan atribut Mentawai
			Masih terbatasnya pengajaran muatan lokal disatuan pendidikan
			Masih rendahnya penampilan sanggar kesenian atau festival budaya Mentawai di setiap desa
			Akulturasi budaya yang didominasi oleh budaya di luar Mentawai
		Rendahnya pemberdayaan masyarakat adat atau UMA	Belum adanya alokasi anggaran dalam pemberdayaan masyarakat adat atau UMA
			Masih rendahnya peningkatan kapasitas masyarakat adat/UMA untuk mengelola hasil hutan atau kehidupan ekonominya
		Masih rendahnya dukungan layanan publik dan dasar di kawasan UMA dan masyarakat adat	Jarak MHA dan UMA yang berjauhan sehingga memerlukan anggaran yang besar
			Letak geografis yang terpisah laut dan sungai sehingga memerlukan biaya besar dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat adat dan UMA
2	Masih rendahnya pembangunan kehidupan keluarga dan masyarakat yang inklusif dan berwawasan lingkungan	Masih rendahnya perlindungan terhadap anak dan perlindungan perempuan serta kesetaraan gender	Melemahnya peran keluarga dan komunitas adat sebagai wahana pewarisan nilai budaya
			Kurangnya penerapan prinsip PUG dalam pembangunan daerah
			Masih rendahnya pemahaman bagi masyarakat dan keluarga tentang hak-hak anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan
			Pemahaman bahwa perempuan mengurus dapur masih tinggi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Edukasi keluarga masih rendah
			Lemahnya literasi digital dan media sosial bagi keluarga

f. Masih rendahnya ekosistem alam yang berkualitas dan resiliensi terhadap bencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendah pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan	Masih rendahnya pemanfataan izin lingkungan dalam pembangunan	Masih terbatasnya informasi tahapan dan proses pengurusan izin lingkungan
			Masih rendahnya kepatuhan dalam pengurusan izin lingkungan
			Belum adanya sanksi yang tegas bagi yang tidak mengurus izin lingkungan
			Belum tersedianya sumber daya manusia dalam menguji kualitas air, udara, tanah dan lahan
			Masih terbatasnya peralatan dan perlengkapan pengujian lingkungan
			Peran aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan belum optimal
2	Masih tingginya risiko terhadap dampak bencana	Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan risiko bencana	Belum tersedianya pusat informasi kebencanan di kawasan rawan bencana
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebencanaan (masyarakat daerah pesisir, bangunan di tanah yang lereng, rumah di kawasan sungai)
			Masih terbatasnya sosialisasi dan penggunaan alat peraga kebencanaan kepada masyarakat
			Masih terbatasnya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam PRB
		Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal	Masih tingginya eksploitasi kawasan rawan bencana (pengambilan pasir, terumbu karang, bakau)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih rendahnya kolaborasi antar pihak dalam menjaga dan melestarikan kawasan rawan bencana
			Masih adanya penerbitan ijin di kawasan rawan bencana
			Masih lemahnya tindakan penertiban bangunan atau aktivitas di kawasan rawan bencana
		Masih miniminya infrastruktur kebencanaan	Struktur topografi Mentawai yang cenderung landai sehingga memerlukan infrastruktur shelter dalam jumlah yang banyak dan berbiaya mahal
			Masih banyaknya jalur evakuasi yang tidak dibangun
			Masih banyaknya jalur evakuasi yang tidak dirawat
			Kepulauan Mentawai yang sangat luas dan garis pantai yang panjang sehingga membutuhkan biaya mitigasi kebencanaan yang besar.

g. Masih rendahnya pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	Pengelolaan destinasi wisata daerah belum maksimal	Belum tersusunnya Rencana Induk Pariwisata Daerah
			Belum tersedianya studi kelayakan dan *masterplan* destinasi wisata strategis dan prioritas
			Masih rendahnya konektivitas menuju destinasi wisata
			Belum tersedianya amenitas yang memadai
			Fasilitas penunjang, seperti penginapan, sanitasi, dan area publik, masih banyak belum memadai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum tersedianya pengelolaan destinasi pariwisata yang handal
			Belum adanya pengembangan desa wisata yang terstruktur dan yang terkelola dengan baik
		Mesih rendahnya kontribusi masyarakat dan peran pelaku pariwisata	Masih rendahnya sikap ramah tamah (*hospitality*) terhadap wisatawan
			Masih rendahnya pelatihan pelaku wisata khususnya pemberian sertifikasi bagi pelaku wisata
			Belum adanya standardisasi dalam penyajian makanan, minuman dan akomodasi di kawasan wisata
2	Masih rendahnya kontribusi usaha ekonomi kreatif dalam pembangunan ekonomi masyarakat	Produk ekonomi kreatif belum mampu bersaing	Masih terbatasnya pelatihan peningkatan nilai produk ekonomi kreatif
			Sertifikasi produk ekonomi kreatif masih sangat rendah
			Masih rendahnya pendampingan pelaku usaha ekonomi kreatif
			Terbatasnya akses para pelaku usaha ekonmoi kreatif dalam mengakses perbankan
			Masih tingginya biaya produksi bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif
			Masih terbatasnya wadah pematangan bisnis (inkubator bisnis)bagi pemula di usaha ekonomi kreatif
		Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan Inovasi dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif	Terbatasnya kemampuan para pelaku usaha ekonomi kreatif dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan usaha
			Masih rendahnya kolaborasi antar pelaku usaha ekonomi kreatif
			Masih minimnya fasilitasi promosi menggunakan media digital
			Masih rendahnya ruang kreasi dan inovasi produk

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			ekonomi kreatif

h. Masih rendahnya penerapan kehidupan masyarakat yang beradab, tenteram dan imparsial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	Masih tingginya pelanggaran hukum dan lemahnya penegakan perda	Masih terbatasnya informasi hukum dan peraturan yang disampaikan kepada masyarakat
			Belum adanya penegakan yang terukur bagi masyarkaat yang telah melanggar
			Adanya pembiaran oleh penegak hukum dan penegak perda
			Rendahnya literasi hukum dan peraturan bagi masyarakat
		Masih lemahnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tidak bekerjanya sistem keamanan lingkungan
			Masih lemahnya peran keluarga dalam membina anggota keluarga sehingga masih ada diluar di jam istirahat malam
			Masih rendahnya sosialisasi dan advokasi hukum bagi anak sekolah, remaja dan masyarakat
			Minimnya forum dialog antaragama dan antarkelompok sosial.

i. Masih rendahnya pelaksanaan birokrasi yang prima

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Masih rendahnya pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan	Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam memanfaatkan digitalisasi
			Masih terbatasnya sumber daya manusia dan lembaga di Kepulauan Mentawai dalam menyediakan dan menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya literasi digital di kalangan aparatur pemerintah
			Belum adanya peta jalan pengembangan digitalisasi pemerintahan
			Masih pada berada di zona nyaman
		Masih rendahnya penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN	Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam penjenjangan karir
			Masih tingginya ketimpangan kualitas ASN
			Masih rendahnya kinerja ASN
			Belum optimalnya penerapan transformasi kelembagaan berbasis kinerja
2	Masih rendahnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	Masih rendahnya penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik pemerintahan	SDM yang terbatas
			Belum terbangun ekosistem inovasi pada perangkat daerah
			Masih terbiasa dengan budaya birokrasi berbelit-belit
			Belum terlaksananya akuntabilitas kinerja pelayanan publik
			Masih rendahnya integrasi data digitalisasi antar perangkat daerah
3	Masih rendahnya pendapatan daerah	Manajemen pengelolaan pendapatan daerah belum terpadu dan optimal	Belum diterapkannya digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah
			Masih rendahnya sosialisasi sumber-sumber pendapatan daerah bagi pelaku usaha, wajib pajak, dan masyarakat
			Masih rendahnya kolaborasi antar sekttor dan antar instansi dalam penegakan
			Belum terdapatnya lembaga pengelolaan pendapatan daerah
			Belum tersedianya SDM pengelolaan pendapatan daerah yang bersertifikat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya penerapan insentif dan disinsentif pajak

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan capaian kinerja yang kemudian dilakukan telaah lebih mendalam dengan perangkat daerah pengampu urusan, berdasarkan capaian tersebut menjadi catatan terhadap permasalahan yang akan ditarik dan didentifikasi pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

2.3.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya guru yang bersertifikat (sertifikasi) sekitar 39 persen. (Disesuaikan)
2) Masih rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan sarjana (strata 1) sekitar 90,79% persen.
3) Akses rumah menuju sarana Pendidikan yang berjauhan (letak geografis) dan tidak dapat ditempuh jalur darat.
4) Belum ada konsep pendidikan berasrama dalam upaya menjawab kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang tersebar dengan akses layanan pendidikan yang terbatas.
5) Terbatasnya sarana tempat tinggal/ asrama untuk para peserta didik yang jauh dari orang tua/tempat tinggal.
6) Masih rendahnya tingkat partisipasi kesetaraan, masih sekitar 57 persen.
7) Belum memadainya kualitas dan ketersediaan sarana layanan dan fasilitas pendidikan.
8) Belum tersedianya asrama untuk sebagai tempat tinggal anak yang lokasi rumahnya jauh dari sekolah.
9) Masih lambatnya transformasi digital dalam implementasi proses belajar mengajar dan administrasi pendidikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan sarana layanan kesehatan, dan masih banyak masyarakat masih menggunakan dukun (sikerei)/ tenaga non kesehatan.
2) Masih rendahnya cakupan jaminan kesehatan khususnya masyarakat miskin yang memanfaatkan layanan kesehatan (sekitar 46 persen).

3) Masih terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat dusun dengan kondisi geografis yang belum sepenuhnya dapat diakses jalur darat.
4) Belum adanya rumah sakit di setiap pulau besar (Siberut, Sikakap) sebagai bagian dari sistem kesehatan daerah.
5) Masih terbatasnya tenaga dokter umum, dokter spesialis dan alat-alat kesehatan hingga ke pusat-pusat layanan kesehatan di desa (Poskesdes).
6) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kasus penyakit menular dan tidak menular.
7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya cakupan aksesibiltas jalan sebagai prasarana penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2) Tingginya angka kemahalan kontruksi di Kepulauan Mentawai.
3) Tidak tersedianya material lokal sebagai bahan dasar pembangunan fisik (jalan dan jembatan) seperti batu, pasir, kerikil yang harus didatangkan dari luar Mentawai.
4) Belum terhubungnya akses darat (Jalan) Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan sebagai bagian dari sistem transportasi daerah.
5) Terbatasnya ruang pembangunan fisik di Kepulauan Mentawai dikarenakan sekitar 82 persen adalah Kawasan hutan.
6) Masih rendahnya keterjangkauan/cakupan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) daerah yaitu sebesar 69,39 persen atau sekitar 32 desa.
7) Ketersediaan sanitasi rumah tangga belum menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh (ada 28 kawasan kumuh).
2) Masih rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
3) Masih banyaknya permukiman potensi bencana alam belum di relokasi.
4) masih terdapat kawasan permukiman masyarakat berada pada kawasan hutan.
5) Belum adanya hamparan lahan/tanah yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan pembangunan, khususnya untuk menyediakan permukiman layak bagi masyarakat.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2) Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan masih terjadinya gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum.
3) Masih belum adanya strategi mitigasi bencana kebakaran, serta minimnya sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran.
4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta alat peraga informasi kebencanaan.
5) Letak geografis yang kepulauan dan permukiman penduduk yang terpencar di setiap dusun dengan akses dan infrastruktur telekomunikasi yang terbatas menyulitkan dalam koordinasi dan pemberian layanan kebencanaan.
6) Pada umumnya kawasan permukiman masyarakat masih berada pada zona rawan bencana.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih belum maksimalnya pengelolaan dan *updating* data DTKS, masih terdapat *exclusion error* dan *inclusion error* data kemiskinan daerah.
2) Kurangnya penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana seperti lumbung sosial, dapur umum, peralatan dan perlengkapan kesiapsiagaan bencana.

2.3.2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengembangan dan pendampingan kewirausahaan (*entrepreneurship*) mulai dari hulunya pengembangan dan peningkatan kapasitas sampai pada hilirnya yaitu bisa mengembangkan usaha atau berwirausaha (mandiri).
2) Belum adanya rencana pembangunan tenaga kerja kabupaten.
3) Masih rendahnya kompetensi/skill tenaga kerja.
4) Masih terbatasnya akses pencari kerja terhadap lapangan pekerjaan.
5) Belum adanya pendampingan terhadap akses tenaga kerja dan *enterprenuer* ke dunia usaha, permodalan dan pasar.
6) Aksesibilitas yang sulit kepulau-pulau terluar menghambat penyerapan tenaga kerja.
7) Kurangnya program pelatihan khusus untuk pengembangan tenaga kerja lokal untuk kebutuhan kerja lokal dan nasional

8) Keterbatasan infrastruktur dasar seperti transportasi dan komumikasi menghambat pengembangan investasi dan ketenagakerjaan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya kontribusi alokasi anggaran dalam penguatan kabupaten layak anak dan gender.
2) masih rendahnya komitmen pemangku kepentingan (pimpinan perangkat daerah, desa) dalam mencanangkan dan menerapkan kabupaten layak anak.
3) Kurangnya keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangakan usaha.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya ketersediaan pangan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
2) Ketahanan pangan daerah masih belum stabil dan rentan terhadap berbagai gangguan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun akses pangan masyarakat.
3) Masih perlu ditingkatkannya penganekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam.
4) Pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan belum berjalan secara optimal.
5) Pengelolaan serta ketersediaan cadangan pangan daerah belum mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
6) Produksi pangan lokal masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
7) Sistem distribusi dan logistik pangan antar wilayah kepulauan belum berjalan secara efektif dan efisien.
8) Kelembagaan serta sistem pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat belum optimal dalam menjaga stabilitas pasokan pangan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih terbatasnya luasan lahan yang dilakukan sertifikasi lahan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) perwakilan Kepulauan Mentawai.
2) Mahalnya biaya operasional pengurusan sertifikasi lahan secara mandiri.

3) Belum tersedianya bank tanah yang digunakan sebagai wadah penyediaan tanah untuk pembangunan.
4) Masih rendahnya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait alih fungsi lahan, pemanfaatan lahan pada kawasan dan proses redistribusi lahan baik itu program TORA, perhutanan sosial, hutan adat (Masyarakat Hukum Adat).

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya tenaga atau sumber daya di bidang keahlian lingkungan hidup.
2) Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
3) Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah masih di ibukota kabupaten (Tuapejat sekitarnya), sarana dan prasarana yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah.
4) Masih terbatasnya aparatur dalam melakukan pengawasan, pengujian dan penegakan lingkungan hidup.
5) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Kondisi geografis yang sulit dengan akses yang terbatas sehingga memakan waktu dan biaya yang besar dalam menjangkau di setiap wilayah masyarakat.
2) Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk perumusan kebijakan daerah (OPD).
3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat.
2) Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa (BUMDes) dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait keluarga berencana.

2) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
3) Masih kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.
4) Masih Kurangnya sosialisasi terkait kualitas dan ketahanan keluarga.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan seperti di pelabuhan, PJU, rambu-rambu.
2) Belum terbangunnya 5 pelabuhan penyeberangan sebagai simpul konektivitas sistem transportasi daerah.
3) Belum optimalnya pengelolaan pelayaran dalam wilayah kabupaten (antar pulau), masih terdapat wilayah khususnya di pantai barat yang belum mendapatkan layanan transportasi laut.
4) Masih terbatasnya jalur/trayek pelayaran menuju Kepulauan Mentawai akses masih 3 kali seminggu.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya *grand design* pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE.
2) Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.
3) Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet
4) Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Koperasi Aktif pada Tahun 2025 sebanyak 65 persen.
2) Minimnya diversifikasi usaha koperasi.
3) Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wira usaha mandiri.
4) Masih rendahnya pendampingan kewirausahaan dan kepada pelaku usaha mikro.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan regulasi tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal.
2) Sulitnya mengurus kerja sama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah adat/ulayat.

3) Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah.
4) Belum lengkapnya data kajian terkait potensi dan peluang investasi.
5) Adanya kompleksitas dalam proses perizinan yang menghambat investasi
6) Kurangnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) menghambat dalam pengawasan kegiatan dan mengidentifikasi hambatan investasi.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya SDM keolahragaan.
2) Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang.
3) Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi kepemudaan.
4) Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan dan keolahragaan.
5) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
6) Masih rendahnya pembinaan terhadap bibit atlet potensial dan pembinaan bagi atlet yang berkelanjutan
7) Kurangnya tenaga pelatih yang profesional dan berkualitas
8) Koordinasi antar lembaga belum berjalan dengan baik seperti kerjasama antara pemerintah, organisasi olahaga, sekolah, dan masyarakat sehingga program tidak maksimal
9) Masih rendahnya pembinaan/pelatihan terhadap pemuda/i untuk berwirausaha.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum defenitifnya SOTK yang mengurusi statistik daerah.
2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah.
3) Belum terjalinnya kerjasama dengan lembaga statistik (BPS) dan lembaga lain penyedia data dalam mewujudkan satu data terintegrasi.
4) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
5) Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi secara optimal.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah.

2) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
3) Belum adanya SDM persandian yang kompeten dalam memastikan keamanan sistem infirmasi pemerintah daerah.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Rendahnya pengenalan dan pemahaman budaya daerah oleh kalangan muda.
2) Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan sehingga belum terintegrasi dengan sektor lainnya.
3) Belum terselenggaranya event atraksi kebudayaan secara kontiniu.
4) Masih sedikitnya pengakuan dan penetapan cagar budaya.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum terdapatnya gedung perpustakaan daerah sebagai sarana layanan perpustakaan publik.
2) Masih terbatasnya sosialisasi dan penggunaan media sosial/elektronik dalam mengampanyekan budaya literasi.
3) belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book), pustaka keliling
4) Terbatasnya tenaga dan sumber daya perpustakaan.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah.
2) Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan keamanan penyimpanan arsip.
3) Keterbatasan ketersediaan SDM pengelola kearsipan.

2.3.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap.
2) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budi daya.
3) Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, kelompok nelayan)
4) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan (TPI dan pabrik es)

5) Masih rendahnya pendampingan bagi kelompok nelayan tangkap dan budi daya serta pendampingan pada industri pengolahan ikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengembangan destinasi prioritas 3M1K.
2) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan desa wisata.
3) Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyelenggarakan even/festival.
4) Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien.
5) Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif menunjang pariwisata

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.
2) Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian.
3) Belum optimalnya pendampingan petani dan kelembagaan tani (kelompok tani).
4) Belum memadainya ketersedian infrastruktur pertanian (jalan pertanian, irigasi), sarana prasarana, lahan, pupuk dan air.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penggunaan pasar sebagai sarana perdagangan.
2) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan.
3) Minimnya SDM penera alat UTTP.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra IKM (revitalisasi IKM Taraet)
3) Belum optimalnya keterkaitan sektor pertanian dan perikanan dengan sektor industri pengolahan den sektor industri lainnya.
4) Belum optimalnya pendampingan calon dan pelaku industri mikro dan kecil dalam hal bisnis proses, sertifikasi, manajemen mutu, akses pasar, prmodalan.

2.3.2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang

a. Unsur Penunjang Perencanaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah dalam penyusunan akuntabilitas kinerja.
2) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
3) Masih rendahnya kapasitas fungsional perencana dalam Menyusun dokumen perencanaan.

b. Unsur Penunjang Keuangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

2) Masih rendahnya kontribusi pendapatan daerah (pajak dan retribusi daerah) untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.
3) Belum teradministrasinya aset dengan baik.

c. Unsur Penunjang Kepegawaian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karier ASN.
2) Sistem penilaian kinerja ASN yang belum akurat.
3) Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja ASN.
4) Belum terlaksana sepenuhnya merit sistem.
5) Masih terdapatnya ASN yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya.
6) Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan.
7) Belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN.

d. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Pemetaan Potensi Lokal belum terupdate
    a. Belum semua desa memiliki profil desa
    b. SK Bupati 25 tahun 2016 tentang potensi unggulan daerah perlu dilakukan riview sesuai dengan kondisi terbaru (pisang, keladi, cengkeh, pala, kelapa)
2) Lemahnya hilirisasi, diseminasi dan komersialisasi riset
    a. Banyak hasil penelitian berhenti di laporan.
    b. minim inkubator dan techno park
    c. Kurang pendampingan komersialisasi produk
    d. Minim akses pasar.
3) Keterbatasan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan
    a. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sering belum terintegrasi dengan baik.
    b. Ego sektoral masih kuat.
    c. Kurangnya forum kolaboratif yang berkelanjutan.
4) Budaya Inovasi yang Belum Tumbuh Kuat
    a. Inovasi belum menjadi indikator utama kinerja daerah.
    b. Minimnya penghargaan terhadap inovator lokal.
5) Kualitas dan Kuantitas SDM Inovatif yang Belum Merata
    a. Jumlah peneliti dan inovator daerah terbatas.
    b. Kompetensi teknologi belum merata, terutama di daerah tertinggal.
    c. Brain drain ke kota besar
6) Keterbatasan Pendanaan Riset dan Inovasi dan kesenjangan infrastruktur teknologi

a. Anggaran riset daerah masih rendah dibanding kebutuhan pembangunan berbasis inovasi.
b. Akses internet dan laboratorium riset belum ada

e. Unsur Penunjang Pengawasan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Perlunya peningkatan kualitas SDM auditor melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian temuan yang ada serta peningkatan sosialisasi kepada penyelenggaraan negara terkait tertib administrasi keuangan.
2) Masih rendahnya penguatan tata kelola pemerintah melalui pendampingan reformasi birokrasi, penerapan ZI, WBK/WBBM, SAKIP dan berbagai penilaian tata kelola pemerintah lainnya.
3) Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 (enam) pelayanan dasar sebagaimana amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada tahun 2024, seluruh Jenis Pelayanan Dasar dapat terlaksana dengan baik dengan pencapaian setiap indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.145
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pendidikan Anak Usia Dini	3.678	2.075	56,42
2	Pendidikan Dasar	18.260	17.351	95,02
3	Pendidikan Kesetaraan	1.984	1.609	81,10

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Pendidikan tahun 2025 antara lain:

a. Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dinilai belum maksimal. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini masih rendah yaitu 35,76 persen.
b. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang sekolah dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi.

c. Masih kesulitan untuk mendapatkan data pendidikan (peserta didik tidak mampu (miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah satuan pendidikan, ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi).
d. Belum maksimalnya kinerja Tim penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan begitu juga dengan pembinaan kepada OPD pengampu SPM.

Tabel 2.146
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.899	1.899	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.544	1.544	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.363	1.363	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	4.951	4.951	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	13.345	13.345	100%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.993	8.447	70,43%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	10.852	8.021	73,91%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.977	2.699	90,66%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	200	177	88,5%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	43	40	93,02%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.470	1.753	70,97%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	2.807	2.678	95,40%

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2025 yakni :
a. Masih banyak remaja usia produktif belum merasa perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan remaja sehingga partisipasi kunjungan ke layanan kesehatan masih rendah.
b. Aksesibilitas kunjungan layanan kesehatan hingga ke dusun yang masih terbatas dan memerlukan biaya yang mahal menjadi kendala melakukan layanan kesehatan luar gedung untuk pelayanan kesehatan khususnya untuk penduduk usia lanjut.
c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya khususnya yang terindikasi TBC ke layanan kesehatan. Pada umumnya masyarakat malu dan merasa menjadi perhatian masyarakat jika didiagnosa mengidap penyakit TBC.

Tabel 2.147
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI MENTAWAI	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	22857	15411	7.446	67,42
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	22857	15916	6.941	69,63

permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2025 yakni :

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2025 yakni :

a. Belum maksimalnya kinerja pengelolaan air minum pada SPAM yang tersedia.
b. Jaringan SPAM yang tersedia sudah banyak yang rusak (bocor) sehingga perlu pemeliharaan atau pembangunan dengan biaya yang relatif mahal.
c. Pengelolaan BPSPAM/KPSPAM belum maksimal sehingga jaringan air bersih skema Pamsimas belum dapat dinikmati oleh masyarakat.
d. Sebaran rumah masyarakat yang membutuhkan sanitasi terpencar sehingga membutuhkan operasional yang besar dalam pembangunan sanitasi dalam kawasan permukiman.
e. Spesifikasi teknis pembangunan sanitasi rumah tangga yang belum memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat.
f. Pola hidup masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sanitasi (jamban) dalam kehidupan sehari-hari.
g. keterbatasan anggaran, Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi masih memerlukan dukungan pendanaan yang memadai agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang berimplikasi pada terbatasnya alokasi pendanaan untuk pembangunan, pengembangan, serta peningkatan sarana dan prasarana air minum maupun sanitasi. Akibatnya, pelaksanaan program tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga capaian Standar Pelayanan Minimal pada sektor ini masih menghadapi tantangan untuk dapat ditingkatkan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 2.148
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Total Rumah Target Pelayanan SPM	realisasi		
			Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	100	0	100
2	Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	10	10	-	100

h. Capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah 100 persen. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana di Desa Saureinu (25 unit) Pembangunan Baru, Sirilogui (20 unit), Sigapokna (20 unit), Begitu juga dengan capaian penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah adalah 100 persen karena sudah melakukan identifikasi dan pendataan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah di Desa Taikako (10 unit).

Tabel 2.149
Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pelayanan SPM	Realisasi		
			Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	0	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	0	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	0	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.000	1634	0	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	0	100

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025 (Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
   Jumlah personel BPBD yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, tidak semua personel memiliki kompetensi teknis kebencanaan yang memadai sesuai standar yang ditetapkan dalam SPM.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.
   Ketersediaan peralatan tanggap darurat, kendaraan operasional, serta fasilitas pendukung seperti sistem komunikasi dan peralatan evakuasi masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan kepulauan.
3. Kondisi Geografis Wilayah Kepulauan.
   Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar dan sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan distribusi bantuan, mobilisasi tim tanggap darurat, dan pelaksanaan layanan SPM tidak dapat dilakukan secara cepat dan merata.
4. Keterbatasan Anggaran Penanggulangan Bencana
   Alokasi anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana dan pemenuhan indikator SPM masih terbatas, sehingga beberapa program seperti pelatihan masyarakat, simulasi kebencanaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
5. Rendahnya Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat
   Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana serta prosedur evakuasi masih relatif rendah. Hal ini berdampak pada lambatnya respons masyarakat saat terjadi bencana dan meningkatkan risiko korban jiwa maupun kerugian.
6. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal
   Koordinasi antara BPBD dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, serta lembaga non-pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemenuhan SPM masih perlu ditingkatkan agar penanganan bencana dapat lebih terintegrasi.
7. Keterbatasan Sistem Informasi dan Data Kebencanaan
   Pengelolaan data dan informasi kebencanaan belum sepenuhnya terintegrasi dan diperbarui secara berkala, sehingga mempengaruhi proses perencanaan, mitigasi, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan SPM.
8. Minimnya Infrastruktur Pendukung Mitigasi Bencana
   Infrastruktur mitigasi seperti jalur evakuasi, rambu-rambu kebencanaan, tempat evakuasi sementara, serta sistem peringatan dini masih terbatas di beberapa wilayah rawan bencana.

Isu-isu strategis BPBD serta permasalahan yang di hadapi agar diberi penjelasannya :
Sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat pada Misi Kepala Daerah Misa Kelima yaitu Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana. Ada beberapa isu strategis terkait resiliensi bencana yaitu:

a. Kondisi bangunan di Sumatera Barat Sebagian besar belum ramah gempa.
b. Deforestasi dan Drainase yang buruk menyebabkan terjadinya banjir ketika hujan lebat.
c. Permukiman di zona merah gunung api tidak bisa dipindahkan karena alasan ekonomi (pertanian, dan lain-lain).
d. Kondisi EWS tidak layak dan tidak berfungsi.
e. Partisipasi dalam pelatihan mitigasi bencana masih rendah.
f. Ketersediaan alat berat untuk tanggap darurat sangat minim.
g. Potensi megathrust di Mentawai mencapai 8,5 magnitudo.
h. Ancaman Bencana tidak mengenal batas wilayah Administrasi.

Sementara sebagai isu strategis di regional Kabupaten Kepulauan Mentawai fakta bahwa sebagai wilayah yang dilintasi jalur Zona Megathrust Mentawai-Siberut sangat rentan pada potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Zona megathrust Mentawai adalah daerah sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal yang lokasinya berada di sebelah barat Kepulauan Mentawai. Zona Megathrust Mentawai merupakan hasil dari aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia di bawah Lempeng Eurasia. Selain gempa bumi dan tsunami, potensi bencana lainnya juga menjadi permasalahan pembangunan kedepan seperti banjir, gelombang/cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Kesiapsiagaan dalam memitigasi bencana menjadi hal penting dan strategis kedepan untuk meminimalisir segala kerugian yang ditumbulkan akibat bencana yang terjadi.

Permasalahan Pembangunan Daerah serta RPJMD telah memuat isu strategis pembangunan daerah, namun perlu diperkuat dengan karakteristik Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah kepulauan, rawan bencana dan memiliki keterbatasan konektivitas. Permasalahan infrastruktur dasar seperti kemantapan jalan, konektivitas laut-darat-udara, air bersih, listrik stabil, sanitasi, akses permukiman, persampahan dan kualitas lingkungan perlu dirumuskan secara lebih terukur, mengingat seluruh isu tersebut menjadi prasyarat bagi pengembangan pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan arahan penyempurnaan, permasalahan pembangunan daerah dirumuskan dengan mencantumkan indikator, baseline (kondisi tahun 2025), lokasi, kelompok terdampak dan perangkat daerah penanggung jawab, sehingga isu infrastruktur wilayah, kebencanaan, lingkungan hidup, transportasi antarpulau, energi, air bersih dan sanitasi dapat dihubungkan langsung dengan sasaran

RPJMD, prioritas tahun 2027 dan kebutuhan intervensi program/kegiatan.

Tabel 2.150
Matriks Permasalahan Pembangunan Daerah Berdimensi Kebencanaan dan Kewilayahan Kepulauan

No	Permasalahan (Indikator)	Baseline 2025	Lokasi	Kelompok Terdampak	OPD Penanggung Jawab
1	Rendahnya kemantapan jalan dan konektivitas antarpulau	Sebagian ruas Jalan Trans Mentawai belum mantap	10 kecamatan, khususnya Siberut dan Pagai	Masyarakat pesisir 33 desa rawan bencana	Dinas PUPR
2	Tingginya risiko bencana gempa bumi dan tsunami (IRBI 196,67, kategori tinggi)	88.389 jiwa terpapar gempa; 65.464 jiwa terpapar tsunami	Seluruh 10 kecamatan	Penduduk difabel, miskin, dan kelompok umur rentan	BPBD
3	Rendahnya cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	0,94% dari target sasaran (2025)	33 desa pesisir rawan bencana	Masyarakat kawasan rawan bencana	BPBD
4	Keterbatasan air bersih dan sanitasi layak	Jaringan pipanisasi rentan rusak akibat bencana	Kawasan pesisir dan pedalaman	Rumah tangga berpenghasilan rendah	Dinas PUPR/PDAM
5	Degradasi ekosistem pesisir (mangrove, abrasi, alih fungsi lahan)	Kerusakan lingkungan 14.463 Ha (tsunami), 594 Ha (karhutla)	Kawasan pesisir 36 desa	Nelayan dan masyarakat pesisir	Dinas Lingkungan Hidup
6	Keterbatasan sarana prasarana dan SDM	Sarpras kantor dan alat komunikasi	Kantor BPBD dan posko	Aparatur dan relawan kebencanaan	BPBD/BKPSDM

No	Permasalahan (Indikator)	Baseline 2025	Lokasi	Kelompok Terdampak	OPD Penanggung Jawab
	penanggulangan bencana	terbatas	kecamatan		

Sumber: Diolah dari RPJMD, Renstra BPBD 2025-2029 dan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Rumusan permasalahan yang terukur sebagaimana matriks di atas menjadi dasar penentuan prioritas dan sasaran program/kegiatan tahun 2027, khususnya dalam mendukung sasaran RPJMD "Menurunnya Risiko terhadap Dampak Bencana" melalui strategi mitigasi struktural, mitigasi non-struktural, kesiapsiagaan dan peringatan dini, serta konservasi lingkungan.

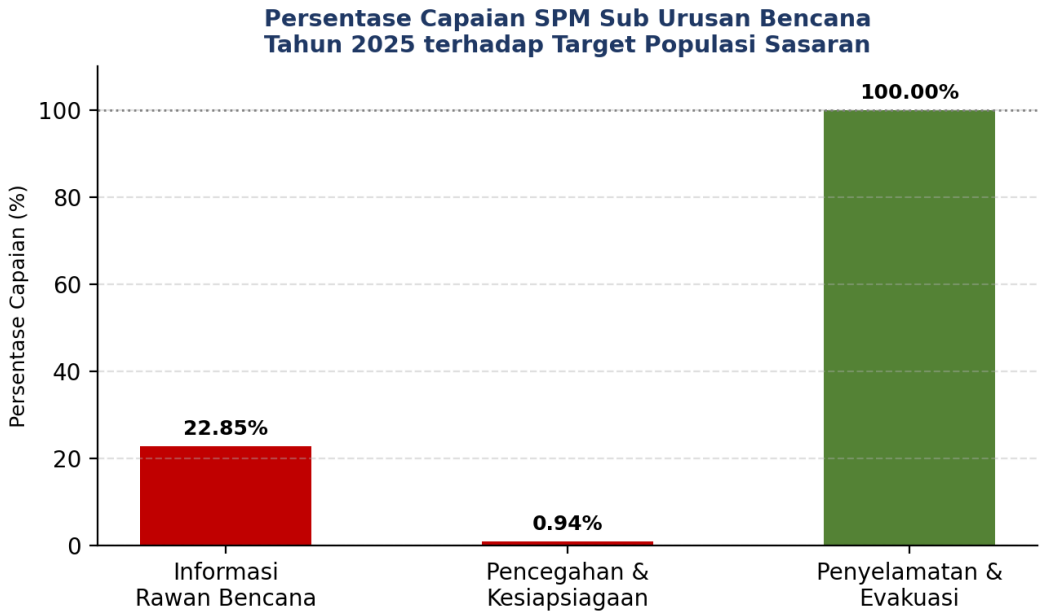
Capaian Standar Pelayanan Minimal, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah menyajikan capaian SPM secara umum, namun perlu memperjelas capaian sub urusan bencana secara lebih terukur. Dengan risiko bencana tinggi dan ancaman tsunami/gempa yang besar, capaian SPM tidak cukup hanya dilihat dari persentase administratif, tetapi harus menampilkan sasaran layanan, jumlah penduduk di kawasan rawan, jenis layanan, standar mutu, warga terlayani, dan kendala pemenuhan layanan sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2.151
Realisasi Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Populasi SPM (jiwa)	Sudah Terlayani (jiwa)	Belum Terlayani (jiwa)	Persentase Capaian
1	Pelayanan informasi rawan bencana	55.378	12.653	42.725	22,85%
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	55.378	520	54.858	0,94%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.373	2.373	0	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Realisasi Capaian SPM Tahun 2025.

Gambar 2.68
Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025 terhadap Target Populasi Sasaran



Grafik di atas menegaskan adanya kesenjangan capaian yang signifikan antar-jenis layanan. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah mencapai 100% dari target populasi terdampak kejadian aktual, namun pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana baru mencapai 0,94% dari total populasi sasaran 55.378 jiwa, dan pelayanan informasi rawan bencana baru mencapai 22,85%. Kesenjangan ini menegaskan bahwa capaian SPM sub urusan bencana masih bersifat responsif (pasca-kejadian) dan perlu diperkuat pada aspek preventif (pra-bencana).

Permasalahan utama dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025 meliputi: sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai (meja, kursi, komputer, printer, alat komunikasi/radio, alat transportasi yang sudah lama, dan keterbatasan alat keamanan anggota); kualitas SDM dalam menunjang pelaksanaan tugas; keterbatasan anggaran; serta belum bersinerginya upaya implementasi SPM antar-perangkat daerah. Solusi yang diarahkan mencakup optimalisasi anggaran penerapan SPM, peningkatan kapasitas SDM, serta prioritas pendataan kelompok rentan (lansia, anak-anak, ibu hamil, penyandang disabilitas) agar target populasi SPM lebih presisi dan metode pelayanan lebih variatif sesuai kondisi geografis kepulauan.

Merujuk pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, SPM Sub Urusan Bencana terdiri atas tiga jenis pelayanan dasar yang wajib disediakan Pemerintah Daerah, dengan rincian kebutuhan data dan target tahun 2027 sebagai berikut.

Tabel 2.152
Rincian Jenis, Cakupan dan Kebutuhan Data SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2027

No	Jenis Pelayanan Dasar	Cakupan Kegiatan	Kebutuhan Data dan Target 2027
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyediaan dan penyebaran informasi kerawanan wilayah, sosialisasi, edukasi, dan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Jumlah warga sasaran per desa rawan, capaian warga terlayani, kegiatan sosialisasi dan media informasi
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontinjensi (Renkon), pelatihan mitigasi, gladi/simulasi kesiapsiagaan	Jumlah warga terlayani, kegiatan simulasi, kapasitas personel dan relawan, sarana prasarana, sistem peringatan dini, shelter dan jalur evakuasi
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	Respons cepat kedaruratan, aktivasi sistem komando, pencarian dan pertolongan, evakuasi korban bencana ke tempat aman	Jumlah korban terevakuasi, waktu tanggap, sarana evakuasi, logistik dan kebutuhan peningkatan layanan

Sumber: Permendagri No. 59/2021 dan No. 101/2018, diolah bersama data BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Rincian tersebut diperlukan agar data SPM sub urusan bencana tahun 2027 tidak hanya memuat jumlah warga sasaran dan capaian warga terlayani, tetapi juga mencakup desa/kawasan rawan, kegiatan sosialisasi dan simulasi, kapasitas personel, sarana prasarana, sistem peringatan dini, shelter, jalur evakuasi, logistik dan kebutuhan peningkatan layanan, sebagaimana telah diuraikan pada Sub Bab 2.2 dan 2.3.

Tabel 2.153
Realisasi Capaian SPM Bidang Bidang Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pelayanan SPM	Realisasi		
			Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang	469	469	0	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pelayanan SPM	Realisasi		
			Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	disabilitas terlantar di luar panti sosial				
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	123	123	-	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	2.552	2.552	-	100
4	Rehabilitasi Sosial dasar Tuna sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	2	2	0	100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap Darurat dan Pasca Bencana bagi korban bencana	-	-	-	-

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2025 adalah :

a. Kendala dalam pengumpulan data diantaranya cakupan wilayah yang luas dan berbentuk kepulauan sehingga harus dijangkau menggunakan transportasi antarpulau. Selain itu juga terdapat kendala terkait akses ke daerah yang cenderung terpelosok dan jumlah personil yang masih kurang cukup.
b. Berdasarkan data yang dihimpun, seharusnya masih banyak penerima pelayanan dasar di luar target yang benar-benar membutuhkan bantuan pelayanan dasar namun tidak sejalan dengan anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi pelayanan dasar terhadap semua klaim luar panti.
c. Sarana dan prasarana yang seharusnya aktif namun sedang dalam kondisi kurang aktif saat ini seperti puskessos di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurang mendukung terealisasinya pelayanan dasar di masyarakat.

2.6 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

1. Isu Strategis Global

Perekonomian global tengah menghadapi tekanan berlapis akibat perlambatan pertumbuhan, ketidakpastian geopolitik, dan krisis iklim yang memburuk. Hubungan ekonomi global sering dipersepsikan sebagai permainan *zero-sum*, dimana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak terjadi dengan mengorbankan pihak lain. Persepsi semacam ini harus segera ditanggapi secara serius. Kebijakan tarif dan perang dagang Amerika Serikat yang terjadi saat ini mendeklarasikan posisi Amerika Serikat sebagai negara adi daya yang memiliki segala *resources* dan negara lain harus mengikuti menandakan bahwa Amerika melalui Presiden Trump menjadi acuan perdagangan global dan tidak boleh dibantahkan. Namun beberapa negara seperti Tiongkok, Rusia, India yang menolak kebijakan Trump memastikan tidak mengikuti dan bahkan menerima kebijakan Amerika Serikat dengan strategi yang sama menaikkan tarif pajak untuk produk yang berasal dari AS dan menyerukan untuk masyarakatnya menggunakan produk yang dihasilkan dari negaranya sendiri. Hal ini tentunya perang dagang ini tidak sekedar memberikan pengaruh kepada negara-negara maju. Namun, juga memberikan dampak terhadap perekonomian negara berkembang termasuk Indonesia. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, juga berdampak bagi Indonesia. Pada Geopolitik dan Ketahanan Ekonomi Indonesia, perang dagang menyebabkan gangguan rantai pasok global. Indonesia yang bergantung pada ekspor bahan baku ke Tiongkok dan AS menghadapi penurunan permintaan. Pelemahan ekonomi kedua negara juga menurunkan harga komoditas global yang berimbas pada penerimaan nasional. Pada aspek Stabilitas Kawasan dan Pertahanan, terdampak dengan adanya militerisasi di Laut China Selatan. Indonesia, walau bukan pihak dalam klaim wilayah, harus memperkuat postur pertahanan maritim, khususnya di Natuna, untuk menjaga kedaulatan dan memastikan jalur pelayaran aman. Pada aspek Investasi dan Keamanan Teknologi, dengan pembatasan teknologi AS terhadap Tiongkok memberi peluang bagi Indonesia sebagai alternatif lokasi relokasi industri. Namun, terdapat risiko infiltrasi teknologi sensitif dari kedua kubu yang berimplikasi pada keamanan siber nasional.

Pengaruh tarif AS dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3–0,5 poin persentase. Target pertumbuhan 5,2% tahun ini terancam tidak tercapai akibat tekanan eksternal. Pada 2024, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar USD 16,8 miliar dengan AS, dengan ekspor utama meliputi elektronik, pakaian, dan alas kaki. Tarif baru berpotensi mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar

AS.Ketegangan global menyebabkan depresiasi rupiah hingga 10–11%, meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi, serta menekan sektor manufaktur domestik. Perang dagang AS-Tiongkok merupakan refleksi pergeseran tatanan global. Indonesia, sebagai negara non-blok dengan potensi besar, memiliki peluang untuk mengambil posisi strategis dengan memperkuat kemandirian ekonomi dan pertahanan. Kuncinya ada pada ketepatan membaca dinamika, keberanian melakukan reformasi, dan soliditas dalam menjaga prinsip politik luar negeri yang bebas-aktif.

Pemerintah perlu mengembangkan "*National Supply Chain Resilience Roadmap*" yang memperkuat ketahanan logistik dan produksi strategis, khususnya di sektor pertahanan, energi, dan pangan. Harmonisasi regulasi investasi pusat-daerah, penyediaan zona industri berbasis kebutuhan sektor *high-tech*, serta pemangkasan waktu perizinan (dari rata-rata 18 hari menjadi kurang dari 7 hari). Menyederhanakan perizinan, meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperbaiki iklim investasi untuk menarik lebih banyak investor asing. Upaya mendorong hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan nilai tambah produk ekspor.

2. Isu Strategis Nasional

1. Pemilu Serentak (4 Periodisasi)

Pelaksanaan pemilu serentak telah ditetapkan dan serentak untuk di seluruh wilayah Indonesia. Pesta demokrasi ini menjadi perhatian serius dalam menjaga dinamika dan stabilitas sosial, politik dan ekonomi masyarakat, persiapan penyelenggaraan bahkan gejolak sosial dan politik masyarakat tentunya akan dan sudah mulai terasa setahun sebelum penyelenggaraan pemilu/pemilukada, begitu juga untuk periodisasi pemilukada dengan atmosfer sosial ekonomi yang akan menyita perhatian publik. Peningkatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kampanye politik turut memberikan sumbangsih pada perekonomian. Perilaku pelaku usaha dan investor serta sentimen pasar juga berperan memengaruhi perekonomian di tahun politik. Kondisi ini akan memberikan dampak secara makro pada pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional bahkan tingkat daerah.

Selain potensi pertumbuhan ekonomi yang positif dikarenakan meningkatnya aktivitas dan pengeluaran masyarakat/ lembaga, yang perlu menjadi perhatian adalah situasi keamanan dan ketertiban menjelang pesta demokrasi berlangsung. Politik identitas yang menjadikan terjadinya dikotomi masyarakat akan menjadi ruang perbedaan yang dirancang akan menjadi isu besar yang harus dapat dikendalikan akan tidak melebar menjadi permasalahan yang menyebabkan keamanan dan ketertiban terganggu. Politisasi SARA bisa memperbesar potensi hambatan lain, terutama konflik horizontal, ketika itu terjadi, masyarakat akan makin terpecah dan tidak baik bagi penyelenggaraan pemilu, terutama dalam upaya konsolidasi demokrasi dan persatuan bangsa.

2. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Selain bantuan gizi, kepada ibu hamil juga perlu dilakukan edukasi parenting. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Sumber makanan diutamakan dari produk lokal sehingga program ini juga akan berdampak besar pada berputarnya roda perekonomian di daerah. Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengembangkan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan program.

2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (nakes) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar *World Health Organization* (WHO) harus segera dibenahi. Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru.

3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Dengan tambahan luas panen minimal 4 juta ha dan bila itu fokus pada tanaman padi, maka produksi padi akan bertambah minimal sebesar 20 juta ton (asumsi produktivitas lahan 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%).

4. **Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.**

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah sekolah unggulan di setiap kabupaten. Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (non-boarding school) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas. Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.

5. **Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut**

Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia (untuk perlindungan kesehatan lansia), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. Selain itu akan ditambahkan program Kredit Usaha Tani Perternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha *Start Up*, kredit untuk para generasi millenial dan generasi Z akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 5 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).

6. **Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.**

Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), dan penyuluh, tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Kebijakan rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi.

7. **Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).**

Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa dan kelurahan yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk menjamin pembangunan rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan MBR, serta menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. Ditargetkan untuk dapat merenovasi atau menjamin pembangunan rumah sebanyak 25 rumah per desa per tahun (dua juta rumah). Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (*landed house*), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yang dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian target penjaminan pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

Pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian dibiayai dengan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, anggaran pemerintah perlu diefektifkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP). Reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Selain itu, pemberian insentif pajak akan terus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat. Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

3. Isu Strategis Regional

Perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi kabupaten/kota sekitar dan terkhususnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jalur distribusi logistik Mentawai tidak terlepas dari kontribusi wilayah di Kota Padang dan beberapa kabupaten seperti Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar. Padang menjadi pintu gerbang utama bagi Mentawai untuk terhubung dengan dunia luar. Mentawai sangat bergantung pada Kota Padang untuk transportasi, perdagangan, dan penyediaan berbagai kebutuhan pokok. Selain itu, sektor pariwisata Mentawai juga memiliki dampak pada ekonomi di Kota Padang, terutama dalam hal akomodasi, transportasi, dan jasa terkait. Padang berfungsi sebagai pusat transportasi utama bagi Mentawai, baik melalui jalur laut maupun udara. Semua kapal penyeberangan dan pesawat yang melayani Mentawai berangkat atau singgah di Padang.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif stagnan dalam 3 tahun terakhir (3-4 persen), hal ini juga dirasakan oleh kabupaten yang sumber PDRBnya disumbang oleh sektor primer (pertanian, perkebunan, perikanan) seperti pada Kabupaten Pesisir Selatan dan Tanah Datar. Kesamaan ini menjadi potensi besar untuk saling kolaborasi dalam meningkatkan nilai tambah, menjajaki kerja sama, kolaborasi untuk transformasi ekonomi ke sektor perdagangan dan industri/hilirisasi komoditas unggulan.

4. Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

1. Pembangunan Manusia yang Holistik

Manusia menjadi aset yang paling berharga dan sangat penting bagi pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi sebuah kepastian akan meningkatkan dan mensejahterakan manusia. Pembangunan manusia dapat dilakukan pada dimensi pendidikan, kesehatan, budaya dan pengembangan ekonomi.

Pada dimensi pendidikan, pembangunan harus memastikan bahwa akses layanan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, tanpa memperhatikan gender dan memperhatikan masyarakat yang memerlukan perhatian khusus (penyandang disabilitas), dan berpihak pada masyarakat rentan/miskin/miskin ekstrem. Penyediaan sarana dan prasarana utama pendidikan yang menjadi tantangan karena Kepulauan Mentawai yang luas, begitu juga dengan karakteristik wilayah dan permukiman masyarakat yang tersebar di mana akses transportasi darat belum ada dan layanan pendidikan terdekat belum tersedia sehingga masyarakat harus berpikir untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan baik SD, SMP maupun SMA. Begitu juga dengan dalam hal pemerataan penguasaan bidang sains dasar, bahasa dan matematika. Ini membawa akibat pada keberlanjutan pendidikan yang terhambat pada masalah mutu. Kemampuan literasi dan numerasi yang masih rendah sehingga memerlukan strategi khusus untuk mengatasinya. Di sisi lain, dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing sedangkan masyarakat Mentawai didominasi dengan mata pencarian di sektor primer akan sulit untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S1 ataupun diploma (vakasi) sehingga butuh intervensi yang terukur pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia.

Pada dimensi kesehatan, akses layanan kesehatan, alat kesehatan dan ketersediaan tenaga medis masih menjadi perhatian kedepan. Sistem

kesehatan daerah dengan konsep kepulauan mengharuskan adanya rumah sakit rujukan yang berkualitas dan representatif di setiap pulau besar seperti di Pulau Siberut (RS Umum Siberut) yang sudah dibangun, di Pulau Sipora (RSUD Tuapejat) dan di Pulau Pagai Utara Selatan, ini menjadi kebutuhan utama dalam konektivitas layanan kesehatan daerah. Begitu juga dengan kelangkaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis untuk penanganan penyakit tertentu menjadi tantangan ke depan dan berbagai inovasi-inovasi layanan kesehatan akan muncul untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Tantangan kedepan dalam pembangunan manusia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tingginya angka *stunting* daerah. Permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (*stunting*). *Stunting* adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran Tinggi Badan menurut Umur seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusianya berdasarkan standar yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. Dalam jangka pendek, *stunting* menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme karena pengasuhan dan praktik pemberian makanan pendamping ASI yang belum lengkap, selain dari masalah rendahnya imunisasi lengkap dan sanitasi. Dalam jangka panjang, *stunting* menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual dan akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Pembangunan manusia kedepan akan diperhadapkan pada eksistensi dan pola hidup yang modern sehingga potensi kehilangan jati diri, budaya, nilai-nilai luhur, kearifan lokal akan sangat besar. Pembangunan kebudayaan sudah mulai sedini mungkin menjadi bagian pembangunan manusia baik di tingkat pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA bahkan di jenjang perguruan tinggi. Pembangunan kebudayaan ke depan akan menjadi bagian dari pembangunan manusia dengan elaborasi kebijakan yang inklusif yang non-diskriminatif, ramah pada penyandang disabilitas, tidak membeda-bedakan (gender) berdasarkan partisipasi masyarakat lokal dan unsur-unsur nilai kebudayaan.

Pembangunan harus menjadikan manusia sebagai subjek yang produktif. Menciptakan wirausaha (*enterprenuer*) bukan sekadar melakukan pelatihan atau memberikan sarana dan prasarana latihan, namun hal yang lebih bernilai adalah eksistensi, konsistensi dan kontinuitas wirausaha atau pelaku usaha dalam mengembangkan potensinya. Pendampingan calon pelaku usaha/ wirausaha di Kepulauan Mentawai harus dilakukan, stigma terhadap memulai usaha harus memiliki modal dana yang besar menjadi alasan utama masyarakat sulit untuk mengembangkan diri. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi tantangan dan peluang dalam memulai dan mengembangkan peluang usaha sehingga diperlukan inovasi pendampingan calon wirausaha mulai dari hulu peningkatan kapasitas/ pelatihan, bisnis proses, hingga

dihilirnya yaitu pangsa pasar yang tersedia menjadi proses yang satu kesatuan dalam pendampingan ke depan.

2. Tingkat Kemiskinan yang Tinggi

Salah satu indikator ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah tertinggal adalah karena tingkat kemiskinannya yang sangat tinggi yaitu 13,22 persen pada tahun 2025. Kenaikan tingkat kemiskinan ini masif relatif lambat, jika dibandingkan capaian tingkat kemiskinan tahun 2024 sebesar 13,89 persen. Akar masalahnya pada produktivitas rendah, kesalahan dan kebiasaan dalam pola konsumsi (masalah rokok) yang menyebabkan proses investasi pada rumah tangga relatif rendah. Penanganan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya sektor sosial saja, penyelesaiannya harus terintegrasi dan terpadu (lintas sektor) dengan basis data yang akurat dan tepat sasaran. Penuntasan atau pengurangan kemiskinan menjadi tujuan dan cita-cita pembangunan daerah, program pembangunan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya beli dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin menjadi pilihan terbaik dalam mengentaskan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Kepulauan Mentawai, pembangunan rumah layak huni, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah bahkan tidak atau belum menempuh jenjang sekolah sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang menjadikannya miskin. Masyarakat Mentawai dengan lapangan pekerjaan utama di dominasi pada sektor pertanian yaitu 66,45 persen atau sebanyak 31.504 jiwa sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu melalui program pemerintah dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat untuk menjaga daya beli adalah melalui pemberian jaring pengaman sosial.

Kemiskinan akan sangat dekat kaitannya dengan rendahnya partisipasi sekolah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu kemampuan dan kemauan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya ketercukupan asupan gizi menjadi hal yang akan sulit dipenuhi jika masyarakat atau keluarga tersebut dalam keadaan miskin. Prevalensi *stunting* sebagai indikator untuk melihat permasalahan kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sangat rentan terjadi pada masyarakat atau keluarga miskin, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Dengan capaian prevalensi *stunting* Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 sebesar 26,4 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan menjadi isu strategis dalam pembangunan manusia kedepan.

Hilirisasi Komoditi Sektor Primer

Reformasi struktur ekonomi daerah dari yang bertumpu pada sektor primer (*raw material*) ke sektor perdagangan/jasa atau pada sektor

industri. Kepulauan Mentawai dengan potensi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang besar dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi (tren pertumbuhan ekonomi stagnan) sehingga permasalahan pembangunan seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan dapat diatasi. Hilirisasi penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan BUMD/BUMDes dan koperasi/ Koperasi Merah Putih yang siap sebagai pelopor pembangunan ekonomi di daerah dan di desa, ini yang harus diseriusi dan dipastikan bertumbuh. BUMD fokus pada skala lebih besar dan BUMDes pada skala desa, keduanya mendorong peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan pemanfaatan potensi lokal. Begitu juga dengan koperasi yang memiliki peran penting dalam kemajuan daerah dan desa, yaitu dengan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan, pelatihan, dan pendampingan, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum.

3. Pengembangan Pariwisata Mentawai

Sebagai destinasi pariwisata yang telah dikenal hingga mancanegara, tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan segala sumber daya baik itu amenitas, aksesiblitas, atraksi, sumber daya manusia, dan menjaga kelestarian kawasan destinasi. Menjadi bagian dari destinasi prioritas yang telah ditetapkan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berbenah dalam mempersiapkan destinasi kawasan pariwisata dengan menjalin kerja sama/ kolaborasi di setiap sektor baik di internal pemerintah daerah maupun di luar pemerintah daerah, pihak swasta, pelaku ekonomi kreatif, investor. Selain itu pendampingan kawasan desa wisata yang bagian terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata prioritas daerah menjadi hal penting dilakukan agar citra dan *length of stay* semakin baik, begitu juga dengan pengalaman/*experience* lebih bermakna. Konsep pengembangan pariwisata "one village one event" juga diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, promosi potensi desa dan mendorong tumbuhnya pariwisata lokal yang akan memperkuat identitas daerah.

4. Aksesibilitas dan Infrastruktur Publik

Sebagai prasyarat pembangunan dan kemajuan daerah, pembangunan infrastruktur dasar dan publik menjadi unsur utama yang harus disediakan. Dengan adanya infrastruktur jalan akan mengurangi biaya (*cost*), memaksimalkan efisiensi dan efektivitas, mempercepat layanan, meningkatkan produktivitas dan mempercepat reformasi struktur ekonomi daerah. Sebagai daerah kepulauan, tantangan

aksesibilitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada dua, yaitu disisi darat adalah pembangunan jalan di sepanjang pulau dengan terhubung pada setiap pelabuhan penyeberangan (hub) di setiap ujung pulau dan disisi laut tersedianya sarana penyeberangan kapal antar pulau. Keadaan ini menjadi tantangan dikarenakan kondisi jalan yang tersedia/ terbangun (trans Mentawai) dengan persentase yang masih rendah, begitu juga masih terdapat setidaknya 4 pelabuhan penyeberangan yang harus dibangun serta kapal penyeberangan antar pulau yang memadai belum tersedia

5. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seiring dengan tuntutan pengelolaan pemerintahan yang baik/*good governance,* maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan terhadap delapan area tersebut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan implementasi reformasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Perwujudan birokrasi kelas dunia menjadi faktor determinan yang perlu bersama-sama kita akselerasi implementasinya, sehingga memastikan adanya perubahan *mindset* dan *cultural set* ASN sebagai komponen utama mesin birokrasi. Pembangunan sumber daya manusia ASN Unggul, yang antara lain dicirikan dengan SDM yang memiliki jiwa pekerja keras, bekerja *smart*, dinamis, adaptif dan agile serta terampil menguasai IT, memiliki kapabilitas dan integritas serta komitmen kerja yang tinggi. Penataan kelembagaan diperlukan adanya transformasi kelembagaan melalui penyederhanaan birokrasi, melalui pengintegrasian kelembagaan dan organisasi yang memiliki kemiripan tugas pokok dan fungsi, agar dapat "*berlari kencang*" dalam menjawab tantangan perubahan yang sedemikian cepat, guna meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan.

Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi keharusan dan syarat perlu untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif dan tepercaya. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan akan meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, memastikan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat,

meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan inovasi, mencegah dan memberantas korupsi.

6. Belum terpenuhinya Kebutuhan Air bersih dan Sanitasi Layak

Kepulauan Mentawai terdiri dari empat pulau besar—Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan—dengan populasi sekitar 85.000 orang. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dengan akses terbatas ke infrastruktur dasar. Air bersih di Kepulauan Mentawai terutama bersumber dari air hujan, mata air, dan sungai-sungai kecil. Pada musim kemarau, banyak sumber air mengering, menyebabkan krisis air bersih di banyak desa. Kualitas air sering kali rendah, dengan banyak sumber air yang terkontaminasi oleh limbah rumah tangga dan aktivitas pertanian. Infrastruktur distribusi air sangat terbatas, dengan banyak desa yang tidak memiliki jaringan pipa yang memadai.

Fasilitas pengolahan air (misalnya, instalasi penyaringan dan penjernihan) kurang atau bahkan tidak ada di beberapa wilayah, menyebabkan penduduk mengonsumsi air yang tidak diolah dengan baik.Penebangan hutan di pulau-pulau ini menyebabkan erosi tanah dan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air, sehingga mengurangi ketersediaan air bersih. Penebangan hutan alam di Kepulauan Mentawai dalam dua tahun terakhir kembali marak akibat Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III (BPHP) Pekanbaru mengeluarkan 31 hak akses SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) di Areal Penggunaan Lain atau APL dengan rata-rata seluas 50 ha. Enam hak akses sudah melakukan penebangan pada 2022 dan delapan lainnya pada 2023. Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, kayu yang sudah ditebang melalui hak akses SIPUHH pada Januari hingga 18 September 2023 di Pulau Sipora dan Pulau Pagai Selatan sebanyak 15.177 batang atau 29.938 kubik. Pada 2022 penebangan hutan alam di areal penggunaan lain di Pulau Sipora sebanyak 8.388 batang pohon atau 20.237 kubik kayu. Berkurangnya sumber air minum bisa semakin cepat, jika deforestasi terus terjadi. Sebab hilangnya tutupan hutan yang seharusnya melindungi bantalan air menyebabkan berkurangnya resapan air. Belum lagi ditambah masifnya pembangunan di daerah pesisir yang berpotensi mengurangi sumber daya air. Hidrologi adalah siklus yang kompleks, pada dasarnya curah hujan yang turun tertahan di daerah hutan tropis, kalau tempat itu tidak memiliki ceruk air untuk menangkapnya dan tidak ada hutan, maka akan kehilangan air tawar yang akan langsung mengalir ke laut.

Tingkat kemiskinan yang tinggi (13,22% pada tahun 2025) membuat banyak penduduk tidak mampu membiayai instalasi atau pembelian air bersih. Kurangnya edukasi tentang sanitasi dan pentingnya air bersih menyebabkan praktik-praktik yang dapat mencemari sumber air. Statistik curah hujan tahunan di Kepulauan Mentawai menunjukkan variasi yang signifikan, dengan musim kemarau yang berlangsung lebih lama dari biasanya dalam beberapa tahun terakhir. Survei kualitas air

dari beberapa desa di Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa banyak sumber air mengandung bakteri E. coli dan kontaminan lain di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% rumah tangga di Kepulauan Mentawai memiliki akses ke air bersih yang layak. Kasus penyakit yang berhubungan dengan air, seperti diare, cukup tinggi di Kepulauan Mentawai, terutama di kalangan anak-anak. Ketidakmampuan untuk menyediakan air bersih secara konsisten mempengaruhi produktivitas masyarakat, terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata, yang merupakan sektor penting di daerah ini. Konflik antar komunitas kadang terjadi akibat perebutan sumber air yang semakin terbatas. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penguatan terkait isu belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak, antara lain:

a. Pemerataan sambungan rumah air minum dengan tarif terjangkau.
b. Perlindungan dan pengelolaan sumber air baku secara berkelanjutan.
c. Peningkatan efisiensi produksi dan distribusi PDAM.
d. Peningkatan kualitas air minum sesuai standar kesehatan.
e. Peningkatan akses sanitasi aman & perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
f. Penguatan sistem pengelolaan air limbah terintegrasi dan berbasis masyarakat.
g. Peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas pengelolaan sampah sesuai standar lingkungan.

7. Belum terpenuhinya Kebutuhan Air bersih dan Sanitasi Layak

Kepulauan Mentawai terdiri dari empat pulau besar—Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan—dengan populasi sekitar 85.000 orang. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dengan akses terbatas ke infrastruktur dasar. Air bersih di Kepulauan Mentawai terutama bersumber dari air hujan, mata air, dan sungai-sungai kecil. Pada musim kemarau, banyak sumber air mengering, menyebabkan krisis air bersih di banyak desa. Kualitas air sering kali rendah, dengan banyak sumber air yang terkontaminasi oleh limbah rumah tangga dan aktivitas pertanian. Infrastruktur distribusi air sangat terbatas, dengan banyak desa yang tidak memiliki jaringan pipa yang memadai.

Fasilitas pengolahan air (misalnya, instalasi penyaringan dan penjernihan) kurang atau bahkan tidak ada di beberapa wilayah, menyebabkan penduduk mengonsumsi air yang tidak diolah dengan baik. Penebangan hutan di pulau-pulau ini menyebabkan erosi tanah dan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air, sehingga mengurangi ketersediaan air bersih. Pencabutan izin perusahaan kayu di wilayah Kepulauan Mentawai oleh Kementerian Kehutanan terhadap PT. Minas Pagai Lumber, Perusahaan pengelolaan kayu dengan izin konsesi kehutanan (IUPHHK-HA), PT. Biomass Andalan Energi, Pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan PT. Salaki

Summa Sejahtera, perusahaan kehutanan pemanfaatan hasil hutan kayu (HPH) menjadi momentum penting untuk memulihkan fungsi ekologis hutan sebagai daerah tangkapan air yang berperan dalam menjaga ketersediaan dan kualitas sumber air bagi masyarakat. Aktivitas penebangan pada masa lalu berpotensi menyebabkan degradasi hutan, berkurangnya daya resap tanah, serta menurunnya kualitas dan kontinuitas sumber air yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak, terutama di wilayah perdesaan dan daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program pembangunan yang terintegrasi antara upaya rehabilitasi hutan dan perlindungan daerah tangkapan air dengan pengembangan infrastruktur air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Optimalisasi pemulihan kawasan hutan pasca pencabutan izin tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sumber air baku, memperluas cakupan layanan air bersih dan sanitasi, serta meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Mentawai.

Belum lagi ditambah masifnya pembangunan di daerah pesisir yang berpotensi mengurangi sumber daya air. Hidrologi adalah siklus yang kompleks, pada dasarnya curah hujan yang turun tertahan di daerah hutan tropis, kalau tempat itu tidak memiliki ceruk air untuk menangkapnya dan tidak ada hutan, maka akan kehilangan air tawar yang akan langsung mengalir ke laut.

Tingkat kemiskinan yang tinggi 13,22% pada tahun 2025 meskipun mengalami penurunan jika di bandingkan pada tahun 2024 sebesar 13,89% namun tidak signifikan namun tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah kemiskinan secara nasional pada tahun 2025 sebesar 8,25% dan Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebesar 5,35%, membuat banyak penduduk tidak mampu membiayai instalasi atau pembelian air bersih. Kurangnya edukasi tentang sanitasi dan pentingnya air bersih menyebabkan praktik-praktik yang dapat mencemari sumber air. Statistik curah hujan tahunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan variasi yang signifikan, dengan musim kemarau yang berlangsung lebih lama dari biasanya dalam beberapa tahun terakhir. Survei kualitas air dari beberapa desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa banyak sumber air mengandung bakteri E. coli dan kontaminan lain di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% rumah tangga di Kepulauan Mentawai memiliki akses ke air bersih yang layak. Kasus penyakit yang berhubungan dengan air, seperti diare, cukup tinggi di Kepulauan Mentawai, terutama di kalangan anak-anak. Ketidakmampuan untuk menyediakan air bersih secara konsisten mempengaruhi produktivitas masyarakat, terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata, yang merupakan sektor penting di daerah ini. Konflik antar komunitas kadang terjadi akibat perebutan sumber air yang semakin terbatas. Beberapa hal

yang menjadi perhatian dalam penguatan terkait isu belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak, antara lain:

a. Pemerataan sambungan rumah air minum dengan tarif terjangkau.
b. Perlindungan dan pengelolaan sumber air baku secara berkelanjutan.
c. Peningkatan efisiensi produksi dan distribusi PDAM.
d. Peningkatan kualitas air minum sesuai standar kesehatan.
e. Peningkatan akses sanitasi aman & perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
f. Penguatan sistem pengelolaan air limbah terintegrasi dan berbasis masyarakat.
g. Peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas pengelolaan sampah sesuai standar lingkungan.

8. Potensi Bencana

Sebagai wilayah yang dilintasi jalur Zona *Megathrust* Mentawai-Siberut sangat rentan pada potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Zona *Megathrust* Mentawai adalah daerah sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal yang lokasinya berada di sebelah barat Kepulauan Mentawai. Zona *Megathrust* Mentawai merupakan hasil dari aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia di bawah Lempeng Eurasia. Selain gempa bumi dan tsunami, potensi bencana lainnya juga menjadi permasalahan pembangunan kedepan seperti banjir, gelombang/ cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Pengarusutamaan kebencanaan sangat penting untuk memposisikan isu kebencanaan dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan/pembangunan fisik/non fisik, pengendalian dan monitoring evaluasi kebencanaan. Kesiapsiagaan dalam memitigasi bencana, infrastruktur kebencanaan yang berkualitas, sistem peringatan dini berbasis teknologi, jaringan informasi/komunikasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam PRB menjadi hal penting dan strategis ke depan menjadi perhatian utama untuk meminimalisir segala kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi.

9. Alih Fungsi Lahan

Seiring dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan akan pembangunan, maka potensi pengembangan wilayah melalui alih fungsi lahan menjadi syarat utama dalam pembangunan. Kawasan areal penggunaan lainnya sebesar 18,11 persen atau 108.841 hektar termasuk wilayah/kawasan pesisir yang menjadi ruang pembangunan daerah. Potensi alih fungsi lahan seperti lahan pertanian perkebunan menjadi sangat besar sehingga sarana kebijakan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut sudah mulai untuk disusun salah satunya melalui revisi RTRW.

10. Wilayah Pesisir dan Pantai

Sebagai daerah kepulauan, dengan panjang garis pantai sebesar 1.402,68 km dengan 33 desa berada pada wilayah pantai/ pesisir.

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi pengembangan kawasan pesisir khususnya pariwisata. Namun, disisi lain pemanfaatan wilayah pesisir dan pantai memiliki potensi besar pada degradasi lingkungan yang berdampak pada luasan kawasan pesisir dan ekosistem yang ada di dalamnya. Penebangan hutan Mangrove, pengambilan pasir dan karang sangat berakibat pada kerusakan daerah pesisir, berkurangnya luasan pesisir dan bahkan adalah hilangnya sebuah wilayah pesisir dan pulau. Ini menjadi perhatian serius untuk pembangunan bagi seluruh pihak terutama menjaga kawasan pesisir dan pantai dari kerusakan dan menjadikan beberapa area sebagai ruang terbuka (*green belt*) atau sabuk hijau sebagai zona bebas bangunan yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan upaya mitigasi kebencanaan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat sebesar 5,61% (yoy). Angka ini sedikit di bawah target pemerintah dan beberapa proyeksi awal. Meskipun demikian, pertumbuhan ini menunjukkan resiliensi di tengah tekanan global.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I Tahun 2026 lebih tinggi dibanding kuartal IV-2025 yang tercatat 5,39% secara tahunan (yoy). Peningkatan ini disampaikan Bank Indonesia seiring menguatnya konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah, yang didukung pelonggaran kebijakan moneter.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diprakirakan berlanjut pada kuartal II-2026, selain konsumsi, pengeluaran pemerintah dan investasi juga diperkirakan tumbuh lebih kuat. BI menilai investasi pemerintah, termasuk proyek hilirisasi sumber daya alam, serta membaiknya keyakinan pelaku usaha menjadi penopang tambahan.

Secara keseluruhan, Bappenas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 berada di kisaran 5,8%–6,8%, didukung sinergi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dengan stimulus fiskal dan sektor riil. Dari sisi fiskal, pemerintah melihat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai faktor penting yang memperkuat konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2026.

Pemerintah juga menekankan percepatan realisasi belanja negara dan efektivitas program prioritas untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Meski prospeknya positif, tantangan tetap ada. Ketergantungan pada faktor musiman membuat dorongan konsumsi berpotensi bersifat sementara, sementara kesinambungan investasi sangat bergantung pada realisasi belanja pemerintah dan kepercayaan pelaku usaha. Namun, kombinasi stimulus fiskal, bauran kebijakan BI, serta momentum musiman dinilai cukup kuat untuk menjaga laju ekonomi nasional pada awal 2026.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Tahun 2027

3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional

Ekonomi global memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi nasional Indonesia, terutama melalui perdagangan internasional, investasi asing (FDI), dan aliran modal. Dampak positifnya meliputi peningkatan ekspor, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi, namun juga membawa risiko kerentanan akibat ketidakpastian geopolitik, penurunan permintaan global, dan fluktuasi nilai tukar.

Pengaruh Positif Ekonomi Global:

Peningkatan Investasi (FDI): Globalisasi memudahkan masuknya modal asing, yang meningkatkan investasi dan kapasitas industri dalam negeri.

Perluasan Pasar Ekspor: Terbukanya akses pasar internasional memacu pertumbuhan sektor manufaktur berbasis ekspor dan komoditas.

Transfer Teknologi dan Pengetahuan: Masuknya perusahaan multinasional membawa teknologi baru dan efisiensi yang dapat meningkatkan produktivitas domestik.

Pengaruh Negatif dan Tantangan:

Kerentanan Eksternal: Ketergantungan pada perdagangan internasional membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap guncangan ekonomi global, seperti perlambatan ekonomi di negara maju.

Volatilitas Harga Komoditas: Ketidakpastian global dapat menurunkan harga komoditas utama (seperti sawit dan batu bara), yang berdampak pada pendapatan ekspor dan stabilitas nilai tukar.

Risiko Proteksionisme: Kebijakan tarif atau perang dagang antar negara (misalnya AS-Tiongkok) berisiko menghambat pertumbuhan ekspor.

Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2027 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan per kapita, sehingga akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dilakukan dengan akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Tema RKP tahun 2027 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri". berfokus pada penguatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, menarik investasi, dan penguatan sektor industri. Strategi ini bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital, serta peningkatan investasi produktif terutama *Foreign Direct Investment*/ Penanaman Modal Asing berorientasi ekspor dan investasi non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sejumlah strategi tersebut dapat berjalan dan didukung dengan deregulasi perizinan dan kondisi makro ekonomi yang stabil.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 6,3 persen, dengan sasaran *Gross National Income* (GNI) per kapita 5.870 dolar Amerika Serikat (AS), penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 37,14 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 76,67 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 6,5-7,5 persen, rasio gini 0,377-0,380, serta indeks modal manusia 0,57.

Mitigasi dan Langkah Strategis:

Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, penguatan sektor ekspor, diversifikasi pasokan pangan, serta memanfaatkan peran diaspora untuk meningkatkan investasi dan jejaring global. Secara keseluruhan, keterkaitan ekonomi Indonesia dengan globalisasi menuntut kebijakan yang adaptif untuk memanfaatkan peluang sekaligus memitigasi risiko ketidakpastian internasional.

3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat

Kebijakan ekonomi Sumatera Barat tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi yang lebih bernilai tambah, memperluas kesempatan kerja produktif, mempercepat penurunan kemiskinan, serta mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Sumatera Barat.

Berikut adalah poin-poin penting kebijakan ekonomi Sumbar 2027:

1. Transformasi Struktur Ekonomi dan Hilirisasi Sektor Unggulan

   Penguatan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, pariwisata halal, dan ekonomi kreatif melalui hilirisasi, peningkatan nilai tambah komoditas, modernisasi produksi, digitalisasi UMKM, serta integrasi dalam rantai pasok industri dan pasar ekspor, sejalan dengan agenda nasional penguatan industri dan ketahanan pangan. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan Wilayah.

Integrasi perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan ekonomi produktif melalui pendekatan graduasi, peningkatan akses layanan dasar, serta percepatan pembangunan pada daerah afirmasi 3TP (khususnya Kepulauan Mentawai) dalam mendukung Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2025-2029.

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

   Penguatan pendidikan berkualitas (termasuk implementasi Wajib Belajar 13 Tahun), peningkatan layanan kesehatan dan gizi, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, serta pengembangan kewirausahaan muda dan perempuan untuk mendukung transformasi ekonomi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

3. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

   Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis, pelabuhan, jaringan logistik, serta dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang konektivitas, kawasan industri, pariwisata prioritas, dan energi baru terbarukan guna menurunkan biaya logistik dan membuka akses wilayah.

4. Percepatan Investasi dan Reformasi Kemudahan Berusaha

   Percepatan realisasi APBD sebagai stimulus ekonomi daerah, peningkatan realisasi PMA dan PMDN pada sektor prioritas, penyederhanaan perizinan melalui OSS dan integrasi RDTR digital, serta penguatan kepastian usaha dalam rangka mendukung reformasi struktural nasional.

5. Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan

   Penguatan pengendalian inflasi melalui optimalisasi peran TPID, operasi pasar, subsidi distribusi komoditas strategis, kerja sama antarwilayah dalam pengamanan pasokan, serta peningkatan produksi pangan lokal untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

6. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ketahanan Lingkungan

   Pengembangan energi baru terbarukan, desa mandiri energi, ekowisata, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda nasional transisi energi dan pembangunan rendah karbon, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana.

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 relatif tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan pada akhir tahun akibat proses normalisasi pascapemulihan Hidrometeorologi serta adanya tekanan pada beberapa lapangan usaha utama. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan 4,37 persen pada tahun 2024. Di tengah perlambatan tersebut, indikator kesejahteraan justru menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,31 persen dengan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 312,3 ribu jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun menjadi 5,52 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27.

Ekonomi Sumatera Barat tahun 2026 diprediksi tumbuh melambat, di kisaran 3,3% hingga 4,6%, akibat dampak bencana hidrometeorologi akhir 2025 yang merusak lahan pertanian. Meskipun sektor pertanian tertekan, ekonomi didorong oleh pemulihan pascabencana, belanja pemerintah, dan investasi infrastruktur, dengan inflasi awal tahun 2026 yang relatif terkendali.

Hal ini untuk disesuaikan dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027.

Kebutuhan akselerasi pertumbuhan di tengah pemulihan pascabencana Menjadi tantangan utama perekonomian daerah. Target pertumbuhan sebesar 5,7 persen pada tahun 2026 dan 6,9 persen pada tahun 2027 menuntut percepatan yang signifikan dari capaian 3,37 persen pada tahun 2025. Di sisi lain, daerah masih menghadapi agenda rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, pemulihan lahan pertanian, serta penguatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Proses ini memerlukan waktu, koordinasi lintas sektor, dan dukungan pembiayaan yang memadai.

3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyusunan Visi Kepulauan Mentawai 2025-2029 memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah periode pertama implementasi dalam penguatan fondasi pembangunan jangka panjang Mentawai Emas 2045, perumusan visi tersebut juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 5 tahun terakhir, sehingga Visi Kepulauan Mentawai 2025-2029 adalah:

"*Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera*"

Penyusunan Visi Pembangunan Kepulauan Mentawai 2025-2029 bercermin dari visi pembangunan Nasional 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 dan visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 yaitu Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan. Visi yang diangkat untuk Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan ekonomi melalui hilirisasi produk/komoditas baik di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata dan menjadi pendorong (*multiplier effect*) tumbuhnya usaha ekonomi baru lainnya.

Begitu juga Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang unik menjaga potensi itu tetap ada untuk kehidupan generasi berikutnya serta menjadi daya dorong dan daya ungkit untuk kemajuan masyarakat Mentawai. Perumusan Visi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera memiliki makna:

MAJU

Menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mampu berdiri tegak dan sejajar dengan daerah lain, akselerasi di segala sektor pembangunan, mengejar yang belum tercapai, memperbaiki yang ada dan meningkatkan apa yang sudah diraih. Begitu juga pembangunan untuk kemajuan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, infrastruktur yang handal, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Maju juga dimaksudkan dalam hal kemandirian untuk mengelola potensi daerah, pembangunan yang memperhatikan kearifan lokal, keseimbangan kemajuan pembangunan dengan kelestarian alam untuk pembangunan berkelanjutan.

BERDAYA SAING

Upaya pembangunan untuk kemajuan di setiap lini Pembangunan seiring dengan memastikan kualitas dan mutu sehingga memiliki keunggulan yang dapat dijadikan penggerak pertumbuhan sosial, ekonomi dan budaya. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, memiliki kebudayaan yang unik dan bernilai tinggi, dan memiliki keunggulan komparatif (keunggulan yang relatif terhadap daerah lain) dan keunggulan kompetitif (keunggulan yang unik dan sulit ditiru) sehingga Kepulauan Mentawai diperhitungkan dalam kancah persaingan domestik, nasional dan internasional.

SEJAHTERA

Kehidupan masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dalam suasana aman, nyaman, terlindungi dan damai, serta adanya kesempatan yang sama bagi semua untuk berkembang dan maju. Sejahtera juga mencakup pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan yang melibatkan semua orang tanpa diskriminasi, pembangunan manusia yang hakiki.

Sejahtera juga dimaknai sebagai wujud kehidupan yang harmonis, bertumbuhnya kehidupan rohani atau spiritual masyarakat, harmoni dengan alam, sesama dan hidup damai/rukun berdampingan dengan masyarakat dari berbagai suku, agama, etnis, dan budaya.

Pelaksanaan pemanfaatan anggaran pemerintah diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong terobosan teknologi, mendukung swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, percepatan Rumah Sakit (RS) daerah, transformasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, pertahanan semesta, serta stabilitas makro ekonomi dan fiskal adaptif. Swasembada pangan dan energi, akan didukung pelaksanaan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hulu hilir.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045 dan pencapaian RPJMN 2025-2029 dengan fokus kebijakan makro Tahun 2027 antara lain:

Percepatan Transformasi Ekonomi; Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

Pembangunan Inklusif; Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

Pembangunan Berkelanjutan; Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

Mewujudkan Stabilitas Ekonomi; Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2026, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian.

Kondisi perkembangan ekonomi daerah yang dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi yang negatif mengindikasikan semakin menurunnya

kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tumbuh positif yaitu tahun 2024 sebesar 3,97 persen dan tahun 2025 sebesar 3,93 persen. Seiring dengan situasi ekonomi nasional yang kondusif dan berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah yang secara hati-hati diterapkan dalam mengantisipasi gejolak ekonomi global, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 seiring dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional dan tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang diprediksi tumbuh positif. Pembangunan sumber daya ekonomi berbasis komoditas unggulan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2027, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian/*value added* dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah. Hal ini selaras arah pembangunan nasional yang menitik beratkan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia, digitalisasi/penguatan teknologi dan infrastruktur ekonomi. Momentum percepatan ekonomi yang menjadi fokus pembangunan nasional menjadi *trigger* bagi daerah yang diharapkan senantiasa memberikan efek pengganda untuk mendorong sektor publik, layanan dasar dan ekonomi terpenuhi.

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan nasional melalui percepatan transformasi ekonomi menjadi ruang bagi daerah untuk ambil peran dan bagian yang integral sebagai satu kesatuan dengan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2027 antara lain:

1. Penguatan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang lebih mendorong pembangunan manusia dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pengentasan *stunting*.
2. Pembangunan infrastruktur ekonomi sebagai prasyarat pengembangan sektor sosial ekonomi masyarakat senantiasa didorong dengan alokasi anggaran yang memadai.
3. Pengembangan produk komoditas unggulan daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah yang dapat dioptimalkan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Menjaga kestabilan harga komoditas pangan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui menjaga kelancaran distribusi logistik (transportasi penyeberangan) serta penguatan kemandirian dalam penyediaan pangan lokal.
5. Optimalisasi alokasi belanja pemerintah melalui penggunaan produk dalam negeri dan lokal untuk penguatan ekonomi masyarakat lokal dan peningkatan program dan kegiatan padat karya.
6. Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui pengembangan destinasi wisata, pelaksanaan even pariwisata, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan desa wisata menuju pariwisata berkelanjutan.
7. Penguatan pemulihan sektor riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMK (optimalisasi *craft center* dan forum UMK, sertifikasi dan uji produk UMK), perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan UMK, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha UMK dan koperasi, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM UKM

dan koperasi, pengembangan *sharing* program yang difokuskan pada pemberdayaan UKM dan koperasi.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026 dan Tahun 2027

Ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan perang harga dan perang dagang serta potensi krisis pangan dan energi yang berkembang hingga saat. Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi dalam pembangunan tahun 2026-2027 adalah:

1) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Hal ini akan berpengaruh pada kebijakan dana transfer ke daerah yang akan mengalami penyesuaian yang ketat sedangkan sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan masih sangat terbatas.
2) Ketergantungan pada impor, sebagai daerah kepulauan Ketergantungan pada impor pangan dan barang lainnya masih menjadi kerentanan dalam perekonomian daerah di Kepulauan Mentawai.
3) Isu struktural: Tantangan struktural seperti kualitas sumber daya manusia, kesenjangan digital, dan disparitas antar wilayah perlu diatasi untuk menciptakan pertumbuhan yang merata.
4) Optimalisasi pengembangan IPTEK dan inovasi dalam mengikuti perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat.
5) Potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang melimpah tetapi belum memiliki nilai tambah sehingga perlu integrasi pengembangan komoditas unggulan hulu hilir hingga pada pemasarannya.

Prospek Perekonomian Daerah tahun 2026 dan 2027 adalah:

1) Penguatan ekonomi digital: Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat diperkirakan terus berlanjut, menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah.
2) Reformasi struktural: Pemerintah fokus pada reformasi struktural, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta adopsi teknologi yang lebih luas.
3) Fokus program prioritas: Anggaran dan kebijakan akan berfokus pada program-program prioritas seperti ketahanan pangan, layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan percepatan investasi.
4) Kebijakan yang adaptif dan inklusif: Kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan serta dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 pada dasarnya diarahkan untuk mendukung tema Pembangunan Daerah, yaitu Penguatan Sumberdaya Ekonomi untuk peningkatan produktifitas menuju transformasi ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan, membiayai dampak bencana terhadap infrastruktur, sarana dan prasarana yang terdampak bencana hidrometeorologi serta pengentasan kemiskinan ekstrem.

Adapun Arah kebijakan keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal;
2. Mengoptimalkan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat;
3. Mewujudkan Belanja Daerah yang berkualitas dan tepat sasaran;
4. Memprioritaskan belanja pada program strategis daerah;
5. Menjaga kesinambungan fiskal daerah.

Tahun 2026 menjadi pijakan untuk reformasi struktural sebagai bentuk transformasi ekonomi nasional dan percepatan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan keuangan nasional memperhatikan kondisi yang tengah terjadi secara nasional dan global, namun tetap bertumpu pada keadaan fiskal yang sehat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Berdasarkan perhitungan rasio kapasitas fiskal daerah dikelompokkan dengan kategori sebagai berikut:

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 0,905	sangat rendah
0,905 ≤ RKFD < 1,141	rendah
1,141 ≤ RKFD < 1,378	sedang
1,378 ≤ RKFD < 1,615	tinggi
1,615 ≤ RKFD	sangat tinggi

Melihat perkembangan nilai peta kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021-2025 dengan memperhatikan PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menunjukkan bahwa kecenderungannya membaik. Artinya daerah dalam membiayai alokasi belanja rutin, belanja tertentu, pembiayaan tertentu sudah mempunyai kemampuan dan menjadi pertimbangan dalam berbagai skema pembiayaan pembangunan .

Perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2021-2025, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2021-2025

Tahun	Rasio KFD	Kategori KFD
2021	0,628	Rendah
2022	1,552	Tinggi
2023	1,730	Sangat Tinggi
2024	1,384	Tinggi
2025	0,024	Rendah

Sumber: PMK Nomor 97 Tahun 2025

Pada Tabel 3.1 tampak bahwa Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode tahun 2021-2025 menunjukkan penurunan yaitu dari kategori rendah hingga pada tahun 2025 kapasitas fiskal Kepulauan Mentawai dengan predikat Rendah → Tinggi → Sangat Tinggi → Tinggi → Rendah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemulihan dunia usaha menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pertumbuhan PAD, mengingat basis pajak dan retribusi daerah sangat bergantung pada tingkat aktivitas ekonomi pelaku usaha lokal, termasuk sektor perikanan, pariwisata, dan perdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi Kepulauan Mentawai. Kebijakan yang ditempuh antara lain:

- Pemberian insentif dan relaksasi perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk penyederhanaan proses perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) di tingkat daerah;
- Fasilitasi akses permodalan dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM sektor perikanan dan pariwisata bahari sebagai sektor unggulan daerah kepulauan;
- Penguatan promosi destinasi wisata Kepulauan Mentawai untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa dan turunannya, sejalan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Siberut Barat Daya dan skema Klaster Ekonomi (NGC Mentawai);
- Pembangunan dan peningkatan infrastruktur menjadi kunci untuk mendukung aktivitas ekonomi berupa Infrastruktur Dasar (Pelabuhan, bandara, Listrik, Air Bersih, Jalan dan Jembatan) dan Infrastruktur Digital (Jaringan Internet, Smart City dan E-government, Fasilitas Co-Working Space dan Inkubator Bisnis Digital);
- Penguatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan dan Pendidikan (Pelatihan Vokasi, Beasiswa bidang ekonomi dan bisnis, Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen usaha untuk UMKM) dan Transfer Teknologi dengan mengadopsi teknologi modern dalam proses produksi, pendampingan teknis dan program magang;
- Sinergi dengan lembaga keuangan dan perbankan daerah dalam skema pembiayaan usaha produktif berbunga rendah bagi pelaku usaha terdampak pelemahan ekonomi.

3.2.1.1Optimalisasi Pendapatan melalui Inovasi Kebijakan

Optimalisasi pendapatan daerah diarahkan melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis inovasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi informasi, guna menutup potential loss dan memperluas basis penerimaan daerah. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi:

- Digitalisasi sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui kanal pembayaran non-tunai (Quick Response Code Indonesian Standard/QRIS dan kanal perbankan lainnya);
- Intensifikasi objek pajak dan retribusi eksisting, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi jasa umum dan jasa usaha;

- Ekstensifikasi objek pendapatan baru sejalan dengan berkembangnya sektor pariwisata dan investasi di Kepulauan Mentawai, termasuk potensi retribusi kepariwisataan dan retribusi pengelolaan sumber daya alam;
- Penguatan basis data wajib pajak dan retribusi daerah melalui pemutakhiran data terpadu antar-OPD dan sinkronisasi dengan portal kendali ekonomi Kementerian Dalam Negeri;
- Optimalisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melalui evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Pajak dan Retribusi berbasis potensi lokal;
- Optimalisasi Aset Daerah;
- Peningkatan Pendapatan dari Sektor Pariwisata;
- Penguatan Pengawasan terintegrasi dan Penegakan Hukum.

3.2.1.2 Mitigasi Dampak untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Mengingat pola realisasi tahun berjalan 2026 yang menunjukkan sejumlah komponen pendapatan belum terealisasi sesuai target periodiknya, diperlukan langkah mitigasi dampak yang responsif untuk mengamankan capaian target akhir tahun sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Langkah mitigasi yang ditempuh antara lain:

- Monitoring dan evaluasi bulanan atas realisasi pendapatan daerah secara berjenjang oleh Bapperida bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan OPD pengampu pendapatan;
- Penyusunan langkah kontinjensi (contingency plan) apabila terjadi selisih signifikan antara target dan realisasi berjalan, termasuk penyesuaian prioritas belanja daerah;
- Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait percepatan pencairan Dana Transfer, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik serta Bantuan Keuangan Provinsi;
- Penguatan sistem peringatan dini (early warning system) fiskal daerah untuk mengantisipasi risiko shortfall pendapatan yang berdampak pada pembiayaan program prioritas daerah;
- Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Sosial Produktif dan Program Padat Karya;
- Diversifikasi Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Alternatif dan Ketahanan Pangan;
- Program Pemulihan Ekonomi melalui Program Stimulus Usaha Mikro dan Kecil, Program Revitalisasi Sektor Pariwisata dan Program Rantai Pasok dan Distribusi.

3.2.1.3 Restrukturisasi Transformasi Ekonomi

Sebagai arah jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendorong restrukturisasi dan transformasi struktur ekonomi

daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer dan memperkuat kemandirian fiskal. Kebijakan ini sejalan dengan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan meliputi:

- Hilirisasi komoditas unggulan daerah, termasuk pengembangan industri pengolahan pisang, kelapa, dan sagu sebagai basis ekonomi baru yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan basis pajak/retribusi daerah;
- Pengembangan skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/KPDBU) untuk infrastruktur strategis, termasuk pengembangan Bandar Udara Mentawai, penerangan jalan umum tenaga surya, dan sistem penyediaan air minum;
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Siberut Barat Daya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi baru dan sumber PAD jangka panjang;
- Penjajakan skema pembiayaan hijau (green financing) dan mekanisme kredit karbon (IDXCarbon/REDD+) sebagai sumber pendapatan alternatif berbasis kelestarian lingkungan kepulauan;
- Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi belanja modal produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya memperluas basis pendapatan daerah pada tahun-tahun mendatang;
- Pengembangan Klaster Industri berbasis sumber daya lokal seperti Pembangunan Kawasan Industri kecil kelapa, Pengolahan Ikan dan Hasil Laut, Inkubator bisnis dan teknologi;
- Akselerasi Ekonomi Digital seperti Pembangunan Infrastruktur Broadband, program literasi digital untuk Masyarakat, fasilitasi startup dan techpreneur;
- Penguatan Ekonomi Biru seperti Pengembangan budidaya laut berkelanjutan, konservasi ekosistem pesisir dan laut, riset dan pengembangan potensi kelautan.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan sumber penerimaannya dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:

    a) Pendirian Badan Pendapatan Daerah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan memperkuat serta revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

yang dirasa perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Salah satu regulasi pengelolaan yang perlu diperkuat adalah penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah sebagai regulasi pajak formal untuk memperkuat aturan-aturan materiil yang telah ada sebelumnya. Pengaturan ini akan membuat prosedur dan ketentuan administrasi lainnya menjadi lebih pasti dengan landasan hukum yang kuat.

b) Peningkatan kinerja pemungutan pajak dan opsen pajak PKB dan BBNKB dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Sejak Tahun 2025, sudah diberlakukan Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Bahwa pendapatan pajak yang semula dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang masuk pada bagian Pendapatan Transfer menjadi bagian Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah.

c) Optimalisasi Pajak Daerah Kendaraan Bermotor, dengan:
   - Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang saat ini hanya sekitar 50-60%. Ini dapat dicapai dengan menggunakan sistem digital untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan.
   - Program edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
   - Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem Samsat Online untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efisiensi penagihan.

d) Reformasi kebijakan fiskal daerah perlu dilakukan dengan memperbaiki basis data perpajakan, melakukan intensifikasi penagihan, meningkatkan transparansi pelayanan, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital yang terintegrasi.

e) Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif, begitu juga dengan pengelolaan RSUD melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat memberikan kontribusi pendapatan dari layanan kesehatan.

f) Optimalisasi sumber PAD mencakup pembaruan data potensi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi dalam monitoring pendapatan, dan mendorong setiap OPD untuk menciptakan inovasi pelayanan publik berbayar yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan.

g) Melakukan program literasi pajak untuk masyarakat dan pelaku usaha juga akan diperkuat agar kesadaran membayar pajak tumbuh secara alami tanpa tekanan administratif.

h) Peningkatan prestasi/kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

i) Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi sistem informasi.
j) Membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, e-wallet, dan aplikasi mobile banking. Semua jenis pajak dan retribusi harus bisa dibayarkan melalui berbagai kanal digital untuk meningkatkan kenyamanan dan partisipasi masyarakat.
k) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan pemerintah provinsi, lembaga, instansi vertikal, SKPD penghasil dan kecamatan.
l) Melakukan implementasi dashboard monitoring pendapatan secara real time yang akan mempercepat deteksi terhadap potensi penyimpangan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Transparansi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
m) Membangun analisis data besar (big data analytics) untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Tax intelligence berbasis data ini akan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi pajak tinggi namun masih belum dimaksimalkan. Dengan menggunakan alat analisis data dan model prediksi, pengelolaan pajak daerah akan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.
n) Performance-Based Revenue Targeting per OPD yakni setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki key performance indicators (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur. Penerapan sistem penilaian kinerja yang berbasis pada pencapaian target PAD akan memastikan setiap OPD memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk memantau, mengevaluasi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.
o) Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, melalui:
    - Mendorong kerja sama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pengelolaan proyek besar yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerja sama untuk pengelolaan layanan publik.
    - Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan.
p) Pengembangan Kredit Karbon sebagai Sumber Pendapatan Daerah melalui:
    - Identifikasi Potensi Sumber Kredit Karbon: Daerah dapat mengeksplorasi berbagai sektor yang berpotensi menghasilkan kredit karbon, seperti sektor kehutanan, perkebunan, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah. Proyek-proyek pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat diintegrasikan dalam mekanisme perdagangan karbon internasional.
    - Mengembangkan program Penanaman Pohon dan Reboisasi serta konservasi hutan untuk memperoleh sertifikat kredit karbon. Program ini tidak hanya akan berkontribusi pada pengurangan emisi CO2, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan jangka panjang bagi daerah.

- Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste dapat menghasilkan kredit karbon melalui pengurangan emisi dari landfill dan daur ulang sampah organik menjadi kompos atau bioenergi.
- Menyusun peraturan daerah yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan proyek-proyek kredit karbon di daerah, termasuk mekanisme verifikasi, pemantauan, dan pelaporan emisi yang terlibat.
- Menjalin kerja sama dengan lembaga internasional yang menyediakan platform untuk sertifikasi dan perdagangan kredit karbon. Pemerintah daerah dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan yang membutuhkan offset emisi untuk memenuhi kewajiban lingkungan mereka.
- Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki platform untuk perdagangan kredit karbon dan perusahaan yang tertarik untuk berkontribusi pada pengurangan emisi melalui proyek lokal.

q) Digitalisasi Pendapatan Daerah Real-Time, melalui:
- Sistem Digital Pembayaran Pajak dan Retribusi yakni mengembangkan dan mengimplementasikan sistem digital yang memungkinkan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara real-time. Sistem ini dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan memungkinkan pemantauan pendapatan secara langsung oleh pemerintah daerah.
- Integrasi Data Pendapatan guna memastikan bahwa seluruh data pendapatan dari pajak, retribusi, dan penggunaan aset dapat terintegrasi dalam satu platform digital. Ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- Laporan Keuangan dan Pemantauan Real-Time: Implementasi dashboard digital untuk pemantauan dan pelaporan pendapatan daerah secara real-time. Ini akan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data, serta mempercepat respons terhadap fluktuasi pendapatan.

r) Meningatkan sumber Pendapatan Lain, Terutama Aset, melalui :
- Memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, seperti tanah dan bangunan milik daerah yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerja sama dengan pihak ketiga.
- Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.
- Mengembangkan kerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk public-private partnership (PPP) untuk mengelola aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

2) Pendapatan Transfer, arah kebijakan selaras dengan asumsi dana transfer ke daerah yang diproyeksikan mengalami stagnasi dan dengan kecenderungan tren perlambatan/menurun. Strategi utama menghadapi stagnasi dana transfer adalah mendorong efisiensi belanja, mempercepat penggalian sumber-sumber PAD baru, memperkuat kinerja aset daerah, dan membangun kerja sama kemitraan dengan sektor swasta. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), Menyiapkan skema pembiayaan inovatif seperti KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan alternatif pinjaman daerah untuk membiayai proyek-proyek prioritas yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh APBD).

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari pihak ketiga, dalam hal ini meliputi bagi hasil yang diperoleh dari pajak pemerintah provinsi, kapitasi JKN, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bagi hasil retribusi dengan pemerintah provinsi serta pendapatan lainnya yang tidak termasuk kelompok PAD dan dana transfer ke daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Begitu juga dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka peran Badan Pendapatan Daerah yang akan dibentuk menjadi motor penggerak pengendali tata kelola pendapatan daerah yang lebih sistematis, terukur, efektif dan efisien. Kehadiran Badan Pendapatan Daerah ini diyakini memiliki pengaruh besar untuk menggali potensi penerimaan daerah yang selama ini belum optimal dan dapat menyinergikan satuan kerja lainnya untuk pemantauan dan penegakan terhadap objek penerimaan daerah. Pendapatan daerah yang diproyeksikan meningkat setiap tahunnya berasal dari salah satunya adalah penerimaan pajak. Pajak daerah sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.2 menujukkan pertumbuhan yang positif dan cukup besar.

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024-2028

URAIAN	JUMLAH DALAM RUPIAH				
	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	PROYEKSI/TARGET	
				TAHUN 2027	TAHUN 2028
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**53.053.048.383**	**58.636.166.875**	**92.743.767.868**	**122.809.699.790**	**140.445.022.173**
Pajak Daerah	9.112.561.267	12.576.581.508	25.084.673.049	47.593.140.790	59.352.454.869
Retribusi Daerah	15.367.248.573	19.810.043.027	28.937.054.000	40.837.759.951	44.921.535.946
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.476.655.254	16.530.807.515	18.476.655.254	16.476.655.254	16.476.655.254
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.096.583.289	9.718.734.825	20.245.385.565	17.902.143.795	19.694.376.104
PENDAPATAN TRANSFER	**864.468.015.943**	**701.866.321.633**	**613.692.550.985**	**715.151.004.608**	**715.095.076.959**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	820.560.607.442	669.682.618.004	590.550.805.000	691.745.761.975	691.689.834.326
Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.907.408.501	32.183.703.629	23.141.745.985	23.405.242.633	23.405.242.633
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**7.945.022.383**	**8.952.006.706**	**12.553.608.000**	**7.014.568.732**	**7.014.568.732**
Hibah	0	0	0	0	0
Dana Darurat	0	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	7.945.022.383	8.952.006.706	12.553.608.000	7.014.568.732	7.014.568.732
PENDAPATAN DAERAH	**925.466.086.709**	**769.454.495.214**	**718.989.926.853**	**844.975.273.130**	**862.554.667.864**

Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2027 diestimasikan meningkat jika dibandingkan dengan kondisi pendapatan asli daerah yang secara nyata telah diterima oleh daerah pada tahun 2025 mengingat sumber pendapatan tersebut secara riel menjadi alokasi yang diterima secara maksimal untuk pembiayaan pembangunan daerah. Begitu juga dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 bahwa BBNKB tidak lagi menganut pola bagi hasil melainkan dengan pola opsen sehingga ketentuan terkait pajak daerah mengalami penambahan berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta dengan terbentuknya Badan Pendapatan Daerah. Beberapa target pendapatan pajak daerah dan pendapatan bagi hasil dari provinsi dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada target opsen PKB dan opsen BBNKB yang telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka pendapatan asli daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp. 122.809.699.790 dengan rincian pajak daerah sebesar Rp. 47.593.140.790, Retribusi Daerah sebesar Rp. 40.837.759.951, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 16.476.655.254, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 17.902.143.795.

Pendapatan transfer untuk tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp. 715,095,076,959. Pendapatan transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 691,689,834,326 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 23,405,242,633 sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2027 yaitu sebesar Rp. 7.014.568.732.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja. Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga, yaitu:

1. Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
   Belanja wajib: belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah
   pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial).
   Belanja mengikat: belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
2. Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Belanja daerah dialokasikan untuk membiayai program prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan belanja mengikat. Pemenuhan belanja wajib digunakan untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka *stunting*. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
2. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
3. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, yaitu untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah diantaranya Pembangunan Infrastruktur Jalan, Penyediaan Listrik, Penyediaan jaringan Internet, Pembangunan Air Bersih, Pembangunan Manusia Berkualitas, Peningkatan Pendapatan Per Kapita.
5. Melakukan koordinasi (kontrol) secara rutin dengan seluruh OPD dan *stakeholder* untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah (efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja).

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024-2028

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi Tahun 2024	Realiasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Proyeksi/Target pada	
				Tahun 2027	Tahun 2028
Belanja Operasi	**664.178.014.705**	**583.878.758.648**	**589.562.654.053**	**643.766.281.256**	**618.082.639.787**
Belanja Pegawai	331.088.804.278	364.707.703.285	418.744.801.131	369.500.744.008	325.955.586.048
Belanja Barang dan Jasa	289.506.143.986	200.227.679.753	157.913.306.922	257.432.322.988	271.539.823.718
Belanja Bunga	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	7.208.422.603	7.430.462.000	4.000.000.000	7.500.000.000	5.000.000.000
Belanja Hibah	35.433.087.998	11.013.413.610	8.754.546.000	9.008.214.260	15.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	941.555.840	499.500.000	150.000.000	325.000.000	587.230.021
Belanja Modal	**152.697.574.476**	**79.174.491.514**	**39.037.405.000**	**117.780.934.154**	**141.764.378.065**
Belanja Modal Tanah	213.300.000	0,00	0	3.274.000.000	2.000.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.182.154.448	23.711.918.832	10.806.634.120	27.137.570.248	23.690.055.684
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.067.914.028	28.696.722.579	577.525.000	15.840.868.000	19.021.377.324
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	91.142.885.630	25.496.556.353	26.989.245.880	70.865.234.166	96.952.945.057
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.775.475.370	697.693.750	664.000.000	663.261.740	100.000.000
Belanja Modal Aset Lainnya	315.845.000	571.600.000	0	0	0
Belanja Tidak Terduga	**1.025.861.621**	**1.595.671.852**	**1.850.000.000**	**1.850.000.000**	**1.500.000.000**
Belanja Tidak Terduga	1.025.861.621	1.595.671.852	1.850.000.000	1.850.000.000	1.500.000.000
Belanja Transfer	**110.976.420.519**	**92.363.773.096**	**88.539.867.800**	**80.522.130.071**	**101.192.410.114**
Belanja Bagi Hasil	3.257.906.575	2.847.826.657	5.402.172.700	5.402.172.700	3.205.794.114
Belanja Bantuan Keuangan	107.718.513.944	89.515.946.439	83.137.695.100	75.119.957.371	97.986.616.000
BELANJA DAERAH	**928.877.871.321**	**757.012.695.110**	**718.989.926.853**	**843.919.345.481**	**862.539.427.966**

Belanja daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp. 844.919.345.481. Belanja ini terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 591.265.510.167 Belanja Modal sebesar Rp. 150.961.425.200 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.500.000.000 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 101.192.410.114.

3.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Arah kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

1. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah.
2. SiLPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran (surplus/defisit). Apabila SiLPA tahun berjalan yang dihasilkan positif/surplus, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan sedangkan apabila SiLPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai dianggarkan sesuai kondisi dan kebutuhan yang direncanakan untuk tahun 2027 untuk Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) pada tahun 2027 sebesar Rp. 1.000.000.000, dengan peruntukkan pada penyertaan modal daerah sedangkan SiLPA diproyeksikan tidak ada, artinya bahwa untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2027 dialokasikan sesuai dengan peruntukan/penggunaannya sehingga SiLPA yang bersifat umum atau penggunaannya bebas/tidak terikat sudah ada peruntukkannya.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024-2028

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Tahun 2026	Proyeksi/Target pada Tahun	
				2027	2028
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**74.953.685.319**	**73.212.395.675**	**92.613.686.400**	**0**	**0**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.953.685.319	73.212.395.675	92.613.686.400	0	0
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**74.953.685.319**	**73.212.395.675**	**92.613.686.400**	**1.000.000.000**	**0**
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	
Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	1.000.000.000	0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**1.000.000.000**	**0**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**74.953.685.319**	**73.212.395.675**	**92.613.686.400**	**1.000.000.000**	**0**

Arah kebijakan KEM PPKF Sumatera Barat Tahun 2027 sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi
   - Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja dan Sistem Keuangan
   - Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah.
   - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai tools afirmasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah.
   - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas

b. Penurunan Kemiskinan
   - Refocusing belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan, seperti; (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik seperti desain ruang public yang aman, dan (2) belanja dari bearmarking TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik terutama untuk daerah 3T.
   - Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan
   - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan
   - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM
   - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur keamanan

c. Pendidikan
- Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan.
- Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM.
- Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta creative financing untuk menjaga keberlanjutan kualitas layanan Pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk sarana sekolah, CSR beasiswa dan peralatan pendidikan, dan green financing efisiensi energi sekolah.
- Memperkuat link and match pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri.

d. Kesehatan
- Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap dan penanganan stunting, serta penguatan layanan kesehatan.
- Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, lingkungan rumah tangga, ibu menyusui, kualitas makanan, ketersediaan makanan dan air, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan.
- Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.

- Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif sesuai kapasitas fiskalnya untuk menjaga kualitas layanan.

e. Pertanian

- Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian
- Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan.
- Prioritisasi earmarking PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan
- Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian

Perikanan

- Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan
- Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan
- Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan.
- Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema creative financing untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2027 dilaksanakan berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil, melalui integrasi antara evaluasi capaian RKPD tahun sebelumnya dengan target RPJMD Tahun 2025–2029. Dokumen RKPD Tahun 2027 memiliki peran strategis dalam merumuskan secara teknis implementasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan Visi Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera. Sebagai penjabaran tahun ke-2 RPJMD Tahun 2025-2029, dokumen RKPD sebagai wujud operasional perencanaan tahunan dalam merumuskan sasaran prioritas pembangunan yang disusun untuk mencapai target tujuan pembangunan daerah. Penguatan ekonomi daerah untuk peningkatan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2025-2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045 menjadi perencanaan jangka menengah nasional periode pertama dan perencanaan tahun 2027. Sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka (tahun 2045) serta mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden mengamanatkan penyusunan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Amanat ini ditujukan untuk meneguhkan kembali tujuan pembangunan yang terbentuk pada pembukaan UUD 1945. Pada visi Indonesia 2045 ditetapkan cita-cita untuk lepas dari jebakan *middle income trap* dan menjadi negara maju atau *high income country* sebelum tahun 2045.

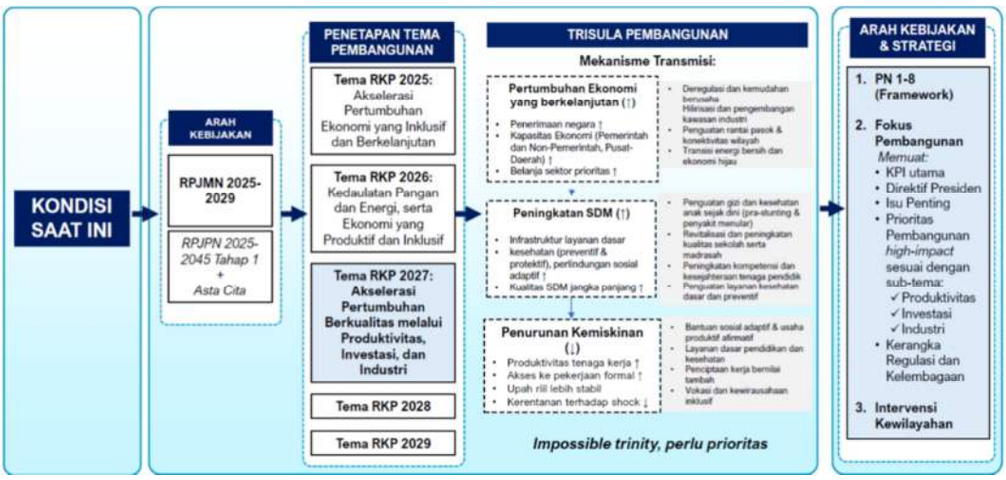
Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi Pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Kedudukan RKP Tahun 2027 sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2025–2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2027 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. RKP 2027 disusun secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis kinerja, dengan memastikan konsistensi terhadap arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029, kesinambungan pembangunan antarperiode, serta responsivitas terhadap dinamika pereonomian global dan domestik. Selain itu, RKP 2027 diarahkan untuk mempercepat transformasi struktural sebagai fondasi pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan proses perencanaan yang komprehensif dan berbasis evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, ditetapkan tema RKP Tahun 2027, yaitu:

“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Investasi dan Industri”

Tema tersebut menegaskan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan produktivitas, peningkatan kualitas investasi, serta percepatan hilirisasi dan industrialisasi. Investasi diposisikan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi dalam mendorong nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing, sementara sektor industri diperkuat sebagai tulang punggung pertumbuhan berbasis inovasi dan peningkatan kandungan lokal. Pelaksanaannya menuntut sinergi pusat dan daerah agar program berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata terhadap percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Gambar 4.1 Dukungan terhadap Tema Pembangunan



Sumber : Kedeputian PMP, Bappenas 2026

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni:

1) Sasaran Pembangunan 1 yakni Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju yang ditandai dengan :
   a. Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
   b. GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
   c. Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029
   d. PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029
2) Sasaran Pembangunan 2 yakni Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditandai dengan Global Power Index menjadi peringkat 29 di tahun 2029
3) Sasaran Pembangunan 3 yakni Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang ditandai dengan :
   a. Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5 - 5% di tahun 2009 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026
   b. Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
   c. Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
4) Sasaran Pembangunan 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029
5) Sasaran Pembangunan 5 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju net Zero emission yang ditandai dengan :

a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 di tahun 2002
b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 di tahun 2029

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Visi Pembangunan Sumatera Barat terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan dijabarkan melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 diperlukan sebagai implementasi setiap misi setiap tahunnya melalui tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, 2025-2029

VISI Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Pendidikan Merata dan Kesehatan yang Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia 2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
Misi 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, Perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan. 2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi 3: Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan	1. Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal. 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar

VISI Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
		untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
Misi 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi.	1. Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah. 2. Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas. 3. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil menengah sebagai pilar ekonomi daerah.
Misi 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana.	1. Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. 2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan. 3. Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.
Misi 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	1. Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. 2. Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan. 3. Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas.
Misi 7: Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk Usaha Kecil	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah. 2. Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan Usaha Kecil.
Misi 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis	1. Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. 2. Meningkatnya kualitas layanan publik.

VISI Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
yang Efektif	digital	3. Meningkatnya Pendapatan Daerah.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat sejak tahun 2025 dan 2026, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakkan ekonomi yang sehat dan merata dan bertumpu pada kemampuan ekonomi di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2027, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 yakni : *"Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan"*

Adapun penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Akselerasi Transformasi Ekonomi

   Akselerasi transformasi ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing melalui transformasi ekonomi desa berbasis badan usaha milik nagari dan koperasi, penguatan industri kecil, usaha kecil, dan sektor kreatif, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
2. Inklusi Sosial

   Inklusi sosial diarahkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar, melalui peningkatan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pasar kerja, serta perluasan akses sanitasi, air minum, dan perumahan layak.
3. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian daerah dan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.2

Proyeksi Indikator Makro Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2027

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2024	2025	2026	2027
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	3,36	5,7	6,9
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	34.167,59	34.854,17	36,87	38,9
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	57.047,21	59.548,83	69,59	77,31
4	Indeks Gini (Rasio)	0,283	0,281	0,281	0,28
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,97	5,35	4,92	4,64
6	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	345,73	312,35	294,59	281,84
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,75	5,62	5,39	5,23
8	IPM	76,43	77,27	77,48	78,04
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,37	74,69	74,83	75,06
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,3	14,31	14,62	14,77
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,44	9,77	9,58	9,69
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.718	12.041	12.074	12.262

Sumber: RPJMD Prop. Sumatera Barat 2025-2029

Dalam pelaksanaannya, pembangunan juga memperhatikan upaya pemulihan pascabencana dan penguatan ketangguhan daerah, sejalan dengan karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tingkat kerawanan bencana. Pemilihan Tema Pembangunan Tahun 2027 merupakan penetapan fokus prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 dan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027

Kebijakan pembangunan tahun 2027 yang fokus pada Penguatan Sumber Daya Ekonomi untuk Peningkatan Produktivitas menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan bagian penting bagi daerah dalam upaya pencapaian pentahapan pembangunan jangka menengah (RPJMD

2025-2029) dan jangka panjang (RPJPD 2025-2045). Meningkatkan kualitas sumber daya Ekonomi dan Peningkatan produktivitas menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan menjadi pondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2027 merupakan jabaran dari tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 seperti pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran

Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2027

VISI Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya Mutu Pendidikan. 2. Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat. 3. Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif.
Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. 2. Meningkatnya Investasi, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi. 3. Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas.
Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Inklusif. 2. Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif.
	Terwujudnya Kawasan sebagai Basis Kemajuan Wilayah yang didukung PSU Berkualitas dan	1. Meningkatnya Desa Mandiri. 2. Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan.

VISI Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
	Berwawasan Lingkungan	
Misi 4: Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan	1. Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat. 2. Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan.
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana	Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana	1. Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan. 2. Menurunnya risiko terhadap dampak bencana.
Misi 6: Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia	Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah. 2. Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat.
Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial	1. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum. 2. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Misi 8: Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya	Terwujudnya Birokrasi yang Prima	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani.
	Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah

Penguatan ekonomi tahun 2027 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi dan sebagai pijakan awal menuju Mentawai Emas 2045 dengan memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan baik nasional maupun daerah, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan yaitu:

"Penguatan Sumber Daya Ekonomi untuk Peningkatan Produktivitas menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Tema tersebut memiliki arti yang penting sebagai wujud menghadirkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas, menggali potensi daerah dalam upaya meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, menjadi efek pengganda untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat dan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Tema prioritas pembangunan daerah Tahun 2027, memiliki makna antara lain:

1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui strategi pengembangan ekonomi melalui pusat pertumbuhan baru (*new growth center*), pengembangan ekonomi berbasis lokal.
2. Peningkatan Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi.
3. Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas berfokus pada penguatan usaha, peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.

Pembangunan daerah tahun 2027 yang fokus pada tema pembangunan tahunan, namun pada prinsipnya dengan tidak mengabaikan komitmen dan upaya yang kuat untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi dan *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perwujudan tema pembangunan tersebut dicerminkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan target pembangunan daerah merujuk pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, dan untuk target pembangunan yang telah tercapai di tahun sebelumnya atau tahun berjalan maka perumusan target sasaran dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan dokumen perencanaan atau dilakukan proyeksi.

Tabel 4.4
Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2027

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi Tahun 2027
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	93,56
Pertumbuhan Ekonomi	%	6,63
IPM	indeks	67,81
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,59
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,48

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi Tahun 2027
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,93
Pengeluaran Per Kapita	Rp.Ribu	7.526
Tingkat Kemiskinan	%	11,89
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,18
Rasio Gini	%	0,263

Sumber : RPJMD Kab. Kepulauan Mentawai 2025-2029

Sebagai bentuk konsistensi dan keselarasan dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2027, berikut disajikan persandingan keselarasan tema pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.

Tabel 4.5

Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2027

Tema RKP Tahun 2027	Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027	Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri"	Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial dan Ketahanan Pangan	Penguatan Sumber Daya Ekonomi untuk Peningkatan Produktivitas menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Keselarasan tema pembangunan terlihat dari upaya bersama bagaimana mewujudkan transformasi khususnya pada sektor ekonomi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui salah satunya hilirisasi sumber daya alam berbasis komoditas unggulan daerah untuk peningkatan nilai tambah yang didukung dengan pembangunan sumber daya ekonomi baik infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia *reskilling/upskilling*, kelembagaan, penguatan pasar, manajemen rantai pasok, dan penguatan investasi.

Tabel 4.6
Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2027

Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran RKP	Sasaran RKPD Provinsi Sumatera Barat	Sasaran RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	101,5-102,2	77,31	93,56

Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran RKP	Sasaran RKPD Provinsi Sumatera Barat	Sasaran RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,8-6,5	6,90	6,63
Tingkat Kemiskinan	Persen	6,0-6,5	4,64	11,89
Rasio Gini	Rasio	0,362–0,367	0,28	0,263
Indeks Modal Manusia/ Indeks Pembangunan Manusia	Persen	0,575	78,04	67,81
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,30-4,87	5,23	1,18

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2027, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2027 sebagai berikut.

Tabel 4.7
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 1

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM		1	Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara
			2	Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme
			3	Pengembangan ekosistem teknologi informasi yang

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z
			4	Internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi, dan penegakan hak asasi manusia
a	Indeks Demokrasi Indonesia	2,12-85,66	5	Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
			6	Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas
			7	Menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum
			8	Peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender
b	Indeks HAM	2,80	9	Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku
			10	Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya
			11	Memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				perlindungan anak
			12	Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya
			13	Transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Tabel 4.8
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			
1	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan Pembangunan			Kedaulatan Negara Dan Stabilitas Keamanan Nasional
a	Asia Power Index (Military Capability)	17,0	1	Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI
			2	Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara,
			3	Memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber
			4	Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
			5	Meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar
			6	Memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme
			7	Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit
			8	Pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis
b	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	65,8	10	Mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia
			11	Meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri
			12	Pembentukan ekosistem industri pertahanan
			13	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest
			14	Kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam
c	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	68,00	15	Memperkuat komponen cadangan dan komponen pendukung
d	Global Cybersecurity Index	95	16	Melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
			17	Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara
			18	Memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia
			19	Memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme
			20	Penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar
			21	Pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme
			22	Memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme
			23	Peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita
			24	Pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat
			25	Penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas
			26	Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil
e	Indeks Keamanan Laut Nasional	61	27	Memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi
			28	Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
			29	Penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal
			30	Penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis
2	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) - Pangan			
a	Indeks Ketahanan Pangan	75,4	31	Menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan
b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	2,38	32	Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio
c	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	6,55	33	Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian
			34	Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya
			35	Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional
			36	Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya
			37	Menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan
			38	Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu
			39	Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur)
			40	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal
			41	Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan
			42	Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Di antaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional
			43	Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan
3	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) - Air			
a	Indeks Ketahanan Energi	6,82	10	Mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy)
b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,00	45	Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
			46	Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional
			47	Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/ distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta
4	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) - Air			; (2); (3); (4; serta (5).
a	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,50	48	penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau
b	Kapasitas tampungan air	60,16	49	peningkatan kinerja layanan irigasi multi komoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi
c	kses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%	42,24	50	pengelolaan risiko bencana daya rusak air
d	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	17,00	51	penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir
			52	revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga
5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan			
a	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)	2	53	Penguatan industri halal, di antaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim
			54	Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional
			55	Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal
			56	Penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan non bank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				modal syariah
			57	Penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional
b	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	41,26	58	Menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, blue finance dan good neighbor policy
			59	Meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun
			60	Mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budi daya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi
			61	Menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan
			62	Menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar
			63	Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				kelautan berkelanjutan melalui peningkatan penguatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata
			64	Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait science, technology, engineering, art, and mathematics, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				nasional dan global
c	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	41	65	Melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat
			66	Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro
			67	Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing
			68	Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi
6	**Terwujudnya transformasi ekonomi hijau**			
a	Indeks Ekonomi Hijau	71,01	69	Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy)
b	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	60,00	70	Menerapkan ekonomi sirkular industri
c	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	28 (17 terdaur ulang)	71	Menerapkan efisiensi sumber daya
d	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	19,07	72	Mengembangkan produk ramah lingkungan
e	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	27,35	73	Menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material
f	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,49	74	Menguatkan ekosistem daur ulang
g	Indeks Kualitas Lingkungan	76,67	75	Mencegah dan menindak tegas

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
	Hidup (IKLH)			pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan
			76	Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa
			77	Peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber
			78	Meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle
			79	Peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
			80	Optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining
			81	Perbaikan tata kelola persampahan
			82	Mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang
			83	Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan). Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi
			84	Mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies
			85	Memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
			86	Mengelola sumber daya genetik

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
			87	Menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi
			88	Memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi
			89	Pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif
			90	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem
			91	Peningkatan peran masyarakat yang terlibat alam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati
			92	Penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati
			93	Peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati
			94	Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan
			95	Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (28) inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru
			96	Pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional
				peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik
			97	Pengembangan pengelolaan keamanan hayati (biosafety)
			98	Meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya
			99	Meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah
			100	Merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema public private people partnership dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat; (35) menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan. Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi
			101	Meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau
			102	Meningkatkan pengelolaan air limbah
			103	Meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia
			104	Meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa
			105	Meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut
			106	Meningkatkan kualitas lahan
			107	Menurunkan laju deforestasi
			108	Meningkatkan kualitas ekosistem gambut
			109	Melakukan pengelolaan bahan

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
			110	Menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (46) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan
			111	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang
			112	Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			113	Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			114	Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif
			115	Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi
			116	Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multi pihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan. Strategi

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi
			117	Menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan
			118	Melakukan pembangunan rendah karbon
			119	Peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer
			120	Efisiensi energi
			121	Peningkatan transportasi berkelanjutan
			122	Peningkatan cadangan karbon
			123	Pencegahan pengurangan cadangan karbon
			124	Implementasi praktik pertanian yang rendah karbon
			125	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru
			126	Pengembangan industri hijau
			127	Pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular
			128	Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau
			129	Mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang carbon trade
			130	Melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				power plant retirement) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan
			131	Menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi renewable energy sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah
			132	Mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan
			133	Mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle) untuk transportasi umum. Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi
			134	Mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing
			135	Meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau
			136	Memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

Tabel 4.9
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif KoperasI			
1	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan		1	Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah
			2	Menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu
			3	Menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi
			4	Mengembangkan pelabuhan simpul transhipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik
			5	Membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah
			6	Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat
a	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	47,00	5	Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
			6	Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas
			7	Menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum
			8	Peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender
			9	Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku
			10	Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya
			11	Memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			12	Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya
			13	Transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan
2	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB			
a	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	188,04	14	Penguatan peran perbankan
b	Aset Perbankan/PDB (%)	64,51	15	Peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan. Penguatan peran sektor keuangan nonbank dilakukan melalui peningkatan kelolaan dana pensiun, kepesertaan dan inovasi produk asuransi, perluasan akses fintech, penguatan pengawasan sektor keuangan nonbank, penguatan kolaborasi multipihak baik di level pusat maupun daerah, serta pendalaman pasar modal yang dilakukan dengan mempermudah investor dan emiten
c	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,63	16	Penguatan peran sektor keuangan nonbank
d	Aset Asuransi/PDB (%)	9,30		
e	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	59,90		
f	Total Kredit/PDB (%)	38,46		
g	Inklusi Keuangan (%)	91,50		
3	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas			
a	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95	17	Memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak
b	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,12	18	Memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi bankable
			19	Menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif
			20	Memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota
			21	Mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa
			22	Mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam
c	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,15	23	Memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah
d	Rasio Kewirausahaan (%)	3,18	24	menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; (2); (3); (4); (5); (6); (7); serta (8)
			25	memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi
			26	melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat
			27	mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan
			28	melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wira usaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha
			29	mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global
			30	mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan start-up
			31	mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
4	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata			
a	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60-4,70	32	Penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan
b	Devisa Pariwisata (miliar US$)	22,00-24,70	33	Pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara
			34	Pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (blended finance)
			35	Memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global
			36	Perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata
			37	Menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata
			38	Menerapkan prinsip Blue-Green-Circular Economy bagi para pelaku usaha pariwisata
			39	Reaktivasi pelaksanaan event dan meetings, incentives, conventions, and exhibitions serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi
			40	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana
			41	Pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata
			42	Diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, meetings, incentives, conventions, and exhibitions,

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				olahraga, ramah muslim, yacht and cruise, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi
5	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif			
a	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,40-8,00	43	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas
			44	Integrasi data ekonomi kreatif
			45	Percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka
			46	Perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia
			47	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
			48	Pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global
			49	Penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum)
			50	Mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Tabel 4.10
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas			
1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas Yang Merata
a	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (Tahun)	9,45	1	Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah
b	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,36	2	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang
c	Rata-rata Nilai PISA		3	Revitalisasi pendidikan nonformal
	(a) Membaca	396	4	Penguatan program

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
	(b) Matematika (c) Sains	404 416		Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)
d	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:		5	Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
	(a) Literasi Membaca (b) Numerasi	65,89 58,86	6	Penguatan tata kelola pendidikan
e	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	65,89 58,86	7	Menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif
f	Angka Partisipasi Kasar (APK)	11,49	8	Memfasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif
g	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,50	9	Meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja
			10	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi
			11	Melaksanakan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan low-skilled berbasis pembelajaran sepanjang hayat

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
			12	Memfasilitasi transisi school to work dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi
			13	Melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing
			14	Mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga
			15	Mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
			16	Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi, mencakup
			17	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
			18	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
			19	Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima
			20	Penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global
			21	Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional
			22	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya
			23	Memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics
			24	Memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
			25	Memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan Iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				diferensiasi misi
			26	Meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya
			27	Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional
			28	Meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta (m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global
2	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua		29	Kesehatan Untuk Semua
a	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,68	30	Memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (universal health coverage) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
b	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata Kelahiran per Wanita Usia Subur 15–49 Tahun)	2,10	31	Menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting
c	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	109	32	Mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin)
d	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	17,50	33	Memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain)
e	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	252	34	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan
f	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,70	35	Memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap
			36	Meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal
			37	Mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara
			38	Menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah
			39	Memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				puskesmas
			40	Memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih pro rakyat, pro tenaga kesehatan, pro fasilitas kesehatan, dan pro pengadaan farmasi
			41	Memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren
			42	Memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk)
			43	Meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran
			44	Memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan
			45	Membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				kesehatan nasional yang efektif dan efisien (family medicine)
			46	Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak
			47	Penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan
			48	Eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya
			49	Mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi
			50	Penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba
			51	Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans
			52	Investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan
			53	Peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan
3	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		54	Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Tenaga Kerja
a	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83	55	Penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan
b	Indeks Perlindungan Anak	72,33	56	Penyediaan fasilitas pendukung keluarga
c	Indeks Pembangunan Pemuda	67,24	57	Penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan
d	Indeks Ketimpangan Gender	0,421	58	Pemenuhan hak anak secara universal
e	Indeks Pembangunan Gender	92,11-92,21	59	Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak
f	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	94,50	60	Peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak
g	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	69,50	61	Penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				berisiko
			62	Penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan
			63	Peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi
			64	Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial diproses pembangunan
			65	Penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia
			66	Mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
			67	Mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas
			68	Mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum
			69	Memperluas program pendidikan formal maupun non formal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
			70	Meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat
			71	Mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas
			72	Membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas
			73	Memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat
5	**Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat**		74	Prestasi Olahraga Indonesia Di Tingkat Dunia Dan Budaya Berolahraga Di Masyarakat
a	Peringkat pada Asian Games	9–11	75	Mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga
b	Peringkat pada Asian Para Games	5–7	76	Mengembangkan program siswa olahragawan (student athlete program) secara berjenjang dan berkelanjutan
c	Peringkat pada ASEAN Para Games	1–2	77	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha
d	Persentase Penduduk	10,80-11,94	78	Mengembangkan jaminan

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
	Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga			kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier
			79	Memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Tabel 4.11

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			
1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan		1	Pengembangan pembiayaan inovatif (innovatif financing) dan optimalisasi insentif fiskal/non fiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor
a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	21,50	2	Penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi
2	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi		3	Aglomerasi industri secara

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
	Domestik dan Global			merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada
a	Biaya Logistik (% PDB)	13,30	4	Optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara bertahap
b	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,40	5	Penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang
c	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22,7	6	Akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi
			7	Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui (a) penciptaan pusat pusat pertumbuhan baru, (b) penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan, dan (c) peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru
			8	Optimalisasi backbone dalam mendukung integrasi ekonomi melalui (a) standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama, serta (b) peningkatan konektivitas integrasi hinterland dengan simpul utama
			9	Penguatan sistem logistik nasional melalui (a) penguatan kebijakan logistik, (b) pengintegrasian dan digitalisasi

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				logistik, (c) pengembangan infrastruktur penunjang logistik, (d) penguatan pelaku logistik, serta (e) peningkatan sumber daya manusia logistik
			10	Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik
			11	Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan integrasi dalam rantai nilai global; (g) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk electric vehicle; serta (h) peningkatan utilisasi Free Trade Agreement/Comprehensive

No.	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				Economic Partnership Agreement untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Tabel 4.12

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			
1	Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan		1	Peningkatan pemberdayaan sosial
a	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	2	Peningkatan rehabilitasi sosia
b	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0-0,5	3	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
c	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)	18,2	4	Peningkatan partisipasi anak usia sekolah
d	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99	5	Peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat
e	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	10,40	6	Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
2	Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan			
a	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,66	6	Peningkatan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
			7	Peningkatan kualitas kawasan permukiman
			8	Peningkatan penyediaan PSU permukiman
			9	Peningkatan aksessibilitas masyarakat yang nyaman dan aman
3	Mewujudkan Pembangunan	13,30	10	Peningkatan pemberdayaan dan

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
	Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan			peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)
a	Persentase Desa Mandiri (%)	23,91	11	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
			12	Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air limbah
			13	Peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian
			14	Peningkatan Produksi perikanan tangkap
			15	Peningkatan produksi perikanan budidaya
			16	Peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
			17	Peningkatan daya saing UMKM
4	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
a	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%)	57,70	18	Peningkatan Pembinaan dan pengawasan koperasi
b	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%)	44,58	19	Peningkatan kualitas SDM perkoperasian
			20	Peningkatan produktifitas koperasi
5	Meningkatnya Usaha Inovatif dan Berkelanjutan di Tingkat Desa/Kelurahan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih			
a	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (%)	30		

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Tabel 4.13
Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			
1	Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsiona		1	Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi
			2	Membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu
			3	Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
			4	Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki
			5	Penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik
a	Indeks Pembangunan Hukum	0,70	2	Mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian terkait

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi
			7	Meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan
			8	Menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
			9	Memperkuat program edukasi anti korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti korupsi di sektor swasta dan publik
			10	Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman
			11	Meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri
			12	Mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa
			13	Penguatan budaya hukum
			14	Penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum
b	Indeks Persepsi Korupsi	40	3	Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum
c	Indeks Integritas Partai Politik	65,00-66,99	4	Transpormasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal
2	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani			
a	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	72,8	6	Membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum
			16	Memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi targeted talent untuk mau bergabung
			17	Mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital
			18	Memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara
			19	Memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara
			20	Memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta
			21	Memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional
			22	Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah
			23	Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional
			24	Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui (a) penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, (b) peningkatan kapasitas dan tata

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, (c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta (d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)
			25	Penguatan manajemen kinerja pembangunan
			26	Menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien
			27	Digitalisasi pelayanan publik
			28	Pengembangan talenta digital pelayanan publik
			29	Penguatan ekosistem digital pelayanan publik
			30	Perluasan akses pelayanan publik. Di samping itu, tata kelola pemerintahan juga mencakup reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui (1) optimalisasi pendapatan negara, (2) optimalisasi belanja negara, dan (3) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan (pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang yang kredibel).
			31	Tata kelola pemerintahan juga mencakup upaya peningkatan harmonisasi kebijakan moneter

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				fiskal, sektor keuangan dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia
b	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	94	7	Transpormasi tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
3	Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba			
a	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)	1,70	32	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah
			33	Memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba
			34	Meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa
			35	Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba
			36	Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba
			37	Meningkatkan kemampuan surveillance dan intelijen pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
4	Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan			
a	Return on Asset (RoA) BUMN	3,26	38	Menutup semua akses ke situs perjudian online
5	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan		39	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
	Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan			
a	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	12,17-13,35	40	Meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak
b	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,46-11,40	41	Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia
6	Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		42	Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal
a	Tingkat Inflasi (persen)	2,5 ± 1,0	16	Pengendalian Inflasi

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Tabel 4.14

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			
1	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju			
a	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	66,15	1	Mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antar umat beragama serta sesama anak bangsa
b	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99	2	Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
c	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,14	3	Mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini
			4	Mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun non formal
			5	Menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya
			6	Menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
			7	Memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan
			8	Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan
			9	Memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal
			10	Meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman
			11	Merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
			12	Meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan
			13	Mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif
d	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99	14	Meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan
			15	Menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital
			16	Membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia
			17	Merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda
			18	Membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia
			19	Memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya
			20	Mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				komunitas seni budaya di seluruh Indonesia
			21	Melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia
			22	Membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara
			23	Memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya; (k) menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia
			24	Mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia; (m) mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas
			25	Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				pendapat, dan berkreasi di muka umum
			26	Memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila
			27	Mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan
			28	Memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat
			29	Mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia
			30	Mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah
			31	Melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan
2	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
a	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,135	32	Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana
			33	Memperkuat sistem deteksi bencana (early warning system) dengan penerapan teknologi terkini
			34	Meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut
			35	Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana
			36	Menata koordinasi antar lembaga

No	Sasaran/Indikator	Target 2027		Arah Kebijakan
				terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana
			37	Mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana
			38	Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana
			39	Pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana
			40	Mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana
			41	Mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim
			42	Meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Arah kebijakan pembangunan tahun 2027 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 yang difokuskan kepada penguatan sektor strategis dalam peningkatan ekonomi daerah, selain itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 juga disusun mempertimbangkan ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

Arah kebijakan serta sasaran pembangunan daerah tahun 2027 akan difokuskan pada pencapaian Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 yakni "*Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan*", yakni :

1. Transformasi sektor strategis difokuskan pada 3 sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta Sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata, yang ditandai denan indikator kinerja yakni :
   a. Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan target sebesar Rp.86.365.206.
   b. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, dengan target sebesar 7,98-7,92%.
   c. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, dengan target sebanyak 1,46%.
   d. Persentase Konstribusi Pariwisata pada PDRB, dengan target sebesar 2,65%.
   e. Persentase Konstribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB, dengan target sebesar 1,09%.
   f. Rasio kewirausahaan Provinsi, dengan target sebesar 4,17%.
   g. Rasio Pajak Daerah PDRB, dengan target sebesar 2,172%.
2. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada:
   a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :
      - Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan target sebesar 6,9%.
      - PDRB ADHB Per Kapita, dengan target sebesar Rp.69,6-77,3 juta.
      - Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 5,-5,66%.
   b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :
      - Rasio Gini, dengan target sebesar 0,275 - 0,279.
      - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dengan target 60,02-61,87%.
      - Tingkat Kemiskinan, dengan target sebesar 4,64%.

- Pengeluaran Riil Perkapita, dengan target sebesar Rp.12.074 ribu.

c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia, yang di tandai dengan indikator kinerja yakni:
   - Indeks Pembangunan Manusia, dengan target sebesar 78,04.
   - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, dengan target sebesar 47,12%.
   - Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman, dengan target sebesar 12,50%.
   - Prevalensi Stunting, dengan target sebesar 47,12%.
   - Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan, dengan target sebesar 98,88%.

Prioritas pembangunan pada tahun 2027 merupakan prioritas yang sama pada tahun 2025-2029, hal ini agar terjadinya konsistensi pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya serta menjaga agar arah pembangunan RPJMD tetap terjaga, sehingga hasil akhir di tahun 2029 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

1. Prioritas Pembangunan 1: Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas.

   Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Kualitas Pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreativitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi. Selain pendidikan berkualitas, pada Prioritas ini juga ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/ pikiran/ ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna,sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka

harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 4.15

Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2027

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	
		Satuan	Volume
Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,04
	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,61
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,58
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	13,72
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,69
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,82
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 KH	98
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	18,00

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

2. Prioritas Pembangunan 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Wilayah ini dikenal dengan produk pertanian unggulan seperti beras, jagung, hortikultura, kopi, gambir, ternak sapi,

hingga perikanan air tawar yang menyebar di berbagai nagari. Selain menjadi penggerak utama ekonomi rakyat, sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjadi fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan. Namun demikian, kontribusi sektor-sektor primer tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat masih belum optimal. Masih tingginya ketergantungan petani pada sistem tradisional, rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian, belum kuatnya sistem rantai pasok dan logistik pangan, serta minimnya industrialisasi produk pertanian menyebabkan nilai tambah produk daerah belum maksimal. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali dan belum terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan telah menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan mengancam ketahanan ekosistem jangka panjang. Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.16

Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2027

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	
		Satuan	Volume
Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,90
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,44
Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan Cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	5,99
	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan	Rupiah	86.365.206
Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	29,68
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	70,33

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	
		Satuan	Volume
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	57,10

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional berbasis kawasan, yang produktif dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian akan dilakukan secara transformasional, dengan penguatan teknologi, inovasi, hilirisasi produk, dan keterhubungan ke pasar, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekonomi daerah yang tumbuh stabil, berkeadilan, dan mampu mengangkat kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, serta masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam.

3. Prioritas Pembangunan 3: Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan.

Sumatera Barat memiliki struktur sosial dan kultural yang unik melalui keberadaan nagari sebagai entitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berakar kuat dalam adat dan tradisi. Nagari tidak hanya menjadi satuan administratif terkecil, tetapi juga pusat kehidupan sosial, budaya, ekonomi, serta pendidikan informal masyarakat Minangkabau. Dalam konteks pembangunan daerah, nagari/desa memiliki posisi strategis sebagai basis produksi, penyedia sumber daya, dan pelestari nilai-nilai lokal yang mendukung pembangunan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik. Namun, kenyataannya, banyak nagari/desa masih menghadapi tantangan serius seperti rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar, minimnya produktivitas ekonomi lokal, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa memperlebar jurang sosialekonomi yang berdampak pada migrasi penduduk usia produktif ke kota, melemahkan kekuatan produksi di perdesaan. Oleh karena itu, pembangunan nagari/desa tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif atau sektoral, tetapi harus bersifat integratif, partisipatif, dan berbasis pada potensi lokal. Nagari/desa harus difasilitasi menjadi “basis kemajuan”, yakni sebagai wilayah yang mandiri secara ekonomi, kuat dalam kelembagaan, berdaya saing melalui pengelolaan potensi lokal, serta berdaya dalam membangun

warganya. Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.17

Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Nagari/Desa

Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2027

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	
		Satuan	Volume
Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan	Tingkat Pengangguran Tebuka	Persen	5,23
	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	Persen	39,54
	Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten	Persen	6,87
	Indeks Desa	Indeks	8,97
Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio Volume Usaha operasi terhadap PDRB	Persen	1,33
	Tingkat Pengangguran Perdesaan	Persen	4,42
	Tingkat Kemiskinan Perdesaan	Persen	5,49
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/ nagari/ kelurahan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	68,59
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	12,50
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	47,12
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	47,50
	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	28,59

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Prioritas pembangunan ini bertujuan menciptakan hubungan sinergis antara kota dan desa/nagari/kota sebagai pusat pertumbuhan yang berorientasi pada jasa, perdagangan, dan teknologi, sedangkan nagari sebagai basis produksi pangan, budaya, dan inovasi lokal. Pembangunan desa tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap pembangunan kota, tetapi sebagai kekuatan utama yang menopang ekonomi daerah secara merata dan berkelanjutan sehingga Pembangunan nagari/desa bukan semata-mata tentang mengejar status administratif "desa maju" atau "desa mandiri", tetapi bagaimana menjadikan desa sebagai
pusat kehidupan masyarakat yang sejahtera, berdaya, produktif, dan lestari. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa kebangkitan desa adalah syarat utama untuk menciptakan Sumatera Barat yang berkeadilan dan berkemajuan, di mana kekuatan adat, budaya, dan potensi lokal dipadukan dengan inovasi dan teknologi modern untuk membangun masa depan.

4. Prioritas Pembangunan 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat.

   Sumatera Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu provinsi yang terletak di jalur pesisir barat Pulau Sumatera, dengan akses langsung ke Samudra Hindia. Wilayah ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam, budaya yang khas, dan infrastruktur yang mulai terbangun seperti pelabuhan, jalan nasional, dan kawasan industri. Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir masih tertumpu pada sektor konsumsi dan pertanian, sementara kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan masih tergolong rendah. Terbatasnya kawasan industri yang terintegrasi, rendahnya investasi swasta, minimnya inovasi industri berbasis teknologi, serta keterbatasan akses UMKM ke pasar ekspor dan digital menjadi tantangan utama dalam membangun ekonomi daerah yang kuat. Dengan menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat, diharapkan peran daerah ini dalam rantai pasok nasional dan regional semakin menguat, sehingga membuka peluang kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

   Pembangunan ekonomi yang kuat dan tahan krisis hanya dapat dicapai jika Sumatera Barat mampu mengelola sumber daya lokalnya menjadi

kekuatan industri dan perdagangan yang terintegrasi dan berbasis inovasi. Transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai tambah lokal menjadi prioritas utama. Pemerintah provinsi akan memainkan peran sebagai regulator, fasilitator, sekaligus akselerator ekosistem perdagangan dan bisnis yang sehat, kompetitif, dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.18
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
MISI 4. SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT			
Tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	Indeks	3,72
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	30,52
	Tingkat Inflasi (%)	Persen	2,10 - 3,52
Sasaran 1 Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%PDRB)	Persen	7,98-7,92
	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	Persen	17,99
	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	Persen	0,99
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	Rp.	3.477.413
	Total Kredit/PDRB (%)	Persen	26.78
	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	kWh	769.71
	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	SBM/Rp Miliar	134.82
Sasaran 2 Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Persen	77,26
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	Persen	18,00
	Proporsi Penciptaan Lapangan	Persen	41,05

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2027	
	Kerja Formal (%)		
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persen	60,02-61,87
Sasaran 3 Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Inklusi Keuangan (%)	Persen	88.49
	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	Persen	2,72

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertenian, Kehutanan dan Perikanan, namun sektor perdagangan dan industri ke depan harus dikembangkan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehinga Sumatera Barat dapat keluar dari *middle income trap*.

Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pusat Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

5. Prioritas Pembangunan 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.

Pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dan berkeadilan memastikan bahwa semua wilayah, baik kota maupun nagari terpencil, memiliki akses terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan jaminan keselamatan dari ancaman bencana. Bagi Sumatera Barat, yang memiliki kontur geografis kompleks dan rawan terhadap berbagai bencana geologi (gempa bumi, tsunami, longsor) serta hidrometeorologi (banjir, kekeringan), pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang

“pembangunan fisik,” tetapi juga tentang daya tahan dan keberlanjutan. Masih banyak wilayah di Sumatera Barat yang belum terlayani secara optimal oleh infrastruktur dasar.

Jalan provinsi di beberapa daerah masih rusak atau belum terhubung dengan baik, ketersediaan air bersih belum merata, serta pengelolaan sanitasi dan persampahan belum efisien. Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan pariwisata dan industri kreatif belum diiringi oleh infrastruktur pendukung yang memadai, seperti jalan ke objek wisata, fasilitas umum, dan konektivitas digital. Rendahnya mitigasi risiko bencana juga memperparah kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan peristiwa ekstrem. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan diarahkan tidak hanya untuk membangun konektivitas fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan, ketangguhan terhadap bencana, efisiensi energi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Prinsip “*no one left behind*” menjadi landasan dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan adil.

Tabel 4.19

Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
MISI 5. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA			
Tujuan Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	Indeks	78.37
	Indeks Kinerja Infrastruktur (Indeks)	Indeks	47,27
Sasaran 1 Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	Indeks	138,71
	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (kumulatif)	Persen	19,76
	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (tahunan)	Persen	31,97
Sasaran 2	Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	m^3/detik	1.77

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2027	
Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	Indeks	70,83
Sasaran 3 Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ratio pajak daerah	Indeks	6,45
	Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	Rata-rata	2,75

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Pembangunan infrastruktur tidak lagi dipandang semata dari aspek konektivitas fisik, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial, ekonomi, dan ekologis. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen membangun infrastruktur yang berkeadilan, yang menjangkau daerah tertinggal, tangguh bencana, dengan sistem mitigasi dan peringatan dini, serta berkelanjutan, dengan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Dengan prioritas ini, infrastruktur menjadi fondasi menuju Sumatera Barat yang maju, aman, inklusif, dan berdaya saing global.

6. Prioritas Pembangunan 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas.

   Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekuatan identitas budaya dan religius yang sangat kuat. Nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang telah teruji menjaga harmoni sosial, tata kehidupan bermasyarakat, serta struktur keluarga yang tangguh dan inklusif. Nilai ini pula yang menjadi keunikan sekaligus kekuatan sosial dalam pembangunan daerah.

   Namun, dalam dua dekade terakhir, arus globalisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai di tengah masyarakat telah menghadirkan tantangan baru. Mulai dari lunturnya tradisi dan budaya lokal di generasi muda, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, hingga melemahnya fungsi keluarga dalam pendidikan karakter dan ketahanan sosial. Selain itu, eksklusivisme beragama, polarisasi sosial, serta meningkatnya intoleransi menjadi sinyal penting perlunya penguatan kembali pondasi nilai-nilai budaya dan keagamaan dalam sistem sosial

masyarakat. Oleh karena itu, prioritas pembangunan ini diarahkan untuk menghidupkan kembali kekuatan budaya, agama, dan kearifan lokal sebagai penyangga utama harmoni masyarakat, serta memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil pembangunan sosial. Sumatera Barat tidak hanya berupaya membangun fisik, tetapi juga karakter, spiritualitas, dan harmoni sosial warganya.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.20
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
MISI 6. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASISKAN AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS			
Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)	Indeks	81,10-81,97
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	73,62
Sasaran 1 Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	61.71 - 61.84
Sasaran 2 Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	71,73 - 72,02
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,339
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	Persen	74,66
Sasaran 3 Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Persen	71,25
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,58
	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang	Persen	94,60

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2027	
	diselesaikan		
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (Indeks)	Indeks	3,068

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Prioritas pembangunan ini untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

7. Prioritas Pembangunan 7: Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM.

   Sumatera Barat memiliki kekayaan destinasi wisata alam, budaya, sejarah, dan kuliner yang luar biasa. Keindahan beberapa destinasi wisata alam di Sumatera Barat seperti Danau Maninjau, kemegahan Lembah Harau, potensi wisata bahari Mandeh, hingga kekayaan tradisi dan seni Minangkabau menjadikan provinsi ini sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Selain itu, Sumatera Barat juga dikenal dengan kekuatan kulinernya, seperti rendang yang diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia, serta potensi ekonomi kreatif di bidang kriya, musik tradisional, dan fashion berbasis budaya. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

   Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas wisata, rendahnya kualitas pelayanan pariwisata, kurangnya promosi digital dan akses pasar, serta keterbatasan kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk naik kelas. Industri kreatif juga masih menghadapi hambatan dalam hal inkubasi bisnis, akses ke teknologi, dan pembiayaan. Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lima tahun ke depan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor ini akan diintegrasikan dengan pengembangan UMKM, pelestarian budaya lokal,

pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah provinsi akan menjadi katalisator dalam mendorong transformasi pariwisata dan industri kreatif sebagai pilar ekonomi baru Sumatera Barat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.21

Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM Tahun 2026

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
MISI 7. TINGKATKAN DAYA SAING PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK USAHA KECIL			
Tujuan : Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Rasio PDRD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PDRDB Akomodasi Makan Minum dan PDRB Jasa lainnya) (%)	Persen	2,65
Sasaran 1 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Persen	1,46
	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	RIbu orang	47,43
Sasaran 2 Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	Persen	1,09
	Rasio kewirausaahan Provinsi (%)	Persen	4,17

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Pariwisata dan ekonomi kreatif bukan hanya menjadi penggerak ekonomi baru, tetapi juga wahana pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah. Sumatera Barat dengan nilai-nilai budaya Minangkabau, keindahan alam, serta semangat kewirausahaan masyarakatnya memiliki semua syarat untuk menjadi destinasi unggulan nasional dan global. Dengan komitmen, kolaborasi, dan inovasi, Sumatera Barat siap menjadikan sektor ini sebagai motor pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan membanggakan.

8. Prioritas Pembangunan 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.

Pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan layanan publik yang responsif, reformasi tata kelola pemerintahan bukan lagi sekadar komitmen administratif, melainkan kebutuhan mendesak yang menjadi fondasi dari semua sektor pembangunan. Sumatera Barat memiliki tradisi pemerintahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal, yang menjunjung tinggi musyawarah, etika sosial, dan amanah dalam pengelolaan kepentingan bersama. Namun dalam praktiknya, tantangan seperti keterbatasan integrasi sistem birokrasi, masih adanya celah korupsi, lambatnya pelayanan publik, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, menjadi penghambat dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, responsif, dan terpercaya. Oleh karena itu, prioritas pembangunan ini diarahkan pada transformasi sistem pemerintahan menuju tata kelola yang digital, transparan, dan adaptif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, pelayanan yang cepat dan mudah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.22
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif Tahun 2027

TUJUAN/SASARAN PER MISI	INDIKATOR KINERJA	2027	
		Satuan	Target
MISI 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF			
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis	Indeks Integritas Nasional (Indeks)	Indeks	74,66

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2027	
digital			
Sasaran 1 Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	Indeks	4,01
	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	Indeks	2,00
	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Indeks	87,75
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Indeks	4,01
Sasaran 3 Meningktanya Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	2,172
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	Persen	1,175

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah, menjelaskan titik tekan pembangunan tahun berkenaan berdasarkan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Pembangunan ekonomi tahun 2027 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi, memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan yaitu “Peningkatan Produktivitas menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”, yaitu:

1. Peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi fokus utama dalam agenda transformasi ekonomi daerah, terutama dengan didorongnya konsep Ekonomi Biru *(**Blue Economy**)* dan Ekonomi Hijau *(**Green Economy**)* optimalisasi komoditas lokal.
    a. Pengalokasian 10% anggaran untuk sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
    b. Peningkatan dan pemberdayaan nelayan dan petani.
    c. Peningkatan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan.
    d. Pengembangan teknologi tepat guna bagi petani dan nelayan.
    e. Pengembangan jaringan pasar komoditas unggulan daerah.
    f. Pengembangan sektor primer berbasis kawasan dan Komoditas Unggulan.
    g. Pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi MHA dan UMA
    h. Pengembangan Kapasitas Koperasi (Koperasi Merah Putih

2. Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi.
    a. Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih. Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah (Kelapa, Pisang, Sagu, Ikan).
    b. Fasilitasi dan Kerjasama (Pasar, inklusi keuangan, Logistik)
    c. Penyediaan Bank Tanah.
    d. Penyediaan infrastruktur Investasi.
    e. Penetapan kawasan strategis investasi.
    f. Pengelolaan Logistik dan distribusi pangan yang Efektif dan Efisien. Diversifikasi pangan.
    g. Penyediaan cadangan pangan.
    h. Revitalisasi Pasar.
    i. Pengembangan sistem informasi.
    j. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas UMKM/ Pembangunan PLUT Pengembangan BUMD dan Pembinaan BUMDes.
    k. Penguatan industri halal dan UMKM halal.
3. Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas.
    a. Pelatihan keahlian/kewirausahaan yang inklusif
    b. Kerjasama, link & matchn tenaga kerja dengan pasar.
    c. Fasilitasi Sekolah Vokasi/ Keahlian.
    d. Insentif Investasi untuk tenaga kerja lokal.
    e. Pemberdayaan kelompok rentan.
    f. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Inklusif.
    g. Jaminan Ketenagakerjaan dan Pengupahan yang layak.
    h. Kolaborasi dan Kemitraan.

Tema pembangunan daerah ini diwujudkan dalam 6 prioritas dan Sasaran Prioritas pembangunan daerah yang berdasarkan yang dirumuskan sebagai bagian dari arah kebijakan pada RPJMD Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Penguatan ekonomi Mentawai dibangun di atas empat pilar yang saling mendukung — pengelolaan lima sektor unggulan (pertanian hingga pariwisata) sebagai basis produktivitas, hilirisasi dan nilai tambah sebagai jalan keluar dari ketergantungan sektor primer, ekonomi biru berbasis pariwisata bahari yang inklusif bagi masyarakat pesisir, serta pembenahan tata kelola fiskal agar potensi ekonomi benar-benar terkonversi menjadi pendapatan daerah yang mandiri. Adapun sasaran

pada prioritas Pembangunan daerah dalam mendukung program strategis nasional yaitu

Tabel 4.23
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Ekonomi Tahun 2027

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		
1	Pendapatan Per Kapita ADHB	93,56
2	Pendapatan Per Kapita ADHK	42,2
3	Pertumbuhan Ekonomi	6,63
4	Rasio Gini	0,263
5	Indeks Daya Saing Daerah	3,5
6	Indeks Zakat Nasional (IZN)	0,43
7	Pengeluaran Per Kapita	7.526
8	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	46,92
9	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	202,59
10	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	2,14
11	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0,386
Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/Hilirisasi		
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	1,19
2	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	20,51
3	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	85,13
4	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	8,3
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	31,55
6	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	50,08
7	Total Kredit/PDRB	10,16
8	Proporsi PDRB Jasa Keuangan	0,1185
9	Total dana Pihak Ketiga/ PDRB	8,45
10	Aset dana Pensiun/PDRB	9,88
11	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	1.566.476
12	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	0.33
Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,18
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	80,62-82,47
3	Rasio Kewirausahaan	2,26

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027
4	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	22,38
5	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	85,25

Ket: Target pada RPJMD Tahun 2025-2029

a. Meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, peternakan, perikanan.
b. Peningkatan ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
c. Peningkatan mutu dankeamanan pangan serta pengelolaan dan
d. keseimbangan cadangan pangan.
e. Pelaksanaan pencapaiantarget konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
f. Perlindungan terhadap LP2B yang didukung dengan sistem pengelolaan teknologi pertanian yang berkelanjutan. Pengembangan komoditas unggulan berbasis kawasan sehingga memungkinkan dari sisi skala ekonominya.
g. Pengembangan pertanian, peternakan, perikanan modern dan profesional.
h. Hilirisasi komoditas unggulan daerah (kepala, pisang, sagu, ikan).
i. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat lokal, UMA dan masyarakat adat.

Pencapaian sasaran Prioritas Penguatan Ekonomi dilaksanakan dengan program prioritas seperti pada berikut ini.

Tabel 4.24
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Ekonomi Tahun 2027

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Pendapatan Masyarakat			
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	283.994.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.262.734.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	9.469.164.914,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.400.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	200.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
6	Program Pengembangan UMKM	3.500.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.085.068.000	Dinas Pariwisata
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan	350000000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	700.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
TOTAL		37.250.960.914,00	

Prioritas Pembangunan Ekonomi Jalan tahun 2027 dalam pelaksanaannya didukung 9 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 37.250.960.914,00 dalam mendukung program strategis nasional yaitu “swasembada pangan”.

2. Investasi dan stabilisasi ekonomi di Mentawai adalah dua sisi mata uang yang sama, investasi mendorong pemasukan modal dan lapangan kerja, sementara stabilisasi (pembenahan fiskal, penertiban perizinan, kelembagaan keuangan lokal) memastikan hasil investasi itu benar-benar terkonversi menjadi kemandirian fiskal daerah, bukan sekadar

pertumbuhan semu di tengah keterbatasan kapasitas anggaran. Intervensi kebijakan pemerintah kabupaten kepulauan Mentawai dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih dan Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah (Kelapa, Pisang, Sagu, Ikan) dalam mendukung program strategis nasional.

. Tabel 4.25
Program Prioritas mendukung Prioritas Investasi dan Stabilisasi Ekonomi Tahun 2027

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Investasi dan Stabilisasi Ekonomi			
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	358.469.981	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	350.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	99.977.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	615.185.838	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.215.209.540	Dinas PUPR
TOTAL		2.638.842.359	

Prioritas ini dilakukan melalui dukungan peningkatan investasi mendorong pemasukan modal dan lapangan kerja, sementara stabilisasi (pembenahan fiskal, penertiban perizinan, kelembagaan keuangan lokal) memastikan hasil investasi itu benar-benar terkonversi menjadi kemandirian fiskal daerah Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Kesempatan Kerja yang inklusif dan berkualitas pada Tahun 2027 dalam mendukung program strategis nasional difokuskan pada:

Tabel 4.26
Program Prioritas mendukung Prioritas Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkelanjutan Tahun 2027

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas			
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1.219.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	714.615.700	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Program Hubungan Industrial	50.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.113.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL		767.947.700	

Pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi anak-anak Mentawai untuk meningkatkan keahlian melalui pendidikan vokasi, perguruan tinggi, dan pendidikan kedinasan, sebagai bagian dari strategi lima tahun ke depan yang berfokus pada SDM unggul dan ekonomi berbasis lokal. Pendekatan "inklusif" berarti pelatihan ini perlu menjangkau kelompok yang selama ini tertinggal — perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di pulau-pulau terpencil (Siberut, Pagai Utara/Selatan), bukan hanya terpusat di Sipora sebagai ibu kota kabupaten.

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah, menjelaskan titik tekan pembangunan tahun berkenaan berdasarkan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Pembangunan ekonomi tahun 2027 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi, memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan yaitu “Penguatan Sumber Daya Ekonomi Untuk Peningkatan Produktivitas menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”, yaitu:

1. Peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi fokus utama dalam agenda transformasi ekonomi daerah,

terutama dengan didorongnya konsep Ekonomi Biru *(**Blue Economy**)* dan Ekonomi Hijau *(**Green Economy**)* optimalisasi komoditas lokal.

i. Pengalokasian 10% anggaran untuk sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
j. Peningkatan dan pemberdayaan nelayan dan petani.
k. Peningkatan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan.
l. Pengembangan teknologi tepat guna bagi petani dan nelayan.
m. Pengembangan jaringan pasar komoditas unggulan daerah.
n. Pengembangan sektor primer berbasis kawasan dan Komoditas Unggulan.
o. Pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi MHA dan UMA
p. Pengembangan Kapasitas Koperasi (Koperasi Merah Putih

2. Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi.
    a. Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih. Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah (Kelapa, Pisang, Sagu, Ikan).
    b. Fasilitasi dan Kerjasama (Pasar, inklusi keuangan, Logistik)
    c. Penyediaan Bank Tanah.
    d. Penyediaan infrastruktur Investasi.
    e. Penetapan kawasan strategis investasi.
    f. Pengelolaan Logistik dan distribusi pangan yang Efektif dan Efisien. Diversifikasi pangan.
    g. Penyediaan cadangan pangan.
    h. Revitalisasi Pasar.
    i. Pengembangan sistem informasi.
    j. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas UMKM/ Pembangunan PLUT Pengembangan BUMD dan Pembinaan BUMDes.
    k. Penguatan industri halal dan UMKM halal.
3. Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas.
    a. Pelatihan keahlian/kewirausahaan yang inklusif
    b. Kerjasama, link & matchn tenaga kerja dengan pasar.
    c. Fasilitasi Sekolah Vokasi/ Keahlian.
    d. Insentif Investasi untuk tenaga kerja lokal.
    e. Pemberdayaan kelompok rentan.
    f. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Inklusif.

g. Jaminan Ketenagakerjaan dan Pengupahan yang layak.

h. Kolaborasi dan Kemitraan.

Tema pembangunan daerah ini diwujudkan dalam 6 prioritas dan Sasaran Prioritas pembangunan daerah yang berdasarkan yang dirumuskan sebagai bagian dari arah kebijakan mendukung visi misi Kepala Daerah terkait pelayanan dasar yaitu

1. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan Infrastruktur Jalan, yaitu membangun jalan yang menghubungkan dusun ke dusun, dusun dengan desa, desa dengan kecamatan sehingga pergerakan orang dan barang lancar dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat tidak terganggu.

Tabel 4.27
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2027

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027
Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan		
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	58
2	Indeks masyarakat digital indonesia	57,08
3	Konsumsi listrik per kapita (kwh/kapita)	342
4	Persentase kawasan /wilayah pertumbuhan yang terhubung	65
Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif		
1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,014
2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (%)ds	11
Meningkatnya Desa Mandiri		
1	Persentase Desa Mandiri (%)	6,25
Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan		
1	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	50,25
2	RT dengan Akses Sanitasi Layak	78,02
3	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	24,79
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	11
Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan		
1	Indeks tutupan lahan (Indeks)	95,3
2	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	24,79
3	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	47,11

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027
4	RT dengan Akses Sanitasi Aman (%)	5,11
Menurunnya risiko terhadap dampak bencana		
1	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	188,1-186,83

Sumber: RPJMD Tahun 2025 – 2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan infrastruktur jalan difokuskan pada:

1. Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Pembangunan jalan Trans Mentawai.
3. Membuka akses jalan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sosial, budaya, sistem jaringan dan simpul transportasi serta pusat pemerintahan.
4. Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*.
5. Pembangunan sistem layanan irigasi.
6. Penyediaan air baku.
7. Pengendalian abrasi sungai dan pantai.
8. Penanaman kembali lahan krisis pesisir pantai.
9. Revisi RTRW kabupaten.
10. Penyusunan regulasi rencana rinci tata ruang.
11. Penyediaan sistem informasi tata ruang.
12. Pengembangan kawasan strategis daerah
13. Penguatan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
14. Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
15. Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.
16. Pengembangan SPBE (e-goverment).
17. Pembukaan jalan untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
18. Pengembangan kawasan permukiman.
19. Pembangunan SPAM di desa prioritas (Muara Siberut, Sioban, Tuapejat).
20. Fasilitasi pembangunan SPAM (Sikabaluan).
21. Percepatan penyediaan kases air bersih untuk masyarakat perdesaan.
22. Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
23. Pembangunan TPST Tuapejat.

24. Pembangunan TPS Kecamatan
25. Pengadaan sarana dan prasana persampahan.
26. Pengelolaan persampahan.
27. Pembangunan PSU di kawasan permukiman.

Pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan dengan program prioritas seperti pada berikut ini.

Tabel 4.28
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun 2027

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Pembangunan Infrastruktur Jalan			
1	Program Penyelenggaraan Jalan	55.237.659.166	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	14.712.267.402	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Penataan Bangunan Gedung	12.964.372.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.400.000.000	Dinas Perhubungan
5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.651.386.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.266.479.732	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	337.344.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.590.339.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.677.861.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL		115.837.709.000	

Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 9 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.115.837.709.000.

2. Pemerataan Jaringan Listrik

Pemerataan jaringan listrik untuk semua wilayah, yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan pihak terkait seperti BUMN (PT. PLN), Kementerian ESDM dan pihak-pihak lainnya. Selain itu, juga kita dapat memberikan bantuan pemasangan listrik bagi masyarakat yang tidak mampu serta memberikan dukungan pada penyediaan akses jalan untuk pengembangan dan perluasan transmisi listrik pada daerah-daerah yang masih belum dapat dijangkau PLN

Tabel 4.29
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pemerataan Jaringan Listrik Tahun 2027

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027
Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan		
1	Konsumsi listrik per kapita (kwh/kapita)	342
2	Persentase kawasan /wilayah pertumbuhan yang terhubung	65

Sumber: RPJMD Tahun 2025 – 2029

Prioritas ini dilakukan melalui dukungan peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai melalui fasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan PLN. Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi daerah.

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pemerataan Jaringan Listrik pada Tahun 2027 difokuskan pada:

a. Pembukaan jalan dalam rangka membuka akses untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
b. Penyediaan listrik bagi kawasan permukiman melalui fasilitasi listrik bagi keluarga miskin baik pendanaan APBD Provinsi ataupun melalui kementerian/Lembaga dan swasta.

Tabel 4.30
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pemerataan Jaringan Listrik Tahun 2027

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pemerataan Jaringan Listrik			
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.069.078.400	Sekretariat Daerah
2	Program Penyelenggaraan Jalan	55.237.659.166	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL		56.306.737.566	

Program prioritas mendukung prioritas pembangunan Pemerataan Jaringan Listrik Tahun 2027 dalam pelaksanaannya didukung 2 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.56.306.737.566.

3. Penyediaan Internet

Penyediaan jaringan Internet, yaitu dengan menyediakan fasilitas internet untuk mendukung layanan dasar dan layanan publik yang kita alokasikan melalui APBD. Seiring dengan itu, tetap dilakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dan berkualitas agar beberapa *blank spot* dapat diatasi serta peningkatan kualitas sinyal dan data pada daerah yang telah terbangun.

Prioritas penyediaan listrik di Kepulauan Mentawai difokuskan pada optimalisasi pelayanan dasar dan pelayanan publik yang responsif, begitu juga untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, serta dalam mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga terwujud pelayanan pemerintahan yang prima dan handal.

Tabel 4.31
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Penyediaan Internet Tahun 2027

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027
Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan		
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	57,08
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,58

Sumber: RPJMD Tahun 2025 – 2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Penyediaan Internet pada Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Pengadaan layanan internet (*starlink*) pada seluruh satuan pendidikan (TK, SD, SMP).
2. Pengadaan layanan internet (*starlink*) pada pemerintahan desa.
3. Pengadaan layanan internet (*starlink*) pada pusat layanan pemerintahan (kantor cabang/korwil, kecamatan, UPTD).
4. Penyediaan *wifi* gratis pada *spot* tertentu bagi masyarakat untuk menggali potensi, dan memberi ruang untuk berkreasi dan menjadi ruang imbal balik kepada pemerintah daerah.

Tabel 4.32
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Penyediaan Internet Tahun 2027

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Penyediaan Internet			
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.651.386.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	473.523.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Program Pengelolaan Pendidikan	64.825.317.750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TOTAL		67.950.226.750	

Program prioritas mendukung prioritas pembangunan Penyediaan Internet Tahun 2027 dalam pelaksanaannya didukung 3 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.67.950.226.750.

4. Pembangunan Air Bersih

Pembangunan Air Bersih, yaitu optimalisasi SPAM yang sudah ada sehingga berfungsi dan dapat melayani kebutuhan air masyarakat, meningkatkan kualitas air. Untuk wilayah yang belum dapat di jangkau oleh SPAM, dapat melalui penyediaan air bersih berbasis masyarakat sehingga perlu tata kelola air bersih kepada masyarakat serta program penyediaan air bersih non perpipaan juga menjadi solusi jangka pendek.

Tabel 4.33
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Air Bersih Tahun 2027

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027
Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif		
1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,014
2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (%)ds	11

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan air bersih di Kabupaten Kepulauan Mentawai fokus pada penyediaan air bersih pada 10 SPAM yang ada, selain tersedia juga dipastikan air yang mengalir berkualitas (layak dan aman) untuk dikonsumsi masyarakat. Selain itu, juga menyediakan pembangunan air bersih berbasis masyarakat untuk membuka akses air bersih kepada masyarakat yang belum terlayani melalui sistem penyediaan air minum daerah yaitu dengan

pembangunan Pamsimas dengan memastikan tata kelola dan keberlanjutan pengelolaannya oleh pemerintahan desa. Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Air Bersih pada Tahun 2027 difokuskan pada:

1. Pengelolaan air bersih melalui badan profesional oleh UPTD.
2. Optimalisasi SPAM yang ada dan memastikan ketersediaan dan kualitas air yang disalurkan.
3. Penyediaan air bersih berbasis masyarakat (Pamsimas) untuk wilayah yang belum dijangkau oleh SPAM.
4. Penyediaan air bersih non perpipaan untuk daerah yang mengalami kesulitan akses air bersih.

Tabel 4.34
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Air Bersih Tahun 2027

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Air Bersih			
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.266.479.732	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	20.576.090.634	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL		33.091.423.366	

Program prioritas mendukung prioritas Pembangunan Air Bersih Tahun 2007 dalam pelaksanaannya didukung 2 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.33.091.423.366.

5. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pada dimensi pendidikan, pembangunan harus memastikan bahwa akses layanan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, tanpa memperhatikan gender dan memperhatikan masyarakat yang memerlukan perhatian khusus (penyandang disabilitas), dan berpihak pada masyarakat rentan/miskin/miskin ekstrem. Penyediaan sarana dan prasarana utama pendidikan yang menjadi tantangan karena Kepulauan Mentawai yang luas, begitu juga dengan karakteristik wilayah dan permukiman masyarakat yang tersebar di mana akses transportasi darat belum ada dan layanan pendidikan terdekat belum tersedia sehingga masyarakat harus berpikir untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan baik SD,

SMP maupun SMA. Begitu juga dengan dalam hal pemerataan penguasaan bidang sains dasar, bahasa dan matematika. Ini membawa akibat pada keberlanjutan pendidikan yang terhambat pada masalah mutu. Kemampuan literasi dan numerasi yang masih rendah sehingga memerlukan strategi khusus untuk mengatasinya. Di sisi lain, dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing sedangkan masyarakat Mentawai didominasi dengan mata pencarian di sektor primer akan sulit untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S1 ataupun diploma (vakasi) sehingga butuh intervensi yang terukur pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia.

Pada dimensi kesehatan, akses layanan kesehatan, alat kesehatan dan ketersediaan tenaga medis masih menjadi perhatian kedepan. Sistem kesehatan daerah dengan konsep kepulauan mengharuskan adanya rumah sakit rujukan yang berkualitas dan representatif di setiap pulau besar. Memastikan tenaga kesehatan dan alat kesehatan tersedia dan merata disetiap layanan kesehatan. Memastikan layanan rujukan tidak mengalami kendala/hambatan melalui pengadaan ambulans laut. Pengembangan RSUD ke tipe C, dan pembangunan puskesmas untuk daerah yang masih kesulitan akses kesehatan seperti pada lokasi Desa Sagulubbeg, Desa Sinaka dan Desa Silabu. Tantangan kedepan dalam pembangunan manusia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tingginya angka *stunting* daerah. Permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (*stunting*). *stunting* adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran Tinggi Badan menurut Umur seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusianya berdasarkan standar yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. Dalam jangka pendek, *stunting* menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme karena pengasuhan dan praktik pemberian makanan pendamping ASI yang belum lengkap, selain dari masalah rendahnya imunisasi lengkap dan sanitasi.

Dalam jangka panjang, *stunting* menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual dan akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Pembangunan manusia kedepan akan diperhadapkan pada

eksistensi dan pola hidup yang modern sehingga potensi kehilangan jati diri, budaya, nilai-nilai luhur, kearifan lokal akan sangat besar. Pembangunan kebudayaan sudah mulai sedini mungkin menjadi bagian pembangunan manusia baik di tingkat pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA bahkan di jenjang perguruan tinggi. Pembangunan kebudayaan ke depan akan menjadi bagian dari pembangunan manusia dengan elaborasi kebijakan yang inklusif yang non-diskriminatif, ramah pada penyandang disabilitas, tidak membeda-bedakan (gender) berdasarkan partisipasi masyarakat lokal dan unsur-unsur nilai kebudayaan.

Pembangunan harus menjadikan manusia sebagai subjek yang produktif. Menciptakan wirausaha (*enterprenuer*) bukan sekedar melakukan pelatihan atau memberikan sarana dan prasarana latihan, namun hal yang lebih bernilai adalah eksistensi, konsistensi dan kontiniunitas wirausaha atau pelaku usaha dalam mengembangkan potensinya. Pendampingan calon pelaku usaha/ wirausaha di Kepulauan Mentawai harus dilakukan, stigma terhadap memulai usaha harus memliki modal dana yang besar menjadi alasan utama masyarakat sulit untuk mengembangkan diri. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi tantangan dan peluang dalam memulai dan mengembangkan peluang usaha sehingga diperlukan inovasi pendampingan calon wirausaha mulai dari hulu peningkatan kapasitas/ pelatihan, bisnis proses, hingga dihilirnya yaitu pangsa pasar yang tersedia menjadi proses yang satu kesatuan dalam pendampingan ke depan.

Tabel 4.35
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2027

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027
Meningkatnya Mutu Pendidikan		
1	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	L = 44,34 N=18,62
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,48
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,93
4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (persen)	5,24
Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat		
1	Usia Harapan Hidup	71,5
2	Angka Kematian Ibu	208
3	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	29,4
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment*	68

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027
	coverage)	
5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	84
Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif		
1	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	98,5
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,89
3	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	45,51
4	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	17,21

Sumber: RPJMD Tahun 2025 – 2029

Prioritas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Mentawai fokus penguatan layanan pendidikan dan kesehatan disertai dengan peningkatan produktivitas masyarakat khususnya masyarakat miskin. Adapun arah kebijakan pada prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2027 difokuskan pada:

1. Penyediaan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
2. Beasiswa pendidikan berprestasi.
3. Pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
4. Pemberdayaan masyarakat miskin.
5. Perlindungan sosial secara menyeluruh bagi masyarakat miskin.
6. Akses layanan publik gratis bagi masyarakat miskin

Tabel 4.36
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2027

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Sumber Daya Manusia			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	64.825.317.750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	73.301.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	40.868.722.883	Dinas Kesehatan/ RSUD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.719.440.000	Dinas Kesehatan
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	139.349.800	Dinas Kesehatan
6	Program Pemberdayaan Sosial	260.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
			Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Program Rehabilitasi Sosial	600.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	130.422.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	500.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TOTAL		114.116.553.433	

Program prioritas mendukung prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2027 dalam pelaksanaannya didukung 9 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.114.116.553.433.

6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita

Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya produktivitas di setiap sektor ekonomi masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata.

Reformasi struktur ekonomi daerah dari yang bertumpu pada sektor primer (*raw material*) ke sektor perdagangan/jasa atau pada sektor industri. Kepulauan Mentawai dengan potensi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang besar dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi (tren pertumbuhan ekonomi stagnan) sehingga permasalahan pembangunan seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan dapat diatasi. Hilirisasi penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan BUMD/BUMDes dan koperasi yang siap sebagai pelopor pembangunan ekonomi di daerah dan di desa, ini yang harus diseriusi dan dipastikan bertumbuh. BUMD fokus pada skala lebih besar dan BUMDes pada skala desa, keduanya mendorong

peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan pemanfaatan potensi lokal. Begitu juga dengan koperasi yang memiliki peran penting dalam kemajuan daerah dan desa, yaitu dengan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan, pelatihan, dan pendampingan, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum.

Sebagai destinasi pariwisata yang telah dikenal hingga mancanegara, tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan segala sumber daya baik itu amenitas, aksesiblitas, atraksi, sumber daya manusia, dan menjaga kelestarian kawasan destinasi. Menjadi bagian dari destinasi prioritas yang telah ditetapkan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berbenah dalam mempersiapkan destinasi kawasan pariwisata dengan menjalin kerjasama/ kolaborasi di setiap sektor baik di internal pemerintah daerah maupun di luar pemerintah daerah, pihak swasta, pelaku ekonomi kreatif, investor. Selain itu pendampingan kawasan desa wisata yang bagian terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata prioritas daerah menjadi hal penting dilakukan agar citra dan *length of stay* semakin baik, begitu juga dengan pengalaman/*experience* lebih bermakna.

Tabel 4.37
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2027

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		
	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	46,92
	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	202,59
	Proporsi jumlah UKM non pertanian	0,33
	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0,212
Meningkatnya Investasi, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi		
	ROA BUMD	0,41
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	1,19
	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	1,01
	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	20,51
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	1,011
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,19
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	
	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	31,55

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2027
	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	50,08
	Total Kredit/PDRB	10,16
	Proporsi PDRB Jasa Keuangan	0,1185
	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	8,45
	Aset Dana Pensiun/PDRB	9,88
	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	1.566.476
Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.18
`	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	80,62-82,47
	Rasio Kewirausahaan	2,26
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	85.25
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah		
	Persentase retribusi terhadap PAD	6,75
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,19
Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat		
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	1,011

Sumber: RPJMD Tahun 2025 – 2029

Prioritas pembangunan Peningkatan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Kepulauan Mentawai fokus transformasi ekonomi dalam rangka peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Adapun arah kebijakan pada prioritas Peningkatan Pendapatan Per Kapita pada Tahun 2026 difokuskan pada:

1. Investasi dalam Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Pengembangan Sektor Produktif.
3. Peningkatan Investasi dan Iklim Usaha
4. Penyediaan akses sarana dan prasarana pertanian.
5. Pengembangan Ekonomi Pedesaan
6. Akses Keuangan Inklusif

Tabel 4.38
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2027

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Peningkatan Pendapatan Per Kapita			
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.277.461.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.103.178.704	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan

NO	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.020.008.237	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan
4	Program Penyuluhan Pertanian	510.317.870	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan
5	Program Pengembangan UMKM	2.916.043.293	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.249.732.840	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	34.160.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan
TOTAL		13.394.636.900	

Program prioritas mendukung prioritas Peningkatan Pendapatan Per Kapita Tahun 2026 dalam pelaksanaannya didukung 8 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.13.394.636.900. Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengambil peran dan turut mendukung pencapaian 8 (delapan) Prioritas Nasional, sehingga terwujudnya keselarasan proritas Pembangunan baik tingkat nasional maupun di daerah. Adapun penyelarasan dan dukungan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.39
Dukungan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme.		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z.		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
				Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
				Pelaksanaan tugas Paskibraka
				Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
				Pembentukan Paskibraka
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota.
		Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Penyehatan media arus utama dan peningkatan kapasitas lembaga dan insan pers	Relasi Media

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Pelayanan Informasi Publik
				Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
				Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
				Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
		Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas.		
		Menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.		
		Penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan		
		Peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik	Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat.	Diseminasi Informasi
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelayanan Informasi Publik
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
				Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
		Pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri	Penyehatan media arus utama dan peningkatan kapasitas lembaga dan insan pers	Relasi Media
				Penyusunan Konten
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
				Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
				Diseminasi Informasi
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Pelayanan Informasi Publik
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan *stereotip* gender.		Relasi Media
				Penyusunan Konten
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
		Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku.	Transformasi pengarusutamaan HAM	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
		Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya.	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan bantuan hukum	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
				koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.		Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
				koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya.	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perlindungan dan pemulihan saksi dan korban	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi.
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Alat Bantu
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		Transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,	Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			
		Memperkuat komponen cadangan.	Penguatan kapabilitas pertahanan termasuk CBRNE, penyempurnaan doktrin, penguatan postur, dan penguatan operasi lintas medan	
		Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara.	Penguatan intelijen dan kontra intelijen	
		Memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.	Operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential force* dalam rangka meningkatkan Penguatan kapabilitas pertahanan termasuk CBRNE, penyempurnaan doktrin, penguatan postur, dan penguatan	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		operasi lintas medanefektivitas menjaga kedaulatan NKRI.		
		Meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar.	Pengawasan dan pemeliharaan keamanan laut di ALKI dan *choke point*	
		Memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.	Pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
		Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest.*	
		Menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan	1. Pengembangan pangan akuatik. 2. Pengembangan pangan hewani. 3. Pengembangan pangan nabati. 4. Penguatan cadangan pangan. 5. Penjaminan mutu dan keamanan pangan. 6. Peningkatan produktivitas hutan. 7. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. 8. Penguatan pengelolaan hutan lestari. 9. Pemulihan ekosistem	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			yang terdegradasi. *10.* Pemulihan luas lahan mangrove	
				Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.
				Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
				Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu)

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				daerah kabupaten/kota
				Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
				Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
				Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil.
				Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
				Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
				Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengolahan Hasil Perkebunan
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
		Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio	1. Pengembangan pangan nabati. 2. Peningkatan produktivitas hutan. 3. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. 4. Penguatan pengelolaan hutan lestari.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
		Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian.	1. Pengembangan pangan hewani. 2. Pengembangan pangan nabati. 3. Penguatan cadangan pangan. 4. Penjaminan mutu dan keamanan pangan.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Hortikultura
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
				Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
				Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
				Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian	1. Pengembangan pangan hewani. 2. Pengembangan pangan nabati.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya	3. Penguatan cadangan pangan. 4. Penjaminan mutu dan keamanan pangan.	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
				Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Pemantauan Stok Pangan
				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
				Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
				Penyusuna kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
				Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
		Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung	1. Peningkatan produktivitas hutan.	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		kemandirian dan ketahanan pangan nasional	2. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. 3. Penguatan pengelolaan hutan lestari. 4. Pemulihan ekosistem yang terdegradasi. 5. Pemulihan luas lahan mangrove	
				Pelaksanaan rehabilitasi
				Pelaksanaan Restorasi
				Pelaksanaan remediasi
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
		Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara *holding* pangan ID *Food* sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya	Penguatan satu data pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
				Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
				Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				kecil dan mikro
				Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		Menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk *start-up* untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan		Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kabupaten/Kota
		Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu	Pengembangan pangan nabati.	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
				Penyusunan *Action Plan* Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kot
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
		Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan	Pengembangan pangan akuatik.	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		transformasi akuakultur)		
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.
				Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
				Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
				Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
				Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
				Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
		Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal	Penguatan cadangan pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan	Penjaminan mutu dan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
				Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				tumbuhan
				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
				Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro
		Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Di antaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional	1. Peningkatan produktivitas hutan. 2. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. 3. Penguatan pengelolaan hutan lestari. 4. Pemulihan ekosistem yang terdegradasi. 5. Pemulihan luas lahan mangrove	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia,	Penguatan satu data pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan		
				Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
				Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
				Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
		Penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau	1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air. 2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan.	Pembangunan Bendungan
				Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
				Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
				Normalisasi/Restorasi Sungai
				Peningkatan Kanal Banjir
				Peningkatan Tanggul Sungai
				Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
				Pembangunan Unit Air Baku
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
				Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
				Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Peningkatan Bendung Irigasi
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Bendung Irigasi
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
		Peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi	1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air. 2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan.	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Peningkatan Bendung Irigasi
				Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
				Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Bendung Irigasi
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
				Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
		Pengelolaan risiko bencana daya rusak air	Pengelolaan risiko daya rusak air.	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
				Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
				Pembangunan Kanal Banjir
				Rehabilitasi Kanal Banjir
				Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
				Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
				Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
				Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
		Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir	Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Pembangunan Unit Air Baku
				Pembangunan Tanggul Sungai
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
				Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Rehabilitasi Unit Air Baku
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
		Revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas	1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur	Pembangunan Tanggul Sungai

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga	tampungan air. 2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan.	
				Pembangunan Kanal Banjir
				Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir
				Rehabilitasi Tanggul Sungai
				Rehabilitasi Kanal Banjir
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pembangunan Bendung Irigasi
		Penguatan industri halal, di antaranya dengan peningkatan halal *value chain*, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim	Penguatan industri halal	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
				Pameran Dagang Nasional
				Pameran Dagang Lokal
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
		Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional	Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
				Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pameran Dagang Nasional
		Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha	Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah (UMKM) halal	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		mikro kecil menengah halal		
				Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
		Penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah	Penguatan keuangan syariah	
		Penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional	Penguatan dana sosial syariah	
		Melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan	Digitalisasi sektor ekonomi	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA)

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		masyarakat		
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
				Penyusunan Konten
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
		Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro	Digitalisasi sektor ekonomi	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM
		Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor	● Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di pemerintahan (*AI, blockchain, metaverse*)	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		asing.	● Digitalisasi sektor ekonomi	
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.	● Penguatan SDM digital. ● Digitalisasi sektor strategis. ● Digitalisasi sektor ekonomi	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
				Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
				Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
		Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (*circular economy*)	Perluasan implementasi teknologi bersih	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
				Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Menerapkan ekonomi sirkular industri	● Penerapan efisiensi sumber daya. ● Penguatan ekosistem daur ulang	Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Menerapkan efisiensi sumber daya	Penerapan efisiensi sumber daya	Peningkatan Citra Produk Ekspor
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengembangkan produk ramah lingkungan.	Pengembangan produk ramah lingkungan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material.	Penerapan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
		Menguatkan ekosistem daur ulang.	Penguatan ekosistem daur ulang	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
		Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan	Pemulihan ekosistem yang terdegradasi	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
				Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
				Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber	Reformasi tata kelola persampahan, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas perencanaan serta pemisahan regulator, operator, dan pengawas serta penegakan hukum	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
				Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				sampah
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		Meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis *reduce, reuse,* dan *recycle*	Penanganan sampah melalui pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* serta fasilitas pangolin lainnya	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penanganan sampah melalui pengangkutan
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
				Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
		Peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penanganan sampah melalui pengangkutan
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
		Optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan *landfill mining*	Penyediaan, optimalisasi, rehabilitasi, pengoperasian dan pemeliharaan, serta pengawasan infrastruktur persampahan, termasuk konservasi tempat pemrosesan akhir dan *landfill mining*	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
		Perbaikan tata kelola persampahan	Penyadartahuan dan pemicuan perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah, terutama peningkatan permintaan, partisipasi, serta kemauan untuk membayar Retribusi. Reformasi tata kelola persampahan, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas perencanaan serta pemisahan regulator, operator, dan pengawas serta penegakan hukum	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
				Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		Mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang	Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
		Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan)	Peningkatan produktivitas hasil hutan. Penguatan pengelolaan hutan lestari.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		Mengelola sumber daya genetik	Inventarisasi sumber daya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
		Memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi	Pemulihan ekosistem yang terdegradasi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pelaksanaan remediasi
				Pelaksanaan rehabilitasi
				Pelaksanaan Restorasi
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif	Pengendalian spesies asing invasif	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				kualitas lingkungan
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
		Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		Penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati	Penguatan data, informasi, dan IPTEK keanekaragaman hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
		Peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati	Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan PrasaranaKeanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan	Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar dilakukan secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
				Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		Pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		Pengembangan pengelolaan keamanan hayati (*biosafety*)	Pengembangan pengelolaan keamanan hayati *(biosafety)*	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota
		Meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya		
		Meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar,langka, dan		

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		terancam punah		
		Merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema *public private people partnership* dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat		
		Menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.		Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
				Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Analisis denda terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		Meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau	Penyediaan pasokan air berkelanjutan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan pengelolaan air limbah	Penguatan tata kelola penyelenggaraan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan iklim	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota
				Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
				Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD)

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/ kota di Indonesia	Peningkatan pengelolaan kualitas udara di kab/kota di Indonesia	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut	Pengelolaan risiko daya rusak air	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatkan kualitas lahan	Peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
		Menurunkan laju deforestasi		
		Meningkatkan kualitas ekosistem gambut		
		Melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	Pengelolaan B3 dan limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
		Menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		ruang	kehutanan serta pemanfaatan ruang	
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
				Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
		Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
				Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif	Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam	Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi	lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan	Penurunan laju deforestasi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Menerapkan regulasi untuk	Peningkatan cadangan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan	karbon di kawasan hutan dan lahan	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
		Melakukan pembangunan rendah karbon	Peningkatan implementasi praktik pertanian yang rendah karbon	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer	Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED
				Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
				Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
		Efisiensi energi	Efisiensi energi	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
				Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
				Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
				Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
		Peningkatan transportasi berkelanjutan	Peningkatan transportasi berkelanjutan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pemenuhan fasilitas PelayananAngkutan pelabuhan Pengumpan lokal
				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
				Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
				Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
		Peningkatan cadangan karbon	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Adaptasi Perubahan Iklim
		Pencegahan pengurangan cadangan karbon	Peningkatan pencegahan pengurangan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Implementasi praktik pertanian yang rendah karbon	Peningkatan implementasi praktik pertanian yang rendah karbon	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil
		Pengembangan industri hijau	Pengembangan industri hijau	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA)
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		Pengelolaan limbah dan ekonomi	Penerapan efisiensi	Peningkatan Citra Produk Ekspor

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		sirkular	sumber daya. Penguatan ekosistem daur ulang	
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan *carbon sink* dan *carbon offset* untuk mengakselerasi target *net zero emission* dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau	Pengembangan industri hijau	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				oordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang *carbon trade*		
		Melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (c*oal-fired power plant retirement*) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan		
		Menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi *renewable*	Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		energy sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah	primer	
				Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
				Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
		Mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;	Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED
				Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
				Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
				Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (*carbon tax/carbon trading*, dst) di daerah
		Mendorong adopsi kendaraan listrik (*electric vehicle*) untuk transportasi umum	Peningkatan transportasi berkelanjutan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing	Pengembangan ekosistem tenaga kerja hijau	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau	Pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
		Memperkuat peran asosiasi dan	Penguatan peran asosiasi	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.	dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau dan tenaga kerja hijau	Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
		Menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, *blue finance* dan *good neighbor policy*	Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				usaha kecil
		Meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun	Rehabilitasi ekosistem karbon biru – mangrove dan lamun	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				mikro dan skala usaha kecil
		Mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi	Pengembangan industri perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala Keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil
		Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait *science, technology, engineering, art, and mathematic*s, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional	Penguatan data, informasi, dan IPTEK. keanekaragaman hayati	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan perikanan mutu untuk dan skala Keamanan usaha mikro hasil dan skala usaha kecil

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		dan global		
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah
				Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah	Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas	Pembangunan Jalan
				Rekonstruksi Jalan
				Pembangunan Jembatan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penggantian Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pelebaran Jalan Menuju Standar
				Rehabilitasi Jembatan
		Menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu.	Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas	Rekonstruksi Jalan
				Pembangunan Jembatan
				Penggantian Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal
		Menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk	Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas	Rekonstruksi Jalan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi.		
				Pembangunan Jembatan
				Penggantian Jembatan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan kabupaten/kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/ kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah.		Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
				Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
		Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat		Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
				Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
				Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
				Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM
		Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran.	Integrasi layanan usaha	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
				Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Perluasan Kesempatan Kerja
		Memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil	Formalisasi usaha serta standardisasi dan sertifikasi produk	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi.		
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemulihan Usaha Mikro
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
				Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
		Melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat.		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
		Mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan.	Inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemulihan Usaha Mikro

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
		Melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha.	Inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemulihan Usaha Mikro
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
		Mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global.		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
				Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok
				Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan *start-up*.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis Koperasi. Pengembangan koperasi sektor produksi skala besar	Pembinaan dan fasilitasi *start-up* digital di wilayah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
				Peningkatan Produktivitas, Nilai ambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
		Mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.	Pengembangan dan pemeliharaan basis data tunggal koperasi dan UMKM	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
		Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas.	Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif.	Pengembangan Sistem Pemasaran
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
		Integrasi data ekonomi kreatif	Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi kreatif
				Perlindungan Hasil Kreativitas
				Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
		Percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan	Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts. Penguatan ekosistem seni, budaya, kerajinan. Penguatan ekosistem	Perlindungan Hasil Kreativitas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka	pengembangan aplikasi dan gim. Penguatan ekosistem kuliner.	
				Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif
		Perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia.		Pengembangan Sistem Pemasaran
				Penyediaan Infrastruktur
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
		Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif.		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
		Pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global.	Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi. Peningkatan kapasitas sisi pasokan industri Digital. Digitalisasi sektor ekonomi Digitalisasi sektor strategis.	Penyediaan Infrastruktur
				Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
				Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif
				Penyusunan Skema Insentif Daerah
		Penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum).		Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
				Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
		Mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia.		Pengembangan Pendidikan
				Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
				Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)
				Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
				Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif
				Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		Memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global.		Penyusunan Skema Insentif Daerah
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
		Perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata.		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Neger
		Menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata.		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
		Menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata.		Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		menerapkan prinsip berkelanjutan.		
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Reaktivasi pelaksanaan *event* dan *meetings, incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana.		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota
				Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota
		Pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata.		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
		Pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*)	Perluasan akses dan inovasi pembiayaan.	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya
				Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota
		Memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
		Memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi *bankable.*		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
		Menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif.		Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
				Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi
				Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
		Memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
		Mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
		Mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dengan melakukan penguatan layanan 1 tahun pra sekolah (TK/RA/BA) dan percepatan wajib belajar 12 tahun yang berfokus pada jenjang pendidikan yang masih membutuhkan akselerasi pelaksanaan wajib belajar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				Pengadaan Mebel Sekolah
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
				Pemeliharaan Mebel Sekolah
				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Satuan Pendidikan Dasar
				Penyediaan infrastruktur TIK
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Penataan Ruang/Sudut Baca
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang.	Penguatan pembelajaran berbasis teknologi digital	Penyediaan infrastruktur TIK
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Laboratorium
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
				Pembangunan Asrama Sekolah
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
				Pembangunan Fasilitas Parkir
				Pembangunan Kantin Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pengadaan Mebel Sekolah
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				Pengadaan Mebel PAUD
				Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
				Pengadaan Perlengkapan PAUD
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Revitalisasi pendidikan nonformal.	Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, di antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
				Pengendalian dan Pengawasan PerizinanIzin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
		Penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI).		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		berkualitas		Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Penguatan tata kelola pendidikan.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kot
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif.		Perluasan Kesempatan Kerja
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
				Job Fair/Bursa Kerja
				Pelayanan antar Kerja

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
		Memfasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif	Mobilitas dan pelindungan tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Perluasan Kesempatan Kerja
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
				Job Fair/Bursa Kerja
				Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
				Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penempatan
		Meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.	Peningkatan keahlian tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
				Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi.	Peningkatan keahlian tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		Melaksanakan *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan *low-skilled* berbasis pembelajaran sepanjang hayat.	Peningkatan keahlian tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		Memfasilitasi transisi *school to work* dan integrasi *soft skills* bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi.		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		.		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
		Melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		Mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga.	Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, di antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas.	
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		Mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	Pengembangan budaya literasi dan peningkatan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Membaca
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
				Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi
				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
		Perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini.		
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.	Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, di antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			penyandang disabilitas.	
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima.	Perluasan cakupan bantuan pendidikan prestasi dan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar sampai jenjang pendidikan tinggi, termasuk beasiswa atlet dan seniman	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		Penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global.	Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter peserta didik.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
		Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok	Pemenuhan layanan pendidikan pesantren yang	

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional.	berkualitas dan pendidikan keagamaan lainnya.	
		Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya.	Penguatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis industri dan keunggulan wilayah	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pembangunan Ruang Praktik Siswa
				Pembangunan Ruang Laboratorium
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
				Pembangunan Asrama Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium
				Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengadaan Mebel Sekolah
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics.*	Penataan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi dan program studi untuk peningkatan kualitas dan penguatan bidang STEAM.	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal
				Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pendidikan
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.	Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		Memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi.	Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		Meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan	Pengembangan kapasitas lembaga penelitian dan	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya.	pengabdian masyarakat	Kemitraan dengan Dunia Usaha
		Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.	Pengembangan kapasitas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
		Meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio.	Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.	Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		Memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (*universal health coverage*) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pendanaan kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting.	Penurunan *stunting*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan	Penurunan *stunting*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Vitamin).		
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain).	Pengendalian penyakit tuberkulosis. Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria).	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Investasi pelayanan kesehatan primer. Penguatan layanan nggulan dan pengembangan pelayanan kesehatan di daerah sulit	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			akses	
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
		Memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap.		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
		Meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal.		
		Mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah.		
		Memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas.		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara	Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pendanaan kesehatan	

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi		
		Memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren.		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman *stunting* (gizi buruk).	Penurunan *stunting*	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
		Memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		.		Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota
		Membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (*family medicine*).		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak.		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan.		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya.		Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
				Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti		Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi		
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba.		Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
				Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans.		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
		Peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.	Produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal
				Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
		Penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan.	Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		Penyediaan fasilitas pendukung keluarga.	Penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga. Penguatan keluarga	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			tunggal, pasca perceraian, dan pekerja migran untuk mengoptimalkan fungsi pengasuhan keluarga	di Kampung Keluarga Berkualitas
				Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
		Penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan.	Pemenuhan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga dan afirmasi bagi keluarga rentan	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
				Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
		Pemenuhan hak anak secara universal.	Penyediaan layanan yang ramah anak dalam rangka pemenuhan hak anak secara universal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak.	Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak.		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
				koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
		Penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko.	Penguatan resiliensi dan peningkatan partisipasi anak secara bermakna	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				tingkat daerah kabupaten/kota
				koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
		Penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan.	Peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter, dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi.	Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan epemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan. Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonom Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			ketenagakerjaan.	
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan.	Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di proses pembangunan	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		Penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia.	Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut Usia.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		Mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		Mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		Mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
		Memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		disabilitas dapat dikembangkan.	pembangunan.	
		Meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar
				Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
		Mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
				Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
		Membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
		Memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk *stereotype*, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.	Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		Mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		Mengembangkan program siswa olahragawan (*student athlete program*) secara berjenjang dan	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		berkelanjutan.		Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
		Mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		Memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.	Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
				Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
		Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional.	Peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi. Peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA. Peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif.	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
		Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.	Peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			pertumbuhan baru. Peningkatan konektivitas integrasi *hinterland* dengan simpul utama	
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
				Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar
				Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk	Peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan kemiskinan.	ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa.	perdesaan	
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa.	Transformasi dan pemberdayaan ekonomi perdesaan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
		Pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota		Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
		.		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
				Mendukung Pembangunan Puskesmas
				Pembangunan Tanggul Sungai
				Normalisasi/Restorasi Sungai
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Minum (SPAM)
				Optimalisasi TPA/TPST/SPA
				Pembangunan TPA/TPST/SPA
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		Pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan.	Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan perdesaan	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		Peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa		Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan	Penguatan tata kelola, keuangan, dan pendampingan desa adaptif.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa.		
				Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
				Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
		.		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan).		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa.		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa		Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Penataan Desa
		Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
		Pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran.		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.	Transformasi pembangunan daerah lambat tumbuh	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		Peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi.	Fasilitasi pembangunan rumah baru layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penanganan permukiman kumuh yang dilakukan secara terpadu.	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
		.		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		.		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Permukiman
		Pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro		Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
				Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen
		Pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation*.		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk	Mendukung Basis Data Terpadu untuk	Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat	pemberantasan kemiskinan melalui Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	Sosial
				Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara Berkesinambungan.	Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		.		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
				Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial
		Penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk.	Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
		Peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial.	Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar,dan Kartu Indonesia Sehat.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
		Penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan	Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya.	secara inklusif	Nikah, dan/atau Identitas Anak
				Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		Reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial.	Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain.	Rehabilitasi sosial dan layanan pengasuhan bagi penerima manfaat dari kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, termasuk melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial, Permakanan, dan Layanan Lansia Terintegrasi	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial.	Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
				Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
		Pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain	Rehabilitasi sosial dan layanan pengasuhan bagi penerima manfaat dari kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, termasuk melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial, Permakanan, dan Layanan Lansia Terintegrasi	Penyediaan Makanan
				Penyediaan Sandang

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Layanan Kedaruratan
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan.		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan Pelaksanaan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
		.		
8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin *independensi*, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi.	Pengelolaan dan audit keuangan partai politik.	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu.	Digitalisasi pelayanan publik.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
				Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
				Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
				Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
				Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
		Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki.		Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
				Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
				Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai *think-tank* dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi.		
		Meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan		
		Menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *center of excellence* dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.		
		Memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik.		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.		

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
		Mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.		
		Penguatan budaya hukum		Fasilitasi Bantuan Hukum
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		Membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan *soft competency* Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
				Kerjasama Pengawasan Internal
		Memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi *targeted talent* untuk mau bergabung.		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		Mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi *future jobs* di era digital.		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		Memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja	Penerapan *total reward*	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total *reward* dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara.		
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
		.		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		Memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total *reward*, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara.	Penerapan *total reward*	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
				Pengelolaan *Assessment Center*
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		Memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya		Pembinaan Disiplin ASN

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan *talent pool* dan mobilitas talenta		
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
				Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
				Pengelolaan Promosi ASN
				Pengelolaan Mutasi ASN
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
		Memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
				Pengelolaan Data Kepegawaian
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
		.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
		Transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik, melalui menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; digitalisasi pelayanan publik; Pengembangan talenta digital pelayanan publik; penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan perluasan akses pelayanan publik.	Digitalisasi pelayanan publik.	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
				Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		.		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
		.		Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
				Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
		Reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan Perpajakan. Optimlaisasi *local taxing power.*	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui optimalisasi pendapatan negara, optimalisasi belanja negara, dan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.	Peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat. Optimalisasi kualitas belanja TKD. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan inovatif dan berkelanjutan	
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
				Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
				Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
				Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
		Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan	Kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkotika	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah.		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
		Meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba.		
		Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba.		
		Meningkatkan kemampuan *surveillance* dan Intelijen Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba		
		Menutup semua akses ke situs perjudian *online.*	Penutupan akses ke situs perjudian *online*	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		.		
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi.		Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		Meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak.		
		Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia.		
		Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.		
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan	Mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antarumat beragama serta sesama anak bangsa.	Peningkatan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan bermaslahat.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Makmur			
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.	Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, serta pembinaan ideologi Pancasila.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini.	Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Daerah
				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kampung
				Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		Mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal.	Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
				Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
		Menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya	Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.	Peningkatan kerukunan umat beragama.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan.	Peningkatan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan bermaslahat.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan.	Peningkatan kerukunan umat beragama.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal.	Penjaminan produk halal.	Pengembangan Usaha Mikro
		Meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman.	● Peningkatan kerukunan umat beragama. ● Transformasi layanan penyelenggaraan ibadah haji.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata.	● Peningkatan bimbingan keagamaan dan bimbingan perkawinan. ● Revitalisasi layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan.	Peningkatan peran lembaga agama dan keagamaan dalam layanan keagamaan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.	Pengembangan dana sosial keagamaan untuk mendukung program pembangunan.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilainilai luhur bangsa bagi generasi muda.	Pengelolaan terpadu cagar budaya.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		.		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		Mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia.	Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara.	Pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya.	Pengembangan produk dan jasa berbasis seni budaya.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		Mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia.		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		Mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas.	Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		.		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum.		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila.	Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, serta pembinaan ideologi Pancasila.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan.	Pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Pemperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.	Pelindungan hutan adat dan tanah ulayat serta pemberdayaan asyarakat dan komunitas adat.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kebudayaan
		Mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia.	Pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		Mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
				Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.	Transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
				Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota
				Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi
		Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana.	Melaksanakan peningkatan peran lembaga dan kapasitas sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
		Memperkuat sistem deteksi bencana (*early warning system*) dengan penerapan teknologi terkini.	Membangun sistem peringatan dini multi ancaman bahaya dan pusat pengendali operasi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			penanggulangan bencana terpadu.	
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
		Meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.	Memulihkan pelayanan dasar bidang fisik, sosial, dan ekonomi di daerah terdampak bencana.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.	Melakukan pembangunan pusat logistik dan peralatan berbasis kewilayahan.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Menata koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana.		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
				Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana.		Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
				Pelaksanaan rehabilitasi
				Pelaksanaan Restorasi
		Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana.		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
				Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
				Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
		Pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana.	Melakukan pembangunan pusat logistik dan peralatan berbasis kewilayahan.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
		Mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana	Meningkatkan layanan literasi dan edukasi kebencanaan berbasis masyarakat, termasuk melalui desa tangguh bencana.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
		Mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim.	● Meningkatkan ketahanan pesisir dan laut. ● Meningkatkan pembangunan dan konservasi sumber daya air. ● Meningkatkan pembangunan dan konservasi sumber daya air.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
				Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota

No	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan	*Highlight* Intervensi	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.	● Melakukan peningkatan keandalan dan kebermanfaatan infrastruktur tahan bencana, termasuk penguatan perijinan bangunan gedung. ● Penetapan dan penyelenggaraan rencana ● aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (RAK LLAJ) secara komprehensif dan sinergis. ● Peningkatan penanganan daerah rawan kecelakaan (DRK). ● Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi udara, laut, dan darat	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan hasil reses dari penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh Bappeda dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Tabel 4.40
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi TAPD

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	28-01-2026	James Sibarani	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Belum adanya peralatan mesin ketam Perabot A	Desa Tuapejat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
2	26-02-2026	Manual Simamora	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan bibit cabe keriting cap Startop yang 10 kg=10 bungkus, pupuk MPK Mutiara 11 kg, tangki semprot Elektrik 11 Unit, Plastik Mulsa Pertanian (cap lonceng)=22 rol, Obat Hama/ Fungisida merek confidor ukuran 1 kg= 10 bungkus, Obat Hama/Insektisida, Curacoron 250 ml = 22 Bungkus, Obat	Dusun Sagitsi Desa Nemnemleleu Kecamatan Sipora Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				Hama Fungisida Nativo 50 gram = 22 bungkus, Obat Herbisida(Roundap1 liter)= 1CH untuk Kelompok Kelompok Tani INGIN JAYA							
3	26-02-2026	Manual Simamora	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Pengadaan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani /Ternak LALATAK LELEU 10 Sapi Betina dan 1 Jantan	Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	11	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
4	26-02-2026	Manual Simamora	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Pengadaan ternak Sapi untuk Kelompok Tani MALEBAK KOAT sebanyak 15 pasang, 15 Ekor Sapi Betina dan 15 Ekor Sapi Jantan	Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	30	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
5	26-02-2026	Manual Simamora	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Pengadaan ternak Sapi untuk Kelompok Tani Mongan Mapadegat sebanyak 15 pasang, 15 Ekor sapi Betina, 15 Ekor Sapi Jantan	Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	30	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
6	26-02-2026	Manual Simamora	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Pengadaan Bantuan Bedah Rumah untuk Desa Bukit Pamewa	Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	15	Unit	-	-
7	26-02-2026	Manual Simamora	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, pemanfaatan olahraga	Bantuan Pembangunan Lapangan Bola Volly	Desa Sipora Jaya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Verifikasi TAPD	1	Paket	150000000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
											tingkat kabupaten/kota
8	26-02-2026	Manual Simamora	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pengadaan Perlengkapan Rumah Ibadah Santo Yosef	Desa Sioban, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
9	26-02-2026	Manual Simamora	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala	Bantuan Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 15 Betumonga	Desa Betumonga Dusun Matubtuman Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi TAPD	2	Rupiah	400000000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
10	26-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Sinso Kecil merek STHILL untuk Kelompok Tani TIRIK BERE	Dusun Pokai Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara Kab. Kep. Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
11	26-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian SHINSOW Kecil untuk Kelompok Tani TRI MASIRPA	Dusun Pilionan Desa Satboyak Kecamatan Siberut Utara Kab. Kep. Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	16	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
12	26-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertanian SHINSOW Kecil Merek STHILL untuk kelompok Tani NGENA	Dusun Malancan Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kab. Kep. Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				AKENEN							
13	26-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian SHINSO Kecil Merek STHILL untuk Kelompok Tani OMBAGA	Dusun Malancan Desa Malancan Kec. Siberut Utara Kab. Kep. Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	16	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
14	26-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian SHINSI Kecil Merek STHILL untuk Kelompok Tani KEREK BAGA	Dusun Malancan Desa Malancan Kec. Siberut Utara , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	16	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
15	26-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Shinso Kecil Merek STHILL untuk kelompok Tani SIMALETCI	Dusun Pokai Desa Muara Sikabaluan Kec. Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	12	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
16	26-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Shinso Kecil Merek STHILL untuk Kelompok Tani Pasikeli	Dusun Terekan Hulu Desa Malancan Kec. Siberut Utara , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	13	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
17	26-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Tengki Semprot untuk Kelompok TANI WANITA RONNAKEN	Dusun Tarekan Hulu Desa Malancan Kec. Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	13	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
18	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan bahan, Pembuatan kandang, Ternak dan Pangan untuk Kelompok Budidaya Ternak Babi ROIROI	Dusun Betaet Desa Betaet Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
19	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian berupa Gerobak Sorong sebanyak 17	Dusun Masigep Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				Unit, Tangki Semprot 17 Unit dan Roundap 17 Unit untuk Kelompok Tani Sibonjoik							
20	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Transportasi Pertanian Berupa Mesin Pompong Merek Honda GX2000 Guna untuk Kelompok Tani SIGALA-GALAK yang digunakan untuk Tranportasi menuju lokasi Pertanian dan juga digunakan untuk mengangkut hasil pertanian berpa Pinang	Dusun Masigep Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	12	Unit	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
21	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Alat Pertanian SHINSOW Kecil merek STHILL untuk Kelompok Tani	Dusun Pilaoinan Desa Sigapokna Kec Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				BINA DESA							
22	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Pengadaan Bantua Peralatan Memasak untuk Kelompok UMKM KEREK NGANGA	Dusun Pokai Desa Ma. Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
23	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Pengadaan Bantuan Peralatan Memasak untuk Kelompok UMKM SIOBAKTA	Dusun Pokai Ma. Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
24	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gedung Gereja IFGF Mongan Poula	Dusun Mongan Poula Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
25	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja SANTO PETRUS STASI TINITI	Dusun Tiniti Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
26	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Pembangunan Gereja GKPM RESORT PULIPSOMAN	Dusun Polipsoman Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat , Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
27	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Renovasi Mesjid AL-MUJAHIDIN	Dusun Sikuran Desa Sigapokna Kecamatan Sibarat Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
28	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Pembangunan Pagar Lingkungan Gereja ST. YOHANES DARI SALIP STASI POLIPSOMAN	Dusun Polipsoman Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
29	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Pengadaan Bantuan Peralatan Memasak untuk Kelompok UMKM IBU-IBU USAHA MANDIRI	Dusun Muara Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Sipora Utara , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
30	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Ternak Babi dan Pembuatan kandang untuk Kelompok Ternak SAKALEAK BERSAUDARA	Dusun Pokai Desa Ma. Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
31	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa/Mahasiswi Desa Sigapokna untuk 50 orang x 2.000.000	Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	100000000	Rupiah	-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
32	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Bantuan Pengadaan FREZER untuk Kelompok UMKM Kerek Baga	Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
33	27-02-2026	Manual Simamora	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Mesin Hand Traktor 2 Unit, Kultifator 2 Unit, Hand Sprayer elektrik 11 Unit, Insektisida 55	Dusun Makoddiai Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				Liter, Fungisida 22 KG untuk Kelompok Tani Suka Maju							
34	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pembangunan /pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan /pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan /pemeliharaan embung pertanian, pembangunan /pemeliharaan DAM parit pertanian	Pengadaan Bantuan Pembangunan Jalan Pertanian Untuk Kelompok Tani Sibatcauk Eruk	Dusun Mongan Poula Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
35	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, pemanfaatan olahraga	Pengadaan Bantuan Alat Musik Orgen Tunggal untuk Organisasi Orgen Tunggal Rona Sonia	Dusun Muara Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Verifikasi TAPD	1	Paket	350000000	Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
36	27-02-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Alat Musik untuk Gereja GKPM RESORT POKAI	Dusun Pokai Desa Ma. Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
37	02-03-2026	Kristinus	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	bantuan pembangunan musholla Darul Umum	Dusun Muruibaga Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan, , Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
38	02-03-2026	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Sitaimasusu	Dusun Maseppaket Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
39	02-03-2026	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan pengadaan bibit ternak babi untuk Kelompok Ternak Babi Situarep	Dusun Maseppaket Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	50	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
40	02-03-2026	Kristinus	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Pengadaan bantuan drum untuk penyulingan minyak nilam untuk Kelompok Nilam Simaroro	Dusun Ongah Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	10	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
41	02-03-2026	Kristinus	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Bantuan pengadaan mesin ketam untuk Kelompok Kerajinan Loinak	Dusun Kinikdog Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	13	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
42	02-03-2026	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Kebutuhan bibit holtikultura	Pengadaan Bantuan Ternak Babi Untuk Kelompok Ternak Sinula sebanyak 14 Pasang, 14 babi Betina dan 14 Babi Jantan	Dusun Nemnemleleu Desa Sikakap , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	28	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
43	02-03-2026	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Kebutuhan bibit holtikultura	Pengadaan Bantuan Ternak Babi untuk kelompok Ternak PUSARAAT SAINA bantuan ternak Babi sebanyak 15 Pasang, 15 Ekor Babi Betina dan 15 Ekor babi Jantan	Dusun Bere Desa Makalo Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	30	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
44	02-03-2026	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan Gereja GKPM TUMALEI	Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
45	02-03-2026	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Musara Kasimaeru	Dusun Ugai Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
46	03-03-2026	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Manai Simaroro	Dusun Ugai Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
47	03-03-2026	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Mumunen	Dusun Sereming Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
48	03-03-2026	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simandarainga t	Dusun Malabbaet Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
49	03-03-2026	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simuinek	Dusun Buttui Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
50	04-03-2026	Kristinus	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Pengadaan mesin domping (parutan sagu) dan peralatan lainnya untuk Kelompok Sagu Simabaga	Dusun Malabbaet Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	2	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
51	04-03-2026	Safrijal Sageileppak	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Dusun Kirip Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	40	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
52	04-03-2026	Safrijal Sageileppak	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Dusun Makukuet Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	40	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
53	04-03-2026	Safrijal Sageileppak	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Dusun Mabuggei Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	60	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
54	04-03-2026	Safrijal Sageileppak	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Dusun Maonai Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
55	04-03-2026	Safrijal Sageileppak	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 450 watt	Dusun Baddan Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	40	Unit	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
56	04-03-2026	Safrijal Sageileppak	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Dusun Tolomo Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	38	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
57	04-03-2026	Safrijal Sageileppak	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Dusun Majuruwjuw Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	40	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
58	04-03-2026	Safrijal Sageileppak	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 450 watt	Dusun Boboakenen Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya , Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	40	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
59	04-03-2026	Safrijal Sageileppak	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Dusun Panasalat Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	60	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
60	04-03-2026	Safrijal Sageileppak	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 450 watt	Dusun Panasalat Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	40	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
61	04-03-2026	Safrijal Sageileppak	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan bantuan pemasangan instalasi listrik	Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	150	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
62	04-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan pembangunan rumah ibadah gereja GKPM pei-pei	Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
63	04-03-2026	Kristinus	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Pengadaan bantuan alat parutan sagu (mesin domping)untuk Kelompok Parutan Sagu Pusaraat	Dusun Sereming Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	2	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
64	04-03-2026	Kristinus	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Pengadaan bantuan mesin domping (alat parutan sagu) untuk kelompok Parutan Sagu Amiakenen	Dusun Ugai Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	2	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
65	05-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Ternak ITIK dan pembuatan Kandang untuk kelompok Ternak ITIK SITULU	Dusun Betaet Desa Betaet Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
66	05-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Mesin shansow Kecil Merek Sthill untuk kelompok Tani SIMAKATUKA	Dusun Pokai Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
67	05-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Mesin SHINSO kecil Merek Still untuk kelompok tani BARAMBANG	Dusun Pokai Desa Muara Sikabaluan kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
68	05-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Alat Tangkap Nelayan Berupa Mesin Tempel 4 PK untuk Kelompok Nelayan TULEN TEITEISIMALA LATEK	Dusun Tugu Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Paket	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
69	05-03-2026	Kristinus	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Keret Baga)	Desa Saibi Samukop, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	20	Unit	-	-
70	05-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan Alat Tangkap Nelayan Mesin Tempel 15 PK untuk kelompok nelayan Makmur	Dusun Muara Desa Ma. Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
71	05-03-2026	Kristinus	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan modal usaha untuk Kelompok UMKM Peigu Karya	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	10	Orang	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
72	05-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan Mesin Tempel 4 PK untuk kelompok Nelayan SIMATUMU POLIPSOMAN	Dusun Polipsoman Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	16	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
73	05-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan Mesin Tempel 15 PK untuk kelompok Nelayan TEPI PANTAI	Pilionan Desa Sigapokna kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
74	05-03-2026	Kristinus	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan (rabo) untuk Kelompok Nelayan Simanja	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	2	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
75	05-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan Mesin Tempel 15 PK untuk kelompok Nelayan BASIAKENEN	Dusun Malancan Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
76	05-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan alat tangkap Nelayan Mesin Tempel 15 PK untuk kelompok nelayan POKAMUMU	Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
77	05-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan alat tangkap nelayan Mesin Tempel 15 PK untuk	Desa Sigapokna Kecamatan Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				kelompok nelayan TAKUNGAN							
78	05-03-2026	Kristinus	Pembangunan /pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan /pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan /pemeliharaan embung pertanian, pembangunan /pemeliharaan DAM parit pertanian	Bantuan pembangunan jalan pertanian persawahan Malupetpet sepanjaang 300 meter	Dusun Puro Desa Muara Siberut Kec. Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
79	05-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan alat tangkap Nelayan mesin ttempel 15 PK untuk kelompok nelayan MONGAN TUBEKEN	Dusun Pokai Desa Ma. Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
80	05-03-2026	Kristinus	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simasingin	Dusun Sereming Desa Madobag, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
81	05-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan mesin tempel 15 PK untuk kelompok nelayan ANAK LAUT	Dusun Sigapokna kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
82	05-03-2026	Kristinus	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan alat tangkap ikan (rabo) untuk Kelompok Nelayan Cahaya Malam	Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	2	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
83	05-03-2026	Gerson	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Pembangunan Pagar Gereja GKPM SIOBAN MALABBAET	Dusun Malabbaet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	150000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
84	05-03-2026	Gerson	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Penambahan Bagunan Gedung GEREJA GKPM Bagan LELET	Dusun Bagan Lelet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	100000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
85	05-03-2026	Gerson	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Lonceng untuk Gereja GKPM Matuptuman	Dusun Matuptuman Desa Betumonga Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1	Unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
86	05-03-2026	Gerson	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Pengadaan Bantuan alat Sulingan Nilam (Drom) untuk Masyarakat di dusun Bagan Lelet	Dusun Bagan Lelet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	35000000	Rupiah	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
87	05-03-2026	Kristinus	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin tempel 15 PK untuk Kelompok Nelayan Torisi	Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
88	05-03-2026	Kristinus	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan pengadaan mesin boat15 PK untuk Kelompok Nelayan Gurigak	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	12	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
89	05-03-2026	Gerson	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Bibit Ternak Babi untuk masyarakat dusun Malabbaet	Dusun Malabbaet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	20	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
90	05-03-2026	Gerson	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Ternak masyarakata Dusun TAKKUMAN	Dusun Takkuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	20	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
91	05-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan pembangunan rumah ibadah gereja katolik pei-pei	Desa Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
92	05-03-2026	Gerson	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, pemanfaatan olahraga	Pengadaan Bantuan Sepeda Air untuk pemuda Dusun Paddarai	Dusun Paddarai Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Verifikasi TAPD	10	Unit	250000000	Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
93	05-03-2026	Gerson	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Ternak Babi untuk kelompok Tani TORO LAGGOK	Dusun Sioban Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	20	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
94	05-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan mesin boat 15 PK untuk Kelompok Nelayan Dusun Kaleak	Dusun Kaleak Desa Sagulubbek Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	3	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
95	05-03-2026	Gerson	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan Bantuan Alat Penerangan Jalan di Dusun Malabbaet	Dusun Malabbaet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
96	05-03-2026	Gerson	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Pembangunan Rumah Ibadah GKPM Wilayah III Sioban	Dusun Sioban Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
97	05-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan mesin boat 15 PK untuk Kelompok Nelayan Dusun Lumago	Dusun Lumago Desa Sagulubbek Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	2	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
98	05-03-2026	Gerson	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Pembangunan Pagar Gereja IFGF Malabbaet	Dusun Malabbaet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	100000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
99	05-03-2026	Gerson	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Pembangunan Podium / Mimbar Untuk Gereja GKLI GETSEMANE	Dusun Takkuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
100	05-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan, pompong untuk Desa Taileleu	Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	20	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
101	09-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Rumah Ibadah Gereja GKPM Jemaat Mabulau Buggei	Dusun Mabulau Buggei Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara , Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	100000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
102	09-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan Mesin Tempel Boat Merek YAMAHA 8 PK untuk Kelompok Nelayan SUNGAI	Dusun Mabulau Bugei Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				RIMAU							
103	09-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan pembangunan rumah ibadah gereja GPDI pei-pei	Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
104	09-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan pembangunan rumah ibadah mesjid Taileleu	Desa Taileleu Kecamatan Siberut Bata Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
105	09-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan pembangunan rumah ibadah geraja GKPM UMA	Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	150000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
106	09-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan rumah ibadah gereja katolik	Desa Taileleu Kecamatan Siberrut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	100000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
107	09-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan pembangunan rumah ibadah gereja GPDI Taileleu	Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Dya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
108	09-03-2026	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Bantuan Pengadaan Rumah Layak Huni	Dusun Mabolak Selatan, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	40	unit	-	-
109	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan pengadaan bibit ternak untuk Kelompok Ternak Sapi Siagou	Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
110	09-03-2026	Wahyu Setiadi	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Pengadaan Mesin Boat (5 PK) untuk 1 kelompok nelayan Dusun Parabatu, Desa Makalo	Dusun Parabatu, Desa Makalo, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
111	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Tani Bailaket Sejahtera	Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
112	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin tempel 15 PK dan alat tangkap nelayan untuk Kelompok Nelayan Kamra	Dusun Puro II Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	13	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
113	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Tani Peleteu	Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
114	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Tani Bio	Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
115	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Maju Bersama	Dusun Pariok Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
116	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Mongan Oinan	Dusun Salappa Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
117	09-03-2026	Wahyu Setiadi	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Alat Pertanian (sinso) 10 KK Dusun Sabiret, Malakopa	Dusun Sabiret, Malakopa, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
118	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Sapi Teitei Leleu	Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
119	09-03-2026	Wahyu Setiadi	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Alat Pertanian (sinso) 10 KK Dusun Purorogat, Desa Malakopa	Dusun Purorogat, Desa Malakopa, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
120	09-03-2026	Wahyu Setiadi	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan Gereja GKPM Parabatu Desa Makalo	Desa Makalo, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
121	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simaoba Paalei (KTSSP)	Dusun Sereming Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
122	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simaeruk	Dusun Ugai Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
123	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan bantuan mesin tempel 15 PK untuk Kelompok Mongan Simangkat	Dusun Sarausau Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
124	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan untuk surau Desa Muara Siberut	Dusun Muara Desa Muara Siberut, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
125	09-03-2026	Wahyu Setiadi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Bantuan Rehab Rumah Dusun Mabola, Sikakap	Dusun Mabola, Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	5	unit	-	-
126	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan untuk Mesjid Ugai Mase Pake	Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
127	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan untuk mesjid sarausau	Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
128	09-03-2026	Wahyu Setiadi	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Parabatu 2 Paket	Dusun Parabatu, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	400000000	Rupiah	-	-
129	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan untuk mesjid saliguma	Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
130	09-03-2026	Wahyu Setiadi	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Malakopa 2 Paket	Desa Malakopa, Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	400000000	Rupiah	-	-
131	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan untuk mesjid pei-pei	Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
132	09-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan untuk mesjid simoilaklak	Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
133	09-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan bibit Kelapa sebanyak 2500 batang untuk kelompok Tani RORO SIMERU	Desa saumanganya kecamatan pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	2500	Batang	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
134	09-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan dana untuk penebangan kayu dan pembersihan lahan untuk kegiatan peremajaan kelapa Kelompok Tani RORO SIMERU	Desa saumanganya kec pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	25000000	Rupiah	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
135	09-03-2026	Wahyu Setiadi	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, pemanfaatan olahraga	Pembangunan sport Hall/ Lapangan Futsal Desa Malakopa	Desa Malakopa, Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Verifikasi TAPD	300000000	Rupiah	400000000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
136	09-03-2026	Wahyu Setiadi	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Alat Musik Orgen dan Speaker di GKPM Mandiri Malakopa	Desa Malakopa, Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
137	09-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Mesin senso kecil merek STHILL untuk mengoptimalkan kegiatan peremajaan kelapa kelompok Tani	Desa saumanganya, kecamatan pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	-	Dibatalkan	6	Unit	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				RORO SIMERU							
138	09-03-2026	Wahyu Setiadi	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Alat Musik orgen dan Speaker GKPM Sibaibai, Sikakap	Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
139	09-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan Mesjid Pei Pei	Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya , Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
140	09-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Dana untuk penanaman bibit kelapa pada kegiatan peremajaan kelapa untuk kelompok tani RORO SIMERU	Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	25000000	Rupiah	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
141	09-03-2026	Wahyu Setiadi	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Modal usaha UMKM Malakopa (40 KK)	Malakopa, Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	200000000	Rupiah	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
142	09-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bantuan mesin potong rumput merek sthill untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan dan produkdi hasil pertanian kelompok Tani PETAK BERBAGI	Dusun mabulau buggei desa saumanganya kec pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	12	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
143	09-03-2026	Wahyu Setiadi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Bantuan Rehab Rumah (20 KK) Desa Malakopa	Desa Malakopa, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	400000000	Rupiah	-	-
144	09-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Sprayer Elektrik Knapsack Baterai 2 in 1 untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan dan produksi hasil pertanian kelompok tani	Dusun Mabulau buggei Desa Saumanganya kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	12	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				Petak Berbagi							
145	09-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan rumah ibadah gereja gizi	Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
146	09-03-2026	Safrijal Sageileppak	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan Sarpras kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan,Pengaaan Obat, Rehap Puskesmas/RS , Layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Pengadaan bantuan BBM untuk pasien rujukan di Puskesmas Taileleu	Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	Verifikasi TAPD	70000000	Rupiah	50000000	Operasional Pelayanan Puskesmas
147	09-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi	Pengadaan bantuan untuk gereja GKPM Mapinang	Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			masyarakat								
148	09-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan untuk Gereja Katolik Mapinang	Dusun Mapinang Desa Sagulubbeg, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
149	09-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Dana untuk Penanaman Bibit Kelapa kelompok Tani TOILET KILIBET BAGA	Dusun Pinairuk Desa Saumanganya kecamata Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	25000000	Rupiah	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
150	09-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan untuk Gereja GKPM Kaleak	Dusun Kaleak desa sagulubbeg, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
151	09-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan Mesin Boat 4 PK untuk kelompok Nelayan SOPO SIMAERU	Dusun Bukku Monga Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	14	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
152	09-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan untuk Gereja Katolik Lumago	Desa Sagulubbeg, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
153	10-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan untuk gereja katolik Siribabag	Dusun Siribabag Desa Sagulubbeg, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
154	10-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Pengadaan bantuan untuk UMKM Muara Siberut	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	100000000	Rupiah	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
155	10-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan bantuan untuk gereja GKPM Sirorow	Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
156	10-03-2026	James Sibarani	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Kapal Bagan	Tuapejat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1	unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
157	10-03-2026	Safrijal Sageileppak	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan pembangunan rumah ibadah gereja GPR	Desa taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
158	10-03-2026	James Sibarani	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pembuatan Rumpun 4 bh	Tuapejat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	200000000	Rupiah	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
159	10-03-2026	Safrijal Sageileppak	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Bantuan pengadaan jalan lingkungan Dusun Makukuet	Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	150	Meter	-	-
160	10-03-2026	Safrijal Sageileppak	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Bantuan pengadaan jalan lingkungan Dusun Makukuet	Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	150	Meter	-	-
161	10-03-2026	Safrijal Sageileppak	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Bantuan pengadaan jalan lingkungan Dusun Makukuet	Desa Pasakiat Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	100	Meter	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
162	10-03-2026	Safrijal Sageileppak	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Bantuan Pengadaan jalan lingkungan Dusun Maonai	Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	200	Meter	-	-
163	10-03-2026	Safrijal Sageileppak	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Bantuan pengadaan Jalan lingkungan Dusun Makoddiai	Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	250	Meter	-	-
164	10-03-2026	Safrijal Sageileppak	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Bantuan Pengadaan Jalan Lingkungan Dusun Pei-pei	Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	100	Meter	-	-
165	11-03-2026	Kristinus	Pembangunan Sanggar Seni/Lembaga seni lainnya	Bantuan pembangunan Sanggar Seni Budaya untuk Kelompok Sadar Wisata	Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	-	-
166	11-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan Mesin Boat 4 PK untuk kelompok Nelayan LAPRAT SIBAU	Dusun Pinatektek Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
167	11-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Pengadaan Bantuan Pembangunan Rumah untuk masyarakat Tidak mampu di Desa Bulasat	Desa Bulasat Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	10	Unit	-	-
168	11-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Pengadaan Bantuan Pembangunan Rumah untuk masyarakat tidak mampu di Desa Saumanganya	Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	30	Unit	-	-
169	11-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Pengadaan Bantuan Pembangunan Rumah untuk masyarakat idak mampu di Desa Taikako	Desa Taikako Kecamatan Sikakap , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	15	Unit	-	-
170	11-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Pengadaan Bantuan Mesin Meja Kayu Kombinasi Serba Guna potong dan Ketam untuk Kelompok UMKM KARONIET	Dusun Biu-Biu Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	15000000	Rupiah	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
171	11-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Pengadaan Bantuan Mesin Diasel Yanmar TF 155 untuk UMKM Karoniet	Dusun Biu-Biu Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	45000000	Rupiah	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
172	11-03-2026	Alisandre Zalukhu	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan alat pertanian Mesin Senso Chainsaw Dusun Pinatetek Desa Sikakap	Dusun Pinatetek Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	19	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
173	11-03-2026	Alisandre Zalukhu	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan alat pertanian Mesin Senso Chainsaw Dusun Bakat Monga Desa Sikakap	Dusun Bakat monga Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	12	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
174	11-03-2026	Wahyu Setiadi	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Mesin tractor Pertanian	Desa Malakopa, Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	100000000	Rupiah	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
175	11-03-2026	Alisandre Zalukhu	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan alat pertanian Mesin Senso Chainsaw Dusun Seay Lama Desa Sikakap	Dusun Seay Lama Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
176	11-03-2026	Alisandre Zalukhu	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan alat pertanian Mesin Senso Chainsaw Dusun Manganjo Desa Saumanganya	Dusun Manganjo Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
177	11-03-2026	Alisandre Zalukhu	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan alat pertanian Mesin Senso Chainsaw Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara	Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
178	11-03-2026	Alisandre Zalukhu	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan alat pertanian Mesin Senso Chainsaw Dusun Matobat Desa Sinaka	Dusun Matobat Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
179	11-03-2026	Julius Tairarak, S. Pt	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pengadaan Bantuan Meteran Listrik 900 Watt untuk Dusun Simalibbeg - Muntei Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat	Dusun Simalibbeg - Muntei Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50	Unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
180	11-03-2026	Alisandre Zalukhu	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan	Pengadaan bibit ternak sapi Pesisir Dusun Polaga seay baru Desa Sikakap	Dusun Polaga Seay Baru Desa Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			pertanian								Kota Lain
181	11-03-2026	Julius Tairarak, S. Pt	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Pembangunan Gereja ST. Maria	Dusun Paipejat Hulu Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	200000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
182	11-03-2026	Julius Tairarak, S. Pt	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Pembangunan Gereja GKPM Dusun Sakaladat Desa Simalegi	Dusun Sakaladat Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
183	11-03-2026	Alisandre Zalukhu	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan bibit ternak sapi P.O Dusun Polaga Seay Lama	Dusun Polaga Seay Lama, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	12	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
184	12-03-2026	Alisandre Zalukhu	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Bantuan bedah rumah Desa Sikakap	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	25	Unit	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
185	12-03-2026	Alisandre Zalukhu	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan pembangunan rumah ibadah Dusun Seay Lama Desa Sikakap	Dusun Seay Lama Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	60000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
186	12-03-2026	Alisandre Zalukhu	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan pembangunan rumah ibadah Dusun Kautek Desa Taikakao	Dusun Kautek Desa Taikakao, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
187	12-03-2026	Alisandre Zalukhu	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Pengadaan jalan Lingkungan Dusun Berkat Lama Pinatektek Desa Sikakap	Dusun Berkat Lama Pinatetek Desa Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	400000000	Rupiah	-	-
188	12-03-2026	Alisandre Zalukhu	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Pengadaan jalan Baiko (Akses Perekonomian) Dusun Sibaibai Desa Sikakap	Dusun Sibaibai Desa Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	450	Meter	-	-
189	12-03-2026	Alisandre Zalukhu	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan pengadaan mesin Tempel Boat 8 PK Yamaha Dusun Mapoupou Desa Makalo	Dusun Mapoupou Desa Makalo, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	17	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
190	12-03-2026	Alisandre Zalukhu	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan pengadaan mesin Tempel Boat 8 PK Yamaha Dusun Sibaibai Desa Sikakap	Dusun Sibaibai Desa Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	14	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
191	14-03-2026	Manual Simamora	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan Alat Tangkap Nelayan Mesin Boat 5 PK untuk Kelompok Nelayan MARLIN Dusun CAMP Desa Tuapejat	Dusun Camp Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
192	14-03-2026	Manual Simamora	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan Alat Tangkap Nelayan Berupa Mesin Boat 5 PK untuk Kelompok Nelayan RORO SIBAU Dusun Turonia Desa Tuapejat	Dusun Turonia Desa Tuapejat Kecamatan SiporaUtara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
193	14-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Mesin Perontok Padi 1 Unit dan tangki	Dusun Ma. Sigep Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				Semprot 17 Unit untuk menunjang percepatan proses produksi padi untuk kelompok tani SIGURUK - GURUK							
194	15-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan Alat Musik untuk Gereja Dusun Mapinang Utara Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara	Dusun Mapinang Utara Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	55000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
195	15-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Mesin Sinso Kecil Merek STHILL untuk kelompok tani RORO SIMERU	Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	6	UNIT	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
196	16-03-2026	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan untuk Masjid AL-WAHIDIN Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan	Muara siberut, Kecamatan Siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	500000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
197	16-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Bibit Kelapa untuk Desa Taikako Kecamatan Sikakap	Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	5000000	Batang	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
198	16-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Dana untuk Penebangan Kayu dan dan pembersihan lahan untuk peremajaan kelapa untuk kelompok tani Desa Taikako Kecamatan Sikakap	Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
199	16-03-2026	Gerson	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan Mesin Tempel 5 PK untuk Kelompok Nelayan Malabbaet	Dusun Malabbaet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
200	16-03-2026	Manual Simamora	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, pemanfaatan olahraga	Pengadaan Bantuan Dana Pembinaan OLah Raga untuk Forki	Jalan tuapejat KM 6 gang kedongdong Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	50000000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
201	16-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Dana Penanaman bibit kelapa pada kegiatan peremajaan untuk kelompok tani desa Taikako Kecamatan Sikakap	Desa Taikako Kecamatan Sikakap , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
202	16-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Pengadaan Bantuan Pembangunan Rumah P untuk Masyarakat Tidak Mampu di Desa Sikakap	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	20	Unit	-	-
203	16-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Bibit Kelapa untuk Peremajaan Kelapa untuk Kelompok Tani TOILET KILIBET BAGA	Dusun Pinairuk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	2500	Batang	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
204	16-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan Mesjid Al Abrar pembangunan tambah Panjang Mesjid dan cor Perkarangan Mesjid	Desa Mongan Paula Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	115	Meter	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
205	16-03-2026	Hendrikus Erik	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan di Dusun Batjoja	Dusun Batjoja Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	200000000	Rupiah	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
206	16-03-2026	Hendrikus Erik	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan di Dusun Simaonaibaga	Dusun Simaonaibaga Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	200000000	Rupiah	-	-
207	16-03-2026	Hendrikus Erik	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan di Dusun Puro I	Dusun Puro I Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	200000000	Rupiah	-	-
208	16-03-2026	Hendrikus Erik	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan Sarpras kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan,Pengaaan Obat, Rehap Puskesmas/RS, Layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Pengadaan Bantuan Perbaikan Pustu TULOULAGGO karena sudah rusak berat	Dusun Tuloulaggo Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	Verifikasi TAPD	200000000	Rupiah	400000000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
209	16-03-2026	Hendrikus Erik	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan Sarpras kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan,Pengaaan Obat, Rehap Puskesmas/RS , Layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Pengadaan Bantuan Perbaikan Pustu Maileppet karena sudah rusak berat	Dusun Siritengah Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	Verifikasi TAPD	200000000	Rupiah	400000000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
210	16-03-2026	Hendrikus Erik	Pembangunan /pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan /pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan /pemeliharaan embung pertanian, pembangunan /pemeliharaan DAM parit pertanian	Pengadaan Perbaikan/rehabilitasi jalan pertanian Malupetpet	Dusun Puro I Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	200000000	Rupiah	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
211	16-03-2026	Hendrikus Erik	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan Bibit Kelapa untuk masyarakat desa Maileppet	Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	300000000	Rupiah	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
212	16-03-2026	Hendrikus Erik	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan Mesin Boat 5 PK UNTUK kELOMPOK Nelayan GABAT PURIMANUAET	Desa Nemnemleleu kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	7	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
213	16-03-2026	Hendrikus Erik	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan Mesin Boat 15 PK untuk kelompok nelayan BULAUBUGGE	Dusun Gotap Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
214	16-03-2026	Hendrikus Erik	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Bantuan mesin boat 5 PK untuk Kelompok nelayan SETCET OJUK	Dusun Pasakiat Desa Maileppet kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	15	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
215	16-03-2026	Hendrikus Erik	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan pembangunan rumah ibadah gereja GBI Peipei	Dusun Peipei Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
216	16-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pembangunan Talud untuk Gereja IFGF Desa Mongan Paula	Desa Mongan Pala Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	100	Meter	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
216	16-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan Pagar Besi untuk Gereja IFGF Desa Mongan Paula 30 x 50 Meter	Desa Mongan Paula Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1500	Meter	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
217	16-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan tambah lebar Gereja IFGF Desa Mongan Paula	Desa Mongan Paula Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	12	Meter	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
218	16-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan Talud untuk Gereja GKPM MoNGAN Paula	Desa Mongan Paula Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	100	Meter	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
219	16-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pembangunan Pagar Geraja untuk gereja khatolik ST. BARTOLEMEUS STASI Mongan Paula	Desa Mongan Paula Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	70	Meter	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
220	16-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pembangunan Talut untuk gereja khatolik ST. BARTOLEMEUS STASI Mongan Paula	Desa Mongan Paula, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	100	Meter	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
221	16-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pembangunan Sekretariat untuk gereja Khatolik ST. BARTOLEMEUS STASI Mongan Paula 6x9 meter	Desa Mongan Paula Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	54	Meter	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
222	16-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja baru untuk gereja BHAI	Desa Mongan Paula Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1	Unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
223	16-03-2026	Gerson	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Pembangunan ruas jalan lingkungan untuk dusun baganlelet desa sioban	Dusun Baganlelet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	200	Meter	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
224	17-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pembangunan /pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan /pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan /pemeliharaan embung pertanian, pembangunan /pemeliharaan DAM parit pertanian	Pengadaan Bantuan Pembangunan Jalan Usaha tani unntuk Kelompok Simalambaen desa mongan Paula 500 Meter	Desa Mongan Paula Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	500	Meter	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
225	17-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pembangunan /pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan /pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan /pemeliharaan embung pertanian, pembangunan /pemeliharaan DAM parit pertanian	Pengadaan Bantuan Pembangunan Jalan Usaha Tani untuk kelompok Taobak Purun Desa Mongan Paula	Desa Mongan Paula Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1000	Meter	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
226	17-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pembangunan /pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan /pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan /pemeliharaan embung pertanian, pembangunan /pemeliharaan DAM parit pertanian	Pengadaan Pembangunan jalan usaha tani Kuklu (1.500 Meter)	Desa Mongan Paula Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1500	Meter	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
227	17-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pembangunan /pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan /pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan /pemeliharaan embung pertanian, pembangunan /pemeliharaan DAM parit pertanian	Pembangunan jalan usaha tani (jalan ekonomi) untuk Kelompok Lampuijang Desa Mongan Paula Kecamatan Siberut Utara	Desa Mongan Paula Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1500	Meter	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
228	17-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pembangunan pagar gereja gkpm Desa Mongan paula kecamatan Siberut Utara 30x50 M	Desa Mongan Paula kecamatan siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1500	Meter	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
229	17-03-2026	MELKI SAPOLENGGU	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pengadaan Bantuan alat transportasi berupa mesin pompong untuk alat transportasi menuju lokasi peternakan untuk kelompok peternakan kampung babi	Dusun Polipsoman Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	12	Unit	-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
230	17-03-2026	Adi Hamdani, S.A.P	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan Sarpras kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan,Pengaaan Obat, Rehap Puskesmas/RS , Layanan ibu bersalin,	Bantuan Pengadaan Perahu untuk Ambulance laut dan kelengkapannya	Dusun Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	Verifikasi TAPD	1	Unit	-	Operasional Pelayanan Puskesmas

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			peningkatan mutu layanan kesehatan								
231	17-03-2026	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan untuk Masjid Nurul Hidayah	Muara Siberut, Kecamatan Siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	500000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
232	17-03-2026	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	bantuan modal usaha alat transportasi (motor) untuk menunjang UMKM	Bantuan Sepeda Motor Bebek Baru untuk Kelompok Ojek PAREREKAT Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan	Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	10	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
233	17-03-2026	Hendrikus Erik	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan modal usaha desa saliguma	Desa Saliguma kecamatan siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	100000000	Rupiah	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
234	17-03-2026	Hendrikus Erik	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	modal usaha UMKM Desa Madobag	Dusun Madobog Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	15	Unit	-	-
235	17-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pengadaan Bantuan ALAT Musik Gereja GKPM PINIEL Tuapejat	Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara , Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	200000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
236	17-03-2026	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Bantuan Rumah Baru di Dusun Beubukku desa Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara	Dusun Beubukku Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	10	unit	-	-
237	17-03-2026	Wahyu Setiadi	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Alat Musik Speaker dan Orgen untuk Gereja GKPM Talopulei Desa Makalo	Desa Makalo, Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
238	17-03-2026	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	bantuan modal usaha alat transportasi (motor) untuk menunjang UMKM	Bantuan Sepeda Motor Bebek Baru untuk Kelompok Ojek KILAU Muara Siberut, Siberut Selatan	Muara Siberut kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	10	unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
											UMKM
239	17-03-2026	Julius Tairarak, S. Pt	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Pengadaan Pembangunan MCK untuk SDN 25 Simatalu Kecamatan Siberut Barat	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi TAPD	1	Rupiah	195000000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
240	17-03-2026	T. F Yohanes Pardede	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Pengadaan Bantuan Pembangunan Jalan Lingkungan di dusun Sikakap	Dusun Sikakap Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	200000000	Rupiah	-	-
241	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Rabat Beton Jalan Lingkungan Panitikat-Leleu Bailo (200 m) dan Drainase Dusun Makalo, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan	Dusun Makalo, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	200000000	Rupiah	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
242	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Rabat beton Jalan Lingkungan Leleu Bailo-Pugerakat (200 m) Dusun Makalo, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan	Dusun Makalo, Desa Makalo, kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	200000000	Rupiah	-	-
243	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Penyediaan perlengkapan prasarana jalan (penerangan jalan umum, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas)	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Makalo Dusun Makalo Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan	Dusun Makalo, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	200000000	Rupiah	-	-
244	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Cengkeh Leleu Sabeu-Bosua dan Maileppet-Ailou-Leleu Bukkuk Kelompok Tani LELEU LAGAI	Dusun Makalo, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Dikembalikan	135000000	Rupiah	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
245	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Kelapa Bere Sigoiso dan Bea Sabeu Kelompok Tani KABEI KERE Dusun Makalo, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan	Dusun Makalo, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Dikembalikan	135000000	Rupiah	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
246	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Cengkeh Leleu Bere Kelompok Tani KUOBA KAI Dusun Bere Desa Makalo, Kecamatan Pagai Utara	Dusun Bere, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Dikembalikan	135000000	Rupiah	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
247	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Kelapa Kelompok Tani KONAN Dusun Saumanganyak, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara	Dusun Saumanganyak, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Dikembalikan	135000000	Rupiah	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
248	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Kelapa Kelompok Tani NIRWANA Dusun Manganjo, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara	Dusun Manganjo, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Dikembalikan	135000000	Rupiah	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
249	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Kelapa Kelompok Tani UREP TOITET Dusun Mabulau Buggei, Desa Saumanganyak, Kecamatan	Dusun Mabulau Buggei, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Dikembalikan	135000000	Rupiah	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				Pagai Utara							
250	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Peremajaan Kelapa Kelompok Tani PURIMANUAIJATTA Dusun Pinaruk dan Beubukku, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara	Dusun Pinaruk dan Beubukkuk, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Dikembalikan	135000000	Rupiah	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
251	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Guluk-guluk, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara	Dusun Guluk-guluk, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	200000000	Rupiah	-	-
252	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Bedah Rumah Dusun Guluk-guluk Patutukat, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara (20 unit)	Dusun Guluk-guluk Patutukat, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	400000000	Rupiah	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
253	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Bedah Rumah Desa Matobe, Kecamatan Sikakap (20 unit)	Desa Matobe, Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	400000000	Rupiah	-	-
254	19-03-2026	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Rumah Ibadah GKPM Seay Lama Dusun Seay Lama, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap	Dusun Seay Lama, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	70000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
255	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni Dusun Berkat, Desa Sikakap	Dusun Berkat, Desa Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	5	unit	-	-
256	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni Dusun Beleraksok, Desa Malakopa	Dusun Beleraksok, Desa Malakopa, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	10	unit	-	-
257	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Pembangunan Rumah Layak Huni Dusun Malakopa, Desa Malakopa	Dusun Malakopa, Desa Malakopa, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	10	unit	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
258	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Rehab Gereja Katolik St. Maria Sikakap	Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	100000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
259	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Gereja GKPM Agus Lett Dusun Talopulei, Desa Makalo	Dusun Talopulei, Desa Makalo, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	70000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
260	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pembangunan Gereja GKPM Dusun Muntei Kecil, Desa Malakopa	Dusun Muntei Kecil, Desa Malakopa, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	60000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
261	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Pengadaan Kulkas Pendingin (Freezer) untuk Kelompok Usaha Durian Dusun Makukuet, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap	Dusun Makukuet, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	300000000	Rupiah	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
262	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Pengadaan Kulkas Pendingin (Freezer) Untuk Kelompok Usaha KARONANTA, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap	Desa Matobe, Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	300000000	Rupiah	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
263	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Rumah Ibadah Jemaat GKPM Mandiri Desa Saumanganyak , Kecamatan Pagai Utara	Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	100000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
264	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Gereja GKPM Seppungan Dusun Seppungan, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap	Dusun Seppungan, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	70000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
265	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan Sarpras kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan,Pen	Rehab Berat Polindes Dusun Beleraksok, Desa Malakopa, Kecamatan Pagai Selatan	Dusun Beleraksok, Desa Malakopa, Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	Verifikasi TAPD	199000000	Rupiah	400000000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			gaaan Obat, Rehap Puskesmas/RS , Layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan								
266	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan Sarpras kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan,Pengaaan Obat, Rehap Puskesmas/RS , Layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Pembangunan Polindes Dusun Bukku, Desa Muara Taikako, Kecamatan Sikakap	Dusun Bukku, Desa Muara Taikako, Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	199000000	Rupiah	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
267	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat (15 PK) Kelompok Nelayan KINABELA Dusun Aban Baga, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan	Dusun Aban Baga, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
268	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat (4 PK) Kelompok Nelayan ALUPETPET KOAT Dusun Limosua, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan	Dusun Limosua, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
269	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat (15 PK) Kelompok Nelayan PUSARAAT Dusun Makukuet, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap	Dusun Makukuet, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
270	22-03-2026	Isar Taileleu, S. PAK	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat (8 PK) Kelompok Nelayan TULU KABU Dusun Mangka Ulu, Desa Sinaka,	Dusun Mangka Ulu, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
				Kecamatan Pagai Selatan							
271	24-03-2026	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Katolik ST. Filipus Rasul Tahap II, Stasi Saikoat, Desa Simatalu Kec. Siberut Barat.	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	1	unit	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
272	24-03-2026	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Modal Usaha Kelompok UMKM MOILE AKE, Dusun Nang_Nang Desa Muara Sikabaluan Kec. Siberut Barat.	Dusun Nang-Nang Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
273	24-03-2026	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Modal Usaha Kelompok UMKM NANLI Dusun Betaet Selatan Desa Simalegi Kec. Siberut Barat	Dusun Betaet Selatan Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
274	24-03-2026	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan Sarpras kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan,Pengaaan Obat, Rehap Puskesmas/RS, Layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Bantuan BBM Rujukan Umum Puskesmas Simatalu.	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	Verifikasi TAPD	1	Paket	70000000	Operasional Pelayanan Puskesmas
275	24-03-2026	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan Sarpras kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan,Pengaaan Obat, Rehap Puskesmas/RS, Layanan ibu bersalin,	Bantuan BBM Rujukan Umum Puskesmas Simalegi.	Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	Verifikasi TAPD	1	Paket	70000000	Operasional Pelayanan Puskesmas

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			peningkatan mutu layanan kesehatan								
276	24-03-2026	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan Sarpras kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan,Pengaaan Obat, Rehap Puskesmas/RS, Layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Rehap Polindes Saikoat Beserta Penerangan Desa Simatalu	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	Verifikasi TAPD	1	Unit	500000000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
277	24-03-2026	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Perlengkapan Bengkel Kelompok BMS “MAJU TERUS” Dusun Nang_Nang Desa Muara Sikabaluan Kec. Siberut Utara.	Dusun Nang-nang Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
278	24-03-2026	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Mobiler 2 Unit SDN 29 Simatalu Desa Simatalu.	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat , Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi TAPD	2	Paket	76000000	Pengadaan Mebel Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
279	24-03-2026	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Bantuan lonceng dan Sound system Gereja Katolik Santo Filipus Rasul Stasi Saikoat Desa Simatalu	Dusun Saikoat Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kab.Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
280	24-03-2026	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Bantuan Kelompok Tani Berupa Mesin Pengupas Pinang dan Pembela Pinang Di Dusun Bojo Desa Simatalu	Dusun Bojo Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	2	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
281	24-03-2026	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat	Rehab Ruang Kelas SD Negri 29 Dusun Limu Desa Simatalu	Dusun Limu Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kab.Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Verifikasi TAPD	2	unit	200000000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
			Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
282	24-03-2026	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Pembangunan Jembatan LemBekeu Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kab.Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Verifikasi TAPD	40	Meter	1500000000	Pembangunan Jembatan
283	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja GKPM Jemaat PATMOS PAGU'GU' SAO	Dusun Pagu'gu/sao Desa Bosua Kecematan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	100000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
284	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja GKPM Jemaat Elsaday Mongan Bosua	Mongan Bosua, Desa Bosua KecematanSipora Selatan,Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	-	Validasi Mitra Bappeda	300000000	Rupiah	-	-
285	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja GKLI Bosua	Desa Bosua KecematanSipora Selatan,Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
286	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Pembangunan Pagar Rumah Ibadah Gereja GKPM Jemaat Iktus Sumber Air Saureinu	Dusun Sumber Air, Desa Saureinu KecematanSipora Selatan,Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	-	Validasi Mitra Bappeda	50000000	Rupiah	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
287	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Mobiler Rumah Ibadah Gereja GKPM Sagitsi	Dusun Sagitsi Desa Nemnemleleu, KecematanSipora Selatan,Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
288	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Bantuan Rumah Baru	Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan Kab.Kep.Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	30	Unit	-	-
289	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Penyediaan, Perbaikan, Prasarana dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Bantuan Rumah Baru	Desa Nemnemleleu Kecamatan Sipora Selatan Kab.Kep.Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	-	Validasi Mitra Bappeda	30	Unit	-	-

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
290	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Bibit Ternak Babi Kelompok Arau Kaku	Dusun Sagitsi Desa Nemnemleleu Kecamatan Sipora Selatan Kab.Kep.Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	-	Validasi Mitra Bappeda	20	Ekor	-	-
291	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Ternak Babi Kelompok	Dusun Nemnemleleu. Desa Nemnemleleu Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	50	Ekor	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
292	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Alat Sulingan Nilam Modern	Dusun Sagitsi Desa Nemnemleleu Kecamatan Sipora Selatan Kab.Kep.Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
293	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Alat Sulingan Nilam	Dusun Monga Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan Kab.Kep.Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	2	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
294	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan Bibit Kelapa	Dusun Berkat DesaTuapejat Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1000	Batang	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
295	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Kulkas Freezer	Dusun Camp, Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	20	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
296	24-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Pembangunan, Penyediaan, Pengelolaan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Bantuan Poli Tank Kapasitas 1 Ton	Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan Kab.kep.Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Verifikasi TAPD	75	Unit	202500000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
297	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Modal Usaha di Sipora Utara dan Sipora Selatan	Kecamatan Sipora Utara dan Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
298	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan hibah GKPM Kanaan Desa Beriulou	Desa Beriulou Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	100000000	Rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
299	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Bantuan Alat Perbengkelan Kelompok Bintang Montir Sipora Selatan	Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
300	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Bantuan Mesin Tempel 4 PK untuk kelompok Nelayan Purimanuajat	Desa Nemnem Leleu Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	11	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
301	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Bantuan Mesin tempel 15 PK untuk kelompok Nelayan Roroi Baga Dusun Matuptuman Desa Betumongan	Dusun Matuptuman Desa Betumonga Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	10	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
302	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Bantuan Mesin Tempel 4 PK untuk Kelompok Nelayan Pukatekat Sioban	Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	5	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
303	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Bantuan Mesin Tempel 4 PK Untuk kelompok Nelayan Taiobaket Mongan Bosua	Dusun Mongan Bosua Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	10	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
304	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Bantuan Mesin Tempel 4 PK untuk Kelompok nelayan Tonem Baga Dusun Pukarayat Desa Tuapejat	Dusun Pukarayat Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	10	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
305	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Bantuan Hibah Mesjid Ummul Mukminin Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan	Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	50000000	rupiah	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
306	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Bantuan Mesin Tempel 4 PK Kelompok Nelayan Simatalu Desa Simatalu Kecamatan Sipora Selatan	esa Mara Kecamatan Sipora Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	14	unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
307	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Bantuan Modal Usaha/ Alat, Pelatihan UMKM	Bantuan Modal Usaha (UMKM) di Desa Tuapejat dan Desa Beriulou	Kecamatan Sipora Utara Desa Tuapejat dan Kecamatan Sipora Selatan Desa Beriulou, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
308	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Bantuan Alat Perabot di Desa Beriulou dan Desa Betumonga	Kecamatan Sipora Utara Desa Betumonga dan Kecamatan Sipora Selatan Desa Beriulou, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	Paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
309	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Bantuan dua Kelompok ternak Ayam Petelur Omega	Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	1	Paket	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
310	25-03-2026	Juni Arman, S. IP	Bantuan Peralatan Alat/ Mesin Industri Kecil	Bantuan Alat Pertanian Mesin pemotong rumput dorong dan handtraktor dorong	Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	1	paket	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
311	25-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	bantuan modal usaha alat transportasi (motor) untuk menunjang UMKM	Bantuan Sepeda Motor dan Keranjang Kelompok UMKM Simatulu	Dusun Monga Selatan, Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan,Kab.Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	10	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	STATUS	VOL.	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
312	25-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	bantuan modal usaha alat transportasi (motor) untuk menunjang UMKM	Bantuan Sepeda Motor dan Kelengkapanny a Kelompok UMKM Simalainge	Dusun Monga Desa Mara Kecematan Sipora Selatan Kab.Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	4	Unit	-	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembang an Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM
313	25-03-2026	Ibrani Sababalat, SH	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Bantuan Mesin Boat 4 pk	Dusun Monga Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan,Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Kepulauan Mentawai , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Verifikasi TAPD	10	Unit	-	Pengembang an Kapasitas Nelayan Kecil

Tabel 4.41
Kamus Usulan Aspirasi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027

No	Permasalahan	Bidang Urusan
1	Pengadaan bantuan BBM untuk pasien rujukan di Puskesmas Taileleu	Dinas Kesehatan
2	Pengadaan Bantuan Perbaikan Pustu Tuloulaggo karena sudah rusak berat	Dinas Kesehatan
3	Pengadaan Bantuan Perbaikan Pustu Maileppet karena sudah rusak berat	Dinas Kesehatan
4	Bantuan Pengadaan Perahu untuk Ambulance laut dan kelengkapannya	Dinas Kesehatan
5	Rehab Berat Polindes Dusun Beleraksok, Desa Malakopa, Kecamatan Pagai Selatan	Dinas Kesehatan
6	Pembangunan Polindes Dusun Bukku, Desa Muara Taikako, Kecamatan Sikakap	Dinas Kesehatan
7	Bantuan BBM Rujukan Umum Puskesmas Simatalu.	Dinas Kesehatan
8	Bantuan BBM Rujukan Umum Puskesmas Simalegi.	Dinas Kesehatan
9	Rehap Polindes Saikoat Beserta Penerangan Desa Simatalu	Dinas Kesehatan
1	Bantuan Bibit Ternak Babi Kelompok “Arau Kaku”	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Pengadaan Bantuan bibit cabe keriting cap Startop yang 10 kg=10 bungkus, Pupuk MPK Mutiara 11 kg, tangki semprot Elektrik 11 Unit, Plastik Mulsa Pertanian (cap lonceng)=22 rol, Obat Hama/ Fungisida merek confidor ukuran 1 kg = 10 bungkus, Obat Hama/Insektisida, Curacoron 250 ml = 22 Bungkus, Obat Hama Fungisida Nativo 50 gram = 22 bungkus, Obat Herbisida(Roundap1 liter)= 1CH untuk Kelompok Tani “Ingin Jaya”	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	Bantuan Pengadaan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani/Ternak ”Lalatek Leleu” 10 Sapi Betina dan 1 Jantan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
4	Bantuan Pengadaan ternak Sapi untuk Kelompok Tani ”Malebak Koat” sebanyak 15 pasang, 15 Ekor Sapi Betina dan 15 Ekor Sapi Jantan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
5	Bantuan Pengadaan ternak Sapi untuk Kelompok Tani ”Mongan Mapadegat” sebanyak 15 pasang, 15 Ekor sapi Betina, 15 Ekor Sapi Jantan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
6	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Chainsaw Kecil merek STIHL untuk Kelompok Tani ”Tirik Bere”	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
7	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Chainsaw Kecil untuk Kelompok Tani ”Tri Masirpa”	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
8	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertanian Chainsaw Kecil Merek STHILL untuk kelompok Tani Ngena Akenen	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
9	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Chainsaw Kecil Merek STHILL untuk Kelompok Tani Ombaga	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
10	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Chainsaw Kecil Merek STHILL untuk Kelompok Tani Kerek Baga	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
11	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Chainsaw Kecil Merek STHILL untuk kelompok Tani Simaletci	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
12	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Chainsaw Kecil Merek STHILL untuk Kelompok Tani Pasikeli	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
13	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Tengki Semprot untuk Kelompok Tani “Wanita Ronnaken”	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
14	Pengadaan Bantuan bahan, Pembuatan kandang, Ternak dan Pangan untuk Kelompok Budidaya Ternak Babi Roiroi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
15	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian berupa Gerobak Sorong sebanyak 17 Unit, Tangki Semprot 17 Unit dan Roundap 17 Unit untuk Kelompok Tani Sibonjoik	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
16	Pengadaan Bantuan Transportasi Pertanian Berupa Mesin Pompong Merek Honda GX2000 Guna untuk Kelompok Tani Sigala-Galak yang digunakan untuk Tranportasi menuju lokasi Pertanian dan juga digunakan untuk mengangkut hasil pertanian berpa Pinang	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
17	Pengadaan Bantuan Alat Pertanian Shinsow Kecil merek STIHLL untuk Kelompok Tani Bina Desa	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
18	Pengadaan Bantuan Ternak Babi dan Pembuatan kandang untuk Kelompok Ternak Sakaleak Bersaudara	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
19	Pengadaan Bantuan Mesin Hand Traktor 2 Unit, Kultifator 2 Unit, Hand Sprayer elektrik 11 Unit, Insektisida 55 Liter, Fungisida 22 KG untuk Kelompok Tani Suka Maju	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
20	Pengadaan Bantuan Pembangunan Jalan Pertanian Untuk Kelompok Tani Sibatcauk Eruk	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
21	Bantuan pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Sitaimasusu	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
22	Bantuan pengadaan bibit ternak babi untuk Kelompok Ternak Babi Situarep	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
23	Pengadaan Bantuan Ternak Babi Untuk Kelompok Ternak Sinula sebanyak 14 Pasang, 14 babi Betina dan 14 Babi Jantan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
24	Pengadaan Bantuan Ternak Babi untuk kelompok Ternak Pusaraat Saina bantuan ternak Babi sebanyak 15 Pasang, 15 Ekor Babi Betina dan 15 Ekor babi Jantan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
25	Bantuan pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Musara Kasimaeru	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
26	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Manai Simaroro	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
27	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Mumunen	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
28	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simandaraingat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
29	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simuinek	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
30	Pengadaan Bantuan Ternak ITIK dan pembuatan Kandang untuk kelompok Ternak Itik Situlu	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
31	Pengadaan Bantuan Mesin shansow Kecil Merek Sthill untuk kelompok Tani Simakatuka	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
32	Pengadaan Bantuan Mesin Chainsaw kecil Merek Still untuk kelompok tani Barambang	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
33	Bantuan Alat Tangkap Nelayan Berupa Mesin Tempel 4 PK untuk Kelompok Nelayan Tulen Teiteisimalalatek	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
34	Pengadaan Bantuan Alat Tangkap Nelayan Mesin Tempel 15 PK untuk kelompok nelayan Makmur	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
35	Pengadaan Bantuan Mesin Tempel 4 PK untuk kelompok Nelayan Simatumu Polipsoman	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
36	Pengadaan Bantuan Mesin Tempel 15 PK untuk kelompok Nelayan Tepi Pantai	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
37	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan (rabo) untuk Kelompok Nelayan Simanja	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
38	Pengadaan Bantuan Mesin Tempel 15 PK untuk kelompok Nelayan Basiakenen	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
39	Pengadaan Bantuan alat tangkap Nelayan Mesin Tempel 15 PK untuk kelompok nelayan Pokamumu	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
40	Pengadaan Bantuan alat tangkap nelayan Mesin Tempel 15 PK untuk kelompok nelayan Takungan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
41	Bantuan pembangunan jalan pertanian persawahan Malupetpet sepanjaang 300 meter	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
42	Pengadaan Bantuan alat tangkap Nelayan mesin ttempel 15 PK untuk kelompok nelayan Mongan Tubeken	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
43	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simasingin	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
44	Pengadaan Bantuan mesin tempel 15 PK untuk kelompok Nelayan Anak Laut	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
45	Pengadaan bantuan alat tangkap ikan (rabo) untuk Kelompok Nelayan Cahaya Malam	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
46	Pengadaan bantuan mesin tempel 15 PK untuk Kelompok Nelayan Torisi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
47	Bantuan pengadaan mesin boat15 PK untuk Kelompok Nelayan Gurigak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
48	Pengadaan Bantuan Bibit Ternak Babi untuk masyarakat dusun Malabbaet	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
49	Pengadaan Bantuan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Ternak masyarakata Dusun Takkuman	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
50	Pengadaan Bantuan Ternak Babi untuk kelompok Tani Toro Laggok	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
51	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan mesin boat 15 PK untuk Kelompok Nelayan Dusun Kaleak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
52	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan mesin boat 15 PK untuk Kelompok Nelayan Dusun Lumago	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
53	Pengadaan bantuan alat tangkap nelayan, pompong untuk Desa Taileleu	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
54	Pengadaan Bantuan Mesin Tempel Boat Merek Yamaha 8 PK untuk Kelompok Nelayan Sungai Rimau	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
55	Bantuan pengadaan bibit ternak untuk Kelompok Ternak Sapi Siagou	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
56	Bantuan Pengadaan Mesin Boat (5 PK) untuk 1 kelompok nelayan Dusun Parabatu, Desa Makalo	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
57	Pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Tani Bailaket Sejahtera	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
58	Pengadaan bantuan mesin tempel 15 PK dan alat tangkap nelayan untuk Kelompok Nelayan Kamra	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
59	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Tani Peleteu	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
60	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Tani Bio	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
61	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Maju Bersama	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
62	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Mongan Oinan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
63	Bantuan Alat Pertanian (sinso) 10 KK Dusun Sabiret, Malakopa	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
64	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Sapi Teitei Leleu	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
65	Bantuan Alat Pertanian (sinso) 10 KK Dusun Purorogat, Desa Malakopa	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
66	Bantuan pengadaan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simaoba Paalei (KTSSP)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
67	Pengadaan bantuan bibit ternak sapi untuk Kelompok Ternak Sapi Simaeruk	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
68	Pengadaan bantuan mesin tempel 15 PK untuk Kelompok Mongan Simangkat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
69	Pengadaan bantuan bibit Kelapa sebanyak 2500 batang untuk kelompok Tani Roro Simeru	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
70	Pengadaan bantuan dana untuk penebangan kayu dan pembersihan lahan untuk kegiatan peremajaan kelapa Kelompok Tani Roro Simeru	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
71	Pengadaan Bantuan Dana untuk penanaman bibit kelapa pada kegiatan peremajaan kelapa untuk kelompok tani RORO SIMERU	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
72	Pengadaan bantuan mesin potong rumput merek sthill untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan dan produkdi hasil pertanian kelompok Tani Petak Berbagi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
73	Pengadaan Bantuan Sprayer Elektrik Knapsack Baterai 2 in 1 untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan dan produksi hasil pertanian kelompok tani Petak Berbagi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
74	Pengadaan Bantuan Dana untuk Penanaman Bibit Kelapa kelompok Tani Toilet Kilibet Baga	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
75	Pengadaan Bantuan Mesin Boat 4 PK untuk kelompok Nelayan Sopo Simaeru	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
76	Pengadaan Kapal Bagan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
77	Pembuatan Rumpun 4 bh	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
78	Pengadaan Bantuan Mesin Boat 4 PK untuk kelompok Nelayan Laprat Sibau	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
79	Bantuan alat pertanian Mesin Senso Chainsaw Dusun Pinatetek Desa Sikakap	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
80	Bantuan alat pertanian Mesin Senso Chainsaw Dusun Bakat Monga Desa Sikakap	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
81	Bantuan Mesin tractor Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
82	Bantuan alat pertanian Mesin Senso Chainsaw Dusun Seay Lama Desa Sikakap	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
83	Bantuan alat pertanian Mesin Senso Chainsaw Dusun Manganjo Desa Saumanganya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
84	Bantuan alat pertanian Mesin Senso Chainsaw Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
85	Bantuan alat pertanian Mesin Senso Chainsaw Dusun Matobat Desa Sinaka	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
86	Pengadaan bibit ternak sapi Pesisir Dusun Polaga seay baru Desa Sikakap	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
87	Pengadaan bibit ternak sapi P.O Dusun Polaga Seay Lama	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
88	Bantuan pengadaan mesin Tempel Boat 8 PK Yamaha Dusun Mapoupou Desa Makalo	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
89	Bantuan pengadaan mesin Tempel Boat 8 PK Yamaha Dusun Sibaibai Desa Sikakap	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
90	Pengadaan Bantuan Alat Tangkap Nelayan Mesin Boat 5 PK untuk Kelompok Nelayan Marlin Dusun Camp Desa Tuapejat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
91	Pengadaan Bantuan Alat Tangkap Nelayan Berupa Mesin Boat 5 PK untuk Kelompok Nelayan Roro Sibau Dusun Turonia Desa Tuapejat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
92	Pengadaan Bantuan Peralatan Pertanian Mesin Perontok Padi 1 Unit dan tangki Semprot 17 Unit untuk menunjang percepatan proses produksi padi untuk kelompok tani Siguruk - Guruk	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
93	Pengadaan Mesin Sinso Kecil Merek Sthill untuk kelompok tani Roro Simeru	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
94	Pengadaan Bantuan Bibit Kelapa untuk Desa Taikako Kecamatan Sikakap	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
95	Pengadaan Bantuan Dana untuk Penebangan Kayu dan dan pembersihan lahan untuk peremajaan kelapa untuk kelompok tani Desa Taikako Kecamatan Sikakap	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
96	Pengadaan Bantuan Mesin Tempel 5 PK untuk Kelompok Nelayan Malabbaet	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
97	Pengadaan Bantuan Dana Penanaman bibit kelapa pada kegiatan peremajaan untuk kelompok tani desa Taikako Kecamatan Sikakap	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
98	Pengadaan Bantuan Bibit Kelapa untuk Peremajaan Kelapa untuk Kelompok Tani Toilet Kilibet Baga	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
99	Pengadaan Perbaikan/rehabilitasi jalan pertanian Malupetpet	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
100	Pengadaan Bantuan Bibit Kelapa untuk masyarakat desa Maileppet	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
101	Pengadaan Bantuan Mesin Boat 5 PK untuk Kelompok Nelayan Gabat Purimanuaet	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
102	Pengadaan Bantuan Mesin Boat 15 PK untuk kelompok nelayan Bulaubugge	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
103	Pengadaan Bantuan mesin boat 5 PK untuk Kelompok nelayan Setcet Ojuk	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
104	Pengadaan Bantuan Pembangunan Jalan Usaha tani unntuk Kelompok Simalambaen desa mongan Paula 500 Meter	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
105	Pengadaan Bantuan Pembangunan Jalan Usaha Tani untuk kelompok Taobak Purun Desa Mongan Paula	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
106	Pengadaan Pembangunan jalan ekonomi Rubana (Sikendiri) 12 KM	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
107	Pengadaan Pembangunan jalan usaha tani Kuklu (1.500 Meter)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
108	Pembangunan jalan usaha tani (jalan ekonomi) untuk Kelompok Lampuijang Desa Mongan Paula Kecamatan Siberut Utara	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
109	Pengadaan Bantuan alat transportasi berupa mesin pompong untuk alat transportasi menuju lokasi peternakan untuk kelompok peternakan kampung babi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
110	Pengadaan Bantuan Mesin Threseher Kubata (Perontok gaba) untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Pengembangan dan hasil Produksi Pertanian untuk kelompok tani Petak Berbagi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
111	Pengadaan Bantuan Perbaikan jalan Pertanian di dusun Salappa	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
112	Pengadaan Bantuan Perbaikan Jalan pertanian di dusun Siguluguluk	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
113	Pengadaan Bantuan Pakan Ternak dan Obat-Obatan Ternak untuk Kelompok Ternak Itik Petelur Manai Sikerei Dusun Simalibbeg	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
114	Bantuan Mesin Boat (15 PK) Kelompok Nelayan Kinabela Dusun Aban Baga, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
115	Bantuan Mesin Boat (4 PK) Kelompok Nelayan Alupetpet Koat Dusun Limosua, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
116	Bantuan Mesin Boat (15 PK) Kelompok Nelayan Pusaraat Dusun Makukuet, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
117	Bantuan Mesin Boat (8 PK) Kelompok Nelayan Tulu Kabu Dusun Mangka Ulu, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
118	Jalan Pertanian Arah SDN 28 Simatalu Panjang 200 Meter, Dusun Limu Desa Simatalu Kec. Siberut Barat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
119	Bantuan Ternak Babi Kelompok	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
120	Bantuan Bibit Kelapa	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
121	Bantuan dua Kelompok ternak Ayam Petelur Omega	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
122	Bantuan Mesin Boat 4 pk	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
1	Belum adanya peralatan mesin ketam Perabot A	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
2	Pengadaan Bantua Peralatan Memasak untuk Kelompok UMKM Kerek Nganga	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengadaan Bantuan Peralatan Memasak untuk Kelompok UMKM Siobakta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4	Pengadaan Bantuan Peralatan Memasak untuk Kelompok UMKM ibu-ibu Usaha Mandiri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Bantuan Pengadaan Frezer untuk Kelompok UMKM Kerek Baga	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6	Pengadaan bantuan drum untuk penyulingan minyak nilam untuk Kelompok Nilam Simaroro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7	Bantuan pengadaan mesin ketam untuk Kelompok Kerajinan Loinak	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Pengadaan mesin domping (parutan sagu) dan peralatan lainnya untuk Kelompok Sagu Simabaga	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9	Pengadaan bantuan alat parutan sagu (mesin domping)untuk Kelompok Parutan Sagu Pusaraat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
10	Pengadaan bantuan mesin domping (alat parutan sagu) untuk kelompok Parutan Sagu Amiakenen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11	Bantuan modal usaha untuk Kelompok UMKM Peigu Karya	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
12	Pengadaan Bantuan alat Sulingan Nilam (Drom) untuk Masyarakat di dusun Bagan Lelet	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
13	Bantuan Modal usaha UMKM Malakopa (40 KK)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
14	Pengadaan bantuan untuk UMKM Muara Siberut	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
15	Pengadaan Bantuan Mesin Meja Kayu Kombinasi Serba Guna potong dan Ketam untuk Kelompok UMKM Karoniet	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16	Pengadaan Bantuan Mesin Diasel Yanmar TF 155 untuk UMKM Karoniet	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17	Bantuan Sepeda Motor Bebek Baru untuk Kelompok Ojek Parerekat Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
18	Bantuan modal usaha desa saliguma	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
19	Bantuan Sepeda Motor Bebek Baru untuk Kelompok Ojek Kilau Muara Siberut, Siberut Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
20	Pengadaan Kulkas Pendingin (Freezer) untuk Kelompok Usaha Durian Dusun Makukuet, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
21	Pengadaan Kulkas Pendingin (Freezer) Untuk Kelompok Usaha Karonanta, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
22	Bantuan Modal Usaha Kelompok UMKM Moile Ake, Dusun Nang_Nang Desa Muara Sikabaluan Kec. Siberut Barat.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
23	Bantuan Modal Usaha Kelompok UMKM Nanli Dusun Betaet Selatan Desa Simalegi Kec. Siberut Barat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
24	Bantuan Perlengkapan Bengkel Kelompok BMS “Maju Terus” Dusun Nang_Nang Desa Muara Sikabaluan Kec. Siberut Utara.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
25	Bantuan Kelompok Tani Berupa Mesin Pengupas Pinang dan Pembela Pinang Di Dusun Bojo Desa Simatalu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
26	Bantuan Alat Sulingan Nilam Modern	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
27	Bantuan Alat Sulingan Nilam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
28	Bantuan Kulkas Freezer	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29	Bantuan Modal Usaha di Sipora Utara dan Sipora Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
30	Bantuan Alat Perbengkelan Kelompok Bintang Montir Sipora Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
31	Bantuan Modal Usaha (UMKM) di Desa Tuapejat dan Desa Beriulou	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
32	Bantuan Alat Perabot di Desa Beriulou dan Desa Betumonga	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
33	Bantuan Alat Pertanian Mesin pemotong rumput dorong dan handtraktor dorong	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
34	Bantuan Sepeda Motor dan Keranjang Kelompok UMKM Simatulu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
35	Bantuan Sepeda Motor dan Kelengkapannya Kelompok UMKM Simalainge	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1	Bantuan Pembangunan Lapangan Bola Volly	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	Pengadaan Bantuan Alat Musik Orgen Tunggal untuk Organisasi Orgen Tunggal Rona Sonia	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Pengadaan Bantuan Sepeda Air untuk pemuda Dusun Paddarai	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4	Pembangunan sport Hall/ Lapangan Futsal Desa Malakopa	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
5	Pengadaan Bantuan Dana Pembinaan OLah Raga untuk Forki	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1	Pembangunan Jembatan LemBekeu Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Bantuan Poli Tank Kapasitas 1 Ton	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Bantuan Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 15 Betumonga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pengadaan Pembangunan MCK untuk SDN 25 Simatalu Kecamatan Siberut Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Mobiler 2 Unit SDN 29 Simatalu Desa Simatalu.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Rehab Ruang Kelas SD Negri 29 Dusun Limu Desa Simatalu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
1	Bantuan Rumah Baru	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
2	Pengadaan Bantuan Bedah Rumah untuk Desa Bukit Pamewa	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
3	Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Keret Baga)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
4	Bantuan Pengadaan Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
5	Bantuan Rehab Rumah Dusun Mabola, Sikakap	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
6	Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Parabatu 2 Paket	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
7	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Malakopa 2 Paket	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
8	Bantuan Rehab Rumah (20 KK) Desa Malakopa	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
9	Bantuan pengadaan jalan lingkungan Dusun Makukuet	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
10	Bantuan pengadaan jalan lingkungan Dusun Makukuet	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
11	Bantuan pengadaan jalan lingkungan Dusun Makukuet	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
12	Bantuan Pengadaan jalan lingkungan Dusun Maonai	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
13	Bantuan pengadaan Jalan lingkungan Dusun Makoddiai	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
14	Bantuan Pengadaan Jalan Lingkungan Dusun Pei-pei	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
15	Pengadaan Bantuan Pembangunan Rumah untuk masyarakat Tidak mampu di Desa Bulasat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
16	Pengadaan Bantuan Pembangunan Rumah untuk masyarakat tidak mampu di Desa Saumanganya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
17	Pengadaan Bantuan Pembangunan Rumah untuk masyarakat idak mampu di Desa Taikako	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
18	Bantuan bedah rumah Desa Sikakap	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
19	Pengadaan jalan Lingkungan Dusun Berkat Lama Pinatektek Desa Sikakap	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
20	Pengadaan jalan Baiko (Akses Perekonomian) Dusun Sibaibai Desa Sikakap	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
21	Pengadaan Bantuan Pembangunan Rumah P untuk Masyarakat Tidak Mampu di Desa Sikakap	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
22	Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan di Dusun Batjoja	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
23	Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan di Dusun Simaonaibaga	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
24	Pengadaan Perbaikan Jalan Lingkungan di Dusun Puro I	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
25	Pembangunan ruas jalan lingkungan untuk dusun baganlelet desa sioban	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
26	modal usaha UMKM Desa Madobag	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
27	Bantuan Rumah Baru di Dusun Beubukku desa Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
28	Pengadaan Bantuan Pembangunan Jalan Lingkungan di dusun Sikakap	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
29	Rabat Beton Jalan Lingkungan Panitikat-Leleu Bailo (200 m) dan Drainase Dusun Makalo, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
30	Rabat beton Jalan Lingkungan Leleu Bailo-Pugerakat (200 m) Dusun Makalo, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
31	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Makalo Dusun Makalo Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
32	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Guluk-guluk, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

No	Permasalahan	Bidang Urusan
33	Bedah Rumah Dusun Guluk-guluk Patutukat, Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara (20 unit)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
34	Bedah Rumah Desa Matobe, Kecamatan Sikakap (20 unit)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
35	Pembangunan Rumah Layak Huni Dusun Berkat, Desa Sikakap	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
36	Pembangunan Rumah Layak Huni Dusun Beleraksok, Desa Malakopa	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
37	Pembangunan Rumah Layak Huni Dusun Malakopa, Desa Malakopa	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
38	Bantuan Rumah Baru	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
1	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja GKPM Jemaat Elsaday Mongan Bosua	Sekretariat Daerah
2	Bantuan Pembangunan Pagar Rumah Ibadah Gereja GKPM Jemaat Iktus Sumber Air Saureinu	Sekretariat Daerah
3	Bantuan Pengadaan Perlengkapan Rumah Ibadah Santo Yosef	Sekretariat Daerah
4	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gedung Gereja IFGF Mongan Poula	Sekretariat Daerah

No	Permasalahan	Bidang Urusan
5	Pengadaan Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Santo Petrus Stasi Tiniti	Sekretariat Daerah
6	Pengadaan Bantuan Pembangunan Gereja GKPM Resort Pulipsoman	Sekretariat Daerah
7	Pengadaan Bantuan Renovasi Mesjid Al-Mujahidin	Sekretariat Daerah
8	Pengadaan Bantuan Pembangunan Pagar Lingkungan Gereja ST. Yohanes Dari Salip Stasi Polipsoman	Sekretariat Daerah
9	Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa/Mahasiswi Desa Sigapokna untuk 50 orang x 2.000.000	Sekretariat Daerah
10	Pengadaan Bantuan Alat Musik untuk Gereja GKPM Resort Pokai	Sekretariat Daerah
11	bantuan pembangunan musholla Darul Umum	Sekretariat Daerah
12	Bantuan Pembangunan Gereja GKPM Tumalei	Sekretariat Daerah
13	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Sekretariat Daerah
14	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Sekretariat Daerah
15	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Sekretariat Daerah
16	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Sekretariat Daerah
17	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 450 watt	Sekretariat Daerah
18	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Sekretariat Daerah
19	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Sekretariat Daerah
20	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 450 watt	Sekretariat Daerah
21	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 900 watt	Sekretariat Daerah
22	Pengadaan bantuan alat penerangan meteran listrik 450 watt	Sekretariat Daerah
23	Pengadaan bantuan pemasangan instalasi listrik	Sekretariat Daerah
24	Bantuan pembangunan rumah ibadah gereja GKPM pei-pei	Sekretariat Daerah
25	Pengadaan Bantuan Pembangunan Pagar Gereja GKPM Sioban Malabbaet	Sekretariat Daerah
26	Pengadaan Penambahan Bagunan Gedung Gereja GKPM Bagan Lelet	Sekretariat Daerah

No	Permasalahan	Bidang Urusan
27	Pengadaan Bantuan Lonceng untuk Gereja GKPM Matuptuman	Sekretariat Daerah
28	Bantuan pembangunan rumah ibadah gereja katolik pei-pei	Sekretariat Daerah
29	Pengadaan Bantuan Alat Penerangan Jalan di Dusun Malabbaet	Sekretariat Daerah
30	Pengadaan Pembangunan Rumah Ibadah GKPM Wilayah III Sioban	Sekretariat Daerah
31	Pengadaan Bantuan Pembangunan Pagar Gereja IFGF Malabbaet	Sekretariat Daerah
32	Pengadaan Pembangunan Podium / Mimbar Untuk Gereja GKLI Getsemane	Sekretariat Daerah
33	Pengadaan Bantuan Rumah Ibadah Gereja GKPM Jemaat Mabulau Buggei	Sekretariat Daerah
34	Bantuan pembangunan rumah ibadah gereja GPDI pei-pei	Sekretariat Daerah
35	Bantuan pembangunan rumah ibadah mesjid Taileleu	Sekretariat Daerah
36	Bantuan pembangunan rumah ibadah geraja GKPM Uma	Sekretariat Daerah
37	Bantuan Pembangunan rumah ibadah gereja katolik	Sekretariat Daerah
38	Bantuan pembangunan rumah ibadah gereja GPDI Taileleu	Sekretariat Daerah
39	Bantuan Pembangunan Gereja GKPM Parabatu Desa Makalo	Sekretariat Daerah
40	Pengadaan bantuan untuk surau Desa Muara Siberut	Sekretariat Daerah
41	Pengadaan bantuan untuk Mesjid Ugai Mase Pake	Sekretariat Daerah
42	Pengadaan bantuan untuk mesjid sarausau	Sekretariat Daerah
43	Pengadaan bantuan untuk mesjid saliguma	Sekretariat Daerah
44	Pengadaan bantuan untuk mesjid pei-pei	Sekretariat Daerah
45	Pengadaan bantuan untuk mesjid simoilaklak	Sekretariat Daerah
46	Bantuan Alat Musik Orgen dan Speaker di GKPM Mandiri Malakopa	Sekretariat Daerah
47	Bantuan Alat Musik orgen dan Speaker GKPM Sibaibai, Sikakap	Sekretariat Daerah
48	Bantuan Pembangunan Mesjid Pei Pei	Sekretariat Daerah
49	Bantuan Pembangunan rumah ibadah gereja gizi	Sekretariat Daerah
50	Pengadaan bantuan untuk gereja GKPM Mapinang	Sekretariat Daerah

No	Permasalahan	Bidang Urusan
51	Pengadaan bantuan untuk Gereja Katolik Mapinang	Sekretariat Daerah
52	Pengadaan bantuan untuk Gereja GKPM Kaleak	Sekretariat Daerah
53	Pengadaan untuk Gereja Katolik Lumago	Sekretariat Daerah
54	Pengadaan bantuan untuk gereja katolik Siribabag	Sekretariat Daerah
55	Pengadaan bantuan untuk gereja GKPM Sirorow	Sekretariat Daerah
56	Bantuan pembangunan rumah ibadah gereja GPR	Sekretariat Daerah
57	Pengadaan Bantuan Meteran Listrik 900 Watt untuk Dusun Simalibbeg - Muntei Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat	Sekretariat Daerah
58	Pengadaan Bantuan Pembangunan Gereja ST. Maria	Sekretariat Daerah
59	Pengadaan Bantuan Pembangunan Gereja GKPM Dusun Sakaladat Desa Simalegi	Sekretariat Daerah
60	Bantuan pembangunan rumah ibadah Dusun Seay Lama Desa Sikakap	Sekretariat Daerah
61	Bantuan pembangunan rumah ibadah Dusun Kautek Desa Taikakao	Sekretariat Daerah
62	Pengadaan Bantuan Alat Musik untuk Gereja Dusun Mapinang Utara Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara	Sekretariat Daerah
63	Bantuan untuk Masjid Al-Wahidin Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan	Sekretariat Daerah
64	Bantuan Pembangunan Mesjid Al Abrar pembangunan tambah Panjang Mesjid dan cor Perkarangan Mesjid	Sekretariat Daerah
65	Pengadaan Bantuan pembangunan rumah ibadah gereja GBI Peipei	Sekretariat Daerah
66	Pembangunan Talud untuk Gereja IFGF Desa Mongan Paula	Sekretariat Daerah
67	Bantuan Pembangunan Pagar Besi untuk Gereja IFGF Desa Mongan Paula 30 x 50 Meter	Sekretariat Daerah
68	Bantuan Pembangunan tambah lebar Gereja IFGF Desa Mongan Paula	Sekretariat Daerah
69	Bantuan Pembangunan Talud untuk Gereja GKPM Mongan Paula	Sekretariat Daerah
70	Pembangunan Pagar Geraja untuk gereja khatolik ST. Bartolemeus Stasi Mongan Paula	Sekretariat Daerah
71	Pembangunan Talut untuk gereja khatolik ST. Bartolemeus Stasi Mongan Paula	Sekretariat Daerah

No	Permasalahan	Bidang Urusan
72	Pembangunan Sekretariat untuk gereja Khatolik ST. Bartolemeus Stasi Mongan Paula 6x9 meter	Sekretariat Daerah
73	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja baru untuk gereja BHAI	Sekretariat Daerah
74	Pembangunan pagar gereja gkpm Desa Mongan paula kecamatan Siberut Utara 30x50 M	Sekretariat Daerah
75	Bantuan untuk Masjid Nurul Hidayah	Sekretariat Daerah
76	Pengadaan Bantuan Alat Musik Gereja GKPM Piniel Tuapejat	Sekretariat Daerah
77	Bantuan Alat Musik Speaker dan Orgen untuk Gereja GKPM Talopulei Desa Makalo	Sekretariat Daerah
78	Bantuan Rumah Ibadah GKPM Seay Lama Dusun Seay Lama, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap	Sekretariat Daerah
79	Bantuan Rehab Gereja Katolik St. Maria Sikakap	Sekretariat Daerah
80	Bantuan Gereja GKPM Agus Lett Dusun Talopulei, Desa Makalo	Sekretariat Daerah
81	Pembangunan Gereja GKPM Dusun Muntei Kecil, Desa Malakopa	Sekretariat Daerah
82	Bantuan Rumah Ibadah Jemaat GKPM Mandiri Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara	Sekretariat Daerah
83	Bantuan Gereja GKPM Seppungan Dusun Seppungan, Desa Matobe, Kecamatan Sikakap	Sekretariat Daerah
84	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Katolik ST. Filipus Rasul Tahap II, Stasi Saikoat, Desa Simatalu Kec. Siberut Barat.	Sekretariat Daerah
85	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja GKPM Jemaat Patmos Pagu'gu' Sao	Sekretariat Daerah
86	Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja GKLI Bosua	Sekretariat Daerah
87	Bantuan Mobiler Rumah Ibadah Gereja GKPM Sagitsi	Sekretariat Daerah
88	Bantuan hibah GKPM Kanaan Desa Beriulou	Sekretariat Daerah
89	Bantuan Hibah Mesjid Ummul Mukminin Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan	Sekretariat Daerah

Tabel 4.42

Usulan Musrenbang Tahun 2027

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
1	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pengadaan Kerambak Apung untuk pengembangan Rumput laut	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertania, dan Perikanan
		Pengadaan Jaring marlon	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	
		Permohonan Rumpon atau Rabo Desa 5 Titik, guna Mempermudah Para Nelayan untuk mendapatkan ikan dengan jumlah yang sangat banyak di beberapa titik yang di pasangkan rumpon, agar meningkatkan perekonomian Nelayan di wilayah Desa Muara Sikabaluan.	Desa Muara Sikabaluan	Siberut Utara	
2	Fasilitasi kemitraan kelembagaan/ usaha, bantuan pendanaan/ pembiayaan	memberikan bantuan pendanaan pada mahasiswa	Desa Muntei	Siberut Selatan	
3	Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, profil desa, penyusunan produk hukum desa dan manajem	Batas Desa belum Jelas dan belum akurat, sering kali menjadi konflik karena batas desa yang kurang jelas	Desa Taikako	Sikakap	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sehubungan dengan belum adanya penegasan batas desa, maka diperlukan fasilitasi dalam penyusunan dan penetapan batas desa melalui Peraturan Buapati atu SK Bupati.	Desa Mara	Sipora Selatan	
		Belum jelasnya perbatasan wilayah desa	Desa Silabu	Pagai Utara	
		Penataan dan Pengelolaan Wilayah, Pemekaran Desa Malakopa	Dusun Beleraksok dan Dusun Sabiret	Pagai Selatan	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
4	Peningkatan SDM Kesehatan	penambahan Tenaga kesehatan,1org Dokter Gigi, 1 org Rekam Medik, 14 org Bidan	Dusun Makoddiai	Siberut Barat Daya	Dinas Kesehatan
		Penambahan Tenaga Kesehatan 2 Org (Bidan + Perawat)	Dusun Sute' Uleu	Siberut Barat	
		Penambahan Tenaga Kesehatan (Bidan + Perawat)	Dusun Tengah Timur	Siberut Barat	
		Penambahan Tenaga Kesehatan (Bidan + Perawat)	Dusun Muara Selatan	Siberut Barat	
5	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Terdapat potensi ikan laut sehingga membutuhkan bantuan alat tangkap untuk kelompok nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapannya.	Desa Mara	Sipora Selatan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertania, dan Perikanan
		Masih banyak nelayan yang menggunakan sampan tradisional, dan tidak dapat menjangkau area yang dalam	Silabu	Pagai Utara	
		Pengadaan mesin 15 pk	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	
		Pengadaan Mesin boat 4 pk	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	
		Pengadaan Bagan Nelayan	Muara Siberut	Siberut Selatan	
6	Bantuan bibit ikan, bantuan pakan ikan bagi pembudidaya	Ekonomi masyarakat belum memadai	Dusun ugai, Madobag dan Rokdog	Siberut Selatan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertania, dan

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
	ikan kecil	Di Dusun Bukku Monga ada Kolam Peninggalan Perusahan dan Masyarakat di sana sudah membentuk kelompok untuk usaha Nelayan Darat Atau Pemeliharaan Ikan dikolam tersebut, dalam hal ini Pemerintah Desa Taikako menampung aspirasi masyarakat disana mereka mengusulkan Bantuan Pengadaan Keramba Apung dan Bibit Ikan	Desa Taikako, Dusun Bukku Monga	Sikakap	Perikanan
		Bantuan Pembudidayaan Lobster, Kepiting Kerapu, Rumput Laut	Desa Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	
		tidak adanya budidaya ikan air tawar sehingga kebutuhan pangan ikan masyarakat tidak tercukupi	Desa Sipora Jaya	Sipora Utara	
		Permohonan Bantuan kolam ikan air tawar untuk kelompok budidaya ikan tawar di dusun nang-nang.	Dusun Nang - Nang	Siberut Utara	
		Bantuan Bibit Lele, dikelola Bumdes Oinan Sangabaibai	Dusun Sumber Air	Sipora Selatan	
		Adanya permintaan konsumen	6 dusun desa muntei	Siberut Selatan	
		Banyaknya permintaan konsumen	6 dusun desa muntei	Siberut Selatan	
		kurangnya pakan ikan	6 dusun	Siberut Selatan	
7	Bantuan Modal Usaha/Alat, Pelatihan UMKM	Tidak adanya pabrik es di Desa Maileppet	Desa Maileppet	Siberut Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
		Tidak adanya pabrik garam didesa maileppet	Desa Maileppet	Siberut Selatan	
		kurangnya pengadaan alat kerja untuk unit	Desa Maileppet	Siberut Selatan	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		usaha perbengkelan			Perdagangan
		Dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat terutama Pelaku UMKM diperlukan untuk pelatihan/penyediaan dana stimulus guna mendukung peningkatan usaha bagi UMKM di lingkungan Desa Mara	Desa Mara	Sipora Selatan	
8	Bantuan pelaksanaan program kerja kepada organisasi kemasyarakatan	Perlunya adanya Pagar dan Menara Lonceng untuk Rumah Ibadah	Dusun Bojakan	Siberut Utara	Sekretariat Daerah
		Bantuan Keagamaan mesin Diesel Yanmar 105	Pujaringan	Pagai Utara	
9	Bantuan Peralatan alat/ mesin industri kecil	Terdapat potensi tanaman pinang milik warga maka sangat diperlukan bantuan pengadaan mesin penggiling pinang yang dimanfaatkan melalui wadah kelompok tani di Desa Mara	Desa Mara	Sipora Selatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Mesin Huller yang sangat dibutuhkan di pertanian khusunya pertanian sawah	Dusun Tiniti	Siberut Barat	
		Mesin Penggiling Daging, Penggiling Sagu	Desa Tuapejat	Sipora Utara	
		Bantuan Mesin Pengupas dan Pembela Pinang 36 Psg	Se- Desa Saumanganya	Pagai Utara	
		Bantuan Mesin Heler 1 Unit	Dusun Pututukat	Pagai Utara	
		Pengadaan Mesin Handtraktor 5 Unit	Pusat Desa	Pagai Utara	
		Bantuan Mesin Hantraktor 2 Unit	Guluk-guluk Ruba	Pagai Utara	
		Pengadaan Alat Pertanian 24 ha	Mapianang Utara	Pagai Utara	
		Pengadaan Mesin Rumput 10 Unit	Guluk guluk	Pagai Utara	
		Pengadaan Mesin Senso 10 Unit	Guluk guluk	Pagai Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Bantuan Perlengkapan alat Musik dan Sonsistem Gereja GKPM Jemaat Mapinang Utara	Mapinang Utara	Pagai Utara	
		Pengadaan Motor Viar	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	
		Permohonan Ginset Rumah Pengolahan Ikan Asin Dusun Bose, Guna Meningkatkan Pengolahan Ikan Asin pada Penggunaan Sumber Daya Listrik.	Dusun Bose	Siberut Utara	
		Permohonan Peningkatan Standarisasi Rumah Pengolahan Ikan Asin Dusun Bose, agar rumah pengolahan ikan asin dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memenuhi standar dalm pengolahan oleh kelompok Nelayan Dusun Bose .	Dusun Bose	Siberut Utara	
		Belum tersedianya mesin pelet	6 Dusun	Siberut Selatan	
		Pengadaan alat industri	Dsusn Toktuk, Bekkeiluk Puro 2, Salappak	Siberut Selatan	
10	Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, profil desa, penyusunan produk hukum desa dan manajem	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa,profil Desa dan Penyusunan produk Hukum Desa	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Batas-batas Desa dan Dusun belum maksimal	Desa Sikakap	Sikakap	
		Keterbatatasan tenaga ahli dan anggaran di pedesaan	Desa Beriulou	Sipora Selatan	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Batas Wilayah Desa Tuapejat	Desa Tuapejat	Sipora Utara	
11	Fasilitasi pengelolaan pelayaran antar pulau	Tidak tersedianya alat transpotasi di desa sagulubbeg berupa kapal antar pulau dan sering terjadinya kecelakaan laut dengan longboat yang memakan banyak korban	Desa Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		Pembangunan Kantor Perhubungan Mabukku	Dusun Peipei	Siberut Barat Daya	
		Pembangunan Lampu Suar Peipei, Taileleu, Roniki, Panaggalat, Pulau Niau	Desa Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	
		Rehabilitas Dermaga Taileleu	Dusun Kirip	Siberut Barat Daya	
		Permohonan Jadwal Kapal Mentawai Fast Antar Pulau Khusus Taileleu, Malilimok, Sagulubbek	Desa Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	
		Pengaktifan Kapal antar Pulau	Dusun Magilik	Siberut Barat Daya	
12	Fasilitasi pengelolaan trasportasi umum (angkutan darat)	Mobil Bumdes	dusun timur	Siberut Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		tidak adanya mini bus di Maileppet	Desa Maileppet	Siberut Selatan	
		Pengadaan Mobil untuk Transportasi Anak Sekolah (Taileleu-Peipei)	Desa Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	
		Masih banyak warga yang belum ada kendaraan	Silabu Huntap	Pagai Utara	
		Pengadaan Transportasi Bus Mini untuk Anak sekolah SMA dan SMP	Manganjo	Pagai Utara	
		Menekan angka kecelakaan lalu lintas. Meningkatkan standar kelayakan kendaraan	Puskesmas Desa Saibi Samukop	Siberut Tengah	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		dan kompetensi pengemudi. Menciptakan sistem transportasi yang tertib dan teratur			
13	Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Setiap hujan deras tempat dimana masyarakat bertani pasti tergenang air dengan ketinggian 1 m,maka dengan ini perlu ada pembangunan irigasi untuk menghindari genangan air.	Dusun Gegetaet	Sipora Selatan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertania, dan Perikanan
		Susah nya masyarakat petani sawah untuk mendapat kan air	dusun tiniti	Siberut Barat	
		Pembangunan Irigasi	Dusun Mapadegat	Sipora Utara	
		Pembangunan Intek	Biu biu	Pagai Utara	
		Lanjutan Pembangunan Irigasi 800 M	Manganjo	Pagai Utara	
		Pembangunan Saluran Pembuangan 1.000 M	Biu biu	Pagai Utara	
		Penambahan Saluran Perairan 500 M	Biu biu	Pagai Utara	
		Pembangunan Pipanisasi 800 M	Tunang Tuggut	Pagai Utara	
		Pembangunan Irigasi setiap Kelompok Tani Desa Saureinu	Dusun Sumber Air, Dusun Bailo	Sipora Selatan	
14	Pelatihan keterampilan ekonomi kreatif	Pelatihan Petanian Lapangan	Muara Siberut	Siberut Selatan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		keterbatasana Sumber Daya Manuasia dalam hal pengetahuan tentang Ekonomi Kreatif di Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, perlu adanya pelatihan keterampilan ekonomi kreatif sesuai dengan	Dusun Bukit Subur, Dusun Subur Makmur, Dusun Pamewa Indah	Sipora Utara	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		kondisi dan ketersediaan sumberdaya yang ada di desa.			
15	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata	Melihat bahwa nilai Kebudayaan masyarakatnya Desa Taikako mulai redup, dan ingin menumbuhkan kembali dengan membangun sanggar Budaya/Seni yang berlokasi di Silaoinan, karena sebagian besar peradaban budaya masyarakat desa taikako lahir dari silaoinan, dalam hal ini Pemerintah Desa Taikako mengusulkan untuk Pembangunan Sanggar Budaya di Silaoinan	Desa Taikako, Dusun Silaoinan	Sikakap	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Melihat bahwa nilai Kebudayaan masyarakatnya Desa Taikako mulai redup, dan ingin menumbuhkan kembali dengan membangun sanggar Budaya/Seni yang berlokasi di Silaoinan, karena sebagian besar peradaban budaya masyarakat desa taikako lahir dari silaoinan, dalam hal ini Pemerintah Desa Taikako mengusulkan untuk Pembangunan Sanggar Budaya di Silaoinan	Desa Taikako, Dusun Silaooinan	Sikakap	
		tidak adanya destinasi wisata di Desa Maileppet	Desa Maileppet	Siberut Selatan	
		Pengadaan Moring, Untuk Kirip, Peipei, Ibay, Roniki, niau, Jujuat	Desa Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Terdapat potensi wisata desa seperti kuliner, hutan dan pertanian yang bisa berdampak peningkatan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana	Desa Mara	Sipora Selatan	
		Perlu membangun akses jalan menuju tempat wisata	Silabu menuju Resort	Pagai Utara	
		Pembangunan Destinasi Wisata Alam dan Destinasi Wisata Bahari	Mapiang Utara dan Saumanganya Rua oinan	Pagai Utara	
		Belum ada nya MCK dilokasi UMKM	Dusun mangaungau dan bubuakat	Sikakap	
		Pembangunan Pariwisata Pantai	Muara Siberut	Siberut Selatan	
		wisata air terjun bat jingaik susah diakses	bekkeilu	Siberut Selatan	
16	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	perlu pembangunan jembatan untuk penghubung akses Ekonomi Masyarakat	Dusun Panepuat	Sipora Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		belum ada pembangunan jalan untuk akses ekonomi sehinga masyarakat sulit membawa hasil pertanian	Dusun Gegetaet	Sipora Selatan	
		Pembangunan Jembatan Sibalublub, Poubeken, Rubana	Dusun Barat, Desa Mongan Poula	Siberut Utara	
		Pembangunan Jalan Pertanian Sikendiri	Dusun Barat, Desa Mongan Poula	Siberut Utara	
		Pembangunan Jembatan Bagat Soumang	Jembatan Soumang,	Pagai Selatan	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		(Dusun Bulasat Baru menuju ke kampung Bulasat Lama) dengan kondisi jembatan saat ini sudah tidak bisa di akses/digunakan lagi.	Dusun Bulasat, Desa Bulasat		
		Pengerasan jalan dari Dusun Mapinang sampai Dusun Limosua. Hingga saat ini masyarakat masih menggunakan jalan setapak.	Dusun Mapinang sampai Dusun Limosua, Desa Bulasat	Pagai Selatan	
		Penerobosan jalan dari Dusun Limosua sampai Dusun Surat Aban. Sampai saat ini belum ada jalan darat dari Dusun Limosua menuju Dusun Surat Aban. Masyarakat masih menempuh jalur laut.	Dusun Limosua sampai Dusun Surat Aban, Desa Bulasat	Pagai Selatan	
		Pembangunan Jembatan di Dusun Lakkau. Jembatan yang digunakan saat ini sudah roboh dan tidak layak pakai. keseharian masyarakat berjalan langsung di dalam sungai dan jika air sungai sedang keruh, jalan tersebut tidak dapat dilalui.	Dusun Lakkau, Desa Bulasat	Pagai Selatan	
		Jalan Pertanian	Dusun Pukarayat	Sipora Utara	
		Belum adanya Plat Dueker/Polongan	Desa Maileppet	Siberut Selatan	
		Belum adanya Akses darat dari Pusat Kecamatan ke Desa	Matotonan	Siberut Selatan	
		Peningkatan Jalan Trans Malancan - Barambang sepanjang 5 KM sekaligus Pembangunan Jembatan 3 Titik	Barambang - Malancan	Siberut Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Pembangunan Jalan Perumahan Dinas PNS	Dusun Muara	Siberut Selatan	
		Pengecoran Jalan Muara Siberut-Katurei	Dusun Puro	Siberut Selatan	
		Pembangunan TPT Batpeigu	Dusun Peigu	Siberut Selatan	
		Belum adanya Akses Jalan dan Jembatan	Desa pariok	Siberut Selatan	
		Belum adanya jembatan	Muntei	Siberut Selatan	
		sulitnya akses penyebrangan	bekkeilu	Siberut Selatan	
		jembatan saat ini sudah rusak parah	muntei	Siberut Selatan	
		jalannya sudah hancur,akses wisata terhambat	peining buttet	Siberut Selatan	
		belum tersedianya jalan dari dusun pariok kebekkeilu dansalappa (13 km)	dusun pariok menuju bekkeilu/salappa	Siberut Selatan	
		jalan lingkar 3 dusun sudah berlubang dan hancur	Dusun pariok, Dusun Buttet dan Dusun Muntei	Siberut Selatan	
		jalan menuju Tunang/lancis rusak parah dan masih berbentuk tanah	Dusun Gobik	Sipora Selatan	
		Jalan rusak	Dusun Katiet-Kairiggi,Desa Bosua	Sipora Selatan	
		Akses Masyarakat dari Dusun silaoinan menuju trans suli dijangkau dikarenakan Jalan Jalur 3 menuju silaoinan sudah rusak, dalam hal ini Pemerintah Desa Taikako mengusulkan Pembangunan Jalan jalur 3 menuju Silaoinan sepanjang 800 m	Desa Taikako, Dusun Silaoinan, dan Dusun Trans I	Sikakap	
		Pembangunan Jembatan Besi 11 Buah untuk	Taileleu-Peipei	Siberut Barat	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Jalan Raya Lintas Taileleu-Peipei		Daya	
		Permohonan pembangunan badan jalan baru jalur Sikabaluan - pokai dengan panjang 7 KM	Desa Muara Sikabaluan	Siberut Utara	
		Permohonan Pembangunan Jalan Poros Sikabaluan -Pokai yang sudah Rusak Berat.	Desa Muara Sikabaluan	Siberut Utara	
		Sepanjang 42.000 meter Jalan Penghubung Antar Desa Simatalu Menuju Desa Simalegi Rusak Berat.	Jalan Penghubung Antar Desa Simatalu dan Desa Simalegi	Siberut Barat	
17	Pembangunan Jalur Evakuasi, Pengadaan Alat Peraga/petunjuk/ arah jalur evakuasi	Pembangunan Posko Bencana ukuran 7x10	Dusun Kirip, Maonai, Peipei, Panasalat	Siberut Barat Daya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Belum adanya alat peraga atau petujuk evakuasi tsunami	Dusun Ngaik	Sipora Selatan	
		Bantuan Alat Peraga dan Petunjuk Jalur Evakuasi Rawang Banjir Desa Saureinu	Desa Saureinu	Sipora Selatan	
		Rehab Jalur Evakuasi	Muara Siberut	Siberut Selatan	
		dengan adanya isu megatrust perlu adanya peralatan kesiapsiagaan bencana berupa penyediaan tenda pengungsian yang perlu disiapsiagakan di Desa, sebagai persiapan jika sewaktu-waktu terjadi bencana	Dusun Bukit Subur, Dusun Subur Makmur, Dusun Pamewa Indah	Sipora Utara	
18	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas	Rusak/Tidak Layak ditempati Oleh Tenaga Kesehatan	Dusun Panepuat	Sipora Selatan	Dinas Kesehatan

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
	Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Pembagunan Poskesdes di Dusun Mapinang. Hingga saat ini masyarakat di Dusun Mapinang belum mempunyai unit pelayan Kesehatan yang maksimal (POSKESDES) jika ada masyarakat yang sakit mereka harus pergi berobat ke poskesdes di Dusun Maonai yang jarak tempuhnya kurang lebih 7 km.	Dusun Mapinang, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan.	Pagai Selatan	
		Pembangunan Poskesdes di Dusun Asahan. Hingga saat ini masih belum ada pelayanan Kesehatan yang maksimal di Dusun Asahan (POSKESDES).	Dusun Asahan, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan.	Pagai Selatan	
		Pembangunan Poskesdes di Dusun Kinumbu.	Dusun Kinumbu, Desa Bulasat	Pagai Selatan	
		Tidak tersedianya akses kesehatan yang memadai dan juga kurangnya tenaga kesehatan di wilayah desa sagulubbeg	Desa Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	
		Alkes Penunjang: EKG, Infant Radiant Warmer, Rotator Plate, Tabung Oksigen. Alkes Laboratorium: Hematology Analyzer, Clinical Chemistry Analyzer, Urine Analyzer.	Desa Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	
		Pembangunan Rawat Inap (PUSTU) Taileleu	Dusun Mabuggei	Siberut Barat Daya	
		Rehabilitas Gedung Puskesmas (Prioritas)	Dusun Makoddiai	Siberut Barat Daya	
		Pengadaan Mobil Ambulance Untuk Desa	Desa Pasakiat	Siberut Barat	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Pasakiat Taileleu	Taileleu	Daya	
		Penambahan Tenaga Medis Bolotok (PNS)	Dusun Bolotok	Siberut Barat Daya	
		keterbatasan anggaran dana desa tidak mencukupi, terutama didesa terpencil dengan pendapatan Rendah. akses layanan kesehatan masyarakat yang masih terbatas.	Dusun Sasau, Desa Beriulou	Sipora Selatan	
		Di lingkungan Desa Mara terdapat Poskesdes yang sudah tidak layak pakai dengan kondisi bangunan/gedung rusak berat, sarpras yang tidak memadai bahkan pihak nakes tidak bisa menginap dan melaksanakan persalinan dengan terpaksa di rumah warga atau dirujuk di puskesmas. Sehingga hal diperlukan Pembangunan/Rehabilitasi guna untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat.	Dusun Mara Timur Desa Mara	Sipora Selatan	
		Banyak nya petugas kesehatan yang tidak memiliki rumah dinas, sehingga dapat mempengaruhi tidak efektifnya dalam melaksanakan tugas .	Puskesmas Sigapokna	Siberut Barat	
		Gedung Posyandu	Dusun Karoniet	Sipora Utara	
		Pengadaan Ambulan Laut	Desa Tuapejat	Sipora Utara	
		Pembangunan Poskesdes	Dusun Berkat	Sipora Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Masih sangat kurang fasilitas dan alat-alat kesehatan	Matotonan	Siberut Selatan	
		Belum tersedianya puskesmas	Desa silabu	Pagai Utara	
		Rehabilitas Pustu	Guluk guluk dan Mapinang Utara	Pagai Utara	
		Pengadaan Vitamin untuk GIZI buruk	Se Lingkungan Desa Saumanganya	Pagai Utara	
		Pembangunan Gedung Pustu 1 Paket	Beubukku	Pagai Utara	
		Pembangunan Gedung Pustu	Pututukat	Pagai Utara	
		Permohonan Rehab berat Pustu Dusun Bose, Dusun Muara dan Dusun Puran Desa Muara Sikabaluan karna setiap Pustus tersebut tidak layak lagi dipakai hampir semua bangunannya rusak berat	Dusun bose, Dusun Muara dan Dusun Puran	Siberut Utara	
		Permohonan pengadaan Obat - Obatan di setiap Pustu, karena terdapatnya kekurangan obat di Pustu Bose, Puran dan Pustu Pokai Desa Muara Sikabaluan	Dusun Bose, Dusun Puran dan Dusun Pokai	Siberut Utara	
		Pengadaan Bantuan Closed lengkap/Paket untuk Lansia/Tidak Mampu	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	
		Pembangunan rumah dinas petugas kesehatan /para medis Desa Katurei	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	
		Penambahan Tenaga Kesehatan Pustu	Desa Katurei	Siberut Barat	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
				Daya	
		Pembangunan Pustu Dusun Malilimok	Dusun Malilimok	Siberut Barat Daya	
		Rehap Pustu Dusun Toloulaggo	Dusun Toloulaggo	Siberut Barat Daya	
		Pemeliharaan Pembangunan Renovasi Puskesmas Muara Sikabaluan yang merupakan Akses Utama Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Siberut Utara.	Dusun Nang-Nang	Siberut Utara	
		Penanganan Konvergensi Stunting Desa pada semua bidang yang berkaitan dengan kesehatan anak dan lingkungan.	Dusun Nang - Nang	Siberut Utara	
		Permohonan pembangunan/peningkatan Pagar Lingkar Puskesmas Sikabaluan	Dusun Nang - Nang	Siberut Utara	
		Permohonan Pembangunan Talud Puskesmas sikabaluan	Dusun Nang - Nang	Siberut Utara	
		Pengadaan Obat di Polindes	Dusun Muara Selatan	Siberut Barat	
		Rehab Berat Gedung Polindes	Dusun Sute' Uleu	Siberut Barat	
		Pembangunan Rumah Dinas SMPN 3 Sipora	Dusun Sawahan	Sipora Selatan	
		Kondisi Puskesmas Yang Belum Memadai	DESA SIKAKAP	Sikakap	
		Rehabilitas Poskesdes / Pustu	Dusun Sawahan	Sipora Selatan	
		Bantuan Program Penderita TBC seperti Obat-obatan dan Pemenuhan Kebutuhan Gizi	Muara Siberut	Siberut Selatan	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Penderita			
		Pembangunan Gedung Rawat Inap 1 Unit Puskesmas Simatalu	Dusun Simalibbeg	Siberut Barat	
		Pengadaan Ambulance Desa Bantuan Jamban Air Bersih RTM Pembangunan Pagar Pustu Goisooinan Pembangunan Pagar Poskesdes Pogari	Desa Goisooinan	Sipora Utara	
		belum tersdianya bangunan pustu	dusun bekkeilu	Siberut Selatan	
		Pemeliharaan Polindes 2 Unit	Beleraksok dan Sabiret	Pagai Selatan	
		untuk Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan kami membutuhkan Perawat satu orang untuk Poskesdes Taraet karena saat ini hanya ada satu Bidan ketika ada urusan keluar Desa maka layanan kesehatan kosong.	Dusun Taraet Borsa	Sipora Utara	
		akibat gempa tahun 2010 mengakibatkan kerusakan bagunan puskesdes rusak para dan sampai sekarang belum direhap maka dari itu di menta perhatianpemerintah tentang bagunan puskesdes	Betumonga Barat	Pagai Utara	
		Mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dasar. Mengurangi jarak tempuh ke fasilitas kesehatan terdekat.	Dusun Totoet	Siberut Tengah	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Menjangkau daerah terpencil atau wilayah dengan akses terbatas			
		Mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dasar.	Dusun Simoilaklak	Siberut Tengah	
		Pagar besi Puskesmas Belum terbagun serta pustu belum direhabilitasi	Desa Madobag	Siberut Selatan	
		Fasilitas Kesehatan di Desa Taikako belum terbangun, seperti polindes belum ada, dan masyarakat butu untuk akses yang mudah dinjangkau berada di di Desa	Desa Taikako	Sikakap	
		Rehabilitas Gedung Pustu Bolotok	Dusun Bolotok	Siberut Barat Daya	
19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan Lingkungan Sekolah)	Fasilitas sarana prasarana sekolah SD 17 Taikako belum maksimal, seperti bangunan MCK belum ada, Ruang kelas/ Perpustakaan butu untuk Rehab, dan Penataan Halaman sekolah butu di perbaiki karena sering terendam pasang air laut	Desa Taikako, Dusun Kaute	Sikakap	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan Lingkungan Sekolah)	Pengadaan Paving Blok 1 paket Sekolah SMPN 1 Pagai Utara	Pusat Desa	Pagai Utara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Kursi dam Meja sekolah SDN 10 Saumanganya 50 psg	Beubukku	Pagai Utara	
		Permohonan Jalan lingkungan SMPN 1 Siberut	Dusun Nang-Nang	Siberut Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Utara, P.32 M , L.3,5 M, karena sampai saat ini jalannya masih jalan tanah berkerikil			
21	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya, Tanggul Sungai, Unit Air Baku, Kanal Banjir, Normalisasi Sungai, Pembangunan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Bendung Irigasi, Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	pantai sudah habis terkikis ombak hingga di pemukiman masyarakat	Desa Matobe	Sipora Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai terkususnya di Dusun Muara Taikako sering digenangi air Pasang Laut di pemukiman masyarakat karena kondisi pantai sudah mulai terkikis dan sistem drainase belum terbangun dengan baik, dalam hal ini Pemerintah Desa Taikako Mengusulkan untuk pembangunan Abrasi Pantai atau Reklamasi Pantai, dan Pembangunan Sistem Drainase yang baik.	Desa Taikako, Dusun Muara Taikako	Sikakap	
		Antisipasi Permasalahan Abrasi Pantai dan Banjir	Dusun Mapadegat, Desa Tuapejat	Sipora Utara	
		Setiap musim hujan akan mengakibatkan banjir sehingga berdampak pada pengikisan tanah (abrasi) pada area tepi sungai di permukiman warga. Dengan demikan sangat dibutuhkan pembangunan DAM sungai untuk menahan abrasi dengan proyeksi biaya @ Rp. 5.000.000.000	Desa Mara	Sipora Selatan	
		Talud Muara Mapadegat	Dusun Mapadegat, Desa Tuapejat	Sipora Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Normalisasi Sungai Dusun Sibeuotcun dalam meminimalisir terjadinya banjir	Dusun Sibeuotcun Desa Malancan	Siberut Utara	
22	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pembangunan tower telekomunikasi (4G). Hingga saat ini masyarakat di Dusun Limu, Dusun Mapinang, Dusun Limuosua, Dusun Lakkau, Dusun Surat Aban. masih belum mempunyai alat komunikasi, maka dari itu perlu dibangun tower (jaringan 4G) di Dusun Tersebut.	Dusun Limu sampai Dusun Surat Aban, Desa Bulasat	Pagai Selatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sebagian wilayah desa madobag belum ada jaringan Tower	Desa Madobag	Siberut Selatan	
		Penambahan Pembangunan Tower Besar Telkomsel (4G)	Dusun Maonai	Siberut Barat Daya	
		Pengadaan Jaringan Starlink Pustu Taileleu	Dusun Mabuggei	Siberut Barat Daya	
		Jaringan 4G yang masih terbatas,	Desa beriulou	Sipora Selatan	
		Tidak Ada Akses Komunikasi	Dusun Lubaga dan Bai'	Siberut Utara	
		Tower pembantu jaringan telkomsel	Dusun pukarayat	Sipora Utara	
		akses jaringan masih lemah	Matotonan	Siberut Selatan	
		Akses Komunikasi Terputus	Betaet Selatan	Siberut Barat	
		Jaringan yang tersedia saat ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat karna keterbatasan pemakaian	Huntap Silabu	Pagai Utara	
		Pengadaan Tower	Mabulaubuggei	Pagai Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Pengadaan Wifi di Pustu	Dusun Pinairuk, Mapinang dan Pujaringan	Pagai Utara	
		Pengadaan wifi SD 4 Unit	Manganjo, Pasapuat, Beubukku dan Mapinang Utara	Pagai Utara	
		Penambahan/Peningkatan Jaringan di Desa Sotboyak	Desa Sotboyak	Siberut Utara	
		Belum Adanya Jaringan Tower BTS untuk Komunikasi Masyarakat Di Dusun Puran Desa Muara Sikabaluan.	Dusun Puran	Siberut Utara	
		Permohonan Pengadaan Jaringan WIFI SDN 09 Muara Sikablauan yang merupakan Kebutuhan Utama saat ini dengan Metode Penilaian Pendidikan berbasis ANBK.	Dusun Muara	Siberut Utara	
		Permohonan Pengadaan jaringan Wifi untuk KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara, Guna Kelancaran Koordinasi dan Pemutakhiran Data Periodik Sekolah di wilayah Kerja Kecamatan Siberut Utara.	Dusun Nang - Nang	Siberut Utara	
		Permohonan Peningkatan Daya Wifi Puskesmas Muara Sikabaluan.	Dusun Nang - Nang	Siberut Utara	
		Pembangunan Tower BTS	Dusun Sute' Uleu	Siberut Barat	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Pengadaan Jaringan Komunikasi/Internet Tower Besar	Dusun Sirilanggai, Ukra Sibeuotcun dan Terekan Hulu	Siberut Utara	
		Pengadaan Starlink 1 Unit Dusun Saikoat	Dusun Saikoat	Siberut Barat	
		Masih terdapat wilayah dengan cakupan sinyal telekomunikasi yang terbatas atau blank spot, meningkatkan pemerataan akses komunikasi dan informasi, mendukung pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat, mendorong percepatan transformasi digital wilayah	Dusun Sirisurak dan Dusun Sua	Siberut Tengah	
		Pengadaan Starlink 1 Unit Dusun Limu	Dusun Limu	Siberut Barat	
		Belum ada Pembangunan Tower	Dusun Bulasat	Sipora Selatan	
		Pengadaan Starlink 1 Unit Dusun Bojo	Dusun Bojo	Siberut Barat	
		Pengadaan Starlink 1 Unit Dusun Muntei	Dusun Muntei	Siberut Barat	
		Pengadaan Starlink 1 Unit Dusun Simalibbeg	Dusun Simalibbeg	Siberut Barat	
		Pengadaan Tower Mini 1 Unit Dusun Paipajet Hulu	Dusun Paipajet Hulu	Siberut Barat	
		Pengadaan Starlink 1 Unit Dusun Paipajet Hulu	Dusun Paipajet Hulu	Siberut Barat	
		Pengadaan Starlink 1 Unit Dusun Suruan	Dusun Suruan	Siberut Barat	
		Pengadaan Starlink 1 Unit Dusun Limau	Dusun Limau	Siberut Barat	
		Pengadaan Tower Bisnis 1 Unit Pusat Desa Simatalu	Dusun Simalibbeg Desa Simatalu	Siberut Barat	
		Tower dan 4G (penambagahan kapasitas)	Desa Saliguma	Siberut Tengah	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		permasalahan sudah banyaknya masyarakat Desa Saliguma menggunakan seluler sehingga ini menjadi kebutuhan dalam berkomunikasi ketika sanak family jauh dari Desa.			
		Penguatan Jaringan Seluler 4G	Desa Goisooinan	Sipora Utara	
		Belum tersedianya jaringan Telekomunikasi	Dusun Bere, Mapoupou, Dusun Talopulei dan Parakbatu,	Pagai Selatan	
		4G penambahan kapasitas karna Desa Cimpungan menggunakan data seluler lelet untuk berkomunikasih susah	Dusun Puroddotan	Siberut Tengah	
		Pembangunan Jaringan telekomunikasi 2 unit	Dusun Muntei dan Sabiret	Pagai Selatan	
		Desa Sirilogui saat ini memiliki jaringan internet skala kecil tetapi tidak maksimal (jaringan internet tidak kuat. oleh karena itu kami mengusulkan untuk membangun tower besar agar jaringan internet lebih kuat.	Desa Sirilogui	Siberut Utara	
23	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, PembangunanPerpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan Perumahan Guru 3 unit (SDN 40 Bulasat). Sampai saat ini belum ada rumah dinas guru di SDN 40 Bulasat.	SDN 40 Bulasat, Dusun Kinumbu, Desa Bulasat	Pagai Selatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Gedung Sekolah SD sebanyak 6 lokal di Dusun Limosua. Sekolah yang digunakan saat ini sudah banyak ruang kelas	Dusun Limosua, Desa Bulasat	Pagai Selatan	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
	Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan	yang sudah tidak layak pakai.			
		Pembangunan Perumahan Guru SD (2 Unit) di Dusun Surat Aban Oba Simeru. Masih belum adanya perumahan guru di Dusun Surat Aban Oba Simeru.	Dusun Surat Aban Oba Simeru, Desa Bulasat	Pagai Selatan	
		Rehabilitas Gedung Sekolah SDN.25 Bolotok	Dusun Bolotok	Siberut Barat Daya	
		Rehabilitas Gedung Sekolah SDN 18 Pasakiat Taileleu	Dusun Makoddiai	Siberut Barat Daya	
		Rehap Gedung Perpustakaan SD 19 Katurei	Dusun Sarausau	Siberut Barat Daya	
		Pengadaan 6 Paket Mobiler Untuk SMPN 1 Siberut Barat	Dusun Betaet Selatan	Siberut Barat	
		Rehab Gedung Sekolah SMP YOS SUDARSO	Dusun Peigu	Siberut Selatan	
24	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	belum adanya drainase di Desa Maileppet	Desa Maileppet	Siberut Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	Pembangunan, Penyediaan, Pengelolaan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan PDAM (Air Bersih) dialirkan sampai kerumah-rumah warga. Hingga saat ini masyarakat masih menggunakan air hujan.	Dusun Maurau sampai ke Dusun Tapak Jaya, Desa Bulasat	Pagai Selatan	
		Pembangunan Air Bersih 5 Titik	Dusun Maonai, Dusun Makoddiai, Dusun Bolotok,	Siberut Barat Daya	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
			Dusun Kirip (Kampung Baru)		
		kurangnya sanitasi masyarakat	dusun salappa	Siberut Selatan	
		sulitnya air minum atau kebutuhan sehari hari sulit (pdam,pamsimas)	dusun pariok, dusun peining buttet dan dusun muntei	Siberut Selatan	
		akses air bersih belum memadai	Desa Sipora Jaya	Sipora Utara	
		Pengadaan Air Bersih 2.850M	Tunang Tuggut-Mabulaubuggei	Pagai Utara	
		karna banyak nya masyarakat penggunan Air PAM/PDAM di Desa Muara Sikabaluan, Kami Mohon Penambahan Pembangunan menara Tangki besar di Wilayah Dusun Nang-nang agar kapasitas warga terpenuhi.	Desa Muara Sikabaluan	Siberut Utara	
		Air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi	Dusun Pangasaat	Siberut Tengah	
26	Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Penanggulangan dan Pengelolaan Sampah	Muara Siberut	Siberut Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	belum adanya dermaga rakyat	Desa Maileppet	Siberut Selatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		perluasan Dermaga lama Desa Maileppet	Desa Maileppet	Siberut Selatan	
		Tambatan Perahu Nelayan	Dusun Tuapejat	Sipora Utara	
		Akses Dermaga/Tambatan Perahu	Dusun Mabekbek	Siberut Selatan	
		Belum tersedianya tambatan perahu	Polimo Silabu	Pagai Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Pembangunan Tambatan Perahu	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	
		Pembangunan Dermaga	Dusun Magilik	Siberut Barat Daya	
		Pelabuhan atau Dermaga Dua Dusun Bose merupakan Akses Utama Masyarakat yang saat ini sudah rusak berat dan tidak layak lagi	Dusun Bose	Siberut Utara	
		Untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi laut antarwilayah.	Desa Saibi Samukop	Siberut Tengah	
		Pembangunan Dermaga/Anggar panjang 12 x 6 meter Dusun Simalibbeg	Dusun Simalibbeg	Siberut Barat	
		Pembangunan Dermaga dengan volume 1 paket untuk melancarkan bersandarnya transportasi laut	Logpon Subelen	Siberut Tengah	
		Saat ini Desa Sirilogui tidak memiliki Dermaga.	Desa Sirilogui	Siberut Utara	
28	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/BPD	Aparatur Desa dan BPD masih membutuhkan pembinaan	Kantor Desa Silabu	Pagai Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
29	Pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	Lanjutan Pembangunan Dermaga Mabukku	Dusun Peipei	Siberut Barat Daya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
					dan Perhubungan
30	Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pembangunan Pabrik Pisang di Desa Bulasat. Banyak masyarakat di Desa Bulasat yang bertani pisang namun tidak ada pengelolaan atau pabrik pisang di Desa Bulasat yang mengelola pisang2 masyarakat tersebut, masyarakat lebih banyak menjual ke luar daerah dengan harga yang sangat murah.	Dusun Bulasat, Desa Bulasa	Pagai Selatan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertania, dan Perikanan
		Pembangunan Posko Kepolisian	Pusat Desa	Pagai Utara	
		Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan pertanian, mendukung kelancaran distribusi sarana produksi dan hasil pertanian.	Desa Saibi Samukop	Siberut Tengah	
		Pengadaan Mesin Pengupas Pinang 1 Unit Dusun Muntei	Dusun Muntei	Siberut Barat	
		Pengadaan Mesin Pengola Sagu 3 Unit Dusun Limau	Dusun Limau	Siberut Barat	
		Bibi Kelapa dan Bibit Coklat 10.000 polibet Kelapa dan coklat untuk geografis Desa Saliguma sangat cocok serta menjadi kebutuhan sehari-hari dalam menunjang perekonomian	Desa Saliguma	Siberut Tengah	
		Bibit kelapa Hibrida 500 biji untuk geografis Desa Cimpungan sangat cocok menjadi kebutuhan dalam menunjang perekonomian masyarakat	Desa Cimpungan (7 Dusun)	Siberut Tengah	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		pengadaan pupuk pertanian masyarakat	6 dusun	Siberut Selatan	
		TORA	Kawasan Hutan Malakopa	Pagai Selatan	
		Pembukaan Sawah 50 Ha	Malakopa	Pagai Selatan	
		Pembangunan Irigasi, Pengadaan Paralon, Panjang 4 Km	Siraija Malakopa	Pagai Selatan	
31	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Dalam rangka untuk melakukan mitigasi bencana maka diperlukan dukungan penyelenggaraan desa tanggu bencana dalam bentuk pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana dalam menghadapi terjadinya bencana di Desa	Desa Mara	Sipora Selatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		Relokasi Rumah Bibir Pantai	Desa Tuapejat	Sipora Utara	
		Masih banyak warga yang belum memiliki rumah layak huni	Desa Silabu	Pagai Utara	
		dengan Telah Smakin Dekat nya Pesisir pantai ke perumahan warga yang merupakan Zona Merah rawat Bencana Alam Gempa dan Sunami, maka perlu dilakukan relokasi Pemukiman dari pesisir pantai ke daerah zona aman lokasi pengungsian tamairang	Dusun Nang - Nang	Siberut Utara	
		Permohonan Relokasi Kantor Camat Siberut Utara Ke Lokasi baru dengan zona Hijau di Lokasi Tamairang.	Dusun Nang - Nang	Siberut Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Relokasi/Bantuan Rumah bagi Korban Bencana Banjir di Sibeuotcun sebanyak 120 Unit	Dusun Sibeuotcun Desa Malancan	Siberut Utara	
		pembangunan rumah pengusian,kenyamanan tempat tinggal	bekkeiluk	Siberut Selatan	
		rumah sering kena banjir	bekkeilu,salappa dan magosi	Siberut Selatan	
		banyak ruamah yang tidak layak huni	8 dusun	Siberut Selatan	
32	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum	tidak adanya tiang listrik sehingga menghambat penerangan dimasyarakat	Desa Maileppet	Siberut Selatan	Sekretariat Daerah
		belum maksimalnya layanan pln keseluruhan wilayah sagulubbeg dan perlu penambahan jaringan transmisi PLN	Desa Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	
		Pengadaan Tiang Listrik (±500 Batang)	Desa Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	
		Penerangan Jalan Raya	Jalan Raya Tuapejat	Sipora Utara	
		Di lingkungan Desa Mara belum ada penerangan jalan umum dibeberapa titik yang sudah ditentukan sehingga ini diperlukan adanya penerangan jalan terutama di jalan raya.	Desa Mara	Sipora Selatan	
		Sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang perputaran ekonomi masyarakat	Politcoman	Siberut Barat	
		Pengadaan Tiang Listrik dengan Lampu Jalan	Desa Tuapejat	Sipora Utara	
		Penerangan Perumahan Pemukiman dengan Tenaga Surya/Mesin Diesel	Dusun Pukarayat	Sipora Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Pemukiman relokasi baru masih belum ada penerangan jalan	Huntap Silabu	Pagai Utara	
		Penambahan Penerangan Jalan Pusat Desa	Pusat Desa	Pagai Utara	
		Pengadaan Listrik/PLN/ jaringan	Dusun Malilimok, Sarausau, Tiop	Siberut Barat Daya	
		Peningkatan Operasi Listerik (PLN) 24 Jam	Desa Sotboyak	Siberut Utara	
		Penerangan Lampu Jalan Lingkar Desa	Desa Sotboyak	Siberut Utara	
		Penambahan jaringan transmisi PLN menuju pariwisata Sakaladhat	Dusun Betaet Selatan	Siberut Barat	
		Pengadaan PLTS Terpusat	Dusun Muara Selatan	Siberut Barat	
		Pengadaan PLN Mini (Sakaladhat-Sute' Uleu)	Dusun Sakaladhat	Siberut Barat	
		belum ada penerangan Lampu Jalan	Desa Saureinu	Sipora Selatan	
		Pengadaan PLTS terpusat 1 Unit	Dusun Bojo	Siberut Barat	
		Belum tersedianya jaringan PLN untuk wilayah Desa Makalo	Dari Dusun Bere sampai dengan dusun Parakbatu, Desa Makalo	Pagai Selatan	
		Pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan volume 1 paket, pusat Desa Cimpungan sangat gelap belum ada penerangan	Dusun Simaingak Bebegen	Siberut Tengah	
		belum terhubung arus listri tempat masyarakat	3 dusun	Siberut Selatan	
		tiga dusun di induk desa belum masuk penerangan mohon perhatian pemerintah	Betumonga barat, Betumonga timur,	Pagai Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
			Betumonga selatan		
		Pengadaan Listrik di Pemukiman Baru	Dusun Timur, Desa Mongan Poula	Siberut Utara	
		Tidak ada Penerangan yang memadai	Dusun Bojakan,Lubaga dan Bai'	Siberut Utara	
		Pengadaan Jaringan PLN baru	Guluk guluk-Mapinang Utara	Pagai Utara	
		Penambahan Jaringan PLN untuk Pusat Desa Malancan, 5 Dusun	Pusat Desa Malancan	Siberut Utara	
		Pengadaan PLTS Masyarakat Dusun Bojo 47 Unit	Dusun Bojo	Siberut Barat	
33	Pengelolaan Jalan Usaha Tani	masih banyak jalan tani yang belum di rabat beton	Dusun Ugai, Rogdog,madobag	Siberut Selatan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertania, dan Perikanan
		Pembangunan Jalan Pertanian Tutut Bukkuk	Dusun Makoddiai	Siberut Barat Daya	
		Pembangunan Jalan Pertanian 4 km (Sirikeru, Maddai/ Ketahanan Pangan/ Osi	Desa Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	
		untuk meningkatkan aksesibilitas dan efesiensi pertanian desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petanidan kesejateraan masyarakat	Dusun Sikuran	Siberut Barat	
		untuk meningkatkan aksesibilitas dan efesiensi pertanian desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petanidan kesejateraan masyarakat	Dusun Pilionan	Siberut Barat	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		untuk meningkatkan aksesibilitas dan efesiensi pertanian desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petanidan kesejateraan masyarakat	Dusun Politcoman	Siberut Barat	
		untuk meningkatkan aksesibilitas dan efesiensi pertanian desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petanidan kesejateraan masyarakat	Dusun Labuhan Bajau	Siberut Barat	
		Perlunya akses jalan usaha tani	Desa Silabu	Pagai Utara	
		Pemb. Jalan Akses Utama Pertanian dari Laggi-laggi ke Pusikenan Panjang 1 KM	Dusun Muara Utara	Siberut Barat	
		Tidak lancar akses perekonomian bagi masyarakat	Dusun cempungan	Sikakap	
		Belum adanya jalan masyarakat menuju tempat pengolahan hasil tani maeyarakat	Dusun makukuet	Sikakap	
		Belum ada jalan menuju lokasi perekonomian masyarakat	Dusun panatarat	Sikakap	
		Akses Pertanian yang kurang lancar kondisi jalan rusak	DESA SIKAKAP	Sikakap	
		Kondisi jalan yang rusak sehingga akses masyarakat susah	DESA SIKAKAP	Sikakap	
		Pembangunan Jalan Pertanian	Puro-Buriai	Siberut Selatan	
		keterbatasan akses jalan pertanian, keterbatasan anggaran desa	Dusun Bukit Subur, Dusun Subur Makmur, Dusun Pamewa Indah	Sipora Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Jalan Usaha Tani ke arah Sigolok sebagai sumber pendapatan masyarakat Matuptuman yang saat ini belum ada akses jalan yang mumpuni untuk mengangkut hasil pertanian.	Matuptuman	Sipora Utara	
		Belum adanya jalan menuju persawahan sehingga hasil padi susah utk dikeluarkan.	Dusun ta monga	Sikakap	
34	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Masyarakat membutuhkan bantuan bibit pala yang akan dijadikan komoditi hasil pertanian desa	Desa Sipora Jaya	Sipora Utara	Dinas Ketahanan Pangan, Pertania, dan Perikanan
		Msayarakat membutuhkan bantuan bibit cengkeh	Desa Sipora Jaya	Sipora Utara	
		Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan diperlukan peralatan yang memadai untuk mengelola lahan pertanian yang merupakan sebelum produksi.	Desa Mara	Sipora Selatan	
		Belum maksimalnya pembukaan lahan pertanian sawah	Dusun Tubeket, Makalo, Bere, Mapoupou, Talopulei, Parak batu	Pagai Selatan	
		Pembukaan Lahan Sawah Baru	3 dusun	Siberut Selatan	
		ketersediaan lahan pertanian masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk lahan perkebunan belum dapat didayagunkaan secara maksimal, perlu adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten terutama dalam penyediaan bibit	Dusun Bukit Subur, Dusun Subur Makmur, Dusun Pamewa Indah	Sipora Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		tanaman yang berkelanjutan berupa Bibit Kelapa hibrida kurang lebih 15.000 batang.			
35	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Bibit Babi	Desa Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertania, dan Perikanan
		Bibit Kelapa, Durian, Gaharu, Cengkeh, Pala, Bebek Petelur, Kambing, Sapi, Babi dan Padi	Desa Tuapejat	Sipora Utara	
		Pengadaan Bibit Padi Gogo 300 Kg Dusun Muntei	Dusun Muntei	Siberut Barat	
		Meningkatkan ekonomi masyarakat	dusun salappa, dusun toktuk, dusun puro 2	Siberut Selatan	
36	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Bibit kelapa Hibrida, Padi Hribrida, Sekaligus Pabrik Kelapa	Desa Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertania, dan Perikanan
		Pengadaan Obat Obatan 1 Paket	Mabulaubuggei	Pagai Utara	
37	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ekonomi masyarakat belum memadai dengan pengadaan bibit ayam	Desa Madobag	Siberut Selatan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertania, dan Perikanan
		tidak adanya bibit pala di Desa Maileppet	Desa Maileppet	Siberut Selatan	
		tidak adanya bibit Durian	Desa Maileppet	Siberut Selatan	
		tidak tersediahnya bibit cengkeh bagi petani	Desa Maileppet	Siberut Selatan	
		tidak adanya bibit tanaman cangkok di Desa Maileppet	Desa Maileppet	Siberut Selatan	
		Masyarakat peternak membutuhkan bantuan	Desa Sipora Jaya	Sipora Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		bibit ternak babi yang berkualitas			
		Penting adanya peternakan sapi masyarakat	Desa Sipora Jaya	Sipora Utara	
		Bantuan Bibit Kelapa Hibrida 500.000 bh	Se-lingkungan Desa Saumanganya	Pagai Utara	
		Pengadaan Bibit padi 500 kg	Mabulaubuggei	Pagai Utara	
		Pengadaan Pupuk Padi 1.000 kg	Saumanganya	Pagai Utara	
		Pengadaan Bibit Ternak Babi Putih	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	
		Pengadaan Bibit Ternak Itik	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	
		Pengadaan Mesin Pengupas Pinang	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	
		Pengadaan Bibit Sapi	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	
		Pengadaan Bibit palo	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	
		Pengadaan Sulingan Stainless	Desa Katurei	Siberut Barat Daya	
		Permohonan Bibit Jeruk Kelompok Pertanian Dusun Bose guna Peningkatan Perekonomian Petani Dusun Bose Desa Muara Sikabaluan.	Dusun Bose	Siberut Utara	
		permohonan Swasembada Pangan pada Program Ketahanan pangan jagung kelompok Tani di Desa muara Sikabaluan	Desa Muara Sikabaluan	Siberut Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Belum tersedianya bibit ternak bagi kelompok ternak	Desa matobe	Sikakap	
		Pengadaan Bibit Pala 1.000 Biji Dusun Limu	Dusun Limu	Siberut Barat	
		Bantuan Ternak Sapi	Dusun Puro dan Dusun Dusun Sirokdak	Siberut Selatan	
		Pengadaan Areal Peternakan	Dusun Puro	Siberut Selatan	
		Bantuan Peternakan Bantuan Bibit Padi Unggul Bantuan MesinBoat Nelayan	Desa Goisooinan	Sipora Utara	
		meningkatkan ekonomi masyarakat	Dusun Bekkeilu	Siberut Selatan	
		bibit gaharu	8 Dusun	Siberut Selatan	
		budidaya tenak ayam kampung. ekomomi masyarakat	6 dusun	Siberut Selatan	
38	Penyediaan Perlengkapan Prasarana Jalan (penerangan jalan umum, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas)	Rawan pencurian, serta terhambat nya ekonomi di malam hari	Desa beriulou	Sipora Selatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		belum tersedianya penerangan jalan di desa Sipora Jaya	Desa Sipora Jaya	Sipora Utara	
		Pembangunan Jalan Trans	Saumanganya- Guluk guluk	Pagai Utara	
		Perlunya Penerangan Jalan Lintas Antara Sikabaluan Menuju Desa Monganpoula dan Sikabaluan Menuju Pokai	Dusun Nang - Nang	Siberut Utara	
		Tidak tersedianya penerangan jalan umum ruas jalan Pendopo - PDAM dan jalan/gang pada tiga	Ruas Jalan Pendopo - PDAM, Dusun Bukit	Sipora Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		dusun.	Subur, Dusun Subur Makmur, Dusun Pamewa Indah		
39	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan, Pengangkutan Sampah	Tempat pembuangan sampah belum tersedia maksimal	Desa Madobag	Siberut Selatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		Betor Sampah	Desa Tuapejat	Sipora Utara	
		Pengadaan Tong Samah dan Pengolahan Sampah	Pusat Desa	Pagai Utara	
		Permohonan sarana sampah di SMA N Siberut Utara, karena disekolah tersebut belum ada tempat pembuangan sampah sehingga banyak sampah tidak bisa diatasi	Dusun Nang - Nang	Siberut Utara	
		Permohonan tempat sampah dan petugasnya di Dusun Muara, karena tidak adanya tempat penanggulangan sampah sehingga banyaknya sampah yang tidak bisa diatasi	Dusun Muara	Siberut Utara	
		Permohonan Mesin Pencacah Sampah di Lingkungan Desa Muara Sikabaluan.	Dusun Nang - Nang	Siberut Utara	
		Permohonan Pembangunan tempat Pembuangan Sampah Akhir Desa Muara Sikabaluan.	Dusun Nang - Nang	Siberut Utara	
		Tenaga Kerja Pengelolaan Sampah	Muara Siberut	Siberut Selatan	
		dalam rangka mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, perlu adanya transportasi pengangkut	Dusun Bukit Subur, Dusun Subur Makmur, Dusun	Sipora Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		sampah/limbah keluarga dari pemukiman warga ke tempat pengumpulan sementara.	Pamewa Indah		
40	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, pemanfaatan olahraga	Lapangan bola kaki tidak layak pakai	Desa Madobag	Siberut Selatan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		tidak adanya TPT dan Penimbunan sarana olaraga	Desa Maileppet	Siberut Selatan	
		Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun Karoniet, Desa Tuapejat	Sipora Utara	
		Lapangan Sepak Bola	Dusun Karoniet, Desa Tuapejat	Sipora Utara	
		Permohonan pembangunan lapangan olah raga bola kaki Kecamatan Siberut Utara lokasi Pantai Muara	Dusun Muara	Siberut Utara	
		Pembangunan Gedung Olahraga/Serba Guna	Dusun Tolouaggo	Siberut Barat Daya	
		Permohonan Lapangan Bola Volly Putra dan Putri Dusun Bose Desa Muara Sikabaluan.	Dusun Bose	Siberut Utara	
		Belum memadai sarana dan prasarana pendukung lapangan sepak bola kaki (Tribun, MCK, Ruang Ganti}, keterbatasan kewenagan, keterbatasan anggaran desa.	Dusun Pamewa Indah	Sipora Utara	
41	Penyediaan, Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman	Penambahan Perumahan Masyarakat	Dusun Timur, Desa Mongan Poula	Siberut Utara	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup
		Gedung serbanguna belum tersedia	Dusun Rogdok	Siberut Selatan	
		tidak adanya pagar TPU	Desa Maileppet	Siberut Selatan	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Perlunya Perluasan Pemukiman Warga	Dusun Bojakan	Siberut Utara	dan Perhubungan
		Perlunya Pemekaran Dusun Dalam Wilayah dusun Bojakan	Dusun Bojakan	Siberut Utara	
		Pembangunan MCK Masyarakat Muara Siberut	Desa Muara Siberut	Siberut Selatan	
		Pembangunan Beda Rumah Warga Dusun Bojo 49 KK	Dusun Bojo	Siberut Barat	
		Pembangunan Pagar Gereja Katolik Muara Siberut	Dusun Peigu	Siberut Selatan	
		Pembangunan Lumbung Sosial	Muara Siberut	Siberut Selatan	
		Rumah Bedah 80 Unit Aaa 80 unit KK dalam kategori rumah tangga miskin dan perlu dibantu	Dusun Sikebbukat, Magujuk dan Matoimiang	Siberut Tengah	
		Belum maksimalnya pembangunan akses jalan lingkungan pemukiman	Dusun Mapoupou	Pagai Selatan	
		Belum maksimalnya pembangunan jalan kawasan pemukiman	Dusun Parakbatu	Pagai Selatan	
		Peningkatan Jalan ke Pemukiman Warga Dusun Taraet Borsa arah Maccemi karena saat ini belum ada akses jalan.	Dusun Taraet Borsa	Sipora Utara	
42	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Perbaikan Rumah Baru Layak Huni	Pembangunan Perumahan Huntap (Hunian Tetap). Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai rumah layak huni.	Dari Dusun Asahan sampai Dusun Surat aban.	Pagai Selatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		Rumah Masyarakat banyak yang tidak layak Huni	Sedesa Madobag	Siberut Selatan	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Masih banyak masyarakat Desa Taikako memiliki rumah tidak layak huni,	Desa Taikako	Sikakap	
		Banyaknya Rumah Warga yang Tidak Layak di huni	Dusun Bojakan,Lubaga dan Bai'	Siberut Utara	
		Terdapat rumah warga yang sudah tidak layak huni sehingga diperlukan bantuan renovasi rumah tidak layak huni seperti program BSPS	Desa Mara	Sipora Selatan	
		Kondisi rumah saat ini sangat memperhatinkan dikarenakan ekonomi yang tidak memadai	Dusun Pilionan	Siberut Barat	
		Kondisi rumah saat ini sangat memperhatinkan dikarenakan ekonomi yang tidak memadai	Dusun Sikuran	Siberut Barat	
		Kondisi Rumah Warga Saat ini sudah banyak tidak layak pakai	Matotonan	Siberut Selatan	
		belum ada	desa sido makmur	Sipora Utara	
		Bantuan beda rumah 100 unit	se- Desa Saumanganya	Pagai Utara	
		Pangadaan Rumah Sosial/Bedah Rumah	Dusun Toloulaggo, Sarausau	Siberut Barat Daya	
		Masih banyak masyarakat yg belum mendapatkan rumah layak huni	Desa matobe	Sikakap	
		Rehab Rumah tidak layak Huni	Desa Goisooinan	Sipora Utara	
		Masih Banyaknya Rumah yang Belum layak Huni utk Wilayah Betumonga (Dusun Sipaarau,	Betumonga	Sipora Utara	

NO	USULAN	MASALAH	LOKASI	KECAMATAN	OPD TUJUAN
		Dusun Sibujai dan Dusun Moria).			
		Saat ini Desa Sirilogui banyak memiliki rumah tidak layak huni, maka kami mengusulkan agar kami dibantu untuk memberikan bantuan Rehab Rumah.	Desa Sirilogui	Siberut Utara	
43	Rehabilitasi Sosial/bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Belum terpenuhinya hak bagi difabel dan lansia	Desa matobe	Sikakap	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 4.43
Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta Pemberi Hibah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
1	Partai Demokrat	Jl. Raya Tuapejat Km-2. Sipora Utara	82.124.000,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jl. Raya Tuapejat Km-6 . Sipora Utara	135.114.000,00
3	Partai Solidaritas Indonesia	Jl. Raya Tuapejat Km-4	43.876.000,00
4	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Jl. Raya Tuapejat Km-2 .Sipora Utara	75.670.000,00
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	Jl. Raya Tuapejat km-3. Sipora Utara	79.030.000,00
6	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Jl. Raya Tuapejat Km-3,5. Sipora Utara	52.122.000,00
7	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Jl. Raya tuapejat Km - 7. Sipora Utara	78.330.000,00
8	PARTAI GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya)	Jl. Raya Tuapejat Km-3. Sipora Utara	77.280.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			623.546.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			623.546.000,00
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		

9	TK KERET BAGA REBANA	DUSUN MAKUKUET DESA MATOBE	15.400.000,00
10	TK ANUGERAH PEMULIHAN	JL. RAYA TUAPEJAT KM.5	100.100.000,00
NO	**NAMA PENERIMA**	**ALAMAT PENERIMA**	**JUMLAH (Rp)**
11	TK KASIH IBU	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 6	77.770.000,00
12	TK FILADELFIA	DUSUN MAONAI	15.400.000,00
13	TK ISLAM BAKTI 44	DESA SALIGUMA	30.030.000,00
14	TK PEMULIHAN TEITEI SINABAK		30.800.000,00
15	TK RORO SIBAU	DUSUN MAPINANG	23.100.000,00
16	TK ST. PETRUS	JL. RAYA TUAPEJAT KM. 5.5	32.340.000,00
17	TK GELAI SIMERU	Dusun Guluk-guluk	23.100.000,00
18	TK MARGARETTA PURO	DUSUN PURO	26.180.000,00
19	TK TERATAI MUARA SIBERUT	SIBERUT SELATAN	44.660.000,00
20	TK MARGARETHA MATOTONAN	MATOTONAN	38.500.000,00
21	TK MARTURIA TERPADU	DUSUN SUA	77.000.000,00
22	TK PURIMANUAIJAT TERPADU	DUSUN SAIBI SAMUKOP	107.800.000,00
23	TK MARGARETHA SIKABALUAN	DESA MUARA SIKABALUAN	61.600.000,00
24	TK BINTANG MULIA 02	DUSUN SEAI LAMA	38.500.000,00
25	PAUD KRISTEN SIMAKIRISAU TERPADU	DUSUN SILAOINAN DESA SAUREINU	30.800.000,00
26	TK KRISTEN SYALOM TERPADU	MATALU DESA BERIULOU	30.800.000,00

27	TK.YBTIU SIMATORO	0	38.500.000,00
28	TK MARGARETHA PEI PEI	Pei pei	38.500.000,00
29	TK GILGAL TERPADU	DUSUN TAKKUMAN DESA SIOBAN	38.500.000,00
30	TK MARGARETHA MASI	SAGULUBEK	30.800.000,00
31	TK KRISTEN MENAHEM TERPADU	DUSUN MARA TIMUR DESA MARA	38.500.000,00
32	TK MARGARETHA GOTAP	Saliguma	38.500.000,00
33	TK HARAPAN TERPADU	DUSUN SIRITENGAH	38.500.000,00
34	TK BINTANG MULIA 03	DUSUN PINATEKTEK DESA SIKAKAP	38.500.000,00
35	TK MARGARETHA MADOBAG	Madobag	38.500.000,00
36	TK SANTO YOSEF	JL. PASTORAN DESA SIOBAN	38.500.000,00
37	TK KRISTEN PEMULIHAN MALILIMOK	DUSUN MALILIMOK DESA KATUREI	50.050.000,00
38	TK DARMA WANITA SALIGUMA	Saliguma	82.500.000,00
39	SATUAN PAUD	TUAPEJAT	1.375.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			2.688.730.000,00
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
40	PKBM SURA	SAUMANGANYA	31.000.000,00
41	PKBM ALITO	Desa Saibi Samukop	31.000.000,00
42	PKBM PUSURAKAT	Desa Betumonga	31.000.000,00
43	PKBM TANGAN PENGHARAPAN	Maileppet	200.000.000,00
44	PKBM NYIUR MELAMBAI	PEIPEI	100.000.000,00
45	PKBM SILIBET SIBAU	Desa Muara	100.000.000,00

		Sikabaluan	
46	PKBM ALITO	Desa Saibi Samukop	100.000.000,00
47	PKBM NESTS TRANSFORMASI SIPORA	Sioban	100.000.000,00
48	PKBM TANGAN PENGHARAPAN	Maileppet	45.000.000,00
49	PKBM GELAIAKE	MAKALO	48.290.000,00
50	PKBM PUSURAKAT	Desa Betumonga	280.000.000,00
51	PKBM PUAGAIJAT TORO PURIMANUAIJAT	Desa Muara Sikabaluan	290.000.000,00
52	PKBM PUSURAKAT	Desa Betumonga	45.000.000,00
53	PKBM SURA	SAUMANGANYA	100.000.000,00
54	PKBM BINA LAGGAI	KM 02 Tuapejat	50.000.000,00
55	PKBM NYIUR MELAMBAI	PEIPEI	31.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.582.290.000,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
56	SD SWASTA VICENTIUS	Sikakap	146.400.000,00
57	SD ISLAM AL KUTTAB 1 MANGORUT	Dusun Mangorut Desa Madobag Kecamatatan Siberut Selatan	72.000.000,00
58	SD SWASTA SANTO YOSEP	Pastoran Katolik Sioban	127.200.000,00
59	SD FRANSISKUS SIKABALUAN	Muara Sikabaluan	220.800.000,00
60	SD KRISTEN CAHAYA BANGSA	Jl. Raya Tuapejat Km. 5 Sipora Utara	220.800.000,00
61	SD SWASTA SANTO PETRUS	KM 5 Tuapejat	210.000.000,00
62	SD SANTA MARIA	Muara Siberut	168.000.000,00
63	SD LENTERA HARAPAN	Maileppet	75.600.000,00
64	SD Kristen Charis Nusa Mentawai	Pasakiat Taileleu	72.000.000,00
65	SD Swasta Se-Kab. Mentawai(BOS)	tuapejat	500.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.812.800.000,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
66	SMP KRISTEN CAHAYA BANGSA TUAPEJAT	Alamat Jalan Raya Tuapejat KM. 5,5 Sipora Utara	149.000.000,00
67	SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH MENTAWAI,	Alamat Sipora Jaya Kec. Sipora Utara	35.760.000,00
68	SMP SWASTA GKPM SIKAKAP	Alamat Kec. Sikakap	80.460.000,00
69	SMP SANTO PETRUS TUAPEJAT	JLN. RAYA KM. 10 TUAPEJAT	153.470.000,00

		KECAMATAN SIPORA UTARA	
70	SMP LENTERA HARAPAN SIBERUT SELATAN	Kompleks Asrama Kec. Siberut Selatan P4MD	101.320.000,00
71	SMPS YOS SUDARSO 2	Alamat Muara Siberut Kec. Siberut Selatan	347.170.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			867.180.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			6.951.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	SEKRETARIAT DAERAH		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
72	GKPM Jemaat Nehemia	Dusun Sikerene Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan	0,00
73	Mushalla Darul' Ullum Dusun Matotonan Desa Matotonan Kec Siberut Selatan	Dusun Matotonan Desa Matotonan Kec Siberut Selatan	0,00
74	GKPM Bubuget Desa Sinaka Kec Pagai Selatan	Dusun Bubuget Desa Sinaka Kec Pagai Selatan	0,00
75	GKPM Asahan Dusun Asahan Desa Bulasat Kec. Pagai Selatan	Dusun Asahan Desa Bulasat Kec. Pagai Selatan	0,00
76	GKPM IKTUS Dusun sumber Air Desa Saureinuk Kec. Sipora Selatan	Desa Saureinuk	0,00
77	GKPM Jemaat Serfat Rokot Dusun Rokot Desa Matobe Kec Sipora Selatan	Dusun Rokot Desa Matobe Kec Sipora Selatan	0,00
78	Hibah GKPM Jemaat Wilayah III Sioban Desa Sioban Kec Sipora Selatan	Desa Sioban Kec Sipora Selatan	0,00
79	Gereja GKLI Betlehem Dusun Saureinu, Desa Saureunu, Kecamatan Sipora Selatan	Dusun Saureinu, Desa Saureunu, Kecamatan Sipora Selatan	0,00
80	Mesjid Baitul Rahman Dusun Sagitci Barat Desa Nemnemleleu Kec Sipora Selatan	Dusun Sagitci Barat Desa Nemnemleleu Kec Sipora Selatan	0,00

81	Jemaat GKPM Padang Jln. Pancasila No. 20 Padang Sumbar	Jln. Pancasila No. 20 Padang Sumbar	0,00
82	GKPM Jemaat Mandiri Taikako Dusun Taikako Desa Taikako Kec Sikakap	Dusun Taikako Desa Taikako Kec Sikakap	0,00
83	DPC PWKI Kep Mentawai Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kec Sipora Utara	Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kec Sipora Utara	0,00
84	Gereja Katolik Bartolomeus Dusun Mongan Poula Desa Mongan Poula Kec Siberut Utara	Dusun Mongan Poula Desa Mongan Poula Kec Siberut Utara	0,00
85	Yayasan August Lett	Nemnemleleu-Kec. Sikakap	0,00
86	Mesjid Al-Kauthar Darul Jadid Dusun Bose Desa Muara Sikabaluan Kec Siberut Utara	Dusun Bose Desa Muara Sikabaluan Kec Siberut Utara	0,00
87	GKPM Jemaat Simalambaen Dusun Nangnang Desa Muara Sikabaluan Kec Siberut Utara	Dusun Nangnang Desa Muara Sikabaluan Kec Siberut Utara	0,00
88	Gereja Katolik Stasi ST Paulus Bake Dusun Bake Desa Bulasat Kec Pagai Selatan	Dusun Bake Desa Bulasat Kec Pagai Selatan	0,00
89	Gereja Katolik Stasi St.Simon Petrus Dusun Taikako Barat, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap	Dusun Taikako Barat, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap	0,00
90	Gereja Katolik ST. Fransiskus Asisi Dusun Bose Desa Muara Sikabaluan Kec. Siberut Utara	Dusun Bose Desa Muara Sikabaluan Kec. Siberut Utara	0,00
91	GPdI Nafiri Dusun Sinabak Desa Sido Makmur Kec Sipora Utara	Dusun Sinabak Desa Sido Makmur Kec Sipora Utara	0,00
92	GKPM Jemaat Tumalei	Dusun Tumalei Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara	0,00

93	GKPM Jemaat Sion Malabbaet	Dusun Malabbaet Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan	0,00
94	GKPM Jemaat Parak Batu	Dusun Parak Batu Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan	0,00
95	GKPM Mandiri Mahanaem Pogari Dusun Pogari Desa Goisooinan Kec Sipora Utara	Dusun Pogari Desa Goisooinan Kec Sipora Utara	0,00
96	GKPM Jemaat Muntei Sigoisok Dusun Muntei Sigoisok Desa Malakopa Kec. Pagai selatan	Dusun Muntei Sigoisok Desa Malakopa Kec. Pagai selatan	0,00
97	GKPM Jemaat Mandiri Saumanganya Dusun Saumanganya Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara	Dusun Saumanganya Desa Saumanganya Kec. Pagai Utara	0,00
98	GKPM Jemaat Malancan , Dusun Kelak Bunda, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara	Dusun Kelak Bunda, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara	0,00
99	GKPM Jemaat Kudus Matobe	Dusun Usut Ngaik Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan	0,00
100	GKPM Jemaat Kanaan Dusun Beriulou Desa Beriulou Kec. Sipora Selatan	Dusun Beriulou Desa Beriulou Kec. Sipora Selatan	0,00
101	GKPM Jemaat Estomihi Dusun Masokut Desa Beriulou Kec. Sipora Selatan	Dusun Masokut Desa Beriulou Kec. Sipora Selatan	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
102	GKPM Jemaat Ekklesia Bukit Batu Dusun Leleu Bukku Desa Taikako Kecamatan Sikakap	Dusun Leleu Bukku Desa Taikako Kecamatan Sikakap	0,00
103	GKPM Jemaat Betlehem	Dusun Silaoinan Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan	0,00
104	Gereja GKPM Jemaat Bagat Lelet Dusun Bagat Lelet Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan	Dusun Bagat Lelet Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan	0,00
105	GKPM Jemaat August Lett Talopulei Dusun Talopulei Desa Makalo Kec Pagai Selatan	Dusun Talopulei Desa Makalo Kec Pagai Selatan	0,00
106	GKPM Bethesda Dusun Beleraksok Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan	Dusun Beleraksok Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan	0,00
107	GKLI Emmaus Dusun Nemnemleleu Desa Nemnemleleu Kec. Sipora Selatan	Dusun Nemnemleleu Desa Nemnemleleu Kec. Sipora Selatan	0,00
108	GKLI Anugrah Tuapejat Dusun Turonia Desa Tuapejat Kec Sipora Utara	Dusun Turonia Desa Tuapejat Kec Sipora Utara	0,00
109	Gereja Pimpinan Rohul Kudus Dusun Peipei Desa Pasakiat Taileleu	Dusun Peipei Desa Pasakiat Taileleu	0,00
110	Gereja Katolik ST Teresa Dusun Puran Desa Muara Sikabaluan Kec Siberut Utara	Dusun Puran Desa Muara Sikabaluan Kec Siberut Utara	0,00
111	Gereja Katolik St Petrus Dusun Tuapejat Desa Tuapejat Kec Sipora Utara	Dusun Tuapejat Desa Tuapejat Kec Sipora Utara	0,00
112	Baznas Kabupaten Kepulauan Mentawai Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara	Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD SEKRETARIAT DAERAH			0,00

Tabel 4.44
Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran
Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi
Hibah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
1	SATUAN PAUD	TUAPEJAT	Pengadaan Alat Peraga Edukatif	200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				200.000.000,00

Tabel 4.45
Daftar Calon Penerima Bantuan Hibah Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2027

NAMA LEMBAGA / ORGANISASI	ALAMAT
BAZNAS Kab. Kep Mentawai	Dusun Karang Anyaer Desa Sipora Jaya Kec Sipora Utara
Gereja Katolik St teresa Puran	Dusun Puran, Desa Muara Sikabalauan , Kec. Siberut Utara
GKPM Jemaat Bagan Lelet	Dusun Bagan Lelet Desa Sioban Kec Sipora Selatan
GKPM Jemaat Kudus Matobe	Dusun Ngaik Desa Matobe Kec Sipora Selatan
GPdI NAFIRI	Dusun Sinabak, Desa Sidomakmur,Kec.Sipora Utara
GKPM Parak Batu	Dusun Parak Batu, Desa Malakopa, Kec.Pagai Selatan
GKPM Jemaat Nehemia	Dusun Sikerene, Desa Saureinu, Kec.Sipora Selatan
Gereja Katolik ST. Fransiskus Asisi	Dusun Bose Desa Muara Sikabaluan Kec Siberut Utara
Gereja Katolik Stasi Simon Petrus	Dusun Taikako Barat Desa Taikakao Kec Sikakap
Gereja Katolik ST Paulus Bake	Dusun Bake Bake Desa Bulasat Kec Pagai Selatan
GKPM Jemaat Simalambaen	Dusun Nangnang Desa Muara Sikabaluan Kec Siberut Utara
Masjid Al- Kauthar Darul Jadid	Dusun Bose Desa Muara Sikabaluan Kec Siberut Utara
Yayasan August Lett	Dusun Sibaibai Desa Sikakap Kec Sikakap
GKPM Jemaat Mandiri Taikako	Dusun Taikako Desa Taikako Kec Sikakap
Jemaat GKPM Padang	Jln Pancasila No.20 Padang Sumbar
Masjid Baitul Rahman	Dusun Sagitci Barat Desa Nemnemleleu Kec Sipora Selatan
GKLI Betlehem Saureinu	Dusun Saureinu Desa Saureinu Kec Sipora Selatan
GKPM Jemaat Wilayah III	Dusun Teiteipabobokat, Desa Sioban,Kec. Sipora Selatan
GKPM Jemaat Sion Malabbaet	Dusun Malabbaet,Desa Sioban ,Kec. Sipora Selatan
GKPM Jemaat Malancan	Dusun Bunda, Desa Malancan, Kec. Siberut Utara
GKPM Mandiri Saumanganyak	Dusun Saumanganyak, Desa Saumanganyak, Kec.Pagai Utara
GKPM Jemaat Betlehem	Dusun Silaoinan Desa Saureinu Kec Sipora Selatan
GKPM Jemaat Serfat Rokot	Dusun Rokot Desa Matobe Kec Sipora Selatan
GKPM Iktus	Dusun Sumber Air Desa Saureinu Kec Sipora Selatan
GKPM Asahan	Dusun Asahan Desa Bulasat Kec Pagai Selatan
GKPM Bubuget	Dusun Bubuget Desa Sinaka Kec Pagai Selatan
Mushalla Darul' Ullum	Dusun Matotonan Desa Matotonan Kec Siberut Selatan
GKPM Jemaat Tumalei	Dusun Tumalei Desa Silabu Kec Pagai Utara
GKPM Bethesda	Dusun Beleraksok Desa Malakopa Kec Pagai Selatan
GKPM Jemaat August Lett Talopulei	Dusun Talopulei Desa Makalo Kec Pagai Selatan
GKPM Jemaat Estomihi	Dusun Masokut Desa Beriulou Kec Sipora Selatan
GKPM Jemaat Kanaan	Dusun Beriulou Desa Beriulou Kec Sipora Selatan
GKPM Jemaat Eklesia Bukit Batu	Dusun Leleu Bukku Desa Taikako Kec Sikakap
GKLI Anugrah Tuapejat	Dusun Turonia Desa Tuapejat Kec Sipora

NAMA LEMBAGA / ORGANISASI	ALAMAT
	Utara
GKLI Emmaus	Dusun Nemnemleleu Desa Nemnemleleu Kec Sipora Selatan
GKPM Jemaat Muntei Sigoisok	Dusun Muntei Sigoisok Desa Malakopa Kec Pagai Selatan
Gereja Katolik St. Petrus	Dusun Tuapejat Desa Tuapejat Kec Sipora Utara
Gereja Pimpinan Rohul Kudus	Dusun Peipei Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya
Gereja Katolik Bartolomeus	Dusun MonganPoula Desa Mongan Poula Kec. Siberut
GKPM Mandiri Mahanaem Pogari	Dusun Pogari Desa Goiso Oinan Kec Sipora Utara
GKPM Jemaat Peipei	Dusun Peipei Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya
GKPM Jemaat Uma Taileleu	Dusun Taileleu Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya
GKPM Beleraksok	Dusun Beleraksok Desa Malakopa Kec Pagai Selatan
GKPM Jemaat Muttei	Dusun Mabulau Buggei Desa Saumanganyak Kec Pagai Utara
GKPM Jemaat Anugerah Sirorouk	Dusun Pasakiat Taileleu Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya
GKPM Jemaat Kinumbu	Dusun Kinumbu Desa Bulasat Kec Pagai Selatan
GKPM Jemaat Eben Haezer	Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Kec Sipora Utara
GKPM Resort Siberut Selatan	Dusun Puro Desa Muara Siberut Kec Siberut Selatan
GKPM Jemaat Berkat Lama	Dusun Berkat Lama Desa Sikakap Kec Sikakap
GBI Rock Filadelfia	Dusun Karoniet Desa Tuapejat Kec Sipora Utara
GKPM Jemaat Mandiri Pniel	Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Kec Sipora Utara
GKPM Jemaat Mabulau Buggei	Dusun Mabulau Buggei Desa Saumanganyak Kec Pagai Utara
GKPM Jemaat Mandiri Maranatha	Dusun Seay Lama Desa Sikakap Kec Sikakap
GKPM Jemaat Laggigi	Dusun Laggigi Desa Bulasat Kec Pagai Selatan
GKPM Mandiri Saibi Samukop	Dusun Saibi Samukop Desa Saibi Samukop Kec Siberut Tengah
GPdI Fila Delfia Peipei	Dusun Peipei Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya
GPdI Nazaret Toloulaggo	Dusun Toloulaggo Desa Katurei Kec Siberut Barat Daya
GKPM Jemaat Saureinu	Dusun Saureinu Desa Saureinu Kec Sipora Selatan
GPdI Jemaat Batu Karang	Dusun Rokot Desa Matobe Kec Sipora Selatan
GPdI Jemaat Elshadai Saureinu	Dusun Kaliou Desa Saureinu Kec Sipora Selatan
GKPM Bake	Dusun Bake Desa Bulasat Kec Pagai Selatan
DPP ST Yosef Sipora Selatan	Jln Raya Sioban Desa Sioban Kec Sipora Selatan
GPdI Immanuel Malilimok	Dusun Malilimok Desa Katurei Kec Siberut Barat Daya
GPdI Sangkakala	Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kec Sipora Utara

4.2.4 Analisis Wilayah Prioritas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pendekatan terpadu yang mengintegrasikan program dan kegiatan lintas perangkat daerah dengan mengutamakan sasaran rumah tangga miskin ekstrem berdasarkan data yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 dan SK Bupati Kepulauan Mentawai No 100.3.3.2-387 tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 15 desa prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang tersebar pada 8 kecamatan dengan jumlah 371 Kepala Keluarga (KK) sebagai sasaran intervensi pembangunan.

Sebaran desa prioritas tersebut meliputi Kecamatan Pagai Utara sebanyak 1 desa, Kecamatan Siberut Utara sebanyak 2 desa, Kecamatan Siberut Barat sebanyak 3 desa, Kecamatan Siberut Barat Daya sebanyak 3 desa, Kecamatan Siberut Tengah sebanyak 3 desa, Kecamatan Pagai Selatan sebanyak 3 desa, Kecamatan Siberut Selatan sebanyak 2 desa, dan Kecamatan Sikakap sebanyak 2 desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem masih tersebar pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama pada desa-desa dengan karakteristik kepulauan, pesisir, kawasan hutan, dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.

Sebagian besar desa prioritas memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan aksesibilitas yang masih terbatas, biaya transportasi dan distribusi logistik yang relatif tinggi, serta ketergantungan masyarakat terhadap sektor primer seperti perikanan, pertanian, peternakan, dan hasil hutan bukan kayu. Kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat, terbatasnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, belum meratanya ketersediaan air minum layak dan sanitasi, serta masih terbatasnya kualitas infrastruktur dasar.

Memperhatikan kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Mentawai memerlukan intervensi yang terintegrasi dan berbasis wilayah melalui sinergi antar perangkat daerah, pemerintah desa, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat. Pelaksanaan program diarahkan pada empat strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kantong-kantong kemiskinan, dan penguatan tata kelola pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan cakupan perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan air minum layak, serta sanitasi. Peningkatan pendapatan masyarakat diarahkan melalui pengembangan usaha produktif sesuai potensi lokal, antara lain sektor perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan, usaha mikro, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, pengurangan kantong-kantong kemiskinan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antarwilayah, peningkatan akses transportasi, listrik, telekomunikasi, serta penyediaan sarana dan prasarana ekonomi desa. Adapun penguatan tata kelola dilakukan melalui peningkatan kualitas data sasaran berbasis DTSEN, integrasi perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah, penguatan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program secara berkelanjutan.

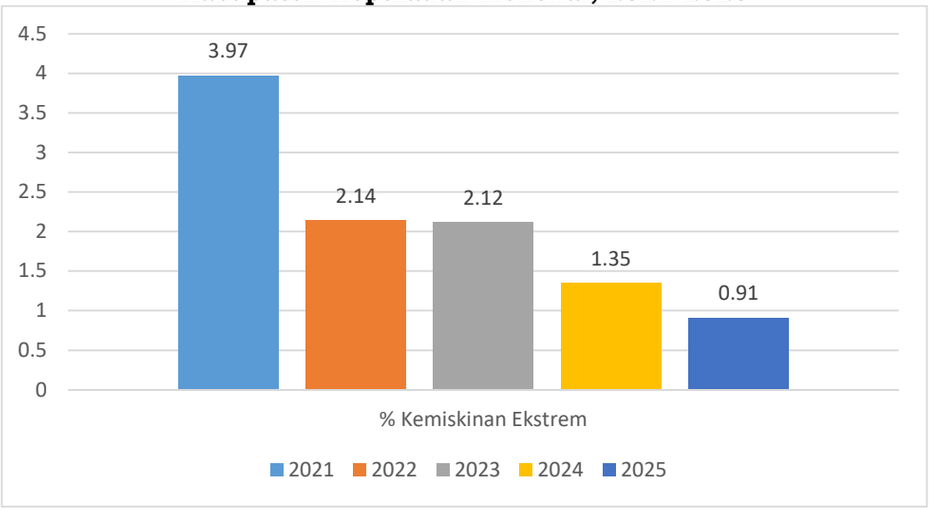
Dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, jumlah kepala keluarga sasaran, serta potensi ekonomi lokal, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 diarahkan pada pelaksanaan intervensi yang lebih fokus, terukur, dan berbasis lokasi (*place-based development*). Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah secara berkelanjutan.

Tabel 4.46
Sebaran Desa Prioritas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027

NO	KECAMATAN	DESA
1	Pagai Utara	Saumanganya
2	Siberut Utara	Bojakan
3	Siberut Utara	Malancan
4	Siberut Barat	Simatalu
5	Siberut Barat	Simalegi
6	Siberut Barat	Sigapokna
7	Siberut Barat Daya	Katurei
8	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg
9	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu
10	Siberut Tengah	Saibi Samukop
11	Siberut Tengah	Cimpungan
12	Siberut Tengah	Saliguma
13	Pagai Selatan	Sinaka
14	Pagai Selatan	Bulasat
15	Pagai Selatan	Makalo

Sumber Data : Kemenko Pemberdayaan Masyarakat - RI no 6 Tahun 2026

Tabel 4.47
Perkembangan Persentase Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Kepulauan Mentwai, 2021-2025



Sumber Data : BPS

Analisis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027, khususnya dalam pengalokasian program dan kegiatan perangkat daerah yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Seluruh intervensi akan diselaraskan dengan karakteristik masing-masing desa, sehingga program yang dilaksanakan tidak hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, dan mewujudkan pembangunan yang lebih merata di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Prioritas sasaran Pembangunan daerah terkait pengentasan kemiskinan pada desa Kemiskinan Eksrem adalah :

NO	PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	OPD Penanggung Jawab
1	Program Pengelolaan Pendidikan	- Bantuan Perlengkapan sekolah baju, Sepatu, buku, tas untuk SD, SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Beasiswa guru ke ITB gratis	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Pelayanan kesehatan keliling, gizi ibu dan anak, serta pencegahan stunting - Dokter Spesialis masuk desa miskin ekstrem - Pemeriksaan kesehatan gratis	Dinas Kesehatan
4	Program Pengembangan Perumahan	- Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Dinas Perwaskim, LH dan Perhubungan

		ekstrem	
5	Program Penyelenggaraan lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	- Transportasi gratis untuk anak sekolah (Kartu Artis) - Angkutan Desa (darat dan sungai) Gratis Untuk Mobilisasi Hasil Bumi Masyarakat Miskin Ekstrem. (Kaipa Mentawai)	Dinas Perwaskim, LH dan Perhubungan
6.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	- Bantuan Sembako Gratis per bulan per keluarga - Kartu Maagai Mentawai untuk anak miskin ekstrem (sekolah kejuruan / SMK) - Verifikasi dan validasi data keluarga miskin ekstrem -	Dinsos P3A
7.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	- Pengembangan usaha garam rakyat melalui Pembangunan sarana produksi garam -	Dinas Ketahanan Pangan , pertanian dan perikanan
8.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Siap Bajak Lahan (Sibalas) - Peternakan lebah madu - Budidaya rotan dan manu	Dinas Ketahanan Pangan , pertanian dan perikanan
9.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	- Pelatihan pengolahan sagu, bantuan peralatan, pengemasan, dan pendampingan usaha - Pelatihan Kerajinan rotan - Pemasaran hasil kerajinan rotan	Dinas Koperasi UMKM dan Perindag
10	Program Pemasaran Pariwisata	- Pengembangan Wisata Budaya - Festival Punen Laggai -	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
11	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor - Pelatihan Servis Mesin Boat - Pelatihan servis AC - Pelatihan mesin diesel	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
12	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Kajian Masyarakat Miskin dan Miskin Ekstrem di Kab. Kepulauan Mentawai	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

		- Kajian kelayakan usaha garam rakyat	
13	Program Penyelenggaraan Jalan	- Pembangunan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3. Penyelarasan Kebijakan RKPD Kabupaten/Kota terhadap RKPD Provinsi dan RKP

Tabel 4.48
Penyelarasan RKPD Tahun 2027 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

RKPD	RPJMD
Pembangunan Infrastruktur Jalan	Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.
Pemerataan Jaringan Listrik	Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah.
Penyediaan Internet	Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Pembangunan Air Bersih	Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi
Pembangunan Sumber Daya Manusia	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana
Peningkatan Pendapan Perkapita	Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia
	Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan
	Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya

Tabel 4.49
Keselarasan Sasaran Utama Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai

RKPD Provinsi Sumatera Barat	RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pendidikan Merata dan Kesehatan yang Berkualitas	Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.
Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah.
Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan	Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi
Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana
Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal melalui	Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan

RKPD Provinsi Sumatera Barat	RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Dukungan Keluarga yang Berkualitas	
Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk Usaha Kecil	Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia
Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya

Tabel 4.50
Keselarasan Indikator Utama Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai

RKPD Provinsi Sumatera Barat	RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan Ekonomi
PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	PDRB Per Kapita (Harga Berlaku) (Rp. Juta)
PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	
Indeks Gini (Rasio)	Rasio Gini
Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka
IPM	IPM

Tabel 4.51
Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama dalam RKPD

RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai	RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pembangunan Infrastruktur Jalan	Program Pembangunan Jalan
Pemerataan Jaringan Listrik	Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah
Penyediaan Internet	Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan
Pembangunan Air Bersih	Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan
Pembangunan Sumber Daya Manusia	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana
Peningkatan Pendapatan Perkapita	Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah
	Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia
	Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan
	Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya

Tabel 4.52
Keselarasan Prioritas Pembangunan

PHTC	PRO SN	PROGRAM UNGGULAN DAERAH
1. Memberi makan siang dan susu	PENANGGULANGAN	1. Pembangunan

PHTC	PRO SN	PROGRAM UNGGULAN DAERAH
gratis 2. Menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan gratis 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4. Membangun sekolah-sekolah unggul 5. Melanjutkan dan menambahkan program katu-kartu kesejahteraansosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6. Menaikkan gaji ASN 7. Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23 %	KEMISKINAN 1. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem 2. Sekolah Rakyat 3. Pembangunan 3 Juta Rumah KETAHANAN PANGAN 1. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam negeri serta penyaluran cadang beras pemerintah KESEHATAN UNTUK SEMUA 1. Jaminan Kesehatan social 2. Makan bergizi gratis PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN 1. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah PERTUMBUHAN EKONOMI 1. Pengendalian Inflasi 2. Percepatan pembentukan koperasi merah putij 3. Kemudahan perizinan	Infrastruktur Jalan 2. Pemerataan Jaringan Listrik 3. Penyediaan Jaringan Internet 4. Pembangunan Air Bersih 5. Pembangunan Sumber daya Manusia 6. Peningkatan Pendapatan per Kapita

Tabel 4.53
Dukungan Anggaran Terhadap Kegiatan Prioritas

ASTA CITA	PRO SN	PROGRAM DAERAH	DUKUNGAN ANGGARAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
Asta Cita 2: Memantapkan	KETAHANAN PANGAN Pengadaan dan	1. Pembangunan	13.394.636.900	Dinas PUPR, Dinas

sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Air Bersih. 2. Peningkatan Pendapatan per Kapita.		Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Asta Cita 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Industri Mengembangkan Mengembangkan Kreatif serta Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PERTUMBUHAN EKONOMI Pengendalian Inflasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Kemudahan Perizinan	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan 2. Penyediaan Internet 3. Pemerataan Jaringan Listrik 4. Peningkatan Pendapatan per Kapita	240.094.673.316	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Menengah, Kecil Perindustrian Perdagangan
Asta Cita 4:	KESEHATAN UNTUK	Pembangunan	114.116.553.43	Dinas

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	SEMUA Jaminan Kesehatan Nasional Makan Bergizi Gratis PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN Pembangunan Revitalisasi dan Pendidikan Dasar dan Menengah	Sumber Daya Manusia	3	Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan/ RSUD, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Asta Cita 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PERTUMBUHAN EKONOMI • Pengendalian Inflasi • Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih • Kemudahan Perizinan	Peningkatan Pendapatan per Kapita	13.394.636.900	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Asta Cita 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan	PENANGGULANGAN KEMISKINAN • Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem • Sekolah Rakyat	• Peningkatan Pendapatan per Kapita. • Pembangunan Sumber Daya Manusia	114.116.553.433	Dinas PU Pemberdayaan PR, Dinas Masyarakaat Desa P2KB, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

Pemberantasan Kemiskinan	• Pembangunan 3 juta Rumah PERTUMBUHAN EKONOMI • Pengendalian Inflasi • Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih • Kemudahan Perizinan			Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Tabel 4.54
Dukungan Program daerah Terhadap Program strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
a.	**Penanggulangan Kemiskinan**				
	1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial	- Meningkatnya pemberdayaan sosial Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial - Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti - Persentase Pekerjaan Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
				Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten padaMasa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana sesuai Standar - Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi dalam Pelayanan Sosial - Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	
		Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	- Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial - Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya - Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya - Persentase Gelangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	- Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar - Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
				- Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin - Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar - Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi - Persentase Keluarga Miskin dan Rentang Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	- Persentase Anak Usia 6 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	- Angka Kematian Ibu (AKI) - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warganegara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	- Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni - Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		Program	Meningkatnya	Persentase Luas Kawasan	Dinas

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
		Kawasan Permukiman	kualitas kawasan permukiman	Kumuh10-15 Ha yang Ditangani	Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		Program penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksessibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Cakupan layanan air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Programm Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan - Peningkatan Produksi Hortikultura - Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal PertumbuhanWirausaha	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2. Sekolah Rakyat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	- Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar - Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi - Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin - Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar - Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi - Persentase Keluarga Miskin dan Rentang Penerima Perlindungan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
				Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	- Efektivitas KerjaSama Daerah - Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Persentase MOU yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 6 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksessibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya ketersedian lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warganegara korban bencanadan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	- Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni - Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang LayakHuni	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
					Perhubungan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	- Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar - Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi - Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin - Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar - Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi - Persentase Keluarga Miskin dan Rentang Penerima Perlindungan Sosialyang Tergraduasi dari Kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya ketersedian lahanu ntuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
b.	**Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Bagah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah**				
		Program Penanganan kerawanan	Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase daerah rentan rawan bencana	Dinas Ketahanan Pangan,

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
		Pangan	pangan		Pertanian dan Perikanan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya kualitas pangan Persentase pangan yang memenuhi syarat mutu	Meningkatnya kualitas pangan Persentase pangan yang memenuhi syarat mutu	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdaganagan dan distribusi perdaganagan yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	- Korban Bencana Alam,Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana - Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
				Kesiapsiagaannya - Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	
c.	**Kesehatan untuk Semua**				
	1. Jaminan Kesehatan Nasional				
	2. Makanan Bergizi Nasional				
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	- Angka Kematian Ibu (AKI) - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)Pada Balita	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Dinas Kesehatan
		Prograam Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusidan kualitas sarana pertanian	- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan - Peningkatan Produksi Hortikultura - Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
d.	**Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah**				
		Program	Meningkatnya	Persentase AnakUsia 6 12	Dinas

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
		Pengelolaan Pendidikan	partisipasi anakusia sekolah	Tahun yang Berpartisipas idalam Pendidikan Dasar (APS)	Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kualitas distribusi industri pendidikan	Persentase Usulan lzin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembang kan Kurikulum Muatan Lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya layanan Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	NilaiTingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan
e. Pertumbuhan Ekonomi					
		Programm Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan - Peningkatan Produksi Hortikultura - Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Programm Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Dinas Perikanan

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
		Perikanan			
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	- Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal - Pertumbuhan Wirausaha	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksessibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	1. Pengendalian Inflasi				
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	persentase daerah rentan rawan bencana	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program	Meningkatnya	Skor Pola Pangan	Dinas

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
		Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Harapan	Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdaganagan dan distribusi perdaganagan yangefisien, meratadan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas hargabarang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tatakelola anggaran	- Persentase Belanja Pegawaidi Luar Tunjangan Guruyang Dialokasikan melaluiTKD - Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PDpada Bidang	Badan Perencanaan Pembanguna

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
			pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	n Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PDpada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah
	2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih				
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi UKM, Perindustria n dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Dinas Koperasi UKM, Perindustria n dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Dinas Koperasi UKM, Perindustria n dan Perdagangan
	3. Kemudahan Perizinan di Daerah				
		Program Perekonomian	Meningkatnya kualitas	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan	Sekretariat Daerah

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
		dan Pembangunan	kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Perekonomian dan Pembangunan	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalaha ndan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase IzinUsaha Industri yang Diterbitkan	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya ketersedian lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanahbagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
f.	**Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden**				
	1. Pembangunan Jalan Trans Mentawai				

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
		Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksessibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Peningkatan Tipe RS dari tipe D ke Tipe C dan Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan				
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	- Angka Kematian Ibu (AKI) - Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Balita	Dinas Kesehatan
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya ketersedian lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastrukture untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami di Kep. Mentawai (Megathrust Mentawai- Siberut)				
		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	- Bencana Alam,Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana - Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya - Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	- Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni - Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah daerahyang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan	Meningkatnya ketersedian lahan untuk kepentingan	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

No	Program Strategis Nasional	Program Daerah	Outcome	Indikator	Program
		Umum	umum	Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Ruang
	4. Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan,dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)				
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	persentase daerah rentan rawan bencana	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	- Angka Kematian Ibu (AKI) - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Dinas Kesehatan
		Programm Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan - Peningkatan Produksi Hortikultura - Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Dukungan Pembiayaan non-APBD

Pendapatan Transfer, arah kebijakan selaras dengan asumsi dana transfer ke daerah yang diproyeksikan mengalami stagnasi dan dengan kecenderungan tren perlambatan/menurun. Strategi utama menghadapi stagnasi dana transfer adalah mendorong efisiensi belanja, mempercepat penggalian sumber-sumber PAD baru, memperkuat kinerja aset daerah, dan membangun kerja sama kemitraan dengan sektor swasta. Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Menyiapkan skema pembiayaan inovatif seperti KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan alternatif pinjaman daerah untuk membiayai proyek-proyek prioritas yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh APBD).

Selain itu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah dan sebagainya. Dari sisi pentahelix non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, BAZNAS, Mitra Perangkat Daerah, kelompok masyarakat, media massa, Forum CSR dan lainnya.

Dalam hal program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional di mana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (Publik Private Partnership), KPBU maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan program kemitraan dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah, serta kerja sama kemitraan dengan lembaga non pemerintah dan kolaborasi multipihak dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Berikut ini adalah dukungngan pembiayaan non-APBD :

Tabel 4.55

Dukungngan Pembiayaan non-APBD Program Unggulan Tahun 2027

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
Program Unggulan Pembangunan Infratruktur Jalan							
Pembangunan Jalan (Jalan Poros ke Trans Mentawai/jalan kabupaten menuju desa)	Panjang jalan yang dibangun	100 KM	20 KM	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kab/ APBD Prop/ Swasta	
Pembangunan Jalan Sigapokna-Simalegi Simatalu-Sagulubek-Taileleu	Panjang jalan yang dibangun	164 KM	32 KM	Kec. Siberut Barat-Kec. Siberut Barat Daya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kab/ Swasta	Pembukaan Jalan
Program Unggulan Pemerataan Jaringan Listrik							
Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Listrik (Diesel, PLTS, Hybrid)	Jumlah Dusun yang dialiri listrik	10 Dusun	2 Dusun	Labuan Bajau, Subelen, Saliguma, Pasapuat, Kinikdog, Mapinang, Tiop, Koritbua, Betumonga, Katurai	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat/PLN/ Swasta/ Kementerian ESDM	APBN/ Swasta	Pola Fasilitasi dan Kerja sama
Bantuan Pemasangan Jaringan Meteran Listrik (Masyarakat Miskin 450/900VA)	Jumlah RT yang diberikan bantuan pemasangan jaringan meteran listrik	1.750 RT	350 RT	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	APBDKab/ CSR	Prioritas Masyarakat Miskin Ekstrem
Pengembangan Jaringan Jalan	Panjang jalan yang di bangun	100 KM	20 KM	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBDKab/ APBDProp/ Swasta	Dukungan pengembangan transmisi PLN

Program Unggulan	Indikator	Output	Indikasi Target	Lokasi	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Keterangan
Program Unggulan Pembangunan Air Bersih							
Pembangunan Air Bersih Non Perpipaan	Jumlah unit air bersih non perpipaan yang di bangun	2.000 RT	400 RT	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kab/CSR	
Program Unggulan Sumber Daya Manusia							
Beasiswa Pendidikan	Jumlah masyarakat miskin yang diberikan beasiswa	500 Orang	100 Orang	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekretariat Daerah	APBD Kab/CSR	
Pemberdayaan ekonomi Inklusif	Jumlah rumah yang direhab	4.000 Rumah	600 Rumah	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan/ Kementerian Perumahan Rakyat	APBD Kab/ APBN/ CSR	

4.4 Kebijakan pembangunan daerah RKPD 2027 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

Kepulauan Mentawai dikelola dengan dengan menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), dengan memadukan ketersediaan infrastruktur daerah pendukung pembangunan dalam perencanaan pembangunan seperti jalan, air, listrik, pariwisata, pangan, perikanan dsb.

Pembangunan Mentawai dari belanja sektoral tersebar menjadi paket kawasan prioritas berbasis sektor jangkar, dengan layanan dasar, konektivitas, fiskal, dukungan pusat-provinsi, dan risiko dikonsolidasikan dalam satu paket keterpaduan. RPJMN 2025–2029 memberi dasar kuat karena strategi kewilayahan diarahkan melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, penjagaan kawasan konservasi, serta perhatian terhadap aspek rawan bencana.

Sumatera Barat juga menempatkan Kabupaten Kepulauan Kepulauan Mentawai sebagai lokus afirmasi yang perlu didorong melalui penyediaan layanan dasar, pembangunan jalan Trans Mentawai, pengembangan aktivitas ekonomi unggulan, dan peningkatan layanan kesehatan.

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Menentukan prioritas inti yaitu memilih 1-3 agenda prioritas yang paling penting, paling berdampak, dan paling realistis;
2. Membangun kemampuan fiskal dan dukungan eksternal. Melihat apa yang bisa dibiayai daerah, dan apa yang perlu dukungan pihak lain;
3. Mengurangi *bottleneck* dan risiko. Mencari titik macet utama, aktor kunci, dan risiko yang menghambat;
4. Mengemas proyek atau usulan. Menyusun usulan yang lebih jelas, menyakinkan, dan dibawa ke forum;
5. Menyusun langkah 30/90/365 hari. Menetapkan siapa melakukan apa, kapan, dan hasil awal yang dituju

Prioritas Inti Perencanaan dengan konsep THIS sebagai berikut:

a. Prioritas Inti 1 — Kawasan Transformasi Ekonomi-Afirmatif Kepulauan Mentawai

   Prioritas ini memilih kawasan tertentu yang memiliki kombinasi antara potensi ekonomi, kebutuhan afirmatif, dan daya ungkit wilayah. Kawasan tidak dipilih hanya karena paling tertinggal, dan tidak juga hanya karena paling menarik bagi investor. Kawasan dipilih karena punya peluang menjadi mesin pertumbuhan sekaligus menjawab ketertinggalan layanan dasar.

   Isi utamanya:

   a. kawasan pariwisata bahari-budaya;
   b. kawasan potensi KEK atau pusat pertumbuhan baru;
   c. kawasan yang membutuhkan konektivitas, air, listrik, internet, kesehatan, pendidikan, dan sanitasi sebagai backbone;
   d. kawasan yang bisa memberi *spillover* ke desa sekitar.

   Harus diturunkan menjadi kawasan fungsional: kawasan pariwisata tertentu, kawasan hilirisasi tertentu, Kawasan logistik tertentu, atau kawasan desa pesisir tertentu.

b. Prioritas Inti 2 — Hilirisasi Komoditas Lokal dan Rantai Pasok Ekonomi Kepulauan

Ini prioritas yang paling bisa *dipush* karena sesuai dengan karakter masyarakat Mentawai yang lebih kuat sebagai masyarakat “darat”, meskipun wilayahnya dikelilingi laut. Ekonomi biru tetap penting, tetapi tidak boleh dipaksakan sebagai prime mover tunggal kalau basis sosial-ekonominya belum komersial.

Fokus prioritas ini:

a. Hilirisasi Kelapa;
b. Pisang;
c. Sagu;
d. Keladi;
e. Pala;
f. Cengkih;
g. Pangan Lokal;
h. Pengolahan Komoditas Berbasis Pulau;
i. Koperasi/Umkm;
j. Logistik Kepulauan;
k. Perikanan Komersial Secara Selektif, Bukan Asumsi Utama.

RPJMD Sumatera Barat bahkan secara eksplisit menyebut Mentawai perlu berfokus pada aktivitas ekonomi sektor pertanian, terutama komoditas unggulan seperti durian, pisang, kelapa, dan komoditas perikanan, serta memuat contoh hilirisasi pisang tropis premium dan industri olahan berbasis pulau. Akan hilirisasi jangan langsung dianggap layak hanya karena ada lahan 100 ha atau komoditas tersedia. Harus diuji: pasokan bahan baku, pasar, listrik, air, pelabuhan, pengolahan limbah, aktor bisnis, koperasi, investor, dan dampaknya bagi petani lokal.

c. Prioritas Inti 3 — Ketahanan Wilayah Kepulauan dan Desa Pesisir Produktif

Ketahanan Wilayah Kepulauan dan Desa Pesisir Produktif bertujuan untuk menjaga agar wilayah yang belum menjadi Kawasan pertumbuhan tetap memperoleh layanan dasar minimum, tetap aman dari risiko bencana, dan tetap tersambung ke manfaat ekonomi.

Berfokus pada

a. Layanan Dasar Minimum: Air, Sanitasi, Listrik, Pendidikan, Kesehatan, Internet Dasar;
b. Desa Pesisir dan Pulau Kecil Yang Rentan;
c. Mitigasi Tsunami, Gempa, Abrasi, Cuaca Ekstrem dan Bencana Kepulauan;

d. Desa Penyangga Kawasan Ekonomi;

e. Koperasi Desa, UMKM, Tenaga Kerja Lokal dan Rantai Pasok Lokal;

f. Dashboard Risiko dan Layanan Dasar.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan prioritas merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2027

Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 terdiri dari program prioritas yang menunjang pencapaian tujuan pembangunan. Rincian program prioritas dihubungkan dengan prioritas nasional tahun 2027.

Adapun rencana program/kegiatan pembangunan dalam RKPD Tahun 2027 diuraikan secara rinci pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi RKPD Tahun 2027

NO	Nama SKPD	Nama Sub Unit	Pagu (Rp.)
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	197,742,996,421
2	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	90,219,992,705
	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	14,389,997,979
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MAPADDEGAT	1,500,000,000
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SIOBAN	1,402,660,100
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS BOSUA	638,535,500
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MUARA SIBERUT	1,402,660,100
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS PEIPEI	113,250,400
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP	1,168,970,250
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN	1,453,206,000
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS BETAET	742,900,000
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SIKAKAP	1,366,200,000
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MALAKOPA	925,997,000
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS BULASAT	809,490,000
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SAREREIKET	655,802,800
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SIMATALU	628,044,000
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SIGAPOKNA	703,187,600
	DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS SAUMANGANYA	881,520,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	107,527,005,267
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT	50,000,000
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	UPT PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH	2,100,000,000
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	35,345,347,374
5	SATUAN POLISI PAMONG	SATUAN POLISI PAMONG	

NO	Nama SKPD	Nama Sub Unit	Pagu (Rp.)
1	2	3	4
	PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4,850,937,540
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,616,570,462
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6,616,535,838
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UPTD PPA	596,555,905
9	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	51,466,725,767
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,018,575,685
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6,546,817,373
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6,106,941,365
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10,473,469,981
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5,101,881,368
15	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4,946,545,904
16	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	24,386,918,676
17	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	44,329,596,187
18	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	33,434,036,477
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	7,250,654,724
20	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	122,239,061,469
21	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4,263,662,156
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5,010,703,866
23	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	8,348,050,781
24	KECAMATAN SIBERUT UTARA	KECAMATAN SIBERUT UTARA	2,809,331,751
25	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	2,115,124,387
26	KECAMATAN SIBERUT BARAT	KECAMATAN SIBERUT BARAT	2,102,339,226
27	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	2,023,197,102
28	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	2,375,521,421
29	KECAMATAN SIPORA UTARA	KECAMATAN SIPORA UTARA	2,424,294,387
30	KECAMATAN SIPORA SELATAN	KECAMATAN SIPORA SELATAN	2,749,281,512

NO	Nama SKPD	Nama Sub Unit	Pagu (Rp.)
1	2	3	4
31	KECAMATAN PAGAI UTARA	KECAMATAN PAGAI UTARA	2,149,056,766
32	KECAMATAN PAGAI SELATAN	KECAMATAN PAGAI SELATAN	2,305,061,411
33	KECAMATAN SIKAKAP	KECAMATAN SIKAKAP	2,960,824,606
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,533,307,892
TOTAL			**843,919,345,481**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**197.742.996.421,00**							**1.000.634.800.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**196.562.996.421,00**							**999.454.800.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**196.562.996.421,00**							**999.454.800.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**150.063.366.221,00**							**131.218.000.000,00**	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan,dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 persen	149.956.986.221,00						-	131.118.000.000,00	
			-	-		-	-	106.380.000,00						-	100.000.000,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						149.038.996.421,00					Pegawai Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		130.200.000.000,00	
		-						149.038.996.421,00					Pegawai Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		130.200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	149.038.996.421,00						-	130.200.000.000,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						149.038.996.421,00							130.200.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	0 Orang/bulan	149.038.996.421,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	130.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						827.989.800,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		828.000.000,00	
		-						827.989.800,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		828.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	17.928.600,00						-	18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	299.959.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	450.131.400,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	59.970.800,00						-	60.000.000,00	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						450.131.400,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	11 Paket	450.131.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						59.970.800,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	59.970.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						17.928.600,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	30 Dokumen	17.928.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	18.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						299.959.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	32 Laporan	299.959.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		90.000.000,00	
		-						90.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	90.000.000,00						-	90.000.000,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106.380.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000.000,00	
		-						106.380.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	106.380.000,00						-	100.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						106.380.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	106.380.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**45.715.630.200,00**							**867.925.000.000,00**	
			Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	-		-	61,90 persen	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	-		-	60,30 persen	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	-		-	70,90 persen	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	-		-	66,80 persen	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	-		-	70,50 persen	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	-		-	70 persen	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	-		-	72,90 persen	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	-		-	98,90 persen	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	-		-	37,60 persen	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			Persentase Anak Usia 6-12 Tahun yang Berpartisipasi dalamPendidikan Dasar (APS)	-		-	100 persen	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	-		-	59,10 persen	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	-		-	53,80 nilai	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	-		-	53,50 nilai	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	-		-	56,30 nilai	12.207.035.000,00						-	12.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	-		-	56,30 persen	19.134.303.000,00						-	841.395.000.000,00	
			Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	-		-	55,30 nilai	28.891.338.000,00						-	850.995.000.000,00	
			-	-		-	-	3.824.292.200,00						-	3.780.000.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						25.134.303.000,00					Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik		847.345.000.000,00	
		-						25.134.303.000,00					Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik		847.345.000.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	800.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-		-	-	300.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	250.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	15.200.000.000,00						-	15.200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	800.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	800.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-		-	-	800.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	440.000.000,00						-	440.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	823.000.000,00						-	823.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-		-	-	221.303.000,00						-	280.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	-	400.000.000,00						-	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						440.000.000,00							440.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	440.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						300.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	3 Unit	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						823.000.000,00							823.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	2 Unit	823.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	823.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	2 Ruang	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	10 Paket	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						500.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	150 Peserta Didik	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						300.000.000,00							500.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-		-	50 Orang	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						800.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	150 Orang	800.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						221.303.000,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-		-	136 Satuan Pendidikan	221.303.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	136 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	136 Orang	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar						800.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-		-	2 Ruang	800.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	13 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	1 Komunitas	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						800.000.000,00							800.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	4 Ruang	800.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						250.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	200 Orang	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	136 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						800.000.000,00							800.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	5 Ruang	800.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						15.200.000.000,00							15.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	14250 Peserta Didik	15.200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	15.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	5 Paket	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						15.957.035.000,00					Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik		16.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						15.957.035.000,00					Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik		16.100.000.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	800.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	7.100.000.000,00						-	7.100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	-	650.000.000,00						-	650.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	-	350.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	400.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-		-	-	900.000.000,00						-	900.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-		-	-	157.035.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						900.000.000,00							900.000.000,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-		-	1 Unit	900.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						650.000.000,00							650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	2 Ruang	650.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium						350.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	350.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah						600.000.000,00							600.000.000,00	
		Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Unit	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						600.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Unit	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	5 Unit	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						600.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	2 Ruang	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	10 Paket	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						7.100.000.000,00							7.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	5200 Peserta Didik	7.100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	7.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	100 Peserta Didik	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						300.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-		-	50 Orang	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						800.000.000,00							800.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	250 Orang	800.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						157.035.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-		-	35 Satuan Pendidikan	157.035.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	34 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						500.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	35 Orang	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	12 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	35 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						500.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	2 Ruang	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	1 Paket	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						3.224.292.200,00					Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik		3.230.000.000,00	
		-						3.224.292.200,00					Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik		3.230.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	-	800.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	380.000.000,00						-	380.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-		-	-	550.000.000,00						-	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	-	194.292.200,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-		-	-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						600.000.000,00							600.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-		-	1 Unit	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						550.000.000,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-		-	100 Orang	550.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						380.000.000,00							380.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	100 Orang	380.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	116 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						800.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	114 Satuan Pendidikan	800.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-BOP PAUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						300.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	12 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	300 Peserta didik	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						194.292.200,00							200.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	114 Satuan Pendidikan	194.292.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1.400.000.000,00					Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik		1.250.000.000,00	
		-						1.400.000.000,00					Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik		1.250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	300.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-		-	-	700.000.000,00						-	700.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	60 Orang	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						300.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	13 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						700.000.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-		-	13 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**468.000.000,00**							**46.800.000,00**	
			Persentase SatuanPendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	-		-	83 persen	468.000.000,00						-	46.800.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						468.000.000,00					Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik		46.800.000,00	
		-						468.000.000,00					Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik		46.800.000,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	-		-	-	468.000.000,00						-	46.800.000,00	
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						468.000.000,00							46.800.000,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	-		-	2 Buku	468.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	46.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**166.000.000,00**							**166.000.000,00**	
			Indeks Pemerataan Guru	-		-	0,35 angka	166.000.000,00						-	166.000.000,00	
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	-		-	38 persen	166.000.000,00						-	166.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	-		-	21,40 persen	166.000.000,00						-	166.000.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						166.000.000,00					Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru		166.000.000,00	
		-						166.000.000,00					Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru		166.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	166.000.000,00						-	166.000.000,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						166.000.000,00							166.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	170 Dokumen	166.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	166.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**150.000.000,00**							**99.000.000,00**	
			Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	-		-	65 persen	150.000.000,00						-	99.000.000,00	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						150.000.000,00					Satuan Pendidikan		99.000.000,00	
		-						150.000.000,00					Satuan Pendidikan		99.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	-	150.000.000,00						-	99.000.000,00	
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						150.000.000,00							99.000.000,00	
		Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-		-	114 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	99.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.180.000.000,00**							**1.180.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.180.000.000,00**							**1.180.000.000,00**	
6.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**392.000.000,00**							**392.000.000,00**	
			-	-		-	-	142.000.000,00						-	142.000.000,00	
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	-		-	35 persen	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00					Masyarakat, Komunitas adat, Individu, • Lembaga pendidikan		250.000.000,00	
		-						250.000.000,00					Masyarakat, Komunitas adat, Individu, • Lembaga pendidikan		250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	3 Objek	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						142.000.000,00					Masyarakat, Komunitas adat, Individu, • Lembaga pendidikan		142.000.000,00	
		-						142.000.000,00					Masyarakat, Komunitas adat, Individu, • Lembaga pendidikan		142.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-	-	142.000.000,00						-	142.000.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						142.000.000,00							142.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-	4 Objek	142.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	142.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**372.000.000,00**							**372.000.000,00**	
			Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi di bidang kebudayaan	-		-	12,84 persen	372.000.000,00						-	372.000.000,00	
			Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	-		-	35 persen	372.000.000,00						-	372.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						372.000.000,00					Masyarakat, Komunitas adat, Individu, • Lembaga pendidikan		372.000.000,00	
		-						372.000.000,00					Masyarakat, Komunitas adat, Individu, • Lembaga pendidikan		372.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-		-	-	372.000.000,00						-	372.000.000,00	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						372.000.000,00							372.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-		-	40 Orang	372.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	372.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**416.000.000,00**							**416.000.000,00**	
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	-		-	80 persen	416.000.000,00						-	416.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						416.000.000,00					Masyarakat, Komunitas adat, Individu, • Lembaga pendidikan		416.000.000,00	
		-						416.000.000,00					Masyarakat, Komunitas adat, Individu, • Lembaga pendidikan		416.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	-	226.000.000,00						-	226.000.000,00	
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-		-	-	190.000.000,00						-	190.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya						190.000.000,00							190.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-		-	5 Objek	190.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						226.000.000,00							226.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	5 Objek	226.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	226.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						**89.219.992.705,00**							**8.550.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**89.219.992.705,00**							**8.550.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**89.219.992.705,00**							**8.550.000.000,00**	
9.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**77.642.470.896,00**							**0,00**	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-		-	1 Paket	60.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	-		-	3 Unit	45.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	100 Persen	77.418.470.896,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-		-	1 Unit	20.000.000,00						-	0,00	
			Terlaksananya Pembayaran Rekening air dan Listrik	-		-	12 Bulan	64.000.000,00						-	0,00	
			Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	25.000.000,00						-	0,00	
			Terlaksananya Rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD	-		-	30 Kali	60.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
		-						25.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						77.418.470.896,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
		-						77.418.470.896,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	77.368.470.896,00						-	0,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						77.368.470.896,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1303 Orang/bulan	77.368.470.896,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	10 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						70.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
		-						70.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						20.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
		-						64.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	64.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						64.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	64.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
		-						45.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						20.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	3 Unit	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
10.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			Angka Kematian Ibu (AKI	-		-	200/100 Kelahiran Hidup	2.953.921.809,00						-	90.000.000,00	
			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-		-	85 Persen	2.953.921.809,00						-	90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	-		-	75 Persen	2.953.921.809,00						-	90.000.000,00	
			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	-		-	60 Persen	2.953.921.809,00						-	90.000.000,00	
			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	-		-	80 Persen	2.953.921.809,00						-	90.000.000,00	
			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	-		-	95 Persen	2.953.921.809,00						-	90.000.000,00	
			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	-		-	100 Persen	2.953.921.809,00						-	90.000.000,00	
			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	-		-	70 Persen	2.953.921.809,00						-	90.000.000,00	
			-	-		-	-	7.248.600.000,00						-	7.425.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						3.028.921.809,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		180.000.000,00	
		-						3.028.921.809,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		180.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	2.878.921.809,00						-	0,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						25.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-		-	2 Unit	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	6 Unit	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						25.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						2.878.921.809,00							0,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	80 Paket	2.878.921.809,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-		-	15 Keluarga	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	-		-	3 Layanan	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	-	5.948.600.000,00						-	6.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	200.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	-	900.000.000,00						-	950.000.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	100 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	10 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						30.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	10 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						5.948.600.000,00							6.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	15 Dokumen	5.948.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-		-	5 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						900.000.000,00							950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	12 Dokumen	900.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	12 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	<1/00 Orang	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	10 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-		-	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	100 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	100 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
11.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**270.000.000,00**							**0,00**	
			Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 Persen	270.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						270.000.000,00					Tenaga Kesehatan		0,00	
		-						270.000.000,00					Tenaga Kesehatan		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	-	270.000.000,00						-	0,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						270.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	100 Orang	270.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
12.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**150.000.000,00**							**0,00**	
			Persentase Industri Rumah Tangga yang memeiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	-		-	100 Persen	50.000.000,00						-	0,00	
			Persentase Pengawasan, Pengendalian dan Fasilitasi Perizinan Apotik, Toko Obat, Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional	-		-	100 Persen	50.000.000,00						-	0,00	
			Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	-		-	undefined undefined	50.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						50.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
		-						50.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						50.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
		-						50.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	10 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						50.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
		-						50.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	20 Unit	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
13.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**30.000.000,00**							**0,00**	
			Jumlah Desa Sehat	-		-	8 Desa	30.000.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
		-						30.000.000,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						30.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-		-	8 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						**14.389.997.979,00**							**30.656.927.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.389.997.979,00**							**30.656.927.700,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**14.389.997.979,00**							**30.656.927.700,00**	
14.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.112.526.800,00**							**3.112.726.800,00**	
			Persentase perangkat daerah yang didukung administrasi dan operasionalnya	-		-	100 persen	341.426.800,00						-	741.426.800,00	
			Persentase perangkat daerah yang didukung pemeliharaan barang milik daerahnya	-		-	100 persen	300.300.000,00						-	500.500.000,00	
			Persentase perangkat daerah yang didukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	-		-	100 persen	470.800.000,00						-	870.800.000,00	
			-	-		-	-	0,00						-	1.000.000.000,00	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						341.426.800,00					-		741.426.800,00	
		-						341.426.800,00					-		741.426.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	315.606.800,00						-	615.606.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	25.820.000,00						-	125.820.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.820.000,00							125.820.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	25.820.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	125.820.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						315.606.800,00							615.606.800,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	315.606.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	615.606.800,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						470.800.000,00					-		870.800.000,00	
		-						470.800.000,00					-		870.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	470.800.000,00						-	870.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						470.800.000,00							870.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	470.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	870.800.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						300.300.000,00					-		500.500.000,00	
		-						300.300.000,00					-		500.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	300.300.000,00						-	500.500.000,00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						300.300.000,00							500.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	20 Unit	300.300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	500.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						0,00					-		1.000.000.000,00	
		-						0,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	0,00						-	1.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						0,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
15.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**6.218.273.200,00**							**18.444.200.900,00**	
			Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	100 persen	6.218.273.200,00						-	18.444.200.900,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						3.480.853.200,00					-		14.706.780.900,00	
		-						3.480.853.200,00					-		14.706.780.900,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	813.400.000,00						-	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	1.667.453.200,00						-	6.000.000.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	-	1.000.000.000,00						-	7.706.780.900,00	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						813.400.000,00							1.000.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	155 Unit	813.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						1.000.000.000,00							7.706.780.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	1 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	7.706.780.900,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						1.667.453.200,00							6.000.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	10 Paket	1.667.453.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	6.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.737.420.000,00					-		3.737.420.000,00	
		-						2.737.420.000,00					-		3.737.420.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	-	2.737.420.000,00						-	3.737.420.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						2.737.420.000,00							3.737.420.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	10 Dokumen	2.737.420.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.737.420.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
16.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**7.059.197.979,00**							**9.100.000.000,00**	
			Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	-		-	100 persen	7.059.197.979,00						-	9.100.000.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						7.059.197.979,00					-		9.100.000.000,00	
		-						7.059.197.979,00					-		9.100.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	7.059.197.979,00						-	9.100.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						7.059.197.979,00							9.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	335 Orang	7.059.197.979,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	9.100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		PUSKESMAS MAPADDEGAT						**1.500.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.500.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.500.000.000,00**							**0,00**	
17.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.500.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.500.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS MAPADDEGAT
		PUSKESMAS SIOBAN						**1.402.660.100,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.402.660.100,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.402.660.100,00**							**0,00**	
18.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.402.660.100,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.402.660.100,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	1.402.660.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS SIOBAN
		PUSKESMAS BOSUA						**638.535.500,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**638.535.500,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**638.535.500,00**							**0,00**	
19.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	638.535.500,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat,Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						638.535.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	638.535.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS BOSUA
		PUSKESMAS MUARA SIBERUT						**1.402.660.100,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.402.660.100,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.402.660.100,00**							**0,00**	
20.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.402.660.100,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.402.660.100,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	1.402.660.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS MUARA SIBERUT
		PUSKESMAS PEIPEI						**1.113.250.400,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.113.250.400,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.113.250.400,00**							**0,00**	
21.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.113.250.400,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.113.250.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	1.113.250.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS PEIPEI
		PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP						**1.168.970.250,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.168.970.250,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.168.970.250,00**							**0,00**	
22.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.168.970.250,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.168.970.250,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	1.168.970.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP
		PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN						**1.453.206.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.453.206.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.453.206.000,00**							**0,00**	
23.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.453.206.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.453.206.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	1.453.206.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN
		PUSKESMAS BETAET						**742.900.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**742.900.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**742.900.000,00**							**0,00**	
24.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	742.900.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						742.900.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	742.900.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Barat || Desa Simalegi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS BETAET
		PUSKESMAS SIKAKAP						**1.366.200.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.366.200.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.366.200.000,00**							**0,00**	
25.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.366.200.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.366.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	1.366.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS SIKAKAP
		PUSKESMAS MALAKOPA						**925.997.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**925.997.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**925.997.000,00**							**0,00**	
26.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	925.997.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						925.997.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	925.997.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Malakopa || 1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS MALAKOPA
		PUSKESMAS BULASAT						**809.490.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**809.490.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**809.490.000,00**							**0,00**	
27.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	809.490.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						809.490.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	809.490.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS BULASAT
		PUSKESMAS SAREREIKET						**655.802.800,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**655.802.800,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**655.802.800,00**							**0,00**	
28.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	655.802.800,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						655.802.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	655.802.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS SAREREIKET
		PUSKESMAS SIMATALU						**628.044.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**628.044.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**628.044.000,00**							**0,00**	
29.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	628.044.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						628.044.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	628.044.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Barat || Desa Simatalu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS SIMATALU
		PUSKESMAS SIGAPOKNA						**703.187.600,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**703.187.600,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**703.187.600,00**							**0,00**	
30.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	703.187.600,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						703.187.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	703.187.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Barat || Desa Sigapokna || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	PUSKESMAS SIGAPOKNA
		PUSKESMAS SAUMANGANYA						**881.520.000,00**							**900.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**881.520.000,00**							**900.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**881.520.000,00**							**900.000.000,00**	
31.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**26.519.945.559,00**							**9.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	881.520.000,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
		-						23.491.023.750,00					Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		9.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	15.392.423.750,00						-	900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						881.520.000,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	3 Dokumen	881.520.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Utara || Desa Saumanganya || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	900.000.000,00	PUSKESMAS SAUMANGANYA
		UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT						**50.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**50.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**50.000.000,00**							**55.000.000,00**	
32.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.690.879.817,00**							**5.624.557.003,00**	
			-	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						307.943.000,00					Aparatur Sipil Negara		330.840.150,00	
		-						307.943.000,00					Aparatur Sipil Negara		330.840.150,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	7 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	55.000.000,00	UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT
		UPT Pengelolaan Air Minum Daerah						**2.100.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.100.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**2.100.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
33.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**8.731.552.266,00**							**2.250.000.000,00**	
			Cakupan layanan air bersih	-		-	66 Persen	2.100.000.000,00						-	2.100.000.000,00	
			Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/ kota	-		-	4,29 Persen	2.100.000.000,00						-	2.100.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						8.731.552.266,00					-		2.250.000.000,00	
		-						8.731.552.266,00					-		2.250.000.000,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	2.100.000.000,00						-	2.100.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						2.100.000.000,00							2.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	8 Unit	2.100.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Pembangunan Air Bersih		-	2.100.000.000,00	UPT Pengelolaan Air Minum Daerah
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**107.527.005.267,00**							**95.416.777.665,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**107.527.005.267,00**							**95.416.777.665,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**107.527.005.267,00**							**95.416.777.665,00**	
34.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.690.879.817,00**							**5.624.557.003,00**	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas	-		-	100 Persen	27.065.500,00						-	28.418.775,00	
			-	-		-	-	5.613.814.317,00						-	5.541.138.228,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.065.500,00					Aparatur Sipil Negara		28.418.775,00	
		-						27.065.500,00					Aparatur Sipil Negara		28.418.775,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	27.065.500,00						-	28.418.775,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						27.065.500,00							28.418.775,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	27.065.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	28.418.775,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.933.969.517,00					Aparatur Sipil Negara		4.809.995.938,00	
		-						4.933.969.517,00					Aparatur Sipil Negara		4.809.995.938,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.933.969.517,00						-	4.809.995.938,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.933.969.517,00							4.809.995.938,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	63 Orang/bulan	4.933.969.517,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	4.809.995.938,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						270.136.800,00					Aparatur Sipil Negara		288.360.640,00	
		-						270.136.800,00					Aparatur Sipil Negara		288.360.640,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	164.292.000,00						-	172.506.600,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.544.800,00						-	74.072.040,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00						-	12.600.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.300.000,00						-	3.432.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.300.000,00							3.432.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.300.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	3.432.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						70.544.800,00							74.072.040,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	70.544.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	74.072.040,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							12.600.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	12.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	12.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.000.000,00							15.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	15.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						164.292.000,00							172.506.600,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	25 Laporan	164.292.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	172.506.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						151.765.000,00					Aparatur Sipil Negara		166.941.500,00	
		-						151.765.000,00					Aparatur Sipil Negara		166.941.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	101.275.000,00						-	111.402.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.490.000,00						-	55.539.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						101.275.000,00							111.402.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	101.275.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	111.402.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						50.490.000,00							55.539.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	50.490.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	55.539.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						307.943.000,00					Aparatur Sipil Negara		330.840.150,00	
		-						307.943.000,00					Aparatur Sipil Negara		330.840.150,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	134.993.000,00						-	141.742.650,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	22.950.000,00						-	24.097.500,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						134.993.000,00							141.742.650,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	26 Unit	134.993.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	141.742.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.950.000,00							24.097.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	35 Unit	22.950.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	24.097.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**9.164.707.494,00**							**2.800.000.000,00**	
			Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	-		-	55,66 Persen	5.287.515.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	-		-	60 Persen	5.287.515.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	-		-	48 Persen	5.287.515.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	-		-	50 Persen	5.287.515.000,00						-	1.500.000.000,00	
			-	-		-	-	3.877.192.494,00						-	1.300.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.287.515.000,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		1.500.000.000,00	
		-						5.287.515.000,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		1.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	-		-	-	1.199.736.000,00						-	0,00	
			Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	-		-	-	3.279.834.000,00						-	0,00	
			Panjang Breakwater yang Dibangun	-		-	-	0,00						-	1.500.000.000,00	
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	-		-	-	807.945.000,00						-	0,00	
	1.03.02.2.01.0102	Pembangunan Breakwater						0,00							1.500.000.000,00	
		Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	-		-	0,3 KM	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						0,00							0,00	
		Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	-		-	0,2 KM	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai						807.945.000,00							0,00	
		Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	-		-	0,3 KM	807.945.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Mara || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai						1.199.736.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	-		-	2 Dokumen	1.199.736.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0135	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai						3.279.834.000,00							0,00	
		Terbangunnya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	-		-	0,3 KM	3.279.834.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.877.192.494,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		1.300.000.000,00	
		-						3.877.192.494,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		1.300.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	-		-	-	3.020.314.000,00						-	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	856.878.494,00						-	1.200.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						3.020.314.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	-		-	0,6 KM	3.020.314.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						856.878.494,00							1.200.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	4 KM	856.878.494,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan Air Bersih		-	1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**8.731.552.266,00**							**2.250.000.000,00**	
			Cakupan layanan air bersih	-		-	66 Persen	6.631.552.266,00						-	150.000.000,00	
			Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/ kota	-		-	4,29 Persen	6.631.552.266,00						-	150.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						8.731.552.266,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		2.250.000.000,00	
		-						8.731.552.266,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		2.250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	200.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-		-	-	4.586.452.266,00						-	0,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	-		-	-	395.100.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	-		-	-	1.150.000.000,00						-	0,00	
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						395.100.000,00							0,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	-		-	150 Unit	395.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan Air Bersih		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						300.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-		-	3 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan Air Bersih		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						1.150.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	-		-	2 Unit	1.150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan Air Bersih		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						4.586.452.266,00							0,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-		-	1000 SR	4.586.452.266,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan Air Bersih		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						200.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	4 Lembaga	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pembangunan Air Bersih		-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
37.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**893.414.443,00**							**912.045.641,00**	
			Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	-		-	15 Persen	893.414.443,00						-	912.045.641,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						893.414.443,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		912.045.641,00	
		-						893.414.443,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		912.045.641,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	-		-	-	450.000.000,00						-	0,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	-		-	-	443.414.443,00						-	912.045.641,00	
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						450.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	-		-	3 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R						443.414.443,00							912.045.641,00	
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	-		-	0,5 Ton/hari	443.414.443,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	912.045.641,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
38.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**2.301.615.280,00**							**1.849.612.994,00**	
			Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	-		-	3,2 Persen	2.301.615.280,00						-	1.849.612.994,00	
			Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	-		-	72 Persen	2.301.615.280,00						-	1.849.612.994,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.301.615.280,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		1.849.612.994,00	
		-						2.301.615.280,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		1.849.612.994,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	-	745.246.000,00						-	0,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	-	1.556.369.280,00						-	1.849.612.994,00	
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						745.246.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	2 Dokumen	745.246.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						1.556.369.280,00							1.849.612.994,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	200 Rumah Tangga	1.556.369.280,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	1.849.612.994,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**1.414.605.261,00**							**1.444.105.334,00**	
			Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	-		-	30 Persen	1.414.605.261,00						-	1.444.105.334,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.414.605.261,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		1.444.105.334,00	
		-						1.414.605.261,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		1.444.105.334,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	-		-	-	400.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	-		-	-	1.014.605.261,00						-	1.194.105.334,00	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						1.014.605.261,00							1.194.105.334,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	-		-	200 M	1.014.605.261,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	1.194.105.334,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						400.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	-		-	3 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**7.806.665.237,00**							**3.716.815.938,00**	
			Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	-		-	35 Persen	7.806.665.237,00						-	3.716.815.938,00	
			Persentase kepatuhan PBG dan SLF Kabupaten/ Kota	-		-	55 Persen	7.806.665.237,00						-	3.716.815.938,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						7.806.665.237,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		3.716.815.938,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						7.806.665.237,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		3.716.815.938,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	7.506.665.237,00						-	3.366.815.938,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-		-	25 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						7.506.665.237,00							3.366.815.938,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Bangunan Gedung	7.506.665.237,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	3.366.815.938,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
41.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**416.577.613,00**							**425.264.892,00**	
			Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	-		-	70 Persen	416.577.613,00						-	425.264.892,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						416.577.613,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		425.264.892,00	
		-						416.577.613,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		425.264.892,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	324.577.613,00						-	325.264.892,00	
			Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	-		-	-	92.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						324.577.613,00							325.264.892,00	
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	324.577.613,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	325.264.892,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan						92.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	-		-	1 Orang	92.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**71.708.516.225,00**							**77.929.163.949,00**	
			Tingkat kemantapan jalan	-		-	21,25 Persen	71.708.516.225,00						-	77.929.163.949,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						71.708.516.225,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		77.929.163.949,00	
		-						71.708.516.225,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		77.929.163.949,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-		-	-	3.067.008.800,00						-	7.746.819.840,00	
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	-	1.176.387.500,00						-	0,00	
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	-		-	-	2.670.485.000,00						-	3.269.623.577,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-		-	-	841.236.000,00						-	925.359.600,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-		-	-	34.735.781.566,00						-	27.329.948.122,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	-	2.526.848.000,00						-	2.779.532.800,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	-	3.105.955.859,00						-	1.602.189.600,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	-	7.585.908.000,00						-	34.275.690.410,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	-		-	-	15.998.905.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						3.067.008.800,00							7.746.819.840,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-		-	15 Dokumen	3.067.008.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	7.746.819.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						841.236.000,00							925.359.600,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-		-	1104 KM	841.236.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	925.359.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						3.105.955.859,00							1.602.189.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	60,50 KM	3.105.955.859,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	1.602.189.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						34.735.781.566,00							27.329.948.122,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-		-	11,14 KM	34.735.781.566,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	27.329.948.122,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						2.526.848.000,00							2.779.532.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	2 KM	2.526.848.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	2.779.532.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						7.585.908.000,00							34.275.690.410,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	3,54 KM	7.585.908.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	34.275.690.410,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						2.670.485.000,00							3.269.623.577,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	-		-	2 KM	2.670.485.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	3.269.623.577,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan						1.176.387.500,00							0,00	
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	8 Jembatan	1.176.387.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						15.998.905.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	-		-	60 Meter	15.998.905.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
43.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**333.262.091,00**							**340.211.914,00**	
			Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-		-	5 Persen	238.180.000,00						-	250.000.000,00	
			Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	-		-	15 Persen	238.180.000,00						-	250.000.000,00	
			Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	-		-	30 Persen	238.180.000,00						-	250.000.000,00	
			-	-		-	-	95.082.091,00						-	90.211.914,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						238.180.000,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		250.000.000,00	
		-						238.180.000,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		250.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	-		-	-	188.180.000,00						-	200.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-		-	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						188.180.000,00							200.000.000,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	-		-	50 Orang	188.180.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						95.082.091,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		90.211.914,00	
		-						95.082.091,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		90.211.914,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	-	95.082.091,00						-	90.211.914,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						95.082.091,00							90.211.914,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	60 Paket Pekerjaan	95.082.091,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	90.211.914,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
44.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**1.215.209.540,00**							**280.000.000,00**	
			Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	-		-	20 Hari	379.045.540,00						-	50.000.000,00	
			Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	-		-	35 Persen	379.045.540,00						-	50.000.000,00	
			-	-		-	-	836.164.000,00						-	105.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						379.045.540,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		50.000.000,00	
		-						379.045.540,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-		-	-	126.415.000,00						-	0,00	
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	-	252.630.540,00						-	0,00	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						126.415.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	126.415.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						252.630.540,00							0,00	
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	252.630.540,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						0,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		30.000.000,00	
		-						0,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		30.000.000,00	
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-		-	-	0,00						-	30.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-		-	2 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						836.164.000,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		25.000.000,00	
		-						836.164.000,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	-		-	-	317.122.000,00						-	0,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	-		-	-	519.042.000,00						-	0,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						0,00							25.000.000,00	
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	-		-	30 Layanan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						317.122.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	-		-	1 Dokumen	317.122.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						519.042.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	-		-	1 Sistem Informasi	519.042.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						0,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		175.000.000,00	
		-						0,00					Masyaraka Kab. Kep. Mentawai		175.000.000,00	
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	-		-	2 Kasus	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	-		-	2 Kasus	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	-		-	2 Kasus	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN						**35.345.347.374,00**							**36.873.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.827.544.834,00**							**23.943.500.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**21.827.544.834,00**							**23.943.500.000,00**	
45.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**14.327.544.834,00**							**14.528.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 Persen	1.541.332.000,00						-	1.918.500.000,00	
			Persentase Kepatuhan penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 Persen	12.686.254.034,00						-	12.495.000.000,00	
			-	-		-	-	99.958.800,00						-	115.000.000,00	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.686.254.034,00					Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		12.495.000.000,00	
		-						12.686.254.034,00					Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		12.495.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	243.240.000,00						-	245.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	12.443.014.034,00						-	12.250.000.000,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.443.014.034,00							12.250.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	256 Orang/bulan	12.443.014.034,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	12.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						243.240.000,00							245.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	243.240.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	245.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						658.397.000,00					Pegawai Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan		767.500.000,00	
		-						658.397.000,00					Pegawai Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan		767.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	350.000.000,00						-	367.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	150.000.000,00						-	157.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	21.912.000,00						-	22.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	10.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	121.485.000,00						-	210.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	10.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						121.485.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	121.485.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							157.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	40 Paket	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	157.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						21.912.000,00							22.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	21.912.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	22.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						350.000.000,00							367.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Dokumen Laporan	350.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	367.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						99.958.800,00					-		115.000.000,00	
		-						99.958.800,00					-		115.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	99.958.800,00						-	115.000.000,00	
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						99.958.800,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	99.958.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	115.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						143.200.000,00					Dinas Perumahan, kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan kawasan Permukiman		290.000.000,00	
		-						143.200.000,00					Dinas Perumahan, kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan kawasan Permukiman		290.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	143.200.000,00						-	290.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						143.200.000,00							290.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	143.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	290.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						739.735.000,00					Pegawai Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan		861.000.000,00	
		-						739.735.000,00					Pegawai Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan		861.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	500.000.000,00						-	550.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	129.735.000,00						-	195.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	110.000.000,00						-	116.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						110.000.000,00							116.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	16 Unit	110.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	116.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						129.735.000,00							195.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	17 Unit	129.735.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	195.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						500.000.000,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
46.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**3.300.000.000,00**							**4.695.000.000,00**	
			Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	-		-	48 Persen	3.100.000.000,00						-	4.385.000.000,00	
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	-		-	48 Persen	100.000.000,00						-	155.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat		155.000.000,00	
		-						100.000.000,00					Masyarakat		155.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00						-	155.000.000,00	
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00							155.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	155.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat		155.000.000,00	
		-						100.000.000,00					Masyarakat		155.000.000,00	
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00						-	155.000.000,00	
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana						100.000.000,00							155.000.000,00	
		Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	-		-	200 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	155.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						3.000.000.000,00					Meningkatnya kawasan permukiman yang dilengkapi PSU		4.230.000.000,00	
		-						3.000.000.000,00					Meningkatnya kawasan permukiman yang dilengkapi PSU		4.230.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	-	1.800.000.000,00						-	1.950.000.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-		-	-	1.200.000.000,00						-	2.280.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						1.200.000.000,00							2.280.000.000,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-		-	50 Unit Rumah	1.200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	2.280.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						1.800.000.000,00							1.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	34 Unit Rumah	1.800.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	1.950.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat		155.000.000,00	
		-						100.000.000,00					Masyarakat		155.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00						-	155.000.000,00	
	1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						100.000.000,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	155.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
47.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**1.550.000.000,00**							**1.870.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	-		-	10 Persen	1.400.000.000,00						-	1.870.000.000,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1.550.000.000,00					Masyarakat		1.870.000.000,00	
		-						1.550.000.000,00					Masyarakat		1.870.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	-		-	-	150.000.000,00						-	155.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	-	1.250.000.000,00						-	1.550.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						1.250.000.000,00							1.550.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	50 Unit Rumah	1.250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU						150.000.000,00							165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	-		-	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh						150.000.000,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	155.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
48.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**2.650.000.000,00**							**2.850.000.000,00**	
			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	-		-	32 Persen	2.650.000.000,00						-	2.850.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						2.650.000.000,00					Masyarakat penerima bantuan		2.850.000.000,00	
		-						2.650.000.000,00					Masyarakat penerima bantuan		2.850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	-	2.650.000.000,00						-	2.850.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						2.650.000.000,00							2.850.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	7 Lokasi	2.650.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Bosua || 1 || Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Utara || Desa Mongan Poula || 1 || Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sido Makmur || 1 || Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	2.850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.517.802.540,00**							**12.930.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**2.665.968.540,00**							**2.965.000.000,00**	
49.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**66.819.800,00**							**155.000.000,00**	
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	-		-	70 Persen	66.819.800,00						-	155.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						66.819.800,00					Dinas Perumahan, kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan kawasan Permukiman		155.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						66.819.800,00					Dinas Perumahan, kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan kawasan Permukiman		155.000.000,00	
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	-		-	-	66.819.800,00						-	155.000.000,00	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota						66.819.800,00							155.000.000,00	
		RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	-		-	1 Dokumen	66.819.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	155.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
50.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**671.497.700,00**							**835.500.000,00**	
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-		-	68 Persen	571.497.700,00						-	680.500.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						321.497.700,00					Dinas Perumahan, kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan kawasan Permukiman		470.000.000,00	
		-						321.497.700,00					Dinas Perumahan, kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan kawasan Permukiman		470.000.000,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	-	100.000.000,00						-	155.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	-	121.497.700,00						-	155.000.000,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	-	100.000.000,00						-	160.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						121.497.700,00							155.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	1 Dokumen	121.497.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	155.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						100.000.000,00							155.000.000,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	155.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						100.000.000,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	160.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						350.000.000,00					Dinas Perumahan, kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan kawasan Permukiman		365.500.000,00	
		-						350.000.000,00					Dinas Perumahan, kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan kawasan Permukiman		365.500.000,00	
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	-		-	-	350.000.000,00						-	365.500.000,00	
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						350.000.000,00							365.500.000,00	
		Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	-		-	5 Titik	350.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pembangunan Air Bersih		-	365.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
51.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**200.000.000,00**							**215.000.000,00**	
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	-		-	70 Persen	200.000.000,00						-	215.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00					Badan Usaha		215.000.000,00	
		-						200.000.000,00					Badan Usaha		215.000.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	-	200.000.000,00						-	215.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						200.000.000,00							215.000.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	16 Badan Usaha	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	215.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
52.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**						**400.948.000,00**							**430.000.000,00**	
			Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	-		-	15 Persen	200.000.000,00						-	215.000.000,00	
			Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	15 Persen	200.948.000,00						-	215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						200.000.000,00					Masyarakat Adat		215.000.000,00	
		-						200.000.000,00					Masyarakat Adat		215.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	-		-	-	200.000.000,00						-	215.000.000,00	
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH						200.000.000,00							215.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	-		-	5 MHA Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	215.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						200.948.000,00					-		215.000.000,00	
		-						200.948.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	-		-	-	200.948.000,00						-	215.000.000,00	
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH						200.948.000,00							215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	-		-	4 MHA/1 Dokumen	200.948.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	215.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
53.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**21.643.000,00**							**105.000.000,00**	
			Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	-		-	Persen	21.643.000,00						-	105.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						21.643.000,00					-		105.000.000,00	
		-						21.643.000,00					-		105.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	-	21.643.000,00						-	105.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						21.643.000,00							105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	21.643.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	105.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
54.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**1.305.060.040,00**							**1.224.500.000,00**	
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	-		-	45 Persen	1.305.060.040,00						-	1.224.500.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						1.305.060.040,00					Masyarakat		1.224.500.000,00	
		-						1.305.060.040,00					Masyarakat		1.224.500.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	-		-	-	61.859.600,00						-	159.500.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-		-	-	1.093.568.200,00						-	900.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-		-	-	149.632.240,00						-	165.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						149.632.240,00							165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-		-	16 Unit	149.632.240,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						61.859.600,00							159.500.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	-		-	2 Dokumen	61.859.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	159.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						1.093.568.200,00							900.000.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-		-	12500 Ton	1.093.568.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**10.851.834.000,00**							**9.965.000.000,00**	
55.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**135.000.000,00**							**150.000.000,00**	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 Persen	135.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						135.000.000,00					Pegawai Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan		150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						135.000.000,00					Pegawai Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan		150.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	135.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						135.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	25 Unit	135.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
56.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**10.236.834.000,00**							**9.305.000.000,00**	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	-		-	0.22 Indeks	10.236.834.000,00						-	9.305.000.000,00	
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						150.000.000,00					Masyarakat pengguna transportasi		155.000.000,00	
		-						150.000.000,00					Masyarakat pengguna transportasi		155.000.000,00	
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	-	150.000.000,00						-	155.000.000,00	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin						150.000.000,00							155.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	155.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10.086.834.000,00					-		9.150.000.000,00	
		-						10.086.834.000,00					-		9.150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	10.086.834.000,00						-	9.150.000.000,00	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						10.086.834.000,00							9.150.000.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	5 Laporan	10.086.834.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	9.150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
57.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**480.000.000,00**							**510.000.000,00**	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	-		-	18 Persen	480.000.000,00						-	510.000.000,00	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal						480.000.000,00					-		510.000.000,00	
		-						480.000.000,00					-		510.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	-		-	-	480.000.000,00						-	510.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal						480.000.000,00							510.000.000,00	
		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	-		-	2 Unit	480.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	510.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						**4.850.937.540,00**							**7.773.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.850.937.540,00**							**7.773.600.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**4.850.937.540,00**							**7.773.600.000,00**	
58.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.700.937.540,00**							**5.860.600.000,00**	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 persen	4.676.937.540,00						-	5.830.600.000,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.528.217.540,00					Perangkat Daerah		3.400.000.000,00	
		-						4.528.217.540,00					Perangkat Daerah		3.400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	0,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.528.217.540,00						-	3.394.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.528.217.540,00							3.394.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	169 Orang/bulan	4.528.217.540,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.394.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						0,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						71.660.000,00					Perangkat Daerah		875.600.000,00	
		-						71.660.000,00					Perangkat Daerah		875.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	16.000.000,00						-	355.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.500.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	24.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	560.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	600.000,00						-	285.600.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						560.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	560.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						600.000,00							285.600.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	285.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.500.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	24.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						16.000.000,00							355.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	16.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	355.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.000.000,00					Perangkat Daerah		30.000.000,00	
		-						24.000.000,00					Perangkat Daerah		30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	24.000.000,00						-	30.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77.060.000,00					Perangkat Daerah		1.555.000.000,00	
		-						77.060.000,00					Perangkat Daerah		1.555.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	48.310.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	23.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.750.000,00						-	25.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						23.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	23.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						48.310.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	15 Unit	48.310.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.750.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	5.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
59.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**100.000.000,00**							**739.500.000,00**	
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat ditangani	-		-	100 %	50.000.000,00						-	364.250.000,00	
			-	-		-	-	0,00						-	11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Menyasar setiap orang, badan hukum, atau kelompok masyarakat yang menlanggar peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada)		728.500.000,00	
		-						100.000.000,00					Menyasar setiap orang, badan hukum, atau kelompok masyarakat yang menlanggar peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada)		728.500.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-		-	-	50.000.000,00						-	364.250.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-		-	-	50.000.000,00						-	364.250.000,00	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						50.000.000,00							364.250.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-		-	3 laporan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	364.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						50.000.000,00							364.250.000,00	
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-		-	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	364.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						0,00					Satpol PP		11.000.000,00	
		-						0,00					Satpol PP		11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-		-	-	0,00						-	11.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						0,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
60.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**50.000.000,00**							**1.173.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-		-	500 orang	50.000.000,00						-	1.173.500.000,00	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						50.000.000,00					Masyarakat		1.173.500.000,00	
		-						50.000.000,00					Masyarakat		1.173.500.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	-	50.000.000,00						-	1.173.500.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						50.000.000,00							1.173.500.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	500 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.173.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**4.616.570.462,00**							**4.911.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.616.570.462,00**							**4.911.700.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**4.616.570.462,00**							**4.911.700.000,00**	
61.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.959.409.912,00**							**4.071.700.000,00**	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan tugas pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 Persen	3.959.409.912,00						-	4.031.700.000,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.677.319.299,50					ASN		3.840.000.000,00	
		-						3.677.319.299,50					ASN		3.840.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	22.364.756,50						-	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.654.954.543,00						-	3.800.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.654.954.543,00							3.800.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	76 Orang/bulan	3.654.954.543,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						22.364.756,50							40.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	22.364.756,50	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						126.858.600,00					ASN		84.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						126.858.600,00					ASN		84.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	60.152.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	59.999.600,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.707.000,00						-	2.500.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.707.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.707.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						59.999.600,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	59.999.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.152.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	60.152.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.000.000,00					ASN		60.000.000,00	
		-						69.000.000,00					ASN		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	69.000.000,00						-	60.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						69.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	69.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						86.232.012,50					ASN		87.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						86.232.012,50					ASN		87.200.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	43.843.572,50						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	37.478.440,00						-	32.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.910.000,00						-	5.200.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.478.440,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	37.478.440,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	32.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						43.843.572,50							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	43.843.572,50	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.910.000,00							5.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	4.910.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	5.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
62.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**657.160.550,00**							**840.000.000,00**	
			Persentase Penurunan Dampak Bencana	-		-	6 Persen	657.160.550,00						-	840.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						124.305.000,00					Masyarakat		200.000.000,00	
		-						124.305.000,00					Masyarakat		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	-	124.305.000,00						-	200.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						124.305.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	100 Orang	124.305.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						125.070.000,00					Masyarakat		240.000.000,00	
		-						125.070.000,00					Masyarakat		240.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	0,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-		-	-	24.807.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	60.851.000,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	-	39.412.000,00						-	50.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						24.807.000,00							0,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-		-	2 Unit	24.807.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						39.412.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	39.412.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						0,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	-	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						60.851.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	100 Orang	60.851.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						327.785.550,00					Masyarakat		300.000.000,00	
		-						327.785.550,00					Masyarakat		300.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	-	176.912.150,00						-	180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-		-	-	150.873.400,00						-	120.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						150.873.400,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-		-	100 Orang	150.873.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						176.912.150,00							180.000.000,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	1000 Orang	176.912.150,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						80.000.000,00					Masyarakat		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						80.000.000,00					Masyarakat		100.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	-	80.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	10 Kegiatan	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**6.616.535.838,00**							**6.727.272.487,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.954.461.588,00**							**6.058.577.292,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**5.954.461.588,00**							**6.058.577.292,00**	
63.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.220.222.613,00**							**4.306.997.927,00**	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 Persen	4.220.222.613,00						-	4.306.997.927,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.280.000,00					OPD		9.372.800,00	
		-						9.280.000,00					OPD		9.372.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	9.280.000,00						-	9.372.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.280.000,00							9.372.800,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	9.280.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	9.372.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.858.385.343,00					OPD		3.941.811.880,00	
		-						3.858.385.343,00					OPD		3.941.811.880,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	27.600.000,00						-	72.720.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.830.785.343,00						-	3.869.091.880,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.830.785.343,00							3.869.091.880,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	33 Orang/bulan	3.830.785.343,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.869.091.880,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						27.600.000,00							72.720.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	0 Dokumen	27.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	72.720.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						216.041.370,00					OPD		218.201.784,00	
		-						216.041.370,00					OPD		218.201.784,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	142.453.370,00						-	143.877.904,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	31.843.000,00						-	32.161.430,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	4.790.000,00						-	4.837.900,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.050.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	31.955.000,00						-	32.274.550,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.050.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	5.050.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						31.955.000,00							32.274.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	31.955.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	32.274.550,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						31.843.000,00							32.161.430,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	31.843.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	32.161.430,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.790.000,00							4.837.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	4.790.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	4.837.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						142.453.370,00							143.877.904,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	142.453.370,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	143.877.904,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.075.500,00					OPD		10.176.659,00	
		-						10.075.500,00					OPD		10.176.659,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	10.075.500,00						-	10.176.659,00	
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.075.500,00							10.176.659,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Unit	10.075.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	10.176.659,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.400.000,00					OPD		58.984.000,00	
		-						58.400.000,00					OPD		58.984.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	58.400.000,00						-	58.984.000,00	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						58.400.000,00							58.984.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	58.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	58.984.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.040.400,00					OPD		68.450.804,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						68.040.400,00					OPD		68.450.804,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	30.000.000,00						-	30.030.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	19.495.400,00						-	19.690.354,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	10.085.000,00						-	10.185.850,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	8.460.000,00						-	8.544.600,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.085.000,00							10.185.850,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	10.085.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	10.185.850,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						19.495.400,00							19.690.354,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	19.495.400,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	19.690.354,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.460.000,00							8.544.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	8.460.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	8.544.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00							30.030.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.030.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
64.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**410.044.975,00**							**414.145.425,00**	
			Persentase Lembaga di BIdang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	-		-	22 Persen	335.044.975,00						-	338.395.425,00	
			Persentase Pekerja Sosial tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti sesuai standar	-		-	82 Persentase	75.000.000,00						-	75.750.000,00	
			Persentase pemerlu palayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/HIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-		-	82 Persen	75.000.000,00						-	75.750.000,00	
			Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai Standar	-		-	25 Persen	335.044.975,00						-	338.395.425,00	
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam pelayanan sosial	-		-	32 Persen	335.044.975,00						-	338.395.425,00	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)						75.000.000,00					Kelompok Masyarakat Komunitas Adat Terpencil		75.750.000,00	
		-						75.000.000,00					Kelompok Masyarakat Komunitas Adat Terpencil		75.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	75.000.000,00						-	75.750.000,00	
	1.06.02.2.01.0005	Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT						75.000.000,00							75.750.000,00	
		Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2 Lokasi	75.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Barat Daya || Desa Pasakiat Taileleu || 1 || Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Tengah || Desa Saibi Samukop || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	75.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						335.044.975,00					Masyarakat/Keluarga		338.395.425,00	
		-						335.044.975,00					Masyarakat/Keluarga		338.395.425,00	
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	180.000.000,00						-	181.800.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	75.000.000,00						-	75.750.000,00	
			Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	-		-	-	80.044.975,00						-	80.845.425,00	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						180.000.000,00							181.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Keluarga	180.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Selatan || Desa Madobag || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	181.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						75.000.000,00							75.750.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	11 Lembaga	75.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1 || Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Selatan || Desa Maileppet || 1 || Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sikakap || Desa Sikakap || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	75.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota						80.044.975,00							80.845.425,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	-		-	20 Lembaga	80.044.975,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	80.845.425,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
65.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**575.000.000,00**							**580.750.000,00**	
			- Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-		-	22 undefined	575.000.000,00						-	580.750.000,00	
			- Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-		-	22 Persen	575.000.000,00						-	580.750.000,00	
			undefined	-		-	undefined undefined	575.000.000,00						-	580.750.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						575.000.000,00					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		580.750.000,00	
		-						575.000.000,00					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		580.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	75.000.000,00						-	75.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00						-	101.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	50.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	350.000.000,00						-	353.500.000,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						350.000.000,00							353.500.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	250 Orang	350.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	353.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						100.000.000,00							101.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	40 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	101.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						75.000.000,00							75.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	150 Orang	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	75.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						50.000.000,00							50.500.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	50.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
66.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**475.000.000,00**							**479.750.000,00**	
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	-		-	12 Persen	475.000.000,00						-	479.750.000,00	
			Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	-		-	10 Persen	475.000.000,00						-	479.750.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						475.000.000,00					Masyarakat Terdaftar DTSEN		479.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						475.000.000,00					Masyarakat Terdaftar DTSEN		479.750.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	75.000.000,00						-	75.750.000,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-		-	-	400.000.000,00						-	404.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						75.000.000,00							75.750.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	5000 Orang	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	75.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00							404.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-		-	12 Usulan	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	404.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
67.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**274.194.000,00**							**276.933.940,00**	
			Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saaat dan setelah tanggap darurat bencana Kab/Kota	-		-	82 Persen	124.194.000,00						-	125.433.940,00	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan Sosial	-		-	88 Persen	124.194.000,00						-	125.433.940,00	
			Persentase masyarakat di saerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	-		-	88 Persen	150.000.000,00						-	151.500.000,00	
			Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	-		-	30 Persen	124.194.000,00						-	125.433.940,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						124.194.000,00					Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		125.433.940,00	
		-						124.194.000,00					Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		125.433.940,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	124.194.000,00						-	125.433.940,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						124.194.000,00							125.433.940,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	300 Orang	124.194.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	125.433.940,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						150.000.000,00					Masyarakat Lokasi Rawan Bencana		151.500.000,00	
		-						150.000.000,00					Masyarakat Lokasi Rawan Bencana		151.500.000,00	
			Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	-		-	-	150.000.000,00						-	151.500.000,00	
	1.06.06.2.02.0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana						150.000.000,00							151.500.000,00	
		Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	-		-	1 Desa/Kelurahan	150.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Utara || Desa Muara Sikabaluan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	151.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**662.074.250,00**							**668.695.195,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**662.074.250,00**							**668.695.195,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
68.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**440.000.000,00**							**444.400.000,00**	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-		-	0,847 Persen	440.000.000,00						-	444.400.000,00	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-		-	90,8 Persen	440.000.000,00						-	444.400.000,00	
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	-		-	4,6 Persen	440.000.000,00						-	444.400.000,00	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-		-	62,8 Persen	440.000.000,00						-	444.400.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						110.000.000,00					Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah		111.100.000,00	
		-						110.000.000,00					Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah		111.100.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	110.000.000,00						-	111.100.000,00	
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						110.000.000,00							111.100.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	10 Lembaga	110.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	111.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						330.000.000,00					Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah		333.300.000,00	
		-						330.000.000,00					Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah		333.300.000,00	
			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	330.000.000,00						-	333.300.000,00	
	2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						330.000.000,00							333.300.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	3 Lembaga	330.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	333.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
69.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**130.293.000,00**							**131.596.132,00**	
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	-		-	88 Persen	10.293.000,00						-	10.396.132,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						10.293.000,00					Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO		10.396.132,00	
		-						10.293.000,00					Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO		10.396.132,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	10.293.000,00						-	10.396.132,00	
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						10.293.000,00							10.396.132,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	1 Kegiatan	10.293.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	10.396.132,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
70.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**110.000.000,00**							**111.100.000,00**	
			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-		-	65 Persen	110.000.000,00						-	111.100.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						110.000.000,00					Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah		111.100.000,00	
		-						110.000.000,00					Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah		111.100.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	110.000.000,00						-	111.100.000,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						110.000.000,00							111.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	3 Lembaga	110.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	111.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
71.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**578.337.155,00**							**584.120.527,00**	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	-		-	71 Persen	51.023.000,00						-	51.533.230,00	
			Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	-		-	88 Persen	101.781.250,00						-	102.799.063,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						50.758.250,00					Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah		51.265.833,00	
		-						50.758.250,00					Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah		51.265.833,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	-	50.758.250,00						-	51.265.833,00	
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						50.758.250,00							51.265.833,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	2 Kegiatan	50.758.250,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	51.265.833,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						51.023.000,00					Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah		51.533.230,00	
		-						51.023.000,00					Lembaga/Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah		51.533.230,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	51.023.000,00						-	51.533.230,00	
	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						51.023.000,00							51.533.230,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	2 Lembaga	51.023.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Utara || Desa Muara Sikabaluan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	51.533.230,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		UPTD PPA						**596.555.905,00**							**602.521.464,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**596.555.905,00**							**602.521.464,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**596.555.905,00**							**602.521.464,00**	
72.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**130.293.000,00**							**131.596.132,00**	
			-	-		-	-	120.000.000,00						-	121.200.000,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						120.000.000,00					Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO		121.200.000,00	
		-						120.000.000,00					Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO		121.200.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	120.000.000,00						-	121.200.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						120.000.000,00							121.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	7 Orang	120.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	121.200.000,00	UPTD PPA
73.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**578.337.155,00**							**584.120.527,00**	
			-	-		-	-	476.555.905,00						-	481.321.464,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						476.555.905,00					Anak Korban kekerasan		481.321.464,00	
		-						476.555.905,00					Anak Korban kekerasan		481.321.464,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	280.000.000,00						-	282.800.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	196.555.905,00						-	198.521.464,00	
	2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						280.000.000,00							282.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	12 Orang	280.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	282.800.000,00	UPTD PPA
	2.08.07.2.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						196.555.905,00							198.521.464,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	5 Orang	196.555.905,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	198.521.464,00	UPTD PPA
		DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN						**51.466.725.767,00**							**43.078.880.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**283.994.000,00**							**325.880.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**283.994.000,00**							**325.880.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
74.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**283.994.000,00**							**325.880.000,00**	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-		-	47,13 %	283.994.000,00						-	325.880.000,00	
			undefined	-		-	undefined undefined	123.880.000,00						-	125.880.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						123.880.000,00					Kelompok Ketahanan Pangan		125.880.000,00	
		-						123.880.000,00					Kelompok Ketahanan Pangan		125.880.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-		-	-	23.880.000,00						-	25.880.000,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						23.880.000,00							25.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-		-	1 Dokumen	23.880.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	25.880.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						160.114.000,00					Swasembada Pangan		200.000.000,00	
		-						160.114.000,00					Swasembada Pangan		200.000.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	160.114.000,00						-	200.000.000,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						160.114.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	11 Ton	160.114.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**51.182.731.767,00**							**42.753.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**12.484.350.752,00**							**6.600.000.000,00**	
75.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**9.469.164.914,00**							**3.000.000.000,00**	
			Produksi Perikanan Tangkap	-		-	14.000 Ton	9.469.164.914,00						-	3.000.000.000,00	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						9.469.164.914,00					Kelompok Nelayan		3.000.000.000,00	
		-						9.469.164.914,00					Kelompok Nelayan		3.000.000.000,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	9.469.164.914,00						-	3.000.000.000,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						9.469.164.914,00							3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	100 Orang	9.469.164.914,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	3.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
76.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**2.400.000.000,00**							**2.400.000.000,00**	
			Produksi Perikanan Budidaya	-		-	460 Ton	2.400.000.000,00						-	2.400.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						2.400.000.000,00					Kelompok Budidaya Perikanan		2.400.000.000,00	
		-						2.400.000.000,00					Kelompok Budidaya Perikanan		2.400.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-		-	-	2.400.000.000,00						-	2.400.000.000,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						2.400.000.000,00							2.400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-		-	10 Kelompok	2.400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	2.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
77.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**615.185.838,00**							**1.200.000.000,00**	
			Jumlah Produksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-		-	110 Ton	496.185.838,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Produksi pengolahan dan hasil perikanan	-		-	110 Ton	119.000.000,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						496.185.838,00					Kelompok Usaha Pengolahan Perikanan		1.000.000.000,00	
		-						496.185.838,00					Kelompok Usaha Pengolahan Perikanan		1.000.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	-	496.185.838,00						-	1.000.000.000,00	
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						496.185.838,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		-	1 Dokumen	496.185.838,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						119.000.000,00					Kelompok Usaha Pengolahan Perikanan		200.000.000,00	
		-						119.000.000,00					Kelompok Usaha Pengolahan Perikanan		200.000.000,00	
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	119.000.000,00						-	200.000.000,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						119.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	5 Ton	119.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**38.698.381.015,00**							**36.153.000.000,00**	
78.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.324.514.450,00**							**25.345.000.000,00**	
			parsentase peningkatan pelayanan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-		-	100 %	13.308.514.700,00						-	12.859.000.000,00	
			-	-		-	-	15.999.750,00						-	12.486.000.000,00	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.754.760.000,00					Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan		12.629.000.000,00	
		-						12.754.760.000,00					Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan		12.629.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	125.760.000,00						-	208.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	12.629.000.000,00						-	12.421.000.000,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.629.000.000,00							12.421.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	176 Orang/bulan	12.629.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	12.421.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						125.760.000,00							208.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	125.760.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	208.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.554.700,00					Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan		230.000.000,00	
		-						136.554.700,00					Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan		230.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	33.554.700,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						33.554.700,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	33.554.700,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	3.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	7 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						417.200.000,00					Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan		0,00	
		-						417.200.000,00					Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	417.200.000,00						-	0,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						417.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	417.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.999.750,00					-		12.486.000.000,00	
		-						15.999.750,00					-		12.486.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	9.999.750,00						-	12.421.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	6.000.000,00						-	65.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.999.750,00							12.421.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	9.999.750,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.421.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	14 Unit	6.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
79.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**18.262.734.000,00**							**3.500.000.000,00**	
			Peningkatan Produksi Peternakan	-		-	70 %	283.340.000,00						-	0,00	
			Peningkatan produksi tanaman pangan, Hortikultura dan Peternakan	-		-	70 %	17.979.394.000,00						-	3.500.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						17.979.394.000,00					Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Peternakan		3.500.000.000,00	
		-						17.979.394.000,00					Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Peternakan		3.500.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	-		-	-	16.000.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	-	1.979.394.000,00						-	3.500.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						1.979.394.000,00							3.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	12 Laporan	1.979.394.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	3.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang						16.000.000.000,00							0,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	-		-	400000 Batang	16.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						283.340.000,00					Kelompok Ternak		0,00	
		-						283.340.000,00					Kelompok Ternak		0,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	-	283.340.000,00						-	0,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						283.340.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	25 Ekor	283.340.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
80.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**7.015.565.140,00**							**7.208.000.000,00**	
			Cakupan luas lahan pertanian yang di tetapkan menjadi lahan pertanian (LP2B)	-		-	5 %	7.015.565.140,00						-	7.208.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						7.015.565.140,00					Kelompok Pertanian		7.208.000.000,00	
		-						7.015.565.140,00					Kelompok Pertanian		7.208.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	5.816.000.000,00						-	6.000.000.000,00	
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	1.199.565.140,00						-	1.208.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						5.816.000.000,00							6.000.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	11 Unit	5.816.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Utara || Desa Sotboyak || 1 || Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Barat || Desa Sigapokna || 1 || Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Utara || Desa Muara Sikabaluan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	6.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya						1.199.565.140,00							1.208.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	4 Unit	1.199.565.140,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	1.208.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
81.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**95.567.425,00**							**100.000.000,00**	
			Parsentase penanganan kasus penyakit menular,cakupan vaksinasi	-		-	60 %	95.567.425,00						-	100.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						95.567.425,00					Kelompok Ternak		100.000.000,00	
		-						95.567.425,00					Kelompok Ternak		100.000.000,00	
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	-		-	-	95.567.425,00						-	100.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular						95.567.425,00							100.000.000,00	
		Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	-		-	1 Laporan	95.567.425,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**4.018.575.685,00**							**4.353.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.018.575.685,00**							**4.353.200.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**4.018.575.685,00**							**4.353.200.000,00**	
82.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.008.546.660,00**							**4.342.200.000,00**	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah	-		-	1 Tahun	3.917.204.660,00						-	4.234.200.000,00	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah	-		-	100% persen	62.000.000,00						-	63.000.000,00	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah	-		-	100 persen	29.342.000,00						-	45.000.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.982.000,00					-		11.000.000,00	
		-						10.982.000,00					-		11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.982.000,00						-	11.000.000,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.982.000,00							11.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	10.982.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.680.228.959,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.825.000.000,00	
		-						3.680.228.959,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.825.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	22.200.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.658.028.959,00						-	3.800.000.000,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.658.028.959,00							3.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	34 Orang/bulan	3.658.028.959,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						22.200.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	2 Dokumen	22.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						236.975.701,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		409.200.000,00	
		-						236.975.701,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		409.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	72.128.000,00						-	72.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	131.952.501,00						-	303.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	26.892.700,00						-	27.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.002.500,00						-	7.000.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.002.500,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	6.002.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						131.952.501,00							303.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	131.952.501,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	303.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.892.700,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	26.892.700,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	27.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						72.128.000,00							72.200.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	72.128.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	72.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						62.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		63.000.000,00	
		-						62.000.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		63.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	62.000.000,00						-	63.000.000,00	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						62.000.000,00							63.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	62.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	63.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18.360.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		34.000.000,00	
		-						18.360.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		34.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	18.360.000,00						-	34.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.360.000,00							34.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	18.360.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	34.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
83.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**0,00**							**0,00**	
			Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	-		-	1 Tahun	0,00						-	0,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						0,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	
		-						0,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						0,00							0,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
84.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**0,00**							**0,00**	
			Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	-		-	1 undefined	0,00						-	0,00	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						0,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	
		-						0,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						0,00							0,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-		-	0 Layanan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
85.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**0,00**							**0,00**	
			Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan	-		-	58,8 persen	0,00						-	0,00	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
86.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**10.029.025,00**							**11.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	-		-	2 Jenis	10.029.025,00						-	11.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						10.029.025,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		11.000.000,00	
		-						10.029.025,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-		-	-	10.029.025,00						-	11.000.000,00	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						10.029.025,00							11.000.000,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-		-	1 Dokumen	10.029.025,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**6.546.817.373,00**							**469.751.284.502,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.546.817.373,00**							**469.751.284.502,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**5.681.421.973,00**							**424.848.976.502,00**	
87.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.643.026.373,00**							**4.507.978.502,00**	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	69.154.792,00						-	182.698.260,00	
			Presentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelapoan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 Persen	133.239.920,00						-	241.000.000,00	
			Terlaksananya Perencanaan, Penggganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	4.402.231.661,00						-	4.039.480.242,00	
			-	-		-	-	38.400.000,00						-	44.800.000,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.975.000,00					ASN		90.000.000,00	
		-						28.975.000,00					ASN		90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	28.975.000,00						-	90.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						28.975.000,00							90.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	28.975.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.402.231.661,00					ASN		4.039.480.242,00	
		-						4.402.231.661,00					ASN		4.039.480.242,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	47.360.000,00						-	65.988.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.354.871.661,00						-	3.973.492.242,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.354.871.661,00							3.973.492.242,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	36 Orang/bulan	4.354.871.661,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.973.492.242,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						47.360.000,00							65.988.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	47.360.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	65.988.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						133.239.920,00					ASN		241.000.000,00	
		-						133.239.920,00					ASN		241.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	53.998.000,00						-	78.300.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	60.373.300,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	14.149.620,00						-	28.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.719.000,00						-	44.700.000,00	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.719.000,00							44.700.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	4.719.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	44.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60.373.300,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	60.373.300,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.149.620,00							28.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	10 Paket	14.149.620,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	28.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						53.998.000,00							78.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	53.998.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	78.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						38.400.000,00					-		44.800.000,00	
		-						38.400.000,00					-		44.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	38.400.000,00						-	44.800.000,00	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						38.400.000,00							44.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	38.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	44.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.179.792,00					ASN		92.698.260,00	
		-						40.179.792,00					ASN		92.698.260,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	6.999.792,00						-	63.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	16.800.000,00						-	9.100.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	12.240.000,00						-	13.598.260,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.140.000,00						-	7.000.000,00	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						12.240.000,00							13.598.260,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	12.240.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	13.598.260,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						16.800.000,00							9.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	16.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	9.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.140.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	4.140.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.999.792,00							63.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	6.999.792,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	63.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
88.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**638.395.600,00**							**795.998.000,00**	
			Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	32 %	338.395.600,00						-	795.998.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	-		-	19 %	338.395.600,00						-	795.998.000,00	
			Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	-		-	20 %	338.395.600,00						-	795.998.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						638.395.600,00					Aparatur Desa dan Anggota BPD		795.998.000,00	
		-						638.395.600,00					Aparatur Desa dan Anggota BPD		795.998.000,00	
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	-		-	-	100.000.000,00						-	26.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	-	88.395.600,00						-	128.998.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-		-	-	100.000.000,00						-	41.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	-	150.000.000,00						-	600.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						88.395.600,00							128.998.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	43 Dokumen	88.395.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	128.998.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	657 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						100.000.000,00							41.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-		-	43 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	41.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						150.000.000,00							600.000.000,00	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	265 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						100.000.000,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	-		-	43 Desa	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
89.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**400.000.000,00**							**419.545.000.000,00**	
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa Dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	-		-	15 %	300.000.000,00						-	419.545.000.000,00	
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Desa	-		-	20 %	300.000.000,00						-	419.545.000.000,00	
			Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-		-	6,25 %	300.000.000,00						-	419.545.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00					Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		419.545.000.000,00	
		-						400.000.000,00					Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		419.545.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	-	200.000.000,00						-	419.095.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	100.000.000,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						100.000.000,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	105 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						200.000.000,00							419.095.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	43 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	419.095.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**865.395.400,00**							**44.902.308.000,00**	
90.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**111.000.000,00**							**44.111.000.000,00**	
			Angka Kelahiran Remaja Umur15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-		-	11,00 Kelahiran Per 1000	60.000.000,00						-	90.000.000,00	
			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	-		-	2,38 %	60.000.000,00						-	90.000.000,00	
			Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	-		-	66,34 Persen	51.000.000,00						-	44.021.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						60.000.000,00					Masyarakat		90.000.000,00	
		-						60.000.000,00					Masyarakat		90.000.000,00	
			Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	60.000.000,00						-	90.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						60.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	8 Kelompok	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						51.000.000,00					Masyarakat		44.021.000.000,00	
		-						51.000.000,00					Masyarakat		44.021.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	-	25.200.000,00						-	121.000.000,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	25.800.000,00						-	43.900.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						25.200.000,00							121.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	12 Dokumen	25.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	121.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						25.800.000,00							43.900.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	12 Laporan	25.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	43.900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
91.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**372.850.200,00**							**551.308.000,00**	
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	-		-	61,75 %	200.000.000,00						-	292.999.000,00	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-		-	100 Persen	172.850.200,00						-	258.309.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						200.000.000,00					Masyarakat		292.999.000,00	
		-						200.000.000,00					Masyarakat		292.999.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	-	150.000.000,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-		-	-	50.000.000,00						-	197.999.000,00	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						150.000.000,00							95.000.000,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						50.000.000,00							197.999.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-		-	43 Organisasi	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	197.999.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						172.850.200,00					Masyarakat		258.309.000,00	
		-						172.850.200,00					Masyarakat		258.309.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	18.900.000,00						-	13.700.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	-	153.950.200,00						-	244.609.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						153.950.200,00							244.609.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	353 Orang	153.950.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	244.609.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						18.900.000,00							13.700.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	12 Laporan	18.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	13.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
92.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**381.545.200,00**							**240.000.000,00**	
			Indeks Pembangunan Keluarga	-		-	62,62 %	32.250.000,00						-	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	-		-	100 Persen	349.295.200,00						-	160.000.000,00	
			Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	-		-	0,04 %	32.250.000,00						-	80.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						32.250.000,00					Masyarakat		80.000.000,00	
		-						32.250.000,00					Masyarakat		80.000.000,00	
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	-		-	-	32.250.000,00						-	80.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						32.250.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	-		-	36 Orang	32.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						349.295.200,00					Masyarakat		160.000.000,00	
		-						349.295.200,00					Masyarakat		160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	349.295.200,00						-	160.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						349.295.200,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	52 Keluarga	349.295.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**6.106.941.365,00**							**6.813.533.165,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.106.941.365,00**							**6.813.533.165,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**6.106.941.365,00**							**6.813.533.165,00**	
93.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.706.941.440,00**							**3.993.533.165,00**	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	-		-	100 persen	22.994.000,00						-	25.000.000,00	
			-	-		-	-	3.683.947.440,00						-	3.968.533.165,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.994.000,00					OPD dan Masyarakat		25.000.000,00	
		-						22.994.000,00					OPD dan Masyarakat		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	22.994.000,00						-	25.000.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						22.994.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	22.994.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.852.423.192,00					Aparatur		2.952.533.165,00	
		-						2.852.423.192,00					Aparatur		2.952.533.165,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	22.880.000,00						-	23.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.829.543.192,00						-	2.929.533.165,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.829.543.192,00							2.929.533.165,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	40 Orang/bulan	2.829.543.192,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	2.929.533.165,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						22.880.000,00							23.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	22.880.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						278.349.800,00					Aparatur		343.000.000,00	
		-						278.349.800,00					Aparatur		343.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	149.886.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	79.999.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	31.464.800,00						-	33.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	17.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						17.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	17.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						79.999.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	79.999.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						31.464.800,00							33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	31.464.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						149.886.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	30 Laporan	149.886.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						315.640.798,00					Aparatur		418.000.000,00	
		-						315.640.798,00					Aparatur		418.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	49.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	266.640.798,00						-	268.000.000,00	
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						49.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	2 Unit	49.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						266.640.798,00							268.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	6 Unit	266.640.798,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	268.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						137.400.000,00					Pemda		140.000.000,00	
		-						137.400.000,00					Pemda		140.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	137.400.000,00						-	140.000.000,00	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						137.400.000,00							140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	137.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.133.650,00					Aparatur		115.000.000,00	
		-						100.133.650,00					Aparatur		115.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	90.133.650,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						90.133.650,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	90.133.650,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	7 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
94.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**680.000.000,00**							**830.000.000,00**	
			Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	-		-	70 persen	640.000.000,00						-	730.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						680.000.000,00					OPD dan Masyarakat		830.000.000,00	
		-						680.000.000,00					OPD dan Masyarakat		830.000.000,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	-	600.000.000,00						-	630.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	40.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	40.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						600.000.000,00							630.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	5 Laporan	600.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	630.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	75 %	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						40.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	3 Komunitas	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
95.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**1.719.999.925,00**							**1.990.000.000,00**	
			Indeks SPBE	-		-	2,60 indeks	1.719.999.925,00						-	1.990.000.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.719.999.925,00					Pemda		1.990.000.000,00	
		-						1.719.999.925,00					Pemda		1.990.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	40.011.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	-	39.995.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	1.639.993.925,00						-	1.740.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						39.995.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	1 Laporan	39.995.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						1.639.993.925,00							1.740.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	36 Titik	1.639.993.925,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	1.740.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						40.011.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	1 Dokumen	40.011.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**0,00**							**0,00**	
96.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**0,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-		-	2 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**0,00**							**0,00**	
97.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**0,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						0,00							0,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	2 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Penyediaan Jaringan Internet		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**10.473.469.981,00**							**10.589.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.581.726.400,00**							**8.649.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**8.581.726.400,00**							**8.649.000.000,00**	
98.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.331.726.400,00**							**4.675.000.000,00**	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 persen	4.331.726.400,00						-	4.425.000.000,00	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.654.680.000,00					Aparatur Sipil Negara		3.735.000.000,00	
		-						3.654.680.000,00					Aparatur Sipil Negara		3.735.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	154.680.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.500.000.000,00						-	3.700.000.000,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.500.000.000,00							3.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	26 Orang/bulan	3.500.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	3.700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						154.680.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	154.680.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						318.836.000,00					Aparatur Sipil Negara		540.000.000,00	
		-						318.836.000,00					Aparatur Sipil Negara		540.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	299.586.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	19.250.000,00						-	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	250.000.000,00	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.250.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	19.250.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						299.586.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	14 Laporan	299.586.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.000.000,00					Aparatur Sipil Negara		45.000.000,00	
		-						40.000.000,00					Aparatur Sipil Negara		45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	40.000.000,00						-	45.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						40.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						318.210.400,00					-		355.000.000,00	
		-						318.210.400,00					-		355.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	226.490.400,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	91.720.000,00						-	55.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						91.720.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	8 Unit	91.720.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						226.490.400,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	226.490.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
99.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**250.000.000,00**							**270.000.000,00**	
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-		-	58 persen	250.000.000,00						-	270.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						250.000.000,00					anggota koperasi		270.000.000,00	
		-						250.000.000,00					anggota koperasi		270.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-		-	-	250.000.000,00						-	270.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00							270.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-		-	58 Unit Usaha	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	270.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
100.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**300.000.000,00**							**324.000.000,00**	
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	-		-	58 persen	300.000.000,00						-	324.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00					anggota koperasi		324.000.000,00	
		-						300.000.000,00					anggota koperasi		324.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-		-	-	300.000.000,00						-	324.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						300.000.000,00							324.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-		-	137 Orang	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	324.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
101.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**200.000.000,00**							**99.000.000,00**	
			Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	-		-	12 persen	200.000.000,00						-	99.000.000,00	
			Pertumbuhan Wirausaha	-		-	2 persen	200.000.000,00						-	99.000.000,00	
			Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	-		-	2,91 persen	200.000.000,00						-	99.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						200.000.000,00					UMKM		99.000.000,00	
		-						200.000.000,00					UMKM		99.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	200.000.000,00						-	99.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						200.000.000,00							99.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	10 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	99.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
102.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**3.500.000.000,00**							**3.281.000.000,00**	
			Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	-		-	20 persen	3.500.000.000,00						-	3.281.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						3.500.000.000,00					UMKM		3.281.000.000,00	
		-						3.500.000.000,00					UMKM		3.281.000.000,00	
			Jumlah Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang ditingkatkan kompetensi dan kapasitasnya	-		-	-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	-	2.000.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negari	-		-	-	1.200.000.000,00						-	931.000.000,00	
	2.17.08.2.01.0009	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Fungsional Pengembang Kewirausahaan						300.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Fungsional Pengembang Kewirausahaan	Jumlah Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang ditingkatkan kompetensi dan kapasitasnya	-		-	100 Orang	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0021	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM						2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	10 Unit Usaha	2.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	2.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0023	Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri						1.200.000.000,00							931.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya pengembangan UMKM dalam Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negari	-		-	30 Produk	1.200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	931.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.808.469.981,00**							**1.870.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**1.408.469.981,00**							**1.620.000.000,00**	
103.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**358.469.981,00**							**450.000.000,00**	
			Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	-		-	75 persen	358.469.981,00						-	450.000.000,00	
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat						358.469.981,00					para pelaku usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol Gol B dan C		450.000.000,00	
		-						358.469.981,00					para pelaku usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol Gol B dan C		450.000.000,00	
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	-	358.469.981,00						-	450.000.000,00	
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C						358.469.981,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	20 Dokumen	358.469.981,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
104.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**350.000.000,00**							**370.000.000,00**	
			Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/ kota (juta rupiah)	-		-	6.301.299 rupiah	350.000.000,00						-	370.000.000,00	
			Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-		-	10 peren	350.000.000,00						-	370.000.000,00	
			Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	-		-	30 persen	350.000.000,00						-	370.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						350.000.000,00					Mayarakat KKM		370.000.000,00	
		-						350.000.000,00					Mayarakat KKM		370.000.000,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	350.000.000,00						-	370.000.000,00	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						350.000.000,00							370.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	5 Unit	350.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	370.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
105.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**700.000.000,00**							**800.000.000,00**	
			Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-		-	6 persen	700.000.000,00						-	800.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						400.000.000,00					Masyarakat KKM		450.000.000,00	
		-						400.000.000,00					Masyarakat KKM		450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	400.000.000,00						-	450.000.000,00	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						400.000.000,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00					Masyarakat KKM		350.000.000,00	
		-						300.000.000,00					Masyarakat KKM		350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-		-	-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-		-	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**400.000.000,00**							**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
106.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**400.000.000,00**							**250.000.000,00**	
			Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	-		-	2,25 persen	400.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/ Kota	-		-	2,60 persen	400.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	-		-	0,03 persen	400.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	-		-	85 persen	400.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	-		-	45 persen	400.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	-		-	50 persen	400.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	-		-	1,19 persen	400.000.000,00						-	250.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						400.000.000,00					pelaku usaha industri (kecil dan menengah) dan pengelola kawasan industri yang berlokasi di wilayah administratif kabupaten/kota		250.000.000,00	
		-						400.000.000,00					pelaku usaha industri (kecil dan menengah) dan pengelola kawasan industri yang berlokasi di wilayah administratif kabupaten/kota		250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	-	400.000.000,00						-	250.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						400.000.000,00							250.000.000,00	
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	12 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X							**83.273.600,00**							**70.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**83.273.600,00**							**70.000.000,00**	
107.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**83.273.600,00**							**70.000.000,00**	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 persen	83.273.600,00						-	70.000.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						83.273.600,00					Aparatur Sipil Negara		70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						83.273.600,00					Aparatur Sipil Negara		70.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	83.273.600,00						-	70.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						83.273.600,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	7 Paket	83.273.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**5.101.881.368,00**							**5.514.800.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.101.881.368,00**							**5.514.800.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**767.947.700,00**							**835.000.000,00**	
108.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**1.219.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	1.219.000,00						-	0,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						1.219.000,00					Masyarakat		0,00	
		-						1.219.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-		-	-	1.219.000,00						-	0,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						1.219.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-		-	1 Dokumen	1.219.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
109.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**714.615.700,00**							**735.000.000,00**	
			Persentase Tenaga Kerja yang di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	-		-	20 persen	714.615.700,00						-	735.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						714.615.700,00					Masyarakat		735.000.000,00	
		-						714.615.700,00					Masyarakat		735.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-		-	-	443.527.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	271.088.700,00						-	235.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota						443.527.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-		-	1 paket Unit	443.527.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						271.088.700,00							235.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	48 Orang	271.088.700,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	235.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
110.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**2.113.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	2.113.000,00						-	0,00	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						2.113.000,00					Masyarakat		0,00	
		-						2.113.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-		-	-	2.113.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						2.113.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-		-	10 Orang	2.113.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
111.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**50.000.000,00**							**100.000.000,00**	
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-		-	50 persen	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4.333.933.668,00**							**4.679.800.000,00**	
112.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.057.634.668,00**							**4.179.800.000,00**	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	-		-	100 persen	3.606.229.418,00						-	3.653.000.000,00	
			-	-		-	-	451.405.250,00						-	526.800.000,00	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.606.229.418,00					-		3.653.000.000,00	
		-						3.606.229.418,00					-		3.653.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	55.560.028,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.550.669.390,00						-	3.588.000.000,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.550.669.390,00							3.588.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	50 Orang/bulan	3.550.669.390,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	3.588.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						55.560.028,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	55.560.028,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						251.442.750,00					Masyarakat		313.000.000,00	
		-						251.442.750,00					Masyarakat		313.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	146.635.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	87.509.850,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	12.006.400,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.291.500,00						-	6.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.291.500,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.291.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						87.509.850,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	87.509.850,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	95.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.006.400,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	12.006.400,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						146.635.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	30 Laporan	146.635.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						56.000.000,00					Masyarakat		60.000.000,00	
		-						56.000.000,00					Masyarakat		60.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	56.000.000,00						-	60.000.000,00	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						56.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	56.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.600.000,00					Masyarakat		88.800.000,00	
		-						88.600.000,00					Masyarakat		88.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	88.600.000,00						-	88.800.000,00	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						88.600.000,00							88.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	88.600.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	88.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.362.500,00					Masyarakat		65.000.000,00	
		-						55.362.500,00					Masyarakat		65.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	45.492.500,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	9.870.000,00						-	15.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						45.492.500,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	9 Unit	45.492.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.870.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	9.870.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
113.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**99.977.000,00**							**150.000.000,00**	
			Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	-		-	75 persen	99.977.000,00						-	150.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						99.977.000,00					Masyarakat		150.000.000,00	
		-						99.977.000,00					Masyarakat		150.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	99.977.000,00						-	150.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						99.977.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	150 Pelaku Usaha	99.977.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
114.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**176.322.000,00**							**350.000.000,00**	
			Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	-		-	80 persen	126.322.000,00						-	250.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						176.322.000,00					Pelaku Usaha		350.000.000,00	
		-						176.322.000,00					Pelaku Usaha		350.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-		-	-	76.322.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						76.322.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-		-	10 Pelaku Usaha	76.322.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	10 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	10 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						**4.946.545.904,00**							**6.297.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.946.545.904,00**							**6.297.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4.659.550.904,00**							**5.807.000.000,00**	
115.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.282.551.904,00**							**3.657.000.000,00**	
			Nilai SAKIP	-		-	BB Nilai	167.598.934,00						-	188.000.000,00	
			Nilai SAKIP	-		-	100 Persen	50.712.970,00						-	79.000.000,00	
			Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat kerja daerah	-		-	100 Persen	2.974.840.000,00						-	3.280.000.000,00	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	-		-	100 Persen	15.000.000,00						-	30.000.000,00	
			-	-		-	-	74.400.000,00						-	80.000.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00					-		30.000.000,00	
		-						15.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	15.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.974.840.000,00					-		3.280.000.000,00	
		-						2.974.840.000,00					-		3.280.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	74.840.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.900.000.000,00						-	3.200.000.000,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.900.000.000,00							3.200.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	38 Orang/bulan	2.900.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						74.840.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	74.840.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	80.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						167.598.934,00					-		188.000.000,00	
		-						167.598.934,00					-		188.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	69.970.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	65.628.934,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	20 Paket	12.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						65.628.934,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	65.628.934,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	13 Paket	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	18.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						69.970.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	36 Laporan	69.970.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	75.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						74.400.000,00					-		80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						74.400.000,00					-		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	74.400.000,00						-	80.000.000,00	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						74.400.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	74.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	80.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.712.970,00					-		79.000.000,00	
		-						50.712.970,00					-		79.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	29.993.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	14.999.970,00						-	16.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.720.000,00						-	8.000.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						14.999.970,00							16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	14.999.970,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	16.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						29.993.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	10 Unit	29.993.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.720.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	5.720.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	8.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
116.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**1.376.999.000,00**							**2.150.000.000,00**	
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-		-	55 indeks	286.999.000,00						-	380.000.000,00	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	-		-	4 Kegiatan	1.060.000.000,00						-	1.685.000.000,00	
			Nilai Kegemaran Membaca	-		-	65 Nilai	286.999.000,00						-	380.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						316.999.000,00					-		430.000.000,00	
		-						316.999.000,00					-		430.000.000,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-		-	-	30.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-		-	-	99.999.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-		-	-	40.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	25.000.000,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-		-	-	92.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						25.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	5 Perpustakaan	25.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						92.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-		-	1 Perpustakaan	92.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	1 Perpustakaan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-		-	1000 Eksemplar	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota						99.999.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-		-	5 Eksemplar	99.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	110.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-		-	1 Perpustakaan	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.060.000.000,00					-		1.720.000.000,00	
		-						1.060.000.000,00					-		1.720.000.000,00	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-		-	-	40.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-		-	-	120.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	900.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	-		-	3 Orang	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						40.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-		-	3 Perpustakaan	40.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						900.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Perpustakaan	900.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.500.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						0,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-		-	5 Orang	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						120.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-		-	30 Lokus	120.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**286.995.000,00**							**490.000.000,00**	
117.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**154.995.000,00**							**210.000.000,00**	
			Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah	-		-	C indeks	104.996.000,00						-	90.000.000,00	
			Persentase tingkat ketersediaan arsip	-		-	30 Persen	49.999.000,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase tingkat ketersediaan arsip	-		-	50 Arsip	104.996.000,00						-	90.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						104.996.000,00					-		150.000.000,00	
		-						104.996.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	49.996.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	-		-	-	35.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-		-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						35.000.000,00							60.000.000,00	
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	-		-	1500 Berkas	35.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						20.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-		-	300 Berkas	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						49.996.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Laporan	49.996.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						49.999.000,00					-		60.000.000,00	
		-						49.999.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	49.999.000,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						49.999.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	49.999.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
118.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**132.000.000,00**							**280.000.000,00**	
			Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	-		-	100 Persen	87.000.000,00						-	115.000.000,00	
			Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-		-	65 Persen	0,00						-	55.000.000,00	
			-	-		-	-	45.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						87.000.000,00					-		115.000.000,00	
		-						87.000.000,00					-		115.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-		-	-	45.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	-		-	-	42.000.000,00						-	55.000.000,00	
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						42.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	-		-	50 Berkas	42.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						45.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-		-	50 Arsip	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota						0,00					-		55.000.000,00	
		-						0,00					-		55.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-		-	-	0,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana						0,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-		-	100 Arsip	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	-		-	100 Arsip	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan						45.000.000,00					-		110.000.000,00	
		-						45.000.000,00					-		110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	45.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						45.000.000,00							110.000.000,00	
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	350 Daftar	45.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Sipora Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	110.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA						**24.386.918.676,00**							**533.240.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.735.488.378,00**							**8.435.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**7.735.488.378,00**							**8.435.000.000,00**	
119.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.935.497.078,00**							**6.505.000.000,00**	
			Jumlah PNS yang menerima gaji	-		-	34 orang	100.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah PNS yang menerima gaji	-		-	34 orang	4.835.497.078,00						-	6.500.000.000,00	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.835.497.078,00					Pegawai		6.500.000.000,00	
		-						4.835.497.078,00					Pegawai		6.500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.835.497.078,00						-	6.500.000.000,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.835.497.078,00							6.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	35 Orang/bulan	4.835.497.078,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	6.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						100.000.000,00					Pegawai		5.000.000,00	
		-						100.000.000,00					Pegawai		5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
120.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**1.799.999.900,00**							**930.000.000,00**	
			jumlah koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan pemuda pelopor	-		-	10 kali	1.799.999.900,00						-	630.000.000,00	
			JUMLAH PEMUDA KADER YANG TERFASILITASI KEMITRAAN	-		-	6 ORGANISASI	0,00						-	300.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						1.799.999.900,00					Pemuda		630.000.000,00	
		-						1.799.999.900,00					Pemuda		630.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	300.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	-	500.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	-	999.999.900,00						-	310.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0017	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota						999.999.900,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	3 Unit	999.999.900,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	310.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota						300.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	50 Orang	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota						500.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	0 Orang	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	210.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					Pemuda		300.000.000,00	
		-						0,00					Pemuda		300.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						0,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	6 Organisasi	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
121.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**999.991.400,00**							**1.000.000.000,00**	
			-	-		-	-	999.991.400,00						-	1.000.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						999.991.400,00					-		1.000.000.000,00	
		-						999.991.400,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	999.991.400,00						-	1.000.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						999.991.400,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	3 Unit	999.991.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**16.651.430.298,00**							**524.805.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**16.651.430.298,00**							**524.805.000.000,00**	
122.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.098.118.898,00**							**2.425.000.000,00**	
			Jumlah PNS yang menerima gaji	-		-	34 orang	1.003.079.500,00						-	105.000.000,00	
			Jumlah PNS yang menerima gaji	-		-	34 orang	433.160.000,00						-	300.000.000,00	
			-	-		-	-	2.561.879.398,00						-	2.020.000.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	20.000.000,00	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						433.160.000,00					Pegawai		300.000.000,00	
		-						433.160.000,00					Pegawai		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	433.160.000,00						-	300.000.000,00	
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						433.160.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	433.160.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.000.000.200,00					-		1.000.000.000,00	
		-						1.000.000.200,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	1.000.000.200,00						-	1.000.000.000,00	
	3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						1.000.000.200,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	12 Dokumen	1.000.000.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.003.079.500,00					Pegawai		105.000.000,00	
		-						1.003.079.500,00					Pegawai		105.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	600.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	403.079.500,00						-	100.000.000,00	
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						403.079.500,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	403.079.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						600.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150.000.000,00					-		150.000.000,00	
		-						150.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.411.879.198,00					-		850.000.000,00	
		-						1.411.879.198,00					-		850.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	999.999.198,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	100.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	311.880.000,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						311.880.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	311.880.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						999.999.198,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	999.999.198,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
123.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**4.900.000.000,00**							**5.400.000.000,00**	
			Jumlah fasilitas dan akesebilitas	-		-	6 unit	1.500.000.000,00						-	2.700.000.000,00	
			JUMLAH SARANA FASILITAS DAN AKESBILITAS PARIWISATA	-		-	11 KAWASAN	2.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			-	-		-	-	400.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						2.500.000.000,00					JUMLAH SARANA DAN AKSESBILITAS PARIWISATA		1.500.000.000,00	
		-						2.500.000.000,00					JUMLAH SARANA DAN AKSESBILITAS PARIWISATA		1.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	-	2.000.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						2.000.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	3 Lokasi	2.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	6 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						2.000.000.000,00					Masyarakat		2.700.000.000,00	
		-						2.000.000.000,00					Masyarakat		2.700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	-		-	-	500.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	3 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	5 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0009	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya						500.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	-		-	4 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
		-						400.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Pengawas di Daerah yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Pengawasan Standar Usaha Bidang Pariwisata	-		-	-	100.000.000,00						-	900.000.000,00	
	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	30 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.04.0023	Fasilitasi dan Pembinaan Pengawas Usaha Pariwisata di Daerah						100.000.000,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pengawas Usaha Pariwisata di Daerah	Jumlah Pengawas di Daerah yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Pengawasan Standar Usaha Bidang Pariwisata	-		-	6 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	900.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
124.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**3.800.000.000,00**							**3.810.000.000,00**	
			-	-		-	-	3.800.000.000,00						-	3.810.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						3.800.000.000,00					-		3.810.000.000,00	
		-						3.800.000.000,00					-		3.810.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-		-	-	0,00						-	310.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	3.300.000.000,00						-	3.000.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-		-	5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						0,00							310.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-		-	3 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	310.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						3.300.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	2 Kegiatan	3.300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
125.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**1.768.243.400,00**							**1.860.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.768.243.400,00						-	1.860.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						1.768.243.400,00					-		1.860.000.000,00	
		-						1.768.243.400,00					-		1.860.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	-		-	-	1.406.325.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	-		-	-	0,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	-		-	-	361.918.400,00						-	360.000.000,00	
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran						1.406.325.000,00							500.000.000,00	
		Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	-		-	3 Dokumen	1.406.325.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual						0,00							1.000.000.000,00	
		Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif						361.918.400,00							360.000.000,00	
		Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	-		-	43 Promosi	361.918.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	360.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
126.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**2.085.068.000,00**							**511.310.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.585.068.000,00						-	511.310.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						1.785.068.000,00					-		511.010.000.000,00	
		-						1.785.068.000,00					-		511.010.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-		-	-	500.000.000,00						-	510.000.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan untuk pengembangan Ekonomi kreatif	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-		-	-	785.068.000,00						-	510.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif						500.000.000,00							510.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-		-	4 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	510.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						785.068.000,00							510.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-		-	50 Orang	785.068.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	510.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0013	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan untuk pengembangan Ekonomi kreatif	-		-	30 Orang	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						300.000.000,00					-		300.000.000,00	
		-						300.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	20 Orang	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SEKRETARIAT DAERAH						**44.329.596.187,00**							**40.197.675.037,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**44.154.156.887,00**							**39.973.506.354,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**44.154.156.887,00**							**39.973.506.354,00**	
127.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**29.689.300.687,00**							**24.534.074.378,00**	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	-		-	100 persen	19.688.692.453,00						-	19.829.804.451,00	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	-		-	undefined undefined	10.000.608.234,00						-	4.704.269.927,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					OPD		50.617.336,00	
		-						0,00					OPD		50.617.336,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	50.617.336,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							50.617.336,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	10 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.617.336,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.491.234.856,00					OPD		9.978.392.379,00	
		-						12.491.234.856,00					OPD		9.978.392.379,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	374.702.000,00						-	56.570.734,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	12.116.532.856,00						-	9.921.821.645,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.116.532.856,00							9.921.821.645,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	225 Orang/bulan	12.116.532.856,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.921.821.645,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						374.702.000,00							56.570.734,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	374.702.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	56.570.734,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.655.883.216,00					OPD		1.984.124.306,00	
		-						1.655.883.216,00					OPD		1.984.124.306,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	452.230.216,00						-	647.972.552,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	773.350.000,00						-	789.606.352,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	430.303.000,00						-	546.545.402,00	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						430.303.000,00							546.545.402,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	430.303.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	546.545.402,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						452.230.216,00							647.972.552,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	452.230.216,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	647.972.552,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						773.350.000,00							789.606.352,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	773.350.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	789.606.352,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.493.715.000,00					OPD		1.660.740.342,00	
		-						8.493.715.000,00					OPD		1.660.740.342,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	126.080.000,00						-	155.936.154,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	7.535.935.000,00						-	656.798.636,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	831.700.000,00						-	848.005.552,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						7.535.935.000,00							656.798.636,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	7.535.935.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	656.798.636,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						126.080.000,00							155.936.154,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	10 Unit	126.080.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	155.936.154,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						831.700.000,00							848.005.552,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	12 Unit	831.700.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	848.005.552,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						447.400.000,00					OPD		1.870.339.104,00	
		-						447.400.000,00					OPD		1.870.339.104,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	447.400.000,00						-	463.644.552,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	1.406.694.552,00	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						447.400.000,00							463.644.552,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	447.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	463.644.552,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							1.406.694.552,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	24 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.406.694.552,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.291.874.259,00					OPD		5.556.859.289,00	
		-						3.291.874.259,00					OPD		5.556.859.289,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.259.192.140,00						-	1.275.436.549,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	1.650.652.216,00						-	3.866.894.549,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	282.349.903,00						-	298.592.040,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	99.680.000,00						-	115.936.151,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						282.349.903,00							298.592.040,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	8 Unit	282.349.903,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	298.592.040,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.650.652.216,00							3.866.894.549,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	25 Unit	1.650.652.216,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.866.894.549,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						99.680.000,00							115.936.151,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	10 Unit	99.680.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	115.936.151,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.259.192.140,00							1.275.436.549,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	1.259.192.140,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.275.436.549,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.905.564.622,00					OPD		1.866.446.144,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.905.564.622,00					OPD		1.866.446.144,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	1.127.976.128,00						-	1.144.218.550,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	613.838.494,00						-	532.533.044,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	63.750.000,00						-	79.694.550,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						613.838.494,00							532.533.044,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	1 Orang/Bulan	613.838.494,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	532.533.044,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						63.750.000,00							79.694.550,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	28 Paket	63.750.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	79.694.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.127.976.128,00							1.144.218.550,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	1 Orang/Bulan	1.127.976.128,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.144.218.550,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						783.226.334,00					OPD		815.711.000,00	
		-						783.226.334,00					OPD		815.711.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	443.790.217,00						-	460.032.550,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	339.436.117,00						-	355.678.450,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						443.790.217,00							460.032.550,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	443.790.217,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	460.032.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						339.436.117,00							355.678.450,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	339.436.117,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	355.678.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						276.266.900,00					OPD, Masyarakat		357.479.481,00	
		-						276.266.900,00					OPD, Masyarakat		357.479.481,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	65.000.000,00						-	81.242.333,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	51.040.000,00						-	67.282.533,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	-	94.893.800,00						-	111.136.151,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	-	37.623.000,00						-	53.865.732,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	27.710.100,00						-	43.952.732,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						94.893.800,00							111.136.151,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	36 Dokumen	94.893.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	111.136.151,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						27.710.100,00							43.952.732,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	1 Laporan	27.710.100,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	43.952.732,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						37.623.000,00							53.865.732,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	36 Dokumen	37.623.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	53.865.732,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						51.040.000,00							67.282.533,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	1 Dokumen	51.040.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	67.282.533,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						65.000.000,00							81.242.333,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	1 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	81.242.333,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						344.135.500,00					OPD		393.364.997,00	
		-						344.135.500,00					OPD		393.364.997,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	-	224.136.500,00						-	196.743.732,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	-	59.999.000,00						-	112.052.633,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	-	60.000.000,00						-	84.568.632,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						224.136.500,00							196.743.732,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	12 Laporan	224.136.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	196.743.732,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						59.999.000,00							112.052.633,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	12 Laporan	59.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	112.052.633,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						60.000.000,00							84.568.632,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	84.568.632,00	SEKRETARIAT DAERAH
128.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**12.679.841.900,00**							**13.617.185.432,00**	
			Efektivitas Kerja Sama Daerah	-		-	45 persen	825.220.200,00						-	918.367.332,00	
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyar	-		-	80 persen	825.220.200,00						-	918.367.332,00	
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-		-	75 persen	825.220.200,00						-	918.367.332,00	
			Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	-		-	88,99 persen	825.220.200,00						-	918.367.332,00	
			Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung	-		-	100 persen	825.220.200,00						-	918.367.332,00	
			Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah	-		-	100 persen	10.620.640.700,00						-	11.496.897.100,00	
			Persentase Penyelesaian Perkara Hukum Pemda baik litigasi maupun non litigasi	-		-	89 persen	1.233.981.000,00						-	1.201.921.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						825.220.200,00					OPD, Masyarakat		918.367.332,00	
		-						825.220.200,00					OPD, Masyarakat		918.367.332,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	-	330.045.800,00						-	361.094.844,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	-	231.912.200,00						-	262.961.144,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	-	263.262.200,00						-	294.311.344,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						231.912.200,00							262.961.144,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	4 Dokumen	231.912.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	262.961.144,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						263.262.200,00							294.311.344,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	0 Dokumen	263.262.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	294.311.344,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						330.045.800,00							361.094.844,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	5 Dokumen	330.045.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	361.094.844,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						10.120.640.700,00					OPD,Masyarakat		10.946.897.100,00	
		-						10.120.640.700,00					OPD,Masyarakat		10.946.897.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	-	6.303.460.600,00						-	5.984.509.440,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	-	3.318.735.100,00						-	3.462.893.516,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-		-	-	498.445.000,00						-	1.499.494.144,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						6.303.460.600,00							5.984.509.440,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	8 Dokumen	6.303.460.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.984.509.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						498.445.000,00							1.499.494.144,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-		-	3 Dokumen	498.445.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.499.494.144,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						3.318.735.100,00							3.462.893.516,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	8 Dokumen	3.318.735.100,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.462.893.516,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						1.233.981.000,00					OPD, Masyarakat		1.201.921.000,00	
		-						1.233.981.000,00					OPD, Masyarakat		1.201.921.000,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	-	580.531.800,00						-	548.977.328,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	-	385.586.600,00						-	416.635.744,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	-	267.862.600,00						-	236.307.928,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						385.586.600,00							416.635.744,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	15 Dokumen	385.586.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	416.635.744,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						580.531.800,00							548.977.328,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	5 Kasus	580.531.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	548.977.328,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						267.862.600,00							236.307.928,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	4 Dokumen	267.862.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	236.307.928,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						500.000.000,00					OPD, Masyarakat		550.000.000,00	
		-						500.000.000,00					OPD, Masyarakat		550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	-	500.000.000,00						-	550.000.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
129.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.785.014.300,00**							**1.822.246.544,00**	
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	-		-	5,3 persen	366.316.200,00						-	374.588.920,00	
			Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	-		-	11,14 persen	366.316.200,00						-	374.588.920,00	
			Pemanfaatan Sistem Pengadaan	-		-	23,04 persen	366.316.200,00						-	374.588.920,00	
			Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	-		-	85 persen	73.287.200,00						-	77.427.863,00	
			Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	-		-	90 persen	366.316.200,00						-	374.588.920,00	
			Persentase OPD dengan Realisasi Keuangan dan Fisim lebih dari 85 Persen	-		-	85 persen	445.196.600,00						-	457.605.380,00	
			Persentase OPD yang Mengikuti ULP Tepat Waktu	-		-	90 persen	900.214.300,00						-	912.624.381,00	
			Tingkat Kematangan UKPBJ	-		-	40,00 persen	366.316.200,00						-	374.588.920,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						366.316.200,00					OPD		374.588.920,00	
		-						366.316.200,00					OPD		374.588.920,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	-	276.279.800,00						-	280.416.060,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	-	90.036.400,00						-	94.172.860,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						276.279.800,00							280.416.060,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	17 Dokumen	276.279.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	280.416.060,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						90.036.400,00							94.172.860,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	5 Laporan	90.036.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	94.172.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						445.196.600,00					OPD		457.605.380,00	
		-						445.196.600,00					OPD		457.605.380,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	-	92.752.000,00						-	96.887.860,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	-	233.497.600,00						-	237.633.860,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	-	118.947.000,00						-	123.083.660,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						92.752.000,00							96.887.860,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	1 Dokumen	92.752.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	96.887.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						118.947.000,00							123.083.660,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	1 Laporan	118.947.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	123.083.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						233.497.600,00							237.633.860,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	1 Laporan	233.497.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	237.633.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						900.214.300,00					OPD		912.624.381,00	
		-						900.214.300,00					OPD		912.624.381,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	-	374.615.700,00						-	378.751.660,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	295.966.600,00						-	300.102.862,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	229.632.000,00						-	233.769.859,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						295.966.600,00							300.102.862,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	12 Dokumen	295.966.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.102.862,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						374.615.700,00							378.751.660,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	13 Dokumen	374.615.700,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	378.751.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						229.632.000,00							233.769.859,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	200 Orang	229.632.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	233.769.859,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						73.287.200,00					OPD		77.427.863,00	
		-						73.287.200,00					OPD		77.427.863,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-		-	-	73.287.200,00						-	77.427.863,00	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						73.287.200,00							77.427.863,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-		-	1 Dokumen	73.287.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	77.427.863,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X							**175.439.300,00**							**224.168.683,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**175.439.300,00**							**224.168.683,00**	
130.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**175.439.300,00**							**224.168.683,00**	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	-		-	100 persen	175.439.300,00						-	224.168.683,00	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						23.319.800,00					OPD		39.562.000,00	
		-						23.319.800,00					OPD		39.562.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	23.319.800,00						-	39.562.000,00	
	X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						23.319.800,00							39.562.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	12 Dokumen	23.319.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	39.562.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						54.069.500,00					OPD		70.312.134,00	
		-						54.069.500,00					OPD		70.312.134,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	54.069.500,00						-	70.312.134,00	
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						54.069.500,00							70.312.134,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	54.069.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.312.134,00	SEKRETARIAT DAERAH
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						98.050.000,00					OPD		114.294.549,00	
		-						98.050.000,00					OPD		114.294.549,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	98.050.000,00						-	114.294.549,00	
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						98.050.000,00							114.294.549,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	98.050.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	114.294.549,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**33.434.036.477,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**33.216.566.477,00**							**0,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**33.216.566.477,00**							**0,00**	
131.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**17.144.596.023,00**							**0,00**	
			Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	-		-	undefined undefined	16.269.934.023,00						-	0,00	
			-	-		-	-	874.662.000,00						-	0,00	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.440.071.273,00					PNS		0,00	
		-						4.440.071.273,00					PNS		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	194.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.245.671.273,00						-	0,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.245.671.273,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	76 Orang/bulan	4.245.671.273,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						194.400.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	194.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						120.000.000,00					Anggota DPRD		0,00	
		-						120.000.000,00					Anggota DPRD		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	120.000.000,00						-	0,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						120.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	120.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						914.282.400,00					anggota DPRD PNS dan Masyarakat		0,00	
		-						914.282.400,00					anggota DPRD PNS dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	359.747.400,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	124.250.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	22.645.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	207.640.000,00						-	0,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						22.645.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	22.645.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						207.640.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	207.640.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						359.747.400,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	359.747.400,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						124.250.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	124.250.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	5 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						347.920.000,00					masyarakat/pihak ketiga		0,00	
		-						347.920.000,00					masyarakat/pihak ketiga		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	347.920.000,00						-	0,00	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						347.920.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Unit	347.920.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.000.000,00					kantor Sekretariat DPRD		0,00	
		-						126.000.000,00					kantor Sekretariat DPRD		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	126.000.000,00						-	0,00	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						126.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	126.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						874.662.000,00					kendaraan Dinas Disekretariat DPRD		0,00	
		-						874.662.000,00					kendaraan Dinas Disekretariat DPRD		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	347.200.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	371.746.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	155.716.000,00						-	0,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						155.716.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	7 Unit	155.716.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						371.746.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	21 Unit	371.746.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						347.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	347.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						9.542.892.350,00					Anggota DPRD		0,00	
		-						9.542.892.350,00					Anggota DPRD		0,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	-	9.226.212.350,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	-	61.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-		-	-	255.680.000,00						-	0,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						9.226.212.350,00							0,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	20 Orang/Bulan	9.226.212.350,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						255.680.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-		-	1 Paket	255.680.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						61.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	20 Orang	61.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						778.768.000,00					Anggota DPRD		0,00	
		-						778.768.000,00					Anggota DPRD		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-		-	-	145.128.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-		-	-	56.393.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-		-	-	577.247.000,00						-	0,00	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						145.128.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-		-	1 Dokumen	145.128.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD						56.393.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	-		-	5 Laporan	56.393.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						577.247.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-		-	2 Paket	577.247.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
132.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**16.071.970.454,00**							**0,00**	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang-undangan	-		-	12 perda	2.534.663.000,00						-	0,00	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang-undangan	-		-	undefined undefined	9.888.269.600,00						-	0,00	
			-	-		-	-	3.028.197.054,00						-	0,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						2.534.663.000,00					Anggota DPRD serta Sekretariat		0,00	
		-						2.534.663.000,00					Anggota DPRD serta Sekretariat		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-		-	-	1.080.944.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-		-	-	388.616.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-		-	-	80.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-		-	-	385.620.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-		-	-	599.483.000,00						-	0,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						388.616.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-		-	2 Dokumen	388.616.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						1.080.944.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-		-	13 Dokumen	1.080.944.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						385.620.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-		-	2 Dokumen	385.620.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						80.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-		-	2 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah						599.483.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-		-	60 Orang	599.483.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						732.966.054,00					Anggota DPRD dan PNS Mentawai		0,00	
		-						732.966.054,00					Anggota DPRD dan PNS Mentawai		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	-	221.469.800,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-		-	-	221.469.800,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-		-	-	25.904.854,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-		-	-	238.216.800,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-		-	-	25.904.800,00						-	0,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						25.904.854,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-		-	1 Dokumen	25.904.854,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						25.904.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-		-	1 Dokumen	25.904.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						221.469.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	1 Dokumen	221.469.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						221.469.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-		-	1 Dokumen	221.469.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						238.216.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-		-	1 Dokumen	238.216.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						3.028.248.800,00					Anggota DPRD dan PNS Mentawai		0,00	
		-						3.028.248.800,00					Anggota DPRD dan PNS Mentawai		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-		-	-	728.268.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-		-	-	436.499.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-		-	-	431.263.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-		-	-	399.371.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-		-	-	380.609.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-		-	-	399.371.000,00						-	0,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-		-	-	252.867.800,00						-	0,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						431.263.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-		-	4 Laporan	431.263.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						436.499.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-		-	4 Laporan	436.499.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						399.371.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-		-	4 Laporan	399.371.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						399.371.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-		-	4 Laporan	399.371.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						380.609.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-		-	3 Laporan	380.609.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran						728.268.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-		-	4 Dokumen	728.268.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						252.867.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-		-	1 Dokumen	252.867.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						2.224.863.800,00					Anngota DPRD		0,00	
		-						2.224.863.800,00					Anngota DPRD		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	-	1.693.142.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	-	18.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-		-	-	33.721.800,00						-	0,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-		-	-	180.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						1.693.142.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	6 Dokumen	1.693.142.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						180.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-		-	3 Orang	180.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						300.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-		-	5 Orang	300.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						33.721.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-		-	12 Dokumen	33.721.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						18.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	3 Dokumen	18.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						5.034.528.000,00					Anggota DPRD dan Masyarkat		0,00	
		-						5.034.528.000,00					Anggota DPRD dan Masyarkat		0,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-		-	-	3.503.189.400,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	-	952.379.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-		-	-	578.959.600,00						-	0,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						952.379.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	6 Laporan	952.379.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						3.503.189.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-		-	3 Dokumen	3.503.189.400,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah						578.959.600,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-		-	60 Orang	578.959.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						148.036.000,00					Anggota DPRD		0,00	
		-						148.036.000,00					Anggota DPRD		0,00	
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-		-	-	148.036.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-		-	-	0,00						-	0,00	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD						148.036.000,00							0,00	
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-		-	1 Dokumen	148.036.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-		-	3 Laporan	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						2.368.664.800,00					Anggota DPRD		0,00	
		-						2.368.664.800,00					Anggota DPRD		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-		-	-	526.697.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	-	1.788.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	-	53.167.800,00						-	0,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						1.788.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	6 Dokumen	1.788.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						53.167.800,00							0,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	3 Laporan	53.167.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						526.697.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-		-	2 Dokumen	526.697.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	X							**217.470.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**217.470.000,00**							**0,00**	
133.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**217.470.000,00**							**0,00**	
			Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	-		-	undefined undefined	150.490.000,00						-	0,00	
			-	-		-	-	66.980.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						150.490.000,00					anggota DPRD PNS dan Masyarakat		0,00	
		-						150.490.000,00					anggota DPRD PNS dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	150.490.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						150.490.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	150.490.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66.980.000,00					kendaraan Dinas Disekretariat DPRD		0,00	
		-						66.980.000,00					kendaraan Dinas Disekretariat DPRD		0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	66.980.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						66.980.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	45 Unit	66.980.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						**7.250.654.724,00**							**7.670.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.250.654.724,00**							**7.670.000.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**6.650.654.724,00**							**7.020.000.000,00**	
134.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.450.654.724,00**							**5.605.000.000,00**	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas layanan Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	5.110.654.724,00						-	5.105.000.000,00	
			-	-		-	-	315.000.000,00						-	350.000.000,00	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.431.513.724,00					Opd		4.520.000.000,00	
		-						4.431.513.724,00					Opd		4.520.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	116.400.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.315.113.724,00						-	4.400.000.000,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.315.113.724,00							4.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	35 Orang/bulan	4.315.113.724,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	4.400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						116.400.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	116.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						340.000.000,00					OPd		380.000.000,00	
		-						340.000.000,00					OPd		380.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	90.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						90.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	90.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						298.550.000,00					Opd		300.000.000,00	
		-						298.550.000,00					Opd		300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	298.550.000,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						298.550.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	298.550.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						380.591.000,00					OPd		405.000.000,00	
		-						380.591.000,00					OPd		405.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	115.591.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	235.000.000,00						-	250.000.000,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						115.591.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	115.591.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						235.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	235.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
135.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**800.000.000,00**							**975.000.000,00**	
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	415.000.000,00						-	475.000.000,00	
			-	-		-	-	285.000.000,00						-	380.000.000,00	
			undefined	-		-	undefined undefined	100.000.000,00						-	120.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						415.000.000,00					Opd		475.000.000,00	
		-						415.000.000,00					Opd		475.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	-	265.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	-	100.000.000,00						-	120.000.000,00	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-		-	1 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						265.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	1 Berita Acara	265.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						100.000.000,00					OPd		120.000.000,00	
		-						100.000.000,00					OPd		120.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-		-	-	100.000.000,00						-	120.000.000,00	
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-		-	72 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						285.000.000,00					OPd		380.000.000,00	
		-						285.000.000,00					OPd		380.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	-	285.000.000,00						-	380.000.000,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						285.000.000,00							380.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	1 Laporan	285.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
136.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**400.000.000,00**							**440.000.000,00**	
			Persentase Keselarasan Program RKPD dan Program Prioritas ke dalam Renja Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			-	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						200.000.000,00					Opd		220.000.000,00	
		-						200.000.000,00					Opd		220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-		-	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						100.000.000,00					Opd		110.000.000,00	
		-						100.000.000,00					Opd		110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						100.000.000,00					OPd		110.000.000,00	
		-						100.000.000,00					OPd		110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**600.000.000,00**							**650.000.000,00**	
137.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**500.000.000,00**							**540.000.000,00**	
			Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	-		-	100 Unit	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	-		-	100 persen	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan Daerah	-		-	89 Persen	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan daerah	-		-	100 Persen	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
			-	-		-	-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						300.000.000,00					OPD		320.000.000,00	
		-						300.000.000,00					OPD		320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	-		-	-	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-		-	-	150.000.000,00						-	160.000.000,00	
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan						150.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat						150.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						200.000.000,00					Opd		220.000.000,00	
		-						200.000.000,00					Opd		220.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-		-	-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-		-	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
138.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**100.000.000,00**							**110.000.000,00**	
			Persentase Produk inovasi yang dimanfaatkan	-		-	100 Persen	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						100.000.000,00					OPD		110.000.000,00	
		-						100.000.000,00					OPD		110.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**122.239.061.469,00**							**128.979.130.578,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**122.239.061.469,00**							**128.979.130.578,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**122.239.061.469,00**							**128.979.130.578,00**	
139.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**36.470.616.538,00**							**37.349.494.978,00**	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan tugas layanan pada Perangkat Daerah	-		-	100 %	36.470.616.538,00						-	37.349.494.978,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.323.000,00					OPD		33.223.000,00	
		-						22.323.000,00					OPD		33.223.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	22.323.000,00						-	33.223.000,00	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.323.000,00							33.223.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	3 Laporan	22.323.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	33.223.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						33.767.996.138,00					ASN		35.322.670.078,00	
		-						33.767.996.138,00					ASN		35.322.670.078,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	469.080.000,00						-	569.880.900,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	33.298.916.138,00						-	34.752.789.178,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						33.298.916.138,00							34.752.789.178,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	61 Orang/bulan	33.298.916.138,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	34.752.789.178,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						469.080.000,00							569.880.900,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	469.080.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	569.880.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.256.437.400,00					OPD		513.001.900,00	
		-						1.256.437.400,00					OPD		513.001.900,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	18.000.000,00						-	19.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	130.532.000,00						-	168.340.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	220.853.200,00						-	168.798.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	784.689.200,00						-	45.789.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	23.175.000,00						-	28.186.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	79.188.000,00						-	82.888.900,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						23.175.000,00							28.186.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	20 Paket	23.175.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	28.186.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						79.188.000,00							82.888.900,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	79.188.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	82.888.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						220.853.200,00							168.798.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	220.853.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	168.798.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						784.689.200,00							45.789.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	784.689.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	45.789.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						18.000.000,00							19.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	4 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	19.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						130.532.000,00							168.340.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	130.532.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	168.340.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						969.150.000,00					OPD		1.139.150.000,00	
		-						969.150.000,00					OPD		1.139.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	969.150.000,00						-	979.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	160.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						969.150.000,00							979.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	4 Laporan	969.150.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	979.150.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						454.710.000,00					OPD		341.450.000,00	
		-						454.710.000,00					OPD		341.450.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	35.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	304.910.000,00						-	180.550.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	114.800.000,00						-	115.900.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						304.910.000,00							180.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	304.910.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	180.550.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						35.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	35.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						114.800.000,00							115.900.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	10 Unit	114.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	115.900.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
140.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**84.550.343.031,00**							**90.315.188.200,00**	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	-		-	100 %	265.000.000,00						-	282.177.800,00	
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	-		-	100 %	1.312.057.800,00						-	1.579.576.400,00	
			-	-		-	-	82.973.285.231,00						-	88.313.434.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.312.057.800,00					OPD		1.719.576.400,00	
		-						1.312.057.800,00					OPD		1.719.576.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	-	60.000.200,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	-	59.999.800,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	-	60.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	215.629.400,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	-	450.966.400,00						-	579.009.200,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	-	465.462.000,00						-	680.567.200,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						60.000.200,00							70.000.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	60.000.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						59.999.800,00							70.000.000,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	59.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						450.966.400,00							579.009.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	2 Dokumen	450.966.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	579.009.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						465.462.000,00							680.567.200,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	2 Dokumen	465.462.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	680.567.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	2 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						215.629.400,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	72 Orang	215.629.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						601.155.160,00					-		573.651.100,00	
		-						601.155.160,00					-		573.651.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	-	246.035.000,00						-	255.987.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-		-	-	40.028.280,00						-	45.987.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-	-	50.493.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-		-	-	207.369.000,00						-	210.997.800,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	-	57.229.880,00						-	60.678.500,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						246.035.000,00							255.987.200,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	1 Dokumen	246.035.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	255.987.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						50.493.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-	4 Dokumen	50.493.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						40.028.280,00							45.987.600,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-		-	1 Dokumen	40.028.280,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	45.987.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						57.229.880,00							60.678.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	12 Laporan	57.229.880,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	60.678.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						207.369.000,00							210.997.800,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-		-	5 Dokumen	207.369.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	210.997.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						265.000.000,00					OPD		282.177.800,00	
		-						265.000.000,00					OPD		282.177.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-		-	-	54.197.400,00						-	58.977.800,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	-	95.684.200,00						-	98.560.800,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	-	49.348.200,00						-	55.648.400,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	-	65.770.200,00						-	68.990.800,00	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						54.197.400,00							58.977.800,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-		-	36 Dokumen	54.197.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	58.977.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						49.348.200,00							55.648.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	6 Laporan	49.348.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	55.648.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						95.684.200,00							98.560.800,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	6 Laporan	95.684.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	98.560.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						65.770.200,00							68.990.800,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	65.770.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	68.990.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	75 Orang	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						82.372.130.071,00					-		87.739.782.900,00	
		-						82.372.130.071,00					-		87.739.782.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	-	80.522.130.071,00						-	85.789.782.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	-	1.850.000.000,00						-	1.950.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						1.850.000.000,00							1.950.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	1 Laporan	1.850.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	1.950.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						80.522.130.071,00							85.789.782.900,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	80.522.130.071,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	85.789.782.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
141.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**1.218.101.900,00**							**1.314.447.400,00**	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	-		-	100 %	1.218.101.900,00						-	1.314.447.400,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.218.101.900,00					OPD		1.314.447.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.218.101.900,00					OPD		1.314.447.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	-	470.597.400,00						-	490.780.900,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	-	69.945.500,00						-	75.680.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-		-	-	54.991.000,00						-	58.998.700,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	-	509.999.800,00						-	550.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-		-	-	59.999.800,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	52.568.400,00						-	58.986.900,00	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						52.568.400,00							58.986.900,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	2 Dokumen	52.568.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	58.986.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						54.991.000,00							58.998.700,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-		-	1 Laporan	54.991.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	58.998.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						509.999.800,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	36 Laporan	509.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						470.597.400,00							490.780.900,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	2 Dokumen	470.597.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	490.780.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						59.999.800,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-		-	1 Laporan	59.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						69.945.500,00							75.680.900,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	1 Laporan	69.945.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	75.680.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**4.263.662.156,00**							**5.525.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.263.662.156,00**							**5.525.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**4.263.662.156,00**							**5.525.000.000,00**	
142.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.793.047.356,00**							**3.267.000.000,00**	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah	-		-	100 %	1.521.400.156,00						-	2.877.000.000,00	
			-	-		-	-	261.647.200,00						-	390.000.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					Aparatur		15.000.000,00	
		-						10.000.000,00					Aparatur		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.063.700.156,00					Aparatur		2.345.000.000,00	
		-						1.063.700.156,00					Aparatur		2.345.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	9.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.054.700.156,00						-	2.330.000.000,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.054.700.156,00							2.330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	31 Orang/bulan	1.054.700.156,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	2.330.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						9.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						261.647.200,00					Aparatur		375.000.000,00	
		-						261.647.200,00					Aparatur		375.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	100.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.000.200,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	61.647.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	75.000.000,00						-	78.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						61.647.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	61.647.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	65.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.000.000,00							78.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	8 Paket	75.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	78.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.200,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	15.000.200,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	4 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	12.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						250.000.000,00					Aparatur		300.000.000,00	
		-						250.000.000,00					Aparatur		300.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	250.000.000,00						-	300.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						250.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	250.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37.000.000,00					Aparatur		40.000.000,00	
		-						37.000.000,00					Aparatur		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	37.000.000,00						-	40.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						37.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	37.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						170.700.000,00					Aparatur		192.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						170.700.000,00					Aparatur		192.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	15.000.000,00						-	17.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	135.700.000,00						-	150.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.000.000,00							17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	17.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						135.700.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	135.700.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
143.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**2.470.614.800,00**							**2.258.000.000,00**	
			Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengolahan Pendapatan	-		-	100 %	2.210.614.800,00						-	2.258.000.000,00	
			Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	-		-	14,53 %	2.210.614.800,00						-	2.258.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.470.614.800,00					Masyarakat selaku Wajib Pajak		2.258.000.000,00	
		-						2.470.614.800,00					Masyarakat selaku Wajib Pajak		2.258.000.000,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	150.165.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	-	210.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	-	210.000.000,00						-	215.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	53.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	-	350.000.000,00						-	375.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	214.750.000,00						-	245.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-	-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	169.999.800,00						-	145.000.000,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		-	-	60.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-		-	-	535.700.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	-	170.000.000,00						-	175.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						350.000.000,00							375.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	1 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	375.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						150.165.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	1 Dokumen	150.165.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						169.999.800,00							145.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	1 Laporan	169.999.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	145.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						170.000.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	1 Unit	170.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	175.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						100.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						535.700.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-		-	5 Obyek Pajak	535.700.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						60.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		-	1 Layanan	60.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	65.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						210.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	1 Dokumen	210.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						50.000.000,00							53.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	53.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						210.000.000,00							215.000.000,00	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	1 Dokumen	210.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	215.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						214.750.000,00							245.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	1 Laporan	214.750.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	245.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**5.010.703.866,00**							**5.332.063.470,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.010.703.866,00**							**5.332.063.470,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**4.987.569.866,00**							**4.646.586.665,00**	
144.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.571.703.866,00**							**3.379.477.223,00**	
			Lancarnya kegiatan perkantoran, tersedianya gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ASN	-		-	1 tahun	4.253.967.988,00						-	3.041.393.888,00	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	-		-	100 persen	0,00						-	7.978.939,00	
			Persentase peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran secara cepat dan tepat	-		-	100 persen	142.412.000,00						-	145.000.000,00	
			Persentase peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran secara cepat dan tepat	-		-	90 persen	175.323.878,00						-	185.104.396,00	
			Terlasanannya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	-		-	100 Persen	142.412.000,00						-	145.000.000,00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.253.967.988,00					ASN		3.041.393.888,00	
		-						4.253.967.988,00					ASN		3.041.393.888,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	22.200.000,00						-	29.040.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.231.767.988,00						-	3.012.353.888,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.231.767.988,00							3.012.353.888,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	49 Orang/bulan	4.231.767.988,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.012.353.888,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						22.200.000,00							29.040.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	22.200.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	29.040.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						120.674.744,00					OPD		125.104.396,00	
		-						120.674.744,00					OPD		125.104.396,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	35.979.000,00						-	39.894.695,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	40.649.000,00						-	29.921.021,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	9.848.144,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.199.000,00						-	4.288.680,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	29.999.600,00						-	40.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.199.000,00							4.288.680,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	4.199.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	4.288.680,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						29.999.600,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	29.999.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.649.000,00							29.921.021,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	40.649.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	29.921.021,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.848.144,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen Paket	9.848.144,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						35.979.000,00							39.894.695,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	35.979.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	39.894.695,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					OPD		7.978.939,00	
		-						0,00					OPD		7.978.939,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	7.978.939,00	
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							7.978.939,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.978.939,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						142.412.000,00					OPD		145.000.000,00	
		-						142.412.000,00					OPD		145.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	138.512.000,00						-	140.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.900.000,00						-	5.000.000,00	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						138.512.000,00							140.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	138.512.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.900.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Laporan	3.900.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						54.649.134,00					OPD		60.000.000,00	
		-						54.649.134,00					OPD		60.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	11.651.094,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	42.998.040,00						-	45.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.998.040,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	42.998.040,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						11.651.094,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	11.651.094,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
145.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**415.866.000,00**							**1.267.109.442,00**	
			Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	-		-	59,74 %	415.866.000,00						-	1.222.109.442,00	
			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-		-	10 %	415.866.000,00						-	1.222.109.442,00	
			Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-		-	50 %	35.000.000,00						-	212.632.446,00	
			Persentase Layanan Kepegawaian yang terdigital	-		-	100 persen	41.866.000,00						-	205.000.000,00	
			Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	-		-	100 %	300.286.800,00						-	526.844.550,00	
			Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	-		-	80 %	377.152.800,00						-	944.476.996,00	
			Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	-		-	100 %	115.579.200,00						-	740.264.892,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						38.713.200,00					ASN		322.632.446,00	
		-						38.713.200,00					ASN		322.632.446,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	-	11.554.600,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	-	0,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	0,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	-	27.158.600,00						-	117.632.446,00	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						27.158.600,00							117.632.446,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	195 Dokumen	27.158.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	117.632.446,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian						11.554.600,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	30 Dokumen	11.554.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	2 Dokumen	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						0,00							65.000.000,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	3 Dokumen	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						300.286.800,00					ASN		526.844.550,00	
		-						300.286.800,00					ASN		526.844.550,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	-	290.061.000,00						-	481.844.550,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	-	10.225.800,00						-	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						290.061.000,00							481.844.550,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	2 Dokumen	290.061.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	481.844.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						10.225.800,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	400 Dokumen	10.225.800,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						35.000.000,00					ASN		212.632.446,00	
		-						35.000.000,00					ASN		212.632.446,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-		-	-	35.000.000,00						-	212.632.446,00	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						35.000.000,00							212.632.446,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-		-	1 Orang	35.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	212.632.446,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						41.866.000,00					ASN		205.000.000,00	
		-						41.866.000,00					ASN		205.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-		-	-	7.866.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-		-	-	16.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	-	18.000.000,00						-	110.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						18.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	1 Dokumen	18.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						7.866.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-		-	79 Orang	7.866.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						16.000.000,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-		-	5 Orang	16.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**23.134.000,00**							**685.476.805,00**	
146.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**23.134.000,00**							**685.476.805,00**	
			Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-		-	100 persen	23.134.000,00						-	430.317.870,00	
			Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-		-	50 %	23.134.000,00						-	430.317.870,00	
			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	-		-	75 %	23.134.000,00						-	430.317.870,00	
			Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	-		-	55 %	23.134.000,00						-	430.317.870,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						23.134.000,00					ASN		430.317.870,00	
		-						23.134.000,00					ASN		430.317.870,00	
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	155.158.935,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	-	23.134.000,00						-	255.158.935,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
	5.04.02.2.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota						0,00							20.000.000,00	
		Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	-		-	2 Lembaga	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota						0,00							155.158.935,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	155.158.935,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						23.134.000,00							255.158.935,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	3 Laporan	23.134.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	255.158.935,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri						0,00					ASN		255.158.935,00	
		-						0,00					ASN		255.158.935,00	
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-		-	-	0,00						-	255.158.935,00	
	5.04.02.2.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri						0,00							255.158.935,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-		-	30 Orang	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	255.158.935,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						**8.348.050.781,00**							**9.017.000.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.348.050.781,00**							**9.017.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**8.348.050.781,00**							**9.017.000.000,00**	
147.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.653.050.781,00**							**6.978.000.000,00**	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 Persen	6.423.200.781,00						-	6.678.000.000,00	
			-	-		-	-	209.850.000,00						-	220.000.000,00	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.924.001.398,00					-		4.997.000.000,00	
		-						4.924.001.398,00					-		4.997.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	96.530.000,00						-	97.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.827.471.398,00						-	4.900.000.000,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.827.471.398,00							4.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	12 Orang/bulan	4.827.471.398,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	4.900.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						96.530.000,00							97.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	7 Dokumen	96.530.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	97.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						300.137.000,00					-		310.000.000,00	
		-						300.137.000,00					-		310.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	300.137.000,00						-	310.000.000,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						300.137.000,00							310.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	40 Orang	300.137.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	310.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						615.226.543,00					-		656.000.000,00	
		-						615.226.543,00					-		656.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	500.004.000,00						-	510.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.398.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	19.809.043,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	10.015.500,00						-	20.000.000,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	15 Paket	20.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.015.500,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	4 Paket	10.015.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.398.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	50.398.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.809.043,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	19.809.043,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.000.000,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	16.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						500.004.000,00							510.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	500.004.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	510.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						350.000.000,00					-		530.000.000,00	
		-						350.000.000,00					-		530.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	300.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						300.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	300.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						209.850.000,00					-		220.000.000,00	
		-						209.850.000,00					-		220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	39.850.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	170.000.000,00						-	180.000.000,00	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						39.850.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	39.850.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						170.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	170.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	180.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						253.835.840,00					-		265.000.000,00	
		-						253.835.840,00					-		265.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	199.999.840,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	29.416.000,00						-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	14.800.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	9.620.000,00						-	10.000.000,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						14.800.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	14.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						29.416.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	10 Unit	29.416.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.620.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	8 Unit	9.620.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						199.999.840,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	199.999.840,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	210.000.000,00	INSPEKTORAT
148.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**1.425.000.000,00**							**1.669.000.000,00**	
			Manajemen Risiko Indeks	-		-	2.83 Skore	150.000.000,00						-	510.000.000,00	
			Manajemen Risiko Indeks (MRI)	-		-	2,83 Nilai	865.000.000,00						-	888.000.000,00	
			Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	-		-	WTP Opini	150.000.000,00						-	510.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Opini Laporan Keuangan (10 Tahun Terakhir)	-		-	WTP Nilai	865.000.000,00						-	888.000.000,00	
			Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	-		-	78 Persen	150.000.000,00						-	510.000.000,00	
			Tindak Lanjut Rekomnedasi BPK Tahun Anggaran n-1	-		-	78 Persen	865.000.000,00						-	888.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.125.000.000,00					-		1.159.000.000,00	
		-						1.125.000.000,00					-		1.159.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	-	500.000.000,00						-	510.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	-	60.000.000,00						-	61.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	60.000.000,00						-	61.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	-	30.000.000,00						-	31.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	-	75.000.000,00						-	76.000.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						60.000.000,00							61.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	4 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	61.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						60.000.000,00							61.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	4 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	61.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						75.000.000,00							76.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	131 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	76.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						30.000.000,00							31.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	37 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	31.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						500.000.000,00							510.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	22 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	510.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						200.000.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	2 Kesepakatan	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	210.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						200.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	210.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						300.000.000,00					-		510.000.000,00	
		-						300.000.000,00					-		510.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	-	150.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	-	150.000.000,00						-	260.000.000,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						150.000.000,00							260.000.000,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	260.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						150.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	8 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	INSPEKTORAT
149.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**270.000.000,00**							**370.000.000,00**	
			1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-		-	3.3 Level	220.000.000,00						-	310.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						40.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						40.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-		-	-	40.000.000,00						-	50.000.000,00	
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-		-	4 Rekomendasi	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						230.000.000,00					-		320.000.000,00	
		-						230.000.000,00					-		320.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	-	30.000.000,00						-	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	160.000.000,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						100.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	10 perangkat daerah	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	160.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	26 perangkat daerah	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	2 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						30.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	2 perangkat daerah	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	40.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN SIBERUT UTARA						**2.809.331.751,00**							**3.153.941.751,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.809.331.751,00**							**3.153.941.751,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.809.331.751,00**							**3.153.941.751,00**	
150.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.707.011.751,00**							**2.971.381.751,00**	
			Meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tertib dan akuntabel	-		-	100 persen	2.639.801.751,00						-	2.862.261.751,00	
			Meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tertib dan akuntabel	-		-	undefined undefined	21.000.000,00						-	0,00	
			Meningkatnya pelayanan pemerintah ditingkat kecamatan	-		-	100 persen	33.260.000,00						-	86.170.000,00	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	-		-	100 persen	12.950.000,00						-	22.950.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.950.000,00					Kecamatan		22.950.000,00	
		-						12.950.000,00					Kecamatan		22.950.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	12.950.000,00						-	22.950.000,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.950.000,00							22.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	6 Laporan	12.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	22.950.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.556.747.051,00					Kecamatan		2.701.717.016,00	
		-						2.556.747.051,00					Kecamatan		2.701.717.016,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	51.550.000,00						-	100.520.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.505.197.051,00						-	2.601.197.016,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.505.197.051,00							2.601.197.016,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	27 Orang/bulan	2.505.197.051,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Utara || Desa Muara Sikabaluan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	2.601.197.016,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						51.550.000,00							100.520.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	51.550.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	100.520.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						83.054.700,00					Kecamatan		160.544.735,00	
		-						83.054.700,00					Kecamatan		160.544.735,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	60.400.000,00						-	90.358.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	21.471.100,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	1.183.600,00						-	3.186.735,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	7.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	9 Paket	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Utara || Desa Muara Sikabaluan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	7.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.471.100,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	21.471.100,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Utara || Desa Muara Sikabaluan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.183.600,00							3.186.735,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	1.183.600,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Utara || Desa Muara Sikabaluan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.186.735,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.400.000,00							90.358.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	60.400.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	90.358.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21.000.000,00					Kecamatan		0,00	
		-						21.000.000,00					Kecamatan		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	21.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						33.260.000,00					Kecamatan		86.170.000,00	
		-						33.260.000,00					Kecamatan		86.170.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	11.170.000,00						-	31.170.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	19.250.000,00						-	49.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.840.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						19.250.000,00							49.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	19.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	49.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						11.170.000,00							31.170.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	11.170.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Utara || Desa Muara Sikabaluan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	31.170.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.840.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	2.840.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Utara || Desa Muara Sikabaluan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	6.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
151.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**10.250.000,00**							**20.250.000,00**	
			Meningkatnya Pelayanan E KTP	-		-	100 persen	10.250.000,00						-	20.250.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.250.000,00					Masyarakat		20.250.000,00	
		-						10.250.000,00					Masyarakat		20.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	10.250.000,00						-	20.250.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						10.250.000,00							20.250.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	12 Laporan	10.250.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	20.250.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
152.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**29.135.000,00**							**50.707.000,00**	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	-		-	100 persen	29.135.000,00						-	50.707.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						29.135.000,00					Pemerintahan Desa SeKecamatan Siberut Utara		50.707.000,00	
		-						29.135.000,00					Pemerintahan Desa SeKecamatan Siberut Utara		50.707.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	8.230.000,00						-	18.350.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	20.905.000,00						-	32.357.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.905.000,00							32.357.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	10 Lembaga Kemasyarakatan	20.905.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	32.357.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						8.230.000,00							18.350.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	8.230.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	18.350.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
153.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**49.485.000,00**							**87.653.000,00**	
			Meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tertib dan akuntabel	-		-	100 persen	49.485.000,00						-	87.653.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						49.485.000,00					Masyarakat		87.653.000,00	
		-						49.485.000,00					Masyarakat		87.653.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	2.700.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	46.785.000,00						-	80.653.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						46.785.000,00							80.653.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	100 Orang	46.785.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	80.653.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						2.700.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	2 Dokumen	2.700.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Utara || Desa Muara Sikabaluan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	7.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
154.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**13.450.000,00**							**23.950.000,00**	
			Serapan APBDes	-		-	90 persen	13.450.000,00						-	23.950.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						13.450.000,00					Pemerintahan Desa SeKecamatan Siberut Utara		23.950.000,00	
		-						13.450.000,00					Pemerintahan Desa SeKecamatan Siberut Utara		23.950.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	13.450.000,00						-	23.950.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						13.450.000,00							23.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	12 Dokumen	13.450.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	23.950.000,00	KECAMATAN SIBERUT UTARA
		KECAMATAN SIBERUT TENGAH						**2.115.124.387,00**							**2.280.444.387,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.115.124.387,00**							**2.280.444.387,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.115.124.387,00**							**2.280.444.387,00**	
155.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.861.484.387,00**							**2.024.314.870,00**	
			Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	-		-	90 Persen	1.861.484.387,00						-	2.024.314.870,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						51.990.000,00					Internal Kecamatan		60.000.000,00	
		-						51.990.000,00					Internal Kecamatan		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	51.990.000,00						-	60.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						51.990.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	51.990.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.683.499.387,00					Internal Kecamatan		1.790.394.070,00	
		-						1.683.499.387,00					Internal Kecamatan		1.790.394.070,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	129.974.500,00						-	122.680.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.553.524.887,00						-	1.667.714.070,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.553.524.887,00							1.667.714.070,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	22 Orang/bulan	1.553.524.887,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.667.714.070,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						129.974.500,00							122.680.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	129.974.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	122.680.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						110.995.000,00					Internal Kecamatan		156.920.800,00	
		-						110.995.000,00					Internal Kecamatan		156.920.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	54.200.000,00						-	64.270.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	47.435.500,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	7.000.000,00						-	8.921.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.359.500,00						-	3.729.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.359.500,00							3.729.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.359.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.729.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						47.435.500,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	47.435.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	80.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000,00							8.921.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	7.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	8.921.800,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						54.200.000,00							64.270.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	10 Laporan	54.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	64.270.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.000.000,00					Internal Kecamatan		10.000.000,00	
		-						9.000.000,00					Internal Kecamatan		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	9.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.000.000,00					Internal Kecamatan		7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						6.000.000,00					Internal Kecamatan		7.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	6.000.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	6.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	7.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
156.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**37.800.000,00**							**46.690.000,00**	
			Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan	-		-	90 Persen	37.800.000,00						-	46.690.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						37.800.000,00					Internal dan Elemen Masyarakat Kecamatan Siberut Tengah		46.690.000,00	
		-						37.800.000,00					Internal dan Elemen Masyarakat Kecamatan Siberut Tengah		46.690.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	37.800.000,00						-	46.690.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						37.800.000,00							46.690.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	12 Laporan	37.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	46.690.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
157.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**28.480.000,00**							**29.290.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan	-		-	90 Persen	28.480.000,00						-	29.290.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						28.480.000,00					Masyarakat di 3 Desa Wilayah Kecamatan Siberut Tengah		29.290.000,00	
		-						28.480.000,00					Masyarakat di 3 Desa Wilayah Kecamatan Siberut Tengah		29.290.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	7.740.000,00						-	8.740.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	20.740.000,00						-	20.550.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.740.000,00							20.550.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	20.740.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	20.550.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.740.000,00							8.740.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	7.740.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	8.740.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
158.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**97.660.000,00**							**86.828.000,00**	
			Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan.	-		-	90 Persen	97.660.000,00						-	86.828.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						97.660.000,00					Internal dan elemen masyarakat		86.828.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						97.660.000,00					Internal dan elemen masyarakat		86.828.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	97.660.000,00						-	86.828.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						97.660.000,00							86.828.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	100 Orang	97.660.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	86.828.000,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
159.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**89.700.000,00**							**93.321.517,00**	
			Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa	-		-	100 Persen	89.700.000,00						-	93.321.517,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						89.700.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat		93.321.517,00	
		-						89.700.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat		93.321.517,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	89.700.000,00						-	93.321.517,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						89.700.000,00							93.321.517,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	6 Dokumen	89.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	93.321.517,00	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
		KECAMATAN SIBERUT BARAT						**2.102.339.226,00**							**2.342.355.416,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.102.339.226,00**							**2.342.355.416,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.102.339.226,00**							**2.342.355.416,00**	
160.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.891.135.726,00**							**2.021.850.066,00**	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	1.891.135.726,00						-	2.021.850.066,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						38.650.000,00					Pemerintahan Desa Se Kecamatan Siberut Barat		44.000.000,00	
		-						38.650.000,00					Pemerintahan Desa Se Kecamatan Siberut Barat		44.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	38.650.000,00						-	44.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						38.650.000,00							44.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	38.650.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	44.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.595.485.176,00					Pegawai ASN Kecamatan Siberut Barat		1.581.878.566,00	
		-						1.595.485.176,00					Pegawai ASN Kecamatan Siberut Barat		1.581.878.566,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	252.270.000,00						-	339.794.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.343.215.176,00						-	1.242.084.166,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.343.215.176,00							1.242.084.166,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	18 Orang/bulan	1.343.215.176,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Barat || Desa Simalegi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.242.084.166,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						252.270.000,00							339.794.400,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	252.270.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Barat || Desa Simalegi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	339.794.400,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						158.393.500,00					Pegawai ASN Kecamatan Siberut Barat		238.671.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						158.393.500,00					Pegawai ASN Kecamatan Siberut Barat		238.671.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	106.086.000,00						-	147.067.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	43.458.000,00						-	52.083.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.009.500,00						-	33.092.300,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.840.000,00						-	6.428.400,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.840.000,00							6.428.400,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.840.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Barat || Desa Simalegi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	6.428.400,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						43.458.000,00							52.083.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	43.458.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Barat || Desa Simalegi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	52.083.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.009.500,00							33.092.300,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	3.009.500,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Barat || Desa Simalegi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	33.092.300,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						106.086.000,00							147.067.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	106.086.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	147.067.800,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						55.607.050,00					Pegawai ASN Kecamatan Siberut Barat		110.000.000,00	
		-						55.607.050,00					Pegawai ASN Kecamatan Siberut Barat		110.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	55.607.050,00						-	110.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						55.607.050,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	55.607.050,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Barat || Desa Simalegi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	110.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.000.000,00					Pegawai ASN Kecamatan Siberut Barat		33.000.000,00	
		-						30.000.000,00					Pegawai ASN Kecamatan Siberut Barat		33.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	33.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Barat || Desa Simalegi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	33.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.000.000,00					Pegawai ASN Kecamatan Siberut Barat		14.300.000,00	
		-						13.000.000,00					Pegawai ASN Kecamatan Siberut Barat		14.300.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	13.000.000,00						-	14.300.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						13.000.000,00							14.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	6 Unit	13.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	14.300.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
161.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**37.212.500,00**							**49.940.000,00**	
			Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-		-	100 Persen	37.212.500,00						-	49.940.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						37.212.500,00					Masyarakat		49.940.000,00	
		-						37.212.500,00					Masyarakat		49.940.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	37.212.500,00						-	49.940.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						37.212.500,00							49.940.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	12 Laporan	37.212.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	49.940.000,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
162.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**45.372.000,00**							**63.364.950,00**	
			Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan	-		-	100 Persen	45.372.000,00						-	63.364.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						45.372.000,00					Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		63.364.950,00	
		-						45.372.000,00					Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		63.364.950,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	22.135.000,00						-	24.356.750,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	23.237.000,00						-	39.008.200,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						23.237.000,00							39.008.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	12 Lembaga Kemasyarakatan	23.237.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	39.008.200,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						22.135.000,00							24.356.750,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	22.135.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	24.356.750,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
163.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**78.944.000,00**							**107.542.600,00**	
			Persentase Peningkatan Nilai- Nilai Luhur Kebangsaan	-		-	100 Persen	78.944.000,00						-	107.542.600,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						78.944.000,00					Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		107.542.600,00	
		-						78.944.000,00					Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		107.542.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	24.230.000,00						-	26.654.100,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	54.714.000,00						-	80.888.500,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					54.714.000,00							80.888.500,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	100 Orang	54.714.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Barat || Desa Simalegi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	80.888.500,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						24.230.000,00							26.654.100,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	24.230.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	26.654.100,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
164.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**49.675.000,00**							**99.657.800,00**	
			Persentase Laporan Keuangan Desa yang di selesaikan Tepat Waktu	-		-	100 Persen	49.675.000,00						-	99.657.800,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						49.675.000,00					Pemerintahan Desa Se Kecamatan Siberut Barat		99.657.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						49.675.000,00					Pemerintahan Desa Se Kecamatan Siberut Barat		99.657.800,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	49.675.000,00						-	99.657.800,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						49.675.000,00							99.657.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	12 Dokumen	49.675.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	99.657.800,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT
		KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA						**2.023.197.102,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.023.197.102,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.023.197.102,00**							**0,00**	
165.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.725.773.102,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	1.725.773.102,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						59.999.000,00					-		0,00	
		-						59.999.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	59.999.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						59.999.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	59.999.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.443.328.883,00					-		0,00	
		-						1.443.328.883,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	149.994.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.293.334.883,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.293.334.883,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	25 Orang/bulan	1.293.334.883,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						149.994.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	149.994.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						174.445.219,00					-		0,00	
		-						174.445.219,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	99.991.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	55.476.919,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	11.999.800,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.977.500,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.977.500,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.977.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Pemerataan Jaringan Listrik Untuk Semua		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						55.476.919,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	55.476.919,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.999.800,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	11.999.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						99.991.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	99.991.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18.000.000,00					-		0,00	
		-						18.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	18.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.000.000,00					-		0,00	
		-						30.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	8 Unit	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
166.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**77.435.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	77.435.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						34.955.000,00					-		0,00	
		-						34.955.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	34.955.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						34.955.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	3 Dokumen	34.955.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						42.480.000,00					-		0,00	
		-						42.480.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	42.480.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						42.480.000,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	3 Laporan	42.480.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
167.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**34.991.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	34.991.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						34.991.000,00					-		0,00	
		-						34.991.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	34.991.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						34.991.000,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	25 Lembaga Kemasyarakatan	34.991.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
168.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**125.000.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	125.000.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						125.000.000,00					-		0,00	
		-						125.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	150 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
169.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**59.998.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	59.998.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						59.998.000,00					-		0,00	
		-						59.998.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	59.998.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						59.998.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	3 Dokumen	59.998.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
		KECAMATAN SIBERUT SELATAN						**2.375.521.421,00**							**2.651.100.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.375.521.421,00**							**2.651.100.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.375.521.421,00**							**2.651.100.000,00**	
170.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.247.657.421,00**							**2.446.100.000,00**	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 Persen	2.220.657.421,00						-	2.415.100.000,00	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 Persen	27.000.000,00						-	31.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		31.000.000,00	
		-						27.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		31.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	27.000.000,00						-	31.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.000.000,00							31.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	27.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	31.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.028.540.321,00					ASN Kecamatan Siberut Selatan		2.239.000.000,00	
		-						2.028.540.321,00					ASN Kecamatan Siberut Selatan		2.239.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	44.800.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.983.740.321,00						-	2.194.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.983.740.321,00							2.194.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	28 Orang/bulan	1.983.740.321,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Selatan || Desa Muara Siberut || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	2.194.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.800.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	44.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	45.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.840.100,00					ASN Kecamatan Siberut Selatan		103.100.000,00	
		-						105.840.100,00					ASN Kecamatan Siberut Selatan		103.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	50.226.000,00						-	51.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	48.815.100,00						-	41.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.620.000,00						-	5.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.179.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.179.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.179.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Selatan || Desa Muara Siberut || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	6.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						48.815.100,00							41.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	48.815.100,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Selatan || Desa Muara Siberut || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	41.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.620.000,00							5.100.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	5 Paket	3.620.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Selatan || Desa Muara Siberut || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	5.100.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.226.000,00							51.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	50.226.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Selatan || Desa Muara Siberut || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	51.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21.000.000,00					Kecamatan Siberut Selatan		20.000.000,00	
		-						21.000.000,00					Kecamatan Siberut Selatan		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	21.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	21.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Selatan || Desa Maileppet || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	20.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						65.277.000,00					Kecamatan Siberut Selatan		53.000.000,00	
		-						65.277.000,00					Kecamatan Siberut Selatan		53.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	60.407.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.870.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.407.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	60.407.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.870.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	4.870.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Siberut Selatan || Desa Maileppet || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
171.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**10.000.000,00**							**18.000.000,00**	
			Persentase aduan yang ditindaklanjuti	-		-	100 Persen	10.000.000,00						-	18.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		18.000.000,00	
		-						10.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	10.000.000,00						-	18.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						10.000.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	18.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
172.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**37.134.000,00**							**49.000.000,00**	
			Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	-		-	68 Persen	37.134.000,00						-	49.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						37.134.000,00					Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		49.000.000,00	
		-						37.134.000,00					Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		49.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	19.490.000,00						-	24.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	17.644.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						17.644.000,00							25.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	17.644.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						19.490.000,00							24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	19.490.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	24.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
173.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**56.205.000,00**							**113.000.000,00**	
			-	-		-	-	56.205.000,00						-	113.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						56.205.000,00					Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		113.000.000,00	
		-						56.205.000,00					Masyarakat Kecamatan Siberut Selatan		113.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	9.090.000,00						-	13.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	47.115.000,00						-	100.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						47.115.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	30 Orang	47.115.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						9.090.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	9.090.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	13.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
174.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**24.525.000,00**							**25.000.000,00**	
			-	-		-	-	24.525.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						24.525.000,00					5 Desa di Kecamatan Siberut Selatan		25.000.000,00	
		-						24.525.000,00					5 Desa di Kecamatan Siberut Selatan		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	24.525.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						24.525.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	24.525.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN SIPORA UTARA						**2.424.294.387,00**							**2.660.730.038,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.400.294.387,00**							**2.624.730.038,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.400.294.387,00**							**2.624.730.038,00**	
175.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.291.139.787,00**							**2.489.730.038,00**	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 persen	36.651.000,00						-	45.000.000,00	
			-	-		-	-	2.254.488.787,00						-	2.434.730.038,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.651.000,00					Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan		45.000.000,00	
		-						36.651.000,00					Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan		45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	36.651.000,00						-	45.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.651.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	6 Laporan	36.651.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	45.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.014.134.987,00					Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah		2.008.380.038,00	
		-						2.014.134.987,00					Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah		2.008.380.038,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	41.040.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.973.094.987,00						-	1.943.380.038,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.973.094.987,00							1.943.380.038,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	35 Orang/bulan	1.973.094.987,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.943.380.038,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						41.040.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	41.040.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	65.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						85.032.000,00					Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah		154.500.000,00	
		-						85.032.000,00					Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah		154.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	40.881.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	34.750.800,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	7.000.200,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	900.000,00						-	1.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						900.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.500.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						34.750.800,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	34.750.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	60.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.200,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	7.000.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.881.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	40.881.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	80.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						95.964.800,00					Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah		120.000.000,00	
		-						95.964.800,00					Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah		120.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	95.964.800,00						-	120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						95.964.800,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	12 Unit	95.964.800,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	120.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.357.000,00					Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah		161.850.000,00	
		-						59.357.000,00					Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah		161.850.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	6.200.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	6.850.000,00						-	6.850.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	38.997.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	7.310.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.997.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	38.997.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	45.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						6.850.000,00							6.850.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	6.850.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	6.850.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.310.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	11 Unit	7.310.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.200.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	6.200.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
176.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**18.954.600,00**							**20.000.000,00**	
			Persentase Aduan yang ditindaklanjuti	-		-	100 persen	18.954.600,00						-	20.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						18.954.600,00					Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan		20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						18.954.600,00					Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	18.954.600,00						-	20.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						18.954.600,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	6 Laporan	18.954.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
177.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**45.050.000,00**							**55.000.000,00**	
			Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Sipora Utara	-		-	100 persen	45.050.000,00						-	55.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						45.050.000,00					Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan		55.000.000,00	
		-						45.050.000,00					Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	20.050.000,00						-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.050.000,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	12 Lembaga Kemasyarakatan	20.050.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	6 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
178.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**21.195.000,00**							**35.000.000,00**	
			Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan	-		-	100 persen	21.195.000,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						21.195.000,00					Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan		35.000.000,00	
		-						21.195.000,00					Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	21.195.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						21.195.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	21.195.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	35.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
179.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**23.955.000,00**							**25.000.000,00**	
			Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	-		-	100 persen	23.955.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						23.955.000,00					Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan		25.000.000,00	
		-						23.955.000,00					Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	23.955.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						23.955.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	18 Dokumen	23.955.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	25.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
	X							**24.000.000,00**							**36.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**24.000.000,00**							**36.000.000,00**	
180.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**24.000.000,00**							**36.000.000,00**	
			-	-		-	-	24.000.000,00						-	36.000.000,00	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.000.000,00					Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah		36.000.000,00	
		-						24.000.000,00					Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah		36.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	24.000.000,00						-	36.000.000,00	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.000.000,00							36.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	36.000.000,00	KECAMATAN SIPORA UTARA
		KECAMATAN SIPORA SELATAN						**2.749.281.512,00**							**2.749.197.169,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.749.281.512,00**							**2.749.197.169,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.749.281.512,00**							**2.749.197.169,00**	
181.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.682.219.562,00**							**2.681.297.169,00**	
			Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	5 Paket	80.363.000,00						-	53.000.000,00	
			pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	-		-	12 Kali	19.950.000,00						-	20.000.000,00	
			Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	27 Orang/bulan	2.529.056.562,00						-	2.525.697.169,00	
			Pelaksanaan Pemeliharaan barang Milik Milik Daerah	-		-	4 Unit	25.850.000,00						-	15.000.000,00	
			Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	-		-	3 Rekening	27.000.000,00						-	27.600.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.950.000,00					Monotoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		20.000.000,00	
		-						19.950.000,00					Monotoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	19.950.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.950.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 kali Laporan	19.950.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	20.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.529.056.562,00					Penyediaan gaji Dan Tunjangan ASN		2.525.697.169,00	
		-						2.529.056.562,00					Penyediaan gaji Dan Tunjangan ASN		2.525.697.169,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	33.360.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.495.696.562,00						-	2.495.697.169,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.495.696.562,00							2.495.697.169,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	42 Orang/bulan	2.495.696.562,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	2.495.697.169,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						33.360.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	2 Dokumen	33.360.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	30.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						80.363.000,00					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Pangunan kantor		93.000.000,00	
		-						80.363.000,00					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Pangunan kantor		93.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	41.172.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	26.191.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	3.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pemerataan Jaringan Listrik Untuk Semua		-	3.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	10.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26.191.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	26.191.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	40.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						41.172.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	41.172.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	40.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27.000.000,00					Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik		27.600.000,00	
		-						27.000.000,00					Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik		27.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	27.000.000,00						-	27.600.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.000.000,00							27.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Rekening Laporan	27.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pemerataan Jaringan Listrik Untuk Semua		-	27.600.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25.850.000,00					Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan dan bangunan lainnya		15.000.000,00	
		-						25.850.000,00					Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan dan bangunan lainnya		15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	25.850.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.850.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	25.850.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
182.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**15.000.000,00**							**15.000.000,00**	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terkait Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat	-		-	200 orang	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			perekaman E-KTP	-		-	200 0ran	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						15.000.000,00					Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan		15.000.000,00	
		-						15.000.000,00					Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
183.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**37.061.950,00**							**37.900.000,00**	
			pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa	-		-	200 0rang	12.084.950,00						-	12.000.000,00	
			Pembentukan dan penumbuhan karakter Keluarga melalui Peningkatan kesadaran akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat ,Berbangsa dan Bernegara	-		-	50 Keluarga	9.977.000,00						-	10.000.000,00	
			Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	-		-	1 Laporan	15.000.000,00						-	15.900.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.000.000,00					Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Perempuan dan Keluarga		15.900.000,00	
		-						15.000.000,00					Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Perempuan dan Keluarga		15.900.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.900.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						15.000.000,00							15.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	15.900.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						12.084.950,00					Peningkatan Partisipasi Perencanaan dalam Forum Musyawarah Desa		12.000.000,00	
		-						12.084.950,00					Peningkatan Partisipasi Perencanaan dalam Forum Musyawarah Desa		12.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	12.084.950,00						-	12.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12.084.950,00							12.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	20 Lembaga Kemasyarakatan	12.084.950,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pembangunan Infrastruktur Jalan		-	12.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						9.977.000,00					Pembinaan dan Penumbuhan Karakter Keluarga		10.000.000,00	
		-						9.977.000,00					Pembinaan dan Penumbuhan Karakter Keluarga		10.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-		-	-	9.977.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						9.977.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-		-	50 Keluarga	9.977.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	10.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
184.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**0,00**							**0,00**	
			Peningkatan Kesadraan Berdasarkat Pancasila	-		-	400 orang	0,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						0,00					Peringatan HU-RI tahun 1945		0,00	
		-						0,00					Peringatan HU-RI tahun 1945		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	400 Orang	0,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
185.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**15.000.000,00**							**15.000.000,00**	
			Peningkatan Pengawasan dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	1 Laporan	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						15.000.000,00					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa		15.000.000,00	
		-						15.000.000,00					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Selatan || Desa Sioban || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan Pendapatan Per Kapita		-	15.000.000,00	KECAMATAN SIPORA SELATAN
		KECAMATAN PAGAI UTARA						**2.149.056.766,00**							**2.031.476.748,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.149.056.766,00**							**2.031.476.748,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.149.056.766,00**							**2.031.476.748,00**	
186.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.963.128.366,00**							**1.943.476.748,00**	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan perencaaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	-		-	100 %	1.791.298.166,00						-	1.943.476.748,00	
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	-		-	100 %	12.000.000,00						-	0,00	
			-	-		-	-	159.830.200,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.791.298.166,00					Seluruh ASN		1.943.476.748,00	
		-						1.791.298.166,00					Seluruh ASN		1.943.476.748,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	102.100.000,00						-	142.560.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.689.198.166,00						-	1.800.916.748,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.689.198.166,00							1.800.916.748,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	30 Orang/bulan	1.689.198.166,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.800.916.748,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						102.100.000,00							142.560.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	102.100.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	142.560.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						159.830.200,00					Masyarakat dan ASN		0,00	
		-						159.830.200,00					Masyarakat dan ASN		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	56.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	55.540.600,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	1.589.600,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	45.750.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.750.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket Paket	45.750.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						55.540.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	55.540.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.589.600,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	5 Paket	1.589.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						56.950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	56.950.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.000.000,00					ASN dan Kantor Kecamatan		0,00	
		-						12.000.000,00					ASN dan Kantor Kecamatan		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Kecamatan		0,00	
		-						0,00					Kecamatan		0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
187.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**59.778.400,00**							**0,00**	
			Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	-		-	85 %	39.928.400,00						-	0,00	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah rencana Pembangunan di Wilayah Kecamatan	-		-	96 %	39.928.400,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Partispasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Diwilayah Kecamatan	-		-	100 %	19.850.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						19.850.000,00					Masyarakat dan Desa dan PKK Serta ASN		0,00	
		-						19.850.000,00					Masyarakat dan Desa dan PKK Serta ASN		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	19.850.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						19.850.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	3 Laporan Laporan	19.850.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						39.928.400,00					Masyarakat ,Desa ,ASN		0,00	
		-						39.928.400,00					Masyarakat ,Desa ,ASN		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	39.928.400,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						39.928.400,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	12 Lembaga Kemasyarakatan	39.928.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
188.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**70.950.000,00**							**88.000.000,00**	
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		-	100 %	70.950.000,00						-	88.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						70.950.000,00					Masyarakat Desa dan ASN		88.000.000,00	
		-						70.950.000,00					Masyarakat Desa dan ASN		88.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	30.025.000,00						-	33.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	40.925.000,00						-	55.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						40.925.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	200 Orang	40.925.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						30.025.000,00							33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	30.025.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	33.000.000,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
189.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**55.200.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	55.200.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						55.200.000,00					Desa Dalam Wilayah Kerja Kecamatan Pagai Utara		0,00	
		-						55.200.000,00					Desa Dalam Wilayah Kerja Kecamatan Pagai Utara		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	32.400.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-		-	-	22.800.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						32.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	3 Dokumen	32.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						22.800.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-		-	3 Laporan	22.800.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN PAGAI UTARA
		KECAMATAN PAGAI SELATAN						**2.305.061.411,00**							**2.557.762.766,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.305.061.411,00**							**2.557.762.766,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.305.061.411,00**							**2.557.762.766,00**	
190.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.120.731.411,00**							**2.353.156.466,00**	
			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-		-	100 Persen	2.120.731.411,00						-	2.342.023.166,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						60.161.554,00					Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		66.779.325,00	
		-						60.161.554,00					Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		66.779.325,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	60.161.554,00						-	66.779.325,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						60.161.554,00							66.779.325,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	60.161.554,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	66.779.325,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.809.819.857,00					Pegawai Kecamatan Pagai Selatan		2.008.900.041,00	
		-						1.809.819.857,00					Pegawai Kecamatan Pagai Selatan		2.008.900.041,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	120.000.000,00						-	133.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.689.819.857,00						-	1.875.700.041,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.689.819.857,00							1.875.700.041,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	31 Orang/bulan	1.689.819.857,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.875.700.041,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						120.000.000,00							133.200.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	72 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	133.200.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						154.750.000,00					Pegawai Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		171.772.000,00	
		-						154.750.000,00					Pegawai Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		171.772.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	100.000.000,00						-	111.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	29.000.000,00						-	32.190.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.220.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.110.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	22.750.000,00						-	25.252.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00							1.110.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.110.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						22.750.000,00							25.252.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	22.750.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	25.252.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						29.000.000,00							32.190.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	29.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	32.190.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							2.220.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	2.220.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							111.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	111.000.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						70.000.000,00					Pegawai Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		77.700.000,00	
		-						70.000.000,00					Pegawai Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		77.700.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	70.000.000,00						-	77.700.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						70.000.000,00							77.700.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	2 Unit	70.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	77.700.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.800.000,00					Pegawai Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		11.133.300,00	
		-						10.800.000,00					Pegawai Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		11.133.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	10.800.000,00						-	11.133.300,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.800.000,00							11.133.300,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	10.800.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	11.133.300,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.200.000,00					Pegawai Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		16.871.800,00	
		-						15.200.000,00					Pegawai Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		16.871.800,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	5.170.000,00						-	5.738.500,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.030.000,00						-	11.133.300,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.170.000,00							5.738.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	5.170.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	5.738.500,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.030.000,00							11.133.300,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	8 Unit	10.030.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	11.133.300,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
191.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**35.000.000,00**							**38.850.000,00**	
			Persentase aduan yang ditindaklanjuti	-		-	100 Persen	35.000.000,00						-	38.850.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						35.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		38.850.000,00	
		-						35.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		38.850.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	35.000.000,00						-	38.850.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						35.000.000,00							38.850.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	4 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	38.850.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
192.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**16.830.000,00**							**18.681.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	-		-	68 Persen	16.830.000,00						-	18.681.300,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						16.830.000,00					Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		18.681.300,00	
		-						16.830.000,00					Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		18.681.300,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.550.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	11.830.000,00						-	13.131.300,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						11.830.000,00							13.131.300,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.830.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	13.131.300,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.000.000,00							5.550.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	5.550.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
193.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**57.500.000,00**							**63.825.000,00**	
			Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	-		-	100 Persen	57.500.000,00						-	63.825.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						57.500.000,00					Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		63.825.000,00	
		-						57.500.000,00					Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan		63.825.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	7.500.000,00						-	8.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	50.000.000,00						-	55.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						50.000.000,00							55.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.500.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						7.500.000,00							8.325.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	4 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Pagai Selatan || Desa Bulasat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	8.325.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
194.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**75.000.000,00**							**83.250.000,00**	
			Persentase penetapan APBDesa tepat waktu	-		-	82 Persen	75.000.000,00						-	83.250.000,00	
			Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	-		-	83 undefined	75.000.000,00						-	83.250.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						75.000.000,00					4 Desa di Kecamatan Pagai Selatan		83.250.000,00	
		-						75.000.000,00					4 Desa di Kecamatan Pagai Selatan		83.250.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	75.000.000,00						-	83.250.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						75.000.000,00							83.250.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	12 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	83.250.000,00	KECAMATAN PAGAI SELATAN
		KECAMATAN SIKAKAP						**2.960.824.606,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.895.924.606,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.895.924.606,00**							**0,00**	
195.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.759.905.006,00**							**0,00**	
			persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas Perangkat	-		-	100 persen	6.150.000,00						-	0,00	
			persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas Perangkat Daerah	-		-	100 persen	2.753.755.006,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.150.000,00					Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	
		-						6.150.000,00					Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	6.150.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.150.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	3 Laporan Laporan	6.150.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.656.884.506,00					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0,00	
		-						2.656.884.506,00					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	92.520.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.564.364.506,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.564.364.506,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	27 orang/bulan Orang/bulan	2.564.364.506,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						92.520.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	15 dokumen Dokumen	92.520.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						67.840.500,00					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0,00	
		-						67.840.500,00					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	65.898.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.942.500,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.942.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	7 paket Paket	1.942.500,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						65.898.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	65.898.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.000.000,00					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		0,00	
		-						24.000.000,00					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	24.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan Laporan	24.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.030.000,00					Kecamatan Sikakap		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						5.030.000,00					Kecamatan Sikakap		0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.030.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.030.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	7 unit Unit	5.030.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
196.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**5.240.000,00**							**0,00**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Sikakap	-		-	B Indek	5.240.000,00						-	0,00	
			Persentase peningkatan pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	5.240.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.240.000,00					Masyarakat		0,00	
		-						5.240.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	5.240.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						5.240.000,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	12 Laporan Laporan	5.240.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
197.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**24.387.600,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	-		-	7 Lembaga	24.387.600,00						-	0,00	
			persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di wilayah kecamatan	-		-	95 persen	24.387.600,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						24.387.600,00					Masyarakat Desa		0,00	
		-						24.387.600,00					Masyarakat Desa		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.844.000,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	20.543.600,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.543.600,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	7 lembaga kemasyarak Lembaga Ke masyarakatan	20.543.600,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.844.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	8 Laporan Laporan	3.844.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
198.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**90.612.000,00**							**0,00**	
			Jumlah layanan Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah	-		-	1 layanan	90.612.000,00						-	0,00	
			Persentase Konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan	-		-	100 persen	90.612.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						90.612.000,00					Masyarakat		0,00	
		-						90.612.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	10.330.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	80.282.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						80.282.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	150 orang Orang	80.282.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						10.330.000,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	10 Dokumen Dokumen	10.330.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
199.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**15.780.000,00**							**0,00**	
			Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu	-		-	92 persen	15.780.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						15.780.000,00					Pemerintahan Desa		0,00	
		-						15.780.000,00					Pemerintahan Desa		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	15.780.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						15.780.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	9 Dokumen Dokumen	15.780.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
	X							**64.900.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**64.900.000,00**							**0,00**	
200.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**64.900.000,00**							**0,00**	
			persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas Perangkat Daerah	-		-	100 persen	64.900.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						64.900.000,00					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0,00	
		-						64.900.000,00					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	64.900.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						64.900.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	8 paket Paket	64.900.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	KECAMATAN SIKAKAP
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**3.533.307.892,00**							**4.729.322.191,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**3.533.307.892,00**							**4.729.322.191,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**3.533.307.892,00**							**4.729.322.191,00**	
201.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.794.272.191,00**							**1.929.322.191,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	1.794.272.191,00						-	1.929.322.191,00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.445.427.191,00					-		1.545.427.191,00	
		-						1.445.427.191,00					-		1.545.427.191,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	54.000.000,00						-	54.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.391.427.191,00						-	1.491.427.191,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.391.427.191,00							1.491.427.191,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	22 Orang/bulan	1.391.427.191,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.491.427.191,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						54.000.000,00							54.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	2 Dokumen	54.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	54.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						192.845.000,00					-		210.895.000,00	
		-						192.845.000,00					-		210.895.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	8.595.000,00						-	8.595.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	75.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	95.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.500.000,00						-	13.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.750.000,00						-	3.800.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.750.000,00							3.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.750.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	3.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						95.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	95.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.500.000,00							13.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	10.500.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	13.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						8.595.000,00							8.595.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	8.595.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	8.595.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						75.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00					-		110.000.000,00	
		-						100.000.000,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.000.000,00					-		24.000.000,00	
		-						24.000.000,00					-		24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	24.000.000,00						-	24.000.000,00	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.000.000,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	24.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32.000.000,00					-		39.000.000,00	
		-						32.000.000,00					-		39.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	17.000.000,00						-	19.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	15.000.000,00						-	20.000.000,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						17.000.000,00							19.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	17.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	19.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	15.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
202.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**575.000.000,00**							**1.450.000.000,00**	
			-	-		-	-	575.000.000,00						-	1.450.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						575.000.000,00					-		1.450.000.000,00	
		-						575.000.000,00					-		1.450.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	100.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	-		-	-	475.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	50 Orang	100.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						475.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	-		-	70 Orang	475.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	1.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
203.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**650.000.000,00**							**645.000.000,00**	
			-	-		-	-	650.000.000,00						-	645.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						650.000.000,00					-		645.000.000,00	
		-						650.000.000,00					-		645.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-		-	-	650.000.000,00						-	645.000.000,00	
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						650.000.000,00							645.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-		-	9 Dokumen	650.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	645.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
204.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**35.000.000,00**							**50.000.000,00**	
			-	-		-	-	35.000.000,00						-	50.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						35.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						35.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	35.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						35.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	5 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
205.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**90.000.000,00**							**150.000.000,00**	
			-	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						90.000.000,00					-		150.000.000,00	
		-						90.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-		-	3 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	25 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	25 Orang	30.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
206.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**389.035.701,00**							**505.000.000,00**	
			-	-		-	-	389.035.701,00						-	505.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						389.035.701,00					-		505.000.000,00	
		-						389.035.701,00					-		505.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	230.000.000,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	-		-	-	78.223.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	35.495.191,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	45.317.510,00						-	65.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						78.223.000,00							85.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	-		-	2 Dokumen	78.223.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						45.317.510,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	25 Orang	45.317.510,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						35.495.191,00						55.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	25 Laporan	35.495.191,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						230.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	230.000.000,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Kepulauan Mentawai || Kecamatan Sipora Utara || Desa Tuapejat || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pembangunan Sumber Daya Manusia		-	300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**843.919.345.481,00**							**2.496.716.996.534,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RKPD tahun 2027 mengacu pada capaian dan target Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, hal ini dimaksudkan agar penetapan target kinerja RKPD tahun 2027 konsisten dengan target pada RPJMD. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan ukuran kinerja strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam periode perencanaan tahunan. Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilaksanakan sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang menerapkan prinsip perencanaan berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja Utama RKPD disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, dan isu strategis pembangunan daerah. Penetapan indikator dimaksudkan untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen perencanaan tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan terukur.

IKU RKPD berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengukur capaian hasil pembangunan daerah (outcome) yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program prioritas pembangunan oleh perangkat daerah. Selain itu, indikator kinerja utama menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Perumusan indikator kinerja utama dilakukan secara objektif, terukur, dan akuntabel dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya, kondisi eksisting pembangunan daerah, target indikator makro pembangunan, serta kemampuan pendanaan daerah. Indikator yang ditetapkan diarahkan untuk menggambarkan peningkatan kualitas pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama yang jelas, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD diharapkan mampu menjadi instrumen pengendalian pembangunan yang efektif dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKU dan target capaian pada Tahun 2027 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,81
2	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) pada asesmen tingkat Nasional-Sekolah Dasar		
	- Literasi Membaca	Persentase	52,80
	- Numerasi	Persentase	15,88
3	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional-SMP		
	- Literasi Membaca	Persentase	47,90
	- Numerasi	Persentase	40,92
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,24
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,93
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persentase	5,24
7	Indeks Perkembangan Anak Usia Dini	Indeks	85,2
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,59
9	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	208
10	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persentase	29,40
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	Persentase	68,00
12	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	Persentase	84,00
13	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase	98,50
14	Tingkat Kemiskinan	Persentase	11,89
15	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	11.476
16	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase	45,51
17	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persentase	17,21
18	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi	Unit Layanan	-
19	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/ atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	237
20	Pendapatan Per Kapita ADHB	Rp.Juta/kapita	93,56
21	Pendapatan Per Kapita ADHK	Rp.Juta/kapita	42,2
22	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	6,63
23	Rasio Gini	Rasio	0,263
24	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,5
25	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,43
26	Pengeluaran Per Kapita	Rp.Juta/orang	7.526
27	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	Persentase	46,92
28	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Rp.Juta/kapita	202,59
29	Indeks Akses keuangan Daerah (IKAD)	Persentase	2,14

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
30	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	Nilai	0,386
31	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Nilai	1,19
32	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	Persentase	20,51
33	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persentase	85,13
34	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persentase	8,30
35	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persentase PDRB	31,55
36	Ekspor Barang dan Jasa	Persentase PDRB	50,08
37	Total Kredit/PDRB	Persentase	10,16
38	Proporsi PDRB Jasa Keuangan	Persentase	0,1185
39	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	Persentase	8,45
40	Aset dana Pensiun/PDRB	Persentase	9,88
41	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Rupiah/kapita	1.566.476
42	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM	Persentase	0.33
43	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	1,18
44	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	80,62-82,47
45	Rasio Kewirausahaan	Nilai	2,26
46	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persentase	22,38
47	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persentase	85,25
48	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	58
49	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	57,08
50	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapita	342
51	Persentase kawasan /wilayah pertumbuhan yang terhubung	Persentase	65
52	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,014
53	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan	Persentase	11,00
54	Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan kumuh	1
55	Persentase Desa Mandiri	Persentase	6,25
56	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Persentase	50,25
57	RT dengan Akses Sanitasi Layak	Persentase	78,02
58	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase	5,11
59	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persentase	24,79
60	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	66
61	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan	Persentase	75
62	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,62
63	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,847
64	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	66,8
65	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	67,03
66	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,44
67	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,64

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
68	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	95,3
69	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persentase	24,79
70	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase	47,11
71	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	188,1-186,83
72	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persentase	1,01
73	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jiwa	9.601
74	Persentase retribusi terhadap PAD	Persentase	6,75
75	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	Persentase	1,011
76	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	71,90
77	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks	62,14
78	Tingkat Partisipasi Pemilih	Persentase	82
79	Tingkat Kriminalitas	Persentase	5,04
80	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,58
81	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	1,7
82	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	2,80
83	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Nilai	71,63
84	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	83,02
85	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	74,43
86	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	46,53
87	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,50
88	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio	16,62
89	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	14,53
90	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Nilai	0,19
91	ROA BUMD	Persentase	0,410

Indikator Kinerja Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam periode perencanaan tahunan. Penyusunan Indikator Kinerja Daerah dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja Daerah disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, dan isu strategis pembangunan daerah. Penetapan indikator dimaksudkan untuk menjamin konsistensi, keterpaduan, dan kesinambungan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan akuntabel.

Indikator Kinerja Daerah berfungsi sebagai alat ukur capaian pembangunan daerah yang menggambarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah secara agregatif. Selain itu, indikator ini menjadi

instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD, serta acuan dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah.

Perumusan Indikator Kinerja Daerah dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan prinsip spesifik, terukur, relevan, dapat dicapai, dan berbatas waktu, serta berorientasi pada hasil (outcome) pembangunan. Penetapan target indikator mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, kondisi eksisting pembangunan daerah, proyeksi indikator makro pembangunan, serta kemampuan pendanaan daerah. Indikator yang ditetapkan diarahkan untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah pada aspek pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Daerah yang terukur dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKD dan target capaian pada Tahun 2027 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase	5,11
2	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persentase	24,79
3	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase	47,11
4	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persentase	8,30
5	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,014
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan	Persentase	11,00
7	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	188,1-186,83
8	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	62,71
9	Jumlah Penduduk	Jiwa	106.566
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	3,69
11	Rasio Penduduk	Rasio	108,18
12	Kepadatan Penduduk	Per Km2	17,66
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,50
2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	208
3	Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persentase	29,40
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	Persentase	68,00

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
	(*treatment coverage*)		
5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	Persentase	84,00
6	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase	98,50
7	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional-SD		52,80
	a-I Literasi M	Persentase	52,80
	a-II Numerasi	Persentase	15,88
8	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional-SMP		
	a-I Literasi M	Persentase	47,90
	a-II Numerasi	Persentase	40,92
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,24
10	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persentase	5,24
11	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persentase	85,25
12	Tingkat Kemiskinan	Persentase	11,89
13	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase	45,51
14	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persentase	17,21
15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,847
16	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	67,032
17	Indeks Akses keuangan Daerah (IKAD)	Persentase	2,14
18	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten	Unit Layanan	-
19	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/ atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	237
III	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	74,43
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,58
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,50
4	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	1,7
5	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,43
IV	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persentase	1,19
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persentase	1,01
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	9.601
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Persentase	1,011
5	Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian	Persentase	0,33
6	Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase	3,19
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persentase	2,26
8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persentase	0,212
9	Return On Aset (ROA) BUMD	Persentase	0,41
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persentase	22,38

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	80,62-82,47
12	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	46,53
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persentase PDRB	31,55
14	Ekspor Barang dan Jasa	Persentase PDRB	50,08
15	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	Persentase	1,99
16	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase	50,25
17	Persentase Desa Mandiri	Persentase	6,25
18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persentase	0,19
19	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	Persentase	8,45
20	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	Rupiah	1.566.476
21	Total Kredit/PDRB	Persentase	10,16
22	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Persentase	0,33

Indikator Kinerja Kunci dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan ukuran kinerja utama yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam periode satu tahun perencanaan. Indikator ini disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang menerapkan prinsip perencanaan berbasis kinerja guna memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan indikator kinerja kunci RKPD mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, serta isu strategis dan kebutuhan pembangunan daerah. Indikator yang ditetapkan diarahkan untuk mengukur capaian hasil pembangunan (outcome) yang mencerminkan manfaat nyata bagi masyarakat serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Indikator kinerja kunci berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan daerah yang memberikan arah dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selain itu, indikator ini menjadi dasar dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD guna menilai tingkat keberhasilan pencapaian target pembangunan serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Penetapan indikator dilakukan secara terukur dan objektif dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, kondisi *eksisting* pembangunan daerah, proyeksi indikator makro pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah. Target kinerja tahunan yang ditetapkan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Melalui indikator kinerja kunci yang jelas, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang efektif dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah secara terpadu, terukur, dan berorientasi pada hasil guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKK dan target capaian pada Tahun 2027 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Persentase Anak Usia 6-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Persentase	100
2	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	72,90
3	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	98,90
4	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	37,60
5	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,80
6	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	56,30
7	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,50
8	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,30
9	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Nilai	59,10
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	70,90
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	66,80
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	70,50
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	70
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	61,90
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	60,30
16	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	83
17	lndeks Pemerataan Guru	Nilai	0,35
18	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	38
19	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persentase	21,40
20	Persentase Usulan lzin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persentase	65
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	35
2	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	80
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	84
4	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	35
5	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang kebudayaan	Persentase	12,84
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Persentase	200 / 100rb KH
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persentase	22
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persentase	70
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persentase	70

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persentase	75
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase	85
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase	100
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persentase	75
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	100
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persentase	70
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persentase	70
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persentase	60
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persentase	95
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar	Persentase	80
15	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	90
16	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	93
17	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	90
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persentase	50
2	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persentase	48
3	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase	60
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	Persentase	55,66
5	Cakupan layanan air bersih	Persentase	66
6	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/ kota	Persentase	4,29
7	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	Persentase	15
8	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	72
9	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase	3,20
10	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	30
11	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	35
12	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	70
13	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persentase	55
14	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	20
15	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	15
16	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persentase	30,00
17	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase	5,00
18	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	Persentase	45
19	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah	Persentase	60

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
	Daerah		
20	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase	15
21	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	Persentase	2
22	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	Persentase	2
23	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	Persentase	2
24	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	Persentase	2
25	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Persentase	40
26	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	Persentase	11,63
27	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Persentase	40,63
28	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase	2
29	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	Persentase	2
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persentase	48
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persentase	15
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persentase	10
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persentase	2
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)	Persentase	32
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase	60
2	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	60
3	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	70
4	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persentase	75
5	Persentase Cakupan Perlindungan Masvarakat	Persentase	70
6	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	80
7	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	2
8	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Persentase	25
9	Cakupan Penyebaran Informasi dan edukasi Rawan kebakaran	Persentase	82
10	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	92
11	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	82
12	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase	55

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	20
14	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persentase	100
15	Persentase penanganan pra bencana	Persentase	50
16	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase	60
17	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100
18	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Persentase	82
2	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persentase	82
3	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persentase	82
4	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi dalam Pelayanan Sosial	Persentase	32
5	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persentase	22
6	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Persentase	4
7	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	25
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persentase	22
9	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persentase	22
10	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persentase	22
11	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persentase	22
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persentase	10
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persentase	12
14	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persentase	82
15	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	Persentase	62
16	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	Persentase	45
17	Persentase Keluarga Miskin dan Rentang Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persentase	22
18	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Persentase	10
19	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/ kota	Persentase	82
20	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	Persentase	88
21	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persentase	88
22	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/ kota yang disediakan sesuai standar	Persentase	30
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	4,6
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persentase	62,8

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,8
4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,847
5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	88
6	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	88
7	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	65
8	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	88
9	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	71
10	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	30
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	71
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase	7
3	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	62
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persentase	55
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	70
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	70
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	70
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	Persentase	70
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B	Persentase	6
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase	70
7	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	1
8	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	Persentase	1
9	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	20
10	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	20
11	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	62
12	Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian	Persentase	70
13	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang di Tindaklanjuti	Persentase	70
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	68
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94,2
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Indeks	80,64
5	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persentase	70,00
6	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	15
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	45
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase	14

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	54
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100
5	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100
7	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100
8	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Persentase	100
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1	Persentase fasilitasi penataan desa	Persentase	23
2	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	32
3	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	20
4	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	19
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Permasyarakatan Desa (LPD)	Persentase	20
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	15
7	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase	6,25
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	Angka Kelahiran Total (Total *Fertility Rate*/TFR)	Nilai	2,38
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Nilai	11
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	61,75
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persentase	12,30
5	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	0,04
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Persentase	62,62
	URUSAN PERHUBUNGAN		
1	Konektivitas Darat	Nilai	0,22
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	Persentase	26,00
3	Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	34,88
4	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Persentase	30
5	Konektivitas Laut	Nilai	0,16
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persentase	70,00
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,60
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/ atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	77,78
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase	77,78
5	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persentase	13,80
6	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,00

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
	URUSAN PERSANDIAN		
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan persandian dan pengamanan informasi	Persentase	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sertifikat elektronik untuk layanan pemerintah	Persentase	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan tata kelola keamanan informasi	Persentase	100
4	Tingkat Kematangan keamanan informasi (Indeks KAMI)	Level	B
5	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah Daerah yang telah dilakukan assessment keamanan	Persentase	100
6	Persentase insiden keamanan informasi yang ditangani sesuai standar	Persentase	100
7	Persentase pengiriman informasi strategis melalui komunikasi sandi	Persentase	100
8	Persentase ASN pengelola persandian yang memiliki kompetensi atau sertifikasi	Persentase	80
	URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
1	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	58
2	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persentase	58
3	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	55
4	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	2,2
5	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	12,00
6	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	2,00
7	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	2,91
8	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	20
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	75,00
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	10,00
3	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Juta Rupiah	6.301.299
4	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	85
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	Persentase	1,19
3	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/ Kota	Persentase	2,60
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	Persentase	2,25
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	Persentase	0,03
6	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Persentase	50
7	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	Persentase	50
8	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	Persentase	45
9	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Persentase	50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase perencanaan tenaga kerja yang disusun	Persentase	50
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase	69
3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Persentase	0,020
4	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Persentase	0,020
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase	0,56
6	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp Juta/Tenaga Kerja/Tahun	66,82
7	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Jumlah	38.000
8	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persentase	50
9	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	44
10	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persentase	50
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Juta Rupiah	92.000
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	Persentase	4,35
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	75
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	80
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	72
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	65
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	45
2	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	CC
3	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	65
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	16.000
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	400
3	Angka Konsumsi Ikan	Nilai	61,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Rasio Wirausaha Pemuda	Rasio	2,40
2	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ training dan memperoleh sertifikat	Persentase	45
3	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persentase	0,05
4	Persentase Atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Persentase	0,05
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	15,00
2	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persentase	4,35
3	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Persentase	3,65

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	20,00
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	20,00
6	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	8,33
	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase	45
2	Persentase MOU yang ditindaklanjuti	Persentase	100
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	75
4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	80
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	5,3
6	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Persentase	23,04
7	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Persentase	11,14
	SEKRETARIAT DPRD		
1	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	80
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100
	PERENCANAAN		
1	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100
2	Persentase keselarasan RPJMD dan Renstra PD	Persentase	100
3	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persentase	100
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	100
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	100
3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	100
4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase	100
5	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	Persentase	100
6	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Persentase	100
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase	100
8	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase	100
9	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase	100
	KEUANGAN		
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	30,00
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	40,00

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persentase	81,50
4	Persentase penurunan SILPA	Persentase	8,50
5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	8,00
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	14,53
8	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	100
9	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	100
	KEPEGAWAIAN		
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	100
2	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	59,74
3	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	10
4	Persentase Pengembangan Karier ASN sesuai dengan kompetensinya	Persentase	80
5	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	100
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase	75
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	Persentase	55
3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persentase	50
4	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	55
	INSPEKTORAT DAERAH		
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	78,00
2	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Opini	WTP
3	Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,83
4	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,3
5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,3
	KEWILAYAHAN		
1	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	Persentase	100
2	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	Persentase	68
3	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	Persentase	100
4	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	Persentase	82
5	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	Persentase	82
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	65
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Persentase	100
5	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase	100

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 dengan tema Penguatan Sumber Daya Ekonomi untuk Peningkatan Prodiktivitas Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sebagai dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran tahun 2027, disusun dengan mempedomani Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah. Adapun pencapaian program prioritas daerah dapat dicapai melalui :

1. Pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan;
2. Pemerataan jaringan Listrik;
3. Penyediaan jaringan internet untuk layanan dasar dan public;
4. Pembangunan air bersih untuk semua wilayah
5. Pembangunan Sumber daya manusia;
6. Pendapatan per kapita.

RKPD Tahun 2027 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.
Penyusunan RKPD Tahun 2027 memiliki tujuan spesifik :

1. Sebagai pedoman penganggaran dan menjadi acuan utama dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
2. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sampai rancangan APBD;
3. acuan perangkat daerah menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan;
4. Sinkronisasi pembangunan untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan sasaran pembangunan di provinsi dan nasional;
5. Efisiensi sumber daya dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas alokasi berbagai sumber daya (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam membangun daerah;
6. Evaluasi kinerja menjadi sebuah instrumen untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pembangunan.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural yang inkusif dan berkelanjutan menjadi fokus pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Tahun 2045. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menitikberatkan pembangunan pada sektor komoditas unggulan dengan pembangunan sumber daya ekonomi, peningkatan produktivitas masyarakat terutama pada hilirisasi komoditas pertanian. Kolaborasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga pemerintah lainnya bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia usaha perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2027 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, merata dan menjadi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dalam hal terjadi perkembangan keadaan, perubahan asumsi prioritas dan perubahan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, keadaan darurat dan keadaan luar biasa yang memberi pengaruh terhadap ketidaksesuaian target, sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RKPD Tahun 2027 dalam pencapaian indikator maka akan

dilakukan evaluasi dan penyesuaian kembali pada dokumen perubahan RKPD tentunya dengan memperhatikan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan RKPD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan RKPD sebagai berikut :

a. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar melaksanakan program-program RKPD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD;
b. RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. RKPD akan menjadi instrumen dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan masyarakat diharapkan dapat mengawal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD.

Keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 memerlukan kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan para pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan semangat kerja keras harus dimiliki oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Semoga dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 yang masuk pada tahap ”Penguatan Sumber Daya Ekonomi untuk Peningkatan Produktivitas menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dapat mewujudkan cita-cita Kabupaten Kepulauan Mentawai di tahun 2029 yaitu :

Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Kabupaten yang memiliki “Penguatan fondasi Tranformasi untuk pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing”

RKPD selain fokus dalam mencapai visi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029, juga memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan berbagai isu penting ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

7.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian sangat penting dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana dan selaras dengan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa pengendalian yang efektif, RKPD berisiko tidak mencapai target, mengalami penyimpangan, atau bahkan mengalami kegagalan. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pengendalian menjadi hal yang penting dilakukan dalam implementasi RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 :

1. Memastikan Seluruh Program Dilaksanakan
   Seluruh program yang tertuang dalam RKPD yang disertai dengan target kinerja dan kebutuhan pendanaan pembangunan telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk dalam RAPBD tahunan.

2. Memastikan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
   Pengendalian berfungsi sebagai mekanisme untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi hambatan atau masalah yang muncul di tengah jalan, sehingga dapat mengambil tindakan korektif secepat mungkin.
3. Optimalisasi penggunaan sumber daya
   Memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan publik dalam pelaksanaan RKPD.
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi
   Proses pengendalian yang transparan dan terukur akan membuat pemerintah daerah lebih akuntabel terhadap masyarakat. Laporan hasil pengendalian dapat diakses publik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan janji-janji politik yang tertuang dalam RKPD.
5. Menyesuaikan dengan Perubahan Lingkungan
   Lingkungan eksternal (sosial, ekonomi, politik) dapat berubah sewaktu-waktu. Pengendalian yang fleksibel memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi dan program kerja agar tetap relevan dan efektif. Misalnya, jika terjadi krisis ekonomi, pengendalian dapat membantu mengidentifikasi program yang perlu diprioritaskan atau direstrukturisasi.
6. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan
   Hasil dari proses pengendalian (evaluasi, audit, dan laporan) memberikan umpan balik yang berharga. Umpan balik ini dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Ini menciptakan siklus pembelajaran dan perbaikan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah proses penting untuk mengukur keberhasilan, mengidentifikasi kendala, dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi dilakukan dengan tujuan:

1. Mengukur Pencapaian Sasaran, yaitu menilai sejauh mana target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai.
2. Menilai Efektivitas dan Efisiensi, yaitu dapat meninjau efektivitas program dan penggunaan anggaran.
3. Mengidentifikasi Masalah, yaitu menemukan faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program.
4. Meningkatkan Akuntabilitas, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
5. Menyediakan Masukan, yaitu dalam rangka memberikan rekomendasi untuk penyusunan perencanaan periode berikutnya.

Evaluasi membantu memastikan konsistensi antara RPJMD dengan rencana tahunan (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (APBD). Hal ini penting untuk mencegah adanya penyimpangan kebijakan dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan selaras dengan tujuan jangka menengah. Pelaksanaan Evaluasi RKPD merupakan langkah krusial yang berfungsi sebagai cerminan keberhasilan dan kegagalan sebuah rencana pembangunan. Proses ini tidak hanya mengukur pencapaian, tetapi juga memberikan landasan untuk perbaikan di masa depan.

Dalam perjalanannya, RKPD selalu menghadapi ketidakpastian dan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Untuk itu, manajemen risiko berperan sebagai "penjaga" yang memastikan rencana tersebut berjalan sesuai jalur. Untuk memastikan perencanaan yang tertuang

dalam RKPD perlu dilakukan analisis manajemen risiko dengan mengidentifikasi potensi risiko baik pada lingkup internal maupun eksternal. Faktor risiko yang teridentifikasi sejak dini, pemerintah daerah dapat menyusun rencana yang lebih realistis dan memiliki strategi mitigasi yang kuat.

Penerapan manajemen risiko pada RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027 diharapkan akan membantu dalam meningkatkan kemungkinan pencapaian target, mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Melalui pengelolaan risiko secara proaktif, pemerintah daerah dapat mencegah atau mengurangi kendala yang berpotensi menghambat program dan kegiatan, seperti keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, atau kegagalan program yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Hal ini secara langsung meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA



Kabupaten Kepulauan Mentawai